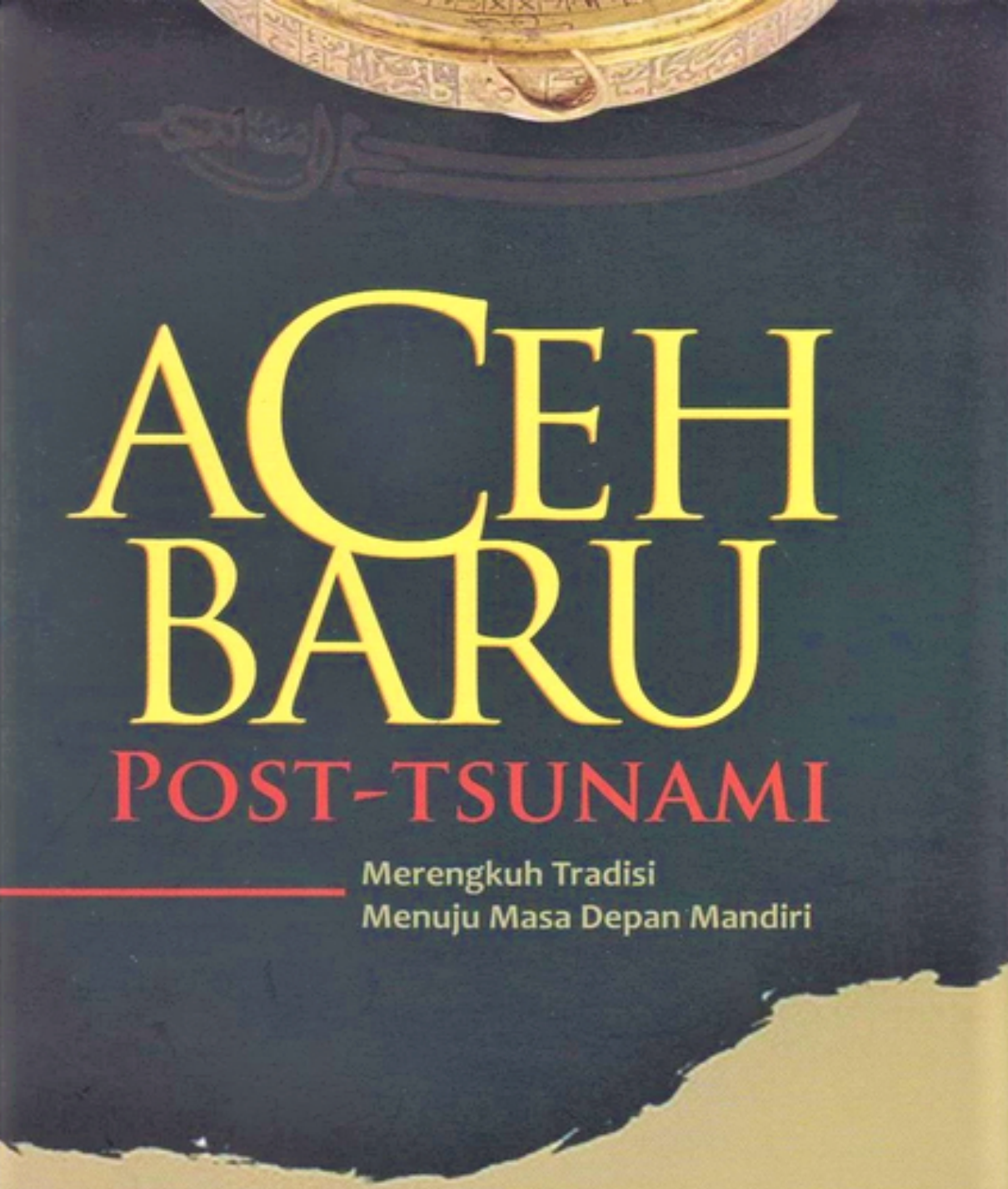

ACEH BARU
POST-TSUNAMI

Merengkuh Tradisi
Menuju Masa Depan Mandiri

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Ph.D

Kata Pengantar:
Prof. Dr. H. M. Hasbi Amiruddin, M.A.

KAUKABA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYAIKH NURUDDIN AR-RANIRY

BANDA ACEH

Aceh Baru Post-Tsunami

MerengkuhTradisi Menuju Masa Depan Mandiri

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta
Pasal 2:

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 72:

Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, Ph.D.

Aceh Baru Post-Tsunami

MerengkuhTradisi Menuju Masa Depan Mandiri

Kata Pengantar:
Prof. Dr. H. M. Hasbi Amiruddin, M.A.

KAUKABA
Bentang Aksara Galang Wacana

ACEH BARU POST TSUNAMI
Merengkuh Tradisi Menuju Masa Depan Mandiri
© Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad
Editor: Fitri Zulfidar
Layout: Kang Baha
Desain sampul: Stel Kendho
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
All Rights Reserved
16 cm x 24 cm; xviii + 318 hlm
Cetakan Pertama: Maret 2014

Penerbit Kaukaba
(Anggota IKAPI)
Krapyak Kulon RT 05 No 181 Panggungharjo Sewon Bantul
Yogyakarta 55188
Telp./Fax. (0274) 387435
Email: redaksi@kaukaba.com
Laman: http://www.kaukaba.com
Bekerjasama dengan:
LSAMA
Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh
Jl. T. Nya' Arief N0. 101
Lemnyong Banda Aceh

ISBN: 978-602-1508-12-1

Buku ini didedikasikan kepada:

Ayahanda Haji Bustamam-Ahmad
yang wafat pada 3 Februari 2012

Pengantar Penulis

SEMUA tulisan dalam buku ini dihasilkan di Aceh mulai tahun 2006 hingga 2012. Namun ketika dijadikan buku, saya telah melakukan beberapa proses revisi secara substansial. Dalam kesempatan ini, saya berterima kasih kepada para peserta seminar atau workshop yang telah memberikan inspirasi bagi saya untuk melakukan berbagai perbaikan setelah mendengar masukan dari mereka. Demikian pula, beberapa isu penting dalam buku ini terkadang menjadi bahan diskusi ketika mengajar di UNSYIAH, IAIN, dan ARTI. Kepada mahasiswa/i di IAIN dan UNSYIAH saya mengucapkan terima kasih. Semoga buku ini bisa memberikan sedikit masukan kepada mereka di bangku kuliah di Aceh. Hampir semua artikel ini pernah diterbitkan di *Serambi Indonesia* dan *Aceh Institute*, kendati ada beberapa yang tidak dimuat. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Nani, Yarmen Dinamika, Arief Ramdan, dan Ampuh Devayan dari *Serambi Indonesia*. Di *Aceh Institute* saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Halim, Alkaf, Kamal Ahmad, Dr. Saiful Mahdi, Chairul Fahmi, dan Fajran Zain. Beberapa tampilan *website* AI pernah dihiasi oleh artikel saya. Tidak bisa dilupakan kepada semua pembaca tulisan, baik di *Serambi Indonesia* maupun *Aceh Institute* yang terkadang memancing ulang untuk secara terus menerus memperbaiki gagasan. Beberapa tulisan dalam buku ini, pernah menjadi bahan diskusi dalam dunia maya. Kepada mereka saya ucapkan banyak terima kasih yang tidak terhingga.

Ketika naskah ini dijadikan buku, ada beberapa orang yang harus saya ucapkan terima kasih. Di Austalia, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Joel S. Kahn dan Wendy Mee keduanya dari La Trobe University, yang telah membuka mata saya mengenai kajian sosiologi dan antropologi. Banyak pikiran dalam buku ini yang terinspirasi dari diskusi dengan Pak Joel dan Ibu Wendy. Selain mereka, saya tidak bisa melupakan Dr. Patrick Jory sebagai teman yang beberapa kali mengunjungi saya di Aceh. Patrick adalah atasan saya ketika mengajar di Walailak University, Thailand. Adapun di Jakarta, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Prof. Azyumardi Azra yang telah banyak memberikan masukan demi masukan agar saya ”tetap berada” di Aceh. Buku ini adalah hikmah dari beberapa perjumpaan saya dengan Pak Azra.

Di Aceh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa sejawat yang setia menjadi penyimak *haba bangai*. Mereka adalah Syahrizal, Rakhmat, Muttaqien, Sulaiman Tripa, Munawar, Reza Vahlevi, Alkaf, dan Bustami. Adapun mereka yang menjadi kawan diskusi ketika beberapa pikiran dalam buku ini mengalami kebuntuan adalah Prof. Yusny Sabi, Prof. M. Hasbi Amiruddin, Dr. Nazaruddin A.W., Prof. Dato' Zulkifli, Prof. Ruzman Md. Noor, Dr. John Kurien, Prof. Bahrein T. Sugihen, Dr. Saleh Sjafei, Dr. A. Rani Usman, Dr. Muhammad A.R., Dr. Munawar A. Djalil, Hasanuddin Yusuf Adan, dan M. Adli Abdullah al-Bawareth. Khusus kepada Prof. Ruzman dan Prof. Dato' Zulkifliy, saya mengucapkan banyak terima kasih, karena revisi buku ini dimungkinkan ketika saya menjadi *Research Fellow* pada Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Dalam kesempatan ini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada LSAMA (Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh) yang telah berinisiatif untuk menerbitkan buku ini. Terima kasih yang amat mendalam saya ucapkan kepada Prof. M. Hasbi Amiruddin yang telah bersedia memberikan pengantar buku ini.

Akhirnya, karena buku ini terbit di Aceh, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada keluarga besar saya baik yang ada di Krueng Mane maupun di Tanoh Abe (Seulimum). Kepada orang tua saya (H. Bustamam dan Hj. Jasmani) yang selalu mengharapkan saya agar tetap berada di Aceh dan memperhatikan keluarga di kampung halaman. Saat buku ini diselesaikan, Ayahanda Haji Bustamam-Ahmad telah pulang ke hadhirat ilahi pada 3 Februari 2012. Sembah dan sujud saya haturkan kepada mereka. Demikian pula, kakek saya (alm. H. Budiman Muli) di Sawang (Aceh Utara) yang ternyata lebih alim dari guru yang pernah saya jumpai selama ini, saya haturkan terima kasih yang mendalam, karena telah mengarahkan agar hidup saya lebih baik. Rasa terima kasih yang mendalam juga tidak dapat saya abaikan dari istri tercinta Fitri Zulfidar. Pengertian dan kasih sayang darinya merupakan spirit mengapa buku ini ditulis. Tidak lupa kepada lima permata hati saya (Qatrin, Qaishar, Queen, Qyara, Qinarania) yang selalu menemani dan memahami kerja Abah mereka. Terakhir, rasa syukur kepada Allah yang selalu menemani saya dalam menghasilkan ide-ide buku ini dan terus memberikan spirit untuk berkhidmat kepada ilmu-Nya.

Jantho – Petaling Jaya – Ule Kareng, 30 Mei 2013

KBA

Aceh Daerah Modal Dan Model: Melihat Kembali Tradisi Orang Aceh

Prof. Dr. H. M. Hasbi Amiruddin, M.A.

ACEH yang dalam dekade terakhir ini seperti tergambar dalam rekaman Kamaruzzaman Bustaman-Ahmad dalam buku ini pernah menjadi daerah yang selalu menjadi rujukan dan model bangsa-bangsa lain. Sehingga nama daerah ini dapat ditemukan dalam berbagai literatur baik sebagai catatan para penulis sejarah, maupun para peneliti masalah-masalah sosial dan agama. Pada abad-abad Saudi Arabia belum menjadi negara yang sangat kaya seperti sekarang, di mana rakyatnya masih banyak yang miskin, termasuk tidak dapat memenuhi kebutuhan biaya pemeliharaan Ka'bah, Syarif Makkah pernah datang ke Aceh untuk mencari bantuan. Saat itu, Kerajaan Aceh Darussalam dipimpin oleh oleh Sulthanah Naqiatuddin, salah seorang raja perempuan di antara 4 raja perempuan yang pernah memimpin kerajaan Islam Aceh Darussalam. Aceh bersimpati dengan situasi saudaranya di Haramain dan kemudian mengirim bantuan dengan menghadiahkan sejumlah emas dan juga sadaqah dari sejumlah masyarakat Aceh untuk biaya pemerliharaan Ka'bah dan Masjid Madinah, bahkan untuk sejumlah penduduk miskin dalam wilayah Haramain.[1]

Pada abad ke 17 ulama-ulama Aceh mampu mewarnai aliran pemikiran agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Kemunculan sejumlah ulama yang bereputasi internasional seperti Syaikh Hamzah Fansuri, Syaikh Syamsuddin As-Sumatrani, Syaikh Nuruddin Ar-Raniry dan Syaikh Abdur Rauf As-Singkili. Di samping itu, terdapat beberapa ulama lain telah menjadi penyebar ilmu agama Islam di Asia Tenggara, baik melalui aktivitas pengajiannya maupun melalui kitab-kitab yang ditulisnya yang kemudian tersebar di wilayah Asia Tenggara. Misalnya, hingga tahun 1940-an kitab *Mir'ah At-Tullab* masih dijadikan sebagai kitab fiqih di

[1]Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara abad XVII & XVIII,* (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 243

Mindano. Demikian juga kitab *Masailal Muhtadi*, masih dipergunakan di berbagai wilayah Indonesia, Malaysia dan Thailan Selatan sampai sekarang.

Ketika daerah-daerah di Indonesia tidak dapat mempertahankan daerahnya dari nafsu penjajahan orang Eropa, Aceh tidak pernah menyerah kepada siapapun dari para penjajah tersebut, termasuk Belanda yang sempat menjajah Indonesia selama tiga setengah abad.[2] Aceh malah pernah membantu Malaka, yang sekarang telah bergabung menjadi negara bagian Malaysia, untuk mengusir Portugis yang telah menjajah orang-orang Melayu di Malaka.[3] Ketika Belanda benar-benar bercokol dalam wilayah Indonesia yang mengeksploitasi penduduk dan hasil hasil alam sesukanya, masyarakat Aceh terus berjuang, sampai berganti generasi selama hampir 70 tahun, laki-laki dan perempuan sampai anak-anak[4] sehingga Belanda angkat kaki dari bumi persada ini dengan sejumlah kerugian.

Bila kita telusuri sejarah politik di Aceh, di saat saat Eropa masih suka menjadikan perempuan sebagai budak nafsu, Aceh telah menunjukkan paham kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Begitulah tradisi penghargaan masyarakat Aceh terhadap kaum perempuan yang diperkuat oleh ajaran agama Islam. Ini dapat dilihat mulai dari sejak awal kerajaan Islam dibangun di Aceh. Sekitar tahun 800 Masehi, Aceh sudah memiliki kerajaan Islam seperti yang dibangun di Peureulak, Aceh Timur. Sejak itu Aceh telah memberi kesempatan kepada salah seorang perempuan menjadi salah satu di antara pimpinan dari kerajaan negeri Beunua, Tamiang, yang merupakan salah satu dari negara bagian kerajaan Perlak, yaitu Putri Lindung Bulan.[5] Ketika kerajaan Islam Pasai mulai kuat dan bahkan terkenal ke manca negara, di kerajaan ini juga pernah dipercayakan salah seorang di antara raja adalah dari perempuan. Bahkan di kala kerajaan Aceh telah disatukan menjadi

---

[2] Diskusi lebih jauh baca Anas Mahmud, *Kedaulatan Aceh yang Tidak Pernah Diserahkan Kepada Belanda adalah Bahagian Dari Kedaulatan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988).

[3] A. Hasjmy, "Sultan Iskandar Muda" dalam Rusdi Sufi, *Biografi Pejuang-Pejuang Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2002), h. 10-13.

[4] Dalam masalah ini Hikayat Prang Sabi berbeda dengan penjelasan dalam kitab fikih lainnya. Biasanya kitab fiqih membuat syarat orang yang wajib berperang selain laki-laki juga orang dewasa. Tetapi Hikayat Prang Sabi mengajak semua masyarakat ikut berperang, *"Syik Putik Tuha Muda, Inong Agam"* (Tua Muda perempuan dan laki-laki). Lihat M. Hasbi Amiruddin, "Jihad dalam Furu' al-Masaail dan Hikayat Prang Sabi," dalam Sudarnoto Abdul Hakim, *Islam Dilihat dari Berbagai Dimensi*, (Jakarta: LPMI, 1995).

[5] M. Yunus Jamil, *Tawarich Radja-Radja Keradjaan Aceh,* (Banda Aceh: Ajdan Iskandar Muda, 1968), hal. 18-21

Kerajaan Aceh Darussalam, kerajaan Islam ini pernah mempercayakan kepada 4 orang sulthanah untuk memimpinnya secara berturut-turut.[6]

Kaum perempuan Aceh di abad ke-16 malah sudah pernah diberi kesempatan menduduki jabatan panglima angkatan laut seperti yang pernah diemban oleh Laksamana Keumala Hayati.[7] Periode-periode selanjutnya setelah kerajan Islam Aceh dipimpim oleh empat orang sulthanah, kendatipun ada fatwa dari Makkah yang menyatakan bahwa perempuan tidak dibenarkan menjadi pemimpin dalam kerajaan Islam[8] tetapi secara alamiah sejumlah perempuan di Aceh telah muncul sebagai pemimpin baik sebagai pimpinan lembaga pendidikan seperti Tgk Fakinah maupun sebagai panglima perang untuk mempertahankan tanah air dari penjajah seperti Cut Nyak Dhien, Cut Meutia, Pocut Baren, Cut Gambang, dan Pocut Meurah Intan.[9] Kehadiran mereka tentu tidak muncul begitu saja dan bukan karena jatah 30% yang diajukan oleh negara atau kelompok tertentu tetapi memang dari kualitas kaum perempuan sendiri ketika itu baik dari sisi ilmunya maupun kesediaannya mengabdi pada agama, negara, dan bangsanya.

Berbeda dengan apa yang terjadi dalam sejarah begitu banyak kaum perempuan di Aceh yang muncul menjadi tokoh nasional dan bahkan internasional, semenjak Indonesia merdeka dan Aceh bergabung bersama Indonesia belum ada kaum perempuan yang dapat dicatat sebagai tokoh nasional. Jika ditelusuri apa penyebabnya yang paling mudah ditemukan adalah karena panjangnya masa konflik yang melanda Aceh, baik konflik dengan penjajah Belanda maupun konflik sosial di Aceh sendiri. Konflik di mana pun terjadi selalu menyebabkan sesuatu bangsa menderita, baik kemiskinan, pelanggaran Hak Asasi Manusia sampai kehilangan kesempatan menikmati pendidikan yang berkualitas. Kehilangan

---

[6] Sulthanah yang memerintah Kerajaan Darussalam adalah dimulai dari Sulthanah Taj al-'Alam Safiatuddin Syah, Sulthanah Nurul Alam Naqiatuddin Syah, Sulthanah Zakiatuddin Inayat Syah, Sulthanah Kemalat Syah (Lihat A. Hasjmy, *59 Tahun Aceh Nerdeka di Bawah Pemerintahan Ratu,* (Jakarta: Bulan Bintang, 1977).

[7] Tuanku Abdul Jalil,"Kerajaan Perlak, Poros Aceh-Demak Ternate, "Siapa Laksamana Keumala Hayati" dalam A. Hasjmy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1993), h. 274-277.

[8] Husein Djajadiningrat, *Critisch Overzicht Van De in Meleishe Werken Vervatte Gegevens Over De Geschidenis Van Het Soeltanaat Van Aceh*, terj. Teuku Hamid, *Kesultanan Aceh: Suatu Pembahasan Tentang Sejarah Kesultanan Aceh Berdasarkan Bahan-Bahan yang Terdapat dalam Karya Melayu*, (Banda Aceh: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Proyek Pengembangan Permuseumen Daerah Istimewa Aceh, 1982/1985), h. 60

[9] Penjelasan lebih detil baca, Zentgraaff, *Aceh*, alihbahasa Aboe Bakar, (Jakarta: Beuna, 1983).

kesempatan menikmati pendidikan adalah suatu hal yang paling berpengaruh dalam memunculkan seseorang menjadi tokoh.

Mungkin juga perlu dicatat bahwa setelah Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya, Belanda masih berusaha mengadakan agresi dan menangkap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta, serta menguasai hampir seluruh wilayah Indonesia, kecuali Aceh. Saat itu, Aceh dijadikan sebagai modal untuk berjuang demi kemerdekaan Indonesia. Aceh bukan hanya memiliki wilayah sebagai modal untuk diumumkan keluar negeri bahwa Indonesia belum takluk kepada Belanda, tetapi juga sejumlah fasilitas yang dapat membantu Indonesia dikenal di luar negeri, seperti radio Rimba Raya untuk komunikasi. Jika kita melihat sejarah bahkan di kala daerah-daerah lain masih berjuang melawan untuk mempertahankan hidup, masih banyak yang baru mampu memakai celana pendek, Aceh telah mampu membeli dua buah pesawat terbang untuk Indonesia baik sebagai modal kepentingan pengangkutan dalam negeri maupun kepentingan kebijakan luar negeri demi kemerdekaannya.[10]

Ketika Indonesia ini dihitung sekian banyak orang masih buta huruf di awal kemerdekaan, tetapi sejumlah orang Aceh dapat memberi sumbangan tenaga akademiknya bahkan untuk Perguruan Tinggi di luar Aceh. Seperti Hasbi Ash-Shiddieqy, Abu Bakar Aceh, dan Tgk. Ismail Yacob.[11] Karena di Aceh hampir tidak pernah ada periode buta huruf, karena mereka setidak-tidaknya dapat membaca kitab Jawoe (bahasa Melayu tulisan Arab latin) yang sekarang telah menjadi bahasa Indonesia. Sekitar tahun 1980-an di IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, pernah dalam waktu bersamaan ada 4 orang dekan dijabat oleh intelektual yang berasal dari Aceh.

Sumbangan secara akademik dan sekaligus aplikasinya juga dapat kita temukan pada ide-ide brillian anak bangsa dari Aceh. Misalnya, di kala bangsa Indonesia ingin membangun dalam artian pembangunan seutuhnya, maka tokoh-tokoh pemimpin Aceh menyumbangkan pemikirannya untuk nasional dengan membentuk Badan Perancang Pembangunan Aceh yang awalnya diberi nama *Aceh Development Board*,

---

[10] Gerald Dick, "The Story of Garuda Indonesia", *Garuda*, (Juli,1993), h. 44.

[11] Lihat M. Hasbi Amiruddin, " Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy: Tokoh Pembaharu dan penggagas Fiqih Indonesia" dalam Luttfi Auni, dkk. (Ed.) *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh*, (Banda Aceh Ar-Raniry Press, 2004), h. 198-211 ; Munawiyah, 'Haji Abubakar Aceh: Ulama dan Historian islam" dalam Lutfi Auni dkk. (Ed.) *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2004), h. 238-256; Syukri Musa, Teungku Haji Ismail Yakub: Ulama Penggemar Sejarah, dalam Lutfi Auni dkk. (Ed.) *Ensiklopedi Pemikiran Ulama Aceh*, (Banda Aceh: ar-Raniry Press, 2008), h. 279-290.

yang kemudian diadopsi oleh Indonesia menjadi Badan Perancang Pembangunan Nasional (BAPPENAS).[12] Demikian juga untuk mempersatukan pemikiran di kalangan ulama demi membangun dan mengawal agama umat pada tahun 1965 ulama Aceh membentuk organisasi sebagai wadah pertemuan ulama yang diberi nama Majelis Permusyawaratan Ulama yang kemudian pada tahun 1975 menjadi badan nasional yang diberi nama Majelis Ulama Indonesia.[13]

Bagaimana kuatnya pemikiran-pemikiran akademik yang berhubungan dengan Islam di kalangan ulama dan tokoh-tokoh pergerakan di Aceh dapat kita lihat misalnya, A.Hasjmy telah menggagas konsep Fakultas Dakwah sejak tahun 1963. Konsep ini muncul ketika Menteri Agama mengeluarkan surat kepusan mendirikan Perguruan Tinggi Agama yang diberi nama Institut Agama Islam Negeri (IAIN) hanya terdiri dari Fakultas Syari'ah, Fakultas Tarbiyah, Fakultas Ushuluddin, dan Fakultas Adab. Menurut A. Hasjmy, justru Islam berkembang sejak masa rasul hingga sekarang adalah karena usaha dari juru dakwah yang komitmen dengan Islam. Karena itu sejak itu A. Hasjmy merumuskan peta ilmu dakwah sehingga menjadi ilmu tersendiri yang terpisah dari ilmu lain. Dan, *Alhamdulillah* pada tahun 1968 Menteri Agama menyetujuinya dan meresmikan Fakultas Dakwah pertama di IAIN Ar-Raniry, Darussalam-Banda Aceh. Sekarang Fakultas Dakwah telah terdapat di semua IAIN dan UIN di seluruh Indonesia.[14]

Demikianlah Aceh dalam perjalanannya selalu menjadi modal kemerdekaan dan model untuk pembangunan Indonesia. Pertanyaan sekarang, apakah tradisi ini dapat diwarisi oleh generasi sekarang dan akan datang? Akankah daerah-daerah lain dalam wilayah Indonesia ini akan menjadikan Aceh sebagai model. Jadikanlah uraian Kamaruzzaman dalam buku ini sebagai bahan bercermin diri. Barangkali banyak hal yang dilakukan dengan tidak sengaja tanpa direncanakan sehingga terjebak pada tindakan-tindakan yang tidak dapat lagi dijadikan model.

Di sisi lain saya kira juga sejarah perjalanan Aceh yang membidani adanya Indonesia bahkan memodalinya, perlu penghayatan bagi semua komponen bangsa di mana saja lahirnya, yang dengan kesadaran tersebut diharapkan akan muncul suatu apresiasi sekaligus usaha penyesuaian tindakan dan kebijakan sehingga tidak lagi muncul ungkapan air susu dibalas dengan air tuba. Semoga.

---

[12] Tim Penulis, *Sejarah Bappeda Aceh*, (Banda Aceh: 2008)

[13] Ismuha, "Sejarah Majlis Ulama Provinsi Aceh", *Santunan*, 1978.

[14] Bahagian Publikasi Fakultas Dakwah/Publisistik Darussalam Banda Aceh, *Risalah Fakultas Dakwah dan Publisistik IAIN Djami'ah Ar-Raniry* Darussalam, 1969.

LAKPESDAM

LEMBAGA KAJIAN & PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA

PENGURUS WILAYAH
Nahdlatul Ulama
PROVINSI ACEH

Daftar Isi

PENGANTAR PENULIS vii

ACEH DAERAH MODAL DAN MODEL:
Melihat Kembali Tradisi Orang Aceh
Prof. Dr. H. M. Hasbi Amiruddin, M.A.....ix

DAFTAR ISI XV

PENDAHULUAN
Membangun Aceh dengan *Haba Bangai* dan *Haba Cet Langet* 1

BAB 1
Melihat Aceh Sebelum Tsunami 23

BAB 2
Kunci Membangun dan *Blue Print* Aceh Baru 51

BAB 3
Strategi Kebudayaan dalam Membangun Aceh.....59

BAB 4
Mampukah Orang Aceh Kembali ke Tradisi?.....63

BAB 4
Kenapa Aceh Bukan Melayu? 75

BAB 6
Mencari Sosok Pemimpin Aceh 85

BAB 7
Dekonstruksi Pemahaman tentang Rekonstruksi Aceh 99

BAB 8
Bermula dari Apa Itu Islam Protestan?.....103

BAB 9
Agenda Studi Aceh 109

BAB 10
Ketika Syari'ah Islam menjadi Masalah.....117

BAB 11
Syari'ah Islam dalam Lipatan Baju Wilayatul Hisbah.....127

BAB 12 ..... **131**
Harga Damai di Aceh 131

BAB 13
Dinamika Beragama di Aceh 139

BAB 14
Menanti Calon Pemimpin yang Siap Kalah 147

BAB 15
Apakah PNS di Aceh Susah? 151

BAB 16
Mimpi Jadi PNS 155

BAB 17
Kenapa Kita Miskin? 159

BAB 18
Politik Bantuan di Aceh 163

BAB 19
Membongkar Wacana Pemekaran Propinsi Aceh 167

BAB 20
Andai Saya Gubernur Aceh Pasê Raya 171

BAB 21
Perilaku Kapitalisme di Aceh 175

BAB 22
Menggagas Kiamat Center di Aceh 179

BAB 23
Gender dan Sesat Pikir 183

BAB 24
Trilogi Pemikiran Keacehan 191

BAB 25
Ada Apa dengan Aktivis Aceh? 199

BAB 26
Ketika SIRA menjadi PARTAI SIRA 207

BAB 27
Menakar Harga Kesabaran Rakyat Aceh 211

BAB 28

Proposal Mega Proyek Maksiat di Aceh 215

BAB 29
Renungan Akhir Tahun 2008 219

BAB 30
Memahami Qanun Wali Nanggroe....223

BAB 31
Misteri Gelar Wali Nanggroe....227

BAB 32
Membaca Langgam Politik GAM 231

BAB 33
"Kijang Innova" versi Edward Aspinnal 235

BAB 34
Memahami Isu Terorisme di Aceh 239

BAB 35
Memahami Kasus KPK VS POLRI 251

BAB 36
Senyum Para Pelaku Sejarah 255

BAB 37
Dinamika PKA 2009....259

BAB 38
Manajemen Unjuk Rasa di Aceh 263

BAB 39
Memahami Tun Dr. Mahathir 269

BAB 40
Belajar Berjudi Ala Malaysia....275

BAB 41
Nasionalisme Indonesia dalam Air Mata Manohara....281

BAB 42
Makna 1-Malaysia bagi Aceh....287

POSKRIP: Menatap Masa Depan Aceh 291

DAFTAR PUSTAKA....299
TENTANG PENULIS 317

Pendahuluan
Membangun Aceh dengan *Haba Bangai* dan *Haba Cet Langet*

AWALNYA saya tidak menyangka kalau keterlibatan saya dalam membina pemikiran keacehan sudah memasuki satu dasawarsa. Umur saya baru 30-an dan untuk ukuran anak muda. Paling tidak, umur 30-an belum dapat dikatakan matang dan bisa menjadi contoh bagi orang lain. Keterlibatan dalam membangun wacana pemikiran Aceh memang tidak pernah disengaja, mengingat untuk terlibat dalam satu pembangunan di Indonesia, masuk atau berada di luar sistem adalah tawaran yang cukup perlu dijawab. Misalnya, kalau mau melakukan perubahan, maka masuklah ke dalam sistem, lalu kembangkan ide-ide brilian Anda. Ada pula yang berpendapat bahwa jika ingin membangun satu bangsa, lebih baik berada di luar sistem, karena dengan demikian, kita bebas melakukan pembangunan. Demikianlah nilai tawar keterlibatan dalam satu proses pembangunan, sehingga nilai tawar inilah yang kemudian menjadi memunculkan banyak ide.

Namun, ada posisi di mana kita tidak mau didefinisikan, baik berada di dalam maupun di luar poros kekuasaan. Artinya, kalau sesuatu tidak bisa didefinisikan, maka definisi itu sendiri harus ikut apa kata yang ingin didenifisikan. Sejauh ini, kelompok yang berada di luar dan dalam orbit kekuasaan ibarat dengan *invisible hand* (tangan yang tersembunyi). Kelompok pembangun ini tidak bisa dikatakan berada di dalam maupun di luar. Mereka terlibat dalam pembangunan, dengan cara mereka sendiri, walaupun kadang mereka tidak bisa didekati. Begitulah potret orang yang hidup untuk mempertahankan ide-ide mereka dalam memberikan kontribusi bagi pembangunan. Terkadang demi ide, mereka rela berada di luar orbit kekuasaan atau bahkan "membenci" kekuasaan dan penguasa. Kadang kala, kekuatan ide ini menjadi semacam kekuatan yang mampu memperteguh ideologi seseorang.

Bagaimana mendekati orang yang tidak bisa didefinisikan? Apa yang perlu dilakukan dan alasan apa saja yang perlu dipersiapkan untuk bertemu dengan

manusia jenis ini. Pilihan saya membuat definisi atas diri saya sendiri, lalu setiap definisi yang muncul pada saya misalnya, maka definisi tersebut boleh jadi sangat dekat dengan poros kekuasaan dan kekuatan ekonomi. Definisi yang terbentuk akhirnya merupakan definisi yang terkonstruksi pada cara saya mendefinisikan jati diri di hadapan kekuatan dan kekuasaan. Maksudnya, jika kita ingin mendefinisikan usaha kita dalam waktu yang sangat singkat, maka kita akan membangun sebuah kotak kekuasaan atas diri kita sendiri. Kotak ini kemudian yang mengikat dan menjadikan diri sangat tegar seperti benteng. Sehingga orang yang berada di luar definisi kita, akan datang kepada kita untuk masuk ke dalam pengaruh definisi yang kita perankan.

Di sinilah bertemunya antara kekuatan jati diri, definisi mengenai fungsi diri, dan respon terhadap pengaruh dari luar diri kita. Ketiga hal tersebut kemudian mengubah sikap seseorang ketika bertemu dengan kekuasaan yang sarat dengan kepentingan. Definisi dibangun untuk memahami sebuah istilah, konsep, dan teori. Karena itu, manusia perlu akan definisi untuk supaya memudahkan dipahami oleh orang lain. Dengan begitu, setiap tingkah laku manusia perlu penafsiran, setelah didefinisikan mengenai jati diri seseorang. Pengaruh yang datang dari luar, akan mampu mengubah sikap seseorang, jika seseorang tidak mampu mendefinisikan mengenai jati dirinya. Jati diri seorang kemudian bertemu dengan jati diri orang lain. Di situlah mulai proses saling memahami, mengenai persamaan dan perbedaan, akan definisi yang dimiliki oleh seseorang.

Contoh dari peneguhan jati diri juga bisa dikaitkan dengan bagaimana suatu bangsa mendefinisikan jati dirinya di depan rakyat. Dalam konteks ini, membangun sebuah bangsa ibarat dengan satu permainan catur, di mana semua unsur kekuasaan dan kekuatan pasti ada yang mengatur dan menggerakkan. Sehingga, kalaupun kekuasaan ini berhenti atau curam masa depannya, pasti karena pemain catur sedang kehabisan pikiran. Perjalanan intelektual yang tidak lazim dan sangat menukik dari satu peta ke peta lain di beberapa tempat di dunia ini, ternyata menciptakan diri seperti awan yaitu kadang muncul dan kadang hilang. Dia muncul saat cerah dan menghilang saat hujan. Awan ini adalah ibarat bermain dengan angin dan matahari. Awan sama dengan kehidupan pemain catur. Mereka ada dan dapat dilihat, namun tidak bisa dipegang, karena mereka yang berani menyentuh awan, pasti orang yang melakukan terjun payung atau terjung bebas. Tetapi jangankan mereka dapat menangkap awan, mereka harus jatuh ke bumi, karena begitu kuat daya gravitasi bumi. Jadi, karena manusia tidak bisa menangkap atau bermain dengan awan, maka dibuatlah film seolah-olah kita bisa menangkap awan dan tidur di atas awan. Padahal, film ini adalah imajinasi pembuat film untuk

mengaburkan pemikiran masyarakat. Dalam budaya orang Aceh dikenal dengan istilah *cet langet* (mengecat langit). Artinya, hidup itu penuh dengan impian.

Jadi, upaya untuk membuat satu definisi mengenai kekuatan jati diri Aceh dan fungsi dari identitas Aceh merupakan tugas yang amat berat. Karena jika definisi dan fungsi tidak bergerak atau memiliki pengaruh, maka jati diri Aceh bisa jadi seperti melukis di atas awan. Dengan kata lain, Aceh untuk melukis jati dirinya, perlu jatuh bangun menghadapi gravitasi cobaan, baik dari alam maupun dari manusia itu sendiri. Apa sebenarya yang dimaksud dengan kekuatan Aceh? Apa yang menyebabkan orang Aceh bisa tahan dari semua kekuatan dari luar jati diri orang Aceh? Bagaimana konsep dan pandangan hidup model Aceh? Masih banyak lagi pertanyaan untuk menguraikan definisi mengenai jati diri Aceh. Namun, setiap pertanyaan bukanlah hanya dijawab dalam bentuk tulisan, melainkan merasuk ke dalam jiwa orang Aceh dan berfungsi dalam gerak kehidupan orang Aceh.

Dari apa yang disampaikan di atas, sebenarnya yang ingin dituju adalah mencari falsafah keacehan. Ini agaknya tugas yang cukup berat, karena sejarah panjang Aceh, selalu diwarnai oleh kekuatan luar yang selalu ingin merusak jati diri keacehan. Pengaruh kekuatan luar, telah meleburkan bangunan keacehan yang telah ditoreh oleh para endatu melalui bumbu kehidupan yang mereka temukan, tidak hanya dari cara pandang mereka terhadap alam semesta, tetapi juga pada pengaruh agama Islam, yang telah memberikan mereka kekuatan untuk mampu membuat definisi keacehan sebagai sebuah bangsa yang disegani.

Sejak kecil saya selalu berkeinginan untuk menulis dan tetap dikenal sebagai penulis. Lalu ketika sekolah Madrasah Ibtidaiyyah Negeri di Krueng Mane, saya membaca buku apa saja. Impian saya saat itu adalah bukan ingin dikenal sebagai murid yang pandai dalam kelas atau mendapat ranking satu. Niat saya, hanya ingin menjadi penulis terkenal dan setiap penggal kalimat saya harus dibaca orang. Makanya, sebelum melakukan budaya menulis, sebagai alat pembangunan bangsa, maka kekuatan membaca adalah pra-syarat sebelum menuangkan ide-ide di atas kertas. Salah satu cara yang ditempuh adalah membeli buku tulis yang tebal, lalu meringkas setiap mata pelajaran di dalam buku tersebut. Melalui buku catatan ini, saya ingin belajar menulis bagaimana meringkas dari sesuatu yang panjang menjadi singkat, dari sesuatu yang besar menjadi kecil, dari sesuatu yang sangat umum menjadi sangat khusus.

Namun, saya tetap tidak bisa menulis, walaupun selembar surat. Ketika saya mendapatkan surat dari seseorang dari Jakarta, saya kelimpungan, karena tidak bisa membalas surat dia. Saat itu yang ada adalah rasa malu, tidak hanya karena tulisan tangan saya yang cukup jelek, kemampuan bertutur kata pun dalam bahasa

tulisan sangat miskin sekali. Saya bercita-cita ingin jadi pengarang atau penulis di MIN (Madrasah Ibtidaiyyah Negeri) di Krueng Mane pada tahun 1980-an, ternyata tidak begitu membantu saya menjadi seorang penulis. Saya hanya bisa menyalin dan mengarang sesuai dengan perintah guru dan buku bacaan. Sehingga saya kehilangan daya kreatifitas. Buku bacaan dan tulisan saya pun berserakan di mana-mana. Impian saya adalah menjadi penulis dan minimal saya bisa menulis buku pelajaran.

Namun ketika saya melihat cara guru mengajar saya dengan penuh tekun dan tanggung jawab, saya berpikir bahwa menjadi murid yang baik di sekolah, bukanlah dengan berhasil menulis sebuah karangan, tetapi siapa yang paling pintar (bagus rankingnya) dan paling bodoh serta paling bandel. Di antara tiga kategori tersebut, saya termasuk paling bandel, tetapi sangat disiplin. Saya membuat kotak definisi atas diri sendiri, tanpa mau mengikuti kotak definisi yang ditetapkan oleh guru. Artinya, kalau bandel, tetapi disiplin, pasti tidak akan mendapat hukuman. Kalau saya disiplin dan bandel, pasti semua guru kenal saya dan mereka tidak akan memukuli saya kalau saya salah, sebab saya datang tepat waktu dan tidak pernah absen. Untuk melatih jiwa kedisiplinan ini, maka saya ditugaskan oleh kepala sekolah menjadi tukang pegang kunci sekolah, tanpa bayaran. Dengan begitu, saya mesti datang ke sekolah lebih awal dan bangun lebih awal. Sebab, jika saya terlambat, proses ngajar mengajar menjadi terkendala. Saya bisa hafal seluruh murid dan tahu di mana rumah mereka. Saya juga mampu mengingat murid mana yang terlebih dahulu tiba di sekolah dan guru mana yang paling terlambat masuk sampai di depan pintu gerbang. Jadi, profesi sebagai tukang kunci sekolah ini ternyata memberikan dorongan disiplin yang amat kuat pada diri.

Adapun guru yang jauh tempat tinggalnya dari sekolah, pasti sampai ke sekolah lebih awal dan selalu berada di saf paling depan kalau upacara hari Senin. Demikian pula, murid yang tinggal hingga radius 5 km dari sekolah selalu datang lebih awal. Mereka tidak pernah wangi jika sudah sampai ke dalam kelas. Sebab, mereka jalan atau mengayuh sepeda dari rumah ke sekolah. Etos dan semangat adalah pergi ke sekolah hanya untuk bermain dan belajar. Karenanya, kalau tidak ada guru atau mereka sedang rapat, maka bermain menjadi agenda murid. Untuk mengasah ilmu pengetahuan dan budaya menulis, saya mulai menghabiskan uang untuk membeli TTS (Teka Teki Silang). Sebab, dari TTS ini saya bisa menuangkan apa sesungguhnya pesan dari sebuah teks. Sekolah bagi saya adalah ibarat gudang ilmu, di mana saya datang, namun saya sendiri yang menciptakan sistem pada diri saya. Di sekolah saya tidak pernah mendapatkan ranking pertama. Akan tetapi, saya sangat terpuaskan jika mampu mengisi setiap kotak TTS. Tidak terhitung

berapa buku TTS yang saya isi. Sekarang saya mulai sadar, bahwa TTS merupakan latihan membuat definisi mengenai istilah atau teka teki dari sepenggal kata. Ini melatih cara berpikir mengenai kekuatan otak sebagai gudang informasi dari bacaan seseorang.

Akan tetapi karena ketekunan dan keuletan serta kebandelan, saya diajak untuk mewakili sekolah untuk mengikuti *Cerdas Cermat*. Semangat membaca yang awalnya untuk menjadi penulis, ternyata membawa berkah pada beberapa kali juara *Cerdas Cermat*. Lagi-lagi, walaupun selalu menang dalam *Cerdas Cermat*, saya tidak puas, karena niat menjadi penulis dan tulisannya dibaca oleh orang lain belum tercapai. Akhirnya, buku bacaan yang saya baca berpuluh-puluh buku. Koran yang menjadi alat pembungkus jualan orang tua pun saya lumat. Sebagai pedagang kaki lima, Bapak kami membeli koran dengan harga kiloan. Koran yang paling sering dibeli adalah *Waspada*, *Analisa*, dan *Kompas*. Waktu itu, saya hanya belajar mencari kata tertentu dalam sebuah kolom koran dengan kecepatan tertentu. Niat saya saat itu adalah untuk mengukur sejauh mana ketajaman saya dalam melihat satu kata dalam ribuan kata dalam satu halaman koran. Belakangan, model pembacaan dikenal dengan istilah *skimming*. Sebelum koran dipotong untuk membungkus pakaian yang dijual pada hari pekan, saya selalu meminta izin untuk memotong koran kiloan tersebut. Puluhan kilo koran terkadang saya sensor, mulai dari berita, opini, dan gambar kartun.

Begitu juga, kalau sedang berjualan di pasar, Bapak sibuk melayani pembeli. Sedangkan saya asyik membolak-balik lembaran koran. Alhasil, kalau ada ada *Cepat Tepat*, informasi yang saya lumat dari koran, ternyata sangat membantu. Cara belajar dari koran kiloan ini memang sangat menarik. Sebab, sekarang cara belajar yang paling efektif agaknya tidak lagi melalui koran kiloan, melainkan dengan model mencari kata kunci di *google*. Paling tidak, saat itu, Bapak menjadi ”Bapak Google”, karena dia menyediakan ribuan informasi kepada anaknya. Informasi yang dimasukkan ke dalam kepala, masih sebatas untuk memuaskan rasa ingin tahu. Bukan untuk menganalisa situasi politik terkini. Bukan juga bahan untuk membuat satu tulisan. Bukan juga untuk memberitahukan kepada orang lain mengenai informasi terbaru. Informasi yang saya telan saat itu murni hanya untuk mengisi rasa ingin tahu saja.

Agaknya, niat menjadi penulis ternyata menggiring saya pada satu proses penalaran. Apa yang saya lakukan mungkin juga dilakukan oleh anak-anak lain. Namun, pernahkah orang tua, pendidik, atau pejabat yang paham situasi seperti ini pada anak mereka, terlebih lagi anak-anak yang tinggal jauh dari kawasan perkotaan. Anak-anak adalah dunia yang cukup cerdas jika kita ingin mencari

tokoh-tokoh pembangunan. Mereka tidak pernah bisa mengatakan bahwa mereka ingin ini dan itu. Namun mereka bisa menunjukkannya dengan kreatifitas yang mereka mainkan waktu itu. Inilah gambaran masa kecil saya yang menyiratkan bagaimana keinginan saya untuk menjadi orang yang ingin serba tahu dan mengantarkan saya pada posisi seorang yang suka menulis.

Buku ini merupakan rangkaian pemikiran saya yang tercecer yang ingin disatukan dalam satu percikan untuk membangunan *tanah endatu*. Dalam buku ini, boleh jadi ada nuansa akademis yang dibalut dengan emosi atau pun empati tentang bagaimana masa depan Aceh. Sebelumnya, ketika di Aceh, sejak tahun 1980-an, saya lebih banyak tinggal di hutan, ketimbang di kota. Ketika kanak-kanak, saya dititipkan oleh orang tua pada kakek saya di desa Gunci, Sawang. Saat itu, hanya ada jembatan gantung dalam bahasa Aceh dikenal dengan istilah *Tutu Ayong* (jembatan gantung). Karena banjir bandang pada tahun 1982, maka *Tutu Ayong* pun rusak. Listrik dan televisi adalah barang mahal di kampung Gunci. Kalau nenek membawa ke hari pekan di Sawang, saya menyeberangi sungai dengan cara melintasi arus sungai. Tidak terbayang akan bahaya atau hanyut oleh arus sungai Sawang. Semua dijalani karena memang untuk dinikmati.

Salah satu pelajaran yang amat membekas dalam diri saya adalah pola disiplin dan model memarahi orang tua Aceh. Disiplin yang dimaksud adalah pola hidup yang teratur, walaupun dalam serba kekurangan. Kakek adalah pensiunan guru. Dia sangat sayang pada saya. Ketika banjir bandang melanda Desa Gunci, menurut cerita nenek, saya diseret ke seluruh rumah, karena kalau kakek meninggal, maka saya pun ikut bersamanya ke alam barzakh. Ketika sakit, saya tidak pernah dibawa ke rumah sakit, melainkan hanya dibacakan doa olehnya. Karena tidak ada lampu, setiap pagi, saya melihat dia membaca atau menghafal seperti bunyi nyamuk. Dengan lampu minyak (*panyet culet*), dia duduk menghadap kiblat, sambil membaca kitab. Saya pernah membongkar tong dan beberapa dokumen lama. Alhasil, saya menemukan sekian kitab. Belakangan saya tahu kalau dia melakukan zikir atau wirid setiap malam. Nenek saya selalu memperhatikan waktu. Saya jarang dibiarkan berkawan dengan orang lain.

Sebagai pensiunan, kakek tentu saja hidup sederhana. Setiap awal bulan, dia ke kota Lhokseumawe untuk mengambil gaji pensiunan. Cara dia hidup adalah dengan model *amilan*, di mana kami mengambil setiap keperluan sehari-hari pada warung. Kakek saya akan membayar setiap awal bulan. Ternyata model *amilan* ini pun diterapkan oleh Bapak saya. Walaupun puluhan toko atau warung, kami tetap mengambil barang pada satu toko saya. Setiap mengambil barang atau keperluan, pemilik warung akan mencatat. Karena hidup di tepi hutan, maka untuk makan

ikan, kakek menjala ikan di sungai. Setiap malam dia menghilang, menjelang Shubuh dia balik dengan beberapa ikan segar. Kalau saya melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh kakek dan nenek, maka saya hanya bisa melihat dari cara mereka memandang saya. Artinya, kalau mata mereka membelalak, maka itu berarti saya sedang dimarahi.

Hidup di pedesaan yang sangat terisolasi menyebabkan saya tidak memiliki kawan masa kecil. Karena sehari-hari saya hanya duduk di rumah, sementara kakek dan nenek pergi ke sawah. Topografi desa Gunci memang bukanlah desa yang sudah "merdeka." Rumah yang sangat berjauhan. Terkadang harimau dan babi hutan menyelinap di bawah rumah masyarakat. Namun masa-masa kecil di desa Gunci mengajarkan bagaimana kesahajaan. Paling tidak, saya hanya berjumpa dengan orang tua saya dua kali setahun, yaitu saat lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Walaupun terisolasi, namun rakyat di situ tidak pernah menyerah akan kondisi kehidupan mereka. Kalau hari pekan, mereka membawa hasil tani dan kebun ke Sawang. Rakyat rela menempah berkilo-kilo meter dari hutan untuk membawa hasil kebun mereka. Pengalaman ini masih sangat membekas dalam memori saya, di mana alam sebenarnya banyak memberikan pelajaran kepada manusia.

Namun, tahun 1990-an, saya sudah tersentuh dengan budaya kota, apalagi ketika menempuh S-1 di Yogyakarta. Sebagai orang kampung yang turun kota, saya selalu teringat bagaimana saya bisa bertahan hidup di kota jika saya tidak punya keahlian. Lagi-lagi, saya membanting setir untuk jadi penulis. Waktu itu, menulis adalah cari makan.[1] Mau makan, berarti harus menulis. Namun, dalam buku ini, menulis bukan lagi sebatas cari makan, karena buku-buku ternyata sama sekali belum memberikan makanan kepada penulis. Buku ini melainkan bagaimana memberikan kontribusi terhadap sebuah nasib kaum yang berasal dari kampung. Misalnya, bagaimana saya harus menulis tentang rakyat jelata.

Aceh adalah tanah kelahiran yang sangat saya cintai. Namun, untuk memahami Aceh, terkadang harus menjadi "bukan sebagai orang Aceh." Beberapa tulisan dalam buku ini adakalanya sangat Aceh sekali dan kadang kala sangat anti-Aceh. Untuk mencintai Aceh saya harus mengkritik dengan pedas. Kadang kala, untuk menyayangi Aceh harus menulis dengan tajam. Terkadang setelah tulisan diterbitkan di koran ataupun jurnal, saya sering mengatakan bahwa itu *haba bangai* (tulisan bodoh). Kawan saya sering komplain, kenapa *haba bangai* dimuat. Saya katakan, kalau *haba carong* pasti diterima dan dijadikan sebagai masukan. Jadi,

[1] Mengenai pengalaman ini, baca Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Acehnologi* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012).

kalau sebagus apapun tulisan, jika tidak ada perubahan, maka dia tetap sebagai *haba bangai*. Melihat Aceh harus memakai kerangka *haba bangai*, karena kalau *haba carong* munculnya dari 'pembisik' atau 'mereka yang dekat dengan poros kekuasaan.'

Haba bangai sering muncul di warung kopi. Mereka mendiskusikan apa yang sepatutnya bagus bagi Aceh. Namun, di kalangan pembangun Aceh, mereka tertarik dengan *haba carong* yakni apa yang bisa dilakukan, namun terlebih dahulu menguntungkan kepentingan pribadi atau kelompok. Karena itu, di warung kopi untuk *haba bangai* sering ditambah dengan *haba cet langet*. Artinya, mereka punya mimpi, namun begitu susah diwujudkan dalam alam nyata. Jadi, tulisan-tulisan dalam buku ini harus dibaca sebagai *habang bangai* dan *haba cet langet* ala warung kopi. Maksudnya, pesan dari tulisan-tulisan dalam buku ini, boleh jadi sangat susah dan terkadang terlalu melangit.

Falsafah *haba bangai*, *haba carong*, dan *haba cet langet* adalah wujud dari diskursus keseharian masyarakat Aceh. Jika ditelisik secara mendalam, kebiasaan memunculkan ide-ide briliyan di warung kopi ditujukan bukan untuk membangun Aceh, melainkan untuk berdiskusi semata, minimal mempersamakan persepsi mengenai imajinasi dunia keacehan. Karena itu, di warung kopi semua pembangunan Aceh berjalan sesuai dengan akal pikiran. Sebab, siapa yang paling cerdas dalam *haba bangai*, dia akan sering didengarkan oleh orang lain. Ungkapan dia pun akan sering dirujuk di warung kopi, terlebih jika dia mau membayar kopi dan rokok. Demikianlah potret kehidupan masyarakat Aceh dengan *haba bangai* mereka. Sebagai contoh, di pinggir-pinggir hutan Aceh, menjelang akhir 1980-an, televisi berwarna sudah masuk. Rakyat Aceh sudah bisa menikmati RCTI dan TVRI saat itu. Bagi mereka yang di kota kecamatan, televisi dan satelit parabola sudah begitu menjamur. Menjelang Shubuh, warga sudah memasuki warung kopi. Setelah berita pagi, mereka langsung berdiskusi, layaknya acara *talk show* di televisi swasta saat ini. Mereka mampu mengulas apa saja. Bahkan analisis mereka lebih tajam dari isi dan isu berita.

Karena itu, untuk menampung para analis lokal Aceh ini, maka setiap warung kopi di Aceh, selalu menyediakan satelit parabola. Informasi dari pusat kekuasaan masuk ke dalam memori kolektif mereka. Mereka mulai menganalisis pola kebohongan pemerintah. Mereka mulai bertanya mengenai keterbelakangan hidup mereka. Di rumah, tradisi memakai satelit parabola pun mulai menjelma. Keluarga Aceh di pinggir hutan mulai "pening kepala" dengan sinetron. Pola pikir pun sudah mulai berubah, terlebih jika sinetronnya diputar beberapa episode. Jika

di warung kupi, isinya analisa berita dan analisa sepak bola, maka di rumah orang Aceh, mulai muncul analisa kehidupan yang ditayangkan dalam sinetron.

Dalam konteks ini, kemunculan *haba carong* di Aceh ditemui pada perilaku para aparaturnya. Dalam hal ini, proses penyusunan rancangan pembangunan Aceh dibuat sebagus mungkin dan sangat terukur. Artinya, waktu untuk pembangunan dibuat dengan model mengebut, asal tidak melewati tanggal anggaran. Pelaku proyek melobi di sana-sini untuk mendapatkan proyek dengan membagikan fee kepada mereka yang berjasa. Lalu, pembangunan yang efisien adalah pembangunan yang secepat mungkin rusak atau tidak bagus kualitasnya, karena dengan demikian, bisa dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya.

Haba carong juga bisa muncul dari staf ahli. Mereka yang memberikan masukan kepada siapa yang mengendalikan pembangunan Aceh. Mereka adalah ilmuwan yang bisa menjangka bagaimana membangun Aceh sebaik mungkin. Di Aceh, peran staf ahli tidaklah sesignifikan, melainkan mereka menjadi penulis pidato atau pengumpul bahan jika ada rapat pimpinan atau apapun yang membuat atasan staf ahli bisa berbicara di depan publik atau rapat. Yang paling berperan adalah 'pembisik' yang selalu memberitahukan apa yang baik menurutnya pada seorang pemimpin. Artinya, 'apa yang baik' bukan sebenarnya untuk kepentingan rakyat, tetapi 'apa yang bisa mendatangkan manfaat' bagi sang pembisik.

Adapun *haba cet langet* yang muncul dalam buku ini adalah sentilan demi sentilan tentang studi keacehan (*Acehnology*). Karena *haba cet langet*, maka dia jarang digunakan sebagai dasar pemikiran bagi pemerintah Aceh. Dia hanya menyapa pembaca supaya harapan mereka setidaknya bisa direkam dalam perjalanan sejarah Aceh. Untuk itu, bab-bab buku ini harus dipahami sebagai mimpi rakyat Aceh terhadap apa yang sebenarnya ingin dicapai. Karena itu, bab-bab buku ini dibiarkan muncul apa adanya, paling tidak, di akhir buku ini, kita bisa menarik satu nafas yaitu bahwa perubahan di Aceh adalah suatu keniscayaan.

* * *

Kenapa saya mengaitkan buku ini dengan persoalan *haba*? Dalam bahasa Aceh, *haba* adalah khabar atau berita. Namun, melihat konteks isi, maka *haba* bisa diartikan pembicaraan. Atau, bisa juga diistilahkan dengan *wacana* (*discourse*).[2] Sedangkah untuk bicara, orang Aceh menyebutkan dengan istilah *peugah* (beri tahu, *to tell*). Kalau digabungkan menjadi *peugah haba* (memberitahukan sebuah kabar). Sedangkan, ide bagi orang Aceh, disebut dengan istilah *akai* (akal). Kalau

[2] Linda A. Wood and Rolf O Kroger, *Doing Discourse Analysis: Methods for Studying Action in Talk and Text* (London: Sage Publications, 2000).

seseorang ingin mengatakan isu dan isi pembicaraan, harus ada *akai*. Artinya, pembicaraan tersebut harus ”berisi.” Jadi, kalau seorang bicara atau *peugah* tanpa isi atau bernas, sering dikatakan dengan *hana akai*. Namun, ketika istilah *hana akai*, ini agaknya bisa berubah menjadi *gila*. Karena itu, orang gila di Aceh kerap disebut dengan *hana akai.* Dengan kata lain, dia *peugah haba* tidak memiliki *akai*. Jika dikaitkan dengan istilah *haba, akai*, dan *peugah*. Maka orang Aceh lebih suka memberitahukan sesuatu dengan tamsilan dan juga hikayat. Di sini seni *peugah haba* menjadi keahlian tertentu bagi orang Aceh.

Namun, ketika dikatakan *haba carong*, maka di situ dia bisa berarti seseorang sedang menyampaikan sesuatu yang berisi. Sedangkan, *haba bangai* seseorang sedang memberitahukan sesuatu yang tidak berisi. Di sini ada dua demarkasi istilah yaitu *carong* dan *bangai*. Di Aceh, anak-anak kalau sedang bermain sering mengatai temannya dengan *kah bangai!* (kamu bodoh). Namun, bagi orang yang juga sering diistilahkan dengan *hansep akai* (tidak cukup akal). Adapun *carong* dapat diartikan sebagai pintar. Dengan kata lain, dia sudah cukup akal (*sep akai*). Di Aceh, *ureung carong* (orang pintar) adalah para ulama atau cendekiawan. Sedangkan *ureung bangai* (orang bodoh) adalah mereka yang masyarakat umum. Karena itu, setiap rakyat bertemu dengan ulama, mereka selalu mengatakan bahwa *kamoe ureung bangai* (kami orang bodoh). Walaupun ini bahasa penghormatan, karena keilmuan atau kewara'an, tetapi dalam tidak ada pengakuan orang pintar, selain seorang ulama atau *teungku*.

Karena itu, peran *ureung carong* ini menjadi sangat penting. Karena rakyat pasti akan mengikuti apapun yang dikatakan oleh *ureung carong*. Orang-orang akan datang ke mereka untuk meminta jawaban dari setiap persoalan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya, peran dan fungsi *ureung carong* menjadi sedemikian sentral. Tegasnya, *ureung carong* ini tidak hanya pandai urusan agama, tetapi juga persoalan sehari-hari. *Ureung carong,* dalam sejarah Aceh, diproduksi di dayah. Mereka ditempa untuk mampu tidak hanya menguasai ilmu-ilmu agama, tetapi juga memiliki sikap dan mental untuk mampu menyelesaikan semua persoalan yang dihadapi oleh masyarakat umum. Salah satu ciri khas *ureung carong* adalah apa yang mereka katakan atau perintahkan harus dituruti. Kalau dilakukan sebaliknya, maka *ureung bangai* akan mendapatkan celaka dalam kehidupannya. Jadi, *ureung carong* harus bisa menjelaskan atau mengabarkan *haba carong*.

Namun, setelah terjadi pergeseran sejarah dan sosial kemasyarakat Aceh, *ureung carong* kemudian dipaksa untuk tidak hanya menyampaikan *haba carong*, tetapi juga terjun langsung dalam masyarakat. Adapun tugas mereka tidak hanya sebagai petugas *haba carong*, tetapi juga melakukan *transfer of knowledge*. Proses

ini dilakukan, tidak hanya di dayah, tetapi juga di berbagai tempat publik, seperti *meunasah* atau *acara dakwah*. *Haba carong* kemudian menjadi kosumsi publik, untuk memperkuat basis *transfer of knowledge*. *Haba carong* kemudian juga ditulis oleh para *ureung carong*, sehingga *ureung bangai* bisa mendapatkan sekian banyak *akai* sebagai penyuluh kehidupan. Diaspora *ureung carong* dan *transfer of knowledge* menjadi tradisi keilmuan masyarakat Aceh. Sehingga, tidak sedikit yang berlumba-lumba untuk mendapatkan *akai* sebanyak mungkin. Istilah lain dari tradisi tersebut adalah *mita eleume*. Hal ini disebabkan posisi *ureung carong* sangat terhormat di kalangan masyarakat biasa. Mereka menjadi panutan dan bahkan dijadikan sebagai rujukan. Inilah sebabnya *ureung carong* betul-betul menyampaikan *haba carong*, karena sang pendengar benar-benar akan mematuhi.

Setelah struktur kehidupan rakyat Aceh bertukar, manfaat ilmu diukur dengan pendapatan, *ureung carong* diukur dengan materi yang mereka dapat gunakan sehari-hari. Maka *haba* menjadi sesuatu yang tidak begitu penting. Setiap hari, masyarakat tidak lagi mengkomsumsi *haba* dari media massa. Pagi hari mereka membaca surat kabar. Sambil di tempat kerja mereka menikmati berita di internet. Sore hari, mereka mengikuti berita dari televisi. Malam hari ini mendapatkan *haba* di tempat publik. Akibatnya, konstruksi pemikiran sebagian orang Aceh menjadi sangat terekayasa. Bahkan, mereka menjadi masyarakat yang dikendalikan oleh *haba*. Bagi mereka yang duduk di parlemen atau perkantoran, untuk mendapatkan *haba*, mereka juga melakukan studi komparatif ke tempat lain. Intinya, proses menerima dan mengelola *haba* tidak lagi berasal dari satu arah.

Orang bijak (*wise man*) di Aceh tidak begitu diperhatikan. Semua *haba* boleh dikondisikan dan diarahkan, sesuai dengan keperluan. Proses perubahan produksi dan distribusi *haba* mengakibatkan masyarakat kehilangan patron. Mereka cenderung mengabaikan dan tidak memperdulikan *ureung carong* seperti yang dipraktikkan pada era *endatu*. *Haba-haba* yang mendalam dan bahkan mampu meramal masa depan, dianggap tidak perlu diperhatikan. Sehingga *haba-haba* ini tidak lagi menjadi sendi kehidupan masyarakat Aceh. Ketika peran orang bijak tidak lagi berfungsi, tempat untuk melahirkan *ureung-ureung carong* pun tidak lagi di lembaga-lembaga atau komunitas-komunitas tradisional.

Dahulu kala, peran *ureung carong* sangat signifikan, yaitu mereka menjadi penasihat raja dan mengarang kitab-kitab.[3] Mereka dirujuk dan diminta pendapat oleh raja atau sultan. Setelah zaman tersebut, *ureung carong* kemudian menjadi

[3] Erawadi, *Wacana Dan Dinamika Intelektual Islam Aceh Abad XVIII Dan XIX* (Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2011).

mujahid perang. Mereka berada di barisan terdepan ketika menghadapi penjajah. Lebih lanjut, menjelang merdeka *ureung carong* kemudian membina organisasi kemasyarakatan. Sehingga bibit nasionalisme di Indonesia, tidak sedikit disemai oleh para *ureung carong* dari Aceh. Bagi rakyat Aceh, *ureung carong* yang dimaksud adalah para ulama.[4]

Transformasi *haba carong* pun mulai digeser, sejak Aceh menjadi bagian Republik Indonesia. *Haba carong* orang Aceh dimanipulasi oleh para pemimpin dari Pulau Jawa. Sehingga *haba carong* selalu berhenti di depan gerbang kekecewaan. Para *ureung carong* kemudian tidak begitu berperan aktif dalam pembangunan jiwa orang Aceh. Namun, *ureung carong* berubah menjadi semacam kelompok intelektual. Mereka bahu membahu mengarang buku untuk pengetahuan generasi muda Aceh. Sehingga pasca-kemerdekaan, peran *ureung carong* dan *haba carong* dari Aceh cukup membahana di pentas negara Indonesia. Peran intelektual dalam membumikan pemikiran mereka dirasakan cukup ampuh. Misalnya, Hasbi Ash-Shiddieqy dikenal tidak hanya sebagai ulama, tetapi juga intelektual yang cukup produktif.[5] Dalam bidang sastra dan sejarah, nama A. Hasjmy adalah seorang intelektual Aceh, yang tidak hanya berkiprah di dalam dunia ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai seorang birokrat. Masih banyak nama *ureung carong* yang cukup disegani di republik ini.

Pertanyaannya adalah mengapa Aceh begitu produktif dalam menghasilkan *ureung carong* dan memiliki ide-ide dari *haba carong*? Tentu saja jawabannya tidaklah mudah. Sebab, jika ditelusuri beberapa kaum di Aceh adalah para pendatang dari berbagai negara dan asal usul. Jika diperiksa DNA orang Aceh, mungkin kita akan terkejut. Misalnya, Hasbi Ash-Shiddieqy merupakan keturunan daripada keluarga Abu Bakar Ash-Shiddiq. Bahkan, keturunan raja-raja Aceh diduga kuat dari keturunan pada raja-raja yang tersohor di dunia ini.[6] Semua kenyataan sejarah ini menyiratkan bahwa *ureung Aceh* adalah orang-orang yang berasal dari keturunan orang-orang yang terhormat. Sehingga mereka mampu mewariskan kepintaran dan kecerdasan dari generasi sebelumnya. Namun demikian, setelah bergabung dengan

---

[4] Yusny Saby, "Dari Aceh Ke Indonesia," in *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam Di Bumi Nusantara*, ed. Komaruddin Hidayat and Ahmad Gaus AF (Bandung: Mizan, 2006).

[5] Yudian Wahyudi, *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh* (Yogyakarta: Nawesea 2007). Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas Dan Gagasannya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997).

[6] Jelani Harun, "Bustan Al-Salatin, 'the Garden of Kings': A Universal History and Adab Work from Seventeenth-Century Aceh," *Indonesia and the Malay World* 32, no. 92 (2004).21-52.

Indonesia dan melewati masa konflik yang cukup panjang, mereka tidak mampu lagi mengaktualisasikan kepintaran dan kecerdasan, seperti generasi sebelumnya.

Sebagaimana dinyatakan di atas, pergeseran struktur sosial di Aceh, telah menyebabkan faktor *haba carong* tidak lagi memainkan peran penting. *Haba carong* menjadi *haba bangai* dan *ureung carong* berperan sebagai *ureung bangai*. Sehingga dalam celotehan anak-anak atau orang kampung di Aceh, jika tidak puas dengan pekerjaan seseorang, maka disebut sebagai *kah bangai!* (kamu bodoh!), *bangai tat-tat* (bodoh sekali), *aneuk miet bangai* (anak bodoh). Intinya kata *bangai* muncul dalam beberapa segmen kehidupan rakyat Aceh. Kemudian *ureung carong* tidak lagi peran mereka seperti era *endatu*, melainkan orang yang mampu menerawang atau memiliki kekuatan magik atau mistik.[7] Misalnya, jika ada persoalan di kampung, terkadang diselesaikan oleh para dukun atau *ureung carong* (orang pintar). Tidak hanya di situ, di Indonesia, perkataan *orang pintar* terkadang diasosiasikan dengan paranormal.

Ketika *ureung carong* dirujuk, sudah tentu berbeda dengan *ureung carong* pada masa dahulu. Mereka dirujuk karena nalar dan logika tidak lagi berfungsi. Mereka haus dengan berita gaib atau pesan alam. Akibatnya, tradisi ini pun lambat laun menjadi tradisi musyrik. Namun karena orang Aceh adalah *ureung carong*, mereka selalu berdalih bahwa usaha bertemu *ureung carong* bukanlah musyrik, walaupun di depan mereka, sang *ureung carong* berkawan dengan JIS (Jin, Iblis, dan Syaitan). Karena *ureung carong* dimonopoli oleh para paranormal, maka istilah bagi mereka yang menekuni ilmu pengetahuan pun tidak lagi digunakan istilah *carong*. Tetapi disebut dengan *ureung jak beut* (orang pergi mengaji) dan *ureung jak sikula* (orang pergi sekolah). *Ureung jak beut* kemudian menjadi *teungku*.[8] Ujungnya adalah menjadi ulama. Sedangkah bagi mereka yang *jak sikula* akan berperan diwilayah publik, minus bidang agama. Kedua kelompok ini membawa perbedaan falsafah berpikir dalam menuangkan *haba carong*.

Bagi masyarakat, yang mereka dengar adalah mereka yang *jak beut*. Namun untuk melanjutkan kehidupan, mereka lebih tertarik untuk *jak sikula*. Perbedaan falsafah atau cara berpikir memiliki dampak pada cara pandang kehidupan. Namun, mereka yang tidak mengaji dan sekolah dianggap sebagai penyakit sosial. Dalam bahasa Aceh dikenal dengan istilah *aneuk hana beut dan sikula* (anak tidak

---

[7] Lihat misalnya Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Panglima La'ot Di Aceh Masa Kini: Sebuah Tinjauan Sosial Antropologi," in *Kearifan Lokal Di Laut Aceh*, ed. M. Adli Abdullah, Sulaiman Tripa, and Murizal Hamzah (Banda Aceh: 2010).

[8] Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Dari *Teungku* Ke *Ustaz*: Potret Pendidikan Islam Di Aceh," *Kajian Islam* 6, no. 1 (2011).1-16.

mengaji dan sekolah). Karena itu, fondasi dasar dalam membangun kebudayaan di tingkat lokal adalah melalui proses mengaji dan belajar di sekolah. Proses mengaji (*beut*) kemudian, jika seseorang ingin menekuninya secara serius, diubah menjadi *jak meudagang* (pergi berdagang). Walaupun isi-nya adalah mengaji, namun keseluruhan prosesinya dikenal dengan istilah seseorang dalam berdagang. Konsep *meudagang* agaknya dapat dipahami sebagai proses untuk melakukan transformasi perpindahan ilmu pengetahuan dari satu generasi kepada generasi berikutnya. Walaupun istilah *meudagang* pada hakikatnya adalah salah satu istilah dalam perekonomian yaitu berdagang (*trade*). Namun untuk istilah berdagang lebih cenderung digunakan kata *hareukat*, dari kata bahasa Arab yaitu *harakah* (gerak).

Dapat dikatakan bahwa dalam tradisi masyarakat Aceh, konsep transfer of knowledge lebih dipandang berharga daripada aktivitas berdagang itu sendiri. Bahkan, aktivitas berdagang dilakukan di sekitar aktivitas *meudagang*. Kalau dilihat secara lebih mendalam, aktivitas *hareukat* itu bukanlah memperkaya diri, tetapi untuk bisa hidup secukupnya. Dalam tradisi *endatu*, ketika dilakukan prosesi *hareukat*, maka mereka membawa hasil tanaman atau kebun ke hari pekan, lalu ditukar atau dibelikan barang keperluan hidup sehari-hari. Mereka jarang menumpuk harta dalam bentuk uang. Adapun pola menumpuk atau mengumpulkan harta dikenal dengan istilah *baynah*, dari kata bahasa Arab yang berarti *bukti*. Dapat dipahami bahwa konsep ini menegaskan seseorang yang dianggap sudah *hareukat* mereka memiliki *baynah* (bukti) yaitu sejumlah harta mulai dari kebun, hewan ternak, dan rumah yang layak huni. Konsep *baynah* merupakan hasil dari konsep *hareukat*. Akan tetapi untuk mendapatkan hasil yang maksimal, orang Aceh membalutnya dengan istilah *beureukat (barakah*). Ini juga berasal bahasa Arab yang berarti suci.

Jadi, konsep *hareukat* dan *meudagang* merupakan salah satu dari hasil kreasi kebudayaan masyarakat Aceh. Sehingga etos kerja untuk mengumpulkan harta, bukan untuk menjadi kaya, melainkan untuk mencari *beureukat*. Sehingga cara pandangnya adalah semakin banyak harta yang dibelanjakan atau disedekahkan, semakin bertambah *beureukat*. Dengan kata lain, konsep donasi sosial telah menjadi darah daging dalam tradisi masyarakat Aceh. Sedangkan *meudagang* (to trade) dipandang sebagai bagian produksi ilmu pengetahuan untuk menjadi seorang ulama, mulai dari *ulama rangkang* atau *ulama gampong* hingga *ulama chik*. Ulama yang paling senior juga bertugas mendistribusikan ilmu, tetapi tetap menggunakan istilah atau konsep *beureukat* Sehingga doa orang Aceh selalu mengaitkan dengan kata-kata *beureukat* dari ulama chik atau ulama yang paling kharismatik. Ulama yang disebutkan dalam bagian ritual doa kemudian dikaitkan dengan cara pandang

bahwa melakukan sesuatu harus menghubungkan diri dengan ulama yang paling alim.

Tidak hanya itu, mereka yang sangat banyak *baynah* tentu saja akan meminta *beureukat* dari ulama. Ini dikarenakan bahwa pagar dari hartanya bukan hanya dari hasil keringat, tetapi juga ada pengaruh spirit kosmik di situ. Akibatnya, ulama kemudian menjadi ”penjaga” tidak hanya bagi orang yang *meudagang*, tetapi juga bagi orang yang melakukan proses *hareukat*. Karena tradisi ini telah dilakukan puluhan tahun, maka tradisi ini terkadang tidak dipahami oleh generasi berikutnya. Tidak mengherankan jika kemudian, anak dari orang yang memiliki *baynah* yang sangat banyak, tidak mengetahui cara memelihara harta, seperti yang dilakukan oleh para orang tua mereka. Demikian pula, anak daripada ulama terkadang tidak mampu menjadi seorang ulama atau menggantikan posisi orang tuanya, karena tidak begitu paham akan makna dari tradisi *meudagang*.

Sehingga pola mencari ilmu dan harta tidak lagi memakai kerangka konsep *jak meudagang* dan *jak hareukat*. Karena itu, tidak mengejutkan jika dilihat tidak sedikit orang kaya di Aceh tidak mampu menghasilkan generasi yang mampu menjaga *baynah*. Demikian pula, beberapa generasi ulama terkemuka, tidak mampu menjadikan anak mereka sebagai ulama. Akibatnya, generasi pencari ilmu di Aceh semakin hari semakin menipis, khususnya mereka yang berkecimpung di dayah. Pola mencari harta dengan model *hareukat*, tidak lagi begitu lagi disukai, karena harta sudah dicari dengan jalan pintas. *Baynah* yang awalnya dimiliki secara utuh, bertukar menjadi semacam barang kredit.

Dari situ kemudian, tidak hanya berkembang pada persepsi mengenai pola mencari ilmu dan harta, tetapi juga pada pandangan bagaimana mencari ilmu pengetahuan dan harta yang benar. *Ureung carong* tidak dianggap begitu signifikan, kecuali dalam ritual keagamaan. Di samping itu, ilmu yang harus dicari dan digali, diarahkan pada pola untuk mencari harta. Dengan kata lain, mencari ilmu sama dengan mempersiapkan diri untuk mencari harta. Sehingga, kalau belajar atau *jak sikula* tidak mampu mempersiapkan diri untuk mendapatkan harta, dianggap telah gagal. Karena mereka tidak akan mempunyai pekerjaan tetap. Akibatnya mereka menjadi ”beban” bagi keluarga dan juga kaumnya. Inilah salah satu satu alasan mengapa orang Aceh cenderung memasukkan kerabatnya dalam setiap lowongan pekerjaan. Ini disebabkan ada falsafah *asai ka u dalam* (asal sudah ke dalam). Walaupun secara kualitas mereka tidak *carong*, namun karena orientasinya adalah pekerjaan tetap, maka segala upaya dilakukan untuk mencapai tujuan.

Demikian pula, pada konsep pencarian *baynah*, di mana jalan pintas dilakukan sedemikian rupa, untuk mendapatkan harta yang banyak. *Baynah* yang pada

awalnya dicari melalui proses *beureukat*, tidak lagi menjadi nafas dalam kegiatan aktivitas *hareukat*. Sebagai contoh, pola menaikkan harga barang dengan cara-cara tidak islami begitu menyeruak dalam kehidupan perdagangan di Aceh saat ini. Pola cara mencari model kontraktor dan agen juga sudah begitu membudaya.[9] Pada saat yang sama, sistem berpikir bahwa uang adalah segala-galanya menjadi nafas baru dalam kehidupan rakyat Aceh. Akhirnya, pola penumpukkan *baynah* dengan cara-cara yang keliru menurut budaya dan agama, seolah-olah dapat dibenarkan di Aceh. Sehingga struktur kehidupan rakyat Aceh pun berubah, seiring dengan perubahan cara pandang dalam mencari *baynah*. Kenyataan di atas juga dipicu oleh ketiadaan hubungan yang kuat antara menarik tradisi *endatu* pada konteks kekinian. Dayah lebih dipandang sebagai tempat orang-orang yang tidak punya masa depan, kecuali mereka mampu *jak sikula* atau menerapkan tradisi *sikula* seperti pesantren modern atau memakai pendekatan *integrated system* dalam bahasa terkini sekolah IT (Islam Terpadu).

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi pergeseran yang amat kuat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Pergeseran ini tidak hanya terjadi pada pola hidup, tetapi juga berlaku pada paradigma hidup. Namun pergeseran ini tidak dianggap sebagai masalah sosial, karena rotasi kehidupan masyarakat, seolah-olah memaksa mereka untuk bertindak seperti itu. Beberapa aktivitas yang tidak lazim dan lumrah, sekarang menjadi hal yang biasa dan tidak taboo untuk dilakukan. Perubahan sosial ini, pada gilirannya, menyebabkan masyarakat kehilangan patron sosial. Mereka tidak lagi memiliki pandangan yang seragam terhadap *ureung carong*, *haba carong*, *hareukat*, dan *baynah*. Ini disebabkan pergeseran muncul karena nilai-nilai kebutuhan kehidupan sehari-hari tidak lagi dilihat sebagai bagian dari untuk menjaga nilai-nilai tradisional yang telah diwariskan oleh para *endatu*.

* * *

Pada bagian ini akan dipaparkan bagaimana pola *seumike* orang Aceh.[10] Jika di atas merupakan suatu gambaran kehidupan sosial, maka pertanyaan lanjutannya adalah bagaimana cara orang Aceh menciptakan pola pikir kehidupan mereka. Di sini terlihat bahwa pola pikir di atas dibangun atas tiga fondasi dasar yaitu alam, agama, dan jiwa. Maksudnya, setipa pola pikir untuk

[9] Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Agen," *Serambi Indonesia*, 17 Januari 2011.

[10] Bagian ini merupakan bagian pengembangan dari Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Memahami Cara *Seumike Ureung* Aceh" (paper presented at the Aceh Development International Conference: Sustainable Development and Acehnese Welfare: Opportunities and Challenges, International Islamic University, 2012).

menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat, mulai dari kawom hingga *nanggroe* dimulai dari bagaimana bersikap pada alam, agama, jiwa. Falsafah alam (*cosmos*) ini menjadi semacam titik kendali tingkah laku. Untuk menciptakan pemahaman, sesuatu yang melawan alam, sering diungkapkan dengan istilah *hana roh*. Istilah ini adalah sering muncul, namun belum ada penjelasan yang komprehensif. Misalnya, tanda-tanda alam dibiarkan dipahami secara turun temurun, dan dikondisikan untuk dilaksanakan, tanpa harus bertanya apakah itu masuk akal atau tidak.

ana roh adalah pemahaman yang muncul, jika dilakukan akan melawan alam. Jadi sesuatu dilakukan karena mengikut keinginan alam. Istilah *roh*, jika boleh, bisa diartikan ruh atau spirit yang merupakan sebuah kekuatan yang tidak tampak secara kasat mata. Karena konsep *puga nanggroe* adalah bagian dari menyelaraskan spirit antara manusia (mikro kosmos) dengan alam (makro kosmos), maka spirit itu menjadi sesuatu yang penting. Karena bagi orang Aceh, terdapat pola pikir, setiap tempat itu adalah yang mendudukinya atau mendiaminya. Karena itu, sebuah wujud kesatuan alama dan manusia, diupayakan diberikan sebuah persembahan bagi alam dengan simbol kenduri (*khanduri*). Karenanya, di Aceh merupakan sebuah negeri yang paling banyak kenduri. Setiap ada ritual, selalu dibarengi dengan kenduri.

Simbol penyelarasan ini kemudian menjelma untuk memasukkan alam ke dalam kehidupan masyarakat. Proses instalasi ini kemudian berubah menjadi semacam doktrin kosmis bagi orang Aceh untuk menjadikan alam sebagai sahabat. Karena itu, semua aktivitas masyarakat Aceh, mulai dari gunung, bukit, sawah, sungai, dan laut, selalu dibarengi dengan "sapaan" terhadap alam. Pola pikir ini kemudian ditutup melalui falsafah *hana roh* kalau ada upaya untuk melakukan sesuatu yang tidak sesuatu dengan tradisi doktrin kosmik orang Aceh. Dari aspek ini terlihat bahwa banyaknya ritual *khanduri* dan pola menjaga alam menjadi semacam pijakan aktivitas masyarakat Aceh. Tentu saja pola ini telah bergeser di Aceh, khususnya di kawasan urban, di mana adanya *khanduri* lebih sebagai ritual semata, tanpa melihat aspek kosmis. Misalnya, dahulu kala, orang melakukan ritual atau *khanduri* dengan melihat tanggal di bulan atau melihat tanda-tanda alam. Kemampuan ini hanya bisa dilakukan oleh tetua. Saat ini, ritual khanduri, misalnya, dilakukan bukan karena alam, tetapi karena hari libur. Sehingga sering di Aceh, hari Sabtu dan Minggu tetap menjadi hari *keurija*, walaupun pada hari Senin-Kamis, mereka telah bekerja.

Adapun aspek kedua adalah pola pikir yang didasarkan pada jiwa. Ini biasanya melahirkan konsep *hana get* (tidak baik) atau *hana jroh*. Pola pikir

ini mengandaikan bahwa sesuatu perbuatan dilakukan berdasarkan pada ilmu-ilmu para bijaksanawan atau *wise men*. Mereka yang melahirkan sebuah tatanan pikiran yang kemudian ditububkan dalam bentuk Hadih Maja. Di sini yang dihadang bukanlah akal pikiran, melainkan jiwa-jiwa luhur keacehan. Sehingga nasihat untuk jiwa ini cenderung pendek dan diucapkan tidak banyak kali. Konsep berpikir ini juga ada pada *ureung tuha* di Aceh, di mana mereka lebih banyak menasihati atau menegur dengan falsafah *hana get* atau *hana jroh*. Di sini ukurannya adalah jika dilanggar akan melawan aspek-aspek batiniyyah manusia.Terkadang larangan atau nasihat tidak masuk diakal, namun jika direnungkan akan meresap ke dalam dada seseorang. Karena itu, yang dihadang di sini bukanlah akal pikiran, melainkan jiwa manusia.[11]

Dengan kata lain, apa yang baik dan buruk, bukanlah diukur dari rasionalitas, melainkan dilihat dari aspek jiwa yang kemudian melahirkan konsep moralitas keacehan. Di sini moral diukur bukan karena tinggi status sosial, melainkan sikap dan sifat keluhuran yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka yang memiliki karakteristik seperti ini biasanya menjadi pemimpin dalam masyarakat. Di sini pola pikir ini dibangun berdasarkan pengalaman dan kemampuan dalam menempatkan diri antara relasi manusia dengan manusia. Jika di atas merupakan relasi manusia dengan alam, maka aspek ini lebih menyentuh pada persoalan relasi manusia dengan manusia. Konsep yang dibangun di sini adalah relasi dengan keluarga, kawom, dan masyarakat. Seseorang yang banyak melakukan hal-hal yang *hana get* dia akan banyak mendapatkan hukuman sosial. Misalnya, seseorang yang tidak menghadiri *kenduri kampong* atau *keurija udep* dan *keurija mate*, cenderung tidak dilarang, tetapi kadang dinasihatkan melalui beberapa patah kata. Di sini walaupun alasannya sangat rasional, masyarakat Aceh cenderung melihat dari aspek *hana roh*. Karena alasan tersebut melawan masyarakat dan kewibawaan para *ureung tuha*. Akibatnya, mereka yang melawan atau tidak mengubris aspek ini, mendapat hukuman sosial di dalam masyarakat.

Namun persoalan *hana get* ini pun sudah berubah. Karena seseorang yang tidak bisa hadir dalam acara sosial, biasanya cenderung menukar kehadirannya dengan uang. Di samping itu, aspek *hana get* di wilayah urban atau pedesaan pun sudah mulai menipis. Hal ini agaknya disebabkan peran dan kewenangan *ureung tuha* sudah berkurang, seiring dengan jalur modernisasi semakin kuat.

[11] Charles Taylor, *The Explanation of Behaviour* (London: Routledge & Kegan Paul, 1964); Charles Taylor, *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity* (Cambridge: Harvard University Press, 1989).

Akibatnya falsafah *hana get* redup dan bahkan tidak begitu menarik lagi untuk dibicarakan di tengah-tengah masyarakat. Pola pikir yang berasal dari jiwa dan pandangan hidup orang Aceh ini redup, tidak hanya karena pergeseran atau perubahan masyarakat, melainkan juga tidak ada kajian mengenai falsafah keacehan di Aceh sendiri. Orang Aceh tidak mencari jati diri Aceh dalam pola pikir ini, sehingga faktor jiwa dan orang Aceh tidak menjadi hal yang begitu penting dalam kehidupan sehari-hari.[12]

Sementara itu, aspek yang ketiga adalah *han jeut* (tidak boleh) yang berasal dari agama. Dia dikeluarkan oleh para ulama dari hukum-hukum Allah yang menjadi larangan.Karena itu, setiap ada upaya yang berkaitan dengan keagamaan, tempat bertanya adalah para ulama. Akibatnya tidak mengejutkan dari falsafah *han jeut* ini, tidak sedikit kitab dituliskan oleh para ulama untuk memberikan panduan bagi ummat.[13] Cara berpikir *han jeut* ini menjadi negosiasi terakhir, setelah *hana roh* dan *hana get* tidak berjalan dalam masyarakat. Jika *han jeut* pun tidak dapat diterapkan, maka dapat dipastikan masyarakat Aceh berada dalam kegamangan. Dalam arti peraturan agama tidak menjadi sandaran utama dan ulama tidak berfungsi sebagai penyeru agama. Dalam konteks ini, falsafah *han jeut* disemai di dayah-dayah dan fungsi sosial para ulama di tengah-tengah masyarakat.[14]

Aspek ketiga ini sebenarnya ingin diformalkan dalam bentuk penerapan syari'at Islam di Aceh. Artinya, semua kendali kehidupan diuruskan dari sisi ini. Namun, agama ini kemudian berfungsi tidak hanya mengatur masyarakat, tetapi juga semua wilayah privasi. Ide ini kemudian banyak ditentang, khususnya mereka yang menginginkan adanya liberalisasi pemikiran di Aceh[15]

---

[12] Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Epistemologi 'Irfani," in *Kearifan Lokal Di Laut Aceh*, ed. M. Adli Abdullah, Sulaiman Tripa, dan Murizal Hamzah (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010)..

[13] Syaikh Nûrdîn Muhammad Jaylanî ibn 'Alî Hasanî ibn Muhammad Hamîd al-Ranirî, *Shirât Al-Mustaqîm* (Jeddah: Al-Haramayn, n.d.); M. Hasbi Amiruddin, *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh*, trans. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad (Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2003); Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Jejak Spirit Aceh," in *Ulama Dan Politik: Menyonsong Aceh Baru*, ed. Bustami Abubakar (Banda Aceh: Lembaga Studi Masyarakat Aceh dan STAIN Malikussaleh,, 2011); Anas M. Yunus, ed. *Gerak Kebangkitan Aceh: Kumpulan Karya Sejarah Muhammad Junus Djamil* (Banda: Jaya Mukti, 2005).

[14] Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim: Pengalaman Indonesia Untuk Asia Tenggara," *Edukasi* 8, no. 2 (2010).

[15] Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Islamic Law in Southeast Asia: A Study of Its*

Namun, pada saat yang sama, falsafah *han jeut* juga telah dialihkan menjadi semacam kekuatan politik, sehingga peran ulama tidak begitu mendominasi dalam hal mengatur bagaimana agar orang Aceh mampu kembali pada tradisi berpikir ini. Dahulu kala, pola pikir ini diterapkan melalui pendidikan dan dimasukkan dalam kompilasi adat istiadat Aceh, serta dijadikan sebagai spirit utama dalam membangun kebudayaan. Akibatnya, setiap raja atau ratu selalu memiliki penasihat dari kelompok ulama.

Dari uraian di atas, tampak bahwa ketiga model berpikir Aceh ini telah hilang dan tidak begitu memiliki fungsi dalam masyarakat Aceh. *Hana roh* yang dipahami sebagai spirit dan relasi manusia dan alam, tidak mampu dimaknai oleh generasi sekarang, khususnya mereka yang ingin mengedepankan aspek rasionalitas dalam memahami alam. Pola penyebaran demoralisasi aspek pertama ini juga berdampak buruk pada aspek kedua yaitu *hana get*. Ketika *hana roh* dan *hana get* tidak bisa berjalan seiring, dia pun memiliki dampak pada aspek ketiga yaitu *han jeut*. Akibatnya ketika alam – jiwa – agama tidak menjadi dasar berpikir masyarakat Aceh, maka struktur sosial menjadi rapuh. Akibatnya adalah rakyat tidak memiliki pemimpin spiritual yang mampu memahamkan diri mereka pada falsafah *hana roh*, *hana get*, dan *han jeut*.

Jika diikat pendahuluan ini telah memberikan pemahaman tentang falsafah keacehan dan bagaimana transfrer pengetahuan berlaku di Aceh. Reproduksi ilmu pengetahuan di Aceh memang sangatlah erat dengan cara pandang orang Aceh terhadap jatidiri mereka. Setelah itu, cara pandang ini menjelma dalam pola pikir, yang kemudian diterapkan dalam kebudayaan. Inilah alasan mengapa persoalan agama dan budaya dalam pola pikir rakyat Aceh tidak bisa dipisahkan. Jika ada pun yang hendak memisahkan keduanya, tentang saja upaya tersebut ingin memasukkan falsafah yang mengubah jati diri masyarakat Aceh secara tradisional. Dalam pendahuluan ini telah dipaparkan bagaimana proses transfer pengetahuan ini terjadi serta dampak terhadap sosial kemasyarakatan.

Untuk itu, bab-bab dalam buku ini harus dilihat, paling tidak, sebagai upaya untuk menohok cara berpikir yang telah berubah dalam masyarakat Aceh. Tentu saja, faktor-faktor seperti konflik dan Tsunami telah memainkan peran yang cukup penting dalam kehidupan rakyat Aceh. Buku ini, dengan demikian, bisa dilihat bagaimana dinamika respon rakyat Aceh, mulai dari elit hingga masyarakat kecil, terhadap rotasi sejarah yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir. Namun demikian, buku ini juga bisa menjadi semacam perbandingan bagaimana cara

Application in Aceh and Kelantan (Chiang Mai: Silkworm, 2009).

pandang keacehan sebelum konflik, terutama sebelum penjajah tiba di Aceh. Bab-bab dalam buku ini memang dibiarkan seperti apa adanya, dengan maksud, ingin menampakkan bagaimana penulis merespon apa yang direspon oleh masyarakat Aceh.

BAB 1

Melihat Aceh Sebelum Tsunami

PADA tanggal 10 Januari 1999, saya pulang dari Yogyakarta ke Krueng Mane. Hari itu, bertepatan dengan aksi penyerangan terhadap warga Kandang oleh TNI. Alasan utama TNI menggempur kampung itu untuk mengejar Ahmad Kandang. Saat penyerangan tersebut, saya masih dalam perjalanan dari Medan ke Lhokseumawe. Kendati beberapa kawan menasihati agar saya tidak masuk ke Aceh, namun karena rasa rindu pada orang tua, saya pun memberanikan diri untuk pulang kampung.[1]

Keesokan harinya, saya penasaran dengan tragedi yang menimpa warga Kandang. Ada apa *sih* di Meunasah Blang Kandang. Pagi hari, saya membeli *Serambi Indonesia*. Setelah itu, bergegas ke kota Lhokseumawe untuk melihat korban kekerasan TNI di Rumah Sakit. Saat itu, saya menjumpai korban yang telah dirawat oleh PMI. Para korban kekerasan tersebut dengan penuh semangat menceritakan kejadian yang menimpa mereka di Gedung KNPI. Mereka dilibas oleh aparat keamanan dengan kabel litsrik. Belum lagi penuturan anak gadis SMU yang terkena peluru nyasar. Saat saya sedang asyik mendengar, tiba-tiba

[1] Hal serupa pernah saya alami saat pulang ke Aceh pada 29 November 2002, di mana saat itu, TNI sedang menyerang TNA (Tentera Negara Acheh) di Cot Trieng, Aceh Utara. Selanjutnya, pengalaman kepulangan ini, telah disajikan dalam Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Satu Dasawarsa the Clash of Civilizations: Membongkar Politik Amerika Di Pentas Dunia* (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2003).

ruang pasien tersebut ramai oleh para pejabat Pemda Aceh Utara. Saat itu, saya melihat pejabat berkopiah sedang membesuk dan membagikan amplop ke korban kekerasan di Gedung KNPI. Saya langsung bertanya dengan suara agak besar: "*So nyank* (siapa dia?) Salah satu pejabat mendelik ke saya, dan langsung menjawab: "*Nyank Bupati* (Dia Bupati). Belakangan, baru saya tahu, kalau bupati kampung halaman adalah Tarmizi A. Karim.

Setelah itu, saya berjumpa dengan wartawan *GATRA* biro Medan. Perempuan ini akhirnya mengajak saya ke kawasan desa Meunasah Blang, Kandang. Saya mengangguk dan kami naik becak. Kendati bulan puasa dan panas yang cukup menyengat, kami sampai di desa Meunasah Blang Kandang. Desa ini memang dipenuhi oleh aparat yang sedang berjaga-jaga. Sesampai di sana, kami digeledah oleh aparat, karena kami datang sebagai orang yang "ingin tahu." Akhirnya kami diizinkan masuk ke kawasan tersebut. Sasaran pertama adalah rumah Ahmad Kandang. Saat terjadi penyerangan ke kampung tersebut, dia lolos dari sergapan aparat. Belakangan saya tahu bahwa aparat keamanan "dipaksa" untuk meloloskan Ahmad Kandang. Sehingga muncul rumor bahwa Ahmad Kandang bisa menghilangkan diri.

Setelah duduk bersilaturahmi dengan ibu Ahmad Kandang. Kami akhirnya berkeliling kampung. Ada seorang janda muda menggendong anaknya, sambil mengatakan bahwa anaknya telah menjadi yatim. Dia ingin membesarkan anak dalam gendongannya tersebut guna menuntut balas kepada mereka yang telah membunuh ayahnya. Dia dengan penuh emosi mengatakan bahwa saat itu suaminya tidak bersalah dan tidak tahu menahu. Di sudut lain, ada ibu-ibu yang mengajak kami masuk ke rumahnya untuk melihat bekas peluru nyasar yang menembus rumahnya. Ada juga yang memperlihatkan warungnya yang dijarah oleh aparat keamanan saat penyerangan tersebut. Hampir semua tempat kejadian dibiarkan apa adanya, tanpa diperbaiki. Saat kami sedang asyik bercakap dengan penduduk, saya sempat melirik aparat yang sedang bermain dengan anak-anak. Kami ingin memotretnya, namun dia tidak mau. Dia mengatakan: "Jangan Anda foto kami seperti ini, kami *kan* jahat!"

Saat wartawan tersebut menyingkir, saya memberanikan diri untuk mendekati tentara tersebut. Saya mengajak dia ngobrol dari hati ke hati. Ternyata, dia memang sedang rindu kampung halaman. Apalagi menjelang lebaran, rasa rindu anak istri ternyata membuat dia tidak bisa membendung air mata. Dia menceritakan beginilah nasib aparat. Selalu dibenci dan dibenci. Padahal, dia sendiri tidak tahu siapa yang telah membuat Kandang "berdarah." Dia menyebutkan bahwa baru saja dipindahkan ke kampung itu, sehari setelah tragedi KNPI dan Kandang berlaku.

Dia tidak tahu pasukan mana yang telah menyebabkan tragedi ini. Namun begitu, pasukan yang telah menjadikan Kandang ini "berdarah" ditarik secara cepat, mereka ditempatkan di situ. Mereka tidak tahu menahu bagaimana kronologi kejadian di kampung tersebut. Sudah menjadi kebiasaan bahwa saat konflik Aceh, arus perputaran pasukan memang sangat cepat. Bahkan beberapa konflik berdarah pasca-DOM (Daerah Operasi Militer), seolah-olah dilakukan tepat pada awal bulan.

Inilah sekelumit cerita yang saya dapatkan sejak pasca-DOM. Cerita di atas memang menunjukkan bahwa kekerasan terhadap rakyat Aceh memang tidak pernah berakhir. Semuanya berujung pada: "Tidak tahu menahu," atau dengan kalimat "Orang Tidak (di) Kenal." Setiap kekerasan di Aceh, pasti akan menimbulkan dendam. Artinya, setiap seorang warga Aceh meninggal, maka pemerintah telah menyulut dendam puluhan bahkan ribuan warga lainnya. Mereka bukan lagi menuntut balas atas nama GAM, namun atas nama darah yang telah mengalir dalam keluarga mereka. Karena itu, dalam bab ini, ingin memaparkan secara komprehensif bagaimana penderitaan rakyat Aceh selama pasca-DOM. Tujuan utama adalah untuk memberikan suatu gambaran yang komprehensif kepada pembaca bahwa penderitaan rakyat Aceh merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari sejarah rakyat Aceh sendiri.

Setelah pencabutan DOM pada 8 Agustus 1998, rakyat Aceh terpolarisasi ke dalam berbagai aksi.[2] Bagi rakyat Aceh, peristiwa tersebut merupakan langkah awal bagi mereka untuk menuntut segala perlakuan ABRI selama pemberlakuan DOM (1989-1998). Pencabutan DOM sama dengan berakhirnya suatu rezim militer di Aceh. Mereka seakan-akan "hidup kembali" setelah 10 tahun "mati" dari berbagai sudut pandang (agama, budaya, sosial, dan politik). Selama 10 tahun, agama di Aceh tidak lagi menjadi patokan kehidupan setempat di mana mereka selalu mendapat tekanan dari pihak militer dan juga GAM yang berujung pada penghilangan nyawa secara paksa. Selama 10 tahun, budaya rakyat Aceh diinjak oleh budaya kekerasan yang selalu menoreh tinta hitam dalam sejarah rakyat Aceh. Demikian juga, selama 10 tahun, kehidupan sosial rakyat Aceh tidak menentu, di mana mengalami "penyakit sosial." Adapun secara politik, kehidupan rakyat Aceh sama dengan pada masa penjajahan. Sumbu-sumbu politik juga tersendat

[2] Lihat misalnya Lambang Trijono, ed. *The Making of Ethnic & Religious Conflicts in Southeast Asia* (Yogyakarta: Center for Security and Peace Studies,2004); Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "The Violence in Aceh: A Socio-Historical Perspective," in *The Minorities*, ed. Buddhadeb Chaudhuri and M. Abdus Sabur (Bangkok: Asian Resource Foundation, 2008).

oleh adanya berbagai kepentingan politik di Aceh yang menyebabkan kehidupan rakyatnya dihantui oleh ketidakpastian.[3]

Selanjutnya, pasca-DOM, rakyat Aceh tampaknya terpolarisasi dalam beberapa kelompok.[4] *Pertama*, kelompok yang meinginkan untuk segera menyidangkan pelaku pelanggaran HAM selama DOM. Mereka adalah korban DOM yang sebelum pencabutan operasi melaporkan kekejian aparat selama 10 tahun. Kalangan ini datang ke kantor DPR atau LSM setempat untuk melakukan testimoni. Kecenderungan kelompok ini adalah menuntut segera pelaku kekerasan selama DOM harus diseret ke meja hijau. Kelompok masyarakat ini sekarang yang paling menderita pasca-DOM. Selain, beban mental akibat kekerasan yang dialami selama DOM, mereka juga harus kecewa sebab pelaku kekerasan tidak pernah disidangkan. Sampai sekarang, jumlah yang pasti mengenai kekerasan yang terjadi selama 10 tahun tersebut memang belum final. Sebab, masih banyak kuburan-kuburan yang menjadi korban belum dapat diidentifikasi. Namun berbagai laporan menyebutkan bahwa korban yang meninggal sejak pertengahan 1980-an, sebelum diperkenalkan DOM, adalah sekitar 5000 orang.[5] Data terakhir, mencatat bahwa korban yang melapor pada TPF (Tim Pencari Fakta) berjumlah sekitar 1.387 kasus dan bukan menurut jumlah korban yang tewas.[6] Harus diakui bahwa mereka yang ditinggalkan oleh korban yang telah meninggal tentu akan menuntut balas terhadap pelaku. Hal inilah yang tidak pernah "diselesaikan" oleh pemerintah Indonesia.

Puncak kekecewaan mereka agak sedikit terobati saat pengakuan mereka didengar dengan harapan, pengakuan tersebut akan menjadi bukti bagi penegak hukum untuk melakukan investigasi terhadap siapa pelakunya. Dalam beberapa laporan, saat pencabutan DOM mereka berduyung-duyung datang ke Komisi Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh yang dibentuk melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia No.88 Tahun 1999. Mereka yang pernah melihat/merasakan/mengalami kekerasan dengan "penuh" bersemangat melapor

---

[3] Lihat juga Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Galang Press, 2002). 271-99; Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, *Wajah Baru Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2004).

[4] Sebagian pemetaan ini dapat dibaca dalam Bustamam-Ahmad, "The Violence in Aceh: A Socio-Historical Perspective."

[5] Mestika Zed, "Hidden History: Sejarah Kebrutalan Dan Kejahatan Negara Melawan Kemanusiaan. Isu-Isu Dan Strategi Dalam Konteks Sejarah Indonesia," *Jurnal Demokrasi & HAM* 2, no. 1 (2002). 28

[6] Ibid. 28-9.

ke komisi tersebut. Namun, setelah semuanya selesai, data-data dan fakta-fakta apa yang mereka alami hanya menjadi "bahan" baca semata.[7] Laporan yang berisi data kekerasan itu memang bisa menjadi "catatan kelam" sejarah peradaban rakyat Aceh pada abad ke-20 ini.

Kedua, kelompok yang selama DOM dijadikan sebagai TPO (Tenaga Pembantu Operasi). Dalam bahasa Aceh dikenal dengan *cuak* (pengkhianat). Kelompok ini, pasca pemberlakuan DOM merasa terjepit, sebab "sang pelindung" mereka telah pulang ke Jakarta ke tempat tugas masing-masing. Dalam *Aceh Bersimbah Darah* disebutkan bahwa bersamaan dengan ditariknya aparat Kopassus dari Pidie, sebagian TPO (Tenaga Pembantu Operasi, tapi oleh masyarakt Aceh diplesetkan menjadi Tukang Pukul Orang) tepatnya ikut serta "merantau" ke luar daerah. Alasanya, para "tukang pukul" ini kini mulai merasa "kurang nyaman" tinggal di kampungnya.[8] Bahkan senjata yang pernah dititipkan sama mereka, dicabut kembali dan nyawa mereka pun terancam. Para *cuak* ini pun berada dalam ketakutan yang amat sangat. Setiap malam, para *cuak* ini diculik dan "dilenyapkan." Sebagian dari mereka masih menginginkan agar aparat berada di Aceh. Belakangan, *cuak* ini sering "disekolahkan" oleh GAM. Menurut pengakuan seorang anak janda yang "disekolahkah", saat dia ingin tahu di mana posisi kuburan ibunya, pihak GAM membolehkan, namun dia harus "membenarkan" sikap GAM.[9]

Kendati demikian, motif *cuak* ini sangat beragam. Setidaknya ada beberapa motif yang menyebabkan kemunculan *cuak* di Aceh.[10] Motif pertama adalah untuk mendapatkan fasilitas proyek di dari pemerintah. Motif ini sesungguhnya lebih bersentuhan dengan urusan ekonomi. Namun demikian, motif ini jarang sekali menyentuh akar rumput. Artinya, hanya korban *cuak* dari motif ini adalah saingan bisnis saat melakukan proyek dari pemerintah.

Motif kedua, terpaksa untuk menyelematkan diri dan keluarganya dari aparat keamanan. Motif ini memang cara yang cukup bagus untuk mencari musuh. Maksudnya, beberapa warga yang dicurigai GAM, ditangkapi, kemudian mereka "dibina." Bahkan "binaan" ini juga dilakukan di Jakarta di mana beberapa

---

[7] Lihat Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Menakar Harga Kemarahan Orang Aceh: Etnografi Kekerasan Di Indonesia," in *Tamaddun Dan Sejarah: Etnografi Kekerasan Di Aceh*, ed. Hasanuddin Yusuf Adan (Yogyakarta: Prismasophie Press, 2003).9-38.

[8] Al-Chaidar, *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (Dom) 1989-1998* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999). 203.

[9] Wawancara dengan anak Janda yang disangka *cuak*, Aceh Utara, Februari (2003).

[10] Motif ini dipinjam dari Al-Chaidar, *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (Dom) 1989-1998.* 211-2.

"pentolan" GAM mendapat "perlakukan khusus" dari TNI.[11] Hal inilah yang sering memicu adanya sikap dualisme TNI ketika menangkap sebagian rakyat Aceh. Jika dipandang akan menguntungkan dari sisi data intelijen, maka tawanan tersebut akan "dibina" dengan berbagai "jaminan." Akan tetapi keluarga yang menjadi cuak, akan merasakan ketakutan, karena tekanan dari pihak GAM di Aceh.

Motif ketiga, dipaksa menjadi *cuak* sebagai kompensasi dia tidak dihukum berat secara fisik, karena sebelumnya dituduh memasok logistik kepada oknum GPL. Selama DOM, tidak sedikit warga Aceh yang ditangkap oleh aparat keamanan yang diancam akan dibunuh, jika tidak memberitahukan sarang-sarang GAM. Para tahanan pun memilih menjadi *cuak*, dengan alasan untuk menyelamatkan diri dan keluarga. Dalam kondisi ini seperti itu, dapat dipastikan bahwa setiap dari *cuak* ini juga terus dimonitor oleh *cuak* lain dengan motif yang berbeda beserta aparat. Namun, dalam beberapa kasus, *cuak* ini menjalani hidupnya penuh dengan tekanan, baik dari GAM, masyarakat, dan yang tidak kalah menakutkan adalah dari aparat keamanan.

Motif keempat, ada *cuak* yang sekadar gagah-gagahan sekaligus calo yang memeras terhadap warga. Dalam motif ini memang sangat kentara, khususnya mereka yang pernah mendaftar menjadi aparat keamanan (Polisi dan TNI) , namun tidak pernah diterima. Karena itu, mereka bergaul dengan aparat keamanan. Perilaku mereka seperti 'ABCD' ('ABRI Bukan Cepak *Doank*!). Mereka sering ikut-ikutan gaya aparat. Oleh aparat keamanan, mereka "dimanfaatkan" untuk memburu GAM. Sering ulah mereka ini sangat menyengsarakan warga setempat. Sebab, mereka melakukan pemerasan terhadap warga setempat dan menggoda gadis-gadis agar mau berteman dengan aparat keamanan.

Ketiga, kelompok pendatang atau transmigran dari luar Aceh. Selama pemberlakukan DOM, mereka jarang sekali "terusik." Mereka bahkan membantu aparat, saat pengejaran GPK. Hal ini dipicu oleh banyak aparat yang dikirim ke Aceh adalah berasal dari suku Jawa. Jadi, secara etnis, mereka melindungi suku tersebut selama DOM. Setelah pencabutan DOM, mereka juga merasa terancam. Mereka juga dilanda ketakutan terhadap kelompok yang masih "berkuasa" di Aceh, yaitu GAM. Sebab, disinyalir bahwa GAM menyebar isu sentimen anti suku Jawa. Karena itu, sangat beralasan jika kelompok ini menginginkan jika aparat masih berada di Aceh.

[11] Lihat misalnya "'Cuak-Cuak' Pun Berguguran," *Tempo*, 1 Juni 2003. dan "Segelas Kopi yang Terakhir," *Tempo* 1 Juni (2003)32-33.

Bagi GAM, keberadaan masyarakat pendatang melalui program transmigrasi merupakan "peluru tanpa suara." Sebab, tidak sedikit imbas yang dirasakan oleh pendudukan setempat. Mereka tidak boleh lagi leluasa menggarap tanah air mereka sendiri. Di samping itu, para pendatang ini memang membawa budaya asli mereka ke Aceh yang tentu saja dalam beberapa hal, berlawanan dengan budaya rakyat Aceh. Hal inilah yang memicu mengapa keberadaan mereka pasca-DOM terusik. Selama DOM pun, kelompok pendatang bebas melakukan apa saja di pelosok Aceh. Dalam satu perjalanan ke Simpang Keuramat di Aceh Utara di lokasi transmigrasi, terlihat kehidupan masyarakat Jawa yang sama sekali bertentangan dengan budaya Aceh. Mereka bebas melakukan perbuatan sesuka hati, sebagaimana lazimnya di pulau asal mereka. Di beberapa sudut kampung, tampak mereka melakukan pergaulan sebagaimana lazimnya di Jawa.

Paling tidak, konsentrasi masyarakat pendatang ini pun ada di beberapa tempat.[12] (1) Wilayah Aceh Besar. Penempatan transmigrasi di Aceh Besar dipusatkan di Jantho, Saree, Seulimum, Abad Sibaleuek dan Indrapuri. (2) Wilayah Aceh Selatan yang dipusatkan di kawasan Simpang Kiri dan Simpang Kanan, Babussalam. Di wilayah ini pula, hutan ditebangi oleh PT. Dina Maju, milik keluarga Suharto, Probosutedjo, Bob Hasan, Tutut. (3) Wilayah Pidie yang dikonsentrasikan di Kecamatan Tiro, Tangse, dan Gumpang. (4) Wilayah Gayo Alas di wilayah ini memang sangat banyak ditemukan transmigran yang berasal dari luar Aceh. Bahkan di kawasan ini dijumpai PT Perusahaan Bengawan. (5) Wilayah Aceh Barat di mana konsentrasi masyarakat pendatang dapat dijumpai di kawasan Gunung Kong. (6) Wilayang Linge di mana transmigran ditempatkan di kawasan Jagong, Burni Bies, Sukaramai, Karang Rejo, Pondok Gajah, Pondok Sayur, Pondok Baru, Batu 35, Blang Paku, Jamur Ujung, Conto I, Lampahan, Damaran, Pondok Geresek, Buter, dan Selun. (7) Wilayah Aceh Utara di mana masyarakat pendatang mendiami hampir seluruh wilayah hutan perbatasan. Mereka menetap di Panton Labu, Lhoksukon, Gunong Geureudong, Cot Girek, Seureukee. Diperkirakan masyarakat di kawasan ini mencapai puluhan ribu. Mereka membentuk komunitas sendiri. (8) Wilayah Teumiang, konsentrasi masyarakat pendatang berada di lokasi Liput, Seumantuk, Aasa Peutek, dan Sidodadi. (9) Wilayah Aceh Timur dipastikan seluruh kawasan pinggir hutan mulai dari Binjai ke wilayah Pase, telah didiami oleh pendatang dari luar Aceh.

[12] Data ini diperoleh dari Yusra Habib Abdul Ghani, *Mengapa Sumatera Menggugat* (Biro Penerangan Acheh-Sumatera National Liberation Front, 2000).134-139.

Tentu saja, selama pemberlakuan DOM, mereka mendapatkan "perlakuan istimewa" dari aparat yang sedang bertugas mencari GPK @ GPL @ GBSA. Perlindungan terhadap kelompok pendatang ini, dilatarbelakangi oleh ikatan etnis dan NKRI di mana aparat merasa punya kewajiban untuk melindungan etnis tersebut di Aceh. Saat terjadi *killing field* terhadap warga Aceh, diperkirakan di beberapa tempat yang didiami oleh para pendatang tersebut. Karena itu sangat beralasan jika mereka tidak menginginkan adanya pencabutan DOM di Aceh. Dalam konteks ini pula, saya berpendapat bahwa adanya pengusiran terhadap kelompok pendatang ini dipicu oleh beberapa hal. *Pertama*, motif untuk strategi perang di mana agar menguasai medan perang, masyarakat pendatang harus "dibersihkan" dari kawasan tersebut. Sebab, GAM sendiri menggunakan strategi perang gerilya. Karena itu, wilayah pinggiran dan hutan sendiri harus mereka kuasai untuk basis pertahanan mereka. Kedua, motif perampokan dengan memanfaatkan ancaman GAM. Motif ini diduga bahwa pengusiran dilakukan melalui pemanfaatan selebaran yang mengatasnamakan GAM. Selebaran ini kemudian disebarkan ke pendudukan. Setelah itu, mereka mengungsi dan tidak sempat membawa barang-barang mereka. Saat itu, truk datang dengan membaca seluruh isi rumah mereka dan kemudian dibawa ke Medan. Ketiga, motif propaganda. Dalam hal ini, sentimen anti-suku tertentu adalah sangat baik untuk menjagas eskalasi konflik di Aceh. Sebab, sentimen agama yang pernah dipicu oleh para provokator tidak berhasil. Model ini hanya berhasil di Ambon dan Maluku. Adapaun di Aceh, propaganda yang bernuansa agama tidak mampu mempengaruhi rakyat Aceh. Karena itu, propaganda untuk mengatakan bahwa "Aceh tidak pernah Aman" adalah dengan membangkitkan sentimen suku. Dalam salah satu perjalanan ke Banda Aceh, beberapa warga pendatang yang mengatakan bahwa mereka masih betah di Aceh. Sebab, mereka ternyata tidak pernah diusik. Mereka adalah pedagang asongan di persinggahan Gunung Seulawah, Saree.

Jadi, berdasarkan paparan di atas, kehadiran pendatang di Aceh memang mengundang sejumlah persoalan. Disatu sisi mereka dimanfaatkan oleh pelaku konflik guna untuk menciptakan permusuhan suku. Di sisi lain, mereka juga dibenci oleh GAM dan "diam-diam" oleh rakyat setempat, karena dianggap telah mengeruk kekayaan bumi Aceh. Namun demikian, pendatang ini pun ingin tetap bertahan, dengan alasan bahwa tanah dan penghidupan mereka hanya di Aceh. Selama pasca-DOM mereka lebih cenderung mengungsi dan mengemis di jalan raya Medan-Banda Aceh, daripada pulang ke kampung halaman. Jumlah mereka semakin hari, semakin banyak. Dan, kondisi ini menjadi persoalan tersendiri bagi pemerintah setempat.

Sementara itu ada juga pendatang yang memang "diundang" dibeberapa perusahaan terkemuka di Aceh. Mereka memang telah mempersiapkan jauh hari sebelum DOM dicabut. Bagi mereka yang menempati posisi "basah" dengan mudah mampu membeli rumah di Medan atau di kota-kota besat lainnya seperti Jakarta. Kelompok ini memang jarang bersentuhan dengan masyarakat biasa yang berada di luar komplek. Sebab, mereka tinggal dalam komplek perumahan yang dijaga selama 24 jam oleh aparat keamanan. Bahkan untuk bepergian bersama keluarga, mereka cenderung menggunakan pesawat carteran yang berangkat dari Bandar Malikussaleh. Namun, mereka juga sering mendapat tekanan dan ancaman dari pihak yang melakukan konflik di Aceh. Pasca-DOM, jumlah kelompok ini semakin berkurang, seiring dengan proses putra Daerahisasi di beberapa perusahaan terkemuka.

Keempat, kelompok kontraktor yang selama ini sering memanfaatkan aparat sebagai *backing*. Sudah menjadi rahasia umum, bahwa selama DOM, tidak sedikit aparat yang terlibat dalam berbagai bisnis di Aceh di mana mereka sering terlibat dalam berbagai aksi pengamanan beberapa proyek yang sedang dijalankan. Setelah pencabutan DOM, mereka tidak lagi mendapatkan "pengamanan khusus" dari aparat. Karena itu, mereka menginginkan agar aparat keamanan masih berada di Aceh. Mereka juga khawatir, jika tidak dilindungi oleh aparat, kemungkinan akan mendapatkan berbagai tekanan dari GAM. Bahkan selama pencabutan DOM, tidak sedikit kontraktor atau pelaku bisnis yang "disekolahkan" oleh GAM. Mereka mendapat "pelajaran khusus" dari GAM selama "sekolah."

Karena itu, pasca-DOM dalam setiap proyek yang memakan dana milyaran rupiah, pihak kontraktor harus menyetor dua pihak sekaligus, jika proyeknya berjalan mulus.[13] Jadi, sangat beralasan jika berbagai proyek di Aceh dijalankan dengan sistem "menyetor sana-sini." Hal ini belum lagi harus menyetor pihak di kantor yang meluluskan proyek. Setiap proyek di Aceh, kontraktor wajib menyetor ke Pimpro (Pimpinan Proyek), dan beberapa pihak tertentu, termasuk kepala kantor di tempat proyek tersebut dijalankan. Namun, ada juga kontraktor yang "nakal" yang melakukan proyek fiktif dengan alasan keamanan. Mereka yang mendapat proyek perbaikan jalan di daerah terpencil, tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ketika ditanya, alasannya adalah adanya penghadangan oleh pihak yang

[13] Lihat potret yang sama paska-MOU Helsinki dalam Edward Aspinnall, "Combatants to Contractors: The Political Economy of Peace in Aceh," *Indonesia* 87(2009). 1-34; Edward Aspinnall, *Islam and Nation: Separatist in Aceh, Indonesia* (California: Stanford University Press, 2009).

bersenjata. Dapat dikatakan, selama pasca-DOM, tidak sedikit proyek fiktif yang dilakukan oleh kontraktor.

Kelima, kelompok Pegawai Negeri Sipil yang secara kerangka NKRI yang sedikit banyak "terusik" jika DOM dicabut. Selama pemberlakukan DOM, PNS agak "sedikit" dilindungi. Sebab, suara mereka diperlukan saat pemilu. Jadi, karena ada jalur ABG (ABRI, Birokrasi, dan GOLKAR), posisi mereka selama DOM, agak diperhatikan. Kendati ada beberapa yang diculik selama DOM, pada era setelah pemberlakukan operasi tersebut, mereka mendapatkan tekanan untuk menyetor ke kelompok tertentu. Mereka biasanya berada dalam posisi dilematis. PNS memang selalu berada dalam posisi sulit saat pencabutan DOM. Mereka mengakui, setiap mereka menerima gaji, harus disetorkan ke pihak tertentu yang ditagih ke sekolah-sekolah mereka. Jumlah pemotongan inipun sangat bervariasi, mulai Rp.50.000-500.000.

Keenam, kelompok masyarakat yang langsung bergabung dengan GAM, baik secara aktif maupun pasif.[14] Secara aktif, mereka mendaftarkan diri atau karena termasuk dalam "penjaringan" GAM. Setelah mendaftarkan diri, mereka ikut latihan di hutan-hutan. Motivasi kelompok ini masuk GAM, diperkirakan karena dendam terhadap aparat yang telah menganiaya keluarga mereka. Adapun secara pasif, adalah yang sering disebut GAM Cantoi. Mereka merupakan simpatisan GAM yang terkadang menjadi mata-mata GAM. Dalam keseharian, mereka membaur dalam masyarakat. Dan, informasi yang diberikan kepada GAM adalah posisi aparat, *cuak*, para pendatang yang menurut mereka patut dicurigai. Posisi mereka sangat vital sekali, sebab mereka menjadi informan GAM. Mantan Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Mayor Jendral Djali Yusuf menyebutkan: "…ketika reformasi sedang kencang-kencangnya. Karena TNI tidak bisa main tangkap lagi seperti pada masa DOM…, GAM menggunakan momen reformasi itu untuk memperbesar kekuatannya."[15]

Sejauh pengamatan saya, ada beberapa motif rakyat mendukung/masuk GAM. Motif pertama, adalah untuk membalas dendam terhadap keluarga mereka yang pernah dibantai oleh aparat. Motif ini memang tidak pernah bersentuhan pada apa dan bagaimana sesungguhnya GAM itu sendiri. Bagi mereka, asal mendapat senjata, maka itu adalah alat untuk membalas dendam. Menurut hemat saya,

[14] Harus diakui bahwa jumlah TNA, saat pemberlakukan DOM jumlah sekitar 2000 jiwa. Adapun setelah pencabutan DOM, jumlah TNA mendapai sekita 5000 jiwa. Lihat Djali Yusuf, "GAM Akan Lumpuh dalam Dua Bulan," Wawancara dalam *Tempo* 15 Juni (2003), h.46; "Siap Menggedor Kantong Nakal," *Gatra*, 10 Mei (2003), h.66.

[15] Mayjen Djali Yusuf, GAM Akan Lumpuh, h.46.

banyak anggota GAM yang di bawah berusia 20 tahun, dapat dipastikan adalah pemuda yang ingin membalas dendam. Di samping itu, para pasukan *Inong Balee* merupakan pasukan perempuan yang dibalut oleh bingkai dendam terhadap perlakukan aparat keamanan selama DOM. Menurut Sofyan Daud, "*Inong Balee* juga terdiri atas perempuan yang suami, kakak, adik, ayah, atau saudaranya dibunuh TNI."[16]

Motif kedua, adalah memang benar-benar ingin memperjuangkan kemerdekaan Aceh. Kelompok ini masuk GAM setelah tahu bagaimana sepak terjang gerakan ini selama 20 tahun lebih. Artinya, mereka masuk GAM setelah mendengar penjelasan atau "doktrinisasi" yang dilakukan oleh GAM. Menurut beberapa sumber yang saya peroleh, kelompok ini sangat mendukung perjuangan Tgk. Hasan di Tiro kalau mencoba "merasionalkan" gerakan ini, mereka akan marah dan mengancam "menyekolahkan" siapa saja yang tidak setuju. Salah seorang *pelarian perang* di Malaysia yang sedang menunggu negara ketiga sebagai tempat pelarian. Dia dengan penuh semangat menceritakan bagaimana sepak terjang. Ketika saya bertanya bagaimana dengan korban yang "disekolahkan" oleh GAM, dia menjawab itu hal yang biasa dalam sebuah perjuangan. Setelah itu, dia memang seakan-akan tidak mau "melayani" saya lagi.

Motif ketiga, karena pengangguran atau tidak ada pekerjaan tetap. Motif ini dapat dijumpai dari mereka yang sebelum masuk GAM adalah kelompok masyarakat biasa. Setelah masuk GAM, dia menjadi lebih "berwibawa" dengan berlagak *a la* tentara. Di samping itu, dia lebih leluasa "mengutip" *pajak nanggroe* untuk kepada masyarakat. Setelah beberapa bulan, dia pun menjadi kelompok "borju." Dalam salah satu pertemuan di Malaysia, ada yang mengkritik pelaporan keuangan GAM tidak amanah. Dalam forum tersebut, dikatakan bahwa GAM tidak *becus* dalam administrasi keuangan. Bahkan pengutipan *pajak nanggroe* terkesan tidak masuk akal. Salah seorang donatur GAM di Malaysia, menyebutkan bahwa sangat aneh ketika dia telah menyumbang untuk panglima wilayah, namun setelah beberapa saat, panglima sagoe pun meminta uang.[17] Inilah yang membuat mereka "geram" saat menyumbang uang untuk perjuangan GAM. Kendati pada akhirnya, model pengutipan ini disinyalir sebagai GAM Gadungan alias *GAM Cantoi.*

Selanjutnya, motif ini juga dipicu oleh lahan pekerjaan di Aceh yang cukup minim. Ini merupakan salah satu persoalan yang tidak dapat dipecahkan oleh pemerintah. Sehingga mereka masuk GAM untuk mendapatkan uang dengan

[16] "Inong Balee, Dibakar Dendam," *Tempo*, 22 Juni (2003), h.33.

[17] Wawancara dengan simpatisan GAM di Malaysia, Agustus 2002.

sangat mudah. Di sinilah bermunculan berbagai intimidasi atas nama *perjuangan nanggroew*. Hal ini kemudian dimanfaatkan oleh TNI ketika melakukan "pengutipan" kepada rakyat. Salah satu alasannya adalah: "Kalau kepada GAM Anda mau menyumbang, mengapa kepada TNI Anda tidak mau?" Harus diakui bahwa pengangguran di Aceh telah menyebabkan implikasi yang cukup serius bagi generasi muda Aceh.

Dari tiga motif di atas memberikan catatan sendiri bagi kita untuk memahami mengapa GAM "menggemuk" selama pasca DOM. Kelompok masyarakat ini kemudian masuk GAM atau menjadi simpatisan GAM. Mereka tersebar dengan berbagai profesi yang cukup "menantang." Sehingga untuk memberangus GAM, sama saja ibarat memotong jaring laba-laba yang tentu saja selalu tersambung saat diputuskan oleh aparat keamanan. Dalam bahasa yang sederhana, ikatan persaudaraan, etnis, agama, politis merupakan bagian jalinan kelindan untuk mengatakan bahwa GAM telah "berhasil" dalam perjuangannya. Setidaknya, motif rakyat yang bergabung dengan GAM adalah akibat perilaku aparat keamanan dan kesalahurusan pemerintah dalam menangani konflik Aceh.[18]

Ketujuh, kelompok elemen mahasiswa. Kelompok ini sendiri terpecah ke dalam empat sub-kelompok. (1) *Kelompok Pro-GAM.* Kelompok mahasiswa tersebut secara terang-terangan mendukung perjuangan GAM. Mereka melakukan "bantuan" secara langsung maupun tidak terhadap GAM. Di samping itu, mereka membangun jaringan dengan kekuatan GAM untuk mensosialisasikan wacana kemerdekaan di kalangan rakyat Aceh. Bahkan ada juga di kalangan mahasiswa yang diduga sebagai pasukan TNA aktif. Mereka menjadi *spy* dalam forum ilmiah di kampus. Dan, siapa saja yang "salah bicara" akan "berurusan" dengan GAM.

Dalam Konggres Mahasiswa dan Pemuda Aceh pada bulan Februari 1999, wacana "ingin pisah dari RI" sangat tampak. Tidak sedikit dari mahasiswa yang menuntut kemerdekaan atau mengurus sendiri "rumah tangganya" daripada diurus Republik Indonesia yang ternyata tidak membawa implikasi yang signifikan terhadap rakyat Aceh.[19] Mereka menolak otonomi daerah yang ditawarkan oleh pemerintah RI. Dalam pandangan kelompok ini, satu-satunya cara yang terbaik bagi rakyat Aceh adalah pisah dari RI.[20]

---

[18] Untuk lebih lanjut, baca Syarifuddin Tippe, *El-Hurr: Nurani Untuk Aceh* (Banda Aceh: Yayasan Ulul Arham, 2001).

[19] "Lebih Baik, bila Aceh…" *Serambi Indonesia*, 3 Februari (1999).

[20] "Pisah dari RI Bergema," *Serambi Indonesia*, 3 Februari (1999).

(2) *Kelompok Anti-GAM*. Kelompok ini terdiri dari mereka yang tidak suka dengan perjuangan GAM yang telah bergeser dari garis-garis perjuangan GAM yang sebenarnya. Kekuatan kelompok ini lebih memilih Otonomi Khusus sebagai *starting point* untuk penyelesaian Aceh. Namun, mereka juga menuntut untuk kasus HAM di Aceh harus diselesaikan oleh pemerintah. Kelompok mahasiswa ini, memang tidak menuntut kemerdekaan, namun yang paling urgen adalah bagaimana Aceh sejahtera dalam bingkai NKRI.

(3) *Kelompok yang sama sekali "cuek" dengan konflik Aceh*. Kelompok mahasiswa ini datang dari anak-anak komplek di beberapa perusahaan terkemuka di Aceh Utara. Mereka adalah generasi "kelompok borju" di Aceh yang sama sekali tidak pernah merasakan ekses DOM. Mereka hidup penuh dengan penuh bergelimang fasilitas yang diberikan oleh perusahaan tempat orang tua mereka. Generasi ini, tanpa disadari membentuk komunitas sendiri, mulai sejak Sekolah Dasar hingga kuliah di perguruan tinggi. Di beberapa kota, kelompok mahasiswa ini, jarang berbaur dengan mahasiswa non-komplek. Karena fasilitas tersebut, *sense of belonging* terhadap kasus Aceh terasa kurang, jika tidak boleh dikatakan tidak ada sama sekali. Padahal apa yang mereka nikmati adalah hasil dari bumi Aceh yang juga berhak dinikmati oleh anak-anak lainnya. Saya mendapati sebagian, jika bukan semua, kencenderungan anak-anak komplek ini adalah "mengasingkan" diri dari pergaulan anak-anak Aceh lainnya. Kalaupun, pulang kampung, mereka naik pesawat layaknya, pejabat datang ke Aceh. Keperihan rakyat di luar komplek, seakan-akan tidak membuat kelompok ini sadar bahwa apa yang mereka nikmati adalah hasil bumi Aceh yang juga dapat dinikmati oleh generasi Aceh lainnya.

(4) *Kelompok mahasiswa yang berafiliasi ke kelompok tertentu.* Mereka adalah sekelompok mahasiswa yang terlibat dalam beberapa LSM asing di Aceh. Mereka terkesan sangat independen dalam memahami duka rakyat Aceh. Kelompok ini "begerilya" secara di "bawah tanah." Salah satu alasan mengapa mereka berbuat demikian adalah untuk menghindari konflik dengan TNI dan TNA. Namun, terkadang aparat keaman sering "mencium" bau mereka saat melakukan aksi. Kelompok ini memang tidak begitu mementingkan idealisme yang ada. Bagi mereka "proposal" adalah cara yang terbaik untuk menyelesaikan konflik Aceh. Untuk mendukung misi ini, kelompok ini "bersembunyi" di balik payung HAM. Sehingga, terkadang, saat mereka menemukan pelanggaran HAM di lapangan, cenderung melaporkan ke siapa yang membayar mereka. Kelompok ini memang sangat tertutup dengan publik. Mereka hanya menjadi "kaki tangan" pihak asing untuk "mengutil" data di lapangan. Karena itu, mereka terpencar di mana-mana,

bahkan di Amerika sekalipun. Bagi yang bagus karirnya, mahasiswa ini pun kemudian disekolahkan oleh pihak asing.

Kedelapan, kelompok yang sama sekali tidak setuju dengan TNI dan TNA. Kelompok ini sering dikenal dengan Taliban. Terhadap TNI, mereka memang tidak pernah setuju dengan berbagai kekerasan yang dilakukan oleh TNI. Bagi mereka, TNI telah menginjak nilai-nilai Islam yang tertanam dalam jiwa rakyat Aceh. Pada saat yang sama, mereka juga tidak setuju dengan GAM yang cenderung "menghilangkan" paksa nyawa seseorang. Sehingga, dalam beberapa pertemuan pihak ini dengan GAM, sering muncul persoalan yaitu apa hukumnya ketika GAM "menghilangkan" nyawa seseorang dari sudut hukum Islam. Dengan kata lain, cara-cara yang digunakan oleh TNI dan GAM merupakan hal-hal yang ditentang oleh hukum Islam. Karena itu, kelompok ini tidak mendukung kedua pihak yang sedang bertikai. Bagi mereka, pelaksanaan syariat Islam secara kaffah merupakan jawaban terhadap konflik Aceh sekarang. Hingga sekarang belum ada fatwa dari mengenai status korban yang dibunuh oleh pihak GAM selama konflik.

Kesembilan, kelompok seniman. Harus diakui, saat pencabutan DOM, seniman Aceh mulai menemukan momennya dalam mengekspresi seni mereka. Bahkan, sejak tahun 1998-2003, kaset dan vcd yang dinyanyikan oleh artis local Aceh sangat marak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa selama DOM, rakyat Aceh jarang sekali mendapatkan hiburan. Kalau pun ada, itu hanya dilakukan untuk "kepentingan" aparat yang sedang bertugas di Aceh. Momen pasca-DOM dipandang sebagai *booming* kaset Aceh, mulai lagu, tarian, sampai kepada *cagok* (lawak) Aceh (*Apa Lambak*, *Apa Kaplouk*, *Beygon*). Hanya saja, dari kaset dan vcd itu, mereka sering "menggugat" perlakuan pemerintah. Hampir setiap kaset sering dijumpai lirik dan lagu yang bernuansa "protes" terhadap situasi yang tidak menentu.

Secara garis besar lirik dan lagu penyanyi Aceh dapat dibagi ke dalam beberapa aspek. Pertama, isi dan lirik yang "menggugat" perlakuan ABRI semasa DOM. Bila didengar lirik dan lagunya akan membuat merinding bulu kuduk. Kaset *nyawonk* merupakah hasil karya seniman Aceh yang "menggugat" kekejaman aparat selama DOM.

Kedua, isi dan lirik yang "memaparkan" bagaimana penderitaan yang dialami oleh janda, anak yatim, dan para orang tua. Berikut adalah salah satu petikan isi lagu yang dinyanyikan oleh penyanyi Aceh, Rafly:

Bahasa Aceh	**Terjemahan**
Deungo loen kisah saboh riwayat *Kisah baroe that di Aceh Raya* *Lam karu Aceh…Aceh* *Timu ngoen Barat* *Di saboh teumpat…tempat meuno calitra*	Dengarkan saya kisahkan satu cerita Kisah baru sekali di Aceh Besar Dalam huru-haru Aceh…Aceh Timur dan Barat Di satu tempat…tempat begini ceritanya
Nasidroe aneuk di moe si at at *Lam jeut jeut saat…saat dua ngoen poma* *Di tanyonk bak ma…bak ma…* *Ayah jinoe pat hai jinoe pat* *Uloen rindu that rindu that keuneuk eu rupa*	Ada anak yang selalu menangis Setiap saat…saat dengan bunda Dia bertanya sama bunda…bunda… Ayahanda sekarang di mana Saya rindu sekali rindu sekali mau lihat wajahnya
Nyoe mantong udep meupat alamat *Uloen jak seutot…jak seutot 'oeh wate raya* *Nyoe ka meuninggai …meuninggai* *Uloen jak siat…jak siat loen baca doa*	Kalau masih hidup, ada alamat Saya akan mencari…mencari saat hari raya Kalau sudah meninggal…meningal Semoga ada kuburannya ya kuburannya Saya datangi sekejap..untuk membaca doa
Hudep di poma 'oeh tan lee ayah *Loen jak tueng upah..tueng upah* *Loen bie bu gata* *Kanasib tanyoe…geutanyoe kheundak bak Allah bak Allah*	Hidup bunda saat ayahanda tidak lagi Saya bekerja..bekerja Untuk memberi makan kamu Sudah nasib kita…kita kehendak dari Allah dari Allah
Seuot lee poma aneuk meu…tuwah *Kheundak bak Allah…bak Allah geutanyoe saba…* *Bek putoh asa…hai asa cobaan Allah.. Ya Allah* *Sabar ngeon tabah ngeon tabah dudoe bahagia*	Jawab bunda wahai anak yang mulia Kehendak dari Allah…dari Allah kita [harus] sabar Jangan putus asa…hai asa cobaan Allah… Ya Allah Sabar dan tabah wahai anak yang mulia

Talakee doa ka nibak Allah *Ubee musibah…musibah bek trouh teuka* *Aceh beu aman…beu aman* *Bek lee roe darah…roe…darah* *Seuramoe meukah beukong agama*	Minta doa sama Allah Semoga semua musibah…musibah jangan datang lagi Semoga Aceh aman…semoga aman Jangan ada lagi kuncuran darah…darah Serambi Mekkah semoga kuat agama

Kesepuluh, kelompok masyarakat Aceh yang berada di luar Aceh, tetapi masih menetap di Indonesia. Sejauh ini, tingkat diaspora rakyat Aceh memang sangat tinggi. Masyarakat Aceh terdapat di hampir seluruh propinsi Indonsia. Mereka bahkan mendirikan organisasi yang berusaha untuk mengikat jalinan silaturrahmi. Dalam bingkai organisasi atau lazimnya yayasan, mereka "membantu" Aceh. Di tengah-tengah mereka juga ditemukan beragama sub-kelompok yang antar satu sama lain berbeda persepsi tentang Aceh. Perbedaan persepsi ini tentu saja dipicu oleh motif mereka berdiaspora. Untuk itu, saya akan membagai beberapa sub-kelompok masyarakat di luar Aceh. Kendati agak sama dengan kelompok yang ada di Aceh, namun varian berikut ini sangat berbeda dengan mereka yang masih menetap di Aceh.

(1) *Kelompok pelarian saat perang Cumbok*. Kelompok masyarakat ini merupakan mereka yang lari akibat "revolusi sosial" di Aceh antara kelompok ulama dan *uleebalang* (kelompok ini masih menggunakan gelar kebangsawanan yaitu *Teuku*). Sepanjang sejarah Aceh, hubungan antara ulama dan *uleebalang* memang jarang harmonis. Dapat dipastikan dalam beberapa episode perjuangan rakyat Aceh, ulama dan *uleebalang* selalu dipicu oleh persoalan sosial dan politis.[21] Puncak konflik atau persaingan mereka adalah ketika terjadi peristiwa Cumbok di mana banyak sekali terjadi pembunuhan terhadap para *uleebalang*.[22] Sebagian mereka yang selamat kemudian "lari" dari Aceh. Selanjutnya, mereka beranak pinak di luar Aceh dan cerita mengenai "peristiwa Cumbok" membekas dalam benak mereka. Karena itu, saat Aceh sedang dilanda konflik, kelompok ini tidak begitu mempersoalkannya. Sebab, menurut kelompok ini, apa yang dialami oleh rakyat Aceh sekarang

[21] M. Masyhur Amin, "Kedudukan Kelompok Elite Aceh Dalam Perspektif Sejarah," in *Kelompok Elit Dan Hubungan Sosial Di Pedesaan*, ed. Alfian (Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988). 14-39.

[22] Lihat juga Taufik Abdullah, *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia* (Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1996). 180.

merupakan akibat "ulah" sendiri. Kelompok masyarakat ini, memang agak sulit dipantau, mengingat mereka telah berbaur dalam masyarakat biasa. Akan tetapi, jangan coba-coba mengajak mereka diskusi tentang Aceh, sebab rakyat Aceh, khususnya ulama, belum "membersihkan" nama baik *indatu* mereka.

(2) *Kelompok pelaku ekonomi (bisnis)*. Kelompok ini adalah para pelaku bisnis yang sudah cukup berhasil di luar Aceh. Mereka memang bukan berasal dari kelompok bangsawan, tetapi kelompok yang memang memulai karir sebagai pelaku bisnis. Harus diakui, jaringan bisnis pengusaha dari Aceh memang sedang mengalami kemajuan yang amat pesat. Kelompok ini memang tidak memperjuangkan adanya rasa aman bagi Aceh. Sebab, bagi mereka apa yang telah mereka dapatkan sekarang, sudah lebih dari cukup. Namun agar tidak terkesan *cuek*, kelompok ini pun sering menyuarakan penderitaan rakyat Aceh. Akan tetapi, "suara" mereka tentu saja tidak boleh begitu "keras" mengingat, jaringan bisnis mereka akan tertimpa musibah. Dalam konteks ini, dapat dipahami, jika pelaku bisnis ini memang agak sulit memahami dan menyelesaikan konflik Aceh. Sebab, jaringan bisnis mereka juga memiliki keterkaitan dengan para "pemain" bisnis pada masa Orde Baru. Artinya, berani menyuarakan konflik Aceh, sama saja, dengan menghancurkan bisnis mereka sendiri.

(3) *Kelompok bekerja sebagai PNS*. Kelompok ini adalah abdi pemerintah yang sama sekali tidak akan memihak kepada perjuangan rakyat Aceh. Sebab, mereka telah hidup di luar Aceh selama puluhan tahun. Namun mereka juga ikut prihatin, sebab famili mereka berada di Aceh. Bagi yang telah memiliki "uang lebih" kebiasaan mengusung famili ke luar Aceh merupakan salah satu jalan terbaik untuk menghindari konflik di Aceh. Kelompok PNS ini memang tidak menunjukkan sikap apapun dalam konflik Aceh. Sebab, selain terdesak oleh kebutuhan hidup yang tinggi, mereka hanya mengkonsumsi berita Aceh melalui surat kabar dan televisi yang telah mengalami distorsi.

(4) *Kelompok yang memang suka merantau*. Kebiasaan rakyat Aceh merantau memang telah dikenal dalam lintasan sejarah bangsa ini. Mereka yang merantau memang bukan karena konflik, namun karena kebiasaan masyarakat setempat yang suka berhijrah. Mereka kemudian menjadi "orang sukses" di luar daerah. Salah satu pekerjaan yang mereka tekuni adalah perdagangan mulai yang paling halal sampai paling haram (ganja). Biasanya, kelompok perantau ini mudik saat lebaran untuk bertemu dengan keluarga. Namun, jika mereka tidak punya kesempatan pulang, akhirnya yang pulang adalah uang mereka yang merupakan hasil jerih payah selama merantau. Bagi mereka yang pro-

GAM, uang hasil dari merantau ini pun disumbang untuk dana perjuangan. Di beberapa propinsi di Indonesia, kelompok perantau ini memang berdomisili secara berkelompok dan "menguasai" beberapa tempat bisnis tertentu. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berprofesi sebagai bandar ganja di pulau Jawa.

(5) *Kelompok ilmuwan*. Kelompok ini memang tidak banyak, akan tetapi mereka tersebar di beberapa kampus terkemuka. Kelompok ini memang tidak punya suara yang begitu "menyentak" pemerintah. Sebab mereka sendiri ilmuwan yang tidak mau "terjebak" dalam konflik Aceh yang penuh kepentingan. Karena itu, kelompok ini lebih sering menjadi narasumber dan peneliti untuk konflik Aceh. Namun demikian, suara mereka juga masih "tumpul" untuk menyelesaikan konflik Aceh. Selama pasca-DOM, kelompok ilmuwan di luar Aceh memang terlibat dalam berbagai kegiatan untuk *recovery* Aceh, seperti lokakarya, seminar, workshop, dan penelitian. Mereka memang jarang "disentuh" oleh kelompok GAM. Hal ini disebabkan oleh, selain GAM sendiri tidak "tertarik" dengan kelompok ilmuwan, kelompok ini juga mempunyai doktrin tersendiri dari Hasan di Tiro.

(6) *Kelompok politikus.* Dalam buku *Islam Historis*, saya telah membagi tipologi elit politik yang berkenaan dengan kasus Aceh di mana para elit politik dapat dibagi ke dalam empat golongan. (i) ada yang mendukung sepenuhnya dan secara lantang mensuarakan kehendak rakyat Aceh. Namun terkadang usaha mereka kandas di tengah jalan. Ada yang diculik, dibunuh dan dibantai. Oleh sebab itu, upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah Aceh tidak pernah terselesaikan. (ii) ada yang mendukung tapi tidak memperlihatkan dukungannya. Biasanya dukungan tersebut muncul ketika menyimak berita tentang Aceh. Kelompok ini biasanya sangat dekat dengan orang Aceh, tapi tidak punya "kuasa" dalam pengambilan keputusan politik. (iii) ada yang tidak mendukung sepenuhnya. Kalangan ini secara terang-terangan memperlihatkan ketidaksukaan pada rakyat Aceh. Mereka ada yang terdiri dari orang Aceh dan bukan orang Aceh. Orang Aceh yang dimaksud adalah mereka yang punya "dendam sejarah" dan telah menikmati hasil keringatnya yang tidak mau "diganggu". Sedangkan orang luar Aceh merupakan orang-orang yang punya kepentingan di Aceh baik secara politik maupun ekonomi. Nampaknya faktor terakhir lebih dominan ketimbang faktor pertama. (iv) ada juga yang tidak mendukung penyelesaian kasus Aceh, namun tidak memperlihatkan ketidakinginannya. Mereka cenderung bermain di belakang layar. Tujuan yang hendak dicapai, adalah sama dengan kelompok ketiga, tapi mereka punya

pilihan lain jika keinginan mereka tidak tercapai. Atau dengan kata lain, jika perjuangan rakyat Aceh berhasil, maka mereka akan ke pilihan lain.[23]

(7) *Kelompok keluarga militer*. Kelompok ini memang tidak begitu terpengaruh oleh ekses pasca-DOM. Namun masukan-masukan dari kelompok ini cukup diperhitungkan oleh TNI/POLRI dalam upaya penyelesaian konflik Aceh. Mereka memang menetap di luar Aceh, namun pengaruh mereka bagi menciptakan image Aceh cukup menjadikan alasan tersendiri bagi TNI untuk menempatkan pasukannya di Aceh. Karena itu, pernyataan Djali Yusuf seperti ini perlu mendapat perhatian, ketika dia menjawab apakah ada keluarga besarnya yang terlibat ikut GAM:

> "Terus terang, saya tidak begitu mengenal keluarga besar saya. Yang saya kenal hanya yang dekat betul dengan orang tua saya, adiknya Bapak atau abangnya. Apalagi saya ini jarang pulang kampung. Mungkin bisa saja ada, tetapi saya tidak pernah tahu."[24]

Dari pernyataan di atas mengindikasikan bahwa jaringan keluarga besar seorang yang berbintang pun, tidak akan lepas dari pengaruh GAM. Karena itu, kelompok keluarga militer akan terus waspada dengan situasi Aceh. Sebab, setelah dilacak tidak sedikit keluarga militer yang punya "hubungan khusus" dengan GAM.

Kesebelas, kelompok masyarakat Aceh yang berada di luar Aceh, tetapi masih menetap di luar negeri. Sebenarnya kelompok masyarakat Aceh di luar negeri dapat dapat dipetakan menjadi beberapa kelompok kecil. Namun secara garis besar mereka adalah kelompok masyarakat Aceh yang tinggal di luar negeri karena beberapa alasan seperti konflik, merantau, studi, bekeluarga, dan bekerja di beberapa negara. Hingga saat ini, diaspora orang Aceh masih bisa dijumpai di seluruh dunia, namun secara umum, Malaysia agaknya masih menempati urutan pertama. Walaupun tidak ada data, negara jiran ini menjadi target orang Aceh tidak hanya mencari harta, tetapi juga melakukan konsolidasi perjuangan. Karena itu, masyarakat Aceh di luar negeri masih memainkan peran yang cukup signifikan.

Keduabelas, kelompok etnis Cina.[25] Sering saya ditanyai "mengapa orang Jawa diusir dari Aceh?" "Apakah orang Aceh membenci orang dari luar daerah?" Terkadang saya bingung memberikan jawaban terhadap pertanyaan seperti itu. Namun, saya sering mencontohkan bahwa kalau memang orang Aceh anti terhadap

---

[23] Bustamam-Ahmad, *Islam Historis: Dinamika Studi Islam Di Indonesia*.. h. 290.

[24] Djali Yusuf, GAM Akan Lumpuh, h. 48.

[25] Mengenai etnik Cina di Aceh, lihat A. Rani Usman, *Etnis Cina Perantauan Di Aceh* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009).

orang luar, mengapa etnis Cina tidak pernah terdengar melakukan eksodus seperti bulan Mei 1998 di Jakarta. Bahkan, di saat perberlakuan DOM dan Pasca-DOM, kelompok etnis Cina masih banyak ditemui di Aceh. Pada saat anak-anak orang Aceh disekolahkan di luar Aceh (Medan, Jakarta, Yogyakarta), anak-anak etnis-Cina masih sekolah di Aceh. Harus diakui bahwa kelompok etnis-Cina sangat menghormati tradisi Aceh. Jika dibandingkan dengan suku-Jawa, etnis Cina sangat diterima di Aceh. Selepas pencabutan DOM, kelompok ini memang jarang mengeluh. Mereka masih menjalankan aktivitas bisnis mereka di Aceh. Beberapa tokoh dan warung makan etnis-Cina, masih ramai di kunjungi oleh pembeli. Mereka tampaknya, tidak begitu peduli dengan situasi Aceh. Sebab kepentingan mereka hanya satu, yaitu bisnis.

Dalam salah satu diskusi dengan guru saya, beliau memang "menggugat" bahwa yang paling bersalah dalam konflik Aceh adalah rakyat Aceh sendiri. Sebab, rakyat Aceh tidak pernah sepakat duduk semeja dalam satu forum menentukan sikap. Jika rakyat Aceh sudah bersatu, maka TNI dan TNA itu tidak ada "apa-apanya." Kemudian dia mengatakan bahwa kesalahan ini yang dimanfaatkan oleh pihak lain untuk terus menjaga agar konflik Aceh terus berlanjut. Guru saya ini memang bukan orang Aceh. Dia juga berasal dari daerah pesisir di mana tingkat "basa-basi" merupakan hal yang paling "tidak disukai." Dia hanya mengatakan, bahwa yang dapat menyelesaikan konflik Aceh adalah rakyat Aceh sendiri. Dengan kata lain, jika rakyat Aceh ingin merdeka atau tetap dalam NKRI, maka pemerintah harus setuju.

Guru saya memang tidak pernah ke Aceh atau setidaknya, memahami polarisasi masyarakat Aceh sebagaimana saya ketengahkan di atas. Karena itu, saya sangat menghormati, jika dia menyalahkan rakyat Aceh yang tidak pernah punya sikap "satu suara" dalam menghadapi konflik daerah tersebut. Bahkan dalam beberapa diskusi *milist* (*mailing list*), persoalan yang paling krusial adalah sikap rakyat Aceh sendiri yang tidak pernah satu kata, satu hati, dan satu tujuan. Paling itu, saya harus menjelaskan, apakah benar rakyat Aceh atau setidaknya sebagian mereka tidak pernah punya inisiatif untuk memberikan kontribusi mereka terhadap kampung halaman mereka.

Untuk memulai bagian ini, saya tertarik untuk mengutip beberapa penggal isi isi surat Ahmad Farhan Hamid (Anggota DPR/RI dari Fraksi Reformasi)[26] kepada

[26]Tentang Ahmad Farhan Hamid, baca F. Harianto Santoso, ed. *Wajah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 1999* (Jakarta: Kompas,2000), h. 391.

alm. Shafwan Idris[27] (Rektor IAIN Ar-Raniry yang ditembak pada 16 September 2000). Dalam surat tersebut, Hamid menulis:

> Dalam rancangan UU [draft Rancangan Undang-Undang Otonomi Khusus bagi Aceh] tidak pengaturan tentang pemerintahan di tingkat II, Kecamatan maupun desa, sehingga dan keleluasaan DPRD-I mengaturnya dalam bentuk perda atau Kanun Aceh.
>
> Istilah-Istilah pemerintahan lokal dimasukkan untuk mengadopsi kebutuhan politik masyarakat.
>
> Makna berdaulat (dalam istilah Negeri Aceh Berdaulat) adalah kekuasaan pemerintah Aceh untuk membuat peraturan yag bersifat internal dalam bentuk Perda atau *Kanun Aceh* (sebaliknya kata ini diharapkan memberi pengaruh yang signifikan bagi 'kelegaan' politik masyarakat). Istilah lain juha boleh digunakan, misalnya Naggroe Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam, dls. Ada kesan ditengah masyarakat [?] istilah 'Otonomi' agak sukar 'dipasarkan'.
>
> Kiranya, Pak Safwan dapat berkontribusi banyak dalam menyiapkan rancangan UU ini dengan tetap mengedepankan keleluasaan bagi pemerintah Aceh dalam pengaturan pemerintah lokal, keadilan hukum-sosial-ekonomi bagi masyarakat Aceh nantinya.
>
> Setelah saling melengkapi di antara kelompok masyarakat, 'mungkin' dalam waktu singkat dapat kita sosialisasikan kepada pihak lain untuk mendapatkan masukan-masukan yang belum terpikirkan oleh kita.[28]

Demikianlah kilas balik penggalan Aceh yang saya pahami sebelum terjadinya Tsunami di Aceh pada bulan Desember 2004. Namun sebelum itu, Aceh juga ditimpa bencana besar yaitu wafatnya dua sarjana yang menjadi simbol dunia pendidikan di Aceh yaitu Safwan Idris dan Dayan Dawood. Kedua tokoh ditembak dari jarak dekat. Musibah ini sangat menyentak masyarakat dan mengingatkan saya bahwa ilmuwan di Aceh memang selalu menjadi sasaran empuk. Logika hukum tidak dipakai, namun yang terjadi adalah logika hukum rimba. Setelah Tsunami, rumah Dayan Dawood malah disewakan kepada salah satu lembaga PBB dalam bidang pangan. Adapun keluarga Shafwan Idris hengkang dari Aceh, karena tidak sanggup lagi menahan rasa sesak di dalam dada. Inilah potret wajah Aceh.

---

[27] Tentang Shafwan Idris, baca Amirul Hadi, ed. *Kearifan Yang Terganjal: Shafwan Idris & Intelektual Aceh* (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2002).

[28] Surat Pribadi Ahmad Farhan Hamid kepada Shafwan Idris, tertanggal 30 Desember 1999.

Bencana yang menimpa Aceh pada akhir tahun 2004 telah menyebabkan Aceh harus menangis selama berbulan-bulan. Hari ketiga saya sampai di Aceh. Saat itu saya naik bis Pelangi dari Medan menuju Banda Aceh dengan harapan bisa bertemu dengan keluarga. Dalam bus tersebut penuh sesak oleh penumpang. Dari semua isi penumpang tersebut, saya hanya membawa satu kopor baju dan dua kaleng susu untuk anak saya. Harapan saya adalah saya masih bisa mendengar tangisan anak saya, walaupun tidak tahu di mana mereka. Dari perjalanan ini saya kemudian mengingat kembali bahwa beberapa tahun yang lalu saya pernah bergumam dengan teman saya bahwa bagaimana membangun Aceh? Kami kemudian berdebat bagaimana kalau suku bangsa Aceh ini dihabiskan satu periode saja, kemudian muncul generasi baru yang akan mengurus Aceh. Gumangan ini mengingatkan saya beberapa tahun sebelumnya yaitu tentang air yang melimpah ke depan rumah paman saya di Kahju. Di situ saya sempat berdiri ketika bersilaturrahmi ke rumah dia, bahwa kalau air yang cukup banyak datang, pasti satu kampung ini akan habis, mengingat Kahju adalah desa yang paling dekat dengan bibir pantai. Dari ingatan-ingatan dalam bis ini kemudian saya berkesimpulan bagaimana seandainya saya tidak membayangkan hal-hal seperti itu sebelumnya.

Jadi ketika jam 4 pagi sampai di Banda Aceh, saya hanya membayangkan bahwa ini hanya musibah kecil. Namun ketika menginjak kaki, suasana persis seperti kiamat. Lumpur dan mayat di mana-mana. Semua gelap gulita. Dari situ kemudian saya mencoba mencari keluarga saya. Dan, *alhamdulillah* semuanya selamat, hanya paman dan dua anaknya yang hanyut dibawa oleh air. Setelah saya menjumpai keluarga saya yang selamat. Saya kemudian sempat mencoba jalan-jalan di Banda Aceh sambil melihat mayat bergelimpangan di mana-mana. Saat itu, saya tidak memiliki apapun, kecuali tidak berbuat apa-apa. Kemudian, saya diajak oleh M. Adli Abdullah untuk membantu atau mengkoordinir bantuan ke Aceh. Namun, perhatian saya ternyata bukan kepada korban Tsunami sedikitpun. Saya hanya tertuju pada gelombang manusia yang datang ke Aceh secara mendadak dan sangat tidak terorganisir. Pada hari ketiga Tsunami, saya sempat duduk dengan beberapa ilmuwan asing di kamp PBB di mana kami masih sempat bergurau dengan penuh canda sang peneliti ini mengatakan bahwa *akan ada pemerintahan baru di Aceh*. Inilah kata kunci yang saya dengar dan kemudian saya berharap ini akan menjadi kejadian. Kejadian Tsunami yang terjadi hanya beberapa menit, namun meninggalkan kesan yang amat luar biasa bagi rakyat Aceh.

Saat itu pula warga asing yang datang ke Aceh secara berduyun-duyun. Lapangan terbang sesak. Sudut kampung penuh dengan tenda. Mobil bantuan berkeliaran di mana-mana. Semuanya bertujuan untuk membantu Aceh. Lalu,

saya pun mencoba melihat semua sisi-sisi kota Banda Aceh dan Aceh besar untuk melihat bahwa Aceh benar akan menjadi Kota Baru atau akan ada *pemerintahan baru* pasca-Tsunami. Di tengah-tengah mengalir deras bantuan ke Aceh, rakyat Aceh kemudian dikejutkan dengan sebuah gelombang yang cukup dahsyat yaitu yang bernama bantuan. Istilah yang paling sering kita dengar adalah *bantuan kemanusiaan*. Di mana-mana orang memberikan bantuan. Saya sendiri dengan suka rela membantu salah satu perusahan dari Perancis, tanpa bayaran. Saya menjadi sopir mereka. Saya sendiri tidak pernah mau tahu berapa gaji yang mereka dapatkan dari musibah yang mendera di Aceh.

Saat itu, begitu mudahnya menggapai duit ratusan dollar dalam satu minggu. Namun, saya tidak sempat menikmati berkah Tsunami ini, karena saya harus hengkang ke Thailand untuk menjadi staf pengajar di Walailak University.[29] Namun, berita tentang Aceh saya abaikan. Sebab saya menyadari bahwa Aceh sudah dikuasai dan dikooptasi atas nama *bantuan kemanusiaan*. Selintingan yang saya dengar adalah pemerintah membuat satu lembaga yang bernama BRR yang agaknya bertujuan untuk mengkoordinir segala bantuan yang datang ke Aceh dari berbagai sumber bantuan dari negara-negara yang ingin membantu Aceh. Alhasil, Aceh saya dengar dari Thailand telah menjadi ladang uang yang amat luar biasa. Beberapa kawan saya malah mengajak saya pulang ke Aceh untuk bekerja di NGO atau lembaga-lembaga asing. Paling tidak, katanya, satu bulan saya bisa mendapatkan uang puluhan juta rupiah. Inilah berkah Tsunami.

Di tengah musibah yang melanda Aceh saat itu, saya benar-benar tidak menyadari bahwa seting masyarakat Aceh berubah total. Struktur masyarakat, seperti yang saya bayangkan sebelum Tsunami berubah total. Banyak orang kaya mendadak. Biasanya orang bisa beli mobil mewah sesuai dengan umur dan karir yang agak senior, namun setelah Tsunami, tidak sedikit anak muda yang mulai memiliki mobil mewah dan gaji yang cukup aduhai. Revolusi ini ternyata meninggalkan kesan yang cukup mendalam, karena tidak sempat melihat dari jarak dekat bagaimana proses ini berlangsung dalam waktu yang cukup singkat.

Jika air Tsunami membawa berkah, namun banjir uang ternyata membawa petaka bagi masyarakat Aceh. Konflik mulai muncul. Dari konflik karena bantuan hingga konflik kepentingan sang donor di Aceh. Tidak sedikit orang yang mengambil kesempatan di dalam kesempitan ini. Rumah mewah di Banda Aceh disulap menjadi kantor. Orang-orang kaya di Banda Aceh, rela menggadaikan surga

[29] Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Putra Aceh Di Nanggroe Budha," *Aceh Magazine*, July 2007.

mereka kepada pihak asing yang datang atas nama *bantuan kemanusian.* Rumah mewah yang tadinya tempat berkumpul keluarga, diubah menjadi tempat rapat dan bersemayamnya berbagai kepentingan para pihak yang datang ke Aceh. Kantor pemerintah Aceh pun harus direlakan kepada pihak asing, atas nama bantuan kemanusiaan. Intinya, atas nama *bantuan kemanusiaan*, rakyat Aceh benar-benar gagap dan gempita dengan uang. Dalam hal ini, beberapa artikel yang dimuat dalam buku ini mencerminkan bagaimana pandangan saya terhadap Aceh, ketika melihat Aceh dari jarak jauh, bukan jarak dekat.

Keinginan untuk menulis tentang Aceh semakin muncul, ketika pada bulan Oktober 2006, saya pulang ke Aceh untuk melakukan penelitian doktoral di Australia. Saya melihat mobil mewah banyak sekali di Aceh. Rumah mewah yang susah sekali ditebak siapa pemiliknya. Lalu, belum lagi wajah-wajah wanita asing yang memakai kerudung. Mereka persis seperti "malaikat kecil" yang datang dengan penuh janji. Pesawat terbang penuh dengan wanita yang memakai kerudung. Ketika berada di bandara Sultan Iskandar Muda, beberapa penumpang wanita memakai kerudung, namun begitu sampai di dalam pesawat mereka langsung membukanya. Bahkan beberapa wanita yang saya lihat di Jakarta yang satu pesawat dengan saya, malah mengambil kerudung dan jilbab mereka untuk disimpan dan baju mereka kemudian beralih menjadi model metropolis.

Dalam benak saya, mereka yang datang atas nama *bantuan kemanusian* ternyata tidak kalah konyol dengan orang Aceh. Mereka rela berdesak-desakan ke Aceh untuk mengais rezeki kemudian menyalin diri mereka menjadi muslimah yang baik. Di Aceh mereka bekerja dan hidup dengan surga orang Aceh. Lalu sampai di luar Aceh, mereka kembali membuka salinan 'pakaian' untuk kembali menjadi diri mereka yang sebenarya. Demikian pula, para aktivis Aceh, ketika saya sampai di Aceh, mereka tidak lagi sama dengan aktivis yang saya jumpai pada tahun 1999. Pada akhir tahun 1998, saya mencoba membuka jalan dengan mendekati pihak GAM di salah satu hutan di Aceh Utara. Kami dengan beberapa aktivis yang sekarang sudah terkenal mencoba berdialog dengan GAM. Lalu, di situ yang muncul adalah kesepakatan bersama untuk mencari penyelesaian tentang Aceh secara baik. Waktu itu, para petinggi GAM sulit sekali dijumpai, kecuali kalau tidak ada kepercayaan antara satu sama lain.

Mereka pun dengan penuh curiga menatap kami. Namun, saya katakan bahwa jika Anda para petinggi GAM melupakan mahasiswa, maka perjuangan Anda betul-betul akan berakhir seperti apa yang dilakukan oleh Tgk. Hasan di Tiro, yaitu hanya berani menggelorakan perjuangan, namun tidak pernah punya ujung. Saat itu, beberapa aktivis inilah yang membuka jalan untuk mencari format

bagaimana menyelesaikan konflik Aceh. Bagi beberapa petinggi lapangan GAM, seperti Sofyan Dawood dan beberapa pentolan kombatan saat itu, menasihati kami bahwa yang terpenting kami (mahasiswa) jangan pernah berada di tengah. Salah seorang Juru Bicara GAM menuturkan bahwa: jika kami berada di tengah-tengah, maka kami akan menjadi sasaran empuk bagi kedua belah pihak. Lalu, saya sendiri dihadiahkan selembar bandera GAM dan beberapa dokumen GAM yang berisi pidato-pidato politik Tgk. Hasan di Tiro dan sepak terjang dia di luar negeri dalam mempromosikan Aceh Merdeka. Lengkap sudah perjalanan saya untuk mengenal GAM. Bahkan ada seorang petinggi GAM tingkat *sagoe* (sagi) yang menghadiahkan sepucuk pistol dan lengkap dengan amunisinya. Saya menolak mentah-mentah sebab saya belum tahu cara menggunakannya. Belakangan saya mengetahui bahwa salah seorang yang "memperingatkan" saya saat itu menjadi salah satu tim sukses salah satu partai penguasa dari Jakarta. Ada beberapa anggota GAM yang pernah saya jumpai di tepi hutan, ada yang sudah ditangkap dan juga wafat.

Namun anggapan saya terhadap perjuangan GAM mulai meleset setelah saya membaca beberapa pidato politik dan beberapa aktivitas para petinggi GAM di dalam dan luar negeri. Kesimpulan yang permainan ini ternyata atas nama darah ini hanyalah sebuah sandiwara semata. Hanya saja, di sini sandiwaranya sangat tersusun rapi, hingga panglima-panglima *sagoe* sendiri tidak sempat berpikir tentang hal ini. Sandiwara yang dimaksud adalah ketika dibandingkan dengan pola-pola perjuangan di kawasan lain seperti Thailand Selatan dan Mindano.[30] Sandiwara inilah yang kemudian menghentikan langkah untuk memahami bagaimana konsep kemerdekaan yang diusung oleh GAM. Lalu bagaimana transformasi ideologi keacehan disemai oleh Hasan di Tiro kepada anak muda di Libya pada akhir-akhir tahun 1980-an. Ideologi keacehan yang melekat ini, kemudian luntur dengan fenomena kekerasan demi kekerasan yang dilakukan oleh GAM di kampung-kampung. Sampai saat ini, belum terdengar ada permintaan maaf dari GAM atas perilaku mereka terhadap orang Aceh yang pernah "disekolahkan."

[30] Patricio N. Abinales, *Making Mindanao: Cotabato and Davao in the Formation of the Philippine Nation-State* (Manila: Ateneo De Manila University Press, 2004); Rufa Cagoco-Gulam, "Toward a People-Centered Peace and Development Framework: Some Lessons from Conflict-Affected Communities in Mindanao," *Tambara* 24(2007); Wilfred Magno Torres III, ed. *Rido: Cland Feuding and Conflict Management in Mindanao* (Makati City: The Asia Foundation,2007); Syed Serajul Islam, "The Islamic Independence Movement in Pattani of Thailand and Mindano of the Philippines," *Asian Survey* 38, 5(1998).

Jadi, ketika saya mendengar adanya penandatangan MOU antara GAM dan RI, saya saat itu berada di Thailand. Saya masih sibuk mencari benang kusut konflik di Thailand Selatan.[31] Hingga, saya berpikir bahwa *bagaimana mungkin darah rakyat Aceh hanya bisa diselesaikan oleh dua tanda tangan dari pihak GAM dan RI*? Inilah kemudian yang membuat saya berpikir bahwa konflik Aceh adalah diobati oleh Tsunami. Walaupun ada karya yang mencoba mengupas 'rahasia' di balik dapur damai Aceh,[32] saya masih beranggapan bahwa ini adalah sebuah acara masak memasak tingkat tinggi. Karena itu, setelah Tsunami saya melihat bahwa struktur masyarakat Aceh yang telah berubah secara total bercampur dengan struktur GAM yang berevolusi menjadi 'masyarakat biasa.' Agaknya apa yang terjadi sebelum Tsunami dan sesudah Tsunami adalah sangat berkaitan erat. Ini mungkin juga terkait dengan kelelahan perang yang dialami oleh dua pihak. Namun, pada sisi lain, ada yang menarik untuk melihat perkembangan mutakhir masyarakat Aceh pasca-Tsunami dan Pasca-MOU Helsinki.

Pertama, orang mulai beranggapan bahwa konflik Aceh adaah berkat jasa baik pihak asing atau mereka yang menjadi penengah. Kemudian saya pun melihat bahwa setiap ada isu damai, makruh rasanya orang Aceh untuk tidak menyebut Helsinki atau pihak asing yang telah mendamaikan Aceh. Inilah femonena yang terjadi selama pasca-Tsunami, terkait dengan dengan isu damai dan rekonstruksi Aceh. Bisakah kita bertanya *mengapa pihak asing harus dijadikan pihak yang paling berjasa? Mengapa pula pihak asing selalu dilibatkan dalam penyelesaian konflik Aceh?*

---

[31] Berikut adalah beberapa karya mengenai konflik di Thailand Selatan. Joseph Chinyong Liow, "The Security Situation in Southern Thailand: Toward an Understanding of Domestic and International Dimensions," *Studies in Conflict & Terrorism* 27(2004). 531-48; Wattana Sugunnasil, "Islam, Radicalism, and Violence in Southern Thailand," *Critical Asian Studies* Vol.38, No.1(2006).119-44; Utai Dulyakasem and Lertchai Sirichai, eds., *Knowledge and Conflict Resolution: The Crisis of the Border Region of Southern Thailand* (Nakhon Si Thammarat: School of Liberal Arts, Walailak University, The Asia Foundation, The William and Flora Hewlett Foundation,2005); Imtiyaz Yusuf and Lars Peter Schmidt, eds., *Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand* (Bangkok: Konrad Adenauer Stiftung,2006); Thanet Aphornsuvan, "Origins of Malay Muslim "Separatism" in Southern Thailand," in *Thai South and Malay North: Ethnic Interaction on a Plural Peninsula*, ed. Michael J. Montesano and Patrick Jory (Singapore: NUS Press, 2008).91-123; Astri Suhrke, "Loyalists and Separatists: The Muslim in Southern Thailand," *Asian Survey* 17, no. 3 (1977).237-50; Aurel Croissant, "Unrest in South Thailand: Contours, Causes, and Consequences since 2001," *Contemporary Southeast Asia* 25, no. 1 (2005).21-43.

[32] Otto Syamsuddin Ishak, *Perdamaian Yang Berikhtiar, Yang Menentang: Kronik Perundingan Gam-Ri Di Helsinki 2005* (Banda Aceh: Achehnese Civil Society Task Force, 2008).

Jawaban ini kemudian mengaitkan pemahaman bahwa para petinggi GAM, mulai dari Tgk. Hasan di Tiro, Malek Mahmud, dan Zaini Abdullah adalah "warga asing." Walaupun sehari sebelum wafat, Tgk. Hasan di Tiro telah menjadi warga Indonesia kembali. Sebab, secara logika bagaimana mereka bisa aman berada di luar negeri sambil mengorganisasikan perang di Aceh. Banyak yang mengatakan bahwa mereka pejuang Aceh yang sangat dihormati, sehingga laqab *wali nanggroe* pun dilekatkan pada Tgk. Hasan di Tiro. Pertanyaan krusial adalah mengapa kita (orang Aceh) harus meyakini kalau dia adalah *wali kita*? Ini tentu saja bukan bahan diskusi yang menarik bagi mereka yang sudah menempuh jalur perjuangan melalui pendalaman ideologis. Namun, sebagai peneliti sosial kebudayaan, pasti punya keyakinan bahwa jika pihak asing begitu bersemangat, maka jelas bahwa perang di Aceh juga disebabkan oleh pihak asing, bukan oleh orang Aceh. Dalam hal ini, orang Aceh, baik mereka yang memanggul senjata atau memberikan sebutir telor adalah korban dari rekayasa konflik baik di dalam maupun luar negeri.

Ini mungkin tidak tepat didiskusikan di sini, yaitu manakala sebuah konsep 'kemerdekaan' tidak berasal dari masyarakat bawah, namun berawal dari tidak tercapainya kepentingan beberapa pihak sebagai kelompok minoritas di satu bangsa. Dengan kata lain, konflik di beberapa kawasan di Asia Tenggara,[33] ternyata menyiratkan indikasi kuat bahwa konflik ini bukan dari masyarakat bawah, namun warisan dari penjajah, dan oleh penjajah pula, konflik ini dikelola secara baik dengan pemerintah pusat. Istilah 'dikelola secara baik' bukan bermakna ini dilakukan atas nama kerja sama, namun atas kepentingan bersama-sama dengan mengedepankan konflik sebagai sebuah keharusan. Jadi, ketika GAM menjadi KPA dan menjadi PA (Partai Aceh), maka yang tersirat adalah evolusi identitas ternyata tidak berawal dari kepentingan rakyat bawah, namun dari kepentingan mereka yang di atas.

Kedua, orang mulai menyadari bahwa jika pihak asing pergi dari Aceh, maka konflik dan perang sangat boleh jadi akan terus berlanjut di Aceh. Inilah apa yang saya katakan kapanpun orang Aceh akan terus dicurigai nasionalismenya.[34] Artinya, Aceh akan terus dipandang sebagai lahan konflik untuk memperteguh sebuah konsep kebangsaan negara ini. Jadi, analisa lanjutan yang boleh diangkat di sini

---

[33] Islam, "The Islamic Independence Movement in Pattani of Thailand and Mindano of the Philippines." 441-56; Syed Serajul Islam, *The Politic of Islamic Identity in Southeast Asia* (Singapore: Thomson, 2005).

[34] Diskusi mengenai nasionalisme dapat dibaca dalam Benedict Anderson, *Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia, and the World* (Manila: Ateneo de Manila University Press, 2004).

adalah peran pihak pusat akan terus menjadi kekuatan untuk menghancurkan Aceh secara sistematis. Mungkin ini agak berlebihan! Dalam diskusi kebangsaan, konflik adalah bagian dari upaya negara untuk memperteguh identitas yang diimajinasikan oleh mereka yang memiliki semangat nasionalisme. Karena itu, konflik dan adu domba dan politik Hindia Belanda akan terus ditancapkan di Aceh. ☙

BAB 2

Kunci Membangun dan *Blue Print* Aceh Baru

DALAM bahasa Aceh ada istilah *gunci* yang bermakna alat membuka pintu rumah. Jadi tanpa ada *gunci*, maka jangan harap kita bisa masuk ke dalam satu gedung atau bangunan yang dijaga atau dikawal oleh satu kekuatan. Sejauh pengetahuan saya, *gunci* adalah satu kampung di daerah Sawang, Aceh Utara yang cukup jauh dari hingar bingar urbanisasi. Namun, kampung ini bisa menjadikan satu pemahaman bagi kita untuk membuka dan menguak sejumlah persoalan Aceh saat ini. Bagi saya, Kampung Gunci adalah awal bagaimana kita memahami persoalan Aceh saat ini.

Ada beberapa hikmah dalam kita membuka kemelut persoalan Aceh saat ini, tentu saja dengan melihat sejauh mana kita memahami persoalan yang sedang menimpa Aceh. Artinya, kalau kita bisa memahami persoalan, kita bisa membuka persoalan tersebut dan menyelesaikan dengan cara sebaik mungkin. Dalam hal ini, usaha untuk memahami masalah adalah persoalan yang paling krusial ketika kita mengurai benang kusut pembangunan Aceh. Artinya, harus dilihat dan terus digali dari mana kita memulai membangun Aceh, apakah dengan uang, personal, atau sistem yang cukup kuat.

Kampung Gunci tidak maju karena mereka berpikir cukup maju yaitu masing-masing kelompok masyarakat berjalan pada rotasi kehidupan masing-masing, tanpa harus mencampuri persoalan orang lain. Orang yang memahami peran masing-masing, akan sanggup memperoleh kunci dalam membangun Aceh. Jika

kita paham pada fungsi kita masing-masing, maka kita akan menghormati peran dan fungsi orang lain. Agaknya, kunci memahami fungsi dan peran masing-masing adalah kunci pertama dalam membangun Aceh saat ini.

Kehidupan yang maju dapat diukur bukan hanya dengan kemajuan dalam menjalani kehidupan, namun maju dalam menghasilkan pemikiran-pemikiran sesuai dengan fungsi masing-masing kelompok masyarakat.[1] Dalam arti, kita dikatakan berpikir maju jika kita sanggup memikirkan bahwa kita siap berpikir maju dan siap dengan kemajuan yang kita dapatkan saat ini. Jadi, tidak ada kemajuan yang datang sendiri, tanpa sebuah hasil pemikiran yang matang dan perenungan yang mendalam, tentang makna dari sebuah penyelesaian masalah Aceh. Tegasnya, orang yang bisa memajukan Aceh adalah harus memahami kunci kedua, yaitu mampu dan siap berpikir tentang kemajuan dan tidak mau meninggalkan orang lain yang belum maju.[2]

Karena itu, untuk mencapai kemajuan, ilmu dan pengetahuan adalah prasyarat yang cukup mutlak. Persoalan ini di Aceh bukanlah yang cukup krusial, mengingat sudah sedemikian banyak ilmuwan, namun kemajuan masih menjadi impian. Dalam tradisi masyarakat Gunci, kesahajaan dan kesederhanaan seorang ilmuwan adalah bukti kalau dia bisa menghasilkan satu produk pemikiran. Karena itu, keberhasilan ilmuwan bukan diukur dari seberapa banyak duit yang dia dapatkan, namun dari seberapa banyak produk pemikiran yang dia hasilkan dan mampu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ilmuwan, dengan demikian, dipandang berhasil jika dia punya karya nyata dan bisa menyatakan kalau karya dia diterima dan dijadikan sebagai pedoman dalam membangun sebuah masyarakat.

Dengan begitu, syarat ketiga adalah bagaimana kita bisa memahami ilmu dan fungsinya dalam masyarakat Aceh. Jadi, kalau Aceh ingin dibangun, kehidupan masyarakatnya adalah kehidupan yang penuh dengan ilmu, bukan dengan materi. Sebab ketika ilmu diukur oleh materi, maka ilmu itu boleh jadi akan hilang, sebab materi hanya bisa dijadikan sebagai sandaran bagaimana ilmu berkembang, namun bukan ukuran sebagai sebuah keberhasilan peradaban. Maksudnya, orang yang menghargai ilmu, biasanya jauh dari harga ilmu sendiri, sebab ilmu tidak bisa diukur dengan uang dan materi apapun di bawah langit ini. Dalam hal ini, kita

---

[1] Lihat misalnya karya berikut: Muhammad Iqbal, *The Recontruction of Religious Thought in Islam* (Kuala Lumpur: Master Piece Publication, 2006). Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam and Secularism* (Kuala Lumpur: ISTAC, 1993).

[2] Dalam skala yang lebih besar, pola berpikir ini telah diterapkan di Malaysia dan Singapura, baca Mahathir Mohamad, *Malay Dilemma* (Asia Pacific Press, 1970). Michael D. Barr, *Cultural Politics and Asian Values: The Tepid War* (London dan New York: Routledge Curzon, 2004).

lihat bahwa keberhasilan sebuah masyarakat atau peradaban satu kaum, karena keterlibatan ilmuwan yang tidak berorientasi pada ilmu, sehingga kadang-kadang ilmuwan itu seperti hantu, yakni ada tetapi tidak wujud, hanya orang yang punya daya nalar tinggi yang dapat melihat bagaimana pengaruh ilmu itu dalam sebuah masyarakat.

Ada kehidupan masyarakat Gunci yang lainnya adalah menghargai alam di sekitarnya. Perubahan masyarakat terkait bagaimana mereka menjaga hubungan mereka dengan alam. Jika manusia tidak menghargai alam, maka alam pun tidak akan memberikan manfaatnya kepada masyarakat setempat. Lebih jauh lagi, orang yang duduk di tengah alam dan tidak pernah memikirkan bagaimana menghancurkan alam, biasanya bisa hidup damai. Sebab konflik dalam masyarakat adalah dalam otak mereka, bukan disebabkan oleh ketidakmengertian pada gejala alam. Bencana dan musibah adalah bukti alam tidak mau bersahabat dengan manusia. Sebab itu, alam harus diajak dalam proses damai di Aceh untuk menjaga kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan mereka. Jadi, jika masyarakat Aceh tidak menghargai alam sebagai flora dan fauna, maka sulit bagi mereka untuk bernegosiasi dengan alam sekitar. Semakin kita menyiksa alam, semakin kita tersiksa oleh bencana alam. Logika ini bukan diada-adakan, namun hubungan keseimbangan alam dan manusia adalah kunci yang paling utama dalam menurunkan 'panas bumi' saat ini di dunia. Jika kita lihat alam Gunci masih bersahaja dan masyarakatnya masih tetap seperti sediakala. Bebatuan dan areal persawahan masih tetap hijau. Anak-anak masih bisa mandi di sungai tanpa khawatir racun atau polusi.

Inilah sebenarnya yang diinginkan dalam membangun Aceh yaitu adanya kemesraan kita dengan lingkungan sekitar. Kita harus mengandaikan bahwa alam itu adalah teman, bukan musuh. Kalau kita punya banyak teman, termasuk alam sekitar, maka dengan sendirinya kita mempersedikit musuh di kalangan kita sendiri. Orang yang tinggal di kawasan pedesaan yang hidup dengan penuh kesahajaan biasanya akrab dan sangat menghormati alam flora dan fauna, sehingga bencana bagi mereka adalah hal yang jarang didapatkan. Kemungkinan kita dalam menjaga alam sekitar ini adalah bisa dilakukan dengan cara menghubungkan setiap generasi Aceh untuk sadar bahwa kita perlu menghormati tempat tinggal kita sendiri. Ketika gunung menjadi danau, dan danau tidak bisa memberikan kehidupan, maka hutan menjadi susah. Ketika hutan menjadi lapangan, pepohonan pun terdesak karena tidak bisa hidup dengan tenang. Ketika pepohonan rusak dan resah, maka binatang pun gelisah dan mencari penyebab kerusakan habitat mereka. Manusia adalah target utama. Jadi, musuh kita sebenarnya bukan manusia, tetapi kita menciptakan sikap permusuhan dengan alam sekitar kita, sehingga yang

baik adalah yang buruk terhadap mereka, sementara yang buruk bagi manusia, juga buruk akibatnya bagi alam. Inilah sebabnya kunci membangun Aceh harus mengedepankan penghormatan pada alam sekitar.

Isu pemanasan global adalah wujud kebenciaan dan kegelisahan alam pada kehidupan manusia saat ini. Mereka yang abai dengan alam, juga abai dengan orang disekitar mereka. Mereka yang abai dengan orang sekitar, juga abai pada keluarga mereka, begitulah seterusnya, orang yang abai pada keluarga, juga akan abai pada diri sendiri. Jadi, kunci membangun Aceh harus membuat kita sadar bahwa hubungan kita yaitu persaudaraan dan persekawanan adalah bentuk kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keberbedaan dalam pandangan adalah sesuatu yang lumrah, karena otak manusia diciptakan untuk terus berpikir, sementara kecepatan dalam berpikir, tidaklah sama antara satu sama lain. Dalam hal ini, yang perlu dipahami adalah bagaimana kita memahami orang lain, sebab dengan kita memahami orang lain, kita juga akan memahami diri kita sendiri. Kalau kita hendak membangun Aceh belajar memahami orang lain adalah satu hal yang sangat mutlak untuk dilakukan. Begitu juga kalau kita sudah memahami diri sendiri, maka kita pun tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri, misalnya mengambil yang bukan hak milik kita atau melakukan keburukan atas nama kebaikan bagi nafsu.

Orang kampung memang tidak cerdas atau pandai, namun mereka sangat bijaksana dan paham betul bagaimana mengajari kebijaksanaan pada generasi mereka. Kebijaksanaan harus dibenamkan sejak usia dini dengan tidak memulai sesuatu pekerjaan dengan saling menyalahkan. Jadi, semua proses kebijaksanaan adalah bentuk kontrak sosial yang tidak tertulis, namun mereka paham, karena mereka bisa memahami orang lain dan pada gilirannya bisa memamahi diri mereka sendiri. Kebijaksanaan orang Aceh sudah tertanam dalam benak setiap orang Aceh, karena itu, tidak ada orang Aceh yang tidak bijaksana, kecuali mereka sudah bersekutu dengan perilaku tidak memahami orang lain.

Inilah kunci selanjutnya yakni bagaimana menciptakan kaderisasi atau regenerasi dalam memahami kebijaksanaan ini secara bertahap. Faktor pembangunan tidak bisa hanya dilakukan dengan uang yang melimpah, namun perlu dilakukan dengan cara yang penuh bijaksana. Karena itu, untuk menjadi orang yang bijak adalah bagaimana dia mampu menciptakan orang yang bijak di sekeliling dia.

Jadi, inilah kunci-kunci dasar yang mungkin tidak bisa dikatakan sebagai langkah yang strategis, namun cukup bisa menjadikan semacam alat pembuka pembangunan Aceh yang bertahap. Untuk itu, tidak ada keinginan untuk membuka masalah Aceh di sini, karena jika kita sudah paham masalah dan bisa

membuka kunci-kunci masalah, maka pembangunan Aceh akan berjalan sesuai dengan irama dan rentak keinginan masing-masing hati orang Aceh. Akhirnya, inilah semacam renungan kita bersama bagaimana kita bisa menemukan *Gunci* dalam membangun Aceh saat ini.

Setuju atau tidak setuju, ramai kalangan yang sudah menawarkan konsep Aceh Baru ke publik. Sengaja atau tidak sengaja, siapapun telah ikut meramaikan wacana ini dari berbagai perspektif. Dalam bab ini saya ingin mengulas apa dan bagaimana konsep Aceh Baru tersebut. Pikiran ini sangat instan dan tidak boleh *taken for granted*. Namun apa yang terbenak dalam pikiran adalah sebuah langkah awal untuk membangun Aceh guna keluar dari kemelut yang sangat multidimensi ini, sehingga ada kata akhir dari pembangunan saat.

Yang paling parah dari pembangunan Aceh saat ini adalah tidaknya tujuan yang ingin dicapai, sehingga program-program yang ditawarkan pun tidak bisa menjadi semacam pecut untuk membangun Aceh. Pembangunan Aceh lebih dimaknai dengan seberapa dana yang dihabiskan dan seberapa bangunan yang sudah pernah dibangun selama dalam jangka waktu tertentu. Akibatnya, perputaran roda pembangunan Aceh kemudian hanya berjalan pada persoalan yang sama setiap tahunnya. Keanehan ini memang jarang terjadi di kalangan negara lain yang sedang membangun. Seperti beberapa negara yang baru saja menyelesaikan perang atau baru berbenah. Mereka memiliki tujuan dalam membangun, sehingga setiap uang yang dihabiskan bisa bermakna untuk negaranya. Dan, orang yang mengisi pembangunan pun sadar bahwa mereka begitu ditunggu oleh rakyatnya. Sehingga semakin dia bisa berjasa kepada rakyatnya, semakin bangga dia akan diri dicatat dalam dada rakyatnya. Sebaliknya di Aceh yang muncul adalah sikap untuk melecehkan rakyat Aceh sendiri. Ini bukti bahwa pembangunan bukan ingin mensejahterakan rakyat, namun mensejahterakan siapa yang melayani rakyat. Mereka ibarat raja yang harus dilayani sebelum melayani.

* * *

Dalam bagian ini, saya ingin menawarkan 7 konsep Aceh Baru yang mungkin dapat dijadikan pijakan dalam rangka membangun Tanah Rencong. *Pertama*, manusia tidak boleh menipu manusia. Konsep ini ingin diketengahkan dengan alasan bahwa terlalu banyak sudah penipuan yang terjadi di Aceh yang dilakukan oleh orang Aceh sendiri. Para pengambil kebijakan sejatinya tidak lagi melandasi pemikirannya dari suatu hasil tipu daya, baik yang dilakukan secara individual maupun kolektif.

Asas ini ingin mengatakan bahwa kebiasaan menipu atas nama apapun adalah suatu langkah kemunduran. Untuk mencapai Aceh Baru, konsep manusia tidak boleh menipu manusia adalah jawaban yang paling urgen dan signifikan untuk diimplementasikan oleh siapapun di Aceh.

Kedua, manusia tidak boleh menyiksa manusia, termasuk menyiksa batin, emosi, dan akal. Ini juga yang menjadi persoalan yang mendesak untuk dihilangkan di Aceh saat ini. Penderitaan batin, emosi, dan akal merupakan penyiksaan yang cukup parah dalam peradaban manusia. Di Aceh rakyat sudah begitu menderita batin, emosi, dan akal, baik selama dan sesudah konflik. Akibatanya, rakyat tidak pernah peduli dengan pemerintah. Sebab mereka akan (dan telah) sering disiksa batin, emosi, dan akal pikiran. Mereka selalu berpendapat apa sebenarnya menfaat pembangunan jika mereka selalu disiksa batin, emosi, dan akal pikiran.

Allah sebenarnya telah berjanji apabila manusia ingin mengubah nasibnya, Dia dengan segala kekuasaan yang melekat pada-Nya akan mengubahnya. Inilah kunci yang dapat mengubah nasib suatu kaum manusia. Sebab 'suara Tuhan' adalah suara rakyat. Dalam hal ini, rakyat Aceh sudah terlalu menderita batin, emosi, dan akal pikiran. Mereka terlalu lelah mencari alasan kenapa para pemimpin selalu menyiksa mereka. Setiap mereka protes akibat penyiksaaan tersebut, malah mereka semakin tersiksa, Jadi, jika ingin menuju Aceh Baru, maka perilaku penyiksaan tersebut harus dihilangkan.

Ketiga, manusia tidak boleh menginjak kepala manusia. Konsep ini dimaksudkan bahwa kepala manusia adalah kehormatan yang dimiliki oleh setiap manusia. Di sini tampak bahwa pemimpin tidak menginjak kehormatannya sendiri dan juga rakyat. Ramai pemimpin dan pengambil kebijakan yang selalu menggunakan 'kepala' manusia untuk kepentingan pribadi. Maksudnya, dia naik ke tahta kekusaan setelah memberikan seribu janji kepada rakyat atau masyarakat sekitarnya. Dia mengelabui masyarakat, lantas masyarakat pun bisa 'diinjak' kepala oleh dia dan orang-orang di sekitarnya juga.

Konsep ketiga ini memang sangat abstrak, bahkan sangat rancu. Namun ada keyakinan agar pembaca mampu menangkap apa yang dimaksud dengan 'manusia tidak boleh menginjak kepala manusia.' Dalam tradisi masyarakat Aceh memegang kepala punya beragam makna. Sejak kecil, orang tua selalu menasihati agar berhati-hati memegang kepala orang. Ini membuktikan bahwa jangan 'menginjak' dan 'memegang' kepada orang lain memang merupakan satu larangan dan taboo. Dalam tradisi Aceh Baru, konsep ini yang mulanya sangat rancu, ingin dibumikan supaya setiap orang belajar saling menghormati satu sama lain. Kepala adalah simbol kehormatan bagi manusia. Namun, kepala juga harus ditundukkan sebagai

bentuk kehormatan bagi manusia lainnya. Bahkan, kepala harus menyentuh bumi, sebagai bentuk penyerahan diri kepada Allah.

Keempat, manusia tidak boleh membayar manusia. Konsep ini ingin ditegaskan bahwa manusia memang berhak atas apa yang ada di bumi ini. Sedangkan untuk akhirat adalah bentuk pertanggunganjawaban kepada Allah SWT. Jadi, selama di dunia, Allah sudah memberikan jatah rezeki pada masing-masing individu. Karena itu, jika ada rezeki yang bukan haknya, Allah akan 'menegurnya' baik di dunia maupun di kubur. Dalam tradisi Aceh, perilaku korupsi adalah wajah kita sehari-hari. Kita selalu ingin dibayar atas apa yang bukan hak kita. Kita juga abai dengan teguran Allah di dunia saat ini.

Jadi, manusia tidak boleh membayar manusia adalah sebuah konsep di mana hanya Allah yang bisa membayar setiap apa yang dilakukan di dunia. Janganlah kita meminta lebih atas apa yang bukan hak kita. Inilah inti dari konsep ini. Konsep ini bisa diterapkan dalam seluruh lini kehidupan masyarakat Aceh. Sebab upaya yang kurang sehat, seperti korupsi, calon, *mark-up* adalah bentuk dari upaya menusia membayar manusia yang tidak disukai oleh Tuhan manapun di dunia ini. Aceh baru selayaknya sudah mulai berpikir bagaimana untuk mengembalikan pada konsep hanya Allah yang berhak membayar manusia yang sering dikatakan dengan rezeki. Dengan begitu, manusia tidak perlu membayar manusia atas apa yang bukan haknya (rezeki).

Kelima, manusia tidak bisa menghukum manusia. Ini sebenarnya yang menjadi inti persoalan sosial keagamaan di Aceh saat ini. Manusia berlomba-lomba jadi seperti malaikat atas nama agama. Padahal yang berhak menghukum manusia adalah Allah SWT. Hukuman buatan manusia sering menyebabkan orang lari dari agama atau bahkan takut pada agama Islam. Setiap maksiat yang dilakukan oleh manusia sudah diketahui oleh Allah SWT. Dia yang yang berhak mengampuni atau menghukumnya di dunia, kubur atau di akhirat nanti. Hukuman yang diberikan oleh manusia terkadang malah melabrak aspek-aspek ajaran Islam. Sebab al-Qur'an sendiri bukanlah kitab undang-undang. Dia hanya petunjuk bagi sekalian manusia. Dengan kata lain, proses cambuk yang cukup marak sekarang di Aceh adalah *berlawanan dengan konsep-konsep dan semangat al-Qur'an*. Hukuman model ini bukan berasal dari al-Qur'an di mana mencari orang untuk dihukum. Semua perilaku manusia sudah diketahui oleh Allah. Tugas manusia adalah saling menghormati dan menasihati dan tidak punya hak untuk saling menghukum dan mempengaruhi. Semua kehendak Ilahi memang bukan disuruh diselesaikan oleh manusia. Jadi, manusia tidak berhak menghukum manusia di dunia ini. Sebab yang berhak menghukumnya adalah Allah mulai di dunia, azab kubur, dan akhirat.

Keenam, manusia tidak boleh meremehkan manusia. Jika Allah mau memberikan pahala untuk suatu niat berbuat baik, maka manusia tidak perlu meremehkan manusia lain jika ada yang ingin melakukan amal kebajikan. Dalam tradisi meremehkan ata mencari keganjilan adalah potret kehidupan masyarakat elit maupun 'elit' (ekonomi sulit). Keinginan untuk mengkritik yang disertai dengan tidak adanya penghargaan sama sekali adalah dampak sifat manusia, yang banyak sekali kita jumpai di Aceh, dalam memeremehkan setiap ada upaya baik. Perilaku remeh atau meremehkan sudah begitu menjangkitu kita semua. Setiap ada usaha baik atau niat baik selalu direspon dengan sikap meremehkan.

Akibatnya, energi kita sibuk mencari kesalahan orang lain yang ingin berbuat baik untuk pembangunan Aceh. Sebab itu, sering muncul debat kusir, pada satu persoalan yang dimulai dengan niat baik. Inilah suatu tradisi masyarakat Aceh yang sering dikatakan: *menyoe kon ie leuhop, meunyoe ken lon mandum gob (kon)*. Inilah filosofi yang menyebabkan masyarakat Aceh mundur. Kita terlalu disibukan untuk mencari kesalahan orang lain yang sedang berbuat baik. Aceh Baru, agaknya akan tercapai jika kita mau keluar dari kemelut saling meremehkan. Kita kadang abai dan bahkan tidak terbiasa memberikan pujian atau penghargaan terhadap ada upaya niat baik dari pemimpin dan yang dipimpin (rakyat). Mimpi saya, Aceh Baru akan bersinar manakala seluruh lapisa masyarakat mau saling menghormati dan menghargai satiap usaha baik.

Ketujuh, memperbanyak kawan sambil mempersedikit lawan. Konsep ini memang sudah sering kita dengar, tetapi dalam konteks Aceh, agak sulit mendapat pandangan bahwa memperbanyak teman itu sangat perlu, konseo '*awak gob*', '*awak nyoe*' adalah cermin betapa sulit membuka jaringan bagi orang Aceh dalam pentas global. Karena itu, Aceh Baru adalah di mana rakyat Aceh mulai memperbanyak jaringan (*networking*) guna untuk mensukseskan pembangunan. Saat ini, misalnya, tidak sedikit warga asing yang sedang membantu Aceg. Diharapkan kehadiran mereka akan sedikit menguak kelopak masyarakat Aceh betapa penting perkawanan dalam dunia ini.

Akhirnya, inilah beberapa catatan awal saya tentang bagaimana membangun Aceh Baru. Karena itu, dalam beberapa tahun ke depan, beberapa impian di atas dapat diwujudkan oleh para pemimpin dan masyarakat Aceh pada umumnya. Sebab, tulisan ini akan sangat bermakna, jika ada di antara kita yang mau memulainya untuk menuju Aceh Baru. ☙

BAB 3

Strategi Kebudayaan dalam Membangun Aceh

BAB ini bermaksud untuk membuka diskusi tentang bagaimana peran kebudayaan di Aceh.[1] Hal ini terkait dengan gagasan mantan Wakil Gubernur Aceh Muhammad Nazar menyampaikan ide tentang pentingnya pendidikan dan budaya dalam pembangunan Aceh (*Serambi Indonesia*, 11/04/2010). Ide cemerlang ini patut diapresiasikan, mengingat aset budaya Aceh begitu kaya dalam pembangunan daerah ini. Hanya saja, dalam pertanyaan tersebut, Wagub hanya lebih menitikberatkan pada aspek pendidikan, sehingga persoalan budaya tidak muncul. Bab ini, dengan begitu, ingin bertanya apakah selama ini budaya di Aceh sudah benar menjadi nafas kehidupan rakyat Aceh. Sepertinya persoalan bagaimana menempatkan budaya dalam struktur masyarakat Aceh masih bertahan pada aturan simbolik dan fungsional semata.

Dengan kata lain, budaya belum menjadi sistem berpikir atau pola pikir di Aceh. Budaya dalam arti simbolik dan fungsional dapat kita lihat dari berbagai festival budaya dan sejumlah kegiatan kebudayaan, baik yang dilakukan dari tingkat kampung hingga propinsi. Sistem berpikir dalam budaya adalah kemampuan menyelami makna kebudayaan dari suatu pemikiran yang otentik dan kemampuan mewariskannya pada generasi berikutnya. Budaya dalam arti simbolik terlihat dalam ritual kebudayaan. Simbol-simbol tersebut kemudian difungsikan dalam sebuah aturan atau norma oleh mereka yang memiliki kewenangan dan kekuasaan.

[1] Tentang kebudayaan di Aceh, baca Bustamam-Ahmad, *Acehnologi*. 111-176.

Sehingga yang muncul nilai-nilai substansi kebudayaan tidak terlihat, karena pencapaian simbolik yang diinginkan. Dengan begitu, kita sering mengatakan bahwa kita sudah berbudaya.

Dalam hal ini, budaya dapat juga dipandang sebagai sistem pengetahuan. Ada yang menyebutkan budaya merupakan suatu amalan masyarakat yang diulang-ulang. Pada prinsipnya budaya adalah tata pengetahuan masyarakat tersebut yang dilakukan secara kolektif. Untuk mengukur satu budaya, maka perlu dipahami tingkatan pengetahuan pada masyarakat tersebut. Budaya menjadi sesuatu yang sangat abstrak. Siapapun yang mampu memberikan makna dari setiap budaya, maka di situ baru dipahami tingkat budaya masyarakat tersebut. Sistem makna di sini kemudian diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya sebagai sebuah pengetahuan. Tujuannya untuk memahami bahwa budaya itu dimulai dari bagaimana masyarakat tersebut memahami diri mereka sendiri. Jadi, dalam memahami budaya suatu masyarakat melalui cara bagaimana masyarakat tersebut memandang budaya mereka sendiri.

Budaya sebagai sistem berpikir adalah budaya yang mampu terserap dalam nilai-nilai kehidupan. Dalam budaya Aceh sistem berpikir yang paling terhormat adalah munculnya *hadih maja*. Nasihat tersebut merupakan hasil sistem berpikir yang cukup maju untuk zaman mereka. Sekarang sistem berpikir yang cukup abstrak ini tidak lagi penting, mengingat orang lebih tertarik pada upaya pencerapan budaya secara simbolik. Bahkan *hadih maja* tidak diajarkan di lingkungan pendidikan di Aceh. Alhasil, makna budaya yang diilhami dari ritual budaya itu sendiri tidak tercermin dalam perilaku. Inilah persoalan kebudayaan di Aceh saat ini, terlebih manakala dikaitkan dengan Islam sebagai nafasnya. Sistem berpikir dalam kebudayaan menginginkan seseorang konsisten antara apa yang diucapkan dan diamalkan dan bukan sebaliknya. Di Barat, sistem berpikir ini dikenali dengan moralitas. Sehingga mereka yang tidak sesuai apa yang diucapkan dengan diamalkan cenderung dilihat dari aspek moral, bukan norma.

Dalam sistem berpikir kebudayaan adalah ajakan untuk tidak selalu mengedepankan aspek simbolik atau fungsional semata. Tetapi juga diharapkan orang tersebut tidak mengingkari apa yang seharusnya baik untuk dilakukan. Dalam tradisi Barat dikenal istilah ”apa yang baik untuk dilakukan” dan ”apa yang baik untuk dijadikan.”[2] Kedua konsep ini harus dijawab oleh seseorang, apakah dia beragama atau tidak. Kalau orang memiliki sistem berpikir baik, maka dia tidak akan melakukan hal-hal yang tidak baik, karena pengaruhnya juga tidak bagus.

[2] Lihat kajian ini dalam Taylor, *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*.

Karena di Aceh sistem kebudayaan telah diikat dengan tarikan nafas keagamaan, maka sistem kebudayaannya lebih tinggi dan mulia jika dibandingkan dengan sistem kebudayaan di tempat lain. Karena sistem berpikir ini tidak mendapat perhatian, maka perilaku atau contoh dari hasil berpikirnya pun dapat ditebak pasti ujungnya tidak akan bagus, baik itu secara moral maupun agama. Walaupun upaya untuk menampilkannya sangat indah, baik secara simbolik dan fungsional. Di Aceh hal-hal yang kerap diperdebatkan baik budaya maupun agama tidak pernah mampu memberikan kontribusi yang penting dalam pembangunan Aceh. Karena diskusi tersebut tidak dimulai dari sistem berpikir yang bagus.

Wacana yang sering muncul adalah bukan pada bagaimana pemikiran kebudayaan tersebut muncul. Melainkan apa kewenangan dan kekuasaan seseorang dalam sistem kebudayaan. Di Aceh agaknya persoalan ini tidak penting saat ini. Sistem berpikir kemudian lebih banyak dikesampingkan, karena dianggap tidak akan berhasil dan punya pengaruh seperti pengaruh dari simbol-simbol. Sementara yang selalu dikedepankan adalah hal yang bersifat simbolik.

Dalam tradisi kebudayaan Aceh, para endatu mencoba merumuskan sistem berpikir ini secara filosofis. Mereka mampu memadukan apa yang mereka pikirkan dengan sistem berpikir yang baik, maka mereka dapat meraba apa yang akan terjadi dengan konteks kekinian. Sehingga tidak heran kenapa orang zaman dahulu lebih tajam nalar logikanya dibandingkan dengan orang Aceh saat ini. Nalar berpikir ini sebenarnya dikembangkan di institusi dayah melalui ilmu selama 8 tahun lebih. Di dayah mereka dilatih cara berpikir dan cara mengeluarkan pikiran kepada masyarakat. Mereka yang dilatih nalar berpikir inilah kemudian menjadi tokoh-tokoh agama, walaupun peran mereka pada prinsipnya tidak lari dari persoalan kebudayaan. Nalar berpikir ini sebenarnya berada di atas ideologi, karena dia sifatnya terbuka dan selalu mencari kebaikan di dalamnya. Kalau ideologi, dia pasti tertutup dan sulit untuk diajak berkomunikasi dalam alam berpikir secara filosofis.

Jadi, di dalam membangun Aceh upaya untuk mencari bagaimana sistem berpikir orang Aceh kekinian adalah sangat penting untuk dilakukan. Hemat saya, agaknya belum ada studi di Aceh yang melakukan upaya serius ini. Karena arah kebudayaan di Aceh bukan ditujukan pada pemikiran, melainkan pada upaya-upaya pragmatis dan simbolik. Karena itu, kalau pun kita melihat Festival Kebudayaan di Aceh, yang ada adalah pengulangan ritual kebudayaan dan tidak punya makna sosial sekalipun. Jangan perubahan sistem berpikir, kehidupan sosial kebudayaan pun tidak ada yang berubah. Jadi, sebenarnya kalau diperhatikan secara seksama, ada persoalan yang cukup parah di dalam sistem berpikir masyarakat Aceh saat ini.

Kita tentu tidak ingin orang yang terdepan di dalam kebudayaan malah terdepan di dalam melanggar sistem kebudayaan itu sendiri. Karena itu, yang perlu dilakukan saat ini oleh para budayawan adalah menemukan apa dasar berpikir orang Aceh saat ini di dalam memandang budaya mereka sendiri. Di Malaysia salah satu tokoh yang sangat piawai di dalam mengupas persoalan ini adalah Shahnon Ahmad melalui karyanya *Kesasterawanan Kepolitikan, Kealaman, Kedirian, Kemanusiaan* (1992).[3] Sedangkan di Indonesia dua tokoh yang sangat piawai di dalam menemukan sistem berpikir seperti ini terutama dikaitkan dengan Islam adalah HAMKA melalui karyanya *Lembaga Budi* (2001)[4] dan H.M. Rasjidi melalui karyanya *Strategi Kebudayaan Dan Pembaharuan Pendidikan Nasional* (1980).[5] Salah satu gugatan Rasjidi terhadap Indonesia adalah walaupun hampir 100 % persen orang Indonesia beragama Islam, apakah orang Indonesia mampu berpikir 100 % secara Islam?

Di Aceh yang sulit ditemukan adalah selain tidak ada sistem berpikir orang Aceh, juga tidak ada karya dari budayawan yang mampu merumuskan cara berpikir orang Aceh 100 %. Model dari sistem berpikir inilah yang kemudian menelurkan pemikiran kebudayaan yang sangat otentik. Tentu saja ini bukanlah tugas yang gampang, melainkan diperlukan sebuah studi yang mendalam tentang bagaimana orang Aceh memikirkan diri mereka sendiri saat ini. Lalu kita akan bisa mendefinisikan apakah orang Aceh sekarang hanya mampu memproduksi budaya atau sekadar mengulang budaya *endatu*, namun sistem berpikirnya bukan sistem berpikir berkebudayaan Aceh. ☙

[3] Shahnon Ahmad, *Kesasterawanan Kepolitikan, Kealaman, Kedirian, Kemanusiaan* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992).. Lihat juga Kim Hui Lim, "*Budi* as the Malay Mind: A Philosophical Study of Malay Ways of Reasoning and Emotion in Peribahasa" (Ph.D. Thesis, University of Hamburg, 2003).

[4] HAMKA, *Lembaga Budi* (Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001).

[5] H.M. Rasjidi, *Strategi Kebudayaan Dan Pembaharuan Pendidikan Nasional* (Jakarta: Bulan Bintang, 1980).

BAB 4

Mampukah Orang Aceh Kembali ke Tradisi?

AGAKNYA istilah yang paling tepat untuk menggambarkan orang Aceh sekarang ini adalah gamang, untuk tidak mengatakan *plin plan*. Potret orang Aceh saat ini adalah sama dengan tiga episode gambar *Gam Cantoei* yang selalu menghiasi lembaran koran harian *Serambi Indonesia*. Gambar pertama adalah konteks sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Gambar kedua biasanya berisi tentang 'ide cerdas' *Gam Cantoei* yang seolah-olah inilah yang paling benar untuk menghadapi konteks pada gambar sebelumnya. Sementara gambar ketiga malah menggambarkan kekonyolan yang dilakukan oleh *Gam Cantoei* membuat kita tersenyum.

Tentu saja, saya tidak ingin mengatakan bahwa ketika kita tersenyum, sesungguhnya kita sedang menertawakan diri sendiri. Sebab inilah potret orang Aceh yaitu selalu berpikir seperti *Gam Cantoei.* Gambaran yang berlebihan ini tentu saja sama dengan saya juga menertawakan diri sendiri, ketika menulis tulisan ini. Tujuan utama saya mengupas keterkaitan *Gam Cantoei* dengan potret orang Aceh adalah untuk mengingatkan kembali apakah kita pernah berpikir bagaimana jika kira-kira tampilan *Gam Cantoei* ada empat keeping gambar, bukan tiga yang selalu membuat kita tersenyum. Apakah orang Aceh bisa berpikir dan berbuat secara alternatif, setelah mereka ditertawakan atau mentertawakan diri sendiri. Mungkinkah orang Aceh punya langkah strategis untuk menatap masa depan.

Jadi, kalau kita andaikan, *Gam Cantoei* itu adalah empat keping gambar bukan lagi menjadi 'sindiran halus' bagi kita. Kalau orang Aceh ingin sukses

dalam kehidupan mereka, harus dicari cara apa yang sebaiknya dilakukan untuk 'melengkapi gambar keempat.' Sekarang mari kita buat perhitungan matematik dan sosial, sejauh mana orang Aceh bisa menjadi maju, bermartabat, dan tidak lagi ditertawakan oleh orang lain.

Kalau dihitung dari jumlah orang pintar, baik secara ilmu manapun, agaknya orang Aceh bukanlah orang yang bodoh atau tertinggal dibandingkan suku bangsa lainnya. Jumlah mereka sangat banyak, ini belum lagi ditambah dengan mereka 'orang pintar' (dukun), *tukang meukat ubat* (penjual obat keliling), dan *tukang peh braqah di keude kupi* (orang yang suka berdiskusi di warung kopi). Orang Aceh punya kekuatan untuk mempengaruhi orang lain walaupun mereka sama sekali tidak belajar di perguruan tinggi. Kemampuan ini, kalau diandaikan sama dengan kemampuan orang Yahudi yang jumlah mereka sangat sedikit namun bisa 'menguasai dunia' ini yang dikenal dengan 'Lobby Yahudi.'[1] Kemampuan orang pintar dan 'orang pintar' di Aceh cukup luar biasa dengan demikian. Seorang *penceramah agama* misalnya, bisa berbicara dalam waktu yang cukup lama (3 jam non-stop) di depan masyarakat hingga larut malam. Saat ini, jarang sekali kita menjumpai ada ceramah agama yang bisa lebih tiga jam, kecuali di Aceh. Demikian pula, potret *tukang meukat ubat*, dipinggir jalan, mereka bisa menjaja obatnya walaupun satu macam pil bisa mengobat 16 macam penyakit. Ini merupakan fenomena bagaimana cara orang Aceh bisa meyakinkan orang banyak dalam waktu yang cukup singkat.

Sebab, ketika terjadi modernisai atau globalisasi, Barat, ambil contoh, memerlukan waktu yang cukup lama untuk mempengaruhi satu kelompok masyarakat. Mereka harus membuat studi, kemudian diajukan ke senat, lalu dipublikasikan di media, kemudian dibangun *image.* Setelah itu mereka pun berhasil mempengaruhi satu kelompok masyarakat yang menjadi target mereka. Kemudian mereka pun terkadang melakukan evaluasi setiap tahun terhadap 'apa yang sudah dilakukan dalam mempengaruhi *the others*.'[2]

Di sini perbedaannya adalah, orang Aceh memerlukan waktu 3-4 jam untuk mencapai satu tujuan, sementara orang Barat –jika boleh saya katakan demikian – memerlukan waktu bertahun-tahun untuk 'menaklukkan' satu tradisi yang mereka ubah. Tentu saja tidak ada harapan untuk mengajak orang Aceh bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh orang Barat. Namun kemampuan untuk

---

[1] Robert Dreyfuss, *Devil's Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam* (New York: Metropolitan Books Henry Holt and Company, 2005).

[2] Bustamam-Ahmad, *Satu Dasawarsa the Clash of Civilizations: Membongkar Politik Amerika Di Pentas Dunia*.

mempengaruhi orang lain ada dalam darah orang Aceh. Namun yang perlu dilakukan adalah apakah kemampuan untuk mengubah atau mencapai sebuah tujuan masih menggunakan filsafat *meukat ubat* di pinggir jalan. Setelah orang terpengaruh, mereka bahkan harus melempar obat ke tong sampah dan memaki si penjual obat yang telah membohonginya. Inilah yang disebut dengan *tipu Aceh*, sebuah tradisi yang sudah membumi di kalangan orang Aceh. Bahkan banyak penjual di Aceh yang cukup ahli dalam menjual barangnya, walaupun kadang lebih banyak melakukan pembohongan, mulai dari harga sampai pada mutu barang yang dijual.

Jadi, sebenarnya potensi untuk mempengaruhi orang lain sudah begitu lama muncul di Aceh. Hanya saja, banyak kemampuan ini tidak ditempatkan pada tempat yang seharusnya. Sehingga kemampuan ini kemudian hanya menjadi semacam potret kemunduran bagi orang Aceh sendiri saat ini. Kemampuan untuk mempengaruhi orang lain kemudian menjadi semacam cacat sosial, ketika energi ini diberikan pada hal-hal yang bersifat negatif.

Salah satu kelebihan lainnya yang dimiliki oleh orang Aceh adalah kerja keras dan pantang menyerah. Jika dilihat dari aspek sosial, maka gerak bisnis orang Aceh sudah dimulai sejak pukul empat pagi, khususnya ketika warung kopi dibuka. Di sini dapat diketahui bahwa mereka yang menjual sarapan pagi tentu bangun lebih pagi daripada jadwal mereka harus membuka warung. Sehingga kadang kala, mereka boleh jadi bangun pada jam 2 pagi. Ini mengindikasikan bahwa orang Aceh begitu kuat dalam mencari nafkah. Ini belum lagi jika kita lihat masyarakat nelayan yang pagi buta sudah pergi berlayar, yang kadang kala juga jarang diselingi dengan shalat Shubuh.

Agaknya, orang Aceh yang menjadi orang kaya secara materi, bukan disebabkan karena mereka memiliki kekayaan dari keturunan atau orang tuanya. Namun mereka mencari dan mengumpulkan dari setiap apa yang mereka dapatkan sehari-hari. Bukan rahasia lagi, jika pada tahun 1990-an dan 1980-an orang kaya Aceh adalah mereka yang membawa sendiri kerbau ke Medan untuk dijual pada era 1970-an. Walaupun kadang mereka ditipu di sana, namun harus diakui semangat menarik kerbau dari Aceh ke Medan yang bisa mencapai ratusan kilometer ini cukup luar biasa. Kemampuan mereka untuk berbisnis cukup patut diacungi jempol.

Saat itu orang kaya Aceh hanya membeli tanah sebagai investasi dan kalau perlu naik haji. Mereka kemudian menjadi orang kaya di lingkungan sendiri atau bahkan menjadi pebisnis ulung di luar Aceh. Hal ini memang bertolak belakang dengan kemunculan orang kaya Aceh era akhir 1990-an dan 2000-an, di mana banyak di

antara mereka yang kaya bukan seperti dulu kala. Mereka banyak menjadi OKB (Orang Kaya Baru) karena fasilitas atau penyelewengan yang mereka lakukan. Mereka bahkan bukan mengumpulkan dengan bangun pagi, tetapi dengan datang ke kantor sesuai seleranya sambil menunggu proyek mana yang harus disunat. Potret ini sesungguhnya berlawanan dengan tradisi orang Aceh yang memang betul-betul pekerja keras. Dalam hal ini, saya tertarik untuk membandingkan bagaimana 'kehalalan harta' seorang OKB dengan *muge eungkot* di Aceh. *Muge* bangun pagi, kemudian langsung meluncur ke TPI (Tempat Pelelangan Ikan), lalu mereka sudah menuju kearah perkampungan untuk menjual ikan mereka. Mereka kadang harus bertaruh nyawa di jalan setiap hari, namun tradisi *muge* patut diperhitungkan, walaupun mereka jarang mendapatkan perhatian dari kita. Semangat *muge* ini kemudian lebih banyak diadopsi oleh generasi baru, jika boleh dikatakan demikian, untuk mengejar proyek (*muge proyek*) atau *muge calo* yang selalu menjadi potret hitam runtuhnya Sumber Daya Manusia di Aceh.[3]

Tulisan saya ini walaupun dalam keadaan 'carut marut,' namun ingin mengatakan bahwa tradisi dan semangat orang Aceh cukup luar biasa dalam mempertahankan hidupnya. Sayangnya tradisi ini kemudian bertabrakan dengan tradisi lain yang datang ke Aceh. Walaupun agak riskan dan mengundang SARA, namun perilaku kerja keras orang Aceh ini hancur ketika mereka menjadi abdi negara dalam era Orde Baru. Konsep *abdi dalem* telah menghancurkan tatanan budaya dan sosial masyarakat.[4] Jadi semakin dekat dengan poros kekuasaan, maka semakin kuat keinginan seseorang untuk menjadi orang kaya. Saat ini pula, kehancuran tatanan sosial dan budaya sepertinya juga dipicu oleh keberadaan tatanan Orde Baru yang diperagakan oleh beberapa institusi di Aceh saat ini.

Demikian pula, jika dilihat secara mendalam tradisi lain yang cukup menarik di Aceh adalah membangun rumah pasti ke arah kiblat. Ini menunjukkan bahwa orang Aceh memang sangat religius atau mereka dikondisikan kalau rumah mereka memang harus mengingatkan orang di dalamnya untuk beribadah kepada Allah. Tradisi membangun rumah seperti ini memang sulit ditemukan di Aceh, seiring dengan hilangnya keinginan orang Aceh untuk mempertahankan rumah adat mereka.

Apa yang ingin saya sampaikan adalah jumlah kamar di rumah Aceh tidak begitu banyak. Mereka bahkan terkadang hanya punya dua kamar. Selain itu

---

[3] Bustamam-Ahmad, "Agen."

[4] Tentang tatanan *abdi dalem*, lihat Denys Lombard, *Nusa Jawa: Silang Budaya Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*, vol. 3 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

semuanya adalah ruangan serambi depan dan belakang. Ada makna sosial di sini yaitu ketika anak menginjak usia remaja, mereka tidak lagi tinggal bersama orang tua. Biasanya yang perempuan akan pergi mengaji di rumah *teungku* dan yang lelaki biasanya akan menginap di *meunasah*. Inilah yang menyiratkan bahwa orang Aceh tidak ingin mengajak anaknya bergabung dengan mereka, sebab anak-anak tersebut harus belajar mandiri. Mereka kemudian yang di tempat mengaji belajar agama. Kehidupan mereka pun teratur. Sayang di sini tidak ada sarjana yang berusaha mengupas potret kebiasaan anak perempuan Aceh yang pergi mengaji di malam hari dan pulang di pagi hari. Sedangkan anak lelaki selain mengaji mereka juga tinggal di *meunasah* dan pulang pada pagi hari. Tradisi orang Aceh yang mempercayai anak mereka keluar rumah cukup menarik untuk dikaji. Tidak debat atau fitnah saat itu. Yang ada semua berjalan sesuai dengan fungsi sosial masing-masing. Para *teungku kampong* mengajar mengaji kepada remaja. Orang tua istirahat di rumah.

Sekarang tradisi ini memang hanya tinggal di kawasan perkampungan yang cukup jauh dari perkotaan, jika bukan *remote area*. Tradisi ini sebenarnya tidak pernah disentuh oleh orang Aceh yang tinggal di perkotaan. Sebab pada malam hari, anak muda dan mudi pulang tengah malam, namun mereka pulang dari berpacaran atau *mejeng*. Mereka bahkan begitu jauh dari *jak beut*. Saya sendiri masih risau apakah anak muda Aceh sekarang bisa mengaji al-Qur'an atau tahu beberapa hukum dasar agama Islam, jika boleh dikatakan mereka masih beragama Islam. Jadi pergeseran setting sosial ini ternyata malah membuat orang Aceh betul-betul gamang. Sehingga muncul tradisi tandingan yaitu mengundang ustaz ke rumah dengan membayar ustaz tersebut per-jam.

Perubahan masyarakat Aceh saat ini yang cukup dramatis memang sangat mengejutkan, namun tidak pernah dijadikan sebagai masalah utama dalam membangun masyarakat Aceh. Apa yang tampak menjadi seolah biasa saja. Saya melihat kebijaksanaan lokal (*local wisdom*) tradisi rakyat Aceh cukup baik untuk dilanjutkan, tentu saja dengan konsekuensi kita dibilang *kampungan* atau *norak amat*. Sebab tradisi ini sebenarnya cukup memberikan signifikansi sosial kepada kelanjutan generasi Aceh pada masa yang akan datang. Sebab melihat arus modernisasi dan post-modernisasi di Aceh saat ini, ternyata bukan menguntungkan orang Aceh. Mereka bahkan tidak bisa 'melawan' arus modernisasi ini, sebab keinginan untuk maju, dalam benak orang Aceh adalah punya uang yang banyak, punya rumah yang bagus, dan punya jabatan yang empuk. Selain itu, bukan ukuran untuk mengatakan maju bagi orang Aceh saat ini. Sehingga seluruh energi orang Aceh dikerahkan kesitu semua. Sehingga apapun yang mereka inginkan

dan lakukan, harus bertujuan pada tiga hal tersebut. Pola pembenaman sikap dan sifat materialistik ini muncul pada saat nilai-nilai lokal pupus dan hilang dalam masyarakat Aceh saat ini.

Walaupun situasi sosial ini bukan hanya milik Aceh, namun harus diakui pengaruh yang cukup luar biasa sudah demikian tampak di Aceh. Akibatnya, pola kehidupan orang Aceh pun berubah dengan cukup drastis. Gejala urbanisasi pun menjadi semacam keharusan bagi orang Aceh untuk menaikkan taraf hidup. Mereka lebih suka hidup di wilayah perkotaan, ketimbang pedesaan atau pegunungan. Lahan-lahan yang subur menjadi terabaikan. Menurut sejarah tradisi orang Aceh, zaman dahulu, para indatu Aceh malah membuka pedesaan atau perkampungan di wilayah yang jauh diperkotaan. Mereka diberikan otoritas untuk membuka kampung dan lahan. Karena itu tidak mengejutkan jika wajah atau sistem kekerabatan orang Aceh sangat dekat satu sama lain. Satu keturunan bisa mendiami satu desa mulai dari beberapa generasi. Mereka masih menghormati tradisi mereka yaitu menjaga adat istiadat. Makanya tidak mengherankan areal persawahan di Aceh sepertinya tertata dengan cukup baik, yaitu sawah dan ladang dikelilingi oleh penduduk setempat. Sehingga memudahkan penduduk dari berbagai kampong untuk ke sawah. Kebersamaan dalam membina areal persawahan juga cukup menarik untuk diamati. Sayang, teks-teks sosial masyarakat Aceh ini lebih tidak banyak dijadikan sebagai bahan penelitian dalam mencari titik sejarah perkembangan orang Aceh. Sekarang orang pergi ke sawah ibarat mereka yang tidak punya pekerjaan tetap. Orang yang pergi ke kebun adalah mereka yang gagal dalam kehidupan dunia pendidikan. Orang yang ke laut, adalah mereka yang tidak pernah tamat sekolah. Mereka yang menjadi supir adalah mereka yang gagal dalam sekolah atau terlalu dekat dengan dunia 'tarik sewa.' Semua 'profesi mulia' ini hanya dilakukan oleh mereka yang termarjinalkan oleh situasi alam perkotaan saat ini di Aceh. Sehingga yang muncul adalah 'beda pendapat karena beda pendapatan.' Akhirnya gejala ini pun mulai menghinggapi orang Aceh di wilayah pedesaan. Gaya hidup mereka mengalami perubahan. Pada saat yang sama, mereka pun mulai mengatakan *lebih baik kita ke kota saja, daripada kita dikatakan kampungan*.

Sebenarnya, tradisi-tradisi yang muncul di Aceh saat sekarang lebih banyak merugikan orang Aceh sendiri, ketimbang menguntungkan. Namun ini belumlah menjadi hal penting dan perlu diambil perhatian, sebab pengaruh yang dirasakan lebih banyak dalam hal materi dan gaya hidup. Dan, ini tidak perlu dijelaskan di sini, bagaimana pengaruh materi dalam gaya hidup seseorang yang baru 'beda pendapat, beda pendapatan.' Mereka tentu saja menjadi kelompok borjuis. Keramahan yang awalnya dibangun dengan salam, sekarang diganti dengan

melihat dengan sudut mata. Keramahan yang dulu dibangun melalui silaturrahmi di *meunasah* atau masjid, tergantikan dengan tradisi SMS. Keramahan yang dulu dibangun dengan kerja sama, diganti dengan membayar siapa saja yang perlu dibayar. Akhirnya, gaya hidup pun berubah secara drastic. Orang Aceh lebih suka berkumpul dengan kelompok nya masing-masing yang sama-sama punya pendapatan sama dan 'penglihatan yang sama pula.' Mereka sulit berkomunikasi dengan kelompok di atas dan di bawah. Mereka juga sulit menerima pendapat orang lain, karena 'beda pendapatan, tentu beda pendapat.'

Jika kita ingin memulai untuk mendiskusikkan apa yang dimaksud dengan tradisi Aceh, maka salah satu hal yang paling urgen dijelaskan adalah apa betul orang Aceh memiliki tradisi, sehingga mereka merasa perlu mempertahankannya. Hal ini tentu saja agak ambigu, sebab sampai sekarang begitu banyak pemahaman yang muncul tentu yang seolah-olah orang Aceh sangat mempertahankan tradisi mereka. Namun kenyataannya adalah, tradisi Aceh semakin tertinggal jauh di belakang. Kearifan lokal menjadi semacam *panacea* yang hanya muncul dalam berbagai ritual yang bersifat simbolik semata.[5]

Sebagai conto, hubungan sosial masyarakat Aceh. Di tingkat paling elit, hubungan kerja adalah salah satu keniscayaan yang harus dijaga. Konsep *'bapak*' adalah sebuah potret yang cukup sering muncul di kalangan ini. Pola hubungan atasan bawahan ini kemudian muncul dalam kehidupan sosial. Sehingga mereka yang punya jabatan di tempat kerja juga memiliki status sosial yang tinggi di lingkungan mereka. Jabatan di tempat kerja juga ternyata memberikan pengaruh pada kehidupan sehari-hari.

Karena itu, konsep *anak bapak fulan*, *istri bapak fulan, anak buah bapak fulan* menjadi semacam hubungan sosial yang memiliki strata di tingkat masyarakat bawah. Jika seorang anak di mana ayahnya tidak mempunyai jabatan yang tinggi, maka dia pun harus menanggung resiko sosial dalam pergaulan. Pelayanan yang dia terima tidak begitu sama dengan *anak bapak fulan*. Sebab, pengaruh jabatan *bapak* di tempat kerja, juga memberikan pengaruh pada aspek materi yang dimiliki keluarganya. Sehingga 'konsep kerajaan' yang muncul di kantor, juga muncul di tempat mereka menjalani kehidupan sehari-hari.

Sepertinya ini yang membuat hubungan sosial orang Aceh semakin terkotak-kotakkan. Mereka tidak biasa menjadi 'masyarakat biasa' atau 'orang biasa.' Semuanya harus dijadikan sebagai 'orang luar biasa.' Sehingga selain sebagai *bapak*

[5] Bustamam-Ahmad, "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Epistemologi 'Irfani."; Bustamam-Ahmad, "Jejak Spirit Aceh."

di kantor, mereka juga menjadi *bapak* di tengah-tengah masyarakat. Sehingga dia pun ingin memiliki jabatan sosial, walaupun tidak memiliki latarbelakangan sosial yang kuat untuk posisi ini. Inilah yang tidak mengejutkan jika kemudian, orang yang menjadi *bapak* di kantor, kemudian mereka sibuk dengan sejumlah posisi jabatan sosial kemasyarakatan ini. Akibatnya, pola kehidupan orang Aceh pun berubah secara perlahan.

Mereka semakin sulit membangun silaturrahmi. Sebab hal tersebut terkadang hanya bisa dilakukan saat *open house* pada musim lebaran. Warga semakin jauh dari pemimpin, sehingga beberapa fungsi adat menjadi tersumbat, sebab posisi ini dipegang oleh *si bapak* dari kantor anu. Akibatnya, tradisi Aceh yang memunculkan *tuha peut, tuha lapan, teungku meunasah,* menjadi semacam simbol belaka. Mereka tidak pernah berfungsi secara wajar, sebab otoritas atau kewenangan mereka sudah dialihkan pada *bapak fulan* yang dipandang memilik hak untuk menyelesaikan persoalan yang muncul di tengah masyarakat. Konsep *duk pakat* menjadi semacam hal yang *taboo*, sebab semua aktivitas sosial sekarang sudah bisa dibayar kepada mereka yang tidak punya pekerjaan tetap.

Fenomena sosial ini memang sedang terjadi di Aceh, tanpa sebuah gugatan yang cukup untuk mengatakan bahwa begitulah orang Aceh menjaga tradisi mereka. Inilah yang menyebabkan masyarakat tidak terkawal sama sekali. Mereka diberitahukan melalui *selebaran* dari kantor anu. Mereka pun tidak pernah akrab satu sama lain. Hal ini semakin runyam, ketika kita melihat kehidupan orang Aceh yang tinggal di perumahan atau komplek. Mereka yang datang dari berbagai latarbelakang pekerjaan, selain harus bersaing di kantor, juga harus 'bersaing' di lingkungan mereka sendiri untuk memperbanyak materi. Sehingga komplek perumahan betul-betul bukan lagi milik orang Aceh. Komplek ini ajang untuk memperlihatkan kekayaan pada sesama warga. Salah satu kebiasaan orang Aceh yang tinggal di komplek adalah meninggikan rumah mereka ke atas berikut dengan pagar. Mereka tidak memperdulikan tetangga yang lain yang tidak menikmati udara segar atau sinar matahari. Setelah itu, orang yang melewati rumahnya harus mengintip ke dalam rumahnya, sebab begitu sulit untuk masuk. Pola kehidupan tetangga ini bukanlah milik orang Aceh yang dikatakan mempertahankan adat istiadat. Jika dilihat di kampung, konsep ketetanggaan adalah hal yang paling utama. Mereka yang datang harus menyesuaikan dengan adat di kampung itu. Mereka yang sudah menjadi *ureung tuha* menjadi 'pagar' bagi kampungnya. Orang Aceh dalam membangun pagar rumahnya tidak pernah membuat sedemikian tinggi. Bahkan pagarnya ditanami dengan tumbuhan yang bisa bermanfaat bagi pemilik dan tetangganya. Halamannya selalu menjadi tempat bermain anak-anak

mereka. Sehingga yang muncul adalah anak-anak merupakan 'harta kampung' yang harus dijaga bersama-sama. Anak-anak dijadikan sebagai simbol kesuksesan sebuah kampung. Maksudnya, jika kehidupan anak-anak atau remaja 'sukses' maka itulah bukti kesuksesan warga dalam menjaga kampung mereka. Tentu saja ini sulit dinalar oleh orang kota yang hidup serba diatur oleh *handphone* atau SMS. Mereka yang tinggal di perumahan, anak-anak mereka juga dijaga supaya tidak bergaul dengan anak-anak yang tidak selevel dengan pendapatan keluarga mereka. Bukan rahasia lagi, beberapa anak muda Aceh yang tinggal di perumahahn elit di salah satu kabupaten, malah begitu malu mengaku bahwa mereka adalah orang Aceh. Sulit sekali bagi kita untuk mengajak mereka diskusi tentang dunia keacehan. Mereka dibesarkan dengan materi yang diperolehi orang tua mereka dari bumi Aceh. Sehari-hari ke sekolah naik *bus sekolah*. Sekolah mereka pun sangat elit untuk ukuran orang Aceh kampung. Bahasa pergaulan mereka pun bukanlah bahasa Aceh. Liburan mereka bukan membantu orang tua di ladang, melainkan naik pesawat ke kota-kota besar atas nama fasilitas perusahaan.

Implikasi sosial yang cukup menyakitkan walaupun mereka lahir dan hidup di Aceh, mereka asing dari tradisi Aceh. Mereka bahkan tidak mengenal budaya Aceh. Mereka pun tidak pandai berbahasa Aceh. Mereka juga sulit untuk diajak untuk mendiskusikan ilmu keacehan. Pada gilirannya, mereka juga tidak betah tinggal di Aceh. Apa yang muncul adalah terjadinya alienasi identitas di kalangan generasi ini. Mereka kerapa malu mengaku diri orang Aceh, namun sulit untuk mengingkari kalau mereka adalah produksi bumi Aceh.

Narasi di atas adalah untuk menyebut salah satu contoh bagaimana orang Aceh melupakan tradisi mereka sendiri. Pengaruh dari fenomena di atas menjadi semakin menguat di Aceh, sehingga sulit untuk mencari tempat atau kawasan di Aceh yang masih betul-betul mengamalkan tradisi Aceh. Sehingga yang muncul kemudian adalah kegamangan untuk mencari bentuk tradisi Aceh. Akhirnya tradisi yang muncul dalam kehidupan sehari-hari, malah menjadi simbol-simbol belaka yang dilakukan berbagai upacara adat. Tradisi Aceh kemudian juga diperlombakan dalam berbagai festival adat. Konon ini adalah bukti orang Aceh mempertahankan adat mereka yang semakin hilang jatidirinya. Namun pada saat yang sama, festival ini sendiri malah menginjak-injak tradisi dan budaya Aceh sendiri.

Hemat saya, tradisi Aceh bukanlah untuk diperlombakan ataupun diseminarkan. Tradisi Aceh sudah menjadi bagian dari kehidupan orang Aceh sendiri, sehingga tidak perlu dicari sebagai yang paling pemenang. Demikian pula, baju adat Aceh adalah baju kebesaran yang harus dijaga nilai-nilai keistimewaannya. Di beberapa suku terasing, baju adat hanya dipakai pada saat tertentu saja dan oleh orang-orang

tertentu yang mengerti betul tradisi suku mereka. Sebaliknya, baju adat Aceh tidak memiliki aura kebesaran sedikit pun, sebab dia hanya menjadi simbol semata yang pada gilirannya, maka memakai baju ini hilang dalam satu kedipan mata. Orang yang memakai baju adat Aceh, seharusnya tahu betul bagaimana tradisi Aceh. Orang yang menari tarian Aceh, sejatinya hapal makna substantif dari tarian yang sedang dimainkan. Orang yang memakai gelar bangsawan Aceh, selayaknya ingat betul mana saja tradisi Aceh yang harus dijaganya.

Sekarang yang muncul malah sebaliknya, mereka yang memakai gelar bangsawan atau gelar yang mengandung aspek karismatik tidak memiliki makna apa-apa. Dahulu gelar *ampon* adalah mereka yang cukup disegani di kalangan orang Aceh. Demikian pulan, gelar *cut* dan *teuku* adalah mereka orang yang 'terpilih' dari sisi sosial kemasyarakatan. Pada saat yang sama pula, *gelar teungku* adalah betul-betul diberikan pada mereka yang memanggul kitab di dayah-dayah. Karena gelar ini dilekatkan pada tempat yang sesuai, maka aspek sosial bagi yang memakainya pun dapat dirasakan. Sekarang yang terjadi, gelar yang muncul di dalam tradisi Aceh sudah hilang jatidirinya. Mereka bahkan tidak menjadi 'tempat' dalam kehidupan orang Aceh. Gelar yang semestinya menunjukkan kehebatan satu suku bangsa, malah menjadi alat untuk menjual bangsanya sendiri. Sebab itu, tidak mengejutkan jika ada artis yang bergelar *cut*, orang selalu bertanya apa betul dia dari Aceh? Pertanyaan ini sebenarnya 'pukulan' bagi orang Aceh. Sebab orang tidak akan bertanya demikian, jika tidak punya asosiasi tersendiri terhadap gelar tersebut. Gelar *cut*, jika kita ambil contoh, menjadi sirna makna sosialnya, ketika nama-nama cut menjadi orang ternama di Jakarta, bukan di Aceh. Demikian pula, mereka yang bergelar *teuku* menjadi terkenal bukan karena tradisi Aceh yang dipegangnya, melainkan karena persoalan kehidupan rumah tangganya. Contoh kecil ini memperlihatkan bahwa begitu sulit untuk membangkitkan kembali simbol-simbol tradisi Aceh yang ada pada nama orang Aceh.

Runtuhnya simbol-simbol tradisi Aceh ini sebenarnya banyak dipicu oleh orang Aceh sendiri. Hal ini disebabkan tradisi Aceh tidak begitu penting untuk dipertahankan, sebab konon orang Aceh pernah sakit hati dengan tradisi mereka sendiri. Sehingga pengelasan masyarakat '*keturunan berdarah biru*' tidak lagi begitu penting. Sehingga fungsi sosial mereka pun hilang secara perlahan-lahan. Demikian pula, kelompok ulama yang menjadi pengawal umat menjadi kelompok eksklusif. Dulu ulama datang ke kampung-kampung untuk memberikan peringatan kepada warga. Mereka aktif dalam mempertahankan tradisi Aceh, sehingga tidak ada kegiatan adat Aceh yang tidak melibatkan kelompok ulama. Namun belakangan kelompok ulama malah harus didatangi dan diundang untuk hadir pada acara

orang Aceh sendiri. Sebagai akibatnya, semakin tinggi posisi ulama di kalangan elit, semakin sulit untuk bertemu atau mengajak dia duduk dalam masyarakat. Semakin sering ulama ini ke poros kekuasaan atau pemerintahan, semakin 'mahal' dan 'sulit' untuk mengundang mereka datang ke majlis kampung.

Akhirnya yang terjadi sekarang di kalangan orang Aceh, terutama di wilayah yang dekat dengan kota, naiknya fungsi sosial ustaz ketimbang *teungku* (ulama). Gelar *ustaz* semakin popular di kalangan orang Aceh. Mereka begitu terkenal dan akrab di kalangan perumahan. Mereka diundang saat ada acara keagamaan mulai dari doa hingga ceramah agama. Mereka menjadi tukang mengajar ngaji bagi anak-anak orang Aceh. Sekarang di wilayah para ustaz ini pun sudah begitu diterima oleh masyarakat. Pada saat yang sama *teungku* sibuk dengan poros kekuasaan. Mereka sibuk dengan mobil mewah mereka kemana-mana untuk menemani pejabat.

Gejala naiknya popularitas ustaz di Aceh ternyata cukup dirasakan, khususnya ketika anak-anak orang Aceh tidak lagi mengirim anak mereka ke dayah, melainkan ke pesantren terpadu yang mengajarkan dan menjanjikan anak mereka bisa berbahasa asing (Arab dan Inggris). Walaupun tidak ada yang salah dalam gejala ini, namun ada hal yang paling riskan adalah turunnya popularitas dayah tradisional yang kental dengan tradisi Aceh. Dayah kemudian hanya diisi oleh mereka yang seolah-olah tidak punya masa depan. Dengan demikian adanya gejaral *from teungku to ustaz* ternyata membawa implikasi sosial bagi orang Aceh. Saya masih memandang perlu dilakukan sebuah studi yang komprehensif bagaimana pengaruh *from teungku to ustaz* di tengah-tengah kehidupan orang Aceh. Sebab, ustaz boleh jadi adalah mereka yang asing dan tidak punya keinginan untuk mempertahankan tradisi Aceh. Sebab boleh jadi menurut ustaz, tradisi Aceh ini adalah *bid'ah* yang sesat menurut agama. Karena itu, hemat saya, kebangkitan *ustaz* di Aceh menarik untuk diamati, khususnya jika dikaitkan dengan gerakan Salafi dan Wahabi. Sebab, orang Aceh yang betul-betul produksi dayah sulit untuk memiliki 'pola pikir' *ustaz* yang ingin mengikis tradisi Aceh.

Apa yang hendak disampaikan adalah bukan ingin mengaduk-aduk orang Aceh, supaya tetap kembali pada tradisi mereka. Namun ini hanya sekadar diskusi lanjutan bagi untuk lebih mengenal apa itu tradisi Aceh. Selama ini, tradisi Aceh banyak didapatkan dari laporan ethnografi C. Snouck Hurgronje melalui beberapa tulisannya. Tradisi tertulis ini memang masih mendominasi pola pikir orang Aceh tentang persepsi tradisi Aceh. Tradisi Aceh kemudian dimaknai hanya ada pada beberapa upacara adat semata. Bagi saya, tradisi Aceh ini mencakup apa saja yang dilakukan oleh orang Aceh, khususnya dalam bidang relasi sosial yang mereka bangun baik secara individu maupun kelompok sosial. Karena itu, pendefinisian

ulang pada apa sesungguhnya tradisi Aceh ini boleh jadi akan membangkitkan semangat baru orang Aceh dalam mempersepsikan tradisi mereka. Namun sikap pesimistis muncul manakala kita melihat orang Aceh saat ini dalam mempersepsikan tradisi Aceh. ☙

BAB 4

Kenapa Aceh Bukan Melayu?[1]

BARU-baru ini pemerintah Malaysia memberikan anugerah Tun Perak kepada Wakil Pemerintahan Aceh (Muhammad Nazar). Tentu saja ini mengingatkan kita pada Manohara ketika diberikan gelar bangsawan oleh pihak Kraton di Jawa Tengah. Agaknya ada perbedaan yang cukup signifikan konteks Muhammad Nazar dan Manohara di dalam budaya Melayu dan budaya Jawa. Bahkan isi pidato Muhammad Nazar dimuat secara utuh dalam *Harian Aceh* (8/12/2009). Saya sendiri tidak ingin mengomentari gelar Tun dan isi pidato Muhammad Nazar, karena di dalamnya tentu sebuah peristiwa sejarah bagi Pemerintahan Aceh era IRNA (Irwandi dan Nazar).

Apa yang menarik bagi mungkin upaya Malaysia untuk terus menerus menganggap Aceh sebagai Melayu. Pada saat yang sama, konsep Melayu di Malaysia sendiri masih bermasalah.[2] Usaha Malaysia ini berhasil ketika beberapa

[1] Tulisan ini mendapat respon dari kalangan pembaca Serambi Indonesia. Lihat Darwis A. Soelaiman, "Aceh Dan Melayu (Tanggapan Untuk Kamaruzzaman)," *Serambi Indonesia*, 19 Desember 2009.

[2] Shamsul Amri Baharuddin, "A Question of Identity: A Case Study of Malaysian Islamic Revivalism and the Non-Muslim Response," in *Nation-State, Identity and Religion in Southeast Asia*, ed. Tsuneo Ayabe (Singapore: Singapore Society of Asian Studies, 1998); Shamsul Amri Baharuddin, "Identity Construction, Nation Formation, and Islamic Revivalism in Malaysia," in *Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia*, ed. Robert W. Hefner and Patricia Horvatich (Honolulu: University of Hawaii Press, 1997); Dick van der Meij, "Pluralism and

tahun terakhir selalu melibatkan Aceh untuk mempertahankan identitas Melayu-Tradisional mereka. Sebab, di dalam konstitusi Malaysia, definisi Melayu adalah (1) yang berbahasa Melayu; (2) beragama Islâm; (3) lahir sebelum 1957 di Tanah Melayu.[3] Dari definisi ini kelihatan bahwa Aceh sama sekali bukan Melayu di dalam konteks konstitusi Malaysia, kecuali beberapa orang Aceh yang lahir di Malaysia. Bahkan beberapa keluarga mereka sama sekali masih berbahasa Aceh (bukan bahasa Melayu!) baik sesama keturunan Aceh atau di dalam keluarga mereka sendiri. Ini mirip dengan keluarga Jawa di Johor yang masih menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari.

Bahkan untuk mengeluarkan suku lain di Malaysia, dimunculkan istilah yang cukup rasis seperti *indon* (untuk orang Indonesia), *mamak* (untuk orang India), *bangla* (untuk orang Bangladesh). Sementara bagi orang Cina yang baru masuk Islâm dipanggil dengan istilah *mat soh*. Adapun untuk orang kulit putih dikenal dengan sebutan *mat saleh*. Demikianlah sikap *rasis* negeri Melayu ini terhadap para pendatang. Sehingga muncul istilah baru bagi orang Melayu di Malaysia yaitu *Other Malays*[4] (orang Melayu yang lain) yang menerima sikap rasis dari Melayu versi konstitusi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Malaysia selalu 'mengajak' Aceh sebagai bagian dari peradaban Melayu pra-kemerdekaan mereka. Sehingga para pemimpin Aceh bangga sekali dengan ajakan ini, bahkan pernah digelar konggres Melayu Raya di Banda Aceh. Pemerintah Malaysia sama sekali sudah meninggalkan konsep ini dengan mengedepankan istilah identitas baru yakni *Malaysia is Truly Asia* (Malaysia adalah benar-benar Asia). Karena kemesraan sejarah inilah seolah-olah Aceh dan Melayu adalah satu. Bahkan pandangan yang paling lazim adalah bahasa Pasai sebagai bahasa Peradaban Melayu. Upaya yang dilakukan oleh Malaysia ini pernah diterapkan pada negeri Pattani, namun gagal karena konflik yang berkepanjangan

---

Identity in the Indonesian-Malay World: The *Isra' Mi'raj* as a Token of Both," *Studia Islamika* 11,3(2004); Timothy P. Barnard, ed. *Contesting Malayness: Malay Identity across Boundaries* (Singapore: Singapore University Press,2006); Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "From Islamic Revivalism to Islamic Radicalism in Southeast Asia: A Case of Malaysia," in *Culture, Identity, and Religion in Southeast Asia*, ed. Alistair D.B.Cook (Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007); Anthony Reid, "Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities," in *Contesting Malayness: Malay Identity across Boundaries*, ed. Timothy P. Barnard (Singapore: Singapore University Press, 2006).

[3] Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "The Discourse of the Islamic State and Islamic Law in Malaysia," in *Asian Transformations in Action* (Tokyo: The Nippon Foundation, 2009). 16-25.

[4] Joel S. Kahn, *Other Malays: Nationalism and Cosmopolitanism in the Modern Malay World* (Singapore: Singapore University Press, 2006).

di kawasan tersebut, sehingga akar Melayu yang diinginkan oleh Malaysia tidak begitu berhasil. Akan sentimen Melayu ini masih muncul di Pattani, Yala dan Narathiwat.[5] Namun dalam konteks Aceh seakan-akan sangat menjanjikan.

Jika ditelisik secara seksama Aceh merupakan sebuah entitas peradaban tersendiri, dan tidak ada hubungan entitas Melayu. Identitas sebagai peradaban dunia inilah yang ingin dikuburkan oleh pihak tertentu untuk kepentingan sosial politik identitas di rantau Asia Tenggara. Harus diakui bahwa Malaysia saat ini memang sedang mengalami persoalan identitas atau referensi keaslian budaya mereka, apalagi ketika beberapa negeri mereka dikuasai oleh pihak Cina berikut kebudayaan mereka. Demikian juga kegelisahan akan putra-putri mereka di dalam berbahasa Melayu dialek Indonesia, karena tidak sendikit rumah tangga mereka ditunggui oleh wanita Indon dan menonton sinetron Indonesia. Kegelisahan inilah yang terjadi di Malaysia saat ini, di mana keberadaan puak lain dipandang akan menjadi saingan kuat dalam sejarah masa depan Malaysia. Mereka tentu saja tidak ingin seperti Singapura yang sudah berhasil menguburkan identitas Melayu. Sehingga Malaysia selalu mencari akar budaya yang kuat, termasuk ingin mengklaim beberapa budaya Indonesia sebagai bagian dari kebudayaan mereka. Namun karena pihak Jawa mengerti betul pola ini, maka mereka sangat menentang sikap Malaysia tersebut dengan sambutan *Ganyang Malaysia*.

Namun terkait dengan Aceh yang memiliki sistem kebudayaan yang sama sekali berbeda dengan Melayu diusahakan untuk dikaburkan. Sistem kebudayaan yang dimaksud adalah mencakup tiga hal yaitu bahasa (bahasa Aceh), sejarah (Aceh memiliki sejarah sendiri), kebudayaan (Aceh memiliki kebudayaan sendiri). Kalau dilihat lebih seksama kebudayaan Melayu itu tidak ada kaitannya dengan Tanah Aceh, melainkan dekat dengan Pattani dan Pulau Jawa. Orang Negeri Sembilan kebanyakan berasal dari Minangkabau. Orang Johor dan Selangor tidak sedikit berasal dari Jawa. Sedangkan Pulau Pinang memang diciptakan sebagai kawasan perdagangan. Orang Aceh yang masih berbahasa Aceh bisa dijumpai di Kedah.

[5] Mengenai konflik di Thailand Selatan dan identitas Melayu di kawasan ini, lihat Liow, "The Security Situation in Southern Thailand: Toward an Understanding of Domestic and International Dimensions." 531-48; Dulyakasem and Sirichai, eds., *Knowledge and Conflict Resolution: The Crisis of the Border Region of Southern Thailand*; Michel Gilquin, *The Muslim of Thailand*, trans. Michael Smithies (Chiang Mai: Silkworm Books, 2005). Aphornsuvan, "Origins of Malay Muslim "Separatism" in Southern Thailand." Patrick Jory, "From "Melayu Patani" to "Thai Muslim": The Spectre of Ethnic Identity in Southern Thailand," in *Working Paper Series* (Singapore: Asia Research Institute, 2007). Yusuf and Schmidt, eds., *Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand*; ICG, "Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad," in *Asia Report* (Brussel: ICG, 2005).

Bahkan sejarah Melayu versi Malaysia lebih banyak diberitakan yang bersumber pada kitab *Negarakertagama*.[6] Artinya walaupun ada hubungan kerajaan atau peperangan dengan Aceh, namun Kerak Peradaban Melayu (KPM) di Malaysia tidak ada hubungannya dengan Kerak Peradaban Aceh (KPA). Garis peradaban mereka bersinggungan dengan Jawa-Sriwijaya (Palembang dan Jambi) –Temasek (Singapura) -Nakhorn Sri Thammarat (Thailand).

Inilah kelalaian para penulis Aceh di dalam menulis identitas peradaban sendiri. Dulu para penulis Aceh telah menghasilkan kitab-kitab untuk digunakan sebagai pedoman kebudayaan Aceh dengan segala keontentikannya, di mana beberapa sariannya belakngan dijadikan sebagai kerak peradaban Melayu-Malaysia. Namun sayangnya setelah melihat kegemilangan Malaysia saat ini, KPA (Kerak Peradaban Aceh) mulai menghilang. Artinya orang Aceh bangga diklaim sebagai bagian dari Melayu. Padahal orang Melayu tidak pernah bangga menjadi bagian dari KPA. Sebagai contoh kecil, tarian *seudati*, *ranup lampuan*, *ratoh duk*, *tarian seribu tangan*, *saman* tidak akan pernah dijumpai di dalam sejarah tarian Melayu di Malaysia. Mereka hanya memiliki tarian *zikir hulu* yang berkembang di Kelantan dan Terengganu. Tarian-tarian Melayu di Malaysia lebih mirip dengan tarian Melayu-Riau. Sedangkan di Sabah dan Serawak budaya mereka lebih dekat ke budaya di pulau Kalimantan. Dari segi pakaian adat orang Aceh, jika dibuka lagi sejarah KPA maka akan terkuak bahwa adat pakaian orang Aceh sama sekali berbeda dengan orang Melayu.

Salah satu pepatah Melayu adalah *lembu punya susu, sapi punya nama*. Artinya kita yang memiliki KPA jangan sampai diklaim sebagai bagian dari kebudayaan wangsa lain. Jika ditilik dari sejarah, tanah Melayu memang tempat pertemuan beberapa budaya, mulai budaya Jawa, Thai, hingga Aceh. Karena itu keaslian Melayu di Malaysia masih diperdebatkan oleh para peneliti. Untuk mengamankan identitas Melayu, pihak Malaysia berhenti di depan konstitusi sebagai orang Melayu yang sah. Inilah kegusaran pendiri bangsa Malaysia ketika merumuskan konsep negara Malaysia, supaya suku-suku lain mendapat tempat di dalam konstitusi Malaysia, namun puak Melayu tetap diutamakan sebagai bumiputra. Sebagai bukti kegusaran ini adalah munculnya kerusuhan besar-besaran pada tahun 1969 akibat dari pergesekan identitas Melayu dengan identitas lainnya (Cina). Namun kita orang Aceh tanpa memahami pergumulan atau pencurian identitas ingin menyandingkan dengan budaya di bawah kita. Saat ini upaya untuk menggali

[6] I Ketut Riana, *Kakawin Desa Warnnana Uthawi Nagara Krtagama: Masa Keemasan Majapahit* (Jakarta: Kompas, 2009).

KPA sudah hilang seiring gencarnya upaya Malaysia memelayukan Aceh dan upaya orang Aceh memelayukan diri mereka sendiri.

Dalam beberapa literatur sejarah (mulai dari Denys Lombard hingga Tgk Chik Kutakarang) yang sangat jelas diterangkan bahwa Aceh merupakan sebuah peradaban sendiri yang megah. Sulit mencari raja sekaliber Iskandar Muda di Tanah Melayu. Sulit mencari kitab sebanding dengan *Sirat al-Mustaqim* (karya Syaikh Nurdin Ar-Raniry) dan *Tarjuman Mustafid* dan *Mir'at Tulllab* (karya Syaikh Abdur Rauf al-Singkili) di dalam sejarah Malaysia.[7] Karena itu pula ulama dari Mekkah dan Madinah lebih tertarik ke Aceh daripada ke semenanjung Melayu, karena mereka paham betul bahwa ada KPA di ujung pulau Sumatra ini memiliki kaitan yang kuat dengan kerak peradaban mereka di Timur Tengah. Ini disebabkan oleh asal usul orang Aceh berasal dari wangsa yang paling terhormat di dunia. Kita khawatir dengan perebutan gelar dan simbol, marwah dan martabat wangsa Aceh menjadi seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah Aceh saat ini.

Karena itu kita mengharapkan adanya pengetahuan sejarah identitas yang komprehensif di Aceh. Sejauh pengetahuan saya, tidak ada pelajaran KPA mulai dari sekolah hingga perguruan tinggi di Aceh. Suku Dayak yang masih tinggal di tengah hutan sudah menggagas Dayakologi untuk menjadi sebuah ilmu seluk beluk mengenai kehidupan orang Dayak. Sedangkan Aceh belum berani memunculkan Acehnologi (ilmu tentang seluk beluk Aceh). Adapun suku Jawa telah membenamkan kerak peradaban mereka ke seluruh Indonesia, termasuk kehidupan masyarakat Aceh. Karena kealpaan inilah maka tidak mengejutkan persoalan identitas wangsa Aceh ini bisa dikaburkan pada beberapa tahun yang akan datang.

Upaya untuk menelusuri KPA melalui Acehnologi ini perlu dipertimbangkan. Di Aceh misalnya tidak sedikit gelar bangsawan yang punya makna identitas kebudayaan Aceh. Namun gelar dan atribut tersebut tidak lagi dipandang perlu dan digunakan oleh beberapa artis ibukota. Orang Aceh bangga dan tidak pernah merasa malu akan larinya makna KPA tersebut. Di Aceh tidak sedikit gaya bahasa Aceh yang penuh dengan estetika dan semiotik, namun sama sekali tidak menjadi pelajaran penting di sekolah atau perguruan tinggi. Bahkan generasi muda susah berbahasa Aceh. Perihal Acehnologi memang masih sangat tabu ibarat *pijet dalam kasoe brok*. Ini disebabkan oleh format dan struktur identitas Aceh sudah menghilang, kecuali simbol-simbol saja untuk keperluan Qanun Adat Istiadat.

[7] A.H. Johns, "The Qur'an in the Malay World: Reflection on 'Abd Al-Rauf of Singkel (1615-1693)," *Journal of Islamic Studies* 9,2(1998).120-45.

Karena itu tidak mengejutkan jika 30 tahun yang akan datang ilmu tentang seluk beluk Aceh harus dipelajari di Semenanjung Melayu, karena Aceh adalah Melayu. Inilah kecelakaan sejarah yang paling fatal bagi wangsa Aceh.

Ketika membaca tulisan Darwis A. Soelaiman (DAS) "Aceh dan Melayu" pada 19 Desember 2009 sebagai tanggapan tulisan "Melayukah Aceh atau Acehkan Melayu?" (12/12/2009), saya langsung membaca tulisan DAS yang ditulis pada 1987 mengenai "Unsur Islam dalam Kesenian Aceh." Dalam tulisan DAS pada tahun 1987 ternyata malah memperkokoh asumsi saya bahwa bahwa Aceh bukanlah Melayu. Tulisan DAS pada 1987 perlu dilihat kembali oleh DAS sebagai upaya melihat kekonsistenannya di dalam melihat Aceh secara komprehensif. Agak menarik untuk melihat bagaimana jalur pemahaman generasi Melayu-Aceh ketika mempersepsikan tentang jati diri tentang Kemelayuan dan Keacehan.

Dalam hal ini, DAS mencoba mengaitkan Aceh adalah Melayu dengan jalur agama dan bahasa. Bahkan berusaha mengajak pembaca untuk mengatakan tidak sedikit negeri Melayu di dunia ini, walaupun saya menduga sulit mencari karya kalau mereka mengklaim: bahwa kami ini Melayu! Kecuali pernyataan Hang Tuah mengenai Melayu tidak akan hilang di muka bumi. Sebenarnya perdebatan ini juga telah "selesai" jika misalnya kita baca karya Barbara Watson Andaya dan Leonard Y. Andaya. *A History of Malaysia* (2001). Dalam beberapa tahun terakhir telah terbit beberapa buku misalnya: *Contesting Malayness: Malay Identity across Boundaries* (2006)[8] dan *Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsula* (2008).[9] Sulit untuk menemuka bab-bab yang menjelaskan Aceh adalah Melayu, kecuali kontribusi Aceh terhadap Melayu seperti tulisan Leonard Y. Andaya dalam salah satu Jurnal yang berjudul "Aceh's Contribution to Standards of Malayness" (2001).[10] Sebagai contoh, jika kita baca tulisan Anthony Reid mengenai bagaimana sejarah tumpang tindih konsep Melayu (tanah jajahan, etnik, bahasa, kerajaan, dan lain sebagainya) di rantau Asia Tenggara.[11] Tetapi kita berharap generasi Melayu-Aceh bisa menceritakan kemelayuan mereka pada kita, tanpa harus merujuk pada karya-karya yang saya sebutkan, karena ditulis oleh orang bukan Melayu (orang Kafir!)

---

[8] Barnard, ed. *Contesting Malayness: Malay Identity across Boundaries*.

[9] Michael J. Montesano and Patrick Jory, eds., *Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsula* (Singapore: NUS Press,2008).

[10] Leonard Y. Andaya, "Aceh's Contribution to Standards of Malayness," *Archipel* 61(2001).29-68.Leonard Y. Andaya, *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka* (Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008).

[11] Reid, "Understanding Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities."1-24.

Alasan kenapa dinyatakan bahwa Aceh bukan Melayu, karena Aceh yang menyumbang pada konsep identitas Melayu, bukan sebaliknya. Sebagai contoh, Syed Naquib Al-Attas menyebutkan bahwa Hamzah Fansuri sebagai Bapak Kesusasteraan Melayu Modern.[12] Tentu saja kita bangga akan sebutan tersebut. Lalu kita katakan bahwa Aceh adalah Melayu. Inilah sebuah kemegahan Melayu, bukan kemegahan Peradaban Aceh (PA). Tetapi bagaimana kita menempatkan karya-karya yang berbahasa Aceh, apakah kita akan mengatakan itu sebagai bagian dari Melayu juga. Sebagai contoh, karya Tgk. Haji Mahjiddin Jusuf (2007) yang menerjemahkan Al-Qur'an dengan bahasa Aceh yang sangat bersajak. Gaya bahasa penerjemahan Tengku ini luar biasa indahnya. Namun karena bukan bahasa Melayu, lantas kita akan meletakkan di mana karya spektakuler ini. Atau, jika kita baca ribuan Hadih Maja yang dikumpulkan oleh Anzib Lamnyong (1968) sebagai kearifan lokal budaya Aceh.

Karena itu, para ahli (minus Melayu-Aceh) sudah menggugat konsep kemelayuan itu sendiri, tidak terkecuali oleh orang Melayu sendiri. Dalam Kongres Kebudayaan Rumpun Melayu 2004 di Johor, misalnya, sudah muncul istilah Melayu-Aib dan Melayu-Ghaib. Melayu-Aib adalah semua yang berkaitan dengan Melayu sangat negatif sekali, sehingga identitas Melayu pun sudah mulai luntur. Demikian pula, konsep Melayu-Ghaib di mana kemelayuan itu sendiri sebenarnya masih diperdebatkan, atau bahkan sudah menghilang jati diri. Kemudian lagi-lagi Melayu "diselamatkan" oleh Islam.

Di Aceh sendiri konsep Melayu sebenarnya tidak muncul, kecuali hanya persoalan bahasa dan agama. Inilah andalan utama para generasi Melayu-Aceh seperti yang kita dapatkan dalam tulisan DAS. Mereka ingin membuat pemikiran seperti Melayu-Riau atau Melayu-Bugis. Namun sejauh pengetahuan saya, para ahli sangat jarang sekali, kecuali kalangan Melayu-Aceh, yang menyebutkan Aceh adalah Melayu. Aceh selalu ditempatkan pada kutub sejarah peradabannya, tanpa kait mengait dengan Melayu.

Dalam tulisan DAS sendiri agaknya sependapat dengan saya dengan mengatakan: "orang-orang Melayu dari Sumatera Selatan, Riau, dan Sumatera Barat ada yang pergi ke semenanjung Malaya, mula-mula bermukim di daerah pesisir yaitu di Melaka dan Singapura." Ini sebenarnya sudah diungkapkan bahwa

[12] Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu*, 4 ed. (Bandung: Mizan, 1990).68. Baca juga karya Naquib lainnya tentang Hamzah Fansuri: Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *The Mysticism of Hamzah Fansuri* (Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1970); Syed Muhammad Naquib Al-Attas, *Rânîrî and the Wujûdiyyah of 17th Century Acheh* (Singapore: MBRAS, 1966).

garis suku Melayu itu mulai dari Jawa-Sriwijaya-Temasek (Singapura) -Malaya-Nakhorn Sri Thammarat. Karena itu, ada pendapat yang mengatakan bahwa kata 'Melayu' berasal dari bahasa Jawa berarti orang yang berlari-larian. Sebenarnya di sini DAS bisa saja menambahkan bahwa penduduk asli semenanjung Malaya adalah Negrito, Senoi, dan Jakun. Rumpun Negrito terdiri dari Kensiu, Kintak, Jahai, Lanoh, Mendriq, dan Bateg. Adapun rumpun Senoi terdiri dari Semai, Temiar, Jahut, dan Che Wong. Sementara Jakun sebagai Proto-Melayu bisa dijumpai dalam suku Temuan, Semelai, Temoq, Orang Ulu, Orang Laut dan Orang Seletar. Namun mereka bukanlah orang Melayu, melainkan disebut dengan Orang Asli. Di Malaysia posisi Orang Asli sama dengan posisi suku Aborigin di Australia atau sukun Indian di Amerika.[13]

Jadi, sebenarnya Aceh sekali lagi tidak kena mengena dengan perjalanan sejarah diaspora identitas Melayu, baik klasik maupun modern, kecuali jasa-jasa ulama dari Aceh yang menulis dalam bahasa Jawi (*jawoe*). Sayang, inilah yang selalu diungkit-ungkit oleh generasi Melayu-Aceh. Padahal ada banyak data dan fakta sejarah yang menyebutkan Aceh merupakan satu entitas peradaban sendiri.

Adapun mengenai asal usul wangsa Aceh memang penuh misteri. Dari beberapa penelusuran sejarah, ada ungkapan yang menyebutkan bahwa Aceh merupakan Pulau Ruja yang banyak dikunjungi oleh para pendatang. Adapun bangsa yang pernah datang ke pulau Ruja adalah bangsa Parsia pada era Raja Darius. Salah satu syair menyebutkan: "*Beek tabeoh kada wangsa meutuwah*; t*urounan meugah meuri-ri wangsa*; k*hujja ngoen majja lakap geupajah*; t*uroenan meugah dorius raja*. Tentu saja syair ini masih bisa diperdebatkan, namun suku bangsa yang dipimpin oleh Darius saat itu saat terkenal dan telah berekspansi hingga India Barat dan tentu saja Pulau Ruja. Di dalam buku *A History of World Societies* (1984: 63) disebutkan bahwa: "*They had created "world empire" encompassing of the oldest and most honored kingdoms and peoples of the ancient Near East*." Sebenarnya inilah salah satu indatu orang Aceh yang sudah dilupakan hingga hari ini. Walaupun kita masih mengakui bagaimana pengaruh Persia (Parsi) di dalam kehidupan kita sehari-hari (mulai dari gelar raja hingga adat istiadat orang Aceh).

---

[13] Lihat kajian tentang orang Asli di Malaysia, Gordon P. Means, "The Orang Asli: Aboriginal Policies in Malaysia," *Pacific Affairs* 58, no. 4 (1985-1986). 637-52; Zawawi Ibrahim, "Orang Asli Citizenry and Nationhood: Mediating the Voices the Bumiputera "Other" in Malaysia," *Asian Studies Review* 21, no. 1 (1997). 107-14; Amran Kasimin, *Religion and Social Change among the Indigenous People of the Malay Peninsula* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991).

Sebenarnya, jasa kerajaan Darius yang beragama Zoroasther ini juga sangat berpengaruh di Timur Tengah. Dalam buku *The Venture of Islam* (1974:242) disebutkan bahwa pada masa Darius dan anaknya Xerxes (486-464 Sebelum Masehi), mereka telah membangun suatu monarki kekuasaan, yang ternyata telah disebutkan sebagai "*world empire*" (kerajaan dunia) hingga menjadi cikal bakal beberapa kerajaan di Timur Tengah. Inilah yang tidak mengejutkan kenapa proses Islamisasi sangat mudah di Aceh, karena adanya kesamaan akar kebudayaan masyarakat Aceh yang kebanyakan adalah pendatang yang telah "bersentuhan" dengan kebudayaan Timur Tengah pada era pra-Islam. Sebenarnya data sejarah ini masih tersimpan rapi di dalam literatur yang menceritakan bagaimana peradaban Aceh dibina oleh para indatu.

Agaknya DAS bisa juga merujuk pada hasil seminar yang ditandatangani oleh Tgk. H. Abdullah Ujong Rimba mengenai Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islâm di Aceh pada 10-16 Juli 1978 yang berisi 29 butir tentang Aceh dan Islâm. Walaupun di situ tidak akan ditemukan istilah Melayu sedikit pun. Salah satu hasil rumusan seminar tersebut adalah Islâm telah bertapak di Aceh pada abad 1 Hijriah dan perdagangan di Aceh dengan luar negeri (Cina dan India) telah dimulai pada abad 1 Masehi. Sayang, sejarah seperti ini, sudah mulai dikaburkan terutama ketika dilekatkan kata Aceh dengan Melayu.

Jadi, sebenarnya identitas Melayu sudah 'bermasalah' dan bisa 'menghilang' dalam di dalam Sejarah Peradaban Aceh (SPA). Hanya saja ada kekhawatiran jika sejarah ini dibongkar, maka bangunan pemahaman terhadap identitas Melayu-Aceh akan terusik. Akan muncul pendapat yang mengatakan bahwa upaya ini terlalu bersemangat atau mengada-ada, karena melawan alam pikiran yang mapan yang telah dikembangkan oleh Melayu-Aceh. Saya sendiri menganggap ini baru permulaan untuk membuka Kerak Peradaban Aceh (KPA) dalam rangka membangun Acehnologi. Karena di Aceh sendiri lintasan sejarah pertemuan budaya-budaya di dunia masih perlu dikuak secara perlahan-lahan. Ini agar KPA dan SPA bisa ditulis sesuai dengan apa yang sebenarnya terjadi, bukan apa yang sebenarnya diinginkan terjadi. ☙

BAB 6

Mencari Sosok Pemimpin Aceh

BERMIMPI atau berangan-angan adalah sah-sah saja bagi siapapun. Jadi saya juga berhak untuk berandai-andai jika saya menjadi Gubernur Aceh nantinya. Tentu saja mimpi ini sangat personal, karena itu saya ingin mengatakan bahwa tidak ada hak siapapun untuk 'menganggu' mimpi saya ini. Untuk itu, dalam bab ini ingin memberikan gambaran sosok Gubernur Aceh.

Pertama, saya ingin mengetahui apakah betul Aceh adalah daerah yang cukup kaya dari segala bidang (Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam)? Jika jawabannya 'Ya.' Kemudian saya juga ingin mengetahui apakah saya sanggup mengelola kedua sumber tersebut. Jika tidak, maka saya tidak mau melanjutkan mimpi saya ini. Takut nantinya ketika jadi Gubernur Aceh saya malah memanfaatkan kedua sumber tersebut untuk diri saya sendiri.

Kepiawaan dalam mengelola SDM dan SDA memang diperlukan sebagai Gubernur Aceh, minimal ini dalam mimpi saya. Karena itu, jika saya tidak punya kualifikasi untuk mampu mengantur kedua sumber tersebut, lebih baik saya tidak menjadi Gubernur. Sebab, dalam mimpi saya, menjadi Gubernur sama saja dengan melakukan investasi. Seberapa banyak uang di rekening saya untuk mendukung upaya saya menjadi orang Nomor Satu di NAD. Dan, sebagai manusia, jika terpilih maka hal yang pertama saya lakukan adalah menarik kembali seluruh modal ke rekening pribadi saya. Karena itu, sekali lagi, saya tidak punya waktu untuk 'mengurus' SDM dan SDA di Aceh.

Kedua, saya ingin mengetahui apakah betul rakyat suka dan mau memilih saya sebagai Gubernur NAD. Jika jawabannya iya. Maka ini adalah 'hutang' yang harus saya bayar ketika menjadi Gubernur kepada mereka. Sebab mereka telah mengamanatkan suara mereka kepada saya melalui PILKADA. Sebagai Gubernur saya harus mampu memilih dan memilah mana suara rakyat yang tulus kepada saya dan mana suara yang dibeli oleh tim sukses saya.

Sementara jika jawabannya tidak. Maka satu hal yang akan saya lakukan adalah mundur teratur dalam pencalonan ini. Sebab menjadi pemimpin di Aceh bukan hanya memerlukan kepiawaan dan manajemen, tetapi juga memerlukan dukungan dari rakyat. Jika tim sukses melakukan 'keganjilan' selama Pilkada, maka itu pertanda saya memang tidak layak jadi pemimpin NAD untuk 4 tahun ke depan. Dengan kata lain, kepintaran yang ada dalam diri saya, belum mampu menjawab apakah saya sanggup menjadi Gubernur NAD. Sebab, rakyatlah yang menentukan apakah mereka suka atau tidak kepada sosok saya.

Dalam melihat ini, saya juga ingin tahu apakah mereka suka kepada saya, karena janji saya, uang yang saya miliki, atau karena visi dan misi saya. Dalam hal ini, agaknya saya masih memikir ulang untuk maju ke PILKADA. Sebab mimpi saya ternyata tidak mampu memberikan harapan untuk jadi Gubernur NAD. Rakyat juga ternyata belum siap untuk memilih saya untuk jadi pemimpin mereka. Mereka juga belum tahu siapa sesungguhnya yang layak menjadi pemimpin mereka. Mereka juga belum terbiasa dengan memilih pemimpin yang belum teruji 'jam terbangnya.' Sebab hampir beberpa pemimpin di Aceh selalu 'diuji' dan 'dipilih' oleh DPR sebelumnya. Jadi, kali ini saya akan dipilih oleh rakyat dan saya betul-betul berhutang kepada mereka.

Ketiga, saya ingin mengetahui apakah program-program saya sebagai modal untuk kampanye atau untuk membangun NAD. Jika dengan kepiawaan yang saya miliki, saya sanggup meluncurkan program-program selama kampanye, rakyat tertarik dengannya, dan akhirnya memilih saya. Maka ini adalah pertanda bahwa saya akan gagal ketika menjadi Gubernur NAD nantinya. Sebab, program-program saya adalah hasil rekayasa dari manajemen isu yang dilakukan oleh tim sukses saya. Jadi, saya khawatir jika saya tidak memberikan jabatan kepada mereka nantinya, program-program ini tentu lebih baik disimpan dalam lemari kantor. Sebab saya harus menservis (*proyek thank you*) kepada seluruh tim sukses saya yang telah memberikan stimulus program-program kerja selama kampanye saya menjadi Gubernur Aceh. Akibatnya, saya ternyata sangat sadar dan abai bahwa program untuk membangun Aceh terrnyata tidak saya miliki sama sekali. Uniknya tim sukses saya tidak tertarik untuk memikirkan program-program tersebut.

Jadi, apapun yang saya lakukan selama kampanye belum tentu akan saya lakukan saat saya dipilih menjadi Gubernur NAD. Sebab, saat menjadi Gubernur NAD saya akan ditemani oleh pejabat yang sama sekali adalah rekan-rekan tim sukses saya. Akhirnya, selama menjadi Gubernur NAD saya hanya memelihara koncoisme belaka. Karena itu, saya mungkin akan abai dan menganggap penting pada konsep-konsep bagaimana membangun Aceh secara komprehensif. Alhasil, saya pun sekali lagi memikirkan bahwa menjadi Gubernur ternyata adalah bagaimana melakukan produktivitas dan aktivitas untuk membangun koncoisme saat saya terpilih.

Keempat, saya juga ingin tahu apakah saya sanggup menjadi pendengar yang baik, terhadap segala masukan, baik dari kawan maupun lawan politik saya. Jika tidak dan memang saya tidak sanggup, karena saya adalah manusia biasa, maka saya tidak akan maju menjadi Gubernur NAD. Sebab menjadi pemimpin adalah bagaimana menjadi pendengar yang baik terhadap segala persoalan yang didera oleh rakyat. Menjadi pendengar bukan berarti tidak merespon ketika adalah persoalan, namun setelah mendengar mencoba mengkaji apa yang harus saya lakukan. Kebijakan apa tepat yang cocok untuk saya ambil, setelah menjadi 'pendengar.'

Demikian pula, saya tidak mau asal dengar dan hanya membaca laporan dari bawahan saya. Karena itu, jika saya tidak punya waktu untuk menjadi 'pendengar yang baik' mungkin saya juga perlu tim yang mau 'mendengar' seluruh persoalan yang menimpa Aceh saat ini. Sebab, kebiasaan mendengar adalah salah satu kebiasaan yang sulit saya terapkan di Aceh. Kebiasaan kita (termasuk saya) adalah ingin didengar oleh orang lain. Sehingga semua orang ingin bicara dan didengar oleh orang lain. Saya pikir sekali lagi saya tidak mau jadi Gubernur NAD, sebab sulit sekali menjadi pendengar yang baik.

Kelima, saya juga ingin mengetahui apakah 'kaum berkacamata' (baca ilmuwan) mau membantu saya selama menjadi Gubernur Aceh. Sebab saya belajar dari beberapa negara yang sedang maju dan berkembang, bahwa kemajuan suatu bangsa sangat didukung oleh 'kaum berkacamata.' Saya akan mendata berapa potensi 'kaum berkacamata' di Aceh saat ini, untuk tidak mengatakan membuat *database Intelektual Aceh*. Jika mereka tidak mau membantu saya selama menjadi Gubernur Aceh, maka ini juga pertanda saya tidak layak jadi Gubernur. Sebab pada akhirnya 'kaum berkacamata' malah akan melirik saya sebagai 'lahan' untuk meningkatkan pendapatan mereka.

Jadi, 'kaum berkacamata' adalah kelompok masyarakat yang harus saya dekati, sebab seluruh kebijakan saya harus dilandasi oleh sebuah penelitian dan pengkajian. Dan, yang mampu melakukan ini adalah 'kaum berkacamata.' Karena

itu, dukungan dari kelompok ini sangat saya perlukan. Saya juga belajar dari pengalaman Gubernur Aceh sebelumnya, bahwa mereka ternyata tidak tertarik untuk melirik intelektual dalam merumuskan kebijakan mereka.

Setelah saya membuat 'daftar menu' jadi Gubernur Aceh sesuai dengan angan-angan dan mimpi saya. Tampaknya tugas Gubernur memang berat sekali dan menuntut dukungan dari segala pihak. Dari kelima faktor di atas adalah beberapa indikasi bagaimana menjadi orang Nomor Satu di Aceh saat ini saat sulit. Uniknya, di Aceh saat ini malah orang berlomba-lomba mengincar jabatan ini dan berlomba-lomba ingin mengatakan bahwa 'rakyat suka saya.' Mungkin 'daftar menu' di atas tidak berlaku sekarang di Aceh. Jadi, mimpi saya jadi Gubernur dan memang tidak akan pernah terwujud, adalah refleksi bagaimana menjadi pemimpin ternyata tidak begitu mudah.

Terkadang membangun suatu bangsa memang berawal dari mimpi.Jadi mimpi saya ini mungkin akan diwujudkan oleh calon-calon pemimpin saat ini di Aceh yang akan menjadi pemimpin Aceh di tingkat propinsi dan kabupaten. Kalau memang iya, maka saya akan berhenti bermimpi. Sebab saat ini sudah ada Calon Gubernur yang akan mewujudkan mimpi saya tersebut.

Supaya kita mudah mewujudkan mimpi di Aceh, maka saya akan mencoba menguraikan bagaimana cara kita mencari pemimpin Aceh. Anda ibaratkan anda ke pasar ikan untuk mencari ikan yang bagus untuk dimasak. Kadang ikan sangat banyak sekali di pasar, tetapi anda tidak akan membeli semua ikan tersebut. Anda tentu saja memilih yang sesuai dengan selera Anda dan keluarga. Kalau seorang Bapak membeli ikan, dia tentu akan ingat anak dan istri yang akan makan. Tetapi kalau ibu yang beli, ikan yang bagus adalah yang bisa dimasak oleh dia, bukan yang bisa dimakan oleh keluarga. Kalau anak-anak yang beli, tentu ikannya tidak akan pernah bagus, sebab sering ditipu sama tukang jual ikan.

Demikian lan kita dalam mencari pemimpin saat ini di Aceh. Kita akan memilih mereka, seperti kita sedang membeli ikan. Kadang, pemimpin bagus dari tampilan luarnya, dia kaya raya. Namun juga ada pemimpin yang bagus, tetapi dia tidak punya uang sama sekali. Ada juga calon pemimpin yang punya massa, tetapi tidak tahu cara memimpin. Demikianlah, begitu rumitnya mencari pemimpin di dunia ini sekarang.

Contoh kecil di atas, saat bapak, ibu, dan anak membeli ikan, adalah contoh kecil bagaimana dalam kehidupan ini kita membuat pilihan yang baik, tidak hanya untuk kita sendiri. Pemimpin yang baik, memang seperti ikan yang kita beli di pasar, sehingga dia hanya kita pilih, karena dia baik dan jujur serta bermanfaat bagi

keluarga kita. Jadi, ikan yang baik belum tentu kita beli, sebab kadang penjual, sering menipu pembeli. Kebanyakan penjual ikan, tidak aka menjual ikan yang bagus pada hari itu, sebab dia akan menjual ikan yang tidak terjuan kemarin.

Di pasar Aceh, saat kita membeli ikan, apalagi anak-anak yang beli, selalu dimarahi oleh orang tuanya, sebab dia selalu beli ikan yang salah. Kadang ikan dibilang sama penjual sangat bagus kepada anak-anak. Dia langsung beli, apalagi jika sang penjual memberikan diskon, sebagai uang jajan mereka. Hampir dapat dipastikan, anak-anak selalu kena tipu tidak hanya beli ikan, tetapi juga daging di Aceh.

Inilah fenomena kita dalam memilih pemimpin. Terkadang kedewasaan memang belum begitu menguat manakala kita memilih pemimpin. Sikap anak-anak yang cenderung mudah ditipu adalah sesuatu yang harus kita jauhi saat kampanye pemilihan kepala daerah di Aceh nanti. Sebab, saya pikir kita orang Aceh, bukan anak-anak yang mudah ditipu. Rakyat harus pandai membedakan mana yang benar dan mana yang palsu, serta mana yang hanya untuk mencari jabatan sesaat. Konsep ini memang lagi-lagi, tidak jauh dari sifat demokrasi, di mana pemimpin dipilih oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi, pemimpin yang baik adalah mereka yang betul-betul dikenal sama rakyat, bukan pemimpin yang asal jadi.

Selain itu, mencari pemimpin juga seperti kita jalan-jalan di pasar malam, di mana semua tontonan diberikan kepada kita hanya dalam satu malam. Kadang, kita hanya berdiri melihat satu tempat pameran. Kadang hanya tersenyum sama penjaga stand-nya. Demikian pula, kadang kita bertanya sedikit untuk sekadar ingin tahu, tapi tidak pernah lama-lama. Uniknya, kadang kita malah berlama-lama pada satu stand. Kita tidak pernah bertanya mengapa kita betah di situ.

Fenomena ini memang lazim kita temukan dalam pasar malam atau pameran pembangunan. Pengunjung punya tempat favorit untuk dikunjungi setiap malam. Dalam konteks ini, memilih pemimpin juga tidak jauh seperti ke pasar malam. Kita disuguhkan puluhan calon pemimpin dengan puluhan program kerja. Kadang kita tidak pernah belajar bagaimana mengetahui apakah program tersebut dapat dikerjakan atau hanya untuk pemikat hati kita supaya memilih mereka. Bagaimana pun, sejak di sekolah hingga kuliah, kita tidak pernah diajarkan bagaimana memilih pemimpin yang baik. Sebab pemimpin yang baik bukan muncul dari akal, tetapi bagaimana kata hati. Konon kata filosof, hati adalah mahkamah manusia yang tidak pernah berbohong. Di sinilah kadang kita sering abai dalam memilih pemimpin. Sebab kata hati kita abaikan, sebab kadang tidak sedikit calon pemimpin telah memberikan kita uang atau hadiah untuk kita. Supaya menyogok 'akal' untuk

memilihnya. Bagaimana pun, manusia tidak bisa tidak bisa 'menyogok' hati manusia. Ini adalah urusan Tuhan, di mana dia yang selalu memberikan pilihan dalam hati manusia.

Jadi, kata hati dalam memilih calon pemimpin adalah sangat diperlukan, supaya tidak salah dalah menetapkan pilihan. Kampanye adalah hanya ibarat 'tukang jual ikan' yang berusaha memikat calon pembeli. Jadi, kita harus berhati-hati dengan kampanye yang akan muncul untuk memilih seorang pemimpin baru di Aceh.

Dalam hal ini, saya berargumen bahwa ada tiga kategori untuk melihat pemimpin yang baik. *Pertama*, jika calon pemimpin tersebut mencalonkan diri dengan paksa dan bahkan mengklaim bahwa dia sudah dipilih rakyat, maka ini pertanda pemimpin ini belum bisa memimpin rakyat. Sebab, dalam memimpin tidak boleh ada nafsu, untuk tidak mengatakan bahwa sering nafsu itu muncul dari niat yang tidak baik. Nafsu untuk memimpin memang diberikan oleh Tuhan, tetapi menjadi pemimpin rakyat sepertinya tidak boleh dilandasi dengan nafsu.

Calon pemimpin seperti ini memang sudah muncul di kalangan rakyat Aceh. Mereka datang seolah-olah saya lah yang paling pantas menyelesaikan sekian persoalan Aceh sekarang. Sayalah yang mampu melakukan segenap agenda pembangunan Aceh. Sayalah yang sudah layak untuk menjadi pemimpin Aceh. Jadi, sepertinya kita harus memikir ulang untuk memilih pemimpin yang yang maju PILKADA seperti kategori ini.

Kedua, jika calon pemimpin datang kepada calon pemimpin lain untuk mengatakan kita akan memimpin Aceh bersama, maka ini juga pertanda akan menjadi kemunduran. Sebab, menjadi pemimpin sejatinya bukan dilandasi oleh perkawanan semata. Perkawanan atau *koncoisme* adalah tali untuk membuka korupsi uang rakyat. Tidak sedikit calon pemimpin yang datang ke calon lain untuk diajak bergabung guna memenangkan dirinya dalam PILKADA mendatang.

Biasanya, faktor daerah dan 'jam terbang' adalah suatu pemikat dalam membangun *koncoisme*. Sehingga, terkadang kita melihat tidak sedikit calon pemimpin atau calon wakil pemimpin yang tidak pernah punya 'jam terbang' dalam kehidupan rakyat Aceh. Mereka diajak karena bisa membantu menaikkan suara sang calon pemimpin. Ini gejala yang tidak sehat, sebab biasanya orang yang 'dikerjain' seperti ini akan menjadi simbol belaka, saat sang calon menjadi pemimpin nantinya.

Dia tidak akan digunakan dalam proses pengambilan kebijakan, sebab dia hanya digunakan untuk pengambilan suara rakyat di daerahnya. Jadi, rakyat

juga harus jeli dalam membaca tanda-tanda munculnya calon pemimpin yang menggunakan strategi ini. Sebab, kadang kehancuran sebuah pemerintahan karena dilakukan saat calon pemimpin melakukan aturan main seperti ini.

Ketiga, pemimpin yang diinginkan oleh rakyat dan tidak pernah ingin menjadi pemimpin. Biasanya, ini sangat sedikit, untuk tidak mengatakan mustahil. Calon pemimpin seperti ini memang bukan muncul dari gedung atau rumah mewah. Pemimpin model ini memang dapat kita temukan di Aceh saat ini. Tetapi dia memang sangat tidak menggebu-gebu untuk menjadi pemimpin Aceh. Dia hanya diajak orang atau kelompok masyarakat untuk jadi pemimpin.

Kebiasaan pengalaman sukses pemimpin dunia adalah muncul dari personal yang akrab di telinga rakyat dan selalu membela kepentingan rakyat. Biasanya mereka akan muncul ke permukaan, tanpa disangka-sangka sebelumnya. Di sinilah kita lihat adanya pemimpin yang bersih pikiran dan hati dalam pemimpin Aceh.

Agaknya, penjelajahan saya ini jangan digunakan sebagai panduan untuk memilih pemimpin di Aceh saat mendatang. Namun, renungan singkat yang tidak ilmiah ini, setidaknya hanya diperuntukkan bagi rakyat bawah, bukan untuk kalangan terpelajar. Sebab, mereka sendiri sudah tahu mana pemimpin yang baik, sejak mereka sekolah dasar hingga kuliah di perguruan tinggi. Dengan begitu, rakyat pun sebenarnya sudah bisa melihat dan menilai mana pemimpin yang diimpikannya.

Dapat dikatakan bahwa betapa sulitnya mencari pemimpin. Sebab, pemimpin itu hanya satu orang. Seperti kita membeli ikan, dari puluhan jenis ikan, hanya satu atau dua jenis yang akan kita beli. Jadi, demikianlah dalam memilih pemimpin Aceh mendatang. Semua orang mengatakan bahwa dia layak jadi pemimpin, namun selalunya pemimpin hanya seorang.

Sejarah manusia memimpin manusia di muka bumi ini memang beragam. Ada pemimpin yang muncul atau diutus, karena dipilih oleh Allah. Kita sering menamai mereka sebagai Nabi atau Rasul. Mereka selalu dibantu oleh Allah dalam menjalankan roda pemerintahannya, jika kita setuju bahwa tidak sedikit Nabi yang menjadi pemimpin bagi kaumnya. Terkadang untuk meyakinkan kaumnya, mereka dibalut dengan kekuatan mukjizat. Agaknya, sulit untuk mendapatkan seorang yang dapat memimpin seperti ini.

Sementara itu, ada juga pemimpin yang dipilih karena garis keturunan. Rakyat cenderungn dipaksa untuk mengikuti kata hati pemimpin tersebut. Terkadang muncul angkara murka dan pembunuhan mewarnai roda pemerintahannya. Pemimpin model ini memang ada yang berhasil. Namun dia selalu dikelilingi oleh

orang bijak, yang sering dinamakan penasihat. Akibatnya, baik dan buruk atau sukses dan tidaknya model kepemimpinan semata, ini sangat dipicu oleh penasihat raja atau pemimpin.

Model yang cenderung yang dipakai saat ini adalah seorang pemimpin apapun gelarnya, dipilih oleh rakyat atau wakil rakyat. Inilah puncak manusia dipilih oleh manusia agar mau memimpin mereka di dunia ini. Sebagai manusia yang dipilih manusia, agaknya Allah mewakilkan 'suaranya' pada rakyat yang sering dinamakan 'suara rakyat atau suara Tuhan.' Karena itu, jika rakyat kecewa atau marah, sepertinya Allah juga marah kepada pemimpin tersebut. Logika ini memang masih memerlukan perdebatan lanjutan.

Namun keyakinan saya mengatakan bahwa manusia dapat dipilih oleh manusia menjalankan Perintah Allah di muka bumi ini. Karena, setiap ada upaya untuk mengelabui manusian, Allah pasti marah. Di sinilah puncak keagungan manusia dibandingkan makhluk lain di dunia ini. Dalam dunia binatang, pemimpin dipilih berdasarkan siapa yang terkuat dalam habitatnya. Kita sering mendengar bahwa Singa adalah Raja para binatang dan hukumnya dikenal dengan hukum rimba.

Karena itu, ketika manusia menggunakan 'hukum rimba' dalam memimpin, maka rakyat pasti marah, dan tidak mengejutkan jika Allah pun marah. Ketidakberhasilan seorang pemimpin lebih banyak dipicu oleh adanya 'hukum rimba.' Dengan kata lain ketika manusia 'menghisap darah' manusia maka yang terjadi adalah ketidakseimbangan hukum Allah (*sunnatullah*) di dunia ini. Di sinilah letak kepiawaan seorang pemimpin dalam mengatur manusia bagi kaumnya.

Sementara itu, rakyat selalu memilih pemimpin melalaui apa kata hati, bukan kata pikiran. Sebab pemimpin lahir dari sebuah jawaban kata hati akan siapa sesungguhnya yang layak mengaturnya di bumi ini. Dengan kata lain, sesungguhnya pemimpin adalah disuruh mengatur hati manusia, karenanya, yang memilih pemimpin adalah hati dalam diri manusia tersebut. Di sinilah kunci utama sebuah konsep kepemimpinan Aceh mendatang yaitu memilih pemimpin dengan kata hati.Dan, pemimpin menjalankan roda pemerintahannya dengan kaa dan mata hati. Jika konsep ini dapat diterapkan oleh calon gubernur mendatang, saya amat sangat yakin, Aceh akan keluar dari kemelut krisis kepemimpinan.

Jadi, pada hakikatnya, manusia dapat memimpin manusia asalkan melalui apa yang dikatakan hati, sebab hati memang tidak dapat membohongi manusia. Dalam hal ini, pertautan hati adalah bentuk dari kesepakatkan antara nafsu dan akal pikiran dalam menjalankan roda pemerintahan. Dengan bahasa yang sederhana, manusia bisa memimpin manusia jika mereka mampu melaksanakan kata hati dan

mengontrol akal dan nafsu. Karena itu menjadi pemimpin bukan pekerjaan yang sangat mudah. Hampir semua sekolah tidak pernah mengajarkan manusia bisa memimpin manusia. Yang ada sekolah yang didesain untuk persiapan menjadi *calon pemimpin*, bukan menjadi pemimpin.

Sebab itu, pemimpin itu harus bijak dan tidak mudah tergoda oleh hawa nafsu, untuk tidak mengatakn serakah. Bijak biasanya muncul dari sikap keras kepala manusia untuk tidak selalu bekerja sama dengan jin atau syaitan. Dalam hal ini, pemimpin memang selalu tidak pernah dipilih berdasarkan jumah umur atau 'jam terbang.' Dia dipilih bukan karena riwayat hidup. Sebab rakyat pun tidak tahu persis kadang latarbelakang seorang calon pemimpin. Jadi itu untuk menampakkan gambar atau simbol adalah bentuk hubungan sang calon pemimpin dengan pendukungnnya. Sering kita melihat setiap ada pemilihan umum (PEMILU), yang dipilih rakyat adalah gambar atau simbol. Ini menunjukkan bahwa rakyat memilih siapa yang menurut hati mereka menjadi pemimpinnya.

Dengan demikian, manusia dapat dipilih oleh manusia menjadi pemimpin manusia sendiri, karena beberapa hal di atas. Namun, ini bukan berarti sulit mencari seorang pemimpin. Pemimpin selalu lahir dari rakyat biasa, namun mempunyai sifat yang luar biasa. Bahkan tidak jarang pemimpin muncul dari keluarga yang tidak mampu atau miskin. Ini menunjukkan bahwa manusia dijadikan pemimpin memang berangkat dari kehidupan yang penuh dengan gejolak hati. Sebab itu, saat dia menjadi pemimpin, dia akan tahu bagaimana susahnya menjadi orang miskin.

Jadi, kemampuan manusia memimpin manusia sesungguhnya memiliki beberapa skenario. Sebenarnya sebuah masyarakat yang sukses adalah manakala seorang pemimpin maju dan memimpin dengan kata hati, bukan hawa nafsu. Dalam kaitan ini, pemimpin yang kategori ini harus bersedia 'membaca' hati rakyatnya. Sebab, dengan demikian, hubungan hati pemimpin dengan hati rakyat akan menciptakan keseimbangan dalam roda pemerintahan. Sekali lagi, jika pemimpin ini berhasil 'membaca' hati rakyatnya, maka sesungguhnya dia telah berhasil 'membaca' perintah Allah, sebab mata hati rakyat adalah sumber kekuatan bagi seorang pemimpin di dunia ini.

Jika pemimpin berangkat dengan hawa nafsu dan akal pikiran, maka tidak akan menutup kemungkinan, akan muncul kemunduran bagi rakyat Aceh. Sebab, ketika hati rakyat mencoba memilih seorang pemimpin yang serakah, mana ini akan memunculkan bencana dalam roda pemerintahannya. Sebab, 'sumber kekuatan' yang dipakai pemimpin yang penuh nafsu akan cenderung menutup seluruh mata hati sang calon pemimpin tersebut. Dengan bahasa yang tegas, calon pemimpin yang maju karena nafsu akan kekuasaan, tidak akan berhasil mendapatkan 'sumber

kekuatan' sebab suara Tuhan selalu dibagi kepada calon pemimpin yang maju dengan mata hatinya.

Dari dua skenario di atas, ada satu impian saya dalam memunculkan konsep kepemimpinan di Aceh. Ini memang super sulit, untuk tidak mengatakan mustahil. Yaitu konsep kepemimpinan yang dimulai dengan mata batin (*bukmum*). Jika calon pemimpin maju dengan alasan mata batin dan rakyat pun memilihnya karena batin mereka memilihnya, maka saya berpendapat, untuk beberapa tahun kemudian, Aceh Baru akan muncul.

Sebab, mata batin adalah sumber dari segala kehidupan manusia di dunia ini. Allah memberikan ini sebagai petunjuk (*hidayah*) manusia untuk mencapai kesejahteraan di dunia dan akhirat. Karena itu, jika Allah telah menutup pintu batin dan hati pemimpin, maka perilaku penyimpangan kekuasaan adalah femonena yang ama lazim kita temukan di Aceh. Sebab, nafsu dan akal telah mengontrol dirinya untuk melakukan korupsi. Intinya, ketika pintu hati dan batin ditutup, maka akal dan nafsu naik kepermukaan dengan membuat persekutuan dengan Jin dan Setan.

Gagasan ini memang terkesan sangat sufistik. Namun saya mencoba melihat kepempinan lebih dekat, yaitu hati, batin, nafsu, dan akal pikiran. Sebenarnya keempat energi tersebut memiliki dorongan positif, hanya saja masih sulit kita jumpai pemimpin yang mampu mengatur empat kekuatan dalam diri manusia tersebut. Dari sini dapat ditarik purna wacana, bahwa manusia bisa memimpin manusia, asalkah dia mampu mengontrol hati. Rakyat ketika memilihnya juga menggunakan kata hati. Karenanya, pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu melaksanakan kata hati dan mengawal nafsu dan akal pikirannya.

Untuk melihat apakah rakyat perlu pemimpin, maka saya ingin meneruskan diskusi ini dengan refleksi saya ketika menjadi pembicara dalam salah satu forum akademik. Pada 22-23 September 2006, saya diundang menjadi pembicara dalam Simposium *Islamic Culture(s), Nation-building and the Media: Contemporary Issues* yang diadakan oleh jaringan Universitas yang konsern dalam kajian Asia di Australia. Dalam konferensi ini muncul beberapa isu terkini yang sedang hangat terjadi dalam dunia Islam, seperti modernitas, negara bangsa, pluralisme, budaya Islam, dan democracy di negara Muslim.

Salah satu yang menarik perhatian saya dalam simposium ini adalah ketika kami membahas tentang Islam di Asia Selatan, tepatnya di Pakistan dan sekitarnya. Saat ini di kawasan ini telah terjadi alienasi identiti yaitu pemimpin memaksakan sistem mereka kepada rakyat bawah, tanpa memikirkan akibat yang muncul di kalangan rakyat tersebut.

Sejenak, ini memang terkesan sangat simplistik, namun jika ditarik dalam konteks ke-Islam-an, isu ini sangat menarik, apalagi menjelang PILKADA di Aceh. Terutama, saat kita memunculkan pertanyaan apakah rakyat perlu pemimpin? Apakah pemimpin betul-betul ingin memimpin rakyat? Dua pertanyaan ini sangat menusuk dan sulit di jawab oleh siapapun.

Kita mulai misalnya, jika rakyat memandang bahwa dengan adanya pemimpin baru, akan menghilangkan jatidiri mereka sebagai orang Aceh dan Muslim, maka ini akan menjadi sinyal kemunduran. Sebab, di kalangan rakyat Aceh masih ada nilai-nilai adat istiadat yang berbasiskan agama. Adat istiadat ini memang sudah tidak begitu penting, namun rakyat ingin sekali menerapkannya dalam kehidupan mereka.

Demikian pula, setiap segi kawasan Aceh memiliki nilai-nilai sosial yang amat berbeda. Mereka hidup bukan dengan Undang-Undang atau peraturan-peraturan negara yang selalu 'membingungkan,' namun lebih disebabkan oleh nilai-nilai sosial yang telah mereka miliki selama ratusan tahun. Karena itu, sekarang kehadiran peraturan-peraturan ternyata malah menyisihkan nilai-nilai sosial yang sedang mengental dalam masyarakat Aceh.

Lebih jauh lagi, di kalangan rakyat Aceh sudah terbentuk sebuah jaringan sosial yang tampaknya ingin dihapuskan oleh kehadiran pemimpin baru. Dalam tradisi sosial masyarakat Aceh, korupsi tidak pernah ada sama sekali. Dalam tradisi rakyat Aceh, penyelewengan jabatan sangat sulit ditemukan. Ini sebenarnya dipicu oleh budaya malu yang sudah mendarah daging dalam masyarakat Aceh.

Hal ini disebabkan adanya sebuah kontrak sosial yang berbasiskan nilai-nilai agama dan nilai-nilai sosial di kalangan rakyat Aceh sendiri. Sehingga, tatatan sosial pun sangat dinamik satu sama lain, untuk tidak mengatakan saling mengisi sesamanya. Fenomena ini memang sangat dekat dengan teori-teori ilmu sosial, di mana terkadang kekuasaan malah menjauhkan rakyat dari nilai-nilai yang telah mereka pelihara.

Jadi, munculnya pemimpin baru di Aceh sepertinya sudah harus memikir kembali, apa betul mereka ingin memimpin rakyat sambil tetapi menjaga nilai-nilai sosial dan nilai-nilai keagamaan yang sudah mendarah daging dalam masyarakat Aceh.

Karena itu, munculnya konflik di Pakistan (Asia Selatan) yang sudah berpuluh tahun, seiring dengan munculnya rezim militer, ternyata malah menjauhkan rakyat kawasan ini dari nilai-nilai sosial dan nilai-nilai keagamaan yang telah mereka miliki. Tahmina Rashid, salah satu warga Pakistan dan dosen di Melbourne University

dan RMIT Melbourne, telah merasakan kejadian ini, menuturkan bahwa betapa sulit menjadikan negaranya keluar dari kemelut, sebab pemimpin negaranya ingin 'memaksakan' semua kehendaknya kepada rakyat.

Dalam konteks Aceh saya ingin menegaskan bahwa rakyat dan pemimpin adalah ibarat dua mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Karena itu, dia sering diandaikan seperti 'pengantin baru' di mana rakyat adalah pengantin wanita, dan pemimpin adalah pengantin pria. Jadi, seharusnya yang muncul adalah kerja sama untuk mengarungi bahtera keluarga (Aceh).

Karena itu, pengantin pria ketika ingin 'melamar' (baca: kampanye) tidak perlu ingin disukai rakyat, tetapi bagaimana rakyat sadar bahwa pilihannya tidak salah. Potret di atas, kasus yang menimpa Pakistan, adalah sebuah catatan bagaimana 'keluarga' tidak harmonis, karena pengantin pria (pemimpin) ingin 'mendominasi' dan terlalu 'mengatur' istrinya (rakyat).

Jadi kunci utama dalam bahtera keluarga Aceh nantinya adalah bagaimana keharmonisan diciptakan kedua belah pihak, tanpa harus ingin mendominasi. Karena itu, *pengertian* dan *kompromi* adalah jalan yang cukup signifikan dalam proses ini. Pemimpin harus mengerti rakyat adalah ibarat perempuan, yaitu harus diperhatikan, disayang, dimanja. Sebab itu, tidak mengejutkan dalam Islam dituturkan bahwa seorang pemimpin itu sukses jika dia mampu memimpin keluarganya. Jadi, sesungguhnya pemimpin adalah ibarat suami, dan rakyat adalah istri.

Perbandingan ini memang unik dan jarang diungkit kepermukaan. Sebab, terkadang pemimpin sendiri hanya perlu rakyat ketika akan naik kuasa. Dan, rakyat pun perlu pemimpin jika mereka terdesak. Proses ini memang tidak lazim dalam sebuah keluarga. Sebab, yang diperlukan adalah harmonisasi dalam bentuk komunikasi. Karena itu, sering keluarga retak karena tidak ada harmonisasi dan komunikasi di antara suami dan istri.

Gurauan saya ini memang sedikit tidak begitu lazim, ketika saya menganalogikan pemimpin dan rakyat sebagai sebuah keluarga. Namun, sepertinya judul bab ini *apakah rakyat perlu pemimpin*? Sama dengan *apakah perempuan perlu suami?* Bukan apakah *suami perlu istri*? Jadi, di sini tampak bahwa rakyat lebih sensitive. Karena itu, untuk mendekatinya yang diperlukan adalah kasih sayang dan saling percaya, kemudian tidak ingkar janji. Keduanya harus setara satu sama lain guna membangun bahtera keluarga besar (Aceh).

Dalam arti, rakyat dan pemimpin harus berjalan bersama-sama, bukan saling sikat-sikut-sikit, tetapi saling asah-asih-asuh. Dengan demikian, rakyat memang

betul ingin seorang pemimpin yang akan membimbing mereka, bukan 'menghisap' mereka. Dalam kajian politik, sering diandaikan bahwa suara rakyat adalah 'suara Tuhan.' Ini memang agak benar, sebab sering suara rakyat memang tidak pernah yang 'buruk' atau melawan agama dan nilai-nilai sosial. Mereka selalu minta seperti yang diinginkan oleh Tuhan, kalau boleh saya katakan Allah SWT.

Mereka minta pemimpin tidak mencuri uang mereka, Allah pun memerintah hal yang sama. Mereka minta pemimpin tidak ingkar janji, Allah pun berulang kali menegaskan akan pentingnya menepati janji. Mereka minta pemimpin akuntabel, Allah sangat sayang sama orang yang jujur. Jadi, sesungguhnya 'suara Tuhan' yang diperdengarkan oleh rakyat adalah suatu bukti bahwa pemimpin harus ikut apa kata Allah. Sebab, hampir seluruh tatanan pemerintahan di seluruh dunia, memang berupaya menjalankan 'perintah Tuhan.' Hanya saja mereka bukan beragama Islam.

Jadi, tugas pemimpin sebenarnya adalah sangat berat sekali, jika tidak boleh dikatakan mustahil untuk dilakukan saat ini. Sebab, pemimpin harus menjaga rakyat seperti seorang *istri* dan 'suara Tuhan.' Untuk melakukan ini, hanya pemimpin yang jujur yang bisa hadir dalam konteks Aceh sekarang. Sebab, bagaimanapun, keinginan untuk menjadi pemimpin adalah setengah dari upaya 'melamar' calon istri (*rakyat*) yang cantik jelita. Jadi, calon pemimpin memang tidak hanya dituntut pintar namun juga bijaksana dan mampu 'menjaga' rakyat seperti istrinya sendiri. Kita sedang menanti seorang pemimpin hadir yang betul-betul mencintai rakyat Aceh seluruhnya. Karena itu, mari kita bersabar hingga bulan Desember ini, untuk mencari seorang 'suami' yang betul-betul sayang 'istrinya.'

BAB 7

Dekonstruksi[1] Pemahaman tentang Rekonstruksi Aceh

SEJAUH ini, ramai kalangan yang menganggap bahwa rekonstruksi Aceh lebih bergantung pada berapa jumlah bangunan yang dibangun selama pasca Tsunami. Rekonstruksi Aceh juga diartikan berapa jumlah uang yang telah dan sedang dihabiskan di Aceh. Pola pemahaman ini kemudian merambat pada asumsi bahwa rekonstruksi Aceh akan berhasil jika rakyat sudah dapat rumah dan fasilitas umum lainnya.

Pemahaman ini tentu saja tidak keliru. Namun akan menarik agaknya jika kita mampu melihat apa sebenarnya yang diinginkan oleh bumi Aceh saat ini. Sebab proses pembangunan kembali Aceh ternyata menyita agenda pekerjaan rumah yang tercecer yaitu bagaimana pembangunan mental rakyat Aceh. Inilah persoalan yang cukup signifikan untuk ditelaah saat ini. Karena itu, rekonstruksi Aceh harus mengalami pendefinisian ulang atau lebih tepatnya dekontruksi pemahaman rekonstruksi Aceh.

Dekontruksi ini bermaksud untuk mengambil satu agenda yang cukup komprehensif di mana pembangunan masyarakat Aceh lebih penting. Dengan kata lain, pembangunan masyarakat Aceh pada gilirannya bukanlah semata-mata dalam

[1] Tentang konsep *dekonstruksi*, baca Jacques Derrida, *Writing and Difference* (New York and London: Routledge, 2010).

dunia pendidikan saja. Namun juga mencakup bagaimana manusia Aceh mampu memahami kembali arah kehidupan mereka di muka bumi ini.

Persoalan ini memang sangat filosofis, karenanya sulit dibenamkan dalam masyarakat Aceh. Sebab selama ini pemahaman rekonstruksi Aceh selalu dimaknai dengan bangunan atau fasilitas fisik yang tampak oleh mata. Sementara pembangunan mental manusia-nya lebih abstrak dan tidak dapat dirasakan dalam waktu yang singkat. Sebab itu tidak jarang agenda pembangunan kembali mental orang Aceh tidak tampak ke permukaan. Namun demikian, semua kita harus mengakui agaknya bahwa pembangunan mental rakyat Aceh harus dikedepankan dalam rangka rekonstruksi Aceh.

Lebih jauh lagi, ada beberapa konsep awal untuk menelaah bagaimana proses pendefinisian ulang rekonstruksi Aceh. Pertama, rakyat Aceh sedang mengalami kegamangan dalam kehidupan mereka. Mereka sangat bergantung pada apa yang sedang terjadi di Aceh. Akhirnya masyarakat hilang sikap inisiatif mereka dalam mengadapi segala cobaan hidup. Akibatnya pola hidup masyarakat Aceh, mulai elit sampai rakyat biasa cenderung statis, untuk tidak mengatakan hilangnya dinamis.

Proses kegamangan atau masyarakat statis ditandai dengan kehidupan yang hanya mengulang sejarah apa yang telah dilakukan kemarin hari. Artinya mereka hilang sifat dan sikap untuk mengambil langkah strategis dalam hidup mereka. Ini sebenarnya diakibatkan oleh dunia uang yang sudah menjadi standar hidup masyarakat Aceh saat ini. Apa yang hendak saya tekankan adalah masyarakat hanya mengulang-ulang cara-cara lama untuk mempertahankan hidup mereka.

Ini sesungguhnya sangat dipicu oleh hilangnya budaya dan peran agama dalam masyarakat yang diikuti oleh minimnya pemahaman akan pentingnya pendidikan. Sehingga semangat budaya yang harusnya terus berkembang dan agama yang sejatinya terus menerus mengontrol masyarakat sebagai pedoman mereka hilang secara perlahan-lahan. Pada gilirannya mereka selalu berjalan di tempat. Jika kita melihat secara dekat kehidupan masyarakat Aceh memang tidak ada hal yang baru yang bersifat positif. Semua hanya mengulang-ulang dari apa yang telah dilakukan sebelumnya. Karena itu semakin banyak bangunan di Aceh tidak akan mempengaruhi mental orang Aceh. Sebab mereka memang suka berjalan di tempat dan jarang punya inisiatif.

Kedua munculnya sikap yang malas di tengah-tengah masyarakat Aceh. Mahathir Mohammad ketika membangun negaranya pernah menuturkan bahwa orang Melayu pemalas.[2] Pernyataan Mahathir ini kemudian mengundang kecaman

[2] Mohamad, *Malay Dilemma*.

dari orang Melayu di Malaysia. Namun jika dilihat hampir semua sendi kehidupan di Malaysia memang 'jarang diatur' oleh orang Melayu. Mereka hanya menjadi konsumen semata.

Di Aceh, pola masyarakat malas memang sudah begitu kelihatan di depan mata. Salah satu alasan yang paling sering terdengar adalah jarangnya diberikan kesempatan kepada putra Aceh. Alasan klasik ini memang sudah begitu membumi sehingga selalu menjadi pelarian ketika muncul pandangan kenapa orang Aceh tidak berhasil.

Untuk sekadar membandingkan dengan kelompok Cina di Indonesia pada era 1970-an dan 1980-an yang tidak memiliki hak istimewa. Ketika saya membaca satu penelitian tentang bisnis Cina di Jakarta ternyata mereka semua menyekolahkan anak mereka agar bisa berbisnis dengan harapan agar mereka bisa bertahan hidup ditengah-tengah himpitan kekuasaan. Salah satu nasihat yang sering terdengar dalam keluarga Cina adalah *silahkan membeli satu mobil jika kamu sudah punya uang untuk membeli sepuluh mobil.* Filosofi inilah yang kemudian membentuk mental anak-anak Cina dalam mengembangkan dunia bisnis mereka dengan kerja keras.

Di Aceh yang muncul malah sebaliknya pola hidup boros dan malas telah menjadi fenomena yang tidak terbantahkan. Sehingga dalam satu keluarga yang penting adalah bagaimana bisa makan enak dan tidak lapar. Namun aspek pemberdayaan kemudian menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan. Sehingga pola keberhasilan di Aceh lebih banyak dimaknai dengan bagaimana mendapatkan uang dengan jalur cepat dan instant. Akibatnya adalah dengan pola kerja yang minimal mampu meraup untung yang maksimal.

Pada gilirannya yang muncul ke permukaan adalah semua orang di Aceh malas bekerja. Etos malas ini kemudian membudaya dan malah menjadi gurita dalam kehidupan kita saat ini. Sebagai contoh orang di Aceh akan bekerja seadanya jika mereka sudah tahu untungnya berapa. Sebaliknya jika tidak jelas untungnya maka jangan harap dia mau bekerja maksimal.

Ketiga adanya proses pedangkalan kepatuhan pada kedipsilinan dan tanggung jawab. Saat ini banyak kalangan yang sedang mengkritik peran BRR yang dinilai tidak punya tanggung jawab. Kritikan ini adalah contoh kecil dari bagaimana pengabaian terhadap harga sebuah tanggung jawab. Tanggung jawab kemudian hanya dimaknai dengan kwitansi semata. Namun hasil dari pekerjaan tersebut tidak pernah menampakkan bagaimana harga tanggung jawab.

Kedispilinan dan tanggung jawab adalah dua mata koin yang saling mendukung. Biasanya mereka yang memiliki kedisiplinan yang tinggi juga memiliki sikap tanggung jawab. Sebab dua perilaku ini memang berjalan seiring seirama dalam kehidupan manusia. Sebagai hasil dari perkalian silang antara kedisiplinan dan tanggung jawab adalah kejujuran.

Dalam hal ini harga kejujuran di Aceh memang sudah tidak begitu membumi. Kelangkaan kejujuran ini selalu dibalut dengan sikap malas dan gamang. Jadi tulisan singkat ini telah mencoba mencuatkan beberapa konsep dalam melakukan dekontruksi pemahaman rekonstruksi Aceh yaitu bagaimana menghilangkan sikap gamang dan malas dalam masyarakat Aceh. Pada saat yang sama rekonstruksi Aceh akan lebih bernas jika pembangunan mental masyarakat juga ditingkatkan. Dalam bab ini saya hanya mengulas beberapa konsep awal yang sangat berkaitan satu sama lain.

Jadi rekonstruksi Aceh sesungguhnya adalah dalam rangka menuju Aceh Baru yaitu Aceh di mana munculnya masyarakat partisipatif. Inilah sebenarnya impian saya ke depan dalam membangun Aceh yang bebas dari sikap gamang dan malas. Pembangunan Aceh bukanlah diukur dari berapa jumlah uang dan kwitansi yang dihabiskan dalam satu tahun, namun dia adalah sebuah proses di mana masyarakat mulai sadar bahwa mereka sebenarnya yang harus membangun diri mereka, bukan orang lain.

Akhirnya bab ini adalah satu sentilan bagi kita semua dalam membangun Aceh. Harus dibangun sebuah pemahaman bahwa yang akan mengubah warna Aceh bukanlah orang lain, tetapi orang Aceh sendiri. Dengan begitu, orang Aceh sendirilah yang harus berubah dan bangun dalam keterpurukan sambil menghilangkan sikap sebagai penonton dalam pembangunan Aceh. Sekali lagi sentilan ini berlaku juga bagi siapa saja termasuk penulis sendiri. ☙

BAB 8

Bermula dari Apa Itu Islam Protestan?

SAYA bertemu dengan istilah ini sejak berkawan karya-karya Barat, terutama ketika membaca bagaimana pengaruh Weber dalam tradisi gerakan Islam, khususnya pada 'Ali Syari'ati, seorang ideolog gerakan Revolusi Iran.[1] Setelah itu, Sukidi juga sudah mulai membawa istilah ini ke dalam kajian ketika dia menganalisa tokoh-tokoh gerakan reformis Islam, mulai dari Intellektual Iran, Sayyid Jamal al-Din al-Afghani, Ali Shari'ati, and Hashem Aghajari.. Sayang debat ini terhenti sebab Sukidi sendiri tidak tahu apa sebenarnya yang dimaksud dengan Islam Protestan.[2] Dua artikelnya memang hanya mencari benang merah apa yang terjadid dalam tradisi Kristen kemudian mencoba mengaitkan apa yang terjadi di dalam tradisi gerakan Islam. Namun Sukidi mengingatkan bahwa "*as with 'traveling theory reconsidered', however, there is also the possibility that the idea of Islamic Protestantism will be reinterpreted and reinvigorated by a newer generation.*"[3]

[1] Ervand Abrahamian, "'Ali Shari'ati: Ideologue of the Iranian Revolution," in *Islam, Politics, and Social Movements*, ed. IIII and Ira M. Lapidus Edmund Burke (London: I.B. Tauris, 1988).289-97.

[2] Sukidi Mulyadi, "Max Weber's Remarks on Islam: The Protestant Ethic among Muslim Puritans," *Islam and Christian Muslim Relations* Vol.17, No.2(2006); Sukidi Mulyadi, "The Travelling Idea of Islamic Protestantism: A Study of Iranian Luthers," *Islam and Christian Muslim Relations* Vol.16, No.4(2005).

[3] Mulyadi, "The Travelling Idea of Islamic Protestantism: A Study of Iranian Luthers."

Diskusi ini kemudian saya temui dalam milist Aceh Institute, yang dipaparkan oleh Fuad Mardhatillah. Kemudian orang mulai mendiskusikan apa sesungguhnya Islam Protestan? Diskusi yang menarik memang bukan ini mengatakan bahwa Fuadlah yang pertama sekali mencetuskan istilah ini dalam debat studi Islam. Namun yang menarik bagi saya setidaknya adalah bagaimana pola pengadopsian istilah ini serta merta dipakai dalam konteks sekarang. Karena artikel tidak bisa menjelaskan bagaimana perkembangan dan transformasi istilah ini, saya hanya ingin mengajak pembaca untuk lebih 'berhati-hati' dalam menggunakan istilah yang tidak jelas latar belakang sejarahnya.

Saya agak tertarik untuk mengupas bagaimana memposisikan diskusi ini dalam diskursus pemikiran Islam. Sebab dalam tradisi pemikiran Islam di Indonesia, ada banyak versi Islam yang dapat ditemui, seperti Islam Sontoeloeyo versi Soekarno, Islam Rasional versi Harun Nasution, Islam Peradaban versi Nurcholish Madjid, Islam Jalan Tengah versi Amien Rais, Islam Kiri versi Hasan Hanafi, Islam Transormatif versi Imanuddin, Islam Post-Tradisionalisme versi kawan-kawan dari NU di Yogyakarta. Selain Islam dikaitkan dengan konsep juga sering dikaitkan dengan istilah kawasan seperti Islam Jawa, Islam Sasak, Islam Lombok, Islam Banten, dan Islam Padang.

Apa sebenarnya yang berkembang di Indonesia mengenai proses pelabelan. Dalam tradisi pemikiran Islam, setiap ada upaya untuk menembus tradisi kejumudan selalu membawa semangat liberal. Sebagai contoh, Charles Kurzman sendiri ketika mengupas Islam Liberal masih mengaitkan dengan Syari'at Islam. Diskusi Islam liberal sendiri masih belum menemui satu jalan yang jelas, sebab apa yang dipahami oleh Charles Kurzman[4] berbeda dengan apa yang ditulis oleh Greg Barton[5] dan yang dipahami oleh kawan-kawan muda NU. Diskusi Islam Liberal ini juga berbeda dengan apa yang dikupas oleh Leonard Binder.[6]

Sekarang ada pula istilah baru yang dipopulerkan oleh Farish Noor dan Omid

---

[4] Charles Kurzman, "Introduction: Liberal Islam and Its Islamic Context," in *Liberal Islam: A Source Book*, ed. Charles Kurzman (New York and Oxford: Oxford University, 1998). 3-26.

[5] Greg Barton, *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, Dan Abdurrahman Wahid* (Jakarta: Paramadina, 1999). Greg Barton, "Neo-Modernisme: A Vital Synthesis of Traditionalist and Modernist Islamic Thought in Indonesia," *Studia Islamika* 2,3(1995).1-75; Greg Barton, "Indonesia's Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid as Intellectual Ulama: The Meeting of Islamic Traditionalism and Modernist in Neo-Modernist Thought," *Islam and Christian-Muslim* 8,3(1997).337-42.

[6] Leonard Binder, *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1988). Joshua Parens, "Whose Liberalism? Which Islam? Leonard Binder's "Islamic Liberalism"," *Political Science and Politics* 27,3(1994).514-5.

Safi tentang Islam Progressif. Istilah yang kurang lebih ingin menembus tradisi umat Islam agar kembali pada tauhi dan akal. Namun tetap membuka mata pada modernisme. Hingga sekarang debat ini masih berjalan dalam beberapa milist, hingga kawan-kawan yang terlibat dalam diskusi ini ingin menjadikan Islam Progressif sebagai gerakan yang bisa dirasakan oleh umat Islam. Ramai kalangan yang menyebutkan tokoh Islam Progressif dapat dilihat dari apa yang dilakukan Chandra Muzaffar melalui NGO-nya di Malaysia, yaitu *JUST*.

Demikian pula, di kalangan Islam Kanan muncul sekian istilah seperti Islam Salafi, Islam Wahabi, Islam Kanan, Islam Fundamentalis, Islam Tektualis dan lain sebagainya. Intinya kelompok dengan model Islam seperti ini ingin mengembalikan tradisi pemikiran Islam pada al-Qur'an dan Sunnah Rasul dengan model yang cukup rigid.

Terkadang dua kutub pola pemahaman ini saling berseberangan jika tidak bermusuhan. Dalam konteks inilah kehadiran Islam Protestan juga mengundang sejumlah tanda tanya, setidaknya . Jika istilah ini ingin mengadopsi apa yang terjadi dalam Kristen, saya agaknya ingin mengutip pandang Max Weber ketika dia menulis:

> *Normally, Protestantism . . . absolutely legitimated the state as a divine institution and hence violence as a means. Protestantism, especially, legitimated the authoritarian state. Luther relieved the individual of the ethical responsibility for war and transferred it to the authoritarian.*[7]

Jika ini yang dimaksudkan oleh Islam Protestan maka sejatinya, sang pencetus harus berhati-hati dalam menelurkan satu istilah baru. Saya sebelumnya membiarkan istilah ini berkembang di kalangan kawan-kawan di milis, namun belakangan tertarik untuk menarik diskusi ini pada kutub yang netral dan tidak *taken for granted*. Semangat Protestan memang ingin mendobrak, tetapi pemikiran ini sendiri masih menjadi perdebatan di kalangan sosiolog.

Sebenarnya saya dapat memahami mengapa Islam Protestan ini muncul. Paling tidak dalam bayangan saya sang pencetus ingin mengatakan bahwa orang Islam harus meniru semangat orang Protestan, walau Luther sendiri hanya ingin mendobrak tradisi gereja dan meminta agar Injil bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman. Inilah upaya yang ingin dilakukan oleh Protestan.

Demikian pula semangat Islam Protestan yang ditulis Sukidi juga ingin mengupas bagaimana peran tokoh Islam dalam Revolusi Iran, khususnya ketika

---

[7] H.H. Gerth and C. Wright Mills, eds., *From Max Weber in Sociology* (London and Boston: Routledge 1974). 124.

mereka ingin mengadopsi sifat Lutheran. Pada era 2000-an, gerakan Islam ini kemudian sering dikatakan sebagai embrio gerakan Islam di seluruh dunia. Hampir puluhan buku yang mengupas mengatakan gejala Islam Radikal juga dipengaruhi oleh Revolusi Iran. Jika kita sepakat apa yang digunakan sebagai basis gerakan sosial saat itu adalah 'Islam Protestan,' maka secara otomatik, gejala pemikiran ini melahirkan sikap radikalisme, suatu sikap yang semakna dengan jiwa Protestan itu sendiri. Pada ujungnya pengaruh gejala Islam Protestant ternyata memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap munculnya kekerasan dalam agama.

Demikian pula, ketika Fuad dan kawan-kawan lain, ingin membumikan istilah di Aceh, maka hal tersebut juga perlu dipikir ulang. Sebab kalau tidak, gejala memunculkan istilah yang 'membingunkan' dari sisi epistemologis dan kerangka histories, akan menjebak kalangan yang tidak mengerti duduk perkara bagaimaan perkembangan istilah tersebut dan bagaimana kancah pemikiran Islam di dunia saat ini.

Sebenarnya munculnya beragama istilah Islam saat ini lebih pada upaya untuk mendobrak tiga hal. *Pertama*, ingin mendobrak tradisi yang mengkungkung umat Islam dari bangkit kembali. Dalam arti, tidak sedikit tradisi-tradisi yang diguna pakai, sering dikaitkan dengan Islam, ternyata menyebabkan kemunduran bagi umat Islam sendiri. *Kedua*, ingin membuka wacana yang seolah baru dalam studi Islam, manakala dengan cara memunculkan istilah yang kurang akrab di telinga kita. Fenomena ini memang sering terjangkiti di kalangan kelompok studi Islam yang hanya membuka satu mata rantai pemikiran Islam saja. Akibatnya, banyak hal kadang salah kaprah ketika ditelurkan sebagai wacana pemikiran. Dalam hal ini, upaya ini tidak keliru, namun untuk ditimbang dari disi sosiologi dan sejarah, maka sekali lagi, konsep ini tidak akan memberikan makna yang cukup signifikan bagi rakyat Aceh saat ini. *Ketiga*, ingin memunculkan paradigma baru dalam pemikiran Islam, tanpa memahami bagaimana kerangka munculnya istilah tersebut. Pemikir Islam kontemporer, seperti Abdul Karim Souroush, Khaled Aboe al-Fadl, Farid Essad, Hassan Hanafi, Ali Harb, Al-Jabiri, menulis segunung karya dalam menelurkan pemikiran mereka. Sedangkan tradisi kita di Indonesia, dan sudah mulai terjangkiti di Aceh, sering dengan memunculkan istilah atau gagasan yang terputus-putus, kemudian dikutip dan dipandang cukup komprehensif. Salah seorang penulis muda dari Yogyakarta, Nurcholik Ridwan, pernah mengkritik tradisi ini di Indonesia ketika mengomentari pemikiran Islam Liberal oleh Ulil.[8]

[8] Nur Kholik Ridwan, *Islam Borjuis Dan Islam Proletar: Konstruksi Baru Masyarakat Islam Indonesia* (Yogyakarta: Galang Press, 2001).

Kritikan saya ini memang tidak beralasan, sebab secara akademik, istilah Islam Protestan sendiri masih menjadi wacana, tidak hanya di timur, tetapi juga di Barat. Namun pola penyebaran istilah ini di Aceh saat ini sama nasibnya dengan kemunculan Islam Liberal oleh kawan-kawan di Jakarta. Yaitu, orang meributkan istilah tersebut sambil saling kafir mengkafirkan, kemudian membuat kotak-kotak dalam komunitas umat Islam sendiri. Dalam konteks ini, energi ini memang belum begitu tampak di Aceh, tetapi ingin mengajak untuk mengubah tradisi, supaya kalau ada istilah yang baru, kita harus 'bertanggungjawab' untuk menjelaskan, setidaknya tahu bagaimana latar belakang istilah tersebut. Sekali lagi, ulasan ini memang sikap 'sayang' terhadap dunia akademik, khususnya dalam bidang studi Islam di Aceh. ☙

BAB 9

Agenda Studi Aceh

AGAKNYA studi Aceh sekarang banyak diminati oleh para sarjana asing. Pada saat yang sama, rakyat Aceh sendiri tidak begitu tertarik dalam menstudi daerahnya. Studi Aceh, dulu pernah didalami oleh para penjajah ketika ingin menaklukkan daerah Aceh. Snouck Hurgronje melalui studi etnografinya telah membuka cakrawala berpikir sarjana lain di Barat tentang Aceh.

Sebab itu Snouck menjadi 'bapak' peletak kajian antropologi di Aceh dengan beberapa buku yang dihasilkannya selama di Aceh. Snouck bahkan menjadi inspirasi bagian sosiolog dan antropolog untuk terus melakukan kajian antropologi di Indonesia, tidak terkecuali di Aceh.[1] Inilah 'kehebatan' Aceh yang berhasil digambarkan oleh Snouck, walaupun orang masih memandangnya sebagai penjajah.[2]

[1] John R. Bowen, "The Transformation of an Indonesian Property System: "Adat," Islam, and Social Change in the Gayo Highlands," *American Ethnologist* 15, no. 2 (1988); John R. Bowen, "Salat in Indonesia: The Social Meanings of an Islamic Ritual," *Man* 24,4(1989); John R. Bowen, *Sumatran Politics and Poetics: Gayo History, 1900-1989* (New Haven and London: Yale University Press, 1991); John R. Bowen, "On Scriptual Essentialism and Ritual Variation: Muslim Sacrifice in Sumatra and Morocco," *American Ethnologist* 19,4, no. Imagining Identities: Nation, Culture, and the Past (1992); John R. Bowen, "Elaborating Scripture: Cain and Abel in Gayo Society," *Man* 27,3(1992); John R. Bowen, *Muslims through Discourse* (New Jersey: Princenton University Press, 1993); John R. Bowen, "The Forms Culture Takes: A State-of-the-Field Essay on the Anthropology of Southeast Asia," *The Journal of Asian*

Setelah itu, sejak sebelum kemerdekaan, sarjana asing mulai berdatangan ingin meneliti Aceh. Bahkan entri tentang Aceh pun dapat dibaca dalam *Encyclopedia Islam* yang ditulis oleh Aj. Piekaar. Agaknya nilai kepentingan Aceh tidak terhenti di situ, para sarjana asing pula datang belakangan ingin meneliti bagaimana kekuatan ulama dalam pergolakan konflik di Aceh.

Episode kajian Aceh kemudian mulai redup sejak Aceh bergabung dengan Republik Indonesia. Kajian tentang hanya berisi tentang sejarah kehebatan rakyat Aceh dan 'kegagalan' beberapa tokoh Aceh dalam memisahkan Aceh daripada Republik Indonesia. Bahkan dalam sejarah Perjuangan Bangsa Indonesia, Aceh ditampilkan sebagai propinsi modal yang berisi sejarah kepahlawanan Teuku Umar, Cut Nyak Dien, dan Cut Nyak Mutia. Foto mereka selalu terpampang dalam gambar pahlawan nasional Indonesia. Inilah potret akhir studi Aceh yang dapat dibaca dalam buku-buku *Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa* (PSPB). Kebanggaan kita hanya menjadi catatan sejarah semata.

Sejak era 1980-an dan 1990-an, kajian tentang Aceh pun mulai berkembang seiring dengan jalur konflik yang terjadi antara propinsi ini dengan Jakarta. Sarjana asing pun mulai mendekati Aceh dengan isu HAM dan sosial politik yang mengitari Aceh. Mereka masuk dan keluar Aceh selain hanya ingin menghitung jumlah korban. Juga memberi tahu kepada dunia luar bagaimana Aceh saat ini. Karena itu buku tentang Aceh era ini pun banjir sampai kita kehabisan waktu untuk membacanya.

Tinjauan singkat ini bukan ingin mengatakan bahwa studi Aceh memang tidak berkembang sama sekali. Namun studi Aceh telah berada di tikungan yang cukup menyedihkan, di mana orang minat terhadap Aceh saat Aceh tidak berada dalam posisi yang cukup bagus. Hampir semua buku tentang Aceh adalah buku tentang sejarah darah dan perjuangan rakyat Aceh. Walaupun episodenya berbeda, namun isi dan substansinya selalu tentang perjuangan dan kekerasan.

Yang uniknya di sekolah-sekolah, buku-buku tentang Aceh sangat minim. Mereka bahkan tidak kenal bagaimana studi Aceh. Bahkan sampai saat ini tidak

---

Studies 54,4(1995); John R. Bowen, ""You May Not Give It Away": How Social Norms Shape Islamic Law in Contemporary Indonesian Jurisprudence," *Islamic Law and Society* 5, no. 3 (1998); John R. Bowen, *Religion in Practices: An Approach to the Anthropology of Religion* (New York: Pearson, 2004).

[2] Harry J. Benda, "The Structure of Southeast Asian History: Some Preliminary Observations," in *Continuity and Change in Southeast Asia: Collected Journal Articles of Harry J. Benda*, ed. Adrienner Suddard (New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1972).

ada satu pun lembaga di Aceh yang betul-betul mengembangkan studi Aceh. Studi Aceh akhirnya dapat kita nikmati saat kita keluar negeri.

Pertanyaannya adalah apakah orang Aceh tidak suka belajar tentang 'diri mereka sendiri'? Apakah orang Aceh tidak punya waktu untuk mulai 'mengenal diri mereka sendiri' melalui pengkajian dan riset? Jawaban terhadap gugatan ini memang sangat sulit untuk dijawab. Sebab orang bisa saja menjawab bahwa 'kita tidak pernah punya waktu untuk mengkaji diri kita sendiri.'

Sehingga kajian tentang Aceh tidak begitu membumi di Aceh. Akibatnya, sangat wajar jika generasi muda Aceh tidak begitu tertarik dengan kajian Aceh dan sejak kecil mereka bahkan tidak diperkenalkan dengan bahasa Aceh. Di samping itu, studi Aceh juga tidak diperkenalkan dalam pendidikan sekolah dan perguruan tinggi. Karena itu, wajar jika studi Aceh di Aceh telah menjadi agenda yang terabaikan. Orang mulai bertanya-tanya apa yang hilang dengan diri mereka.

Sebenarnya, pada saat yang cukup kondusif seperti ini, semangat untuk melakukan studi Aceh sudah dapat dikembangkan lagi. Kajian tentang Aceh dapat dimasuki dalam beberapa pintu. Bagi yang tertarik dengan sejarah, dia bisa masuk melalui gerbang sejarah Aceh. Sebab hampir semua orang Aceh suka bicara sejarah Aceh. Namun untuk mencari orang Aceh yang mampu menulis sejarah mereka sendiri sangat sulit. Kita bahkan tidak punya direktori sejarah masing-masing kabupaten di Aceh saat ini.

Bagi yang tertarik dengan dunia ekonomi, agaknya kesempatan ini dapat dilakukan melalui pengajian dunia ekonomi Aceh. Agaknya kajian ini sangat urgen saat ini, guna membangun Aceh Baru yang mapan secara ekonomi. Sampai saat ini kita masih agak sulit menentukan bagaimana wajah ekonomi Aceh saat ini. Seperti ini dengan adanya studi ekonomi di Aceh akan sedikit banyak membantu pemerintahan baru untuk menyusun strategi pembangunan Aceh ke depan.

Demikian pula, bagi mereka yang tertarik dengan sosiologi dan antropologi, Aceh merupakan laboraturium sosial yang cukup baik untuk dijadikan sebagai bahan riset. Bagaimanapun kajian tentang kultur dan adat istiadat sangat penting dalam era kontemporer. Sebab dengan memahami setting sosial dan budaya, kita akan mampu mengenal wajah masyarakat Aceh saat ini. Isu-isu modernisasi, kosmopolitan, budaya pop adalah fenomena yang cukup terasa dalam masyarakat Aceh. Karena itu untuk mengetahui dampak ini, riset atau penelitian yang cukup mendalam adalah sebuah keniscayaan yang cukup urgen untuk dilakukan dalam waktu dekat.

Masih banyak lagi wilayah ilmu yang bisa dilakukan di Aceh. Harus diingat pula untuk mengubah nasib suatu masyarakat, riset adalah salah jawaban yang cukup komprehensif dalam mengenal Aceh. Dalam situasi ini, generasi muda juga sudah harus kembali untuk membangun studi Aceh di kampus ataupun lembaga swadaya masyarakat. Sebab dengan risetlah kita bisa mengubah peradaban kita. Langkah selanjutnya adalah menjadi studi Aceh sebagai sebuah kampanye penyadaran kembali identitas keacehan.

Sebab dengan pengembangan studi Aceh, maka Aceh pun akan dapat bersaing dengan dunia luar. Kemajuan yang dicapai negara maju adalah berkat studi atau riset yang mereka kembangkan. Untuk hal ini kita memang sangat pesimistis dengan perkembangan riset di Indonesia, sehingga wajar jika kemudian impak dari semangat riset ini tidak terasa di Aceh. Karena disebabkan oleh ketidak berdayaan pemerintah kita dalam mengembangkan dunia riset.

Dalam konteks Aceh ketertinggalan dunia riset amat sangat dirasakan. Bahkan sampai saat ini agaknya tidak ada satu lembaga pun yang mampu melakukan penelitian tentang Aceh di Aceh oleh orang Aceh sendiri. Pemerintah agaknya juga belum tertarik untuk mengembangkan dunia ini. Sebab dunia studi atau riset adalah bagaimana menghabiskan dana yang cukup besar untuk tujuan yang tidak praktis. Padahal jika kita mampu memiliki dan mengenali daerah kita, maka tidak sulit untuk memulai mengembangkannya secara baik.

Dengan demikian, hal ini memang bukan ingin mengajak kita untuk mengatakan bahwa studi Aceh adalah jalan keluar dalam pembangunan Aceh. Namun saya hanya ingin membuka mata kita bahwa studi Aceh telah menghiasi lembaran ilmu pengetahui di dunia, baik di Timur dan Barat. Karena itu ketika ada kalangan yang ingin mengembangkannya, demontrasi adalah bukan sikap yang bijak untuk menghalangnya. Demikian pula, ilmuwan di Aceh pun sudah saatnya memikirkan bagaimana mengembangkan dunia studi Aceh tidak hanya dalam seminar belaka, tetapi juga harus diikuti dengan tradisi riset dan publikasi. Dengan demikian, ketertinggalan Aceh dalam dunia ilmu pengetahuan, dapat di atasi, setidaknya ketika orang ramai mau berpikir bahwa kita sudah sangat perlu untuk belajar tentang diri kita sendiri.

Ramai yang mengatakan bahwa untuk membangun pendidikan di Aceh diperlukan dana yang tidak sedikit. Sehingga ada yang mengusulkan dana pendidikan sebaiknya 20 % persen dari APBD. Dengan demikian, mimpi untuk mewujudkan pendidikan di Aceh akan tercapai. Pandangan ini memang sudah begitu mengental dalam wacana pendidikan di Aceh, khususnya ketika isu otonomi daerah mencuat ke permukaan.

Akan tetapi, sejak empat tahun terakhir, di mana beberapa mahasiswa Aceh selalu diperdengarkan, bahwa Aceh memiliki dana berjumlah ratusan milyaran rupiah untuk membangun pendidikannya. Program ini, selain sangat menggiurkan mereka, juga tidak kalah pentingnya melihat apakah hanya uang yang diperlukan membangun pendidikan di Aceh.

Bahkan tidak sedikit yang mengambil contoh negara Malaysia sebagai contoh dalam membangun pendidikan di Aceh. Di mana pemerintah tersebut mengalokasikan dana pembangunannya untuk pendidikan selama 20 tahun lebih. Akhirnya, sejak akhir tahun 1990-an, pemerintah Malaysia menikmati hasil keringat mereka selamat 20 tahun lebih. Bahkan hampir setiap warga Malaysia selalu mengatakan bahwa Malaysia dulu belajar pada kita (Indonesia), namun sekarang kita harus belajar pada negeri ini.

Dua kenyataan di atas memang bukan ingin mengatakan bahwa uang adalah penyelamat pendidikan Aceh sekarang ini. Namun yang diperlukan adalah sejauh mana keseriusan pemerintah daerah dalam memperhatikan pendidikan, selain dengan logika uang. Sejauh ini, ada fenomena, misalnya dana beasiswa bisa juga habis dengan sekadar jalan-jalan ke luar negeri. Atau, ada juga uang beasiswa yang digunakan untuk membeli kendaraan bermotor oleh sang mahasiswa. Tentu masih banyak fenomena lain untuk menjustifikasi bahwa beasiswa ternyata tidak mampu menyelesaikan kemelut pendidikan di Aceh.

Apa yang hendak disampaikan adalah belum adanya sebuah standarisasi bahwa uang adalah indikator keberhasilan pendidikan di Aceh. Paradigma inilah yang terkadang membuat kita terjebak pada anggapan bahwa pendidikan bisa berhasil dengan uang. Akan tetapi, terkadang dana milyaran rupiah tersebut juga belum mampu menciptakan keberhasilan pendidikan. Jadi, kendati ada keinginan untuk menganggarkan dana pendidikan yang luar biasa, namun saya masih agak pesimististis untuk mengatakan bahwa pendidikan di Aceh akan berhasil dalam duapuluh tahun ke depan.

Dalam konteks ini, sebenarnya ada beberapa pra-syarat yang harus diambil sebagai catatan utama dalam membangun pendidikan Aceh. *Pertama*, para pengambil kebijakan dalam bidang pendidikan di Aceh harus mengerti betul skala prioritas sumber daya manusia yang diperlukan oleh daerah ini. Sejauh ini, sumber daya manusia tampaknya menjadi agenda yang terabaikan di kalangan pemerintah daerah.

Dalam bahasa lain, jika kita mempertanyakan kepada pemerintah daerah, berapa jumlah mahasiswa yang kuliah di Aceh, misalnya, tentu akan sangat

mustahil untuk mendapatkan jumlah yang pasti, kecuali mereka menelpon seluruh perguruan tinggi di Aceh dan seluruh Indonesia. Begitu juga bagaimana keperluan sumber daya manusia untuk 5-10 tahun ke depan, tentu pertanyaan ini tidak akan terjawabkan oleh pemerintah daerah.

Hal yang serupa juga terjadi, manakala kita mempertanyakan *data base* atau direktori pemerintah daerah, tentang berapa mahasiswa di luar negeri yang sedang belajar. Miskinnya database inilah yang terkadang membuat Aceh selalu 'kehilangan' putra-putra terbaiknya dalam rangka membangun Aceh.

Sebenarnya, jika mau diakui, bahwa keberhasilan Mahathir dalam membangun negaranya,[3] adalah manakala dia keliling dunia di mana selalu menanyakan berapa jumlah mahasiswa Malaysia di luar negeri. Setelah itu mereka didata oleh kerajaan Malaysia dan langsung 'dirapatkan' dengan instansi yang memerlukan sumber daya manusia. Akhirnya, mereka mengerti betul sumber daya mereka yang sedan dan akan mengisi roda pembangunan negaranya. Karena itu, kerajaan Malaysia hanya tinggal memanfaatkan sumber daya manusia yang telah ada, tanpa harus mengeluarkan dana yang besar.

Dengan begitu, tampaknya uang bukanlah salah satu penentu pembangunan pendidikan Aceh. Sebab, saat ini tidak sedikit sumber daya manusia Aceh yang 'bergentayangan' di beberapa negara. Dalam hal ini, sebenarnya ini lebih berharga daripada uang yang dianggarkan tiap tahun. Parahnya, mereka juga tidak begitu dilirik oleh pemerintah daerah Aceh. Akhirnya, mereka menjadi kelompok yang 'asing' di negeri sendiri.

Kedua, di Aceh belum terciptanya sebuah jaringan yang solid antara para pengambil kebijakan dengan ilmuwan Aceh, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Proses alienasi ilmuwan memang dapat dikatakan merupakan suatu kecelakaan sejarah bagi suatu bangsa. Bagaimanapun, keberhasilan beberapa negara maju dalam mengatur negaranya adalah berkat jalinan yang kuat antara ilmuwan dengan pengambil kebijakan.

Di Aceh, harapan ini agaknya masih sangat sulit ditemukan. Yang muncul adalah bagaimana kolaborasi ilmuwan dan pengambil kebijakan untuk

[3] Tentang Mahathir, baca In-Wong Hwang, *Personalized the Politics Malaysian State under Mahathir* (Singapore: ISEAS, 2003). Bridget Welsh, ed. *Reflections the Mahathir Years* (Washington, DC: Southeast Asia Studies Program, The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), Jonhs Hopkins University,2004); Frank-Jurgen Richter and Thang D. Nguyen, eds., *The Malaysian Journey: Progress in Diversity* (Kuala Lumpur: Marshall Cavendish,2004).

mengabaikan dunia pendidikan secara perlahan-lahan. Demikian pula, tradisi riset di Aceh memang masih belum begitu menggembirakan. Tidak sedikit kebijakan pemerintah yang tanpa dilandasi sebuah hasil kajian yang mendalam. Akhirnya, ilmuwan di Aceh lebih menjadi 'ban serap' bagi pemerintah daerah.

Sekali lagi, jalinan dan jaringan adalah suatu modal utama yang lebih bermakna dari sekadar uang. Meski ini masih belum begitu membumi, tampaknya jika hanya mengandalkan uang dalam membangun pendidikan di Aceh, tidak mengejutkan kemudian hasilnya pun tidak seperti yang diharapkan.

Ketiga, pemerintah daerah harus diisi oleh mereka yang mengerti betul bagaimana membangun pendidikan, bukan oleh yang mereka mengerti cara menghabiskan dana pendidikan. Selama ini, uang pendidikan Aceh memang selalu menjadi 'barang rebutan' bagi kelompok tertentu untuk mengelolanya. Karena itu, sebenarnya dana pendidikan tidak perlu diproyekkan atau mencari program bagaimana menghabiskannya dengan kegiatan yang tidak bermutu.

Bukan rahasia lagi, jika ada pandangan yang mengatakan bahwa tidak sedikit uang pendidikan Aceh digunakan dengan logika proyek. Maksudnya, jika ada lembaga yang melakukan *training*, dengan dana ratusan juta rupiah, maka salah satu hal yang perlu disosialisasikan adalah bagaimana antara panitia dan peserta harus 'saling tahu sama tahu' bahwa ini adalah 'proyek.' Inilah sebuah bencana dalam dunia pendidikan di Aceh, ketika dana pendidikan dijadikan sebagai proyek oleh lembaga tertentu. Munculnya pendidikan dan latihan dari beberapa instansi tertentu yang bersifat 'siluman' adalah salah satu bentuk bagaimana menghabiskan uang pendidikan di Aceh.

Dalam hal ini, tidak adanya pengawasan dan standarisasi dalam pengembangan dunia pendidikan di Aceh, tentu akan mengakibatkan kemunduran bagi Aceh sendiri. Inilah sebenarnya persoalan yang mendesak untuk diselesaikan dalam rangka membangun pendidikan Aceh. Yaitu, bagaimana mampu mengikis 'mafia' dilingkungan pendidikan sama sekali tidak professional kemudian selalu berupaya untuk menghabiskan uang pendidikan sendiri.

Jadi, ini hanya merupakan sebuah bahan renungan kita dalam membangun dunia pendidikan di Aceh. Sekali lagi, uang, sumber daya manusia, jaringan, dan profesionalisme adalah beberapa faktor penting dalam mengelola pendidikan. Sayangnya, faktor-faktor tersebut sering berjalan sendiri tanpa disatukan dalam sebuah konsep dan aksi yang matang. Sehingga yang muncul adalah dunia pendidikan Aceh lebih sering jalan di tempat, jika tidak boleh dikatakan mundur ke belakang. ☙

BAB 10

Ketika Syari'ah Islam menjadi Masalah

BELAKANGAN ini, saya banyak menerima surat elektronik dari kawan-kawan tentang situasi hukum Islam di Aceh[1] pasca Tsunami. Salah satu kesan yang paling mendalam adalah bahwa di Aceh telah terjadi proses Talibanisasi. Di samping itu, di Aceh juga dipandang telah terjadi pemahaman bahwa Syariat Islam hanya mengurusi perempuan. Kenyataan ini memperkuat dugaan bahwa Syariat Islam memang telah mengalami distorsi pemahaman terhadap isi dan kandungannya.

Bab ini memang tidak lagi ingin membahas perdebatan antara *fiqh*, hukum Islam, dan syariah Islam. Namun, apa yang ingin diketengahkan adalah bahwa terjadinya pembelokkan Syariah Islam di tikungan pemahaman sebagian kelompok bahwa jika perempuan tidak keluar malam atau memakai jilbab, maka Syariah Islam di Aceh dipandang sudah berhasil.

Baru-baru ini saya juga sempat berdiskusi dengan teman saya dari Arab Saudi tentang makna jilbab di kalangan orang Arab. Sebab, dalam tradisi Arab ada beberapa istilah yang digunakan untuk menggambarkan perempuan menutup

[1] Mengenai pemberlakuan hukum Islâm di Aceh, baca Bustamam-Ahmad, *Islamic Law in Southeast Asia: A Study of Its Application in Aceh and Kelantan*. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "The Application of Islamic Law in Indonesia: The Case Study of Aceh," *Journal of Indonesian Islam* 1,1(2007). 135-80. Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Kontribusi Daerah Aceh Terhadap Perkembangan Awal Hukum Islam Di Indonesia," *Al-Jâmi'ah: Journal of Islamic Studies* 64(1999). 143-75.

aurat, seperti istilah *abaya*, *boushiya*, *buknuk*, *burqa*, *shalwar*, *niqab*, *dupatta* dan lain sebagainya. Di Arab sendiri, perdebatan tentang jilbab memang jarang terjadi, sebab bagi mereka memakai jilbab adalah tradisi yang sudah berlangsung sejak Zaman Hammurabi.

Namun yang menarik adalah ketika mengulas tentang jilbab, maka menurut teman saya ini, harus menutup semua tubuh, kecuali tangan dan mata. Sedangkan jika mengikuti gaya wanita memakai jilbab, maka ini bukan sebenarnya memakai jilbab, tetapi hanya *hijab*. Diskusi ini memang tidak menarik untuk diangkat ke permukaan. Sebab, semua orang punya pemahaman tersendiri tentang jilbab. Jadi jika mengikuti pandangan kawan saya dari Arab Saudi, maka semua orang Aceh harus memakai baju yang besar dan harus berwarna hitam!

Debat di atas memang bukan diskusi dalam dataran Syariah Islam, tetapi adalah diskusi tentang diskusi tradisi Arab, yang terkadang dipandang sebagai representasi Islam. Tentu saja kita tidak akan sepakat dengan pernyataan ini. Mengingat model wanita dalam mengenakan jilbab pun sangat beragam. Sekali lagi, ini juga bukan perdebatan dalam wacana Syariah Islam, tetapi lebih merupakan wacana dalan fashion saja.

Sekarang persoalan yang tidak kalah sulit untuk dibahas adalah memberikan wilayah yang cukup jelas antara mana wilayah Syariah Islam, budaya/tradisi, dan fashion. Bagi yang berpegang teguh pada Syariah Islam, maka kelompok ini akan memiliki definisi sendiri tentang jilbab. Sedangkan yang mengutamakan budaya/tradisi, maka data-data historis bagaimana perempuan memakai baju di Arab, adalah bukti otentik bahwa jilbab adalah bagian budaya Arab. Sementara yang memakai logika fashion, jilbab akan dimaknai sebagai pelengkap dalam berbusana.

Jarang memang ketika perspektif ini bertemu dalam satu titik, bahwa jilbab harus seperti yang diinginkan oleh kelompok Syariah Islam. Di sinilah kemudian memunculkan tensi bahwa kelompok Syariah Islam memiliki kekuasaan dan otoritas untuk memberangus setiap kelompok perempuan yang tidak memakai jilbab.

Yang lebih parah lagi adalah jika indikasi keberhasilan penerapan Syariah Islam di Aceh diukur dari keberhasil ”mengurusi kaum perempuan” dalam ruang publik. Pemahaman yang rigid dan stagnan ini kemudian yang memunculkan sikap antipati terhadap Syariah Islam yang ujungnya dipandang sebagai proses Talibanisasi di Aceh.

Pada hemat saya, pemahaman ini harus diubah dengan asumsi bahwa perempuan memang tidak perlu diurus oleh Syariah Islam apalagi dengan *sweeping*

di jalan raya. Dengan kata lain, harus dibangun sebuah pemahaman bahwa persoalan wanita berikut dengan jilbab yang mereka pakai adalah bagian kecil dari agenda Syariah Islam.

Dalam konteks ini, salah satu persoalan yang urgen untuk bahas adalah bagaimana merangkai sebuah pendidikan yang bersifat islami (*tarbiyah*) dalam rangka membina pemahaman wanita terhadap diri mereka sendiri. Dengan kata lain, perangkat Syariah Islam harus mendesain sebuah program pendidikan, baik cara formal maupun informal, untuk mengatakan bahwa jilbab itu penting bagi perempuan.

Model ini adalah kampanye publik yang memang tidak pernah menguras rasa emosi, sikap malu, dan rasa hormat terhadap perempuan. Dengan kata lain, perempuan sendirilah yang menentukan bahwa jilbab memang patut dan pantas bagi mereka. Jika kaum lelaki kemudian datang dan merazia mereka, maka pandangan bahwa Syariah Islam hanya mengurusi wanita benar adanya. Dengan kata lain, harus dibangun opini publik bahwa memakai jilbab itu bagus.

Untuk menyederhanakan logika jilbab ini, saya akan ambil contoh kebiasaan kaum lelaki merokok dalam bus atau labi-labi, di mana hampir semua penumpang termasuk wanita dan anak-anak menjadi korban perokok pasif. Sampai sekarang tidak aturan bahwa lelaki dilarang merokok di tempat tersebut. Kaum lelaki akan sangat marah, jika mereka ditegur di depan umum. Bahkan tidak jarang, kita lihat misalnya, kaum lelaki merokok di ruang AC. Saya dapat membayangkan bahwa jika kita menegur kaum lelaki ini, maka mereka akan sangat marah atau bermasam muka.

Sebenarnya, jika ukur bahwa bahaya ”jilbab” dan ”merokok” pada dasarnya sama saja. Namun Syariah Islam di Aceh tentu saja tidak akan mengurusi para perokok tersebut, di mana korbannya adalah wanita dan anak-anak. Kaum wanita pun tidak akan melakukan protes ke jalan-jalan untuk menentang aksi ini, karena sekali lagi, ini bukan wilayah Syariah.

Analogi di atas adalah contoh kecil betapa persoalan kecil memang tidak perlu menuntut kita untuk menguras tenaga. Kesadaran kolektif adalah salah satu jawaban untuk persoalan ini. Pemerintah sebenarnya harus menciptakan kesadaran kolektif ini. Di Malaysia, saat ini sedang gencar-gencarnya kampanye anti terhadap website pornografi. Tentu saja mereka bukan berusaha untuk merazia berapa banyak anak-anak muda yang membuka website porno, namun pemerintah ini menkampanyekan betapa bahaya pengaruh website porno. Sehingga sekarang, di setiap jalan, hampir ditemukan tulisan yang kurang lebih: jika Anda menemukan halaman *web lucah* (porno), maka tekan alt. kemudian F4 pada *keyboard* Anda.

Sebenarnya inilah yang menjadi agenda yang tercecer di Aceh, di mana seolah-olah Syariah Islam adalah milik Kadis Syariah atau Wilatul Hisbah. Saya masih menyimpan harapan bahwa Syariah Islam di Aceh akan mengadopsi nilai-nilai keacehan yang sama sekali tidak bertentang dengan nilai-nilai dalam agama Islam. Jika ini diketemukan, maka sebenarnya seluruh lapisan, baik mereka yang mengusung Syariah Islam, tradisi/budaya, dan fashion, dapat duduk bersama dalam rangka menciptakan proses kesadaran publik, misalnya, dalam hal jilbab dan merokok dalam bus atau labi-labi.

Jika ini terjadi maka sesungguhnya tidak perlu ada perang ayat atau adu argumen dalam menerapkan Syariah Islam di Aceh. Masing-masing kelompok, pada prinsipnya, dapat mengisi sama lain. Hemat saya ini juga sebenarnya yang diinginkan oleh Syariah Islam, di mana ketika ummah dapat menyelesaikan urusan mereka sendiri dengan damai.

Akhirnya dugaan bahwa Syariah Islam di Aceh akan menjadi lahan Talibanisasi akan terkikis sedikit demi sedikit. Ini tentu saja memerlukan kedewasaan kita untuk membangun sebuah pemahaman bahwa Syariah Islam bukan hanya mengurusi perempuan. Masih banyak perilaku kecil di kalangan masyarakat kita, terutama yang dilakukan oleh kaum lelaki, yang malah menyalahi nilai-nilai Syariah Islam.

Sebagai salah satu contoh kasus yang amat menarik untuk diskusi di atas, *New York Times* (1/08/2006) menerbitkan satu laporan tentang pemberlakuan Syariat Islam di Aceh yang cukup 'menyentak' dengan judul *Indonesian Province Embraces Islamic Law.* Pada saat yang sama, ICG (*International Crisis Group*) (31/07/06) juga menurunkan laporan mereka tentang hal yang sama yaitu tentang perberlakuan Syariah Islam di Aceh. Dua laporan ini memang hal baru bagi *bule* dalam menulis pandangan mereka tentang permberlakuan Syariah Islam di Aceh. Namun yang tanda tanya bagi saya adalah bagaimana kita 'membaca' kegiatan *bule* Aceh, kemudian mereka menulis tentang Aceh di negara mereka. Dalam hal ini sangat menarik untuk melihat bagaimana kontribusi *bule* dalam 'melihat' Aceh dari dekat, khususnya tentang pemberlakuan Syari'at Islam.

Saat ini, di Aceh memang ramai sekali *bule* yang datang dengan berbagai tujuan. Tsunami tampaknya menjadi berkah bagi *bule* untuk melihat Aceh secara dekat, setelah beberapa tahun mereka 'diharamkan' berdiam di Aceh. Ada yang datang sebagai aktivis NGO dengan dalih kemanusian, kendati punya misi tertentu. Ada pula yang datang sebagai peneliti yang ingin sekali meneliti Aceh. Tidak sedikit pula yang datang dengan misi 'kenegaraannya.' Demikian juga, tidak sedikit pula yang menetap di Aceh untuk tujuan pengembangan agama tertentu. Semua kedatangan mereka memang melalui 'berkah' Tsunami, sehingga sulit bagi

orang Aceh untuk mengenal pasti apa sebenarnya yang sedang terjadi di Aceh saat ini dengan kehadiran *bule*.

Di samping itu, *bule* juga 'berkah' bagi orang Aceh, khususnya mereka yang terlibat langsung dengan berbagai proyek yang diusung oleh *bule*. Pendek kata, kehadiran *bule* memang sangat ditunggu-tunggu di Aceh sejak zaman konflik. Jadi dalam hal ini, *bule* memang ibarat tamu yang sudah lama dinanti di Aceh, khususnya setelah Tsunami dan MOU antara GAM-RI.

Namun demikian, orang Aceh tentu tidak bisa mengerti dan mengikuti apa yang dilakukan *bule* setelah pulang dari Aceh. Orang Aceh juga tidak akan sanggup mencerna jika hasil wawancaranya menjadi sebuat *headlines* di surat kabar international atau dipublikasi dalam sebuah studi kebijakan (*policy studies*). Bagi sebagian orang Aceh, dekat dengan *bule* akan memberikan pengaruh tertentu, apalagi jika bisa menjawab pertanyaan mereka dalam bahasa Inggris. Namun orang Aceh tentu saja tidak akan paham apa makna dan tujuan dari setiap rasa ingin tahu *bule* tersebut.

Bule datang ke Aceh memang berasal dari masyarakat yang *open society* (masyarakat terbuka). Masyarakat yang tidak peduli dengan apa yang terjadi Di sampingnya. Masyarakat yang bebas menulis dan membicarakan apa saja. Masyarakat yang sudah terbiasa dengan *free life*. Akan tetapi, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang selalu perhatian dengan apa yang terjadi di sekelilingnya. Masyarakat yang selalu memberikan komentar setiap apa yang mereka lihat. Masyarakat yang selalu ingin tahu apa yang dilakukan oleh orang lain.

Dalam kondisi seperti ini, Syari'ah Islam adalah sebuah jembatan yang bisa menjadi pemikat atau pemisah antara *bule* dan masyarakat Aceh. Pemikat bisa bermakna, *bule* harus menghormati adat istiadat Aceh yang dibalut oleh Syari'ah Islam. Pemisah manakala *bule* menganggap bahwa Syari'ah Islam adalah hambatan bagi mereka untuk bisa dekat dengan masyarakat Aceh.

Hingga di sini dua laporan di atas telah memperlihatkan bahwa kedekatan *bule* dan masyarakat Aceh ternyata memberikan pengaruh bagi 'wajah' Aceh di muka internasional. Kebiasaan *bule* menulis apa yang mereka lihat tanpa mau mengerti sebuah persoalan yang muncul setelah itu, adalah suatu fenomena yang sudah lumrah. Tidak sedikit *bule* yang sudah menetap di Aceh dan disambut 'ramah' oleh orang Aceh, lalu menulis hal-hal yang 'negatif' tentang Aceh.

Tampaknya keramahan dan kebaikan masyarakat Aceh dalam menerima *bule* tampaknya tidak sebanding dengan apa yang ditulis oleh *bule* dalam laporan mereka. Keramahan rakyat Aceh bisa diterjemahkan sebagai 'keterbelakangan'

mereka dalam paradigma sang *bule*. Kebaikan orang Aceh bisa 'dibaca' sebagai sikap polos atau 'apa adanya yang' menurut ukuran orang *bule* sebuah 'kemunduran.' Terkadang pembicaraan yang malah tidak 'berbobot' malah menjadi titik utama fokus dalam laporan mereka.

Kebiasaan *bule* menulis sesuatu yang 'negatif' terhadap apa yang mereka terima adalah suatu fenomena yang lumrah, tidak hanya di Aceh, tetapi juga terjadi beberapa negara berkembang lainnya. Sebab masyarakat Aceh adalah masyarakat yang mau bicara ceplas-ceplos atau apa adanya. Tradisi inilah yang terkadang menyebabkan 'wajah' Aceh selalu 'tercoreng' dengan Syari'at Islam oleh ulah *bule* yang datang ke Aceh.

Pada saat yang sama, Syari'ah Islam di Aceh juga perlu dilihat kembali, khususnya sejauh mana mampu mengakomodir kepentingan *bule*. Sebab, dalam Syari'ah Islam *bule* sudah dapat dikatakan sebagai *mukim* atau penduduk tempatan jika mereka sudah menetap begitu lama di Aceh. Dalam hal ini perlu diatur tentang *qanun* tentang ke-*bule*-an. Dengan demikian, posisi Syari'ah Islam di Aceh tidak akan menghalangi beberapa kegiatan *bule* yang *nota bene* dari masyarakat terbuka.

Dalam hal ini kebiasaan *bule* yang terbiasa dengan *bad news is good news* (berita buruk adalah berita yang bagus) perlu mendapat perhatian masyarakat Aceh. Sebab, peneliti atau jurnalis akan menulis segala sesuatu yang mereka pandang 'menjadi masalah' bagi pemahaman dan peradaban sang *bule*. Saat ini tidak sedikit peneliti dari luar negeri yang datang ke Aceh dengan berbagai tujuan. Tentu saja, masyarakat Aceh yang polos tidak perlu tahu kemana dan bagaimana 'suara' mereka digambarkan dalam bentuk tulisan nantinya.

Bagi rakyat Aceh adalah harus 'menjamu' setiap tamu yang datang ke mereka, sambil menjawab beberapa pertanyaan sang *bule* tersebut. Saya sering mengandaikan bahwa sekarang bule selalu ingin tahu semua tentang Islam. Orang Islam sendiri tidak mau tahu tentang *bule*. Dalam konteks ini, agaknya saya masih pesimistis bahwa di kalangan masyarakat Aceh tentu tidak ahli tentang *bule*. Tetapi tidak mengejutkan jika sekarang di Aceh banyak sekali *bule* yang ahli tentang Aceh dan Islam.

Ketimpangan ini tentu akan berakibat negatif bagi rakyat Aceh sendiri. Sebab kepolosan dan keterus-terangan mereka akan dipandang sebagai bentuk sambutan positif rakyat Aceh terhadap kehadiran *bule*. Namun memberikan *bule* mampu 'balasan' yang maha dahsyat bagi rakyat Aceh sendiri. Dengan kata lain, isu Syari'ah Islam dan kasus yang menimpa *bule* dari Itali baru-baru ini merupakan preseden buruk bagi keharmonisan antara masyarakat Aceh dengan *bule* yang sudah terbina selama ini.

Jadi, dapat dikatakan bahwa pengalaman laporan *New York Times* Amerika Serikat dan ICG yang berpusat di Brussel/Jakarta/Singapura, berikut dengan respon para *bule* terhadap penangkapan aktivis NGO dari Italia, mengindikasikan bahwa Syari'ah Islam adalah sebuah batu ganjalan di Aceh saat ini. Kendati sang aktivis ini harus bersyukur, sebab agaknya, akan lain ceritanya jika dia memiliki ganja di Singapura atau Malaysia. Sebab di dua negara tersebut, ganjaran bagi yang memiliki ganja adalah hukuman mati.

Dalam kondisi seperti ini, dialog dan *mutual understanding* adalah jawaban sesaat untuk mengobati kepiluan di kalangan *bule*. Demikian pula, para *bule* harus memegang teguh integritas akademik dan etika yang menjadi dasar masyarakat tersebut dan negara maju. Selayaknya, *bule* juga tidak menjadikan Aceh sebagai lahan untuk membenamkan 'bom waktu' di kemudian hari atas nama Syari'at Islam.

Jadi, yang diperlukan adalah gerbang untuk membuka dialog antara kepentingan *bule* berikut dengan agenda mereka dengan kebudayaan masyarakat Aceh yang dibalut oleh Syari'ah Islam. Saya ingin berargumen bahwa, dan atau tidak adanya Syari'ah Islam, masyarakat Aceh adalah masyarakat yang 'polos' dan 'terbelakang' dalam cermin pandangan 'masyarakat terbuka' di negara *bule*.

Agaknya debat tentang Syari'ah Islam sudah begitu menjamur di Aceh saat ini. Semua diarahkan pada pemikiran bahwa Aceh tidak punya pilihan lain, kecuali menjalankan Syari'ah Islam. Sementara pada level lain orang mulai ramai meninggalkan bagaimana belajar Islam. Orang juga tidak tahu bagaimana mengaji dengan baik. Orang juga naik haji, tetapi korupsi jalan terus.

Dalam kontek Aceh yang kaya raya saat ini, Syari'ah Islam memang bukan jawaban yang tepat untuk mengubah perilaku umat Islam. Sebab Syari'ah Islam bukan undang-undang yang seperti sekarang dijalankan di Aceh saat ini. Syari'ah Islam bukan juga bukan juga dasar untuk mengatakan sudah Islami suatu masyarakat.

Level beragama umat Islam ada dua, yaitu muslim dan mukmin. Kalau orang Muslim itu belum tentu Mukmin. Sebab Muslim adalah hanya mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, setelah itu, dia bisa menipu biasa siapa saja, melakukan korupsi kapan saja, membunuh orang siapa saja, menjadi beking kejahatan di mana saja. Semua kejahatan yang dilakukan di Aceh adalah dilakukan oleh orang Muslim. Sebab 100 persen penduduk Aceh adalah Islam. Lantas, apakah ini berkaitan dengan Muslim, Syari'ah Islam, atau jangan-jangan kita tidak pernah punya rasa keimanan dalam diri kita.

Orang tidak melakukan korupsi karena dia punya nilai iman yang kuat dalam dadanya. Sebenarnya inilah persoalan umat Islam di Aceh, di mana sangat bangga menjadi Muslim, tetapi belum berani menjadi Mukmin, apalagi Muttaqin. Dalam dua kutub inilah, Syari'ah Islam menjembatani, supaya orang menjadi Mukmin. Kalau orang Islam sudah yakin seyakin-yakinnya kepada Allah, syaria'ah manapun seperti yang dilakukan di Aceh saat ini dan di dunia ini tidak diperlukan. Orang yang berzina juga tahu Islam, namun belum tahu iman. Orang yang menipu juga hapal ayat-ayat al-Qur'an. Apakah ini berkaitan dengan Syari'at Islam. Orang yang Shalat Lima Waktu dan rajin ke pengajian juga cukup piawai dalam menipu publik.

Ini semua tidak ada hubungannya penurunan kemaksiatan di Aceh bisa dikaitkan dengan Syari'ah Islam. Orang menipu uang bantuan masjid, misalnya adalah mereka yang ahli tentang Syari'ah Islam. Di sinilah tampak bahwa semakin besar tuntutan pelaksanaan Syari'ah Islam, semakin besar pula angka kejahatan dan kriminal di Aceh. Pertanyaannya adalah apakah Syari'ah Islam ini sebagai jawaban atas apa yang terjadi di Aceh. Sebab bagaimana manusia itu akan berbuat dan mencari cara untuk melakukan hal-hal yang dilarang agama, termasuk dalam hal sekecil apapun.

Karena itu, saya sendiri masih menyimpan argumen bahwa di Aceh, sudah terjadi kemunduran yang amat luar biasa. Dalam tata pemerintahan, orang kerja tetapi suka korupsi. Dalam tatanan politik, orang ingin mendapatkan kekusaan, uang yang dijadikan ideologinya. Dalam tatanan ekonomi, menipu adalah hal yang sudah lumrah di mana pun. Dalam hal sosial, kesenjangan moral adalah warisan yang bukan dijawab dengan Syari'at Islam.

Jadi kemampuan untuk mengubah ini semua bukan dengan Syari'ah Islam. *Pertama*, orang Aceh memang sudah melupakan Tuhan-nya. Inilah yang menyebabkan musibah datang silih berganti. Orang Aceh tidak punya lagi rasa takut kepada Allah. Orang Aceh dididik punya rasa takut kepada "Syari'ah Islam" versi Dinas Syari'at. Nilai ketakutan kepada Allah lah yang menjadi persoalan mengapa Aceh yang kaya raya ini menjadi terbelakang.

Kedua, orang Aceh tidak punya nilai ketakutan pada aturan sosial yang sudah dibina sejak ratusan tahun. Hal ini disebabkan oleh adanya pahaman yang menyebutkan bahwa orang saat memiliki banyak harta akan mencari cara untuk berbuat maksiat, tentu saja jika dia tidak memiliki rasa iman kepada Allah, walaupun dia Muslim sejak lahir. Orang Islam yang baik adalah bagaimana dia memadukan apa yang dia yakini dan percayai dengan apa yang diamalkan.

Inilah yang disebutkan keseimbangan dunia dan akhirat. Menjadi Muslim orang sudah menjadi Islam di dunia, tetapi belum tentu di akhirat. Sebab yang

menentukan seorang masuk Surga dan neraka adalah amalannya dan ridha Allah. Jika amalannya tidak sejalan dengan perintah Allah, maka walau ribuan kali dia mengaku Islam, tentu akan lain di hadapan Allah.

Saat ini pula kita tampaknya alergi untuk membicarakan bagaimana mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan ketentuan agama. Orang lebih banyak memikirkan apa yang dilarang agama dan dicari celah untuk membenarkannya. Sebab itu orang mulai ramai lari pada latihan spiritual yang ingin menghadirkan iman dalam dada. Sekali lagi, semua upaya ini belum dilaksanakan di Aceh apatah lagi dipikirkan.

Upaya untuk menghadirkan iman dalam dada hanya ada dalam Shalat Jum'at. Pelajaran Tsunami misalnya tidak begitu berimpak pada diri kita saat ini. Kita masih berani mengambil duit yang bukan hak kita. Karena itu wajar jika kemudian Allah berulangkali mengirim cobaan kepada kita semua. Di tengah kekosongan iman ini pula, muncul kelompok yang secara tergopoh-gopoh ingin menerapkan Syari'ah Islam seperti yang dipahaminya.

Sampai sekarang saya yakin, MPU tidak punya program bagaimana meningkatkan iman dan ketakwaan orang Islam di Aceh. Hal ini memang tidak keliru, sebab usaha menghadirkan iman ke dalam dada adalah urusan personal. Karena itu, agama sesungguhnya wilayah personal, bukan wilayah publik. Orang yang betul-betul menjalankan shalat seperti yang diperintahkan, tentu saja tidak akan melakukan maksiat.

Kalau kita ingin mengubah paradigma berpikir orang Aceh, maka usaha membenamkan kepentingan iman dan menaikkan pentingnya ilmu pengetahuan adalah salah jawabannya yang bisa dilakukan di Aceh saat ini. Kepentingan iman dan ilmu adalah jawaban yang cukup menarik untuk mengeluarkan Aceh dari kemelut Syari'ah Islam saat ini. Kalau kita ingin menjadikan Aceh ini lebih baik, maka upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah serta menjauhkan amalan Setan. Kita harus menjauhi diri kita bersekutu dengan Setan dan Iblis, sebab bagaimana makhluk ini sudah bersumpah akan terus menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Bagaimana pun Syari'ah Islam bukan alat penangkal Setan dan Iblis, sebab wujud Setan dan Iblis juga bisa menyerupai manusia dan siapa saja.

Jadi debat Syari'ah Islam seharunys sudah dapat diselesaikan seiring dengan tidak perlunya kanun-kanun yang sama sekali tidak pernah diketahui oleh rakyat Aceh apa isinya dan berapa pasalnya. Orang Aceh agaknya tidak mementingkan apa isi kanun, namun yang mereka harapkan adalah kesejahteraan. Perilaku zina

dan tradisi membunuh memang sudah terjadi sejak Nabi Adam, Nuh, hingga sekarang. Ribuan Nabi sudah diutus ke dunia ini, namun perilaku sosial ini tetap berjalan.

Paling tidak, MPU, Dinas Syari'ah, WH, ulama perlu memikirkan pentingnya pembenaman iman ke dalam diri orang Aceh saat ini. Keberhasilan Syari'ah Islam bukan diukur dengan berapa kasus hukum cambuk dan wanita memakai jilbab. Tetapi bagaimana memulai kembali mengingatkan manusia bahwa Allah itu marah jika ada hambanya lupa kepada Dirinya. Inilah yang menjadi persoalan yang mendesak.

Bab ini bukan ingin melawan arus pemberlakuan Syari'ah Islam di Aceh, tetapi ingin menghilangkan usaha simbolik yang terkadang menyesakkan dada orang Aceh saat ini. Sekali lagi, maksiat adalah perilaku manusia yang sudah melupakan Allah. Sekarang kita bertanya sejauh mana kita sudah "menarik hati" Allah untuk sayang kepada kita? Dan sejauh mana kita sudah 'menjaga diri kita, keluarga, dan masyarakat kita' dari azab Allah. ☙

BAB 11

Syari'ah Islam dalam Lipatan Baju Wilayatul Hisbah

AGAKNYA salah satu lembaga yang sedang mendapat sorotan di Aceh adalah Wilayatul Hisbah, sebuah lembaga yang sedang 'mengawal' pemberlakuan Syari'ah Islam di Aceh. Kalau boleh dianalogikan, sebelum damai, kelompok laki-laki adalah salah satu komunitas yang harus ekstra hati-hati. Mereka harus punya KTP, ronda malam, dan harus tidak melakukan perjalanan ke kampung lain, jika tidak melapor pada aparat keamanan setempat. Kaum lelaki juga harus hati-hari jika berbicara sembarangan, di mana dia boleh ditangkap atau diintrograsi.

Namun setelah damai, di mana naiknya peran Wilayatul Hisbah sebagai 'pengawal' Syariah Islam di Aceh, kaum perempuan tampaknya harus ekstra hati-hati. Mereka harus memakai jilbab. Tidak boleh keluar malam. Tidak boleh duduk dengan lelaki yang bukan muhrimnya, apalagi di tempat gelap. Tidak boleh melakukan aktivitas publik jika dapat mengundang kecurigaan dari pihak Wilayatul Hisbah.

Dari dua kasus di atas, sangat menarik kiranya untuk membahas apa betul peran yang dimainkan oleh Wilayatul Hisbah sudah sesuai dengan Syari'ah Islam? Kemudian, apa landasan teologis atau normative untuk datang menggerebek setiap tempat yang mereka curigai? Apakah *sweeping* atau *razia* adalah bagian dari Syari'ah Islam? Apakah ada model negara lain yang melakukan pola seperti yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah saat ini di Aceh?

Pertanyaan di atas adalah bukan untuk kita jawab atau menggugat WH, namun lebih kepada bagaimana Wilayatul Hisbah, yang mendapat mandat menjadi

'pengawal' Syari'ah Islam di Aceh, dapat memainkan peran yang sesuai dengan Syari'ah Islam. Sebab, agaknya Wilayatul Hisbah telah memaikan peran seperti 'kelompok' yang paling 'benar' di Aceh saat ini. Dan, yang paling memprihatinkan adalah Wilayatul Hisbah telah menjadi 'duta' wajah Syari'ah Islam kelompok non-Islam di Aceh. Kelompok non-Muslim sudah mulai ketar ketir dengan tingkah polah sebagian aparat WH yang mendatangi tempat mereka, terlebih apa yang terjadi di kantor *World Food Programme* minggu lalu.

Pada tahun 2004, ketika saya melakukan penelitian hukum Islam di Aceh dan Kelantan (Malaysia), salah satu jawaban yang paling sering saya dengar di kalangan eksponen penggagas Syariah Islam adalah bahwa di Aceh tidak akan menerapkan hukum cambuk atau mengadopsi pola-pola yang dilakukan di Timur Tengah. Saat itu, jawaban yang sering saya perolehi adalah bahwa Syari'ah Islam di Aceh dimaknai sebagai proses pendidikan (*tarbiyah*), bukan dengan ancaman hukuman seperti yang diterapkan saat ini di Aceh.

Tradisi orang berpacaran di pantai atau di tempat sunyi adalah fenomena yang sudah lazim kita temui di Aceh. Tradisi perempuan Aceh tidak memakai jilbab – dalam kategori Wilayatul Hisbah- adalah fenomena yang lazim, tidak hanya di wilayah perkotaan, namun malah di pedesaan. Kebiasaan lelaki tidak pergi ke Jum'at adalah fenomena yang tidak perlu dipertanyakan keabsahannya. Demikian pula, kebiasaan berjudi adalah bagian dari kehidupan masyarakat Aceh. Dan atau tidak adanya Wilayatul Hisbah, tradisi ini akan terus berlanjut. Namun apakah cambuk menjadi jawaban untuk menyelesaikan persoalan moral ini?

Apa yang hendak saya katakan adalah pelanggaran atau pengabaian pelaksanaan Syariat Islam – dalam konteks pemahaman WH – di Aceh bukanlah dijawab dengan *sweeping*, *razia,* dan cambuk. Teori *hudud* (batas) sendiri adalah sebuah teori yang memandang batas hukuman minimal dan maksimal. Bahkan proses pembentukan hukum dalam Islam juga melewati proses yang sangat panjang. Mabuk misalnya, peraturan pertama adalah banyak kemudharatan dalam minuman keras, kedua, jangan kamu dekati shalat, jika kamu mabuk, ketiga, baru ada perintah bahwa mabuk-mabukan dilarang karena akibatnya. Jadi, jika muncul pelanggaran adalah bukan dijawab dengan pola-pola yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah saat ini.

Agaknya, mulai dari kitab kuning hingga kitab putih, tidak adal satu pengalaman sejarah umat Islam manapun, yang mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah adalah sudah sesuai dengan Syari'ah Islam. Demikian pula, dalam al-Qur'an dan Sunnah tampaknya tidak ada satu perintah *amar* – jika kita boleh menggunakan pola *ushul fiqh*- yang dapat menjadikan landasan pembenaran apa yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah di Aceh saat ini.

Sejak zaman Nabi Muhammad hingga zaman keruntuhan *khilafah Islamiyyah* di Turki, tidak juga ditemukan satu penggalan sejarah yang membolehkan orang datang menangkap, menrazia, atau mendatangi tempat tertentu. Dalam pandangan saya, fenomena ini baru – atau seperti yang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah –muncul saat kelompok Wahabi di Timur Tengah yang sedang melakukan purifikasi. Kelompok Wahabi inilah yang sudah berhasil menguasai Timur Tengah, di mana salah satu agendanya 'membersihkan' umat Islam dari kehancuran.

Dalam konteks ini, pemahaman sebagian aparat Wilayatul Hisbah yang mengatakan bahwa Syari'ah Islam di Aceh harus sesuai dengan Arab Saudi adalah sangat berlebihan. Sebab, sampai sekarang tidak ada ayat atau hadist manapun yang mengatakan bahwa Arab Saudi adalah representasi wajah Islam di dunia ini. Demikian pula, harus diingat beberapa kekerasan yang muncul saat ini di beberapa belahan dunia adalah akibat dari munculnya fatwa-fatwa dari Timur Tengah.

Orang Arab tidak akan minum minuman keras di negaranya, tetapi begitu sampai keluar negeri, mereka tidak sedikit yang mencobanya. Di Arab mereka menutup aurat, namun begitu sampai dalam pesawat, jilbab sudah mulai ditanggalkan. Tidak sedikit kawan-kawan saya dari Arab Saudi yang mengatakan bahwa jika mereka telah melakukan hal tersebut karena *open minded.* Orang Arab memang tidak suka berzina, namun mereka mempraktekkan *nikah mut'ah* dan *nikah misyar* ("*travellers' marriage*"). Pertanyaanya, apakah ulama Arab Saudi tidak tahu tentang *nikah mut'ah* dan *nikah misyar*, misalnya? Justru karena mereka tahu perangai orang Arab ini, maka mereka menghalalkan kedua pola *nikah mut'ah* dan *nikah misyar*. Ini hanya sebagai contoh kecil saja.

Dalam pada itu, jika Syari'ah Islam seperti yang dipahami atau dijalankan oleh Wilayatul Hisbah, maka persoalan yang cukup mendasar adalah di mana pola *tarbiyah* (pendidikan) yang menjadi landasan pelaksanaan Syari'ah Islam. Apakah selama 2 tahun terakhir ini Dinas Syari'ah dan Wilayatul Hisbah telah melakukan program *tarbiyah* kepada masyarakat. Ini sangat menarik misalnya, ketika dalam 2 tahun terakhir ini yang muncul adalah proses Wahabisasi atau Talibanisasi seperti yang dilakukan di Arab Saudi dan Afghanistan.

Kalau ini sampai terjadi, maka yang telah terjadi pergeseran yang cukup jauh tentang pelaksanaan Syari'ah Islam di Aceh. Di Arab Saudi, kendati Rajanya sangat dekat dengan Amerika dan bahkan memberikan tempat untuk pasukan negara ini, namun rakyatnya tidak begitu lapar. Dengan bahasa lain, apa yang sedang terjadi di Aceh saat ini, di mana naiknya mobilisasi 'pengawal' Syari'ah Islam, adalah sebuah hal yang bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Arab Saudi, jika mereka ingin menjadikan Aceh sebagai Arab Saudi. Orang Arab tidak main

judi negaranya, namu dia bisa terbang ke negara lain. Salah satu pacuan kuda di Melbourne Australia, selalu dipenuhi oleh syaikh dari Arab.

Apa yang hendak saya katakan adalah keinginan Wilayatul Hisbah atau lembaga yang serupa dengannya untuk menjadikan Aceh sebagai Arab Saudi atau seperti Timur Tengah adalah suatu kecelakaan sejarah bagi rakyat Aceh. Sebab, Aceh sangat berbeda dan tidak bisa disamakan dengan Arab Saudi, meski dalam bingkai 'pelaksanan' Syariah Islam yang sedang dilakukan oleh Wilayatul Hisbah. Pada hakikatnya adalah sendi-sendi adat istiadat Aceh yang harus dibangkitkan kembali. Namun agaknya agenda Syari'ah Islam melalui *tarbiyah* malah telah mengabaikan sendi-sendi adat istiadat Aceh.

Agenda Syari'ah Islam ternyata malah menjadi 'menakutkan' bagi rakyat Aceh. Saya khawatir, jika nantinya pola Wilayatul Hisbah akan menjadi persoalan tersendiri bagi rakyat Aceh dan non-Aceh. Sebab, jangan-jangan lembaga ini ingin merasakan bagaimana enaknya menjadi 'aparat keamanan' atas nama Syari'ah Islam. Akhirnya bab ini hanya sebuah diskusi kecil untuk melihat kembali bagaimana sebaiknya peran Wilayatul Hisbah di Aceh. Bagaimanapun, *tarbiyah* adalah lebih mahal dan terhormat, dibandingkan dengan *sweeping* atau *razia.* ☙

BAB 12

Harga Damai di Aceh

AGAKNYA dalam sejarah Aceh, damai pasca MOU yang ditandatangani pada tahun 2005 dapat dikatakan sukses.[1] Dan, juga damai ini tampaknya yang paling panjang yang pernah terjadi di Aceh selama 30 tahun lebih, sebab sampat saat ini belum ada upaya serius untuk mengagalkannya. Karena itu, damai ini merupakan suatu anugerah yang harus disyukuri sambil menghitung-hitung beberapa agenda yang nyata untuk mengisinya. Kendati, detik-detik awal penandatangan MOU ini memang penuh dengan sikap harap-harap cemas, namun semoga damai kali ini benar-benar dirasakan oleh rakyat Aceh.

Sebagai warga Aceh yang jarang berada di Aceh, damai adalah sebuah magnet bagi warga mereka untuk pulang ke kampung halaman, jika saya boleh mewakili warga Aceh yang sedang merantau. Di mana mereka tidak perlu lagi merasa khawatir jika ingin kembali ke Aceh, seperti mulai harus mempersiapkan KTP hingga 'melaporkan' sepak terjang selama di rantau. Sejauh ini, memang harus diakui tingkat diaspora warga Aceh yang berada di luar Aceh, baik di Indonesia maupun di luar negeri, memang luar biasa. Keinginan mereka untuk berdiam di luar Aceh tentu saja bukan hanya dikarenakan oleh konflik, namun juga sikap ekspatriat rakyat Aceh yang suka merantau. Sehingga kelompok ini selalu menjadi pemerhati dari luar terhadap apa yang terjadi di Aceh saat ini.

[1] Lihat misalnya Edward Aspinnall, "The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?," in *Policy Studies No. 20* (Washington: East-West Center, 2005).

Demikian pula, warga yang berada di Aceh juga selalu menanti saudara mereka yang berada luar Aceh. Keinginan pulang tentu saja tidak bisa hanya dimaknai dengan kepulangan fisik, namun juga pulang dengan sekian ide-ide yang bisa diterjemahkan dalam kondisi Aceh yang damai saat ini. Kepulangan warga Aceh dari luar memang sudah diwujudkan dengan kembalinya beberapa petinggi GAM dari luar negeri. Ini merupakan suatu prestasi yang amat luar biasa dalam bingkai mempererat tali silaturrahmi antar masyarakat Aceh.

Karena itu, ada beberapa hal yang mungkin dapat dijadikan catatan pinggir kita dalam mengisi damai Aceh untuk beberapa tahun ke depan yang juga harus diperhatikan oleh warga Aceh yang sedang merantau. *Pertama*, rakyat Aceh harus mengubah paradigma berpikir dari konsep menanti (menunggu) menuju ke konsep mengisi. Maksudnya, jika sebelumnya rakyat Aceh selalu menanti damai dengan makna tidak ada lagi kekerasan dan bermacam operasi militer, maka setelah satu tahun damai ini, maka rakyat Aceh harus berlomba-lomba untuk mengisi damai Aceh dengan kegiatan dan pemikiran yang produktif. Dalam konteks ini, persatuan sebagai orang Aceh adalah satu ikatan yang mampu membangkitkan semangat untuk membangun Aceh. Kongkretnya, sikap untuk memperbanyak 'musuh' di kalangan rakyat Aceh harus disingkirkan secara perlahan-lahan.

Kedua, kita (termasuk saya) telah terlalu lelah dengan segala kelemahan yang kita miliki bersama-sama. Yaitu, kita (termasuk saya lagi) mempunyai kelemahan dalam menerjemahkan pemikiran kita dalam bentuk aksi yang cukup realistik dan pragmatis. Konsep NATO *(No Action, Talk Only!)* adalah budaya kita (lagi-lagi tidak terkecuali saya) di Aceh. Hal ini disebabkan oleh kebiasaan kita dalam berlomba-lomba untuk menjadi pembicara – mulai dari warung kopi hingga gedung DPR –dan bukan pekerja yang ulet. Dengan bahasa lain, kebiasaan untuk lebih banyak berbicara dan berdebat, selayaknya juga diikuti dengan tindakan yang nyata pula. Dalam hal ini, damai harus diisi dengan kegiatan-kegiatan yang cukup produktif, sambil mengurangi sikap mengkritik dan mencari-cari kesalahan orang lain. Dengan begitu, pada tahun-tahun ke depan, damai di Aceh akan lebih memiliki nilai-nilai produktifitas yang signifikan.

Ketiga, untuk ke depan, damai di Aceh harus dijaga bersama-sama, mulai dari rakyat kecil hingga 'rakyat besar.' Sebab upaya untuk mengagalkan damai di Aceh adalah sebuah keniscayaan yang akan terus terjadi sepanjang sejarah Aceh. Pengalaman damai, tidak hanya tidak Aceh, namun juga di beberapa negara yang dilanda konflik, selalu diupayakan oleh kelompok yang ingin mencari keuntungan secara ekonomi dan sosial-politik. Belajar dari pengalaman damai di Aceh dan di beberapa negara lain juga, pada hakikatnya, kelompok yang ingin mengagalkan

damai tidaklah begitu banyak. Untuk itu, rakyat Aceh harus mampu membaca secara cermat, kapan dan bagaimana pola, yang akan dilakukan oleh 'kelompok kecil' ini untuk mengagalkan damai.

Keempat, sudah saatnya demokrasi yang santun dibangun dalam masyarakat Aceh. Inilah yang akan menjadi denyut nadi kehidupan Aceh dalam rangka menuju 'Aceh Baru.' Bagaimanapun, Aceh harus terbuka dan harus diarahkan pada pada konsep masyarakat yang multi-etnik dan multi-kulturalisme. Jika pintu Aceh dibuka dengan seluas-luasnya, maka rakyat Aceh juga harus siap mengira-ngira ke arah mana sejarah Aceh akan dibawa. Pengalaman Aceh dengan berbagai warna sejarah, sepertinya tidak jauh dengan pengalaman perjalanan demokrasi yang berkembang di Barat atau *shura* di Timur Tengah.

Dalam pada itu, masyarakat yang santun atau dalam bahasa ilmiah-nya *civil society* (masyarakat madani) adalah sebuah pijakan untuk membangun Aceh baru. Dalam hal ini, rakyat harus terlibat aktif dalam membangun dan menikmati hasil pembangunan. Jadi, pola damai yang diartikan, kurang lebih, berhentinya perang antara GAM dan TNI, juga harus harus diartikan dengan naiknya peran aktif masyarakat dalam pembangunan Aceh. Inilah substansi damai yang harus diisi untuk beberapa tahun ke depan.

Lebih dalam lagi, dalam mengisi damai, juga harus dikikis sikap-sikap untuk menarik kembali Aceh pada jurang kehancuran. Kendati ide ini sangat sulit dilaksanakan di Aceh, namun saya tetap optimis bahwa upaya untuk menarik Aceh ke jurang kehancur memang ada di depan mata kita semua. Maksudnya, jika kita (termasuk saya) gagal dalam membangun sebuah Aceh Baru dengan penekanan pada peran aktif masyarakat dan aspek-aspek pendidikan dan sosial politik, maka damai ini akan mengalami kegagalan secara menyeluruh pula.

Sebab, damai harus dibaca sebagai sebuah *zaman kesempatan* – jika saya boleh mengutip pandangan Eep Saefullah[2] – di mana sebuah zaman kita harus mengisi energi kita untuk hal-hal yang positif. *Zaman kesempatan* bukanlah zaman aji mumpung di mana kita memanfaatkan semua tenaga kita untuk mencari keuntungan pribadi. *Zaman kesempatan* bukan juga zaman di mana kita sibuk untuk mencari posisi dan jabatan yang mampu menaikkan pendapatan.

Zaman kesempatan adalah zaman di mana kita harus siap untuk merapatkan barisan menuju Aceh Baru. Dalam hal ini, konsep Aceh Baru yang saya tawarkan adalah sebuah negeri yang betul-betul mulai memahami bagaimana pentingnya

[2] Eep Saefullah Fatah, *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca-Orde Baru* (Bandung: Mizan, 2000).

menciptakan Aceh yang memiliki nilai-nilai progresifitas dalam segala hal. Sebentar lagi misalnya, kita akan belajar berdemokrasi, melalui Pilkada. Jika *test case* ini berhasil, maka ini akan menjadi catatan tersendiri bagi dunia internasional bahwa rakyat Aceh memang mampu menerjemahkan damai di kalangan mereka sendiri, tanpa sedikit pun kekerasan yang terjadi.

Demikian pula, sebentar lagi, kita akan memiliki seorang pemimpin yang benar-benar dipilih oleh rakyat. Karena itu, ini juga merupakan sebuah akibat dari damai, di mana rakyat bisa menentukan pilihan mereka secara langsung. Karena itu, siapapun yang akan menjadi pemimpin Aceh nanti, salah satu tugasnya adalah mempertahankan damai ini, sebab rakyat sudah menitipkan suara mereka pada kantong pemimpin yang berlaga dalam pilkada.

Akhirnya, *kado* damai ini merupakan sebuah curahan pikiran yang tentu saja bukan hal baru bagi masyarakat Aceh. Sambil menutup membaca opini ini, saya berharap para pembaca mulai menghitung kemana arah Aceh dalam situasi damai. Sebab, Aceh adalah tanah tercinta kita semua di mana semua episode sejarah kemanusian telah terjadi di atasnya. Karena itu, kita harus mulai menulis sejarah baru untuk generasi berikutnya, sambil mengatakan bahwa *damai* adalah *zaman kesempatan* bagi kita untuk membangun Aceh Baru.

Kesempatan untuk berdamai di Aceh memang bukan barang baru, seperti saya tegaskan di atas. Namun, fenomenan kekerasan dalam perjalanan damai di Aceh juga bukan barang. Saya ingin menyebutnya dengan istilah 'mesin pembunuh,' sebab kata ini sangat tepat untuk mengambarkan para pembunuh di Aceh yang kerap beredar di Aceh. Munculnya mesin pembunuh yang selalu diberi nama OTK adalah fenomena yang sangat lazim di Aceh, baik dalam situasi damai atau perang sekalipun. Karena itu, rakyat Aceh tidak terkejut dengan kehadiran mesin pembunuh dan mereka dapat memastikan bahwa mesin pembunuh ini memang tidak akan dapat ditangkap oleh kekuatan manapun di Aceh sekarang ini.

Istilah mesin pembunuh memang muncul pada era posmodernisme, suatu zaman penuh dengan ketidakpastian, di mana pembunuhan dianggap sebagai sebuah hal yang tidak perlu dipersoalkan. Karena itu, istilah mesin pembunuh adalah sangat tepat untuk mengambarkan situasi kematian demi kematian pasca pilkada. Mesin pembunuh ini memang seperti mesin yang kerjanya hanya untuk membunuh. Mereka beraksi kalau mendapat tugas untuk membunuh, maka si calon korban tidak punya kuasa untuk menolaknya. Mereka memang 'setingkat' di bawah malaikat pencabut nyawa dalam hal menghabisi manusia. Mereka juga tidak punya belas kasihan, sebab kenikmatan mereka hanya terletak ketika melihat korban meninggal di tempat.

Dalam hal ini, pembunuhan yang diperagakan oleh mesin pembunuh memang sudah dapat diramalkan sebelumnya, terutama menjelang selesainya pilkada. Dengan kata lain, ramai yang menduga bahwa mesin pembunuh di Aceh akan berkeliaran lagi, walaupun damai sudah berjalan satu tahun lebih. Tujuan utama mesin pembunuh adalah menciptakan kesan seolah-olah Aceh memang tidak damai. Pola yang dilakukan oleh mesin pembunuh pun tidak jauh berbeda dengan aksi dalam film laga di layar televisi. Jadi, mesin pembunuh ini orang yang pandai dalam menggunakan senjata dan menghabisi korban, untuk tidak mengatakan mereke terlatih dalam dunia bunuh membunuh. Kerja mereka hanya membunuh ibarat seperti mesin yang hanya menerima satu perintah yaitu hanya untuk membunuh.

Pola yang dimainkan oleh mesin pembunuh pun bukanlah hal yang baru, yaitu dengan menggunakan taktik melenyapkan korban secepat mungkin. Mesin pembunuh ini sangat terlatih dalam membunuh dalam waktu yang sangat cepat. Mesin pembunuh juga tidak mengenal sipil atau militer, mereka hanya punya satu tujuan yaitu bagaimana menakutkan rakyat Aceh. Tujuan klasik inilah yang tidak dapat dibendung oleh kekuatan manapun di Aceh saat ini. Inilah kelemahan dunia keamanan di Aceh, di mana mereka harus bertekuk lutut di depan mesin pembunuh. Agaknya sampai tulisan ini diangkat tidak pernah terdengar satu berita pun yang menyebutkan bahwa mesin pembunuh atau OTK sudah tertangkap.

Mereka muncul dengan tiba-tiba dan hilang juga dengan tiba-tiba. Kalau aparat Indonesia berhasil menangkap teroris walaupun berjarak antar pulau, namun untuk kasus mesin pembunuh di Aceh tidak demikian. Sulit sekali mendengar keberhasilan aparat dalam menangkap mesin pembunuh di Aceh. Pahadal korban yang bertumbangan pun adalah warga sipil atau militer. Kerja mereka juga tidak jauh berbeda dengan teroris. Dalam konteks ini, seolah-olah ada upaya untuk membiarkan mesin pembunuh ini berkeliaran di Aceh. Sehingga setiap selesai bekerja mesin pembunuh pun lenyap ditelan berita. Tidak ada satupun yang berani menangkap mereka. Semua terdiam dan kita hanya bisa menghitung jumlah mayat yang telah dibunuh oleh mesin pembunuh ini.

Dalam tradisi bunuh membunuh di Indonesia, pembunuh bayaran adalah mesin pembunuh yang cukup terkenal. Di Pulau Jawa misalnya, istilah pembunuh bayaran dikenal dengan istilah *gali*. Mereka hidup dari hotel ke hotel dengan tujuan hanya membunuh. Kehadiran mereka sangat ditakuti oleh target. Namun tidak sedikit *gali gali* yang kemudian gila karena selalu dihantui bayang-bayang korban yang pernah dihabisinya.

Mesin pembunuh di Aceh memang hadir saat-saat kematian rakyat Aceh diharapkan. Mereka hadir pada saat ingin menggiring Aceh pada kekacauan. Mesin pembunuh di Aceh juga datang saat semua orang ingin membangun Aceh. Dalam hal ini, kita tidak mengetahui dengan mengatakan tanpai bukti siapa mesin pembunuh ini.

Para pemimpin membunuh rakyatnya pasti karena punya anggapan bahwa rakyat tersebut tidak suka dengan dirinya. Pengalaman Saddam Hussein, Pol Pot, Soeharto adalah beberapa pemimpin yang mempunyai cara menyelesaikan orang yang tidak mereka sukai dengan cara membunuh. Di bawah pemimpin, mesin pembunuh hadir hanya untuk menciptakan kekacauan semata. Mereka seperti diizinkan untuk membunuh siapa saja. Mereka hanya menerima perintah dari atas untuk membunuh. Biasanya mesin pembunuh ini seperti sistem komputer, yaitu sangat rapi dan terorganisir sekali.

Dalam bab ini tentu saja kita tidak akan mengajak pembaca untuk meraba-raba siapa mesin pembunuh tersebut. Namun rakyat bisa belajar dari sejarah dibelakang bagaimana pola mesin pembunuh tersebut muncul di Aceh. Dalam hal, jika rakyat terpancing maka Aceh tidak damai adalah sebuah keniscayaan yang diinginkan oleh mesin pembunuh.

Pengalaman pengakuan korban mahasiswa yang menjadi korban baru-baru ini sangat menarik untuk melihat pola kerja mesin pembunuh (*Serambi Indonesia*, 30 Januari 2007). Sekaligus ini masih tendensius namun ini menampakkan bahwa mesin pembunuh ingin membidik kelas tertentu dalam masyarakat. Mesin pembunuh akan menembak aparat dengan dalih yang melakukan hal tersebut adalah GAM. Mesin pembunuh akan membantai mahasiswa, dengan dalih pelakunya bisa jadi militer atau GAM. Mesin pembunuh merampok di jalanan atau SPBU, dengan demikian, orang akan memikir ini boleh jadi GAM, karena tidak punya uang, atau aparat militer, yang tidak punya 'objekkan' di Aceh lagi. Inilah logika imajiner yang dibangun oleh mesin pembunuh di Aceh selama ini.

Penggiringan paradigma inilah sesungguhnya yang diinginkan oleh mesin pembunuh di Aceh, walaupun tidak pernah ada dalah sejarah pembunuhan di Aceh, OTK dapat ditangkap. Inilah kemahiran mesin pembunuh di Aceh. Karena itu, sekali lagi mesin pembunuh adalah bukan orang bodoh dalam dunia persenjataan atau menghabisi lawan. Jadi diperlukan kemahiran yang sangat tinggi untuk menangkap mesin pembunuh di Aceh.

Untuk tingkat mesin pembunuh di Indonesia, Dr. Azahari, ahli bom dari Malaysia, aparat militer menghabiskan waktu yang cukup lama untuk

menangkapnya. Demikian pula, Amerika menghabiskan dana milyaran dollar untuk menangkap Saddan Hussein. Kenyataan ini menunjukkan bahwa upaya untuk mencari mesin pembunuh tergantung niat dari aparat keamanan. Semakin sering mesin pembunuh melakukan pembunuh di Aceh, terutama pasca pilkada, semakin menunjukkan bahwa ada proses 'penerimaan' terhadap kehadiran mesin pembunuh di Aceh.

Jika aparat keamanan masih saja mengumpulkan data hasil kreasi mesin pembunuh, maka tidak memungkinkan bahwa ada upaya secara sistematis untuk mengakhiri damai di Aceh. Sesungguhnya dalam sejarah mesin pembunuh di Aceh pola yang dimainkan sepertinya bukanlah hal yang luar biasa. Sebab mereka belum meledakkan bom di sekitar gedung di Banda Aceh atau meledakkan bus seperti yang terjadi di Timur Tengah. Operasi mesin pembunuh di Aceh hanya menembak dengan secara cepat kemudian melarikan diri atau merampok.

Akhirnya paparan ini hanya ingin membuka mata kita rakyat Aceh untuk siap menghadapi mesin pembunuh yang sudah berkeliaran di Acen. Kesiapan kita terhadap mesin pembunuh bukan dengan mengangkat senjata atau melaporkan pembunuhan ke aparat, sebab semua itu tidak akan menyeret mesin pembunuh di Aceh. Namun, kembali mendidik anak-anak kita dengan mengatakan bahwa tidak ada mandat dari Allah bagi manusia untuk mencabut nyawa orang lain seperti yang dilakukan oleh mesin pembunuh. Dan, satu hal lagi yaitu kehadiran mesin pembunuh adalah bentuk 'undangan tidak resmi' dalam rangka mengacaukan situasi damai di Aceh.

BAB 13

Dinamika Beragama di Aceh

ISU pemurtadan di Aceh memang bukan persoalan baru, apalagi sejak zaman Orde Baru, berbagai upaya telah dilakukan oleh berbagai pihak untuk memurtadkan rakyat Aceh. Berbagai pengakuan dari muallaf yang sebelumnya menjadi missionaries di Aceh, telah membuat pernyataan bahwa satu-satunya daerah di Indonesia yang sangat sulit untuk dimurtadkan adalah Aceh. Hingga di sini, kita hanya mendengar sayup-sayup pemurtadan dari mulut ke mulut. Kajian tentang hal ini memang sangat jarang dilakukan oleh akademisi Aceh, namun impak dari isu ini sebenarnya telah dapat dilihat di depan mata kita saat ini.

Hal ini kembali mencuat sejak minggu pertamam pasca-Tsunami, bahwa tidak sedikit anak-anak korban Tsunami yang "dilarikan" dari bumi Aceh. Saat itu, saya tidak begitu memperhatikan persoalan ini, hingga baru-baru ini disinyalir bahwa upaya pemurtadan sedang hangat dibicarakan oleh rakyat Aceh. Tampaknya persoalan ini menjadi begitu penting untuk dibahas oleh kita semua yang tidak menginginkan Serambi Mekkah sebagai ladang pemurtadan.

Dalam konteks ini pemurtadan harus dilihat sebagai bencana yang paling serius pasca Tsunami. Namun demikian, isu ini pun dapat dijadikan pisau silet untuk membedah denyut nadi kehidupan beragama rakyat Aceh. Terlebih lagi, pemurtadan dilakukan bukan dengan cara pindah agama, akan tetapi dengan proses pedangkalan pemahaman terhadap agama. Saya melihat ada beberapa gelombang pemurtadan di Aceh saat ini.

Gelombang pertama, pemurtadan dilakukan atas nama kemanusiaan. Upaya ini dibalut dengan dalih ingin membantu rakyat Aceh yang sedang dihimpit berbagai kesulitan pasca Tsunami. Dalam gelombang ini, sasaran utama adalah anak-anak yang masih kosong perut, iman, dan juga kasih sayang serta perhatian dari orang tua. Sehingga muncul benih-benih pedangkalan akidah terhadap Islam pertama akan ditanam pada mereka atas nama misi kemanusiaan.

Pada saat yang sama, kelompok generasi muda Aceh dipandang bukan sebagai sasaran pemurtadan, mereka akan digiring pada telingkungan kehidupan kapitalisme. Ini merupakan hasil dari dialektika antara pengikisan budaya Aceh dengan budaya kapitalisme. Untuk itu, jarang kelompok generasi muda Aceh yang menjadi korban pemurtadan, namun lebih sebagai korban kapitalisme yang mulai memandang bahwa segala sesuatu diukur dari berapa jumlah pendapatan selama pasca-Tsunami.

Adapun gelombang kedua adalah runtuhnya filterisasi di kalangan pengambil kebijakan yang memandang isu pemurtadan adalah "isu klasik." Kita agaknya lupa bahwa sejak kedatangan penjajah, Di samping misi kolonialisme selali dibarengi dengan misi misionaris. Tampaknya untuk konteks Aceh saat ini adalah kapitalisme dan missionarisme akan memaikan peran penting dalam pemurtadan besar-besaran di Aceh. Asumi ini ingin menegaskan bahwa pemurtadan akan terjadi dalam proses jangka panjang yang cukup sistematik. Jika kapitalisme sudah subur dan manusia akan dinilai dari berapa penghasilan mereka, maka sikap keagamaan juga akan memudar secara perlahan.

Pada kondisi seperti ini, maka isu agama menjadi hal yang tidak begitu penting dibicarakan. Ujungnya dalah tesis Francis Fukuyama[1] tentang peran Agama dan Samuel P. Huntington[2] tentang "bahaya Islam" akan menjadi benar adanya. Tampaknya pikiran in sudah muncul pada sebagian mereka yang terlibat dalam pembangunan Aceh kembali, di mana muncul pandangan bahwa agama tidak begitu penting dijadikan sebagai topik utama.

Akibatnya adalah memunculkan gelombang ketiga yaitu isu pemurtadan bagi lapisan masyarakat Aceh tidak begitu penting lagi dibahas dan dicari solusinya. Mereka akan apatis dan malah diam-diam tidak lagi peduli dengan dengan hal ini. Hal ini disebabkan oleh kontrol ekonomi dan sosial budaya tidak lagi ada

[1] Francis Fukuyama, *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstruction of Social Order* (New York: The Free Press, 1999). Francis Fukuyama, *Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2002).

[2] Samuel P. Huntington, *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order* (London: Touchstone Books, 1997).

pada masyarakat Aceh, namun pada siapa yang membantu mereka secara ekonomi. Gelombang ini memang belum terjadi di Aceh, mengingat masih ada kalangan yang gelisah dengan adanya isu pemurtadan di NAD. Namun kelompok ini, sekali lagi, tidak akan memiliki nilai tawar yang besar, sebab mereka terjebak pada system yang telah dibuat oleh para pengambil kebijakan saat ini di Aceh. Sekarang saja, siapa yang paling kritis terhadap isu pemurtadan di Aceh tentu saja sangat sulit "terlibat" dalam proyek-proyek besar di Aceh.

Dari ketiga gelombang tersebut, hemat saya, rakyat Aceh tidak mampu melawannya, kecuali mereka sudah bulat tekat untuk menentang segala upaya yang dilakukan dengan tujuan mendangkalkan terhadap agama. Pada saat yang sama pula, rakyat Aceh sedang menanti uluran tangan dari berbagai pihak. Pada pihak yang lain, si pengulur tangan tentu punya kepentingan jangka pendek dan jangka panjang yang menyebabkan terkikisnya sendiri kehidupan beragama rakyat Aceh.

Susahnya Beragama!

Dalam bagian ini, ingin ditelaah bahwa apapun puncak pengalaman beragama selalu bersentuhan dengan kekerasan. Tidak mengakui Allah dan Rasul dianggap murtad dan kafir. Bersatu dengan Tuhan, dianggap sesat dan kerap mengundang kekerasan terhadap sang pelaku. Artinya, kedua puncak tersebut selalu berujung pada mulai saling sesat menyesatkan, kekerasan, dan saling kafir mengkafirkan.

Terlalu rasional memahami agama, dipandang melecehkan agama itu sendiri. Terlalu banyak menggunakan batin dan ruhani dalam beragama dianggap "telah bermain-main" dengan Tuhan. Salah satu obat dari kedua kutub tersebut adalah "beragama secara biasa-biasa saja." Beragama seperti inilah yang dianggap aman dan lebih tentram yang tidak menyusahkan diri sendiri dan orang lain.

Namun, bagaimana dengan manusia yang ingin "mencari" Tuhan, supaya mereka bisa "berasyik-masyuk" dengan-Nya? Kita kadang disuruh ikut tarekat, supaya kalau terjadi sesuatu, bisa "ditimpa" pada sang Mursyid atau Khalifah. Akan tetapi, bagaimana jika seseorang memiliki rasa intelektual yang amat tinggi yang memiliki keinginan terus menerus untuk bercengkrama dengan Tuhan. Dalam sejarah Aceh, mereka yang sudah masuk kategori ini, dipaksa oleh keadaan untuk mengasingkan diri dan menghilang dengan tidak diketahui sebab yang pasti.

Namun, ada satu gejala di tengah masyarakat kita yaitu cepat sekali merasa menjadi "Nabi" sebelum dia mampu memahami hakikat kenabian. Ilham dipaksa menjadi petunjuk atau wahyu. Sentilan akal pikiran dianggap sebuah kebenaran

yang sudah baku. Yang unik, dahulu kala, semakin alim seorang ulama, semakin dia menjauh dari wilayah publik. Pengalaman ruhani yang terjadi padanya sulit dipahami. Sehingga dia memilih untuk "menyingkir" daripada berada di tengah komunitas masyarakat.

Pada prinsipnya, sentilan pikiran dalam beragama bukanlah sebuah pengalaman puncak. Sebab, akal selalu berproses dan tidak akan pernah berhenti berpikir, hingga dia masuk pada wilayah metafisika yaitu: bagaimana muncul persatuan *'alam al-kabir* (makro-kosmos) dengan *'alam al-saghir* (mikro-kosmos) yang ada di dalam diri. Saat itulah, akal mencangkok kepentingannya pada batin, sehingga agama bisa hidup dalam diri manusia tersebut.[3]

Sejauh ini, munculnya sekte atau aliran di dalam masyarakat, lebih disebabkan karena sang "Nabi" mereka tidak mampu menganalisa sentilan pikiran dan pengalaman ruhani dalam pengalaman beragama mereka. Pengalaman ruhani dianggap semacam wahyu yang sudah mutlak. Akal dipaksa berdialektika dengan wahyu, sehingga ketika akal sudah tidak mampu menganalisa lagi, dipandang kebenaran tentang paham keagamaannya telah sahih. Akhirnya sang "Nabi" mampu menaklukkan akal pikiran bagi orang yang berada di bawah tingkatan berpikirnya.

Dalam kajian keagamaan, pola manusia mencari Tuhan selalu diambil hikmahnya dari pengalaman Nabi dan Rasul. Ibn 'Arabi, sebagai contoh, menjelankan jalan beragama dari ilmu hikmah dari para Nabi dan Rasul. Artinya, apapun pengalaman beragama, apakah itu mistik, keramat, ladunni, wahdatul wujud, haruslah dimulai dari pengalaman keagamaan pada Nabi melalui pintu ilmu hikmah mereka. Sedangkan, jika seseorang bisa memiliki ilmu yang amat tinggi, sebagaimana pengalaman Nabi Musa, maka seseorang diarahkan untuk belajar ilmu hikmah dari Nabi Khaidir.[4]

Pertanyaannya adalah apakah pemimpin dan pengikut sekte agama saat ini, bisa melalui proses pemahaman dan pengalaman beragama seperti di atas? Karena itu, apapun kelebihan kita dalam beragama, pada prinsipnya tidaklah seluar biasa yang diaggap oleh pengikut kita. Jika demikian, menjadi manusia beragama memang sangat susah sekali. Apalagi jika kita hendak mencari jalan untuk mempertemukan

---

[3] Pnina Werbner, *Pilgrims of Love: The Anthropology of a Global Sufi Cult* (Indianapolis & Bloomington: Indian University Press, 2003).

[4] Henry Corbin, *Creative Imagination in the Sûfism of Ibn 'Arabî*, trans. Ralph Manheim (New Jersey: Princeton University Press, 1969).

alam al-saghir dengan *alam al-kabir* dari pengalaman ruhani atau kecerdasan intelektual.[5]

Inilah sebabnya, menjadi Nabi atau Rasul bukan pekerjaan yang mudah dan ringan. Ilmu para Nabi dan Rasul ilmu yang didapatkan dari sumber ilmu melalui Malaikat.[6] Sehingga agama yang mereka bawa selalu menyisakan tanda tanya bagi pengikutnya, antara mengikuti pengalaman ruhani sang-Nabi atau mengikuti gerak pikir akal dalam memahami pengalaman sang-Nabi dan Rasul. Namun, pengalaman ruhani kenabian dan kewalian, bisa diperoleh oleh siapa saja yang benar-benar ingin ”bertemu” dengan Allah.

Sebagai contoh, kitab *Ihya al-Ulum al-Din* karya Imam al-Ghazzali, dipuja oleh sejumlah ulama. Orang yang membaca kitab tersebut boleh mengikuti apa yang termaktub dalamnya. Namun, siapapun akan terus memikirkan bagaimana pengalaman beragama Imam Al-Ghazzali hingga beliau mampu menulis kitab sebagus ini. Dengan kata lain, karya dan pengalaman keagamaan seorang ulama sangat menentukan wajah dan watak pemahaman agama, yang pada gilirannya membuat orang lain, setuju atau tidak setuju dengan pendapatnya. Akan tetapi, orang lebih suka menekuni isi kitab, ketimbang memahami pengalaman spiritual ulama tersebut

Demikian pula, ketajaman Ibn Rusyd melihat daya batin Ibn ’Arabi ketika masih belia telah meyakinkannya bahwa Ibn ’Arabi adalah anak muda yang telah dan memiliki pengalaman spiritual agama yang amat tinggi.[7] Sehingga dialog mereka lebih banyak dilakukan melalui batin, ketimbang bahasa verbal. Artinya, kemampuan untuk melihat pengalaman spiritual/keagamaan seseorang adalah kemampuan yang amat luar biasa. Namun, diatas itu semua ulama-ulama yang memiliki kemampuan ini memiliki karya atau kitab yang masih dirujuk hingga hari ini. Sayang, tidak sedikit dari kita yang mengatakan bahwa ajaran Ibn ’Arabi sesat dan menyesatkan, terkait dengan konsep *wahdatul wujud* dan *insan kamil*.

---

[5] Bustamam-Ahmad, "Jejak Spirit Aceh."

[6] Che Zarrina Sa'ari, *Al-Ghazali and Intutition: An Analysis, Translation and Text of Al-Risâlah Al-Laduniyyah* (Kuala Lumpur: Departement of Aqidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2007).

[7] Tentang Ibn Arabi, baca William C. Chittick, *Ibn 'Arabi: Heir to the Prophets*, ed. Patricia Crone, Makers of the Muslim World (Oxford: Oneworld, 2007). Samer Akkach, "The World of Imagination in Ibn 'Arabi's Ontology," *British Journal of Middle Eastern Studies* 24,1(1997). David Buchman, "Structuralism Reconsidered: Ibn Al-'Arabi and Cultural Variation in Muslim Societies," *The Muslim World* 94, no. 1 (2004).

Namun demikian, sekarang tidak sedikit kita saling salah menyalahkan pemahaman orang lain, tanpa memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam pengalaman spiritual orang tersebut. Demikian pula, terkadang baru satu sentilan pikiran muncul dalam melakukan ritual, kita sudah mencari pengikut untuk kita sebarkan bahwa inilah pemahaman agama yang paling benar/hakiki. Fenomena zaman ini memang mirip dengan model beragama *new-age* di Barat. Artinya, seseorang cepat sekali menjadi anutan orang lain, walaupun pengalaman spritualnya belum mampu menandingi para ulama terdahulu.

Mengapa demikian? Pada era modern, tidak terkecuali di Aceh, orang cenderung haus akan pengalaman spiritual. Sehingga semakin tinggi penggunaan akal, semakin tinggi pula keinginan untuk memahami alam spiritual. Para ulama cenderung menuliskan pemahaman beragama mereka dalam kitab, sehingga siapapun yang haus spiritual bisa "meminumnya" dari kitab tersebut. Namun, pengalaman puncak beragama pada diri seseorang tidaklah sama. Maksudnya, ada pengalaman beragama yang mendorong seseorang mampu menulis "panduan" bagi orang lain.

Sehingga proses penyandingan ilmu dan iman serta islam adalah keniscayaan. Namun pola ini bukanlah monopoli ummat Islam saja. Di dalam agama Semit, tradisi ini telah berkembang ribuan tahun dan telah menghasilkan dialog yang cukup rumit. Dalam agama Yahudi dikenal dengan konsep Sefiroth dan munculnya kelompok *Kabbalist*. Dalam agama Kristen ada konsep *purgativa*, *contemplativa*, dan *illuminativa*. Ada yang berpendapat bahwa ketiga konsep tersebut mirip dengan *sharī'ah*, *tharīqah*, and *haqīqah*.[8] Karena itu, tiga rangkai alat bantu dalam beragama (ilmu, iman, dan islam) adalah pisau analisa untuk membedakan di mana posisi seorang penganut agama.

Jadi, kesusahan dalam beragama sebenarnya adalah warisan sejarah agama-agama Semit. Inilah warisan dari kajian agama Semit sejak Nabi Ibrahim yang dikenal dengan konsep manusia *Hanif* hingga pada Rasulullah. Artinya, proses sejarah beragama dan pengalaman beragama telah menyejarah. Karena itu, Rasulullah membuat batasan yang cukup tegas yakni al-Qur'an dan Sunnah-Nya.

Kita dibolehkan memahami tradisi beragama, namun batasannya adalah al-Qur'an dan Sunnah. Pertanyaannya adalah sejauh mana kekuatan ilmu, iman, dan islam kita dalam memahami kedua sumber tersebut? Terkadang malah pemahaman kita terkadang sangkut pada satu episode sejarah keagamaan, hingga tersungkur

[8] Annemarie Schimmel, *Mystical Dimensions of Islam* (Chapel Hill: The University of North Carolina, 1975). 78.

pada satu sudut pemahaman. Karena itu, beragama itu memah susah. Lebih susah lagi menentukan tingkatan kesusahan beragama dan kesanggupan kita dalam menangani setiap pengalaman beragama. ☙

BAB 14

Menanti Calon Pemimpin yang Siap Kalah

SALAH satu permainan yang mengundang perhatian dunia adalah Sepak Bola. Permainan ini ternyata telah menyedot perhatian penduduk dunia sampai ke pelosok desa. Tentu saja, setiap kesebelasan selalu ingin menang dalam setiap pertandingan, tidak peduli apakah tim tersebut kuat atau lemah dalam menggiring dan menciptakan gol ke gawang lawan. Namun, setiap babak final, hanya satu tim yang berhak dan harus menang. Karena itu, FIFA mencari alasan biar ada tim yang menang (jumlah gol, perpanjangan wakat, atau pinalti).

Irama Sepak Bola sepertinya dapat kita terapkan pada proses pemilihan Kepala Daerah mendatang, yaitu hanya satu tim yang berhak untuk menang dan memimpin Aceh. Adapun tim lain harus siap kalah. Kali ini, logika Sepak Bola tidak sepenuhnya dapat kita terapkan pada proses PILKADA mendatang. Sebab, PILKADA merupakan mencari pemimpin untuk memimpin rakyat Aceh. Adapun Sepak Bola adalah proses yang cukup melelahkan untuk mendapatkan kemenangan secara terhormat.

Akan tetapi logika Sepak Bola memang tidak jauh dengan PILKADA, pemilihan Presiden sekalipun. Kita tampaknya ingin melihat apakah calon pemimpin dalam pilkada ini siap kalah. Sebab, bagaimanapun tidak mungkin ada dua nahkoda dalam satu kapal. Dengan demikian, calon pemimpin dalam PILKADA mendatang juga harus memikir ulang apa yang dipikirkan dan dilakukan jika mereka kalah.

Dalam konteks ini, ada beberapa skenario yang mungkin dapat terjadi jika sang calon pemimpin kalah dalam proses pemilihan Orang Nomor Satu di NAD.

Pertama, sang calon pemimpin yang kalah akan mengambil sikap oposisi dengan calon terpilih berikut dengan semua tim suksesnya. Dalam hal ini, dia akan menjadi seorang yang paling vokal terhadap Gubernur terpilih. Namun, dia tidak dapat 'mengontrol' tim sukses-nya jika mereka 'melebur' dalam pemerintahan terpilih. Hemat saya, dari pada mencari lawan, lebih baik memperbanyak kawan. Sebab Pilkada adalah *filter* untuk memilih seorang yang pantas menjadi pemimpin bagi warga NAD. Dan, tidak menang bukan berarti kalah dalam tradisi berpolitik. Sebab politik menurut penadangan saya, adalah persoalan bagamaina mendapatkan kekuasaan dari rakyat.

Kedua, terciptanya asas 'jika maka.' Maksudnya, jika sang calon pemimpin sudah mendapatkan sinyal kekalahan, setidaknya muncul sikap kurang percaya diri, maka dia akan melobi sang calon pemimpin yang hampir menang untuk memberikan sedikit 'kue kekuasaan' kepadanya.Di sini pertanyaannya adalah bagaimana proses pembagian 'kue kekuasaan' antara masing-masing calon pemimpin yang berlaga dalam PILKADA. Di sini, rakyat memang tidak diikutkan, sebab sanga calon pemimpin yang gagal, memang tidak dapat berbuat apa-apa kepada konstituennya. Dalam situasi ini, calon pemimpin yang gagal juga harus menyadarkan rakyatnya untuk tidak memusuhi rakyat yang akan menjadi pendukung calon pemimpin yang menang. Intinya, kita memerlukan calon pemimpin yang gagal untuk bersikap beijaksana, baik kepada lawan politiknya maupun kepada rakyat sebagai pendukungnya.

Ketiga, munculnya logika 'Abu Nawas.' Logika ini mengandaikan behawa sang calon pemimpin yang gagal untuk melakukan loncatan-loncatan untuk tidak percaya pada system yang ada. Dia, misalnya, mengatakan adanya kecurangan dalam proses Pilkada. Sebagaimana akan kita lihat nanti, mereka akan mengusung kenapa mereka gagal mulai dari tingkat lokal hingga tingkat nasional. Bahkan sang jaksa dan sang hakim akan sibuk menerima berbagai tuntutan dari sang pemimpin yang gagal. Agaknya, sikap ini sudah dapat dilihat pada awal-awal tahap seleksi di mana logika 'Abu Nawa' sudah diterapkan oleh beberapa calon pemimpin yang akan berlaga dalam PILKADA di NAD.

Logika 'Abu Nawas' adalah sebuah logika mengukur bagaimana kecerdikan untuk mengelabui raja yang selalu dimenangkan oleh Abu Nawas. Sayangnya, logika ini tidak dapat diterakan pada aspek mencapai kekuasaan pada era modern ini. Dalam hal ini, kecerdikan dan kepintasan bukanlah jaminan seorang bisa memimpin rakyat Aceh. Jadi, saya berpendapat calon pemimpin yang gagal untuk tidak melakukan logika Abu Nawas. Tentu saja, Abu Nawas yang saya maksudkan adalah tokoh rekaan saja, bukan Abu Nawas yang tidak pantas masuk surga dan

neraka. Sebab, bagaimanapun pemimpin juga sepertinya bisa masuk surga dan neraka pada hari ini kiamat nanti.

Jadi siapapun yang kalah dalam PILKADA mendantang, maka itu bukan sebuah kegagalan yang diterjemahkan melalui tindakan-tindakan inkonstitusional menurut UUD 1945. Sebab, kegagalan menjadi pemimpin Aceh melalui jalur PILKADA adalah sebuah baca hukum alam, di mana mengakui kegagalan merupakan sebuah pengakuan yangh paling bijak dalam sejarah manusia. Alasan mengapa saya menekankan hal ini, sebab calon pemimpin yang muncul dari berbagai kelompok masyarakat Aceh, ternyata memang dipilih sendiri oleh rakyat. Dengan kata lain, pemimpin Aceh mendatang adalah betul-betul pilihan rakyat Aceh sendiri. Karena itu, sang calon pemimpin tidak perlu marah dan kecewa jika tidak terpilih. Mungkin kali ini 'Suara Tuhan' (suara rakyat) memang belum berpihak pada nya.

Lebih lanjut, sang calon pemimpin yang gagal juga harus mulai berpiki bagaimana membantu sang calon pemimpin yang dipilih oleh rakyat melalui jalur yang paling demokratis ini. Hal tersebut memberikan indikasi bahwa gagal menjadi pemimpin Aceh bukan berarti rakyat tidak suka pada dia. Dalam konteks ini, *trust* (rasa percaya) memainkan peran penting. Jadi, tidak dipercayai oleh rakyat, bukan berarti dibenci oleh rakyat. Dengan bahasa lain, membantu rakyat bukan hanya dengan jalur PILKADA. Karena itu, kolaborasi dengan pemimpin yang terpilih adalah keniscayaan yang harus dipikirkan oleh masing-masing calon-calon pemimpin Aceh saat ini. Dengan begitu, suatu jalinan untuk menciptakan Aceh Baru akan tercipta. Kendati dengan nada sedikit optimis, semua calon-calon pemimpin Aceh ingin tampil dalam PILKADA ini adalah manusia-manusia yang sudah agak bersih dari sikap iri, dengki, dan mencari musuh.

Dalam memetakan tiga skenario di atas, bab ini ingin memberikan tekanan bahwa proses pemilihan PILKADA memang seperti Sepak Bola. Namun, Di sini yang akan beradu hanya dua orang pada masing-masing tim. Karena itu, rakyat harus jeli betul dalam memilih mana yang layak menjadi pemimpin mereka pada masa yang akan datang. Sebab, calon pemimpin yang gagal bisa menjadi batu sandungan, jika dia tidak punya niat baik terhadap calon pemimpin yang terpilih.

Dalam hal ini, saya ingin mengambarkan beberapa ciri-ciri calon pemimpin yang gagal. *Pertama*, dia cepat marah dengan situasi yang tidak diinginya. *Kedua*, dia cepat mengubungi orang jika ingin perlu sesuatu. *Ketiga*, dia cepat dalam mengatakan bahwa rakyat memilihnya saat ini. *Keempat*, dia terlalu cepat mengambil tindakan dengan tidak penuh perhitungan. *Kelima*, dia tidak pernah tenang dalam hidupnya, sebab dia selalu memikirkan berapa uang yang telah dikeluarkan dalam

proses PILKADA ini. *Keenam*, dia tidak mau mendengar nasihat-nasihat orang bijak atau penasihatnya, pada saat memang dibutuhkan. *Ketujuh*, dia selalu mencari musuh dan *krasak krusuk* saat menjelang hari pemilihan.

Jadi, sebenarnya calon pemimpin yang gagal memang sudah dapat dilihat dari hari ini. Rakyat sendiri sudah bisa membaca siapa dan bagaimana criteria menurut mereka yang pantas menjadi pemimpin mereka. Bahkan, Allah pun sudah mengatur siapa sesungguhnya yang menjadi pemimpin NAD pada PILKADA ini. Saya hanya khawatir, nanti malah calon pemimpin yang gagal malah akan mengusung nama Allah kemana.

Kajian ini memang bukan ingin memberikan dorongan atau energi negatif kepada calon Gubernur NAD, melainkan ingin memberikan suatu stimulus pemikiran bahwa ada calon pemimpin yang berhasil dan gagal. Hanya saja, kita abai memberikan gagasan kepada pemimpin yang gagal. Saya dengan berat hati ingin mengatakan bahwa *terima kasih* kepada calon pemimpin gagal yang telah berani meramaikan bursa PILKADA ini. ☙

BAB 15

Apakah PNS di Aceh Susah?

SAYA agak terkejut dengan pola kehidupan PNS di Banda Aceh. Sebab, saat saya makan siang di sebuah warung ternama di Banda Aceh di kawasan Lamnyong, saya memang dibuat terbuai dengan arena parkiran di mana mobil mewah dikendarai oleh baju-baju kantoran. Bayangkan, satu porsi makan siang sekitar 30 ribu rupiah dan yang menikmatinya adalah mereka yang bernota bene PNS atau 'baju kantoran dinas.' Asumsi saya, generasi 'baju kantoran dinas' ini lebih banyak menyisihkan uang mereka dengan pola 'makan siang' tersebut.

PNS yang gajinya tidak sampai 200 dolar perbulan, tidak mungkin punya mobil mewah dan bisa makan siang semewah itu. Dulu saya membayangkan PNS adalah kelompok masyarakat yang sangat hemat hidupnya. Mereka selalu dililit hutang dan tidak mungkin bisa makan siang dengan porsi sedemikian rupa. Ini mengingatkan saya pada pola hidup 'PNS Barat" yang sering membawa makan siang ke kantor. Mereka hanya makan seadanya dan kembali bekerja. Padahal gaji mereka di atas 30 juta perbulan. Pertanyaannya adalah kenapa 'PNS Barat' punya cita rasa hidup hemat.

Ini sungguh 'pengalaman dan pemandangan' yang luar biasa bagi saya. Bagaimana mana mungkin mereka yang hanya bergaji di bawah 200 dolar, bisa makan dan punya mobil mewah. Ini tentu saja bukan ingin menggugat bahwa PNS harus miskin dan 'dililat kreditan.' Ini juga bukan ingin mempertanyakan apakah PNS tidak boleh kaya dan makan enak. Apa yang ingin saya tekankan adalah

bagaimana mungkin itu semua bisa terjadi? Ini memang pertanyaan sosiologis dan antropologis. Bagaimana mungkin orang yang punya penghasilan di bawah 200 dollar perbulan, bisa kaya raya.

Kalau pun seorang PNS punya jabatan, gajinya pun tidak akan mungkin di atas 1000 dollar per bulan. Beaya hidup tersebut mungkin juga tidak akan cukup untuk menghidupi keluarga di tengah harga-harga barang yang semakin meninggi dan dunia pendidikan yang juga tidak murah. Perbandingan ini sesungguhnya bukan ingin membongkar rasa iri atau cemburu. Tetapi bagaimana merasionalkan kehidupan PNS yang banyak menjadi impian anak-anak muda.

PNS yang sukses mungkin mereka yang punya usaha atau pandai berdagang. Mereka bisa menambah pendapatannya dari usaha tersebut. Namun jangan harap mereka akan 100 persen dalam dunia PNS Jadi sebenarnya ada persoalan yang cukup mendasar di Aceh adalah mencoba 'merasionalkan' kekayaan seorang PNS. Kita mungkin tidak boleh curiga dengan kekayaan orang lain, namun sekadar 'merasionalkan' tentu tidak salah. Bayangkan, seorang pejabat negara juga dihitung harta mereka sebelum menjabat jabatan publik.

Jadi 'pengalaman dan pemandangan' pola hidup PNS di Banda Aceh memang cukup mengasyikkan untuk 'dirasionalkan.' Sebab dengan proses 'rasionalisasi' ini kita akan tahu bagaimana dan mengapa anak-anak muda bermimpi jadi PNS di Aceh. Jawaban yang saya berikan di atas berikut dengan potret gaya hidup mereka seperti semakin meyakinkan kita bahwa kalau ingin kaya di Aceh, jadilah PNS.

Sekarang mari kita lihat bagaimana pendapatan dan pengeluaran. Ini sebenarnya sudah pernah diuraikan oleh Max Weber tentang *Economics Ethic* di mana semangat ekonomi ternyata mempengaruhi seseorang dalam menjalankan agamanya di dunia ini. Dalam hal ini, Weber telah membeberkan bahwa *Economic Ethic* ternyata mempengaruhi dalam sikap pragmatisme dan psikologisme umat beragama.[1] Di samping itu, *strata social* juga ikut memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap praktek beragama. Strata sosial juga sepertinya dipengaruhi oleh jumlah *income* dan bagaimana income tersebut didistribusikannya kepada keluarganya dan orang-orang di sekitarnya.

Jadi, pola hidup PNS juga ternyata tidak lepas dari teori yang dikembangkan oleh Weber, yaitu bagaimana pendapatan mempengaruhi gaya hidup seseorang, termasuk dalam kehidupan beragama. Pola makan siang '30 ribu rupiah' adalah bagaimana distribusi pendapatan seorang PNS. Tentu mereka tidak akan makan

[1] Max Weber, *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*, trans. Talcott Parsons (London and New York: Routledge, 2002).

setiap hari, namun jika dalam satu bulan, mereka 'makan siang' 20 kali, maka dia menghabiskan 600 ratus ribu perbulan. Kalau dia pake mobil mewah untuk 'ukuran Banda Aceh' maka kalau satu hari dia menghabiskan bensin 50 ribu rupiah, maka dalah satu bulan biaya bensin kurang lebih 1,5 juta rupiah. Jadi, kalau gajinya hanya 2,5 juta perbulan, maka 400 ratus ribu rupiah sisa gajinya. Kalau ini semakin 'dirasionalkan' maka pertanyaannya adalah darimana penghasilan 'tambahan' PNS tersebut.

Inilah yang menarik untuk kita telaah secara telegrafik. Seorang PNS senior, mungkin dia punya gaji hampir 5 jutaan, karena dia punya tunjangan jabatan. Seorang PNS yang piawai dalam proyek, dia bisa punya uang 30 jt perbulan. Seorang PNS yang ahli dalam berdagang, dia bisa punya penghasilan 40-50 juta perbulan. Jadi sebenarnya semangat dan kinerja PNS memang bukanlah hal utama di Aceh saat ini.

Kalau boleh dikatakan menjadi PNS adalah 'alat' untuk bisa kaya secara cepat. Caranya memang bukan dengan menjadi PNS, namun saat menjadi PNS. Inilah potret suram PNS kita di Aceh dan juga di Indonesia. Sehingga semua cita-cita anak muda, termasuk saya adalah menjadi PNS yang kaya raya. Sehingga setiap kita berurusan dengan PNS kita harus memberikan uang, sebagai 'uang lelah' atau 'uang kopi,' guna menambah pendapatan sang PNS. Yang aneh bin ajaib, kalau tidak memberikan 'uang lelah' dan 'uang kopi' kita tidak dianggap menghargai PNS. Sekali lagi, saya tidak menuduh dan menaruh curiga dengan PNS yang kaya raya.

Namun diskusi tentang kekayaan PNS yang tidak normal adalah diskusi klasik sejak zaman Orde Baru hingga Orde Reformasi. Dalam konteks Aceh, PNS yang kaya memang dekat dengan posisi basah. Sehingga mereka tidak mengejutkan bisa kaya dan naik haji beberapa kali dalam kehidupan mereka.

Pertanyaan terakhir adalah darimana uang tersebut? Inilah pertanyaan yang harus dihindari didiskusikan, sebab akan mengundang sejumlah kecaman dari PNS. Kalau uang yang mereka ambil, selain gaji adalah 'uang lelah' dan 'uang kopi' ternyata uang tersebut adalah milik rakyat. Sekali lagi, kalau mereka ambil uang rakyat, maka jangan harap kekayaan tersebut akan membawa berkah. Sebab, kalau 'suara rakyat' adalah 'Suara Tuhan,' maka 'uang rakyat' adalah 'uang Tuhan.' Makanya tidak sedikit mereka yang mengambil uang rakyat sudah 'sengsara' sejak di dunia. Terkadang penyakit malah banyak menjangkiti mereka yang mengambil uang rakyat. Karena itu adalah tugas kita untuk 'menyelamatkan' 'uang Tuhan' dari PNS yang kaya raya tidak secara 'rasional.'

Jadi sesuai dengan judul bab ini yaitu mengukur kadar kesusahan PNS, agak sulit untuk mengatakan bahwa PNS susah dengan 'pengalaman dan pemandangan' di Banda Aceh. Kajian ini sesungguhnya bukan ingin menebar rasa ingin tahu mengapa jadi PNS bisa kaya. Namun sekadar diskusi nakal saya supaya kita tahu bahwa mengapa Tuhan marah, kalau kita makan uang yang bukan hak kita.

Tentu tidak semua PNS yang makan siang itu adalah mereka yang ambil uang rakyat. Namun kajian matematik saya sepertinya ingin memperdalam diskusi ini dalam menyelamatkan uang rakyat. Sebab PNS adalah abdi rakyat. Jadi sebenarnya mereka 'harus' susah seperti rakyat. Sebab PNS adalah juga berasal dari rakyat. Setidaknya, saya ingin 'PNS Aceh' seperti 'PNS Barat' yang mencoba hidup hemat. Jadi tujuan bab ini bukan ingin menggugat PNS makan siang di restoran, namun sekadar mencuil rasa ingin tahu publik, kenapa gaji sedikit bisa makan enak dan punya mobil mewah. ☙

BAB 16

Mimpi Jadi PNS

SAYA adalah termasuk orang yang ingin sekali menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil). Menjadi PNS adalah suatu rahmat yang luar biasa, terutama jika mempunya posisi yang 'basah.' Bayangkan, setiap bulan dapat gaji dan dapat berbagai fasilitas dari pemerintah. Saya juga kadang-kadang tidak perlu masuk kantor, dan gaji saya tetap jalan sebagaimana biasanya. Impian ini mungkin tidak hanya milik saya, namun juga kalangan anak muda lainnya di Aceh. Tetapi, sampai sekarang saya tidak pernah berhasil menembus masuk ke lingkungan PNS.

Bab ini merupakan sebuah renungan bagi orang-orang yang (pernah) ingin menjadi PNS di NAD. Saya dapat mengerti manakala tidak diterima menjadi PNS adalah sebuah pukulan yang maha dahsyat bagi sebagian kelompok masyarakat. Apalagi, jika mereka yang tidak memiliki penghasilan yang pasti. Sehingga terkadang harus kerja serambutan di sana-sini. Ini juga akan menjadi sebuah badai bagi mereka yang sudah bekerluarga dan tidak memiliki penghasilan tetap.

Namun apakah PNS dapat mewujudkan impian kita?

Saya hanya ingin mengambarkan bahwa minat saya menjadi PNS memang begitu besar, namun semakin saya gagal untuk menjadi PNS, saya semakin sadar bahwa PNS adalah bukan lahan saya. Alhasil, saya pun mengembara ke mana-mana untuk bekerja mencari sesuap nasi. Dalam kondisi seperti ini, saya sangat beruntung karena saya tidak perlu melapor dan membuat surat ini itu, kalau saya ingin bepergian kemana saja saya mau. Saya juga beruntung, tidak ada atasan yang

menyuruh saya untuk melakukan ini dan itu, apalagi mengkonsep surat untuk dia.

Kegagalan menjadi PNS adalah bukan sebuah tragedi dalam kehidupan kita. Orang bijak mengatakan bahwa kegagalan adalah keberhasilan yang tertunda. Jadi, jika kita gagal menjadi PNS, percayalah ada sebuah pekerjaan yang sedang menanti kita. Sayangnya, kita terkadang tidak mau bekerja keras. Saat ini, fenomena yang muncul di kalangan anak muda adalah jika gagal menjadi PNS, maka itu adalah akhir dari segala kehidupannya.

Saya pernah gagal menjadi PNS di salah satu kampus terkemuka, dengan alasan saya masih muda atau junior. Saat itu, saya hanya kecewa dan tersenyun. Padahal, saya saat itu menjadi peneliti di salah satu Lembaga Riset di Bangkok, di mana hampir semua penelitinya adalah sudah 30-an. Kemudian pada tahun 2004, saya pun gagal menjadi PNS, karena saya bukan orang NU. Saat itu juga saya berpikir, bahwa PNS adalah bukan jawaban terhadap masa depan saya.

Satu hal yang saya lakukan jika saya gagal adalah yakin bahwa Allah akan memberikan sesuatu yang lebih dari saya dambakan. Inilah yang jarang kita lihat di Aceh. Bagi mereka yang gagal PNS, seolah-olah harapan mereka untuk menjalani kehidupan sudah berakhir. Bahkan jarang pihak keluarga memikirkan bagaimana menyemangati jika famili mereka gagal PNS. Yang muncul adalah ”mungkin kita kurang dalam membayar si fulan untuk meluluskan anak kita.” Dalam konteks ini, pihak keluarga atau orang terdekat harus menjadi pihak pertama dalam memberikan respon terhadap famili mereka yang gagal menjadi PNS.

Di atas itu semua, ada faktor lain yang cukup riskan saat ini di kalangan anak muda Aceh, yaitu faktor keahlian (*skill*). Biasanya, kita tidak begitu ”berharga” jika kita tidak punya suatu keahlian. Karena itu, biasanya yang lulus jadi PNS belum tentu mereka adalah orang-orang yang professional dari sisi keahlian. Sehingga, dapat dibayangkan pada bulan-bulan pertama banyak PNS yang hanya terima gaji, namun tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Akan tetapi, tidak sedikit pula PNS yang bagus, namun ditempatkan pada posisi yang tidak bagus. Sehingga mereka tidak begitu produktif dalam dunia kerja mereka.

Semua ini menunjukkan menjadi PNS adalah bukan yang terbaik. Saya sedang membayangkan bahwa orang tidak lagi peduli dengan PNS, kalau bisa, setiap tahun hanya sedikit yang melamar jadi PNS. Kendati ini mustahil, namun ini adalah suatu lompatan yang luar biasa, jika terjadi di Aceh. Sebab, dengan demikian, PNS tidak lagi menjadi impian bagi setiap orang.

Dalam pada itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin menjadi PNS. Paling tidak, harus diingat bahwa seleksi PNS di Indonesia

adalah model klasik seleksi pegawai yang ada saat ini di dunia. Di beberapa negara maju, model seperti ini sudah tidak ada lagi. Kalau pun ada, ia hanya untuk posisi tertentu dengan memerlukan se-kelompok orang yang betul-betul professional.

Di beberapa negara di ASEAN, mereka lebih tertarik untuk merekrut staff dengan model kontrak per-tiga tahun. Artinya, pegawai akan dievaluasi setiap tahun terhadap produktifitas kerja mereka. Bagi pegawai yang memiliki nilai yang bagus akan dipromosikan, sementara yang jelek, akan di rumahkan. Dengan model seperti ini, setiap orang berlomba-lomba untuk memberikan yang terbaik bagi instansi mereka. Sayang, model ini masih tabu di lingkungan PNS kita. Sehingga, bagi mereka yang menjadi PNS, sama halnya sepert masuk ke dunia baru, di mana dia bisa bekerja selama puluhan tahun dan tetap menikmati gaji, kendati produktifitas kerjanya nihil.

Lebih daripada itu, salah satu yang paling krusial tentang PNS di Indonesia, apalagi di Aceh adalah model seleksi yang dilakukan tanpa wawancara. Kendati ini diterapkan pada tingkat dosen, namun tidak adanya wawancara pada level PNS biasa, juga disinyal menyebabkan adalah ”orang yang tersesat di jalan yang benar.” Sering orang yang betul-betul layak untuk menjadi PNS, malah tidak pernah lulus. Sehingga ”orang yang tersesat di jalan yang benar” ini kemudian menjadi persoalan tersendiri dilingkungan PNS sendiri di kemudian hari.

Hal lain yang paling krusial di lingkungan PNS adalah persoalan inisiatif dengan logika proyek. Tidak ada proyek, sama dengan, tidak perlu ke kantor. Jika adalah proyek, maka ada kesempatan untuk membeli perkakas rumah atau setidaknya kendaraan bermotor. Sehingga, para PNS baru pun berlomba-lomba bagaimana mendapat bagian dari proyek. Akibatnya, banyak sekali uang rakyat yang diplintir oleh mereka yang bernota bene PNS.

Studi ini tentu saja bukan bermaksud untuk memaparkan citra buruk menjadi PNS. Namun, saya hanya ingin memberikan sekelumit gambar bagi mereka yang tidak lulus menjadi PNS. Jika anda hanya bertujuan seperti di atas ketika menjadi PNS, maka ketidakberhasilan Anda dalam seleksi PNS, adalah keberhasilan negara dalam menyelamatkan uang dan kinerja di lingkungan PNS. Jika Anda adalah orang yang memang tidak berniat melakukan hal-hal di atas, maka kegagalan anda menjadi PNS adalah harus dibaca sebagai penyelamatan anda dari sebuah lingkaran setan. Dalam bahasa lain, kenyataan ini juga harus dibaca sebagai sinyal bahwa Anda harus berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Dengan begitu, saya menduga, Anda harus mencari rezeki di tempat lain yang betul-betul mampu menyerap *skill* anda.

Saat ini, jika paradigma kita diubah, sangat banyak sekali peluang kerja di luar negeri, tentu saja bukan dengan jalur TKI. Untuk mengantisipasi ini, maka pendidikan adalah modal pertama jika Anda gagal menjadi PNS. Sebab, dengan pendidikan Anda akan diukur di luar negeri. Sebab di sini tidak ada KKN sama sekali. Anda diterima, berarti Anda mampu bersaing dengan yang lain. Akhirnya, bab pendek ini hanya sebagai retrospek bagi kawan-kawan saya di Aceh yang belum lulus menjadi PNS. Sebab, lahan Aceh masih sangat luas dan belum di jamah sama sekali. Bumi Aceh masih menanti tangan-tangan yang tulus yang menggarap dan memeliharanya. Tidak lulus PNS, bukan berarti Anda gagal dalam hidup ini. ☙

BAB 17

Kenapa Kita Miskin?

KEMISKINAN adalah penyakit sosial yang dijumpai tidak hanya di negara-negara berkembang, namun juga di negara-negara maju. Ramai yang mengatakan bahwa kemiskinan adalah sebuah takdir sosial yang sulit diingkari. Sehingga banyak kalangan yang berpendapat bahwa kemiskinan adalah salah satu persoalan yang menyebabkan munculnya ketimpangan sosial.

Dalam konteks Aceh, kemiskinan adalah suatu pemandangan yang amat lumrah dijumpai. Salah satu logika untuk mengukur kemiskinan adalah bagaimana kita merasa tidak cukup dalam memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Namun demikian, mencari penyebab kemiskinan juga tidak begitu mudah, sebab terkadang melibatkan berbagai persoalan mulai dari sosial-politik sampai sosial-ekonomi.

Dalam bab ini saya tertarik untuk membahas mengapa bangsa kita yang kaya raya bisa terjebak dalam kemiskinan yang tidak berpangkal dan berujung. Demikian pula, dalam kasus Aceh, propinsi yang dilimpahi kekayaan alam yang luar biasa, ternyata menjadi propinsi yang paling miskin di Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah kemiskinan kita diciptakan atau jangan-jangan kita malas untuk mencari nafkah. Kalau kita lihat nelayan yang pergi berhari-hari mencari ikan di laut, seharusnya mereka adalah kelompok yang jauh dengan kemiskinan. Demikian pula dengan petani, jika kita lihat dari keringat yang mereka keluarkan, sejatinya mereka tidak berada dalam roda kemiskinan. Di negara-negara maju, nelayan dan petani adalah kelompok masyarakat yang sama sekali jauh dari isu kemiskinan.

Mari kita lihat bagaimana kemiskinan diciptakan di Indonesia, khususnya Aceh. Dalam hal ini, ada beberapa skenario yang dapat menjawab mengapa kita miskin. Skenario pertama, pemerintah Indonesia sangat rajin berhutang pada lembaga-lembaga keuangan internasional dalam membangun negara ini. Dalam jebakan telingkungan kapitalisme, setiap dana yang mengucur ke Indonesia adalah hutang, kendati pemerintah sering menyebutnya "bantuan" atau "pinjaman lunak." Dalam hal ini, selain harus membayar utang tersebut, pemerintah juga harus memikirkan bunga yang tentu saja tidak jauh berbeda dengan lintah darat.

Karena itu, untuk mengantisipasi ini, pemerintah menciptakan skenario kedua untuk menjerit leher rakyat untuk menanggung hutang tersebut. Pada saat yang sama, pinjaman tersebut memang tidak akan dinikmati oleh rakyat. Alih-alih uang tersebut hanya digunakan untuk kepentingan sekelompok masyarakat yang disebut yang dikenal dengan sebutan 'pemerintah.' Karena itu, tidak mengejutkan jika pemerintah Indonesia selalu meminta penjadwalan hutang setiap tahun sembari mengeluarkan kebijakan untuk mencekik rakyat jelata.

Akibat dari skenario ini semua kebutuhan masyarakat sehari-hari tidak terkontrol. Fasilitas yang semestinya gratis untuk rakyat menjadi begitu mahal. Mulai dari pendidikan sampai mau nikah di Indonesia, harus menggunakan uang yang jumlahnya di atas 'garis kemiskinan.' Ketika masyarakat tidak sanggup untuk menutupi kebutuhannya mereka, maka yang pertama sekali dilakukan adalah mengabaikan pendidikan. Efeknya adalah manakala rakyat tidak mengenyam pendidikan, maka agak sulit bagi mereka bersaing dalam mencari nafkah. Proses pengabaian pendidikan inilah terjadi di Indonesia, tidak terkecuali Aceh. Bayangan bahwa pendidikan tidak akan menyelesaikan kemiskinan adalah suatu fenomena yang lazim di kalangan masyarakat.

Sebagai satu contoh, Kenya adalah negara di Afrika yang sudah terjebak selama beberapa tahun dalam lingkaran kapitalisme ini. Manakala mereka menerima bantuan dari Bank Dunia atau IMF, uang tersebut agaknya hanya dipakai oleh pemerintah korup. Pada saat yang sama, mereka harus membayar hutang tersebut berikut dengan bunganya setiap tahun. Akibatnya, Kenya telah memperkerjakan anak-anak sebagai buruh dalam beberapa sektor kegiatan ekonomi untuk membayar hutang kepada Bank Dunia dan IMF. Alhasil, tidak sedikit anak-anak tersebut yang tidak mengenyam pendidikan. Sehingga kapitalisme global telah menyebabkan kemunduran bagi negara ini.

Dalam konteks Indonesia, memang tidak jauh berbeda dengan negara di Afrika tersebut. Sebagai contoh, pada tahun 1997 ketika Indonesia mulai mengalami krisis, jumlah hutang Indonesia terhadap Bank Dunia adalah 14,4 miliyar dollar

sementara dengan Asian Development Bank sebesar lebih dari 8 miliar. Jika ditotalkan jumlah hutang bangsa ini pada tahun tersebut adalah 22 miliyar dollar (atau dalam rupiah sejumlah Rp. 198.000.000.000). Jumlah hutang ini pada tahun 1997, tidak dapat dibayangkan berapa hutang Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini. Hampir dapat dipastikan, setiap tahun Indonesia harus membayar hutang mulai dari 2 miliyar hingga 9 miliyar dollar. Angka-angka ini adalah contoh konkret bagaimana kita sudah terjebak dalam telingkungan kapitalisme global. Laporan lain menyebutkan bahwa beban hutang luar negeri Indonesia yang mencapai sebesar US$134.85 milyar (INFID/ 31/Des/04).

Hemat saya, inilah salah satu penyebab mengapa semua orang Indonesia miskin, apalagi di Aceh. Sebab setiap bayi lahir di Indonesia, dia harus menanggung beban hutang tersebut. Secara kasat mata, impak dari tradisi Indonesia berhutang ini memang tidak dirasakan, sebab pemerintah tidak memberikan informasi yang jelas di mana posisi Indonesia dalam berhutang saat ini. Akan tetapi mahalnya harga-harga keperluan sehari-hari adalah bukti nyata bahwa pemerintah sudah kehilangan akal dalam memberikan kemudahan bagi rakyatnya. Mahalnya pendidikan adalah bukti lain bahwa kita sudah terlalu miskin untuk lari buta huruf. Maraknya korupsi adalah salah satu tradisi membuktikan betapa rakyat harus menanggung bebab hutang pemerintah tersebut. Sebab uang yang sering dikatakan 'bantuan' ini selalu dilarikan untuk beberapa kelompok tersebut.

Dalam hal ini, jawaban kenapa kita miskin tampaknya sudah dapat dirabab-raba penyebabnya. Apakah kita miskin karena kita malas atau jangan-jangan kita sudah miskin sejak kita lahir atau malah kita kita akan pernah mampu keluar dari 'garis kemiskinan.' Dalam bahasa yang sederhana, saya sering menggambarkan bahwa orang yang rajin dalam korupsi adalah mereka yang terlambat kaya. Sehingga setiap orang memandang bahwa kekayaan akan dapat diperoleh jika korupsi atau manipulasi. Alhasil, lingkaran Setan penyebab kemiskinan di atas harus dimaknai sebagai tanda-tanda bahwa kita memang ditakdirkan untuk miskin dan selalu 'antri' untuk jadi orang kaya.

Selanjutnya, uraian di atas juga memberikan kita pelajaran bagaimana sirkulasi kemiskinan global diciptakan. Tidak berlebihan agaknya ketika pada saat krisis Mahathir Mohammad tidak mau berhutang kepada IMF. Sebab dia mungkin mengerti bahwa dengan berhutang kepada lembaga internasional ini, maka dia akan menciptakan kemiskinan bagi rakyatnya. Akibatnya tidak mengejutkan pula manakala kita lihat Malaysia mampu keluar dari kemelut krisis 'penciptaan kemiskinan global' ini dalam waktu yang amat singkat.

Dalam konteks Aceh, tampaknya kemiskinan akan tetap berjalan. Demikian pula 'orang yang terlambat kaya' akan berlomba-lomba untuk memikirkan bagaimana memperkaya diri. Siklus ini memang tidak ubahnya seperti lingkaran Setan yang sulit diselesaikan. Saya hanya bermimpi bahwa Aceh harus keluar dari kemelut dengan dengan memikirkan bagaimana membangun pendidikan dan berupaya mengikis secara perlahan mereka yang 'terlambat kaya.'

Agaknya studi ini memang mencoba untuk menohok tradisi berpikir kita untuk kembali memikirkan bahwa agak sulit bagi kita untuk keluar dari 'garis kemiskinan.' Ternyata kapitalisme global ditambah dengan pemerintah yang korup telah memberikan bencana yang maha dahsyat bagi semua generasi di Indonesia. Akibatnya, kita selalu merasa kurang, kendati kita sudah terlalu banyak diberikan oleh Allah dalam kehidupan kita sekarang ini. ☙

BAB 18

Politik Bantuan di Aceh

BANYAK yang menduga bahwa pada tahun 2009, beberapa aktivitas bantuan untuk Aceh akan berakhir. Saat itu diduga mereka yang selama ini sibuk membantu Aceh akan kembali ke negara mereka. Pada saat itu pula rakyat Aceh akan kembali menjadi gamang, sebab semua tatanan yang terbangun selama lima tahun terakhir akan hilang. Mereka yang sudah terbiasa dengan gaji puluhan juta, tentu akan berpikir lima kali saat lembaga tempat kerja dibekukan.

Tatanan yang dimaksud adalah kehidupan penuh dengan kemanjaan. Saat ini status sosial masyarakat Aceh pasca-Tsunami memang hanya ditentukan oleh berapa pendapatan jika sudah bekerja di NGO. Bahkan di kampung, mereka yang sama sekali tidak mengerti kepanjangan NGO, sering mengucapkan dengan NJO. Gejala kemanjaan dengan kehadiran NGO di Aceh memang sudah nampak sejak beberapa bulan setelah Tsunami. Akan tetapi, apakah ada semacam *grand scenario* dalam bantuan Aceh saat ini? Apakah betul bantuan tersebut ikhlas atau jangan-jangan ada agenda dibalik kebaikan ini semua?

Dalam tradisi budaya Aceh dikenal dengan pernyataan bahwa tidak ada manusia yang melakukan kebaikan jika tidak ada maunya. Hanya saja, kita tidak tahu agenda tersebut, sebab sudah demikian banyak NGO asing yang membantu Aceh. Ada NGO misalnya yang mengusung nama atau istilah Islam/Muslim. Ada juga yang membawa nama negara. NGO yang membawa nama negara ini pun membaur atau menyebar uang mereka melalui NGO lokal. Demikianlah 'kebaikan' yang ditebarkan oleh NGO asing di Aceh saat ini.

Kehadiran mereka memang diharapkan, apalagi dalam membantu masyarakat Aceh yang tertimpa Tsunami. Akan tetapi misi yang dibawa pun bermacam-macam. Ada misalnya NGO yang memiliki misi jangka panjang di Aceh, sehingga sekarang mereka membangun infrastruktur untuk kemudahan rakyat Aceh. Namun misi jangka panjang ini kadang kala tidak bisa ditebak atau dicurigai, sebab nalar kebaikan harus dilihat dengan kebaikan pula. Jika ada misi jangka panjang di Aceh yang dilihat dari nalar keburukan, maka ini akan menjadi persoalan tersendiri, terutama jika NGO tersebut sudah mengantongi data dan watak penduduk Aceh dan serta isi perut bumi ini. Inilah yang menarik dilihat lebih lanjut, ketika misalnya, apa yang akan dibawa pulang oleh NGO internasional saat mereka pulang ke negaranya?

Dalam pandangan saya, setidaknya ada beberapa hal yang menjadi hal penting bagi mereka dan bagi rakyat Aceh, yaitu: *Pertama*, apa dampak sosial dari kehadiran NGO internasional saat ini dalam menciptkan Aceh sebagai *new city and new government*. Harus diakui bahwa proses pembentukan daerah baru di Aceh saat ini banyak dibantu oleh NGO asing. Mereka sibuk mempromosikan bagaimana damai di Aceh serta melakukan pengawasan yang cukup melekat pada proses damai di Aceh saat ini. Mereka ini kemudian menjadi pahlawan bagi rakyat Aceh yang telah berhasil meredam konflik di Aceh. Namun demikian, mereka tentu saja tidak bisa meredam aksi terror yang sekarang banyak terjadi. Pengawasan mereka hanya pada menghitung jumlah korban, bukan menghentikan kekerasan. Sebab pendekatan yang mereka lakukan adalah pendekatan tokohisme. Sehingga pada level bawah, NGO asing harus memikirkan kembali apa sebenarnya konflik di Aceh saat ini. Atau jangan-jangan yang diinginkan saat ini di Aceh adalah munculnya perang saudara di kalangan rakyat Aceh sendiri, setelah mereka pergi nanti.

Kedua, sejauh mana misi NGO asing ini berhasil dilakukan di Aceh dan apakah yang mereka inginkan jika sudah keluar dari Aceh? Misi NGO adalah misi yang bersifat membantu. Sebab itu bukan NGO, jika tidak membantu. Namun agaknya NGO juga selain membantu punya misi yang diembankan oleh pemerintah atau donator. Perubahan yang kerap terjadi yang diinginkan oleh NGO adalah perubahan pola hidup dan perubahan paradigma masyarakat. Perubahan paradigma adalah sesuatu yang bisa dijalankan dalam kurun waktu tertentu. Namun dalam 3 tahun terakhir, NGO sudah berhasil mengubah beberapa paradigma rakyat Aceh, terutama pola kehidupan dan bagaimana rakyat memandang kekuasaan dan uang. Namun yang paling penting adalah perubahan kehidupan sosial sejak kehadiran NGO, di mana memunculkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat Aceh

sendiri. Tentu saja apa yang terjadi di tengah-tengah rakyat Aceh adalah bukan kehendak atau misi NGO internasional di Aceh belakangan ini.

Ketiga, apa dampak sosial politik bagi rakyat Aceh dengan kehadiran NGO internasional di bumi Serambi Mekkah ini. Harus diakui bahwa kehadiran NGO dikarenakan pemerintah tidak mampu melakukan beberapa fungsinya, termasuk dalam bidang sosial, ekonomi, dan politik. Jadi, NGO asing yang membawa visi dan misi mereka secara pelan-pelan mengisi fungsi pemerintah di Aceh. Namun dalam konteks Aceh, agak sulit mengurai benang kusut kepentingan masing-masing NGO yang sedang berkiprah. Sebab, misi jangka panjang adalah hal yang paling tersembunyi, sebab misi jangka pendeklah yang diinginkan oleh rakyat Aceh saat ini. Misi misalnya, ingin mengeruk hasil bumi Aceh adalah hal yang tidak wajar jika dimunculkan ke permukaan saat ini. Sebab NGO asing sudah berjasa dalam membangun infrastruktur di beberapa tempat strategis di Aceh. Demikian pula, misi untuk menjauhkan rakyat Aceh dari agama, juga menjadi hal yang cukup sensitif jika didiskusikan, mengingat jumlah uang dibenamkan di Aceh membuat hal tersebut tabu untuk dibincangkan. Jadi posisi dan nilai tawar rakyat Aceh sebagai pengguna, penikmat, dan si target adalah posisi yang cukup tidak menguntungkan dari sisi sosial, politik, dan ekonomi. Dalam bahasa yang lebih tegas, kehadiran NGO internasional adalah bagaimana menjadi Aceh dan warganya sebagai obyek jangka pendek, menengah, dan jangka panjang.

Akhirnya, paparan ini menunjukkan bahwa peran dan fungsi NGO internasional adalah hanya untuk membantu rakyat Aceh. Namun tidak ada kebaikan di dunia ini yang tidak ingin dibalas. Semuanya kebaikan perlu dibalas. Rakyat Aceh nanti akan membalas kebaikan ini dengan merestui apa yang akan terjadi pada diri mereka dan bumi mereka. Inilah sesungguhnya politik bantuan yang sedang dijalankan di Aceh saat ini. Sepertinya sulit bagi NGO internasional untuk menegasikan pemikiran di atas, sebab uang dan harga sosial yang mereka bawa ke Aceh tentu harus dibayar oleh Aceh pada suatu saat nanti. ☙

BAB 19

Membongkar Wacana Pemekaran Propinsi Aceh

ISU pemekaran wilayah di Aceh memang sudah mencapai titik kulminasi, ketika beberapa pihak terlibat dalam upaya untuk "talak tiga" dengan NAD. Kondisi ini sejatinya bukan suatu wacana baru di NAD, setidak isu ini memang telah dihembuskan sejak pemberlakuan otonomi daerah pasca reformasi. Namun demikian, diskursus ini semakin mencuat manakala Aceh saat ini sedang menanti pengesahan RUU PA yang diikuti dengan pilkada beberapa bulan yang akan datang. Keinginan untuk pisah ini juga harus dimengerti bahwa ada beberapa pihak khawatir dengan situasi sosial politik di Aceh saat ini.

Dalam bab ini, saya ingin mencoba membongkar kembali apa dan bagaimana isu pemekaran ini harus ditanggapi oleh kita yang masih menginginkan Aceh sebagai sebuah daerah yang kaya dengan suku bangsa dan bahasa. Setidaknya ada beberapa tesis yang ingin dikemukakan dalam kesempatan ini.

Tesis pertama adalah bahwa keinginan untuk memisahkan diri di kalangan beberapa kelompok masyarakat NAD sekarang ini adalah sebagai adanya ketidakseimbangan antara struktur kelas dan fungsi sosial di Aceh. Perasaan tidak "terlibat" dalam proses pembangunan NAD di mana sering dimaknai sebagai tidak berimbangnya pembagian "kue politik dan ekonomi". Pada gilirannya kelompok yang tidak bisa menikmati "kue' ini ingin mendirikan pemerintah daerah sendiri dengan asumsi bahwa jika berhasil mendapatkan status propinsi baru, maka "kue politik dan ekonomi" akan dinikmati oleh kelompok ini. Keinginan ini memang

sangat mulia dengan mengatasnamakan kepentingan rakyat setempat, namun pada akhirnya rakyat juga tidak akan menikmati hasil dari "kue politik dan ekonomi" tersebut.

Tesis kedua, selama ini ada agenda yang tercecer di kalangan pemerintah NAD yaitu meningkat sikap kebersamaan sebagai orang Aceh. Sampat saat ini tensi bahwa tidak semua orang Aceh di NAD adalah orang Aceh sudah demikian memanas, apalagi terhadap mereka yang menjadi korban konflik selama beberapa tahun terakhir ini. Hal ini pada urutannya memunculkan sikap untuk mengangkat identitas lokal untuk diangkat ke permukaan yang dimaknai dengan pendirian propinsi baru. Sesungguhnya persoalan ini juga dipicu oleh rasa keterasingan beberapa suku tertentu di NAD yang pada gilirannya menyebabkan mereka ingin mengangkat jati diri mereka secara organisatoris dalam bentuk "talak tiga" dengan Aceh. Intinya, tesis ini ingin menegaskan bahwa perasaan "alienasi" ini memang sudah terjadi beberapa dekade, sehingga perasaan ini menyebabkan mereka untuk menunjukkan identitas mereka secara sosial dan politik pula. Jadi seakan-akan dengan berdirinya propinsi tersebut, maka segala persoalan identitas akan selesai. Padahal hal ini memang belum mampu menjawab sekian persoalan yang akan menanti jika mereka pisah dari NAD

Tesis ketiga rentak irama goyang ingin "cerai" ini memang sengaja dihembuskan dalam rangka menganggu pola damai yang sedang berjalan di Aceh. Harus diakui, ini akan menguras emosi masyarakat yang ingin cerai dengan NAD. Emosi inilah yang dimanfaatkan oleh mereka yang ahli dalam melakukan peta konflik di Indonesia. Hal ini sudah lazim malzum di Indonesia, di mana setiap isu bisa "diskenariokan" asal gendang dan rentaknya bisa diatur. Saya yakin, isu ini akan mencuat seiring dengan Pilkada dan keterlibatan GAM dalam politik di Aceh. Dalam konteks manajemen konflik – beberapa kelompok di Jakarta dan juga di Aceh –memang sangat ahli memainkan isu-isu sensitif di Aceh, apalagi jika skenario konflik ini didapatkan dari mereka yang pernah terlibat dalam operasi militer di Aceh.

Adapun tesis keempat adalah suatu pemahaman yang tidak begitu popular di Aceh yaitu bahwa suatu kemunduran jika ada anggapan dengan adanya "talak tiga" ini akan mencapai kemajuan. Sebagai contoh, saat ini beberapa negara maju malah ingin bersatu dalam satu group atau kelompok atas nama kesamaan pemahaman pada bidang tertentu yaitu politik, ekonomi, dan keamanan. Karena itu tidak mengejutkan jika muncul kelompok Uni Eropa atau ASEAN-Plus Three. Semua ini menunjukkan adanya keinginan untuk bersatu untuk menyelesaikan berbagai

persoalan secara bersama. Sikap ini sering dinamakan dengan centripetal yang kurang lebih berarti ingin bersama dalam satu kesatuan.

Adapun di Indonesia dan juga di kalangan masyarakat Aceh yang muncul adalah sikap *centrifugal* yang berarti ingin pisah dari sebuah kesatuan. Kalau boleh dikatakan sebagai langkah mundur, maka kecenderungan ini harus dimaknai sebagai proses untuk menuju kebelakang, bukan ke depan. Maksudnya, jika ada keinginan dari beberapa kelompok masyarakat di NAD untuk "talak tiga", maka persoalan yang harus dipikirkan adalah bukan sekadar status propinsi baru, namun bagaimana kesiapan untuk mengatur pemerintahannya. Jika hanya ingin "talak tiga" lantas kemudian menanti bantuan dari pemerintah, maka munculnya berbagai penyimpangan akan mewarnai pemerintahan tersebut. Dalam konteks ini tampaknya kalkulasi sosial lebih utama dari pada ekonomi dan politik.

Saya masih menyimpan anggapan bahwa pemekaran ini akan mampu memuaskan keinginan beberapa kelompok tertentu. Namun dibalik itu semua adalah beberapa catatan pinggir yang sejatinya menjadi bahan pertimbangan. Untuk tidak mengatakan pesimistis, saya beranggapan bahwa keinginan "talak tiga" ini lebih sekadar dari imajinasi solidaritas atas kesamaan bahasa, budaya dan sejarah. Konsep ini memang telah banyak muncul di kalangan beberapa gerakan sosial di seluruh dunia di mana mereka selalu mengedepankan imajinasi ini dalam membangkitkan sentimen sosial. Namun kerap kali imajinasi solidaritas ini tidak mampu menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi rakyat.

Dalam bahasa yang lebih sederhana, jika rakyat berpikir bahwa dengan adanya propinsi baru akan menciptakan lapangan kerja, rakyat sejahtera, pendidikan dan ekonomi merata atau lebih baik daripada "bergabung" dengan NAD. Maka ini yang disebut dengan imajinasi atau janji yang agaknya sulit untuk dibuktikan oleh kelompok yang ingin "talak tiga." Karena itu, beberapa gerakan sosial atau bahkan revolusi sekalipun tidak mampu menjawab tantangan ini. Dalam kontek isu pemekaran Aceh, persoalan ini tampaknya akan dibangkitkan untuk menarik simpati massa. Pengalaman beberapa revolusi dan reformasi, di beberapa negara, termasuk Indonesia, menunjukkan bahwa terkadang rakyat lebih putus asa ketika mereka mendapatkan suatu pemerintahan yang baru di mana sebelumnya banyak memberikan janji-janji.

Lebih jauh lagi, saya hanya ingin memberikan beberapa catatan pinggir untuk membangun kembali semangat kebersamaan di kalangan warga Aceh. Bahwa keinginan untuk "talak tiga" adalah sesuatu yang wajar dan tidak perlu disalahartikan. Namun sebelum mengajukan "talak tiga" seharusnya dibangun sebuah dialog untuk memastikan bahwa ada sesuatu yang "hilang" di kalangan

masyarakat Aceh selama ini. Tegasnya, semangat kebersamaan yang telah muncul sekian lama di Aceh, tidak perlu diakhiri dengan adanya kepentingan kelompok yang tampaknya memiliki kepentingan jangka pendek.

Semangat dialog dan kebersamaan ini juga harus diterjemahkan dengan mengikis perasaan "alienasi sosial" yang selama ini tampaknya terjadi di kalangan masyarakat Aceh. Bagaimana pun, data sejarah memang tidak cukup untuk diuraikan di sini untuk membuktikan betapa kebersamaan selama ini telah mengukir sebuah peradaban Aceh. Dalam membangun peradaban baru di Aceh yang punah akibat konflik selama ini, isu pemekaran adalah bukan jawaban yang tepat. Pada saat masyarakat dunia membangkitkan semangat centripetal, kita malah mundur dengan mengedepankan semangat *centrifugal*.

Akhirnya, kajian ini bukan ingin menunjukkan kesetujuan dan ketidaksetujuan dengan adanya isu pemekaran Aceh. Namun hanya ingin memberikan sebuah perspektif yang luas dalam rangka membangun Aceh ke depan, khususnya dampak dari isu pemekaran ini. Sambil menutup kajian ini, saya masih menyimpan harapan bahwa bumi Aceh agaknya bukan untuk dipecah belah, namun untuk dijaga agar muncul kembali peradaban Aceh yang baru. ☙

BAB 20

Andai Saya Gubernur Aceh Pasê Raya

IZINKAN saya sejenak bermimpi lagi menjadi seorang Gubernur di propinsi baru yaitu Aceh Pasê Raya. Tahun 2006 saya juga pernah bermimpi menjadi Gubernur Aceh, walaupun saya tidak mencalonkan menjadi Gubernur. Propinsi ini saya beri nama Aceh Pasê Raya (APR). Letak propinsi saya ini mulai dari Samalanga hingga ke Lhoksukon dengan areal pegunungan yang dikenal dengan istilah Bukit Barisan. Jadi, propinsi impian saya ini sangat kecil, karena itu, saya pun tidak begitu susah untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur jika APR ini sudah berdiri.

Sebelum terpilih menjadi Gubernur APR, saya terlebih dahulu menyerap 'aspirasi' rakyat bahwa memang diperlukan propinsi baru di Aceh. Mereka selalu datang ke rumah saya untuk membicarakan bahwa APR sangat mungkin untuk dilakukan. Mereka juga menyebutkan beberapa nama yang menjadi tokoh yang bisa diminta pendapat di Jakarta. Selain itu, mereka juga membuat satu kelompok propagandis, bahwa APR sudah saatnya dideklarasikan.

Untuk biaya operasional propaganda ini, saya telah dibantu oleh sekelompok pengusaha yang setia untuk menanti berapapun biaya untuk proyek jangka pendek ini. Mereka bahwa mengatakan, kalau APR nanti didirikan, saya sudah dipersiapkan untuk menjadi Gubernur. Tugas saya hanya menyerap 'aspirasi' rakyat untuk mempercepat pendirian propinsi APR. Saya pun mulai menulis bahwa pemerintah Aceh ternyata hanya mengambil hasil bumi di kawasan Aceh Utara

selama ini. Rakyat tidak pernah diberdayakan. Saya juga mulai mempublikasikan bahwa perusahaan terkenal di Aceh Utara, sama sekali tidak pernah memberikan perhatian yang cukup terhadap rakyat. Demikian pula, saya juga menulis bahwa jalan-jalan di pedesaan, misalnya jalan Muara Batu – Sawang, tidak pernah menjadi simbol kebanggaan sebagai warga propinsi Aceh saat ini. Mereka menyebut jalan ini adalah bukti proyek *jen jen jok* selama dua puluh tahun terakhir. Saya juga menulis bahwa banyak sekali infrastruktur di Aceh Pasê Raya yang ternyata tidak pernah mendapat perhatian. Jalan yang dibuat selalu diselesaikan 30 Desember namun 31 Januari jalan sudah digenangi oleh air dan lumpur. Hal ini disebabkan oleh aspal yang tidak berkualitas, selain proyek dijalankan dengan pola kajar tayang ala sinetron.

Dalam hal ini, saya juga harus mengabaikan sejarah perkembangan Kerajaan Aceh dahulu kala. Saya menyebut ini adalah romantisme sejarah saja. Bahkan saya mengatakan bahwa perjuangan di Cumbok bukti bahwa orang Aceh tidak bisa bersatu. Di samping itu, saya juga mempublikasikan bahwa sejarah Aceh Utara selama ini adalah sejarah penghisapan darah rakyat dan semuanya tidak pernah menguntungkan rakyat. Inilah sebagian agenda pribadi saya, saat saya ingin dikenal oleh rakyat sebagai pendekar pejuang Aceh Pasê Raya. Untuk meyakinkan publik, saya menyebutkan bahwa selama hampir dua puluh lima tahun, area Aceh Pasê Raya ini tidak pernah berubah. Rumah yang ada Di samping jalan yang didirikan sejak tahun 1980-an ternyata tetap kokoh sampai sekarang. Bus yang digunakan oleh rakyat pun adalah barang rongsokkan walaupun hanya ganti bak-nya saja. Saya pun menyampaikan betapa banyak kecelakaan lalu lintas akibat dari bus ini. Di samping itu, saya pun menjanjikan untuk membuat jalur dua arah sepanjang propinsi impian saya ini.

Untuk pemerintah pusat, saya pun begerilya ibarat Gubernur Aceh lainnya pada masa Orde Baru, menunggu pejabat di masjid waktu shalat Subuh. Saya datangi mereka sambil membisikkan bahwa Aceh Pasê Raya akan menguntungkan Jakarta, jika benar-benar dilaksanakan. Saya datangi juga beberapa kelompok elit Jakarta untuk mengatakan jika pendekatan *grouping masyarakat* dijalankan, maka salah satu caranya adalah dengan mencincang satu penggal wilayah Aceh sekarang ini. Dalam hal ini, saya sebenarnya sedang mencari muka di depan mereka, supaya pada saat dialog dengan anggota DPR-RI mereka yakin bahwa Aceh Pasê Raya adalah jawaban yang paling mantap terhadap kemelut pemekaran Aceh saat ini.

Setelah propinsi ini disahkan, saya pun diangkat sebagai pahlawan. Hampir semua kedai kopi membicarakan kesuksesan saya. Mereka tidak segan-segan menghampiri saya dengan mengatakan ini baru benar-benar *Aneuk Pasê*. Saat

propinsi ini sudah berdiri, saya pun mulai diserang berbagai penyakit. Saya takut jumpa orang, karena mereka menanyakan bagaimana solusi seterusnya setelah pendirian propinsi Aceh Pasê Raya. Karena saya kelelahan selama kampanye Aceh Pasê Raya, akhirnya saya harus terbang ke Pulau Penang untuk berobat. Rumah dan kantor saya pun kosong selama beberapa pekan.

Selama di Penang, saya selalu mendapatkan telpon dari berbagai kalangan untuk meminta jabatan dan proyek. Dokter pun memarahi saya dengan mengatakan *awak kena rehat sekejap*. Akhirnya, mereka yang dulunya menjadi kawan dan mitra kerja, mulai curiga saya sudah mengisolasi diri dan tidak memperdulikan diri. Hape mati, tetapi kepala tetap tidak berhenti. Propinsi baru saya ternyata sudah menuai benih konflik kepentingan. Rakyat pun mulai mengatakan kalau saya ini adalah pembohong. Mereka yang dulunya datang minum kopi, sudah belajar melempari kerikil ke rumah saya. Bom pun sudah mulai dibunyikan atas nama ketidakpuasan.

Setelah dokter mengizinkan saya pulang, maka sesampai di Bandara Malikussaleh, sebagai Gubernur Aceh Pasê Raya, saya disambut oleh staf dan ajudan. Mereka langsung menyebutkan agenda yang harus saya kerjakan. Pada saat yang sama, HP saya pun tidak pernah berhenti berbunyi. Ternyata dalam batin saya menjadi pemimpin di propinsi baru ini tidaklah mudah. Walaupun saya mengatasnamakan rakyat, ternyata menjadi contoh rakyat tidak lah gampang. Ternyata saya abai selama kampanye Aceh Pasê Raya ini saya tidak pernah belajar dari negara-negara yang hancur atau propinsi yang selalu dilanda konflik, kemudian pemerintah memunculkan propinsi baru. Ternyata saya juga abai kalau promosi Aceh Pasê Raya ini adalah jebakan untuk mematikan diri saya sendiri.

Saya mulai menyadari bahwa membangun satu pemerintahan baru tidaklah mudah. Sebab, walaubagaimanapun kekuasaan yang menjadi incaran saya tidaklah sama seperti apa yang diharapkan oleh masyarakat Aceh Pasê Raya. Mereka mengharapkan perubahan dari saya dan saya pun memberikan janji perubahan tersebut. Karena itu, mereka sangat simpati pada ide-ide saya untuk mendirikan Aceh Pasê Raya ini. Padahal, dalam hal apapun, ada pandangan yang mengatakan bahwa 'di Aceh semua bisa berubah, namun yang tidak pernah berubah adalah orang Aceh sendiri.' Jadi, saya bisa membawa perubahan nama, status, bandera, undang-undang, dan segalanya, namun saya tidak bisa memberikan bagaimana caranya agar orang Aceh bisa berubah. Apakah dengan perubahan status menjadi Aceh Pasê Raya, orang Aceh di Aceh Pasê Raya akan berubah? Saya sendiri walaupun sudah menjadi Gubernur Aceh Pasê Raya, ternyata tidak bisa berubah seperti yang diinginkan oleh rakyat saya sendiri, apalagi kalau saya menuntut perubahan dari mereka.

Demikian pula, jika nanti Aceh Pasê Raya, apakah misalnya jalan Muara Batu – Sawang akan dibuat seperti jalan raya di Jakarta. Apakah perubahan status ini juga memberikan impak pada kontraktor dan pimpro dalam menangai propinsi baru ini. Jalan Muara Batu – Sawang ini adalah salah satu jalan yang saya injak sejak berumur 2 tahun hingga sekarang. Sudah begitu banyak pemimpin yang bertukar dan bupati yang menjalankan proyek, namun hingga sekarang, jalan ini menjadi symbol bahwa saya tidak perlu mengganti atau membuat propinsi baru di Aceh. Sebab, saya meyakini bahwa yang diperlukan oleh rakyat adalah perubahan gaya kepemimpinan dan gaya berpikir mereka yang menjadi abdi rakyat. Dengan kata lain, saya belum berani agaknya menggagas propinsi baru, jika saya belum bisa mengubah watak orang Aceh. Sebab, propinsi atau apaun namanya adalah sebuah label atau penamaan yang sarat dengan kepentingan lokal, nasional, dan internasional. Agaknya saya pun bisa menduga tidak ada ada upaya untuk mendirikan propinsi Aceh Pasê Raya, karena bumi Pasê telah menyumbang jutaan rupiah dan dollar terhadap manusia di dalam dan luar negeri. Dengan kata lain, kawasan ini akan tetap seperti impian saya ketika menjadi alasan mengapa Aceh Pasê Raya didirikan. Namun saya belum berani mengatakan bahwa pendirian Aceh Pasê Raya adalah jawaban terhadap keterbelakangan tanah kelahiran saya ini.

Jadi, saya pun tidak membawa alasan perubahan atas nama propinsi baru. Alasan dan propaganda saya adalah hal yang benar adanya, namuan bukan menjadi alasan untuk 'mencalonkan diri saya menjadi Gubernur APR.' Karena yang paling sulit dalam kehidupan saat ini adalah mengubah paradigma atau pola piker rakyat besar dan kecil untuk benar-benar punya itikad membangun kawasannya masing-masing. Jika dana yang cukup besar dan kejujuran pemimpin dan ketulusan kontraktor dikedepankan, maka impian saya untuk mendirikan Aceh Pasê Raya harus berakhir di tulisan ini saja. ☙

BAB 21

Perilaku Kapitalisme di Aceh

BANYAK kalangan yang menduga bahwa gejala kapitalisme[1] hanya dapat ditemui di negara-negara Barat. Bukan hanya di situ, ada juga pandangan bahwa gejala kapitalismelah yang menyebabkan munculnya kemiskian dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat, terutama di negara-negara miskin. Namun fenomena kapitalisme juga dapat ditemui di kalangan masyarakat Aceh yang sangat islami.

Kapitalisme sendiri adalah pemikiran yang dikembangkan oleh Karl Marx (1818-1883), salah seorang pemikir ilmu sosial yang sangat berpengaruh di Barat. Dia hidup sezaman dengan Darwin yang mencoba mengatakan bahwa manusia dari kera. Inti dari ide Marx adalah bagaimana mencapai keuntungan yang sebanyak-banyaknya dalam dunia bisnis yang hanya dapat dilakukan oleh kalangan menengah ke atas.[2] Dalam hal ini, rakyat tidak akan mampu bersaing dalam dunia kapitalisme. Mereka hanya menjadi objek dari system ini di mana hanya ada dua

[1] Untuk mengenal konsep kapitalisme, baca Milton Friedman, *Capitalism and Freedom* (Chicago and London: The University of Chicago Press, 1982).

[2] Untuk mengenal beberapa pemikiran Karl Marx, baca Shlomo Avineri, *The Social and Political Thought of Karl Marx* (Cambridge: Cambridge University Press, 1972); Ken Morrison, *Marx, Durkheim, Weber: Formations of Modern Social Thought*, Second ed. (London: Sage Publications, 2006); Tom Bottomore, ed. *Modern Interpretations of Marx* (Oxford: Basil Blackwell,1981). Tom Bottomore, ed. *A Dictionary of Marxist Thought* (Oxford: Blackwell Reference,1988). David McLellan, *The Thought of Karl Marx: An Introduction*, Second ed. (New York: The Macmillan Press, 1980).

cara untuk mencapai keuntungan yaitu: meminjamkan uang atau menghidupkan bunga atau perdagangan dalam dunia komoditas.

Ide ini sesungguhnya hanya bagaimana menjadi buruh (dalam bahasa Marx) sebagai objek untuk mencapai keuntungan sebanyak-banyaknya. Intinya adalah bagaimana menciptakan profit yang luar biasa. Dewasa ini system ini hanya berkembang di negara-negara maju dan di kota-besar yang hanya didominasi oleh kelas tertentu.

Namun demikian, saat ini gejala ini sudah lama merambat dalam kehidupan masyarakat Aceh. Dalam bab saya ingin memberi beberapan contoh kecil di mana kapitalis bermain hingga menyengsarakan rakyat. Pertama, dalam dunia kontraktor di mana pemainnya adalah mereka yang punya modal selalu mencari keuntungan dari setiap proyek. Keuntungan yang didapatkan memang terkadang di luar dugaan. Untuk mencari keuntungan maka skenario yang pertama adalah bagaimana memotong habis semua anggaran produksi dengan cara mengurangi semua budget untuk sebuah proyek. Dalam bahasa lain, jika sebuah proyek berjumlah Rp. 700 juta, maka anggaran yang dihabiskan hanya 300-400 juta. Sehingga hasil atau bangunannya tidaklah seperti yang diinginkan. Karena itu, tidak mengejutkan jika kita jalan-jalan di sekitar Aceh maka beberapa bangunan yang dibuat kontraktor pada era 1990-an hingga 2000-an sangat mengecewakan, mulai dari jalan hingga bangunan untuk rakyat. Inilah pola kapitalisme yang tampak dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Karena kapitalisme hanya berjalan di kalangan elit semata, maka sang kontraktor hanya berurusan dengan elit di mana proyek dia dapatkan. Dalam hal ini, 'kesepakatan elit ini' juga diambil dari uang proyek tersebut. Sehingga tidak mengejutkan 'elit' yang menangani proyek juga mendapatkan imbas dari dunia kapitalisme ini. Sampai saat tulisan ini ditulis, fenomena ini sudah begitu membudaya di Aceh, sehingga tidak ada satu kekuatan pun yang mencoba mengubah sistem kapitalis ini.

Salah satu contoh lain yang cukup menyesakkan dada adalah jika kita jalan-jalan di sekitar pasar Aceh untuk membeli baju. Jika harga baju 25 ribu rupiah, maka penjual memulai membuka harga 3 atau bahkan 4 kali lipat dari harga semula. Proses pencarian untung seperti ini juga dapat dirasakan oleh pembeli di Pasar Aceh, Banda Aceh, untuk memberi satu contoh tempat yang lazim terjadi pola kapitalisme lokal. Sehingga para pembeli yang tidak berani menawar setawar-tawarnya akan terjerembab dalam pola penjualan sang kapitalis. Pola tawar menawar ini sebenarnya memang bukan barang baru dalam dunia perdagangan. Tetapi jika sangat merugikan pembeli maka itu bukan tawar menawar, tetapi

bagaimana mendapatkan untung sebanyak-banyaknya dengan metode kapitalis.

Demikian pula, kalau kita mengisi bensin di tempat penjualan resmi, maka perilaku kapitalis juga dapat ditemui. Langkah yang paling mudah adalah dengan 'memainkan' harga pada mesin pengisi minyak. Perilaku ini terkadang menyesakkan dada, sebab terkadang yang 'dimainkan' oleh petugas pengisi minyak hannya beberapa rupiah sahaja. Namun sekali lagi, dalam dunia kapitalis, untung adalah segala-galanya tanpa memperhatikan konsumen. Lagi-lagi kita sebagai pembeli tidak punya kuasa untuk mengubah perilaku ini.

Contoh kecil lainnya yang pernah marak di Aceh adalah saat membeli di supermarket, yaitu tradisi mengembalikan uang dengan menggantikan permen. Saya sendiri pernah bertanya bagaimana kalau uang saya tidak cukup saya gantikan dengan permen. Kasir mengatakan tidak bisa. Namun saya balik bertanya kenapa anda bisa menggantikan uang saya dengan permen. Persoalan remeh temeh ini memang luput dari perhatian kita semua, namun sekali lagi kita telah membiarkan dunia kapitalis berkembang di Aceh.

Contoh-contoh di atas adalah perilaku kecil di tengah-tengah masyarakat kita yang tidak (akan) ada penyelesaiannya. Sebab perilaku ini sudah menjadi budaya kita sehari-hari. Akibatnya yang kaya semakin kaya sedangkan yang miskin semakin miskin. Sebab sistem sosial yang berkembang adalah memihak pada yang kaya atau yang kuat. Sedangkan yang miskin bagaimana dia mendapatkan kesempatan untuk belajar jadi orang kaya dengan mengadopsi metode kapitalis juga.

Dalam dunia kapitalis, uang atau untung sebanyak-banyaknya adalah tujuan utama. Mereka tidak akan memikirkan orang kecil atau orang miskin. Bagi mereka orang miskin adalah orang yang dapat dipergunakan sebagai 'alat' bagi mempertahankan kekayaan mereka. Dalam dunia kapitalis orang kecil sering disamakan dengan buruh atau tukang. Mereka adalah orang yang hanya menikmati sisa-sisa uang dari kapitalis yang kaya raya. Namun sang kapitalis tidak akan punya pemikiran untuk mensejahterakan orang lain, sebab dalam pikiran mereka adalah uang dan untung sebanyak-banyaknya.

Bab ini memang ingin membuka wacana terhadap persoalan remeh temah yang berkembang di tengah masyarakat Aceh. Sebab dalam Islam, jika agama ini menjadi agama resmi di Aceh, tujuan bermasyarakat adalah bagaimana mensejahterakan satu sama lain. Namun semangat ini ternyata malah hilang sama sekali di tengah-tengah masyarakat kita.

Yang tampak adalah bagaimana kita mengaminkan perilaku kapitalis ini secara bersama-sama. Kita juga memberikan ruang gerak bagi mereka untuk mendapatkan

uang sebanyak-banyaknnya. Kita juga berpura-pura sambil tersenyum membiarkan mereka mempermainkan kelompok masyarakat (konsumen). Karena itu tidak mengejutkan jika kemudian perilaku ini menjadi semacam budaya yang amat sulit dihilangkan, seperti budaya merokok dalam bus AC.

Perilaku kehidupan ekonomi yang sehat agaknya memang belum berjalan di Aceh. Sebab itu setiap ada upaya atau kesempatan yang berbau uang selalu diikuti dengan mencari keuntungan untuk diri sendiri dahulu. Akibatnya perilaku ini juga diikuti oleh rakyat kecil ketika mereka punya kesempatan. Jadi sebenarnya kebiasaan kapitalisme memang sudah begitu menggurita di Aceh.

Dalam hal ini, ada beberapa langkah untuk mengurangi kapitalisme di Aceh. *Pertama*, para kapitalis ini selayaknya harus menyadari, jika memang mereka beragama Islam, bahwa mendapatkan untung dengan cara yang tidak sehat dimurkai oleh Tuhan dunia akhirat. *Kedua*, para elit juga harus memikirkan kembali bahwa 'kerja sama' mereka dengan kontraktor adalah dalam rangka menyesarakan rakyat. *Ketiga*, para perilaku mencari untung tidak sehat ini harus memahami bahwa pola tersebut tidak akan memberikan keberkahan, sebab apa yang dimakan oleh mereka adalah harta orang lain. *Keempat*, tradisi kapitalisme di Aceh harus dihentikan seiring keinginan kita semua menuju Aceh Baru.

Akhirnya paparan ini memberikan satu masukan dan rangsangan untuk kita semua bahwa apa yang kita benci selama ini, yaitu kapitalisme, ternyata sudah begitu akrab dalam kehidupan kita. Sebab itu kita sendiri secara bersama-sama membiarkan budaya ini yang sama sekali berlawanan dengan agama yang kita anut, Islam. Jadi, ditunggu 'kekuatan baru' untuk menghilangkan perilaku kapitalisme di Aceh. ☙

BAB 22

Menggagas Kiamat Center di Aceh

BAB ini adalah hasil refleksi saya selama ini untuk melihat bumi Aceh sekarang yang sudah tidak menentu. Ketidakmenentuan ini dipicu oleh kegelisahan saya yang ternyata tidak akan menyelesaikan masalah Aceh jika bukan dengan menggagas Kiamat Center. Kiamat Center bertugas untuk mencari beberapa kejadian atau perilaku manusia di Aceh yang saat ini ternyata tidak menuju ke arah yang lebih baik. Kiamat Center bisa menjadi semacam lembaga yang menampung isu-isu apa saja yang sudah mengarah pada tanda kiamat di Aceh.

Selama ini Aceh adalah tempat yang paling agamis di Asia Tenggara, namun beberapa tahun belakangan, ada kejadian yang mempertandakan bahwa Aceh sudah dijadikan tempat oleh Allah sebagai tempat musibah. Lalu Allah mendatangkan musibah selanjutnya di Kuala Simpang. Ini betul-betul suatu fenomena alam yang amat sangat menarik untuk mengkaji secara akademik apakah Aceh tempat yang disayang oleh Allah atau sebaliknya. Dan kita berharap tidak ada musibah pada bulan Desember tahun ini.

Kiamat Center juga bertugas mencari apa saja perilaku umat Islam di Aceh yang betul-betul mendukung analisa kita bahwa musibah itu adalah teguran yang paling kuat dari Sang Pencipta Alam. Asumsi yang hendak saya bangun adalah bahwa orang Aceh masih mempercayai Allah sebagai Tuhannya dan mengakui dirinya beragama Islam. Sebab itu analisa kita ingin mengatakan bahwa orang Aceh adalah orang yang betul-betul tahu bahwa dia masih dikasih iman dan Islam oleh Allah.

Selanjutnya Kiamat Center juga bertugas untuk mencari informasi di bumi ini untuk mendapatkan data bahwa banyak musibah yang terjadi tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Saat ini para pengkaji cuaca misalnya sudah memberikan tanda-tanda yang cukup mengejutkan yaitu terjadinya *global warming* akibat ulah manusia. Hal ini dibuktikan dengan es di Antartika (sebuah kutub dekat dengan Australia) diperkirakan akan menurun, kita tidak dapat membayangkan jika es ini meleleh. Pada saat yang sama, lapisan ozon pun sudah begitu tipis hingga mengakibatkan dunia semakin panas.

Dunia semakin panas juga dipicu oleh ketidaknyamanan hidup. Di Aceh misalnya, orang yang sudah kaya masih gelisah untuk memperbanyak kekayaan mereka. Orang yang bersenjata masih gelisah untuk melanjutkan perang di Aceh. Orang yang miskin selalu gelisah bertanya dalam hati mereka kapan giliran kita. Orang yang diamanatkan pekerjaan sosial selalu gelisah bagaimana memperbanyak pendapatan mereka. Orang yang miskin dan melarat selalu gelisah apakah mereka masih bisa makan hari ini atau besok. Yang sekolah gelisah apakah mereka dapat kerja setelah selesai kuliah. Yang hidup harus mengajar gelisah kenapa mereka tidak kaya-kaya.

Fenomena sosial ini selayaknya dapat dijadikan data awal bagi Kiamat Center di Aceh. Sebab implikasi dari data di atas akan membenarkan temuan bahwa masih akan banyak ketidakmenentuan di Aceh ini. Demikian pula kita harus melakukan data apa saja yang sudah kita punyai selama ini. Kita punya uang di Aceh yang tidak terhitung jumlahnya. Kita punya ulama yang selalu memperdengarkan ilmu-ilmu kepada murid mereka. Kita masih punya pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Kita juga masih punya tantara yang dibayar dengan uang rakyat. Kita juga masih punya kekayaan alam yang bisa hidup untuk ratusan tahun ke depan.

Setelah itu, kita melakukan analisa data dengan memberikan standarisai pada persoalan seberapa banyak kita bersyukur dan tidak bersyukur. Proses syukur dan mensyukur ini kemudian dapat dilihat dari apa yang terjadi selama ini di Aceh. Apakah dengan jumlah uang yang banyak orang makin gelisah atau masik tenang hidupnya. Apakah dengan tidak ada perang, orang masih gelisah untuk mengatur perang lagi di Aceh. Apakah dengan tidak ada perang, orang tidak mau makan uang dan menakuti rakyat.

Jadi tugas Kiamat Center ini adalah berdasarkan pada musibah yang muncul di Aceh, Tsunami dan banjir di Kuala Simpang. Demikian pula pada munculnya kekerasan selama ini di Aceh. Ini menunjukkan bahwa sulit menemukan bahwa naiknya tingkat kesadaran orang di Aceh untuk selalu ingat kepada Allah. Malah sebaliknya, yang ada naiknya tingkat ketidaksadaran pada Allah.

Dalam konteks ini, Kiamat Center harus mempunyai divisi pelacakan apa saja yang disukai oleh nafsu dan Setan bagi manusia di Aceh. Divisi ini bertugas untuk mengacak dan mecabik data setiap kekerasan dan ketimpangan yang ada di Aceh selalu dipicu oleh dua hal ini, nafsu dan Setan. Selain daripada itu, divisi ini bisa bekerja sama dengan divisi olah data mengapa Tuhan membenci satu kaum.

Jadi keberadaan Kiamat Center ini adalah hasil akumulasi dari apa yang terjadi selama ini di Aceh. Kita harus membuat evualuasi bahwa semakin banyaknya uang yang beredar di Aceh semakin banyak ketimpangan yang muncul. Pada saat yang sama kita juga melihat semakin banyak keinginan untuk menghentikan perang, semakin besar tuntutan untuk membuat Aceh tidak damai.

Dua asumsi dasar ini kemudian dapat dijadikan sebagai data awal, kira-kira bencana apa yang akan datang, jika kita berbuat demikian. Jika kita tidak suka baca al-Qur'an dan pengalaman kaum sebelumnya pada zaman Nabi, maka pengalaman Tsunami di pesisir Aceh dan banjir di perbatasan Aceh dapat dijadikan sebagai rujukan utama. Kita tidak perlu membaca bahan lain, sebab kejadian ini apapun istilah geografinya adalah suatu teguran dari pencipta alam ini, Allah SWT.

Saat ini memang belum ada di Aceh lembaga yang mengkhususkan diri pada isu-isu yang berkaitan dengan 'teguran' Allah. Kiamat Center ini memang sudah sepatutnya menjadi agenda para ilmuwan dan ulama di Aceh. Sebab bagaimanapun kita sudah melihat munculnya perilaku-perilaku yang menguncang kehidupan masyarakat Aceh.

Kiamat Center juga bisa menjadi lembaga *think thank* bagi pengambil kebijakan di Aceh supaya selalu merujuk pada lembaga ini. Dengan kata lain, Kiamat Center ini bisa bersanding dengan seluruh center-center lain di Aceh. Kekuatan Kiamat Center adalah mereka mampu memberikan masukan dalam lintas ilmu yang bertujuan untuk mengatakan bahwa hidup ini pasti ada akhir.

Jadi tugas Kiamat Center adalah mempersiapkan data-data atau masukan agar semua yang bersifat akhir ini selalu dikaji oleh Kiamat Center. Setidaknya mereka bisa memberikan data akademik, bahwa jika anda berupaya untuk lari dari aturan Ilahi, maka akibatnya seperti ini. Mereka tinggal menunjukkan data-data orang mati atau bangunan yang runtuh, jika Allah memberikan 'tegurannya.'

Salah satu kelemahan Kiamat Center di Aceh adalah belum adanya perangkap atau sistem yang mendukung ke arah ini. Semua lembaga yang ada di Aceh agaknya belum terbiasa bahwa hidup ini pasti ada akhirnya. Akhir dari sebuah kehidupan inilah yang harus dikaji oleh Kiamat Center bahwa kiamat bagaimana pun dimulai

dengan tanda-tandanya yang sudah diatur oleh Ilahi. Namun demikian, akhir dari kehidupan alam inilah yang paling penting untuk dikaji dan diseminarkan.

Apa misalnya, proyek akhirat kita, setidaknya saat kita mati, berjumpa dengan Pencipta Alam ini? Inilah yang menjadi tugas Kiamat Center untuk membangun paradigma bahwa hidup itu ada akhir. Kita hidup ini mulai sebagai kotoran (air mani) dan mengeluarkan kotoran (taik dan kencing) dan akan menjadi kotoran juga (jadi makanan ulat). Jadi tugas Kiamat Center memang tidak begitu sulit, sebab mereka sudah punya data awal dan referensi apa yang terjadi di Aceh saat ini.

Kiamat Center juga tidak perlu banyak uang, sebab dia sebenarnya ada dalam diri kita sendiri. Kiamat Center sudah dibuat oleh Sang Pencipta. Tinggal kita mengaktifkan kembali sambil mengajukan 'proposal' kepada Allah untuk mengaktifkan dalam hati, batin, dan isi kepala kita. Dalam mengajukan 'proposal' pun, Allah tidak minta program yang detail, dia hanya ingin kita bersyukur dan tidak melupakan dia.

Akhirnya, renungan tentang Kiamat Center adalah renungan bagaimana membenamkan iman dalam batin kita. Dan, jika ada kawan-kawan yang mau mendirikan Kiamat Center juga tidak perlu bingung, sebab saya sudah mengulasnya di atas. Paling tidak Kiamat Center ini menjadi masukan bagi mereka yang selalu belajar dan berlomba-lomba untuk berbuat kejahatan di Aceh saat ini. ☙

BAB 23

Gender dan Sesat Pikir

SAYA tertarik dengan diskusi tentang isu perempuan ini, setelah membaca aksi 'pembelaan' Limantina terhadap 'penggeroyokkan' kawan-kawan terhadap ide-ide yang dilemparkan oleh Limantina. Saya sendiri tidak punya kapasitas untuk memberikan komentar terhadap apa yang diutarakan oleh Limantina, sebab bagi saya, apa yang dituliskan oleh Limantina, sama dengan aksi pemikiran kawan-kawan saya di Yogya pada tahun 1996-1997, ketika asyik mengutak-atik ayat suci al-Qur'an dengan fenomena lokal. Diskusi ini semakin menarik saat itu, ketika misalnya kawan-kawan saya terpesona dengan pemikiran Abdullah Ahmed An-Naim dalam bukunya *Toward Islamic Reformation* yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia *Dekontruksi Syari'ah.*[1]

Bukti kalimah yang sudah sering saya dengar yang juga ditulis oleh Limantina dalam diskusi klasik ini adalah "anda … masih berada di kulit teks dan pandangan anda masih dipenjarakan oleh teks. Al-Qur'an dan Hadits mengatakan begitu, ya sudah begitu!." Hingga di sini, saya dapat menyimpulkan bahwa apa pun yang dikupas panjang lebar oleh kawan-kawan lain tentang apa yang ditulis oleh Limantina, cukup diakhiri dan diamini dengan kalimah ini. Sebab jika kalimah ini sudah bisa dipahami, maka tidak perlu diperdebatkan lagi contoh kecil-kecil yang ditulis oleh Limantina ini kemudian tarik pada dataran teologi untuk menjustifikasi

[1] Lihat misalnya karya terkini: Abdullahi Ahmed An-Na'im, *Islam and the Secular State: Negotiating the Future Shari'a* (Cambridge: Harvard University Press, 2007).

pemikirannya. Model berpikir seperti ini memang sudah begitu umum di kalangan mereka yang ingin membongkar teks-teks al-Qur'an.

Apapun yang ditulis Limantina ini bukan hal baru dalam dataran pemikiran Islam, yaitu adanya berbagai wajah Islam yang berbau lokal. Ini sebenarnya cukup bisa dipahami dengan membaca karya-karya seperti karya Ronald Lukens-Bull tentang Islam yang bersifat '*high tradition*" dan "*low tradition*."[2] Ataupun pola pemikiran Islam lokal, Islam glokal, dan Islam global. Jika ini tidak bisa dipakai, Islam juga bisa dilihat dalam bentuk studi kawasan, yaitu munculnya terma Islam Padang, Islam Jawa, Islam Aceh, Islam Sasak, dan Islam-islam lainnya yang semuanya dibalut dengan bumbu budaya lokal. Jika model ini belum bisa dimasuki, maka boleh juga memakai Islam Peradaban ala Nurcholish Madjid,[3] Islam Rasional yang dikembangkan oleh Harun Nasution,[4] Islam Transformatif, dan Islam Kultural yang menjadi judul buku Amin Abdullah.[5] Intinya adalah memahami Islam bukan dengan mengusung teks al-Qur'an dan Hadits, tetapi bagaimana melihat Islam dalam wajah lokal. Pemikiran dan debat ini sebenarnya sudah selesai. Karena itu, ketika membaca tulisan Limantina yang begitu berapi-api, sebenarnya dia bisa juga merujuk pada pemikiran Islam kontemporer lainnya seperti Mohammed Arkoun, Mohammed Syahrur, Hassan Hanafi, Farid Essak, Khaled Abou-Fadl, Ali Harb dan beberapa tokoh pemikiran Islam lainnya di belahan dunia. Apa yang menarik, diskusi pemikiran merekalah yang kemudian menggiring pada munculnya pemikiran dekontruksi yang menjadi substansi tulisan Limantina, walaupun ini tidak akan pernah diakui oleh Limantina. Bagi kawan-kawan yang belum akrab dengan trend pemikiran ini, sulit sepertinya untuk beradu argumen dengan Limantina, sebab semua fenomena sosial menjadi contoh bagi dia dan begitulah seterusnya. Semua teks sosial akan menjadi teks itu sendiri, sebuah trend pemikiran juga yang muncul dalam tradisi pemikiran yang menggunakan pendekatan

---

[2] Ronald A. Lukens-Bull, "Between Text and Practice: Considerations in the Anthropological Study of Islam," *Marburg Journal of Religion* Vol.4, No.2(1999).1-21.

[3] Nurcholish Madjid, *Islam Dan Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi Dan Visi Baru Islam Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1995); Nurcholish Madjid, *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna Dan Relevansi Islam Dalam Sejarah* (Jakarta: Paramadina, 2000); Nurcholish Madjid, *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Komodernan*, V ed. (Jakarta: Paramadina, 2005).

[4] Harun Nasution, *Akal Dan Wahyu Dalam Islam* (Jakarta: UI Press, 1986); Harun Nasution, *Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu'tazilah* (Jakarta: UI Press, 1987); Harun Nasution, *Teologi Islam: Aliran Aliran Sejarah Analisa Perbandingan* (Jakarta: UI Press, 2007).

[5] M. Amin Abdullah, *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*, ed. M. Muchlas Rowi, Hilman Latief, and Asep P.B. (Bandung: Mizan, 2000).

hermenetik. Jadi jika empat kawan lainnya ingin membela "Aceh mereka' dengan sejumlah gugatan Limantina, maka sampai kapanpun debat ini tidak akan selesai, sebab jika nanti ada seorang perempuan Aceh yang tidak memakai jilbab naik sepeda dan ketangkap WH misalnya, juga akan menjadi bahan bagi penulis seperti Limantina, untuk dijadikan contoh-contoh kecil untuk mengatakan bahwa inilah potret Aceh saat ini, yaitu perempuan dikunkung dan tidak diberikan kebebasan. Inilah gaya menulis yang cukup membumi saat ini melalui pola induktif.

Dalam tradisi ilmu mantik, ada gaya berpikir dan berspekulasi *mislu sya' ghair syai* (mirip sesuatu bukan sesuatu). Saya walaupun memakai sorban untuk mengatakan bahwa saya mencontoh Islam Timur Tengah, namun pada hakikatnya saya bukan orang Timur Tengah, karena saya dilahirkan di Aceh. Saya hanya mencontoh dan saya tidak akan berhasil. Demikian pula, orang Aceh ingin mencontoh, jika boleh dikatakan demikian, namun mereka tetap orang Aceh dengan keacehannya. Makanya pertanyaanya adalah apakah Aceh saat ini belajar mencontoh Timur Tengah atau Aceh sekadar ingin menerapkan keislaman lokal mereka?

Apakah perempuan itu memakai jilbab atau tidak, tentu saja kita tidak ambil pusing. Demikian pula, apakah perempuan itu dikungkung atau tidak, saya tidak tertarik untuk mengupas bahkan menjadikan isu penting. Yang menarik adalah apa yang dilakukan oleh Islam adalah menarik mereka menjadi terhormat. Sebelum Islam, perempuan menikah tidak pernah punya satu kepastian hukum dan mereka sering harus gigit jari dengan adat jahiliyyah, maka setelah Islam datang, diberikan aturan yang menaikkan derajat perempuan. Sebelum Islam, perempuan tidak mendapatkan warisan, lalu Islam berusaha memberikan mereka kesempatan mendapatkan warisan. Walaupun kemudian muncul debat tentang 2:1.

Terkait dengan aurat, Islam sebenarnya tidak mengatur apapun. Sebab perempuan telah memakai jilbab jauh sebelum Islam datang. Dikisahkan bahwa jilbab dipakai oleh mereka untuk membuat mitos *menstrual taboo* yang dipercayai oleh umat sebelum Islam. Bahkan perempuan dianggap memiliki *mata Setan*, yang karenanya mereka disuruh memakai cilla pada mata mereka, pada saat datang bulan. Demikian pula, sejarah kosmetik sesungguhnya adalah sejarah perempuan *haid* yang ingin mempercantik diri mereka, sebab mereka dianggap membawa sial jika sudah datang bulan. Bahkan bagi mereka yang bukan bangsawan, mereka yang sudah datang bulan, diletakkan dalam sebuah penjara kecil. Begitu hinanya perempuan saat itu, ketika mereka datang bulan. Tidak sedikit karya Barat yang mengupas *menstrual taboo* ini. Uniknya ketika Islam menganjurkan perempuan menutup aurat, sama sekali tidak pernah membeberkan sejarah pahit dan "aib"

kaum wanita di atas.[6] Para peneliti yang membuka tabir ini agak telah menyiratkan bahwa Islam itu sama sekali tidak pernah memaksa apapun bagi umatnya.

Kalau boleh tradisi ini dilanjutkan, maka dan tanpa Islam, perempuan memang sudah dianggap sebagai pembawa sial oleh masyarakat pra-Islam. Makanya ketika sekarang wanita ingin melakukan apapun yang mereka lakukan, maka sebenarnya mereka sedang menuju pada zaman pra-Islam. Saya sendiri tidak pernah mempersoalkan apapun ide yang mengatakan mereka anti-jilbab atau apapun peraturan yang mencoba memperbetulkan perempuan. Sebab zaman pra-Islam dan zaman sekarang sejauhnya tidaklah begitu berbeda sama sekali. Sebelum Islam datang, homoseksual sudah dilegalkan, sekarang malah sudah nikah. Sebelum Islam, wanita digilir, sekarang wanita malah menggilirkan dirinya kepada lelaki dengan bayaran jutaan rupiah. Sebelum Islam, bayi perempuan dibunuh karena aib, sekarang malah dibunuh dalam kandungan. Jadi sebenarnya tidaklah ada perbedaan yang cukup signifikan antara zaman sekarang dengan zaman pra-Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sekali lagi, ini bukan persoalan wanita versus lelaki, tetapi ini sebuah kesinambungan sejarah.

Pertanyaannya adalah kenapa perempuan begitu hina sebelum Islam? Lalu apa kepentingan al-Qur'an ingin mengangkat derajat wanita? Lantas apa pula sebenarnya yang diinginkan oleh wanita modern saat ini? Dalam teologi Islam, Allah tidak pernah punya kepentingan dengan hamba-Nya. Allah hanya memberikan manusia akal dan pikiran. Karena itu, Allah bagi saya Maha Liberal, dibandingkan kelompok liberal sekarang ini. Jadi silahkan manusia memutuskan apapun yang mereka inginkan. Agama Islam hanya berisi bagaimana manusia mengingat Allah dan mensyukuri apapun nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Di atas dua hal tersebut, manusia selalu diberikan pilihan dengan akal pikiran mereka.

Jadi Muslim dari Maroko hingga Rusia boleh punya beberapa pemahaman tentang Islam, tetapi jika dia masih dalam koridor pasrah dan bersyukur, maka dia tentu saja masih mengenal Tuhan yaitu Allah.[7] Itu adalah sah-sah saja. Untuk mengenal dan dekat dengan Allah pun, punya beragam cara mulai dari tarekat hingga wasilah. Karena itu, dalam Islam dikenal dengan perbedaan pendapat adalah rahmat, sebab dengan demikian, ini akan memberikan spirit intelektual pada kaum Muslim.

---

[6] Nasaruddin Umar, "Perspektif Jender Dalam Islam," *Paramadina* 1,1(1998).96-128.

[7] Tentang sejarah Tuhan, lihat Karen Amstrong, *The Case Fo God* (New York: Anchor Books, 2009). Karen Amstrong, *History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam* (New York Ballantine Books, 1993).

Anehnya pada beberapa dasawarsa, hal ini kemudian menjadi hilang. Semua menyalahkan al-Qur'an dan Hadits. Islam dipandang tidak adil. Padahal al-Qur'an hanya mencatat bahwa sebelum Islam datang, perempuan seperti ini, dan setelah Islam datang, perempuan boleh jadi seperti ini. al-Qur'an bukan kitab undang-undang, dia hanya petunjuk. Karena itu, tafsir sangat diperlukan. Al-Qur'an tidak akan marah jika dia ditinggalkan, sebab al-Qur'an hadir untuk sekadar memberikan petunjuk. Jika sang manusia sudah dapat petunjuk selain dari al-Qur'an, maka silahkan dia meninggalkan al-Qur'an. Makanya dalam al-Qur'an, selalu diakhir dengan kata *afala (bukankah)* atau *la'alla* (mudah-mudahan).

Jadi secara singkat, jika perempuan tidak menutup aurat, al-Qur'an tidak akan menyalahkannya, sebab al-Qur'an hanya menganjurkan. Maka kalimah *afala* ini menjadi semakin kuat pengaruhnya. Jika wanita membuka aurat, tidak akan menyebabkan banyak perempuan yang menjadi pelacur. Dia tetap menjadi wanita, dan bukan pelacur. Tetapi jika perempuan menjadi pelacur sekaligus memakai jilbab, maka cara pandangnya adalah bukan menyalahkan jilbab atau al-Qur'an yang tidak memberikan jaminan seseorang itu baik, jika dia memakai jilbab. Makanya kalimah *la'alla* ini menjadi begitu penting dalam memahami al-Qur'an dan fenomena sosial. Ini rahasia kenapa al-Qur'an semakin dibaca semakin memberikan petunjuk, bukan membawa pada *truth claim*.

Dalam al-Qur'an, disebutkan *jangan kamu mendekati zina*. Di sini kalimahnya bukan sebab akibat. Sebab boleh jadi kamu mendekati zina, dan bukan berzina, untuk tujuan penelitian, namun hasilnya malah membeberkan aib wanita sendiri. Atau boleh jadi, kamu mendekati zina untuk sekadar ingin tahu bagaimana dunia dugem atau dunia malam. Jadi sebenarnya al-Qur'an telah memberikan ruang berpikir pada manusia. Tetapi jika kemudian ada yang berzina, apakah dia berjilbab atau tidak, ini tidak ada kaitannya dengan al-Qur'an dan Hadits, sebab al-Qur'an hanya memberikan kalimah *jangan kamu dekati*. Logikanya adalah jika kamu sudah dekati, maka akibatnya kamu tanggung sendiri. Namun al-Qur'an memberikan batasan maksimal bahwa jika kamu benar-benar berzina, makan kamu akan dikenakan hukuman ini, namun harus ada saksi yang melihat kamu berzina seperti timba dalam sumur. Begitu beratnya al-Qur'an membuak suatu petunjuk bagi manusia agar mereka menjadi makhluk terhormat.

Namun al-Qur'an jika sudah menyentuh yang baik-baik, selalu memakai logika hukum pasti. Jika kamu shalat, maka kamu akan tidak melakukan kejahatan. Shalat di sini bukanlah shalat 'patas' namun dimulai dengan ikhlas dan tidak ada satupun rukunnya yang tinggal. Dia juga bisa menghadirkan kekhusukan, dan al-Qur'an menjamin, jika shalat itu dilakukannya dengan model ini, maka manusia ini tidak

akan melakukan kejahatan. Kemudian jika ada orang Islam yang berbuat jahat, maka sudah pasti shalatnya tidak betul seperti yang dijamin oleh al-Qur'an. Karena itu ada kawan saya yang mengatakan bahwa ada 13000 hal yang harus diketahui sebelum melakukan shalat. Sebab itu tidak mengherankan jika dalam kitab kuning, penjelasan shalat diulang-ulang mulai dari air hingga salam dalam shalat. Karena itu pula tidak mengherankan jika bab shalat sangat panjang, ketimbang bab zina. Para santri malah menghabiskan 6-7 tahun untuk mempelajari shalat. Sekarang umat Islam hanya perlu waktu 4 menit untuk melakukan shalat atau kurang dari itu.

Jadi apapun yang ditulis oleh Limantina sebenarnya tidak salah dan benar semua. Makanya saya menulis dengan kalimah mengamini Limantina. Artinya saya tidak menganggap satu pun penggal kalimah Limantina yang keliru. Sebab dia mengupas apa yang dia lihat dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi yang menarik bagi saya adalah dia mencoba masuk kesana kemari untuk mengatakan bahwa begitu kuatnya dominasi lelaki pada wanita. Sebaliknya saya ingin mengatakan bahwa sekarang hampir semua lini kehidupan dikuasai oleh wanita. Lelaki harus tunduk pada wanita, bukan sebaliknya. Jika kita masuk sebuah kantor maka mulai dari resepsionis sampai dengan sekretaris adalah wanita. Jika kita menginap di sebuah hotel, maka penerima tamunya adalah wanita dan penikmat tamu juga wanita. Jadi tidak benar wanita ini dikungkung dan tidak diberikan hak mereka. Di gedung parlimen pun wanita mulai mengatur semua jalur lalu lintas informasi. Dapat dikatakan bahwa era modern ini bertaruh adalah era wanita memimpin lelaki, bukan sebaliknya. Lelaki hanya menjadi pemimpin simbolik, sedangkan wanita menjadi pemimpin substansi. Bahkan lelaki akan goyang kepemimpinannya jika digoyang skandal wanita. Inilah sebenarnya kemenangan wanita pada saat menjelang dunia kiamat. Semua lini kehidupan umat manusia benar-benar dipimpin oleh wanita. Bahkan lelaki banyak yang berlomba-lomba menjadi wanita. Semakin mereka memerankan diri sebagai wanita, semakin tinggi pula bayaran yang dia terima.

Namun jika ada tingkat kejahatan sosial, ini juga tidak perlu dikaitkan dengan wanita, sebab lelakilah yang menjadi penyebabnya. Jika seorang penjabat belajar korupsi, maka janganlah salahkan istrinya yang minta diberikan berbagai macam kebutuhan rumah tangga. Jika seorang pria melacur, jangan salahkan wanita yang menjadi penjual wanita (germo), salahkan lelaki yang rela menghabiskan uangnya di dalam pelukan wanita. Jika ada sindikat penjual bayi, salahkan lelaki yang memberikan benih, sebab wanita hanya melahirkan saja.

Menanggapi debat ini saya tertarik juga untuk memberikan masukan tentang terjadinya *paradigm shift.* Di dunia ini hanya dua kelompok manusia yang ada,

yaitu kelompok yang yakin dengan agama dan kelompok yang ingin menyebarkan keraguan pada agama. Terserah apapun agama mereka, yang pasti kelompok kedua lebih kuat, sebab mereka tidak berbicara atas iman, melainkan atas akal pikiran. Jadi mereka hanya ingin mengetahui semua gejala alam ini bukan dengan agama melalui akal. Sayangnya model berpikir ini banyak muncul di Barat dan mulai berpindah pada masyarakat Timur. Karena berbagai riset dan pendapat selalu berujung pada kematian fungsi agama dalam kehidupan masyarakat dunia. Agama dipandang gagal dan sejatinya harus ditinggalkan. Akhirnya manusia kelompok kedua ini membuat peraturan sendiri yang juga biasanya dilanggar sendiri. Sebab akal pikiran manusia berpikir untuk membuat peraturan, dan pada saat yang sama dicari celah untuk merusaknya. Pada dataran kelompok kedua ini pun muncul berbagai pandangan tentang agama itu sendiri. Mereka ada yang sepenuhnya yakin, setengah yakin, dan pura-pura tidak yakin, namun yakin sekali pada agama.

Diskursus kajian perempuan ini memang banyak muncul di Eropah saat perempuan menuntut hak mereka yang sama dengan kaum lelaki. Jika pagi hingga sore hari kaum lelaki mencari uang, maka malamnya mereka boleh ke bar atau saloon. Namun ketika perempuan juga mencari uang, mereka juga berhak ke bar untuk bersenang. Di sini muncullah pesta pora atau berselingkuh antara pasangan. Bagi mereka, agama dipandang gagal dan tidak berfungsi sama sekali. Pada saat yang sama, mereka juga menganggap dominasi gereja ternyata tidak memberikan kemaslahatan. Pemikiran dan konteks sosialnya inilah yang dibawa ke dalam masyarakat agama, termasuk ke Aceh saat ini, hingga memunculkan berbagai stigma negatif terhadap kelompok agama.

Diskursus perempuan sama sekali tidak bersentuhan dengan agama. Dia muncul pada saat perempuan tidak diberikan ruang gerak yang sama dengan lelaki, yang seolah-olah diakibatkan oleh agama. Padahal ada persoalan sosial lainnya yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan agama, yaitu 'kebutuhan' (*the need*). Jika kita hormat pada apa kebutuhan kita, maka kita tidak akan membeberkan alasan apapun, sebab ini akan membongkar aib kita sendiri. Sekali lagi, semakin banyak akal memberikan ide-idenya yang baik, pada saat sama dia juga memberikan sentilan ide yang nakal (*naughty*).

BAB 24

Trilogi Pemikiran Keacehan

PADA 27 Januari 2008, di Aceh terjadi gelombang kedatangan santri dari penjuru Timur Aceh. Setelah mereka menyampaikan orasi dan tuntutannya, mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Kejadian ini, saya bisa ibaratkan sepertu cerita pendekar turun gunung atau Si Pitung membela kebenaran. Mereka datang dengan memakai baju khas mereka. Ada juga yang memakai celana di dalam sarung atau memakai jubah dengan wajah penuh harap akan datangnya kebenaran di Serambi Mekkah. Di antara mereka ada yang datang hanya sebagai pengembira. Namun, ada juga yang datang karena ingin berjumpa ulama yang menjadi idola mereka.

Kejadian penting ini kemudian melahirkan tiga isu penting yaitu diskusi jen(der) dihapuskan di Aceh. PEMDA harus memikirkan secara serius tentang pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh. Lalu, ada tuntutan agar ada Qanun Aswaja (Ahli Sunnah Wa al-Jama'ah). Lalu, sebagai respon terhadap tuntutan santri dan Abu-Abu dayah, kelompok Aktivis gerah dan langsung merapatkan barisan untuk mencari 'amunisi' lebih banyak lagi. Pada saat yang, Pemda juga menganggap bahwa permainan lama sudah berlangsung lagi di Aceh. Dalam hal ini, tidak keinginan untuk masuk terlalu dalam untuk menganalisa momen ini dalam bentuk saling memperhadapkan. Sebab, bagaimanapun mobilisasi massa itu selalu perlu ada 'janji-janji' yang akan dicapai.

Dalam hal ini, saya ingin menjawab kegelisahan kita terhadap fenomena tuntutan santri ini dengan trilogi pemikiran asli Aceh yaitu *ngeutlogi, teungeutlogi,* dan *peungetlogi*. *Ngeutlogi* adalah satu ilmu (*logos*) yang bermakna [di]bodoh[i]. Istilah dibodohi ini memang berkembang pada tahun 1999 ketika PKB – sebagaimana pernah disinyalir oleh Ulil Abshar Abdallah – bahwa NU dibodohi, ketika Presiden Abdurrahman Wahid diturunkan melalui berbagai '*gate*.' Makanya orang bodoh di Aceh adalah orang yang selalu *ngeut, teungeut,* dan *dipeunget*. Ada istilah *ngeut ujong* yaitu dia dibodohi pada satu akhir kegiatan. Atau, *ngeut uram* di mana dia dibodohi dari awal. Dalam konteks kekinian, saya ingin menjelaskan bahwa *ngeutlogi* sudah berkembang di Indonesia sejak zaman Belanda ketika mereka mengadu domba dengan model *ngeut uram* atau *ngeut ujong*. Makanya, dalam tradisi Aceh, seorang yang bodoh bukanlah yang tidak sekolah atau pintar dalam segala hal. *Ngeut* ini muncul setelah orang tidak berhasil menganalisa atau memahami satu kejadian di sebalik kejadian yang ada didepan mata.

Dalam hal ini, 'peluru' *ngeutlogi* yang ditawarkan adalah tiga yaitu jen[der], syari'ah Islam, dan Qanun Aswaja. Peluru ini kemudian menyebabkan kelompok jen[der] gerah dan menganggap bahwa kebangkitan kelompok santri ini sebagai ancaman yang cukup serius, sehingga mereka harus mencari 'amunisi' ke manapun untuk menghadapi 'peluru' dari kelompok dayah. Dalam perspektif *ngeutlogi*, ini adalah satu proses pembodohan atas nama 'peluru' dan 'amunisi' sehingga masing-masing orang Aceh saling curiga dan sulit hidup berdampingan. Istilah yang paling keren adalah penghancuran struktur masyarakat secara apik dan telegrafik. Akibatnya, mereka yang berada di belakang 'peluru' dan 'amunisi' duduk manis melihat bagaimana orang Aceh saling cakar-cakaran. Sehingga istilah yang tepat untuk mengambarkan kejadian ini adalah orang Aceh sudah diarahkan kembali pada perspektif *ngeutlogi.*

Sementara itu, *tengeutlogi* adalah satu ilmu yang ingin menjelaskan keterlenaan atau ketiduran yang sengaja dibuat dan dibuai untuk mengabaikan satu isu yang dimainkan. Dalam bahasa yang sederhana adalah *teungeutlogi* ingin mengupas dan menjelaskan bahwa untuk mengubah atau mengacak satu tradisi, maka buaian dan terlena adalah cara yang paling mujarab. Buaian ini bisa termasuk diberikan sesuatu harapan atau impian bagi satu keinginan dari mereka yang ingin menjalankan aksi *ngeutlogi*. Dalam kejadian tanggal 27 Januari sangat menarik dikupas, sebab semua pihak seakan-akan bangun dari *teungeutlogi*, namun mereka tidak bangun memikirkan aksi apa yang bisa dilakukan, namun lebih pada aksi apa yang harus diabaikan. Dalam perspektif *teungeutlogi*, fenomena sama dengan orang dikejutkan dari buaan mereka oleh satu kekuatan yang cukup menyentak.

Kelompok jen[der] misalnya, akan mencari segala cara untuk mengisi 'amunisi' berupa duit dan program untuk menghantam kelompok santri. Sementara mereka kembali ke gunung untuk mengaji dan menanti apa yang akan terjadi terhadap respon mereka. Dalam hal ini, kelompok jen[der] tentu saja tidak akan menargetkan siapa yang membuat *teungeutlogi*. Yang terpikirkan adalah bagaimana melihat ini sebagai musuh dan harus dibinasakan dalam hitungan '*one dollar one vote*.' Artinya, setiap 'amunisi' yang dihabiskan harus membenamkan atau melakukan proses *ngeutlogi* terhadap sasaran mereka. Karena itu, keterpancingan mereka dan diamnya PEMDA Aceh dalam hal ini harus dilihat dalam perspektif untuk melakukan *teungeutlogi*. Dalam bahasa yang lugas, masing-masing pihak yang menjadi sasaran santri tidak akan tinggal diam, namun mereka 'berdiam' untuk melihat siapa yang berada dibalik aksi pengiriman 'peluru' pada tanggal 27 Januari yang lalu.

Oleh sebab itu, pembaca bisa menganalisa isu ini dengan melakukan dua hal utama yaitu mengacak dan mengajak isu ini agar ditempatkan dalam perspektif *ngeutlogi* dan *teungeutlogi*. Untuk mendapatkan atau melengkapi dua ilmu ini, maka sangat perlu memahami *peungeutlogi* yaitu satu ilmu khusus dalam menipu atas nama kebenaran. Bahasa yang sering saya gunakan adalah tersesat di jalan yang benar. Dalam tradisi *pengeutlogi* sesuatu hal atau isu dipandang cukup benar dan tidak bisa diganggu gugat, walaupun kadang kala, pada penerapannya malah menciptakan situasi *peungeutlogi* yang berlapis-lapis. Karena itu, penipuan atau penyesatan atas nama kebenaran yang dibalut dengan ideologi adalah satu cara yang terjadi di Aceh selama ini, khususnya ketika 'peluru' dan 'amunisi' bertambah, seiring dengan banyaknya orang yang menjadi korban penipuan atas nama kebenaran.

Banyak orang atau siapapun yang memperjuangkan satu isu itu tujuannya adalah untuk menegakkan kebenaran. Mereka bersusah payah untuk merencanakan agenda yang apik dan super perhitungan untuk membuat satu kesadaran baru dalam masyarakat. Namun, kadang kala ujungnya mereka abaikan sehingga terjebak dalam *ngeut ujong*. Mereka dibodohi pada ujung satu agenda, sehingga kadang kala, habis energi untuk memperjuangkannya, namun hasil dari perjuangan ini dinikmati oleh mereka yang mengisi dan mengolah isu agar diperjuangkan oleh siapapun, termasuk kelompok dayah dan aktivis jen[der]. Karena proses *ngeut ujong* inilah kadang sikap dan sifat dalam memperjuangkan isu atau ideologi menjadi tertutup dan sangat eksklusif. Padahal, jika semua isu ini diangkat menjadi ilmu di mana dia bebas nilai dan terbukan, maka mereka tidak akan terjebak ada *ngeut ujong* atau *ngeutlogi*.

Inilah sebenarnya langkah awal supaya kita bisa memahami setiap ada kejadian baru di Aceh. Sebab, apapun kejadian ataupun actor, asal 'peluru' dan 'amunisi' selalu sama. Karena itu, tidak mengejutkan jika kelompok yang terjebak dalam *ngeutlogi* ini semakin hari semakin sedikit, karena mereka yang bertahan adalah mereka yang sudah memiliki sangat banyak 'peluru' dan 'amunisi.'

Akhirnya, anggaplah paparan di atas sebagai satu catatan pembuka melihat bagaimana proses penghancuran struktur masyarakat Aceh. Dalam bahasa yang lebih tegas dan lugas, era sekarang adalah masa di mana masyarakat Aceh selalu menjadi objek adu domba oleh kepentingan sesaat mereka yang memiliki agenda 'tersesat di jalan yang benar.' Mudah-mudahan, tulisan ini menjadi semacam cermin untuk berkaca di hadapan lautan teks sosial yang tengah terjadi di Aceh.

* * *

Masyarakat Aceh saat ini sedang mengalami proses sakit sosial yang amat parah. Sakit sosial ini tentu saja bukan diobati dengan obat yang bisa sembuh dalam satu atau dua minggu. Sakit sosial ini disebabkan karena dua hal yaitu adanya proses demoralisasi dan destabilitasi. Demoralisasi ini adalah proses mencabut aspek dan nilai-nilai dalam masyarakat, yang dilakukan secara tanpa sadar selama beberapa tahun terakhir. Tentu saja proses ini telah berhasil mengikis fondasi kehidupan rakyat Aceh.

Pertama yang dikikis adalah nilai-nilai adat istiadat, dari yang bersifat hakikat ke simbolik semata. Makna dan substansi nilai-nilai digantikan secara sistematis melalui proses internalisasi nilai-nilai budaya yang sesungguhnya dibenci oleh rakyat Aceh itu sendiri. Sekarang kita membela sesuatu yang kita tidak sukai, tetapi kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Proses internalisasi budaya dari luar melalui non-adat istiadat adalah bentuk ketidakramahan dalam berpikir sebagai orang Aceh.

Mengamalkan apa yang tidak sukai merupakan suatu kewajiban dalam membina peradaban Aceh saat ini. Apa yang disukai baik oleh pikiran dan perasaan menjadi sesuatu yang amat mahal sekali diamalkan. Hal tersebut boleh jadi tidak ada lagi standar moral ketika proses demoralisasi terjadi dalam masyarakat. Tingkat pengetahuan masyarakat, bukan lagi diturunkan dari keluarga dan para 'urafa, melainkan dipaksakan untuk menilai sendiri apa yang baik dan buruk.

Akibat tidak ada standar moral, orang baik dan jahat tidak jauh berbeda air muka dan perangai kehidupannya. Terkadang orang senyum untuk menutup kejahatan, sementara tidak sedikit yang berbuat jahat dengan senyuman. Pola ini pada ujungnya mengakibatkan masyarakat hilang kontrol. Inilah kekosongan

yang diisi oleh standar moral atau perilaku yang tidak baik. Masyarakat mengukur sesuatu bukan karena pengetahuan, tetapi apa yang menjadi penerimaan dari standar moral dari luar nilai-nilai kehidupannya.

Ketika proses demoralisasi dan tidak ada standar ideologi, maka ideologi lain akan masuk ke dalam pikiran masyarakat. Karena mereka tidak cukup pengetahuan untuk memahami fenomena sosial, propaganda atau gagasan untuk menukar ideologi terjadi secara sistematik. Ketika perubahan ini terjadi, maka masyarakat menjadi gamang. Ini sama dengan perilaku habis azan magrib di TV swasta nasional, lalu muncul iklan dan acara yang tidak mengajak orang untuk shalat. Artinya, orang membaca doa, tetapi mata harus menikmati apa yang dibenci oleh doa itu sendiri.

Adapun kedua yang terjadi adalah proses destabilitasi yaitu mencari sekuat tenaga untuk menciptakan proses ketidakamanan di Aceh. Proses ini sesungguhnya sedang dilakukan melalui adu domba. Dulu musuh bersama rakyat Aceh, ketika dipropagandakan oleh GAM adalah Jawa. Saat itu, ketika sudah tidak ada musuh bersama, maka proses destabilitasi dilakukan dengan saling adu kekuatan di antara sesama orang Aceh sendiri.

Saat tidak ada musuh bersama, maka siapapun yang paling dekat ketika berjuang boleh jadi saat ini menjadi musuh yang paling berbahaya. Proses ini sebenarnya sangat wajar, di mana beberapa negara pernah mengalaminya. Ini dikarenakan, pemerintah tidak mementingkan teori dan pandangan ilmuwan dalam merekayasa mesin sosial atau fenomena sosial. Sehingga ayunan pemerintah selalu bergoyang dan seolah harus bermusuhan antara satu sama lain. Kalau tidak berdebat dan saling menjegal adalah sesuatu tidak begitu indah dipandang mata. Dengan kata lain, pemerintah gagal dalam menciptakan sebuah rekayasa sosial masyarakat Aceh yang bertamaddun.

Sekarang, kedua proses ini sebenarnya sudah muncul dalam ilmu propaganda, ketika ingin mengubah satu struktur masyarakat untuk menuju kehancuran secara sistemik. Dulu, rakyat Aceh menelan mentah-mentah propaganda anti-Jawa, anti-Indonesia, dan anti-Jakarta, sehingga rakyat kecil dan besar rela korban perasaan dan angkat senjata untuk mengusir Jawa dari Aceh. Setelah damai, propaganda tersebut hilang, muncul propaganda lain yang ternyata lebih parah dari anti-Jawa. Yaitu meluluh lantakkan struktur dan fondasi kehidupan rakyat secara sistematis. Agama diformalkan, tetapi budaya beragama dihilangkan. Lembaga adat ditumbuhkan, tetapi pengetahuan tentang manfaat beradat diabaikan, mulai dari sekolah hingga ke perguruan tinggi.

Alhasil, ujung dari proses ini adalah menciptakan ketidakstablisan atau ketidakamanan di Aceh. Proses normalisasi melalui MOU dipandang tidak begitu indah, karenanya perlu usaha untuk menciptakan krisis. Uniknya, krisis yang muncul adalah berasal dari orang Aceh sendiri. Sehingga fenomena bahasa kekerasan menjadi potret kehidupan baru rakyat Aceh. Marah tidak dikasih proyek, marah ketika disentil dalam ceramah agama, legislatif dan eksekutif saling jegal menjegal, dan marah ketika tidak bisa memarahi orang lain merupakan suatu budaya baru dalam bahasa kekerasan di Aceh. Kalau tidak marah seolah-olah hilang jatidiri keacehannya.

Akibatnya, pola tasamuh dan *meusyedara* sudah tidak begitu penting dalam masyarakat. Karena tidak ada konsep untuk merekayasa sebuah masyarakat yang bertamaddun dan bermartabat, rakyat kemudian menciptakan sendiri budaya-budaya untuk hanya menguntungkan diri sendiri. Paradigma negatif tersebut sebenarnya sudah terjadi dalam sepuluh tahun terakhir, karena pemerintah Aceh tidak memiliki konsep secara subtantif. Konsep yang dimaksud adalah mengembangkan daya pikir untuk kemajuan, tidak hanya pada pembangunan saja, tetapi juga tingkat kecerdasan dan kemampuan rakyat dalam mempertahankan proses demoralisasi di atas.

Untuk sekadar perbandingan, proses pembangunan kecerdasan rakyat dilakukan melalui budaya-budaya yang diproduksi oleh para endatu. Karena budaya tersebut tidak diarahkan untuk menghancurkan sendi kehidupan rakyat, maka ketika unsur-unsur budaya ini dibawa sebagai alat perjuangan, yang terjadi adalah keinginan untuk mengamankan diri sendiri, bukan demi kaum atau masyarakat Aceh secara keseluruhan. Di Aceh, ilmuwan dan ulama sangat banyak sekali, namun mereka belum dianggap penting untuk memproduksi pemikiran demi keacehan.

Dalam sejarah gerakan sosial, tokoh-tokoh ilmuwan yang menggerakkan mesin atau rekayasa sosial adalah mereka yang merasakan kaum atau etniknya tertindas. Pertanyaannya adalah apakah saat ini Aceh sedang tertindas? Kalau iya, siapa yang paling betanggungjawab dalam wujud ketertindasan tersebut? Jawabannya adalah rakyat Aceh sudah lama tertindas, namun abai dalam menciptakan mimpi untuk masa depan. Sehingga mimpi yang ada hanya untuk mengamankan diri dan keluarga, tanpa memikirkan kaum atau etnik Aceh secara keseluruhan.

Akhirnya kita hanya berupaya mencari penyebab kecil dari kesakitan sosial yang dialami oleh rakyat Aceh. Tentu saja sakit sosial obatnya bukanlah minum pil, melainkan memikirkan penyebab dan jalan keluar dari kemelut ini. Jalan keluar bukanlah selalu menadah tangan pada asing atau Jakarta, jika sudah

tidak sanggup berdamai secara internal, tetapi mencari energi dan spirit positif untuk mengatakan, bahwa kita sebagai sebuah etnik dan bangsa, harus mampu menyelesaikan masalah sendiri, dengan mengedepankan kepentingan warisan endatu, ketimbang ambisi pribadi untuk jangka pendek. ☙

BAB 25

Ada Apa dengan Aktivis Aceh?

PADA tahun 1997-1999 adalah tahun-tahun di mana lahirnya generasi reformis di Indonesia. Saat itu, tidak sedikit mahasiswa yang menjadi penggerak lokomotif demokrasi di Indonesia. Mereka begitu diagung-agungkan oleh rakyat jelata. Kemanapun, jika seorang anak muda mengaku mahasiswa, maka mereka pun menjadi begitu dihormati. Jika ada masalah, tidak sedikit mereka yang mengatakan: *saya mahasiswa lo Pak!* atau *apa perlu saya kerahkan kawan-kawan saya untuk demontrasi di kantor Bapak?*

Mereka begitu ditakuti dan disegani, sehingga mereka betul-betul menjadi agen perubahan di Indonesia saat itu. Bahkan ketika menjadi mahasiswa, tidak lengkap jika belum mengaku menjadi aktivis. Ciri-ciri aktivis saat itu adalah mereka jarang masuk kuliah, kerjaannya demo melulu, selalu berpakaian ala kadarnya, perokok dan minum kopi, dan selalu membantah apa yang didengarnya. Semuanya berujung pada *teologi pembebasan* yaitu sebuah pemahaman yang menginginkan kebebasan yang membebaskan. Di Aceh pun, aktivis selalu menjadi incaran mahasiswa baru. Biasanya mereka sudah berani protes apa saja menjelang semester 3-4, di mana mereka sudah dilatih oleh kakak mahasiswa untuk melakukan perlawanan terhadap apa saja.

Namun setelah kuliah, biasanya aktivis ini pun mulai sibuk lirik sana sini untuk mencari sesuap nasi. Ada misalnya, aktivis yang kreatif di mana dia membuka LSM atau NGO untuk terus berjuang demi kepentingan rakyat. Proposal pun

diproduksi sebanyak mungkin. Rumah atau kamar kos-kosan pun disulap jadi kantor. Mereka sibuk membuat dan mencari *fundings* untuk mendanai program mereka. Di samping itu, ada juga aktivis yang menjadi asisten seorang penjabat public. Kehidupan dia mutlak bergantung pada seorang tokoh. Kalau dulu semasa menjadi mahasiswa, dia begitu anti pada tokoh tersebut, maka setelah pensiun jadi mahasiswa, dia pun harus menjadi pembela setia tokoh public tersebut. Sementara itu, ada pula aktivis yang dijadikan sebagai agen intelejen atau mata-mata, di mana tugasnya hanya menjadi provokator. Dia keluar masuk penjara dan selalu bisa terbang kemana saja. Kehidupan dia tidak lebih kurang seperti mafia. Aktivis model ini kadang menjadi orang yang paling depan saat demontrasi. Mereka kadang melakukan provokasi untuk menciptakan kekisruhan dan kekacauan. Intinya, dari dunia kekacauan (*chaos*) inilah dia bisa hidup.

Di Aceh, dunia aktivis memang agak berbeda dengan dunia aktivis di Pulau Jawa. Di Aceh, aktivis yang hidup menjadi pembela rakyat pada era 1997-1999 banyak menjadi kelompok yang sangat dicari oleh aparat. Kehidupan mereka keluar masuk kota, menyamar, lantas lari ke luar negeri. Mereka menjadi pejuang HAM di luar negeri. Mereka disekolahkan dan diangkat derajatnya melalui pendapatan atas nama HAM. Yang tidak bisa keluar negeri, mereka kadang keluar masuk hutan untuk bersembunyi dari kejaran aparat keamanan. Namun tidak sedikit juga aktivis yang dekat dengan aparat keamanan. Mereka didanai oleh kesatuan tertentu lalu dihidupkan sebagai kekuatan ketiga yang seolah-olah membela rakyat.

Era 1999-2003, adalah era di mana aktivis Aceh bergerilya di dalam dan luar negeri. Mereka kadang harus menginap di penjara untuk beberapa lama. Ada juga yang lari ke luar negeri karena dijadikan *the most wanted man*. Ada juga yang sekolah, supaya ada pekerjaan di kemudian hari. Artinya, mereka ingin menjadi aktivis yang model baru yaitu bisa ber cas cis cus dalam bahasa asing. Era ini, mereka tidak banyak yang berkeliaran di wilayah public. Saat itu, agak takut untuk mengakui diri mereka sebagai aktivis. Bagi yang mahasiswa, era ini adalah era di mana mereka agak sedikit bungkam, karena yang berkuasa saat itu adalah Pe-De-eM-De. Namun harus diakui, tidak sedikit aktivis Aceh yang menjadi syuhada atas nama perjuangan mereka. Mereka kadang ditembak, dibunuh, dan dihilangkan, tanpa satu proses hukum atas nama mencari kebenaran. Darah mereka seolah menjadi tinta merah untuk menulis sejarah rakyat Aceh. Mereka kadang disebut sebagai pahlawan HAM.

Masuk era 2004 sampai sekarang, maka inilah masa panen bagi aktivis dan yang pura-pura jadi aktivis. Masa inilah mereka banyak yang pulang untuk kembali berkiprah, yang tentu saja, bukan sebagai aktivis. Mereka menjadi pekerja sosial

atas nama membangun Aceh. Mereka menjadi pekerja bukan lagi pemikir. Kalau dulu aktivis tidak pernah menggantung kartu nama di leher mereka, sekarang mereka bahkan bangga dengan jabatan yang didapatkan. Bagi mereka yang bisa bahasa asing, maka pekerja yang asing pula menjadi hal yang tidak begitu asing lagi. Bagi mereka yang begitu tajam dan kejam dalam segi ideologi, diberikan jabatan dan posisi serta gaji yang amat tinggi. Intinya aktivis diciptakan menjadi kelompok borjouis. Mereka menjadi generasi baru orang kaya baru. Kalau dulu semasa aktivis, satu gelas kopi, bisa dinikmati oleh sekian orang, maka sekarang untuk menikmati kopi, maka harus ke warung tertentu. Kalau dulu, untuk makan, bisa dinikmati secara ramai-ramai, maka sekarang, untuk makan siang pun, daftar restoran terkenal sudah dalam saku baju dan memori *hand phone*.

Perubahan drastik inilah yang kemudian membuat Aceh menjadi daerah mandul dari segi pemikiran. Mereka dulu yang jarang pegang uang puluhan juta, sekarang malah bisa dihabiskan dalam satu hari. Mereka dulu yang naik bis ke pulau Jawa, sekarang sudah rajin ke sana kemari dengan pesawat. Jika dulu mereka kemana-mana naik bus kota atau *robur*, maka sekarang sudah terbiasa dengan mobil mewah yang ber-AC. Mereka begitu sulit untuk dijumpai atau dikenali sebagai aktivis.

Yang menarik adalah aktivis menjadi kelompok yang hidup pada era industri atau post industri, kendati latarbelakang mereka adalah kelompok masyarakat agraris. Mereka memiliki gaya hidup post modernis dan sikap dan perilakunya seperti orang fatalis. Mereka kosong secara ideologi, dalam arti, agenda perubahan yang mereka perjuangkan pada era sebelumnya hanya sebagai satu loncatan untuk menaikkan karir mereka. Gaya hidup aktivis model ini memang hanya dapat ditemukan di Aceh sepertinya. Gambaran aktivis yang banyak ditemukan adalah hidup sederhana, punya ide luar biasa, dan tetap mempertahankan idealisme.

Sekarang jika dilihat dari segi angka, mereka dulu yang menjadi orang yang paling dicari, sekarang menjadi orang yang paling sulit ditemui. Dulu, jika nama disebutkan, maka orang langsung dapat membayangkan kapan dan di mana terakhir dia menjadi orator ulung. Sekarang, jika nama dia disebutkan, orang langsung dapat membayangkan berapa penghasilannya dalam satu bulan.

Inilah potret baru dunia aktivis Aceh. Sehingga tidak mengherankan, kegamangan dan kebingunan sedang melanda orang Aceh. Kelompok yang menjadi motor penggerak pada arah perubahan telah menjadi orang yang menikmati hasil dari sebuah perubahan.

Sepertinya dunia aktivis sekarang memang harus ditutup dengan uang. Inilah sebenarnya jawaban mengapa aktivis sekarang tidak begitu diharapkan oleh masyarakat. Mereka ternyata lebih akrab dengan uang, ketimbang dengan rakyat. Uang sudah menjadi semacam 'Tuhan' baru bagi aktivis. Kesederhanaan ternyata tidak lagi menjadi cermin seorang aktivis. Mereka sudah dibuat seolah-olah untuk mengukur suatu kesuksesan hanya dapat dicapai dengan uang. Karena itu, gejala ini pun merambat tidak hanya pada kelompok activis, namun juga pada kelompok intelektual Aceh. Sehingga dunia pendidikan pun menjadi mandul, karena 'Tuhan' baru yang bernama uang.

Harus diakui, dunia aktivis dan intelektual adalah ibarat dua mata koin yang tidak dapat dipisahkan. Orang menjadi aktivis biasanya karena ingin memperjuangkan satu konsep yang dipercayainya akan membawa perubahan. Seorang aktivis ingin memperjuangkan demokrasi, karena dia yakin bawah konsep ini mampu membawa perubahan yang baik. Seorang intelektual pun demikian, dia akan menulis satu ide yang dia yakini bisa memberikan pencerahan bagi pembacanya.

Dalam ingatan saya, pada era reformasi, khususnya di pulau Jawa, langgam dan gerak aktivis memang selalu seirama dengan kelompok intellectual. Ide-ide cerdas yang diperjuangkan oleh aktivis kadang dipaparkan oleh seorang intelektual. Mereka diundang dalam diskusi bawah tanah, demi untuk mengetahui sebuah konsep yang akan diperjuangkan. Demikian pula, seorang intelektual, kadang merasa terhormat jika dia diundang dalam sebuah pelatihan yang diadakan oleh kelompok aktivis. Karena itu, aktivis dan intelektual tidak bisa dipisahkan begitu saja.

Kadang pula, ada intelektual yang bergelar aktivis dan sebaliknya, seorang aktivis yang memakai cara-cara intelektual dalam membenamkan ide-idenya. Era 1980-an dan 1990-an, cita-cita sehat seorang aktivis adalah bisa menulis di sebuah koran nasional. Dari honor menulis, dia mengundang kawan-kawan makan di pinggir jalan. Saat itu, aktivis mendapatkan pacar yang cantik, karena ketenaran dari publikasi di media nasional. Sekarang sebaliknya, pasangan seorang aktivis generasi baru, banyak ditentukan setinggi mana posisi dia dalam sebuah lembaga tempat dia bekerja.

Dari sini, jika dilebarkan lagi, maka mundurnya peradaban sosial Aceh saat ini, banyak dipicu oleh hilangnya kelompok aktivis yang memiliki ideologi pembebasan. Mereka tidak lagi memperjuangkan rakyat kecil. Dengan kata lain, mereka sudah menjadi kelompok yang alergi dengan kepentingan publik. Karena itu, wajar jika ada aktivis yang mendapatkan gaji puluhan juta, mendapatkan

respon negatif dari rakyat. Sebab aktivis adalah milik rakyat dan rakyatlah yang memberikan penghargaan kepada mereka, bukan jabatan dan uang.

Materi memang diperlukan dalam sebuah roda kehidupan. Namun jika materi ini membuat orang lupa pada apa yang dipercayainya dan diyakininya hilang, maka dia sudah 'menuhankan' materi tersebut. Gaji yang besar dan rumah yang mewah adalah satu hal yang lumrah bagi siapa saja. Namun karena dua ini, kita telah alpa pada ide-ide yang kita perjuangkan, maka sesungguhnya aktivis itu telah mati suri. Sebab tidak sedikit aktivis menemui ajal mereka karena memperjuangkan sebuah ide yang dia percayainya akan membawa perubahan yang bajik pada rakyatnya.

Dalam tradisi perjuangan bangsa Aceh, pengkhianat banyak lahir karena mereka sudah menjadi kaki tangan musuh. Mereka sudah diberikan fasilitas oleh kolonialis. Mereka juga sudah mendapatkan jaminan dari penjajah. Karena itu, tidak sedikit pahlawan Aceh menemui ajal mereka, karena ulah pengkhianat ini. Tentu saja saya tidak ingi membandingkan aktivis Aceh saat ini dengan pengkhianat bangsa Aceh. Sebab konteks sosial dan sejarah yang sangat jauh berbeda. Begitu juga, begitu naïf jika dikatakan sekarang aktivis Aceh yang menjadi kelompok borju ini sebagai pengkhianat. Apa yang boleh dikatakan adalah sulit sekali menarik aktivis ini kembali pada barak mereka. Begitu juga, agak mustahil untuk mengajak mereka untuk memikirkan pembangunan Aceh dari luar spectrum uang dan kekuasaan.

Bagaimanapun, jika seorang sudah mendapatkan uang dan kekuasaan, maka jangan berharap banyak pada idealisme dia. Kalau dulu dia menjadi orang terdepan dalam melawan korupsi, sekarang malah orang yang paling terbelakangan dalam menghilangkan korupsi. Jika dulu mereka meneriakkan untuk kepentingan rakyat, maka sekarang berubah, jika sudah mendapatkan dan memenuhi kepentingan pribadi. Keterkejutan saya ini memang bukan hanya monopoli saya agaknya, namun kekesalan kita pada aktivis yang sudah menjadi kelompok borjouis cukup beralasan.

Keterkejutan saya memang cukup menyesakkan dada, namun bukan berarti ini menjadi justifikasi bahwa aktivis telah mati di Aceh. Mereka masih hidup di lorong-lorong atau warung-warung kopi. Namun suara mereka sudah tersumbat oleh pendapatan mereka sendiri. Padahal ada beberapa agenda penting bagi aktivis dalam membenahi Aceh saat ini.

Pertama, aktivis yang dulu menjadi motor penggerakan perubahan sosial, harus memikirkan apakah rakyat Aceh sekarang menuju perubahan yang positif atau negative. Jika ke arah positif, apakah aktivis bisa meyakinkan diri mereka dan rakyat Aceh, bahwa perubahan ini akan menguntungkan Aceh. Jika perubahan

ini ke arah yang negatif, sampai di mana rakyat Aceh harus berpartisipasi. Sampai di mana mereka harus memilih seorang pemimpin yang yakini akan membawa perubahan yang baik. Aktivis harus memberikan jawaban terhadap kegelisahan rakyat Aceh.

Kedua, aktivis Aceh harus berhenti menjadi motor penggerak penikmat *dana takziah Aceh* saat ini. Idealitas dan realitas adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tuntutan kehidupan semakin tinggi, seiring dengan naiknya angka pendapatan. Jika dulu dengan uang Rp. 800.000 bisa hidup dalam satu bulan, maka sekarang 8 juta sudah dirasakan agak kurang sekali. Jika dulu naik labi-labi adalah hal yang wajar, maka sekarang menjadi hal yang cukup *taboo*. Jika dulu memakai H/P yang mereknya 'kacangan' maka sekarang salah satu bukti pendapatan besar adalah dilihat dari H/P yang digunakan. Jadi sebenarnya perubahan yang cukup mendasar pada dunia aktivis adalah karena mereka menjadi kelompok penikmat *dana takziah Aceh* selama ini. Mereka ikut dalam membuat proposal untuk menipu rakyat nya sendiri. Mereka ikut dalam memanipulasi data-data korban untuk kepentingan pribadi mereka.

Ketiga, sudah perlu dipikirkan bahwa aktivis dan intelektual itu bukan kontraktor. Kita ambil contoh yang mungkin tidak kita temukan di Aceh saat ini di mana seorang pekerja di Lembaga Rehab dan Rekon, dia seorang dosen di perguruan tinggi terkemuka di Aceh. Karena dia sudah bekerja di lembaga Rehab dan Rekon, dia tahu betul di mana pos uang yang paling banyak dan cara mendapatkannya. Lalu dia pun membuat LSM atau NGO untuk mendapatkan akses ke dana tersebut. Pada satu sisi, dia sudah mendapatkan gaji sebagai dosen dengan amanah untuk mengajar mahasiswa. Dia juga mendapatkan gaji dari Lembaga Rehab dan Rekon sebagai upah pekerja, dia juga mendapatkan dana milyaran rupiah dari Lembaga Rehab dan Rekon atas nama NGO yang dia pegang. Fenomena ini memang sudah menjadi rahasia umum di Aceh saat ini, kendati belum banyak dibicarakan. Aktivis sudah beralih profesi menjadi kontraktor. Mereka tidak lagi malu atau segan dalam mencari pendapatan lebih. Al-hasil perilaku dan gaya hidup mereka persis seperti kontraktor.

Keempat, sejatinya aktivis ini menjadi orang yang mengubah dan bukan yang menikmati perubahan di Aceh. Harus diakui bahwa perubahan Aceh pasca-Tsunami telah menaikkan pundi-pundi tabungan para aktivis. Mereka sudah tidak lagi memikirkan apakah Aceh saat ini menuju ke arah 'yang baik', 'pura-pura diperbaiki,"diperbaiki secara pura-pura ,' atau 'pura-pura baik'. Mereka bahkan menjadi bagian dari 'yang baik', 'pura-pura diperbaiki', 'diperbaiki secara pura-pura,' dan 'pura-pura baik.' Paling tidak, jika kita menohok ini, maka sudah pasti

kita dituduh cemburu atau karena belum mendapatkan gilirannya. Tuduhan ini memang betul, sebab semua ini hanya persoalan giliran saja. Namun jika kita tidak memberikan contoh yang tidak baik pada giliran kita, maka sedikit banyak, orang yang mendapatkan giliran berikut tidak akan menjadikan kita sebagai 'catatan kaki' bobroknya Sumber Daya Manusia Aceh.

Akhirnya, paparan singkat ini bukan ingin mengatakan bahwa aktivis itu harus pensiun dini. Sebab salah satu profesi yang paling cepat pensiunan di dunia adalah adalah pramugari pesawat terbang. Kita tentu saja tidak ingin membandingkan aktivis Aceh ini dengan pramugrari pesawat. Mereka (pramugari) mendapatkan gaji jutaan rupiah dan segenap fasilitas kecantikkan lainnya, namun hanya untuk beberapa tahun saja. Setelah itu, mereka boleh jadi pensiun atau beralih profesi lainnya. Kita juga berharap agar aktivis ini tidak menjadi pramugari yang hanya bekerja sekejap dan mendapatkan fasilitas, lalu pensiun dini. Kita berharap aktivis tetap aktivis sampai mereka mati sekalipun. Dalam arti, janganlan kita menjadi orang yang didoakan mati sebelum mati. Jadilah orang yang didoakan setelah mati. Sebab aktivis adalah orang yang berani mati karena memperjuangkan kepentingan rakyat yang akan mendoakannya setelah mati. ☙

BAB 26

Ketika SIRA menjadi PARTAI SIRA

DALAM ingatan saya, SIRA adalah sebuah organisasi yang diawali oleh pertemuan mahasiswa Aceh pada awal tahun 1999. Saat itu, Gedung Sosial atau Gedung Tgk. Chik Di Tiro gemuruh dengan semangat mahasiswa yang ingin mengakhiri konflik di Aceh dengan pola referendum. Saat itu, saya sempat 'diculik' oleh beberapa mahasiswa untuk memberikan pandangan, bagaimana sebaiknya mahasiswa bergerak untuk mengakhiri konflik di Aceh. Dalam pembicraan ini, tidak ada diskusi untuk berkiprah secara langsung dalam politik, apalagi melibatkan diri dalam pemerintahan. Yang ada adalah bagaimana memberdayakan rakyat supaya mereka sadar akan nasib diri mereka melalui perjuangan politik dan demokrasi.

Semangat yang dijunjung saat itu, maklum untuk seukuran mahasiswa, adalah bagaimana mengakhiri konflik Aceh, yang boleh jadi, salah satu caranya adalah referendum. Wacana referendum kemudian bergema di Banda Aceh di mana 2 juta rakyat Aceh berkumpul, namun tidak ada setetes pun darah yang mengalir saat itu. Rakyat datang ke Banda Aceh untuk mendengar, bagaimana suara mahasiswa Aceh untuk konflik Aceh. Namun, saat pertemuan kedua diadakan, begitu banyak darah yang berceceran di sepanjang jalan menuju Banda Aceh. Dari sini, mengindikasikan bahwa SIRA memang bisa menjadi lokomotif suara rakyat Aceh. Dan, rakyat Aceh telah berkorban demi SIRA saat itu.

Pertanyaannya adalah apakah SIRA ini masih menjadi bagian dari gerakan mahasiswa atau sudah menjadi semacam kendaraan politik bagi sebagian mantan mahasiswa. Di samping itu, apakah sudah terjadi proses regenerasi SIRA atau kaderisasi SIRA, sehingga mandat suara mahasiswa atau Pelajar Aceh pada tahun 1999, masih bergema. Dalam perjalanannya, SIRA seperti sudah berubah menjadi semacam kendaraan politik, di mana munculnya rezim baru untuk tampil ke depan dalam pemerintahan Aceh.

Jaringan dan jalinan mantan mahasiswa yang terlibat pada tahun 1999, seperti tidak lagi, mengedepankan, nilai-nilai perjuangan yang dimiliki oleh mahasiswa. Kisruh dan adu mulut serta saling jotos, adalah warna yang sudah melekat dalam beberapa musyawarah di Aceh. Bahkan fenomena ini juga terjadi di propinsi lain di Indonesia. Namun apakah makna adu mulut ini bagi rakyat? Apakah makna kisruh ini bagi pengembangan demokratisasi rakyat Aceh saat ini.

Ini seperti yang sudah membelok dari mandat utama SIRA saat ini. Fenomena terpilihnya Muhammad Nazar, yang alumni IAIN (Fakultas Adab) dan bukan jurusan ilmu sosial politik, adalah faktar sejarah pertama kepemimpinan di Aceh, di mana seorang aktivis IAIN bisa menjadi seorang pemimpin di Aceh. Terpilihnya Nazar sebagai Wakil Gubernur, juga menyiratkan bahwa rakyat masih menitip amanah mereka disaku SIRA. Namun melihat gejala yang dimainkan oleh SIRA saat ini, seperti ada beberapa hal yang sudah dilupakan yaitu misalnya, apakah SIRA masih menjadi lokomotif suara rakyat atau sekadar kendaraan politik untuk mencapai kekuasaan sesaat.

Di sinilah peran kaderisasi dan kematangan dalam berpolitik semakin menunjukkan taringnya. Di mana, SIRA ternyata bisa berubah sesuai dengan bandul politik di Aceh saat ini. Bagaimanapun posisi Nazar sebagai Wakil Gubernur, menjadi asset penting bagi SIRA untuk memunculkan tokoh-tokoh lain dari SIRA yang layak jual kepada rakyat Aceh. Dengan kata lain, SIRA kali ini bukanlah SIRA yang lahir pada tahun 1999. Mereka sudah berevolusi melalui mendekatnya diri mereka dengan poros kekuasaan. Di Aceh, sumbu kekuasaan selalu terselip bau penyimpangan atau kesewenang-wenangan. Dalam hal ini, kita mungkin tidak akan memberikan rapor merah kepada SIRA, jika mereka ingin berubah menjadi partai politik. Pertanyaannya adalah apakah perubahan SIRA ini sudah sesuai dengan amanah dan gelora semangat mahasiswa pada tahun 1999?

Ini agaknya yang perlu dijawab oleh SIRA, seiring dengan keinginan mereka, menjadi kelompok elit di Aceh saat ini. Dalam tradisi berpolitik di manapun di dunia ini, setiap tokoh yang naik pada satu jabatan, maka otomatis, seluruh 'pasukan' di belakangnya akan naik juga, walaupun hanya menikmati uang proyek atau terlibat

dalam tender di sana sini, apakah itu naik jabatan atau naik penghasilan. Dalam hal ini, perlu dipikirkan oleh SIRA, ke arah mana agenda politik ingin dimainkan di Aceh. Di Indonesia tradisi aji mumpung atau azas manfaat sudah begitu banyak menghiasi sejarah korupsi di Indonesia. Tidak sedikit daripada tokoh dari satu organisasi harus membelokkan uang rakyat demi kepentingan organisasi yang membesar dirinya menjadi 'orang penting.'

Sebab, dalam konteks sejarah politik Aceh, hanya SIRA-lah yang berhasil menjadi organisasi penting di Aceh, yaitu mulai dari diskusi kecil-kecil di seluruh Nusantaran hingga mengkristal dalam bentuk kekuasaan pada tahun 2006. Harus diakui, KMPAN Serantau adalah diisi oleh mahasiswa dari seluruh penjuran tanah air dan luar negeri, di mana mereka 'berjuang' atas nama demokrasi untuk mengakhiri konflik di Aceh. Jadi, penting dilihat bagaimana konteks sejarah kelahiran SIRA dengan aktivitas anggota SIRA saat ini di Aceh. Apakah perubahan SIRA menjadi partai politik mengingkari semangat mahasiswa yang bermusyawarah pada tahun 1999, atau jangan-jangan SIRA yang menjadi Partai SIRA adalah neo-SIRA yang sama sekali tidak bersentuhan dengan SIRA pada tahun 1999.

Tentu saja, kita tidak akan meminta pertanggungan jawaban Muhammad Nazar, sebagai pemimpin SIRA selama 8 tahun terakhir. Dalam hal ini, proses penonjolan tokoh menjadi elit, adalah hal yang cukup wajar di Indonesia. Di mana dalam setiap organisasi sosial politik, tokoh adalah paling berperan dalam mengait suara rakyat. Kita misalkan, jika kita bicara PKB, maka rakyat akan ingat Gus Dur. Demikian pula, jika diskusi tentang PAN, rakyat selalu terngiang dengan Amien Rais. Tetapi rakyat tidak pernah hapal betul bagaimana program partai tersebut. Dalam hal ini, agaknya SIRA lebih menuju pada situasi tersebut, ketimbang menjadi lokomotif suara rakyat. Jadi, yang perlu dipikirkan oleh eksponen SIRA adalah lebih berjuang pada kepentingan rakyat, bukan menaikkan tokoh menjadi elit.

Kalau boleh saya andaikan, saat SIRA lahir pada tahun 1999, Muhammad Nazar atau kawan-kawannya sekarang masih berusia sekitar 20 tahunan. Mereka masih menyimpan idealisme dalam pemikiran mereka sebagai mahasiswa. Di samping itu, mereka juga masih selalu bersemangat untuk mengubah Aceh dengan waktu yang sangat cepat. Dan, catatan 2 juta rakyat Aceh berkumpul di depan masjid raya Baiturrahman, adalah bukti konkrit prestasi SIRA sebagai bagian dari perjuangan mahasiswa. Dalam hal ini, apakah SIRA sebagai partai politik, bisa melakukan hal yang sama dengan cara berbeda, untuk meyakinkan rakyat bahwa partai SIRA penting bagi rakyat sekarang.

Jadi, evolusi SIRA menjadi Partai SIRA banyak meninggalkan pesan dan kesan bagi perjuangan mahasiswa di Aceh. Kesan yang dimaksud adalah apakah perubahan ini akan menciptakan sikap dan sifat eksklusifitas (ketertutupan) SIRA di depan rakyat dan mahasiswa atau perubahan ini menciptakan sikap dan sifat inklusifitas (keterbukaan). Inilah sebenarnya yang menjadi persoalan yang mendesak untuk dipecahkan oleh eksponen atau mantan-eksponen SIRA untuk menarik lagi gerbong SIRA sesuai dengan mandat pertemuan KMPAN Serantau Aceh pada tahun 1999. Dalam hal ini, bukan ingin mengatakan bahwa SIRA harus kembali mempromosikan referendum, tetapi lebih banyak menjadi 'pelindung' rakyat di depan rezim. Tetapi, jika SIRA kemudian menjadi rezim atau bagian dari rezim, maka pertanyaannya adalah apakah ini yang ingin dilakukan oleh SIRA.

Dalam tradisi politik di Aceh, kepercayaan diri satu organisasi dalam berkiprah sebagai organisasi politik, lebih banyak dipicu oleh misi dan visi serta 'amunisi' yang dikumpulkan oleh masing-masing anggota partai politik. Pertanyaannya yang mungkin diajukan adalah apakah perubahan SIRA menjadi kelompok elit ini juga akan 'mempergemuk' SIRA dalam mengumpulkan 'amunisi' untuk tampil dalam pemilu pada tahun 2009. Maksudnya adalah perlu dilihat dan dicermati bagaimana kelompok Partai ini mengumpulkan dana untuk perjuangan mereka. Dalam bahasa yang sederhana, jika kemunculan Partai SIRA ini karena banyak eksponen mereka menjadi elit di Aceh, yang juga berpengaruh pada 'amunisi' mereka, maka perubahan ini akan banyak memberikan kesengsaraan bagi rakyat Aceh sendiri. Sebab, jika dipakai asas aji mumpung dan azas manfaat, maka Partai SIRA ini tidak lebih bangkitnya kepercayaan diri para eksponen SIRA untuk lebih gagah dalam berpolitik. Di sini, asumsi yang harus dibangun, sejauh mana SIRA menjadi partai yang bersih dan tidak memakan uang atau fasilitas rakyat Aceh.

Jika hal di atas bisa dilakukan oleh SIRA, maka perubahan ini tentu membawa rahmat bagi rakyat. Dengan kata lain, perubahan SIRA menjadi Partai SIRA bukan membawa bencana baru bagi pendidikan politik rakyat Aceh. Suara rakyat yang dititipkan dalam pilkada tahun lalu, sepertinya boleh menjadi cermin bagi SIRA untuk memperjuangkan nasib rakyat Aceh. Karena itu, rakyat dan mahasiswa harus tetap memantau SIRA ini, karena apapun bentuk dan wajah SIRA sekarang, itu tidak bisa dilepascan dari perjuangan dan darah rakyat Aceh serta semangat mahasiswa di perantauan. Akhirnya, sebagai mantan mahasiswa saya ingin mengucapkan selamat kepada Partai SIRA. ☙

BAB 27

Menakar Harga Kesabaran Rakyat Aceh

MOLORNYA pengesahan RUU PA di Jakarta ternyata menarik untuk ditelaah oleh kita semua, terutama jika dikaitkan dengan "harga" kesabaran rakyat Aceh. Tulisan ini memang bukan diniatkan untuk memberikan suatu pemahaman baru bagaimana merespon keterlambatan pengesahan RUU tersebut. Tujuan utama tulisan ini adalah bagaimana mengukur atau menakar harga kesabaran warga Aceh, terutama jika dilihat dari maraknya demontrasi dan eskalasi kekerasan selama beberapa pecan terakhir ini. Harus diingat pula bahwa sebelum perjanjian Helsinki, telah beberapa kali dilakukan proses perdamaian yang acapkali gagal dan diakhiri dengan operasi keamanan.

Kali ini, kesabaran warga Aceh benar-benar akan diuji untuk kesekian kalinya, khususnya terhadap pengesahaan RUU tersebut. Namun demikian, ada yang menarik selama beberapa minggu terakhir ini yaitu naiknya eskalasi "ketidaksabaran" rakyat Aceh yang diwujudkan dengan aksi demontrasi. Tentu saja hal ini akan sangat menguntungkan bagi beberapa pihak untuk melihat sejauh mana rakyat Aceh bersabar. Paling tidak, sejak tahun 1998 hingga 2003, rakyat Aceh telah banyak melakukan aksi demontrasi yang terkadang berakhir dengan tragedi kemanusian yang kemudian diikuti oleh berbagai operasi keamanan.

Dalam konteks ini, harus juga diperhatikan bahwa para wakil rakyat yang dipilih pada tahun 2004 adalah mereka yang sangat "nasionalis" di mana terkadang menganggap bahwa upaya penyelasaian Aceh harus memakai kerangka NKRI.

Jangan lupa pula bahwa pada tahun 2003 hampir beberapa isu kampanye adalah tentang dukungan terhadap operasi penegakkan NKRI di Aceh. Jadi, pro dan kontra di gedung DPR terhadap RUU harus dibaca sebagai sebuah "cobaan" bagi rakyat Aceh.

Kenyataan di atas sebenarnya bukan ingin mengatakan bahwa akan sangat besar kemungkinan proses damai di Aceh akan gagal kembali. Namun jika rakyat Aceh keliru dalam menyalurkan aspirasi mereka dalam menyikapi situasi ini, bukan tidak mungkin proses perdamaian akan berujung seperti pengalaman damai sebelumnya. Dalam hal ini ada beberapa skenario yang lazim terjadi di Aceh saat proses perdamaian.

Pertama, aksi-aksi demontrasi di Aceh memang sering ditunggangi oleh kelompok tertentu yang sering menggunakan rakyat sebagai tameng. Dalam konteks ini, kita berharap kelompok yang sering menggunakan massa apapun nama organisasi tersebut, sejatinya tidak menjadikan momentum ini untuk "mengacaukan" situasi damai di Aceh dengan mengajak rakyat turun ke jalan. Sebab, kemarahan atau anarkhis akan sangat mudah muncul ketika aksi tersebut disusupi oleh kelompok tertentu yang menginginkan adanya kekacauan di Aceh.

Kedua, meningkatnya eskalasi kekerasan yang menggunakan senjata api, seperti yang terjadi dalam beberapa minggu ini. Ini akan menjadi salah satu indikasi bahwa Aceh memang belum aman. Alhasil, padangan atau pemikiran untuk meningkatkan sikap waspada melalui pendekatan keamanan bukan suatu yang mustahil yang akan terjadi. Dalam situasi seperti ini, klaim penjahat dari kelompok tertentu akan membangkitkan opini publik yang pada ujungnya menimbulkan sikap saling curiga.

Ketiga, rakyat Aceh harus terbiasa dengan cuaca politik di Jakarta. Untuk membaca cuaca politik di Aceh memang diperlukan kesabaran tingkat tinggi. Apalagi jika suatu keputusan penting dilakukan dengan hasil *voting*. Ini tentu saja akan menguras emosi ketika apa yang diinginkan oleh rakyat Aceh, tidak tercapai, hanya karena sikap dan pandangan politik anggota DPR. Untuk hal ini, rakyat tidak perlu turun ke jalan untuk melakukan tekanan kepada mereka. Sebab, jika rakyat Aceh turun ke jalan, "wacana-wacana yang tidak diinginkan" akan muncul. Akibatnya, sikap DPR untuk mengulur-ulurkan waktu untuk pengesahan RUU ini akan semakin panjang dengan alasan sikap rakyat Aceh sendiri.

Keempat, para pengawal "perdamaian" Aceh dari AMM tentu akan memainkan peran penting. Namun nilai tawar mereka secara politik tidaklah kuat, manakala di Jakarta akan diusung isu-isu nasionalisme atau NKRI. Paling tidak, ini pernah

berlaku ketika pada tahun 2003, di mana para elit di Jakarta memunculkan sikap kritisisme mereka terhadap para warga asing yang membantu perdamaian di Aceh. Dalam bahasa yang sederhana, keberadaan AMM di Aceh akan memainkan peran penting, namun pada saat yang sama, Jakarta mampu membangkitkan opini publik secara nasional sebagaimana yang pernah terjadi terhadap HDC. Pendek kata, jika AMM diperpendek masa kerja mereka di Aceh, maka akan sangat besar kemungkinan RUU PA akan diperpanjang pembahasannya.

Kelima, munculnya provokator yang menggerakan massa (milisi) atau melakukan aksi kekerasan dengan cara meneror rakyat supaya mereka merasa tidak aman. Skenario ini memang bukan hal baru di Aceh, apalagi di Indonesia secara keseluruhan. Kelompok ini memang tidak bisa dideteksi dari mana dan bagaimana pola kegiatan mereka. Tujuan utama aktivitas kelompok ini adalah menaikkan tensi kecurigaan di kalangan rakyat Aceh sendiri yang kemudian dijawab dengan "operasi keamanan." Paling tidak, skenario ini memang ampuh untuk mengobrak-abrik kesabaran rakyat Aceh. Aksi perampokkan, penembakan, penculikan, pembakaran, dan gangguan terhadap fasilitas umum adalah hal yang sangat lumrah dijumpai di Aceh, terutama pada masa-masa proses perdamaian.

Lebih lanjut, lima skenario di atas adalah bukan hal baru untuk "menakar" harga kesabaran rakyat Aceh. Mereka juga sudah terbiasa dalam segala kondisi dan janji. Mereka juga sangat akrab dengan berbagai akibat jika sebuah proses damai gagal. Bukan hanya di situ, rakyat Aceh juga sangat pandai meramal apa yang akan terjadi pada mereka. Kebiasaan ini sebenarnya bukanlah hal yang perlu dinampakkan pada permukaan.

Apa yang selayaknya dilakukan oleh warga Aceh adalah menerjemahkan "rasa sabar" dalam wacana yang positif atau amanah. Maksudnya, jika rakyat Aceh "bersabar" maka tidak perlu melakukan berbagai aksi yang kontraproduktif. Molornya pengesahaan RUU di Jakarta bukan berarti gagalnya perjanjian Helsinki. Namun ini merupakan ujian bagi pemerintah untuk memberikan yang terbaik pada rakyat Aceh dan memperbaiki citra mereka di mata dunia internasional. Jadi, jika pun RUU ini gagal disahkan, "kemarahan" adalah bukan jawaban yang bijak. Situasi damai yang telah tercipta beberapa bulan terakhir ini adalah jawabah dari "kesabaran" sebelumnya dan sangat mahal untuk dilepascan hanya karena tidak "sabar" terhadap persoalan pengesahaan RUU ini.

Lebih lanjut, kekuatan sosial di Aceh selayaknya tidak memperkeruh suasana ini dengan dalih untuk menekan Jakarta agar segera mengesahkan RUU ini. Sebab, pengalaman kekuatan sosial di Aceh dalam "mengawal" isu masih dapat dikatakan sangat mengkhawatikan. Dengan bahasa yang lebih tegas, terkadang kekuatan ini

selayaknya tidak menjadikan momentum kali ini untuk membangkitkan wacana-wacana yang mengundang munculnya sikap curiga dari Jakarta. Acapkali, tindakan beberapa kelompok ini malah memberikan pengaruh yang luar biasa bagi rakyat Aceh secara keseluruhan, untuk tidak mengatakan fatal sama sekali.

Akhirnya, saya masih menyimpan harapan agar rakyat Aceh mampu meraih "harga" kesabaran mereka yang dinanti-nantikan selama puluhan tahun. Pengalaman konflik selama bertahun-tahun adalah bukan sejarah yang baik untuk ditulis bagi generasi selanjutnya. Alangkah konyolnya sesuatu bangsa jika generasi mereka asyik menulis "harga dan akibat" kesabaran rakyatnya terhadap sebuah penindasan. ☙

BAB 28

Proposal Mega Proyek Maksiat di Aceh

SETELAH membaca *Aceh Undercover* terbitan majalah *Aceh Kini* edisi Agustus, saya agak tertarik untuk mengupas bagaimana pengaruh mega proyek maksiat di Aceh sekarang ini. Sebab proyek ini meski tidak pernah dianggarkan, namun pengaruhnya cukup luar biasa, setidaknya jika dilihat dalam dunia industri seksual yang terjadi di kota-kota Aceh baru-baru ini.

Industri seksual yang sudah berhasil yang paling mutakhir adalah di Changloon, sebuah kota kecil di perbatasan antara Malaysia dan Thailand. Di sini setiap malam, ribuan wanita menjaja seks di berbagai tempat hiburan di Changloon. Jika malam Sabtu dan Minggu, hampir semua hotel dan tempat hiburan dipenuhi oleh para lelaki dari berbagai tempat yang menghabiskan akhir pekan mereka di situ. Delapan tahun yang lalu, tidak ada hotel dan panti pijat di situ, namun sekarang akibat dari dunia malam ini, akhirnya kota ini menjadi incaran bagi wisatawan seks di Asia Tenggara.

Walaupun masih tabu, mengingat industri seks di Aceh yang dibuat secara diam-diam, dan seolah-olah tidak bisa disentuh, agaknya semua kalangan seolah-olah mengamini apa yang sedang terjadi di beberapa kota kecil di Aceh. Bagi pendatang, yang tentu saja bukan warga Aceh, mereka cukup bermodalkan sehelai jilbab atau seledang, ketika turun pesawat dipakai di atas baju ketat mereka, lalu bisa menikmati dugem di Aceh. Bagi wanita Aceh, mereka cukup bermodalkan

sehelai jilbab trendy dengan celana ketat. Akhirnya mereka yang paranoid dengan isu Syari'at Islam, akan merasa 'selamat.'

Seolah-olah inilah fenomena Aceh yang cukup 'menyejukkan' saat ini. Jika Tuhan dari agama manapun, mungkin bisa 'tertawa' melihat apa yang terjadi di Aceh saat ini. Sudah begitu banyak musibah yang ditimpa, semakin banyak pula maksiat terorganisir di Aceh sekarang ini. Jadi ini menunjukkan bahwa industi malam memang sangat menjanjikan dan agama bukanlah jawaban atasnya. Sebab uang yang beredar di Aceh pun cukup banyak sekali. Jadi uang ini tidak akan pernah 'lari' lagi ke Medan atau Jakarta.

Sepertinya pemerintah daerah sudah bisa memikirkan bagaimana menggorganisir maksiat ini secara legal. Sebab, salah seorang ulama klasik pernah berkata, kejahatan yang dilakukan dengan perencanaan yang baik, akan berhasil, dibandingkan dengan suatu rencana kebaikan yang dilakukan secara amburadul. Jadi ini menjadi sinyal bahwa industri kejahatan ini di Aceh bisa dimasukkan ke dalam pembahasan proyek-proyek untuk beberapa tahun ke depan.

Demikian pula, sudah bisa dipikir bagaimana untuk 'mengamankan' industri ini sebaik mungkin. Sebab jika seorang pelacur bisa mendapat penghasilan jutaan rupiah perbulan, tentu saja ritme kehidupan masyarakat Aceh akan berubah. Kalau saya tidak salah, Muammar Emka penulis buku *Jakarta Under Cover*, pernah menghitung dan membandingkan jumlah pendapatan di dunia malam ini dengan profesi lainnya. Jumlah yang diperoleh oleh mereka yang berprofesi penjaja seks kelas atas jauh lebih banyak daripada gaji seorang professor.

Sebagai perbandingan, maksiat yang diorganisir dengan baik adalah salah satu negara di Asia Tenggara, secara khusus membuat 'surga penjudi' di hutan yang kemudian disulap menjadi 'surga.' Pemerintah Aceh sepertinya sudah bisa berpikir untuk meniru keberhasilan negara ini, sambil menghitung berapa banyak nanti generasi Aceh akan hancur di tengah jalan. Inilah proyek garda masa depan yang dibalut dengan dunia posmodernisme namun berujung pada 'manusia gila.'

Kegagalan modernisme memang berujung pada posmodernisme, di mana manusia saat itu gamang. Yang baik menjadi begitu asing dan seolah tidak *gaul*. Orang bicara untuk tentang bagaimana beribadah dengan baik kepada Tuhan, menjadi semacam hal yang harus ditinggalkan secara perlahan-lahan. Sebaliknya mereka yang 'jujur' pada diri sendiri atas nama kebebasan, dipandang lebih terhormat, karena mereka memiliki semua materi, yang menjadi ukuran kehidupan manusia posmo. Alhasil, siapapun yang ingin membumi hanguskan dunia malam di Aceh saat ini, maka akan dipandang aneh, dan kalau bisa dicap

sebagai fundamentalis atau radikalis. Mereka tidak menghargai pluralisme atau kebebasan individu yang menjadi motto manusia sejak awal abad ke-19 ini.

Melihat kenyataan ini, saya teringat dengan karya Ulil Abshar Abdalla pada tahun 2001, tentang bagaimana "orang NU dibodohi, Pintarnya orang lain." Saya sepertinya bisa juga beranggapan bahwa ini zamannya 'orang Aceh dibodohi' atau 'orang Aceh yang dibodoh-bodohi.' Cacian atau sangkaan negatif orang luar Aceh saat ini sudah disambut dengan senyuman. Sebab mereka datang membawa misi kemanusian, jadi mereka tidak boleh dikatakan sedang memperbodohi orang Aceh.

Orang boleh berpesta apapun, asalkan tidak boleh bicara Syari'at Islam, sebab ini akan berujung pada paranoid. Orang boleh membuat dunia *dugem* di Aceh, asalkan orang Aceh *yang sok alim* tidak ikut campur. Inilah dunia maksiat sudah di depan mata, dan orang Aceh 'pura-pura bodoh' terhadap gejala sosial ini. Sebab hampir dapat dipastikan jika mereka marah, orang boleh mencibir sesuka hati bahwa orang Aceh, dan mungkin akan ditulis di berbagai media, orang Aceh itu tidak pintar berterima kasih. Mereka kolod dan *kampungan*, karena tidak tahu makna kebebasan yang hakiki.

Salah satu kepincangan sosial dan budaya Aceh saat ini adalah manakala orang Aceh sendiri yang memulai untuk menghancurkan budaya mereka sendiri. Orang Aceh itu ibarat anak kecil, jika dikasih mainan (baca uang yang banyak dan posisi yang basah) mau melego budaya dan firasat keagamaannya dalam kehidupan ini. Inilah salah satu alasan untuk mengatakan bahwa hancurnya budaya Aceh ini lebih disebabkan oleh orang Aceh sendiri yang 'sedang dibodohi' dan dilengkapi dengan orang lain 'yang sedang membodohi' orang Aceh. Jadi, lengkaplah sudah sejarah kehancuran budaya Aceh pasca Tsunami ini. Orang berlomba-lomba berdo'a supaya Aceh tidak hancur dengan senjata, namun mereka abai dan tidak ada yang berdoa dengan kehancuran Aceh dengan 'senjata tanpa peluru.'

Saya telah menulis dalam *Aceh Magazine* tentang apa dan bagaimana orang Aceh harus membayar kepada orang yang datang ke Aceh dengan misi kemanusiaan. Di situ saya tekankan bahwa suatu saat orang Aceh akan rela terhadap apa yang terjadi saat ini. Pada saat yang sama, mereka tidak bisa melawan terhadap apa pun dunia maksiat di depan mereka sendiri. Sepertinya orang Aceh sudah saatnya membayar satu persatu hutang mereka dengan 'menggadaikan' harga diri dan adat istiadat mereka kepada budaya posmo ini.

Mimpi saya, sampai kapanpun orang Aceh, baik yang terlibat dalam dunia *dugem* dan *esek-esek* ini, tidak akan mampu membendung kemaksiatan tergorganisir ini. Sebab, orang yang sedang menikmati dunia ini, adalah mereka yang sedang

membantu orang Aceh. Dalam tradisi Aceh, siapapun yang membantu kehidupan orang lain, dia tidak akan diganggu seumur hidup. Bahkan dia tidak akan pernah diusir dari bumi Tanoh Rencong ini.

Ini berbeda dengan masyarakat dulu yang mengusir penjajah, mereka tidak perduli mau dikatakan *Aceh pungo* atau apapun, asalkan mereka tidak menetap di Aceh apapun alasannya. Jadi waktu itu, penjajah pun harus berpikir lama untuk menaklukkan Serambi Mekkah ini. Sebaliknya sekarang, pendatang yang membawa uang yang cukup banyak, mereka dijadikan sebagai *first class* dan tidak ada hukum bagi mereka. Jadi kita akan menanti kapan kehancuran Aceh ini dengan budaya posmo ini. Agaknya, potensi untuk menghancurkan budaya dan adat istiadat ini ternyata juga dimiliki oleh generasi Aceh sendiri. Lengkaplah proyek maksiat di Aceh saat ini.

Akhirnya, renungan singkat ini bagi orang Aceh dan non-Aceh untuk memikirkan bagaimana mempertahankan budaya Aceh yang sedang mengalami kehancuran secara pelan namun pasti. Bab ini bukan dimaksudkan untuk mengusir pendatang yang sedang menikmati 'bau Surga' Aceh. Namun yang perlu diberitahukan adalah ada saatnya 'bau surga' ini bisa menjadi malapetaka yang akan ditanggung oleh orang Aceh sendiri yang mungkin boleh jadi sebagai 'bau neraka.' Karena itu, marilah kita tonton kehancuran budaya Aceh ini secara baik-baik sambil menghitung kapan bencana atau malapetaka akan datang lagi ke Aceh.

BAB 29

Renungan Akhir Tahun 2008

SAYA ingin menulis tentang sebuah renungan bagi rakyat Aceh, semoga dalam melangkah tahun 2009 lebih baik daripada 2008 ini. Ada beberapa hal yang akan terjadi di Aceh pada tahun depan, yang mungkin menuntut kadar kedewasaan sosial dan politik. Pertama, tahun depan kita akan memilih wakil rakyat yang akan duduk di tingkat kabupaten, propinsi, dan nasional. Semua energi kemanusiaan kita akan diarahkan pada proses pemilu di tingkat kabupaten.

Sebab, dalam hal ini, Aceh akan lebih banyak bagaimana menjembatani kepentingan partai lokal di tingkat kabupaten dan propinsi. Tentu saja, harapan kita adalah wakil rakyat yang akan dipilih adalah mereka yang pintar melakukan 'interupsi' ketika sidang, namun bagaimana mereka mengerti betul persoalan yang sedang didera oleh rakyat Aceh. Dalam hal ini, kemampuan wakil rakyat yang akan berlaga di panggung politik lokal juga perlu diambil kira, supaya dewan rakyat tidak menjadi 'taman kanak-kanak' - meminjam istilah Gus Dur.

Kedua, energi pemilu tahun depan akan menyorot tiga hal yaitu kemampuan caleg dalam mengusung isu-isu lokal, kesamaan visi dan misi dalam menatap masa depan Aceh, dan bagaimana mempertahankan perdamaian yang sudah dirintis selama 3 tahun terakhir. Karenanya, tidak berlebihan jika dikatakan tahun depan, akan menjadi tahun yang cukup 'melelahkan' tidak hanya bagi caleg dan rakyat, tetapi bagi para pencinta damai di Aceh. Kehadiran Partai Lokal yang boleh jadi tidak akan memberikan sifnifikansi politik di tingkat nasional, namun pada level

daerah, kehadiran mereka cukup memberikan perhatian yang banyak. Tentu saja, mesin politik nasional lebih kuat, namun pertimbangan Pilkada tahun 2007 lalu boleh jadi menjadi dalil kuat, betapa berbeda-nya eskalasi politik Aceh dengan eskalasi politik di tingkat nasional.

Untuk itu, tiga hal di atas, semestinya dijadikan sebagai dasar pemikiran para caleg yang akan berkampanye nantinya. Apapun bola politik yang dimainkan, namun isu-isu lokal harus dijadikan prioritas. Misalnya, akses masyarakat dan kesejahteraan mereka dalam roda pemerintahan, perlu dianggap hal serius. Sebab wakil rakyat akan menjadi corong kepentingan rakyat, bukan kepentingan partai mereka.

Demikian pula, visi-misi untuk membangun Aceh Baru yang tidak melupakan sendi agama-adat-ilmu perlu terus ditingkatkan pada level-level penyadaran masyarakat Aceh. Sebab, dalam satu dekade terakhir, ketiga hal ini yang menjadi 'bumbu masakan' Aceh Baru ternyata telah diabaikan secara berjama'ah oleh sebagian wakil rakyat. Damai Aceh juga perlu dijadikan agenda para caleg untuk memperlihatkan bahwa betapapun keperbagaian di Aceh, namun muara pemikirannya adalah damai.

Dalam pada itu, salah satu isu penting pasca-pemilu tahun depan adalah mencuatnya kembali isu pemekaran Aceh, terutama bagi mereka yang tidak terpilih atau sudah terpilih. Isu ini terus terang akan diangkat kembali oleh politisi lokal, seiring dengan kebebasan politik pada tahun 2009. Pemerintah Aceh, dalam hal ini, bisa menanti bahwa pemekaran akan terus dianggap sebuah keniscayaan atas nama rakyat, jika mereka tidak tersalurkan sebagian kepentingan politiknya dalam pemilu mendatang. Konsekuensi logis dari pemilu mendatang adalah naiknya isu-isu lokal sebagai bahan kampanye di tingkat dua menuju tingkat satu dan nasional. Namun, hal ini tidak akan memberikan ancaman serius terhadap pembangunan Aceh, sebab isu pemekaran adalah bagian dari cambuk bagi pemerintahan saat ini supaya tidak menutup mata bahwa ada yang 'tertinggal' dalam sejarah pembangunan Aceh saat ini.

Ketiga, isu yang tidak kalah pentingnya adalah meleburnya agama dalam kepentingan politik, khususnya bagi yang mengusung partai politik. Ini harus disikapi oleh rakyat sebagai 'bukan menjual ayat-ayat al-Qur'an,' namun tokoh politik masih melihat bahwa peluang agama sebagai komoditi politik masih sangat terbuka. Akan tetapi, sebagaimana pengalaman pemilu-pemilu di Indonesia, isu agama hanya akan berhenti di pintau gedung dewan terhormat. Sebab itu, rakyat harus disadarkan bahwa ketika agama dinaikkan, mereka juga tidak akan menikmati imbas dari isu ini.

Karena itu, hal yang keempat yang cukup merisaukan adalah masih bertahannya politik dayah di Aceh. Inilah yang memperlihatkan kebuntuan isu-isu lokal, ditengah naiknya isu agama dalam konteks politik dayah. Dalam kategori ini, mereka yang memiliki basis dayah akan menghadang kelompok yang memiliki basis non-dayah. Proses penggemukkan dayah menjadi kendaraan politik, memang hanya terjadi di Jawa Timur, namun dalam konteks Aceh saat ini, hal tersebut sangat merisaukan. Sebab, ketika dayah tidak lagi menjadi modal dan model pendidikan Aceh, maka proses yang terjadi berikutnya adalah keinginan masyarakat dayah untuk tampil dalam kancah politik. Dalam sejarah Aceh ini pernah terjadi dan selalu berujung pada ketidakmampuan kelompok dayah dalam mengelola isu yang mereka mainkan.

Untuk itu, tahun depan, polarisasi dayah dan aksi *sweeping* akan terus terjadi. Tentu saja ini atas nama agama, dayah akan memainkan peran penting. Dalam hal yang lebih sederhana, kekuasaan Aceh pada tahun 2009 nanti akan lebih banyak dikendalikan oleh dayah. Hal ini juga terlihat peran dayah dalam menyusun langkah ke depan, saat pemilihan kepala daerah nantinya. Gelombang kebangkitan politik dayah tahun depan, adalah lebih karena kegagalan kelompok ini mempengaruhi pemerintah Aceh saat awal tahun 2008 ini. Jadi, boleh jadi, situasi politik Aceh tidak akan jauh berbeda dengan situasi politik di Jawa Timur, di mana dominasi ditentukan oleh para Kyai. Dalam hal ini, saya ingin melandaskan bahwa preseden sejarah politik Aceh selalu berakhir ketika dayah tidak mampu mengendalikan diri mereka secara internal.

Adapun hal kelima yang cukup mengkhawatirkan adalah munculnya kelompok-kelompok yang merusak perdamaian Aceh, dengan menyusup dalam situasi kampanye dan pasca-pemilu. Hal ini yang selalu menjadi kekhawatiran kita saat nanti, di mana kelompok provokator akan masuk ke berbagai lini guna menghancurkan situasi perdamaian Aceh. Rencana untuk melakukan ini sudah terlihat dari beberapa tahun terakhir, khususnya saat terjadi mobilisasi massa dan aksi yang mengarah pada adu domba sesama rakyat Aceh.

Dari kelima kerisauan di atas, tentu saja kita harus terus mengambil langkah penting, yaitu tidak mau larut dalam suasana pesta politik tahun depan. Sebab, dalam hemat saya, Aceh masih memainkan peran sebagai pusat jajanan isu bagi pihak yang akan melakukan kampanye. Karena itu, Aceh kemudian akan menjadi piring nasi supaya semua lauk pauk politik dari tingkat nasional, propinsi, dan kabupaten bercampur baur.

Yang tertinggal adalah bagaimana rakyat mau memakannya 'gado-gado politik' ini. Proses blenderisasi isu di Aceh pada tahun 2009 adalah proses untuk

memajukan kepentingan segolongan pihak dan menghancurkan kepentingan golongan pada pihak yang lain. Rakyat Aceh, dalam hal ini, akan menjadi saksi sejarah sebuah pesta 'gado-gado politik' pada tahun 2009. Saya berharap, ini tidak akan menyebabkan rakyat Aceh berjalan di tempat, sebab hasil dari pesta ini hanya akan menjadi tontonan kita pada tahun-tahun berikutnya di gedung parlimen.

Akhirnya, renungan ini tidak ingin mengajak kita pada kehampaan dalam keterputus-asaan. Bagaimanapun, kita akan melewati tahun 2009 nanti. Hanya saja kita harus bersiap-siap dengan segala kemungkinan yang boleh saja tidak terjadi, atau malah terjadi secara bertubi-tubi. Untuk itu, rakyat sejak bulan Januari tahun 2009 sudah bisa mempersiapkan diri dengan skenario 'gado-gado politik' di Aceh. ☙

BAB 30

Memahami Qanun Wali Nanggroe

DALAM bab ini, saya tertarik untuk membahas Qanun No.8 tahun 2012 tentang *Wali Nanggroe* yang disahkan oleh Gubernur Aceh pada 19 November 2012. Tanpa bermaksud untuk mencampuri persoalan pro dan kontra mengenai Qanun ini, ada baiknya kita telaah isi Qanun yang berjumlah 134 pasal. Secara sepintas Qanun ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa Wali Nanggroe merupakan pemimpin tertinggi di Aceh dalam bidang adat. Namun begitu membuka lembaran daftar Wali Nanggroe yang muncul adalah nama ulama yang memimpin peperangan melawan Belanda, kecuali Wali Nanggroe ke-9. Mereka sama sekali tidak pernah berfungsi sebagaimana isi Qanun ini yaitu pemimpin tertinggi di dalam adat.

Namun jika ditelisik secara mendalam, pasal demi pasal di dalam Qanun ini hanya ingin mempertegas posisi Malek Mahmud di dalam Pasal 132 ayat 6. Demikian pula, aturan menjadi Wali Nanggroe selama 7 tahun pun tidak sama durasinya dengan nama-nama Wali Nanggroe sebelumnya, di mana ada yang memangku selama 7, 4, 2,3,5, 5 bulan, dan 30 tahun. Adapun persoalan lainnya adalah aturan yang berisi puluhan pasal sebelum pasal 132, sama sekali tidak berlaku bagi Wali Nanggroe ke-IX. Inilah persoalan yang cukup krusial, mengingat MoU Helsinki adalah mandat untuk rakyat Aceh, namun aturan di Qanun ini berlaku secara komprehensif 7 tahun mendatang (2019). Maksudnya, Aceh akan memiliki Wali Nanggroe versi isi Qanun ini pada tahun 2019.

Demikian pula, pola pemilihan Wali Nanggroe nantinya sama sekali tidak dipilih oleh rakyat, melainkan oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe (Pasal 70). Padahal lembaga ini adalah lembaga adat, namun di dalam pasal ini tidak ada mekanisme keterlibatan masyarakat adat di dalam pemilihan Wali Nanggroe pada tahun 2019 nanti. Demikian pula, persoalan pasal 17 ayat 4 -5, di mana seolah-olah Wali Nanggroe memiliki kekebalan hukum. Dan, hanya DPRA yang berhak mengeluarkan persetujuan tertulis, jika Wali Nanggroe melanggar hukum. Tentu saja, nalar ini masih perlu dikaji secara mendalam, karena pada tahun 2019 nanti, boleh jadi komposisi DPRA akan berbeda dengan hari ini.

Qanun ini pada prinsipnya ingin meneruskan nafas MoU Helsinki, namun ingin menetapkan Wali Nanggroe seolah-olah seperti pemimpin spiritual di Iran. Akan tetapi, isi Qanun ini seakan-akan ingin menyatakan bahwa Wali Nanggroe adalah "pemerintah bayangan" di Aceh yang berfungsi bak Presiden. Karena itu, disekeliling Wali Nanggroe wujud berbagai Majelis yang mirip seperti kabinet dan memiliki menteri koordinator. Jika seperti ini fungsinya, adalah lebih baik jika Wali Nanggroe bukan sebagai Pemimpin Adat, melainkan berfungsi seperti "Presiden Aceh" yang memiliki protokoler dan dana dari pemerintah.

Jika ini tujuannya, lebih baik Qanun diteruskan dengan pembagian kabupaten yang berfungsi seperti "propinsi." Dengan kata lain, fungsi *Panglima Wilayah* dan *Panglima Sagoe* akan mirip dengan fungsi Panglima Daerah dan KODIM. Secara tersirat, fungsi ini sebenarnya telah berjalan selama beberapa tahun terakhir. Dengan begitu, *pajak nanggroe* dapat dilegalkan melalui Qanun lain untuk menopang kekuasaan Wali Nanggroe dan hubungannya dengan *Panglima Wilayah*, serta model pengutipan *pajak nanggroe*. Adapun turunan Qanun ini dapat diteruskan dari pasal 47, yaitu fungsi *Bentara*. Adapun mengenai hal *pajak nanggroe* dapat ditarik dari Pasal 128 ayat 1, point c yaitu "sumber lainnya yang sah."

Jadi, di Aceh akan muncul dua model kekuasaan, yaitu kekuasaan yang berasal dari Jakarta, berwujud Gubernur. Dan kekuasaan model MoU Helnsiki yang berwujud Lembaga Wali Nanggroe. Kedua model ini pada prinsipnya tidak ditemukan rujukannya dalam sejarah pemerintahan Aceh *tempoe doeloe*. Saat ini, sistem kendali pemerintahan Aceh memakai sistem kekeluargaan dan sistem jama'ah. Karena itu, Lembaga Wali Nanggroe, tidak akan bertolak belakang dengan Legislatif dan Eksekutif. Namun, sulit membayangkan nantinya pada tahun 2019, jika Aceh tidak memiliki "sistem kekeluargaan" dan "sistem jama'ah" di dalam menjalankan fungsi Eksekutif dan Legislatif seperti hari ini.

Sebelum dan pasca MoU Helsinki, telah berkembang dua paradigma yaitu dari "tidak setuju, dibunuh" ke "tidak setuju, dipecat." Paradigma pertama telah muncul

sejak era konflik. Siapapun yang tidak "setuju" telah "disekolahkan." Mayat rakyat Aceh yang tidak berdosa bertaburan diseluruh penjuru bumi Serambi Mekkah. Namun setelah 2005, fenomena ini berkembang menjadi ketika tidak "setuju", sudah pasti "dipecat." Begitulah kekuatan sistem jama'ah yang telah menjelma dibalik Qanun Wali Nanggroe lahir. Isi pasal tumpang tindih dengan peraturan lain dan ketidaksinambungan historis merupakan hal yang biasa untuk ditabrak oleh pembuat Qanun ini, asalkan MoU Helsinki bisa diselamatkan.

Dalam konteks inilah, Qanun Wali Nanggroe lahir, yaitu setelah terjadi proses "bunuh" dan "pecat." Sekarang muncul paradigma baru yaitu "tidak setuju, protes." Bagi yang "protes" akan berhadapan dengan MoU Helsinki yang telah "dikeramatkan." Fenomena "bunuh," "pecat," dan "protes" juga telah menjadi budaya baru sebelum dan pasca-damai. Dengan kata lain, damai hanya untuk GAM dan TNI, bukan bagi yang "dibunuh," "dipecat," dan "protes." Sistem berpikir inilah yang menjiawai nafas Qanun Wali Nanggroe, di mana ingin membangun paradigma bahwa "kami telah berhasil menguasai Aceh." Kalau anda "protes" maka proteslah MoU Helsinki.

Karena sistem jama'ah yang digunakan di dalam merumuskan Qanun No. 8 2012, maka siapapun yang "protes" tidak akan didengarkan, baik oleh pihak Legislatif maupun Eksekutif. Ketika ruang itu tertutup, maka rakyat sama sekali berada di luar Qanun tersebut. Karena dalam "sistem jama'ah" hanya yang setuju yang bisa masuk di dalam barisan tersebut. Kalau "protes" maka proteslah ke pihak luar negeri yang mendatangkan MoU Helsinki ke Kutaraja. Cuaca politik ini akan terus bertahan, hingga hari pelantikan Wali Nanggroe ke-IX.

Namun, pertanyaannya adalah apakah rakyat akan melakukan pesta atau kenduri ketika mereka memiliki Wali Nanggroe hari ini? Selain isi Qanun yang masih bermasalah, fenomena "menutup telinga" adalah jawaban bagaimana "protes" tentang Qanun ini sama sekali tidak menjadi perhatian serius di kalangan Eksekutif dan Legislatif. Karena itu, sangat wajar jika nanti kemanapun Wali Nanggroe berkeliling akan "dinanti" oleh rakyat. Mereka akan berkata: "Anda Wali kami, silahkan anda datang ke kampung kami!"

Sekali lagi, bab ini bukan ingin menggugat Qanun Wali Nanggroe, namun menggugah hati nurani pembuat Qanun ini, supaya tidak menjadikan hasrat mereka sebagai "bom waktu" bagi masyarakat Aceh. Rakyat sudah 30 tahun lebih memendam perasaaan bahwa "anda yang menikmati kekuasaan" mengapa "kami yang harus menderita." Inilah falsafah dan spirit mengapa Qanun ini belum diterima oleh rakyat Aceh. Karena rakyat Aceh di kampung-kampung tidak pernah memulai perang, tidak pernah terlibat di dalam proses perdamaian, dan

juga masih belum menikmati "hasil" damai hari ini. Jadi, Qanun Wali Nanggroe ini sebenarnya hanya untuk jama'ah (baca: kelompok), bukan untuk ummat (baca: rakyat). ☙

BAB 31

Misteri Gelar Wali Nanggroe

SAYA agak kaget melihat ada baliho mengenai kedatangan Wali Nanggroe di salah satu sudut kota Banda Aceh. Hal yang sama juga adalah adanya ucapan Selamat Datang dari Ketua (Sementara) DPRA terhadap kedatangan Wali Nanggroe yang dibubuhi stempel DPRA dan lambang pemerintahan Aceh (Panca Cita) *Serambi Indonesia* (17/10/2009). Saya kaget bukan karena sosok Tgk. Hasan di Tiro sebagai Wali Nanggroe, melainkan ada persoalan sejarah yang sejatinya mendapat perhatian warga Aceh saat ini yaitu bagaimana duduk perkara status Wali Nanggroe.

Misteri gelar Wali Nanggroe adalah sesuatu yang jarang diangkat kepermukaan. Sebab, sampai saat ini rakyat Aceh belum pernah melakukan pemilihan langsung siapa sebenarnya Wali Nanggroe mereka. Sejauh pengetahuan saya, setelah Aceh bergabung dengan Republik Indonesia ada dua pejuang Aceh yang pernah digelari sebagai Wali Nanggroe yaitu Tgk. Daud Beureu-eh dan Tgk. Hasan di Tiro. Kedua mereka tentu mendapat tempat di hati rakyat Aceh sampai hari ini.

Gelar Wali Nanggroe yang dimiliki oleh Tgk. Daud Beureu-eh tercatat rapi di dalam Piagam Batee Kureng yang dibuat pada tanggal 21 September 1953. Dalam Bab III piagam tersebut dinyatakan bahwa (1) Wali Negara adalah titel dari Kepala Negara Bahagian dan merupakan kepala eksekutif negara; (2) Wali Negara dipilih oleh rakyat Negara Bahagian; (3) Pada sa'at lahirnya Piagam ini, Wali Negara yang pertama adalah Yang Mulia Tengkoe Moehammad Daoed Beureue-

eh.[1] Inilah Piagam yang menyatakan bahwa Tgk. Muhammad Daud Beureu-eh adalah seorang Wali Nanggroe yang pernah mendapat pengakuan dari 88 orang para pejuang Aceh saat itu.

Adapun data mengenai Tgk. Hasan di Tiro sebagai Wali Nanggroe dapat ditemukan di dalam tulisannya yaitu Konsep-Konsep Kunci Ideologi Acheh Merdeka pada tanggal 26 Maret 1996. Di tulisan tersebut Tgk. Hasan menulis: "Saya telah menanda-tangani Surat Pernyataan Acheh/Sumatra Merdeka sebagai Negara Sambungan atau kelegalan Hak satu *successor state* sebab pada waktu ini sayalah yang berhak (bertugas) sebagai Wali Negara Acheh sebagai Tgk. Tjhik di Tiro menggantikan Yang Mulia Nenekanda Tengku Tjhik Majeddin dan Pamanda Tengku Tjhik Ma'at, yang gugur pada 3 Desember 1911, dalam perang melawan Belanda."[2] Tentu saja warga Aceh sejak tahun 1996 tidak pernah melakukan pemilihan umum untuk memilih Tgk. Hasan di Tiro sebagai Wali mereka. Ini pun jika dirujuk pada tatacara pemilihan Wali Nanggroe sebagaimana termaktub di dalam Piagam Bate Kureng, bab III.

Anehnya di dalam daftar para pemimpin Aceh (*Nyang Mat Peurintah Acheh*) setelah Sultan Daud Syah, hanya dicantumkan nama-nama dari keluarga beliau, mulai dari Tgk. Muhammad Saman hingga ke Tgk. Ma'at, Artinya, sama sekali beliau tidak menyebutkan nama Tgk.Daud Beureu-eh atau Syaikh Abdur Rauf al-Singkili (yang pernah menjadi Wali Kerajaan Aceh). Setelah itu, beliau langsung mencantumkan namanya sebagai pemimpin Aceh yang bergelar sebagai Wali Nanggroe. Artinya, pewaris tahta Wali Nanggroe setelah Tgk. Hasan di Tiro jika merunut pada aspek keturunan (dinasti) adalah anaknya Karim Tiro yang saat ini berdomisili di Amerika Serikat. Sayang, sampai detik ini putra Tgk. Hasan sama sekali tidak "memperhatikan" persoalan ini.

Yang menarik lagi adalah dalam daftar Tgk. Hasan Tiro, nama Tgk. Daud Beureu-eh sama sekali tidak dicantumkan sebagai Wali Nanggroe sebelum beliau. Begitu juga sebaliknya, di dalam susunan nama-nama di dalam Piagam Bate Kureng, sama sekali tidak ada nama Tgk. Hasan Tiro, kecuali Tengku Zainal Abidin Muhammad Tiro dan Tengku Umar Tiro. Di samping itu, dalam sejarah Aceh, *cap sikureung* sebagai simbol kerajaan Aceh yang pernah diberikan kepada Tgk. Chik di Tiro setelah kewafatan beliau 1891 ternyata diserahkan kepada Habib Samalanga.[3] Apakah keturunan Habib ini juga bisa digelari sebagai Wali

[1] Mengenai isi piagam ini, baca Abdul Murat bin Mat Jan, "Gerakan Darul Islam Di Aceh 1953-1959" (B.A. Thesis, Gadjah Mada University, 1975).

[2] Tiro, "Konsep-Konsep Kunci Ideologi Acheh Merdeka."

[3] Anthony Reid, *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra Hingga*

Nangroe? Menurut sejarah *cap sikureung* ini sangat penting untuk sebagai simbol pemerintahan kerajaan Aceh dan pengaruhnya sangat luar biasa bagi siapapun yang memiliki stempel kerajaan Aceh tersebut. Sedangkan jika dikatakan keluarga Tgk. Hasan di Tiro adalah pewaris Wali Nanggroe, maka ada kenyatan sejarah bahwa pemimpin perang Aceh yang terakhir adalah adik Tgk. Mat Amin (w. 1896) yang bernama Tgk. Di Tungkeb alias Tgk. Beb.[4]

Tentu saja sejarah dua Wali Nanggroe pasca-bergabung dengan Republik Indonesia sangat menarik diulas lebih lanjut. Karena jika sejarah ini diluruskan maka gelar Wali Nanggroe ini memang sangat mengundang sejumlah tanda tanya. Saya memandang Wali yang memiliki kata jamak Aulia adalah yaitu kelompok manusia setingkat di bawah Nabi dan Rasul. Mereka adalah pelindung atau penolong bagi suatu kaum manusia, seperti terlihat di dalam surat al-Anfal (72) dan al-Kahfi (44).

Banyak mereka dikenal orang paling dekat dengan Allāh dan memiliki kekeramatan (*karamah al-auwliya*) yang amat luar biasa.[5] Dua hal inilah yang pernah dimiliki oleh Tgk. Chik di Tiro dengan semangat jihadnya. Karena itu, menurut sejarah pula, bumi Aceh adalah *tanoh aulia* (tanah para wali). Jadi, gelar Wali adalah gelar keagamaan, di mana mereka terkadang menjadi penasihat Raja atau menjadi pemegang otoritas keagamaan yang paling tinggi, walaupun jarang terlembagakan di dalam sebuah pemerintahan. Dalam sejarah Aceh pula, mereka hadir saat Sultan tidak mampu lagi menghadapi Belanda ketika memimpin perang. Di Pulau Jawa sendiri, juga dikenal sebagai negeri para wali yaitu *Wali Songo* (Wali Sembilan) yang beberapa keturunan mereka berasal dari Aceh.

Yang lebih menarik lagi, dalam MOU Helsinki poin 1.1.7. yang disebutkan bahwa Lembaga Wali Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelar. Secara tersirat seolah-olah Wali Nanggroe ingin diarahkan pada persoalan adat istiadat ingin dilembagakan sebagai aset budaya, bukan pemegang otoritas keagamaan tertinggi. Melihat pengalaman piagam Bate Kureng dan pengakuan Tgk. Hasan di Tiro maka sebenarnya Wali Nanggroe boleh dilekatkan pada siapa saja, dan dia bukan sebuah lembaga adat atau budaya, sebagaimana ingin diterjemahkan ke dalam rancangan Qanun Wali Nanggroe. Peran Wali Nanggroe

---

Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19, trans. Masri Maris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005). 275. Anthony Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese & Other Histories of Sumatra* (Singapore: Singapore University Press, 2005).

[4] Ibrahim Alfian, *Perang Di Jalan Allah* (Jakarta: Sinar Harapan, 1987).161.

[5] Muniron, "Pandangan Al-Ghazali Tentang *Ittihâd* Dan *Hulûl*," *PARAMADINA* 1,2(1999).

adalah sama perannya dengan peran ulama yang dapat dilihat dari perilaku MPU atau MUNA. Kesan yang muncul sementara adalah Wali Nanggroe akan berfungsi seperti MAA (Majelis Adat Aceh).

Atau, jika merujuk pada makna Wali yang sesungguhnya, maka harus ada seorang Wali yang memiliki kemampuan seperti Tgk. Chik di Tiro atau ulama-ulama lain yang pantas disebut sebagai Wali. Pada kenyataan ini, model keterlibatan Wali di dalam pemerintahan dapat dicontoh pada negara Iran, di mana pemimpin spiritual tertinggi dipegang oleh seorang ulama yang dikenal dengan Ayatullah. Di dalam kajian Islâm, konsep dari kelompok Syi'ah ini disebut dengan *wilayah faqih*. Tentu saja arah poin 1.1.7 MOU Helsinki bukanlah diarahkan kesini.

Namun demikian, yang harus diingat lagi adalah posisi Tgk. Daud Beureu-eh yang juga perlu diangkat, karena beliau tidak pernah mengaku sebagai Wali Nanggroe, tetapi diangkat sebagai Wali Nanggroe. Beliau juga mendapat mandat menjadi Wali Nanggroe dari beberapa pejuang Aceh. Ada juga bukti sejarah bahwa ketika Tgk. Hasan di Tiro mendeklarasikan sebagai Wali Nanggroe dan Waki Wali Nanggroe pada Tgk. Yahya Hasbi Geudong pada tanggal 22 Mei 1977 di Gunung Halimon, Aceh Pidie. Nama Tgk. Daud Beureue-eh malah ditempatkan sebagai Mufti Empat yang mirip dengan posisi Qadhi Malikul 'Adil. Jadi, agaknya gelar Wali Nanggroe ini hadir pada saat darurat perang, bukan pada saat damai. Karena Piagam Batee Kureng dan peristiwa di Gunung Halimon adalah terjadi pada saat rakyat Aceh ingin berjuang demi rakyat Aceh.

Adapun misteri lainya adalah mencari Undang-Undang Dasar yang melegalkan keturunan Tengku Chik di Tiro sebagai Wali Nanggroe. Sebab, sebelum Tgk. Hasan di Tiro mengaku sebagai Wali Nanggroe, beliau menulis: "Kesulitan ini telah dapat kita elakkan dengan mendirikan *Successor State* dengan UUD-nya yang melegalkan keturunan Tengku Tjhik di Tiro sebagai Wali Negara." Artinya, jika memang UUD tersebut ada dan dimiliki oleh Tgk Hasan Tiro maka bisa dimasukkan sebagai dalil kuat di dalam penyusunan Raqan Wali Nanggroe.

Akhirnya tujuan utama saya mengangkat diskusi tentang Wali Nanggroe adalah supaya generasi muda paham betul bagaimana *neuduk* sejarah rakyat Aceh. Kita boleh jadi masih awam dan bodoh dengan sejarah Aceh, minimal menempatkan Piagam Batee Kureng dan pengakuan Tgk. Hasan di Tiro di atas. Dalam salah satu bait lagu Rafly ada sya'ir: *Amanah endatu beugeod tapapah, bek gadoeh tuwah wangsa mulia; Mulia ureung cit bak tuwah; wangsa meutuwah bek taboeh kada*. Inilah niat saya untuk mengupas misteri Wali Nanggroe di Aceh. Karena setelah bait terakhir lagu Rafly tersebut, ada ungkapan *Hoka Raja Loen!* ☙

BAB 32

Membaca Langgam Politik GAM

SIAPA yang mampu menebak bagaimana akhirnya drama keterlibatan GAM dalam politik di Aceh? Belum genap satu bulan mereka mengajukan nama untuk calon Gubernur yang akan ikut dalam Pilkada mendatang, GAM buru-buru menyebutkan bahwa mereka tidak akan ikut dalam Pilkada kali ini. Drama ini memang belum berakhir, mengingat RUU PA sendiri belum disahkan dan agak sulit untuk melihat kemana arah bandul politik GAM kali ini.

Bab ini berupaya ingin memberikan suatu perspektif dalam memahami langgam politik GAM berikut dengan irama yang sedang mereka mainkan di Aceh. Dalam dataran kancah politik di Aceh, GAM memang masih sangat baru, jika tidak boleh dikatakan 'masih hijau.' Namun dalam perspektif akar rumput, GAM memang memilki kekuatan yang tidak dapat diabaikan, khususnya simpatisan yang masih menganggap GAM adalah kendaraan politik mereka. Demikian pula, dalam lobi di tingkat internasional, GAM juga tidak dapat dikatakan masih 'seumur jagung', mengingat 'jam terbang' eksponen GAM adalah di beberapa maju yang terbiasa dengan iklim demokrasi.

Sebaliknya, di Aceh iklim politik masih belum dapat dipastikan mengingat RUU PA belum disahkan oleh pemerintah RI. Indikasi ini tampaknya menjadi pertimbangan bagi GAM untuk mengurngkan niatnya untuk ikut Pilkada mendatang. Karena itu, pernyataan Muhammad Nazar, Presidium Sentral Informasi Referendum Aceh (SIRA) bahwa "ada penyusupan pemikiran beberapa

pentolan GAM agar kelompok pejuang jangan naik, ada skenario ke arah itu" (30/05/2006) sangat menarik dicermati lebih lanjut, mengingat Nazar sendiri adalah Cawagub dari hasil konvensi GAM. Ini menamppakkan bahwa bandul politik GAM memang belum begitu solid dalam menghadapi Pilkada mendatang.

Dalam konteks seperti ini ada beberapa tesis untuk membaca langgam politik GAM. Pertama, ada kesalahan strategi, jika boleh dikatakan begitu, ketika GAM menyelenggarakan konvensi untuk menetapkan Cagub dan Cawagub di gedung Dayan Dawood Unsyiah (25/05/2006). GAM dalam hal ini, para elitnya tampaknya begitu tergesa-gesa ingin 'menjual' pasangan mereka ke publik jauh sebelum RUU PA disahkan. Sejatinya, GAM harus menarik bandul politik mereka ke arah konsolidasi, ketimbang menetapkan pasangan yang akan berlaga dalam Pilkada.

Harus diakui kalkulasi politik di Aceh memang masih dikendalikan oleh partai-partai politik yang selama ini mengikuti pemilu. Kendati indikasi pemenang pemilu tidak dapat dijadikan sebagai patokan, namun GAM sendiri belum punya pengalaman dalam pemilu di Aceh. Jika dikatakan bahwa GAM sudah punya pendukung sampai pada akar rumput, maka klaim ini juga belum dapat dipastikan, sebab akan sangat tergantung pada sejauh mana 'pasangan GAM' mampu bertarung dengan pasangan-pasangan lainnya.

Karena itu, manakala GAM mengatakan bahwa mereka akan konsentrasi pada pilkada tahun 2009, maka ini akan menyebabkan indikasi perpecahan kepentingan politik dalam tubuh GAM sendiri. Di mana ada kelompok yang ingin ikut dalam Pilkada kali ini. Setidaknya 'kekecewaan' Nazar memberikan sinyal adanya keinginan kuat untuk tampil dalam pilkada kali ini. Sementara ada kelompok yang tampaknya sangat khawatir dengan kalkulasi politik Aceh yang memilih untuk tidak ikut Pilkada pada tahun ini.

Untuk tidak mengatakan perpecahan pemikiran dalam GAM, saya cenderung ingin menyebutkan ada sinyalemen bahwa hasil konvensi GAM belum mencerminkan apa yang diinginkan oleh elit GAM itu sendiri. Banyak kalangan yang mengatakan bahwa SIRA, terlepas dari misinya untuk referendum di Aceh, sangat dekat dengan GAM. Namun di lapangan sendiri, kedekatan ini tidak bisa diterjemahkan dalam suatu kekuatan politik yang mampu menarik simpati rakyat Aceh saat ini.

Kedua, pandangan ini memang sangat 'tidak cerdas,' ketika membandingkan manakala HAMAS di Palestina menang dalam Pemilu, kemudian mendatangkan 'kemudharatan' secara politik dari dunia international. Jika tesis ini diaplikasikan

pada konteks Aceh, jika GAM mampu mengendalikan Aceh, akan mendatangkan beberapa impak secara politik bagi Indonesia yang pada gilirannya memberikan pengaruh bagi Aceh.

Bagaimanapun, catatan merah GAM selama 3 dekade akan mengundang sejumlah kekhawatiran, ketika GAM mengendalikan pemerintahan di Aceh. Karena itu, pandangan bahwa konsentrasi GAM untuk Pilkada tahun 2009 harus dibaca sebagai pandangan cerdas. Maksudnya, jika GAM terlibat dalam Pilkada kali ini, nuansa 'curiga' dari Jakarta akan mempengaruhi situasi politik di Aceh. Dalam situasi seperti ini, keterlambatan pengesahan RUU PA agaknya merupakan rangkaian panjang dari upaya Jakarta membaca kekuatan dan pengaruh GAM saat ini di Aceh. Dengan begitu, ketika GAM mencabut 'pasangan' mereka adalah sebuah strategi yang cukup signifikan bagi Jakarta dan politisi lokal di Aceh.

Ketiga, tampaknya GAM masih belum 'percaya diri' untuk ikut aktif secara politik di Aceh, khususnya Pilkada. Asumsi ini tentu saja bukan ingin menjustifikasi bahwa 'pasangan' GAM, Nashiruddin bin Ahmed dan Muhammad Nazar, adalah kandidat yang akan mampu menarik massa bagi GAM. Tentu saja, 'jam terbang' Nazar di SIRA adalah catatan pinggir bagi masyarakat Aceh memilihnya dalam Pilkada mendatang. Namun demikian, 'romansa politik' GAM-SIRA tampaknya belum tepat untuk digulirkan pada publik Aceh saat ini. Dalam bahasa yang sederhana, GAM-SIRA juga selayaknya tidak hanya membaca kalkulasi politik, namun juga 'kalkusi keamanan' jika RUU PA tidak disahkan secepatnya.

Lebih konkret lagi, bandul politik GAM-SIRA akan mudah dibaca ketika RUU disahkan. Jadi, penetapan cagub dan cawagub adalah bukti dari '*trial error*' politik Aceh yang masih *instant*. Lebih jauh lagi, penarikan diri GAM dalam pilkada mendatang belum dapat dikatakan sebagai langkah final. Bisa jadi, GAM akan melebur dalam kekuatakan politik yang lebih formal atau sebaliknya. Demikian pula, jika GAM maju dalam pilkada mendatang, tampaknya kalkulasi konvensi tidak akan dilakukan lagi. Sebab, perhitungan politik dalam konvensi tidak begitu memberikan pengaruh yang signifikan dalam kalkulasi Pilkada. Karena itu, ketika konvensi GAM yang lalu, tidak sedikit yang kaget, ketika nama Nashiruddin bin Ahmed dan Muhammad Nazar mengungguli pasangan-pasangan lainnya yang tampaknya 'layak jual' ke publik.

Pembacaan ini sesungguhnya tidak menutup kemungkinan gebrakan GAM berikutnya untuk mengajukan calon yang mereka anggap betul-betul mampu menyerap massa. Dalam situasi seperti ini, tokoh-tokoh GAM yang selama ini berada di luar negeri, kemungkinan akan maju, tentu saja setelah mereka 'memiliki' KTP dan paspor Indonesia. Atau sebaliknya, tokoh-tokoh GAM selama ini yang

betul-betul akrab dengan rakyat akan dipasangkan dengan tokoh-tokoh yang dipandang sejalan dengan perjuangan politik GAM.

Di atas segala, irama dan gendang politik GAM di Aceh memang menarik untuk dicermati, terlebih lagi sejak mereka berani melakukan konvensi. Suatu tradisi yang pernah dilakukan oleh Golkar dalam sejarah politik Indonesia. Dalam hal ini, GAM selayaknya perlu banyak belajar bahwa terkadang 'pasangan' yang layak jual, belum tentu didapatkan dari konvensi. Demikian pula, GAM perlu membuka diri terhadap kekuatan-kekuatan politik lokal di Aceh. Sebab, bandul politik Aceh selalu dikendalikan oleh kelompok ormas dan tokoh-tokoh kharismatik yang tentu saja besinggungan dengan agama.

Akhirnya, bab ini hanya sekadar 'pembacaan dari luar' yang tentu saja tidak dapat dikatakan sebagai pandangan yang perlu dipertimbangkan. Namun, jika GAM mampu menyusun strategi politik yang dinamik dan demokratis, ini akan memberikan pendidikan yang cukup berharga bagi rakyat Aceh. Dengan bahasa yang lebih tegas, pendidikan politik bagi rakyat Aceh lebih mahal daripada hanya mengincar posisi orang nomor satu di Aceh. Dalam hal ini, GAM sudah memberikan suatu contoh yang amat berharga bagi dinamika politik di Aceh. ☙

BAB 33

"Kijang Innova" versi Edward Aspinnal

BARU-baru ini Edward Aspinnal, salah seorang peneliti dari *Australian National University* (ANU), menerbitkan hasil penelitiannya selama sepuluh tahun tentang Aceh. Dimata peneliti di Aceh dan luar negeri, nama Edward memang cukup terkenal. Bahkan beberapa muridnya sekarang masih "menyisir" Aceh dengan berbagai topik penelitian. Judul tulisan yang terbit pada jurnal terkemuka di Amerika Serikat yaitu *Indonesia* edisi April 2009 adalah *Combatants to Contractors: The Political Economy of Peace in Aceh* (Kombatan ke Kontraktor: Politik Ekonomi dalam Perdamain di Aceh).[1]

Dibandingkan beberapa peneliti asing yang lebih senior, seperti Anthony Reid, Damien Kingsbury, J. Siapno, John R. Bowen, dan Mark Durie, nama Edward Aspinnal memang tergolong masih baru. Karena itu, saya ingin mengangkat artikelnya untuk didiskusikan, karena perhatian Edward terhadap Aceh memang sangat luar biasa. Khususnya jika kita bahwa beberapa tulisannya mengenai Aceh sejak tahun 2000-an. Tulisan ini sengaja saya paparkan di dalam bab ini, mengingat pada tahun 2007, ada tulisan termasuk dari saya yang dimuat di dalam harian ini

[1] Aspinnall, "Combatants to Contractors: The Political Economy of Peace in Aceh." Sebagian dari tulisan ini tersebut dapat juga dibaca dalam Aspinnall, *Islam and Nation: Separatist in Aceh, Indonesia*.

tentang potret kehidupan para mantan kombatan dengan metafor hasil perjuangan mereka seperti berhenti di "Kijang Innova."

Agaknya Edward malah berani memaparkan perubahan nasib mantan kombatan GAM ini dengan amat meyakinkan melebihi dari "Kijang Innova". Apa yang menarik di sini, Edward dan juga Damien Kingsbury[2] dikenal dekat dengan sejumlah petinggi GAM. Di dalam hal ini, Edward telah berhasil "membuka" bagaimana dinamika mantan kombatan yang beberapa dari mereka menjadi kontraktor yang sukses. Edward sendiri membuka tulisannya dengan memaparkan bagaimana kemegahan rumah Darwis Jeunieb. Dalam artikel tersebut, Edward secara gamblang menulis bahwa Darwis Jeunieb telah menjadi seorang enterprener dan kontraktor yang sangat sukses. Edward menulis: "*In the past, Darwis had expounded a vision of remorseless struggle against the Indonesian state. Now he said he was more concerned with ensuring this his formers followers had jobs and did not slide toward lives of violent crime*."

Saya memang agak terkejut membaca laporan awal Edward ini, sebab apa yang bisa dibayangkan jika artikel Edward ini dibaca sepuluh tahun mendatang oleh generasi muda Aceh. Boleh jadi, artikel ini menjadi "bom waktu" di kemudian hari, sebab jika tidak disikapi dengan bijak. Boleh jadih generasi muda Aceh mendatang, akan melakukan 'penilaian' tersendiri terhadap pola tingkah laku beberapa mantan kombatan GAM. Bahasa yang cukup sederhana untuk membahasakan "bom waktu" adalah *walanca walance awai ta pubut du doe tapike.* "*Seunut*" yang dipaparkan oleh Edward kali ini cukup menyentak, walaupun hasil penelitian ini tidak akan didistribusikan kepada para mantan petinggi GAM di Aceh.

Di dalam artikel ini, Edward juga menyajikan bagaimana 'cara-cara' mantan kombatan menguasai proyek di Aceh. Edward menyebutkan bahwa ada enam cara di mana mantan kombatan GAM mendapatkan penghasilan selama pasca MOU Helnsinki. Pertama, banyak mantan kombatan yang kembali pada aktivitas ekonomi murni. Seperti menjadi pekerja atau penjual di beberapa sektor aktivitas ekonomi. Kedua, bantuan langsung. Harus diakui, selama pasca MOU, beberapa mantan kombatan GAM banyak mendapatkan bantuan dengan berbagai program untuk mengembalikan mereka pada masyarakat. Ketiga, penglibatan anggotan GAM di dalam upaya rehab rekon, seperti di dalam BRR. Keempat, pajak nanggroe atau uang keamanan. Di sini memang Edward berhasil memaparkan bagaimana

[2] Lihat karya Damien, Damien Kingsbury, ed. *Violence in between Conflict and Security in Archipelagic Southeast Asia* (Victoria: Monash University Press,2005). Damien Kingsbury, "The Free Aceh Movement: Islam and Democratisation," *Journal of Contemporary Asia* 37, no. 2 (2007).

tingkah laku mantan kombatan GAM di dalam mendapatkan berbagai pendapatan di lapangan, melalui pajak nanggroe atau uang keamanan, untuk memuluskan proyek-proyek yang tengah berlangsung di daerah. Kelima, bisnis wiraswasta. Di dalam bagian ini, Edward menyebutkan bagaimana kesuksesan perusahaan Pulo Gadeng milik Muzakir Manaf dalam berbagai proyek. Keenam, melalui jaringan GAM di mana mereka mendapatkan uang atau pemasukan dari beberapa tokoh GAM yang masuk ke dalam wilayah pemerintahan.

Dari keenam hal di atas, Edward lebih menitik beratkan pada aspek perilaku "kontraktor" dari GAM. Edward juga melalui beberapa 'wawancara rahasia' berhasil memaparkan bagaimana pihak kombatan GAM melakukan upaya-upaya untuk mendapatkan proyek di Aceh selama pasca MOU Helsinki. Perangai kontraktor dari GAM ini, digambarkan oleh Edward sebagai berikut: pertama, mereka hanya mendapatkan fee dari beberapa kontraktor yang sudah mapan, dan mereka lebih menjalankan aktivitas konstruksi yang menurut Edward lebih banyak "*low-level and low-skilled construction work, usually in conjunction with better established players*." Menurut saya, ini merupakan 'rapor merah' bagi sebagian mantan anggota GAM. Karena tidak semua anggota GAM yang mendapatkan proyek selama ini.

Di dalam konteks ini, publikasi Edward ini sangat menarik, sebab dia memang memiliki akses dengan para petinggi GAM. Dalam sejarah kepenelitian di Aceh, peneliti asing, termasuk jurnalis memang memang lebih banyak dekat dengan kombatan seperti Michelle Ann Miller dan William Nessen. Namun, terkadang "curhat" pihak GAM ini bisa mencoreng wajah dan sejarah GAM di kemudian hari. Saat ini, upaya untuk menulis tentang Aceh memang sedang digalakkan di luar negeri. Di dalam ilmu sosial "curhat" bisa menjadi 'senjata makan tuan'. Dibandingkan beberapa tulisan Edward lainnya mengenai Aceh, seperti *The Aceh Peace Process* bersama Harold Crouch (2003) dan *The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?* (2005),[3] tulisan mengenai perilaku mantan kombatan GAM kali ini perlu mendapat perhatian bersama oleh kita, minimal oleh para peneliti muda Aceh harus bisa melihat bagaimana isi dan dampak dari tulisan tersebut, tidak hanya untuk hari ini, namun juga bagi wajah Aceh, di tingkat nasional maupun internasional.

Tulisan Edward ini memang tidak boleh disambut melalui sikap yang emosional. Sebab, di dalam ilmu sosial, setiap hasil riset yang ditanggapi secara emosional akan menghasilkan sikap kontra produktif, yang kadang malah melambungkan nama

[3] Edward Aspinnall, "The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?," in *Policy Studies* (Washington: East-West Center Washington, 2005).

peneliti tersebut. Karena itu, peringatan orang tua Aceh mengenai *walanca walance* memang sangat tepat untuk menyampaikan "curhat." Sebab siapapun bisa menulis tentang Aceh melalui berbagai sudut pandang. Dunia kepenelitian adalah dunia yang paling berkembang di bawah langit ini. Hanya saja, terkadang penelitian-penelitian yang bersifat "curhat" dan "apa adanya" bisa menjadi "bom waktu" bagi mereka yang tidak memahami posisi ilmu sosial di dalam kehidupan manusia. Tentu bukan tempatnya untuk menyatakan siapa yang bertanggung jawab di kemudian hari, akibat dari tulisan Edward ini.

Apa yang bisa kita lakukan adalah intropeksi diri, bahwa apapun yang kita lakukan di Aceh ada yang memonitornya. Mereka akan menulis dan menyajikan kepada generasi mereka dan generasi muda Aceh berikutnya. Intropeksi diri ini memang susah, sebab wilayah kesadaran kita tidak bisa bersamaan dengan wilayah kebutuhan dan kepentingan kita sehari-hari. Honor peneliti di luar negeri, untuk beberapa penelitian mereka bisa membeli satu desa di Aceh. Sejatinya, bagi kita rakyat Aceh kebutuhan dan kepentingan di dalam hidup ini harus diseimbangkan. Jangan uang untuk membangun desa dan daerah menjadi "bahan tertawaan" di dalam seminar-seminar di luar negeri. Karena itu saya selalu mengatakan Aceh adalah sebuah laboraturium sosial bagi dunia internasional. Kita hanya seperti "ikan yang diberi makan di dalam aquarium besar."

Akhirnya, bab ini bisa menjadi diskusi dan masukan bagi sebagian kelompok masyarakat Aceh saat ini. Setiap detak kehidupan kita selalu ada yang memantau. Kita terkadang tidak takut pada "pantauan langit", karena itu kadang terjebak pada "pantauan bumi" yang malah menyebabkan kita sendiri dipermalukan di depan generasi sendiri. Mudah-mudahan, filsafat *walanca walance* menjadi perhatian kita semua, tidak terkecuali oleh mantan kombatan GAM yang menjadi objek tulisan Edward. Karena itu, sering-seringlah menatap ke langit supaya kita berhati-hati akibat dari abai terhadap "pantauan langit." ☙

BAB 34

Memahami Isu Terorisme di Aceh

BARU-baru ini Aceh kembali dikejutkan dengan penangkapan beberapa teroris di Aceh Besar, Jantho. Walaupun sampai sekarang tidak ada pernyataan resmi mengenai apakah benar ada teroris di Aceh atau tidak oleh aparat terkait, namun beberapa pakar terorisme sudah mulai melemparkan pandangan mereka. Ada pakar yang menyebutkan belum tentu mereka yang ditangkap di Jantho adalah teroris. Ada pula ahli terorisme yang mengatakan mereka adalah bagian dari jaringan terorisme di Indonesia.

Agaknya, terlepas dari apakah benar ada dan tidaknya teroris di Aceh, saya lebih tertarik melihat apakah Aceh benar menjadi basis jaringan terorisme? Tentu saja jawabannya sangat sulit dijawab, mengingat terorisme itu seperti permainan *pet-pet nyet* (petak umpet). Karena di situ ada berbagai kepentingan dan keinginan untuk terus membudidayakan sel terorisme sepanjang masa, terutama di Asia Tenggara. Di Malaysia sendiri, ada beberapa orang Aceh yang telah lama berdomisili di negara tetangga tersebut menjadi perekrut anak muda yang akan dikirim ke Afghanistan pada saat Perang Dingin untuk menghancurkan Uni Sovyet. Konon di Afganistan dan Pakistan, budidaya terorisme dijalankan yang mendapat dukungan penuh

dari CIA.[1] Mimpi anak muda untuk menjadi mujahid adalah salah satu ”vitamin” dalam budidaya sel terorisme.[2]

Harus diakui pula bahwa, menurut mantan petinggi Jemaah Islamiyyah, Nasir Abas,[3] sejak Abdullah Sungkar meninggal pada tanggal 23 Oktober 1999, maka arah perjuangan JI telah terpecah ada yang masih berada di bawah tanah yang tidak melakukan aksi apapun dan ada yang terus melakukan aksi pemboman di sana sini. Karena itu, amat sukar untuk menjelaskan jaringan teroris ini, kecuali ada data-data yang valid. Terkait dengan aktivitas terorisme di Aceh, memang belum ada data yang dipublikasikan secara luas, kecuali ketika RI menuduh GAM sebagai organisasi teroris pada tahun 2003, namun tidak mendapat ”restu” dari pihak internasional.[4] Selain itu, ada beberapa anggota aktivis Aceh yang diduga terlibat di dalam jaringan terorisme di Asia Tenggara seperti yang pernah dilaporkan oleh ICG (International Crisis Group). Namun teori tersebut terkadang tidak sepenuhnya didukung oleh data lapangan, sebab tidak ada aksi terorisme (misalnya bom bunuh diri atau aksi pemboman terhadap aset asing) di Aceh selama sepuluh tahun terakhir, kecuali dampak bagian dari beberapa operasi militer yang berakhir tahun 2005.

Terkait dengan kedatangan teroris ke Aceh, memang sudah muncul setelah Tsunami. Mereka melebur dalam masyarakat Aceh dan terus memanfaatkan situasi Tsunami dan perdamaian di Aceh. Salah satu kata kunci di dalam tubuh organisasi JI adalah *tansiq bayn al-jama'ah*. Jadi, sel teroris ini menyatu dengan masyarakat, ibarat operasi penggalangan, namun mereka tidak akan saling memberitahukan asal usul mereka yang asli. Setiap sel akan bersatu jika punya kepentingan yang sama. Kepentingan yang sama inilah yang dikelola dan kemudian masuk di dalam proses budidaya teroris seperti yang terjadi di Jantho baru-baru ini.

Pada prinsipnya, *tansiq bainal al-jama'ah* berada satu atap di bawah operasi intelijen (*jasus*) yang berada di bawah *takwin al-quwwah*, mulai dari pengrekrutan hingga pada operasi tempur yakni melakukan aksi-aksi terorisme. Di dalam PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah al-Islamiyyah) misalnya disebutkan bahwa “operasi pembangunan kekuatan merupakan suatu proses panjang meliputi

---

[1] John Prados, "Note on the Cia's Secret War in Afghanistan," *the Journal of American History* 89,2(2002). Dreyfuss, *Devil's Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam*.

[2] Jessica Stern, *Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill* (New York: Harper Collins, 2005).

[3] Nasir Abas, *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Ketua Ji* (Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009).

[4] Bustamam-Ahmad, *Wajah Baru Islam Di Indonesia*.

pembinaan potensi kekuatan sampai dengan penggalian potensi kekuatan menjadi kekuatan yang efektif dan siap digunakan dalam operasi penggunaan dan operasi tempur." Di sinilah pembangunan kekuatan digunakan pada lapis terluar yaitu *tansiq bain al- jama'ah*. Setelah operasi ini baru kemudian dilanjutkan dengan *istikhdamul quwwah* yang berupa da'wah dan jihad. Setelah semuanya berjalan dengan baik, maka operasi dilanjutkan dengan *tansiq bain duwal* yang merupakan operasi lintas batas negara yang bersifat transnasional.

Dalam operasi *tansiq* ini, anggota inti berada di tengah, kemudian mereka "dilindungi" oleh tiga kelompok yaitu: "umat pendukung," "umat simpatisan," dan "umat netral".[5] Jadi, dapat dipastikan betapa tertutupnya sosok teroris, sehingga hanya mereka yang betul-betul masuk ke dalam organisasi tersebut yang bisa mengenali satu sama lain. Namun, tradisi yang paling kerap mereka lakukan adalah dengan memakai nama palsu dan asal usul yang palsu. Inilah kadang-kadang yang mengagetkan masyarakat jika ada satu kelompok kecil yang ditangkap oleh aparat keamanan. Karena keseharian mereka sangat saleh, namun tujuan mereka boleh jadi salah, karena membahayakan nyawa banyak orang. Selain itu, seperti yang dipraktekkan di pulau Jawa, mereka pun kerap membuka usaha-usaha "menolong umat" (dikenal dengan proses *tamwil*) agar mampu menutup jati diri mereka yang sebenarnya. Bahkan tidak jarang di desa pelosok terkadang sudah ada tempat pengobatan tradisional dan yayasan "siluman" yang merupakan bagian dari operasi *takwin al-jama'ah* dan *tarbiyyah.* Inilah pola *tansiq* yang sampai saat ini masih sulit menghentikan pengembang-biakkan sel terorisme di Indonesia. Konon, menurut pedoman JI, ujung operasi ini penegakan khilafah Islamiyyah. Jadi, siapapun yang punya keinginan terhadap ini, dia akan dimasukkan ke dalam proses "*tansiq*" dengan memanfaat segala kelebihan yang dimiliki oleh anggota tersebut.

Pada saat yang sama, di Aceh juga sudah muncul organisasi sosial keagamaan yang mendapat "restu" negara untuk mengembang biakkan organisasi mereka seantero Nusantara yang mirip dengan operasi JI. Mereka disukai karena bisa merekrut anggota di mana pun dan bisa memberikan latihan militer kepada anggota mereka dengan alasan jihad di Palestina. Harian *Serambi Indonesia* pernah menampakkan bagaimana latihan militer anggota organisasi tersebut di salah satu kawasan Aceh. Bahkan beberapa ulama lokal Aceh sempat di undang ke Jakarta untuk mengikuti berbagai musyawarah mereka. Karena itu, melihat aksi terorisme di Aceh tidak serta merta harus diklaim ini JI atau bukan, namun perlu penjelasan

[5] Abas, *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Ketua Ji.*97.

yang cukup komprehensif. Tentu saja, kita tidak menginginkan ada falsafah ”jeruk makan jeruk” di Aceh. Karena di dalam sejarah Indonesia, tidak jarang kelompok Islam Radikal sering dimanfaatkan untuk mengelola sebuah konflik.[6]

Salah satu tempat yang paling disukai sebagai basis militer teroris adalah desa yang dekat dengan pergunungan dan sungai. Kawasan seperti ini sangat mudah dijumpai di Aceh, termasuk di kawasan Jantho yang terhubung dengan Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Aceh Pidie. Namun boleh jadi ada di beberapa tempat lain yang masih sangat dirahasiakan, misalnya di areal perbatasan pegunungan di Aceh Tengah-Aceh Jeumpa- Aceh Utara. Namun, kawasan Jantho memiliki nilai yang cukup strategis, karena budidaya teroris ini datang dari luar Aceh, di mana sedikit banyak beberapa anggota baru punya hubungan emosional dengan beberapa warga Jantho yang berasal dari luar Aceh. Karena itu, boleh jadi mereka juga mengembangbiakkan sel mereka di kawasan Aceh Timur dan Aceh Tamiang sebagai kawasan penghubung antara Aceh dengan Sumatera Utara.

Adapun kota penghubung yang paling disukai oleh teroris adalah kota seperti Bireuen yang menjadi pintu gerbang ke seluruh penjuru areal pegunungan di Aceh. Karena itu, sejak tahun 2005 upaya para ”ustaz” sudah melakukan aksi *tansiq bayn al-jama'ah* secara rapi. Tentu saja pola ini bukan aksi terorisme, sebab dalam organisasi teroris proses penguatan organisasi memerlukan masa yang bertahun-tahun sampai akhir menjadi *qaidah aminah.* Dalam hal ini, Aceh memiliki nilai strategis yang cukup menjanjikan karena masuk di dalam kategori mantiqi 2 dalam struktur organisasi JI. Terlebih jika mereka mampu mengubah Aceh di dalam masa 20 tahun menjadi qaidah aminah yang cukup kuat. Mereka tentu saja memanfaatkan situasi damai dan boleh jadi melempar kesalahan kepada GAM, jika ketahuan memiliki senjata.

Karena itu, amat tidak mengherankan jika operasi penumpasan budidaya sel terorisme ini diambil alih oleh Mabes POLRI. Sebab, selama ini setiap ada aksi penumpasan budidaya terorisme selalu dikendalikan oleh pihak Jakarta dengan dibantu aparat terkait pada tingkat daerah. Hanya saja yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai masyarakat sipil menjadi korban seperti yang terjadi di Jantho baru-baru ini. Di samping itu, rakyat perlu diberitahukan bagaimana dampak dari aksi terorisme atas nama agama ini pada generasi muda saat ini.

Akhirnya, kajian ini hanya upaya kecil untuk membuka diskusi bahwa di manapun sel teroris bisa berkembang, termasuk di Aceh. Hanya saja, dalam konteks Aceh, perlu kehatian-hatian ganda untuk menghentikan sel teroris ini.

---

[6] Ken Conboy, *Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service* (Jakarta: Equinox, 2004).

Sebab emosi dan keputus-asaan rakyat bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu yang berujung pada munculnya konflik baru di Aceh. Karena itu, ulama dan umara perlu berdiri di garda depan agar emosi keagamaan rakyat Aceh tidak dijadikan sebagai senjata oleh kelompok tertentu. Tentu saja kita tidak ingin situasi damai pupus karena persoalan teroris ini.

Teroris di Pulau Jawa

Tanggal 17 Juli 2009 adalah hari yang cukup mengejutkan bagi rakyat Indonesia. Setelah hampir 4 tahun, tidak ada teror bom di Indonesia, tepat pada hari Jum'at jam 7 pada menit 47, bom meledak di dua hotel mewah (J.W. Marriot dan Ritz-Carlton) di Jakarta. Setelah *shalât Jum'at*, Presiden SBY langsung memberikan keterangan pers yang disambut pro dan kontra terhadap beberapa pernyataanya, khususnya adanya upaya untuk menggagalkan Pilpres dan dirinya menjadi target teroris. Walapun sebenarnya selama sepuluh tahun terakhir, target bom adalah warga asing dan simbol-simbol Amerika dan Yahudi.

Dalam bagian ini saya tidak mengomentari keterangan SBY, melainkan mencoba mengajak pembaca untuk memahami bagaimana sesungguhnya jejaring jaringan teroris di Indonesia dan di mana posisi kita sebagai rakyat kecil. Walaupun kita sedang diarahkan pada satu organisasi yaitu Jema'ah Islamiyyah yang didirikan pada tahun 1990-an dan memiliki kaitan yang sangat kuat terhadap al-Qaeda, saya masih melihat ada ruang lain bagi petakwilan aksi terorisme di Indonesia. Ruang inilah yang selalu mengacaukan pikiran saya yaitu hampir semua pelaku bom bunuh diri dikenal baik di kalangan keluarga dan masyarakat setempat. Mereka dikenal santun dan tidak menyiratkan bahwa di dalam pikiran mereka untuk bertemu Tuhan melalui cara meledakkan diri sendiri.

Sebenarnya, di dalam organisasi teroris, ada istilah yang dikenal dengan *tansiq baina al-jama'ah*. Ini yang menjadi kata kunci mengapa kita tidak mengenal teroris di sekitar mereka. Kata kunci ini bermaksud untuk mengikat kekuatan tanpa perlu mengetahui asal usul anggota teroris tersebut dan mereka melebur ke dalam masyarakat biasa. Karenanya, siapapun yang sudah masuk ke dalam organisasi ini, maka dia sudah menjadi bagian terkecil (sel). *Tansiq* kemudian tidak bertujuan untuk saling kenal, dan di dalam latihan-latihan teroris selalu memakai nama palsu dan nama-nama tersebut diupayakan untuk menghilangkan jati diri mereka yang asli. Jadi, kata kunci inilah yang kemudian menyebabkan banyak organisasi intelijen yang bermain di dalamnya, sehingga memunculkan berbagai penafsiran jika ada aksi terorisme.

Misalnya, ada yang menyebutkan bahwa pelaku adalah Jema'ah Islamiyyah.

Lalu di dalam televisi kita disuguhkan pakar yang ahli untuk organisasi ini. Minimal dia punya informasi tentang JI dan sanggup memetakan kepada publik secara meyakinkan. Ada pula yang pakar tentang NII/DI/TII di mana dia bisa menjelaskan duduk perkara dan lalu kita pun merasakan ini ada kaitannya dengan aksi terorisme.[7] Yang paling lazim adalah keterlibatan organisasi internasional yang mendalangi dan mendanai aksi terorisme di seluruh dunia. Namun, kita juga tidak boleh lupa pada beberapa organisasi intelijen dunia yang memiliki badan khusus yang mengurusi persoalan kontra intelijen yang kadang berwajah teroris juga.

Jadi, dari beberapa gambaran di atas, di mana kita hendak meletakkan posisi pelaku bom bunuh diri, minimal di Jakarta minggu lalu? Cara yang paling sehat adalah melihat adanya perubahan dari proses *tansiq* dan pencucian diri ke *tansiq* informasi, sehingga di sinilah letak kelemahan intelijen kita. Biasanya *tansiq bain al-jama'ah* mudah dideteksi, minimal oleh agen-agen intelijen, namun tidak pada *tansiq* informasi. Maksudnya, semua sayap intelijen yang mengurusi persoalan terorisme sudah pasti memiliki orang, baik di dalam organisasi teroris maupun di luar sebagai tukang monitor. Lalu informasi ini diberikan kepada yang berhak. Uniknya, operasi seperti serupa juga dikenal di dalam organisasi terorisme.

Seperti Jema'ah Islamiyyah, *tansiq bainal al-jama'ah* berada satu atap di bawah operasi intelijen, mulai dari pengrekrutan hingga pada operasi tempur yakni melakukan aksi-aksi teroris. Di dalam PUPJI (Pedoman Umum Perjuangan Al-Jama'ah al-Islamiyyah) misalnya disebutkan bahwa "operasi pembangunan kekuatan merupakan uatu proses panjang meliputi pembinaan potensi kekuatan sampai dengan penggalian potensi kekuatan menjadi kekuatan yang efektif dan siap digunakan dalam operasi penggunaan dan operasi tempur." Di sinilah pembangunan kekuatan digunakan pada lapis terluar yaitu *tansiq bain al-jama'ah*.

Jadi kita tidak usah heran jika di sekitar kita muncul 'orang baik' dan 'santun' melalui citra yang cukup sempurna. Tentu saja, masyarakat awam susah menebak siapa saja yang sudah masuk ke dalam proses *tansiq* ini. Karena itu, yang mengetahui siapa saja yang menjadi target operasi adalah orang yang memonitor. Dia juga bisa berupa seperti orang yang 'santun' dan kadang sangat baik. Karena itu, sepanjang penelitian tentang persoalan teroris, saya kemudian berkesimpulan bahwa persoalan teroris adalah semata-mata permainan intelijen dan tidak ada kait

[7] Greg Barton, *Indonesia's Struggle: Jemaah Islamiyah and the Soul of Islam* (Sidney: University of New South Wales Press, 2004). Greg Fealy, "Half a Century of Violent Jihad in Indonesia: A Historical and Ideological Comparison of Darul Islam and Jema'ah Islamiyah," in *Islamic Terrorism in Indonesia: Myths and Realities*, ed. Marika Vicziany and David Wright-Neville (Clayton: Monash Asia Institute, 2005).

mengait dengan persoalan ajaran agama manapun di dunia ini.

Intelijen yang dimaksud bukanlah intelijen seperti sebuah organisasi yang berbakti kepada negara atau institusi yang mendanai mereka. Namun lebih pada permainan pikiran manusia, lalu dikaitkan dengan siapa yang harus menang dan kalah di dalam setiap permainan ini. Para pelaku bom selalu mereka yang baik-baik dan 'sopan' namun karena telah mengalami proses tansiq, maka dia mampu dan tidak sanggup berpikir rasional, sehingga tubuhnya adalah sumbangan bagi ideologi organisasi mereka.

Dalam konteks ini, aksi terorisme di Indonesia yang sudah berlangsung 10 tahun terakhir selalu melibatkan orang-orang kecil di pedesaan. Mereka yang tidak paham peta geo-politik dunia dan tidak mengerti bagaimana sejarah kekerasan di belahan dunia manapun. Mereka polos dan bahkan tidak pernah menduga bisa menjadi sebuah jaringan organisasi terorisme internasional. Lalu, kita kaget ketika melihat bahwa kadang tetangga kita adalah pelaku bom bunuh diri dan sepotong wajah mereka tampil di televisi.

Yang aneh, kenapa bom-bom seperti ini hanya terjadi di Indonesia (Jakarta dan Bali), tidak di Malaysia, Singapura, dan Brunei. Di Indonesia juga kadang kita bertanya mengapa beberapa tersangka teroris dilepascan setelah ditangkap. Kita juga kadang bertanya kemana Hambali dan Omar al-Farouq yang pernah menjadi target operasi pada awal-awal tahun 2000-an. Di Amerika Serikat, sebuah negeri yang sedang berperang melawan teroris, juga mengalami persoalan yang cukup krusial seperti adanya operasi intelijen yang 'menghalalkan' secara cara. Mereka bebas melakukan pembunuhan di beberapa negara target (*Tempo*, 26 Juli 2009: 123-124).Apakah ini bukan aksi terorisme juga? Padahal tidak sedikit organisasi anti-teror adalah hasil didikan beberapa organisasi militer Amerika Serikat. Dalam situasi seperti ini, kita menjadi sangat kecil dan kadang terlalu bodoh untuk sikap saling curiga pada sesama tetangga kita.

Jadi, sebagai rakyat kecil kita hanya bisa berdoa semoga permainan ini segera berhenti. Karena aksi terorisme pada hakikatnya adalah memanfaatkan kebodohan rakyat kecil yang tidak mengerti akan situasi yang sesungguhnya dunia ini. Dalam aksi teroris ini, ada negara yang mengambil keuntungan dan tertimpa kerugian akibat dari ulah 'orang kecil dari desa' yang bermimpi jadi 'syuhada.' Karena itu, saya selalu berpendapat aksi terorisme bukan hanya persoalan keamanan negara, melainkan juga sejauh mana tingkat pendidikan warga negara terhadap apa yang sedang terjadi di dunia ini. Rakyat harus diperkayakan dengan pemahaman ini, supaya tidak muncul sikap saling curiga terhadap sesama mereka, khususnya dalam hal agama, lalu ada pihak yang beruntung di dalam kemelut ini.

Dengan demikian, kajian tentang terorisme memang rumit dan pelik. Semakin kita masuk ke dalamnya, semakin kita sadar bahwa kita begitu kerdil di bawah sebuah kekuatan teror di bawah langit ini. Dulu, saat teror bom di Indonesia, nama Hambali mencuat, lalu Omar al-Farouq yang keduanya entah di mana. Setelah itu muncul nama Abu Bakar Baasyir, Dr. Azhari, dan Nordin Bin Top. Abu Bakar Baasyir dibebaskan karena tidak terbukti, Dr. Azhari tewas ditembak. Lalu Encik Nordin bin Top yang menjadi target utama berikut dengan anak buahnya yang masih hidup bebas di Indonesia. Agaknya rakyat Indonesia ingin melihat target utama mati di Indonesia, ketimbang menghilang seperti Hambali dan Omar al-Farouq. Akan tetapi setelah itu, mungkin akan muncul nama lain, seiring dengan permainan intelijen ini.

Akhirnya, saya hanya berusaha membuka mata kita pada permainan intelijen ini, supaya kita bisa mengaja ahli dan keluarga kita. Dua hal yang harus dipahami di sini adalah Allāh mengatakan 'jagalah keluarga kamu dari api neraka' dan 'jangan berbuat fitnah, karena dia lebih kejam dari pembunuhan.' Agaknya inilah gagasan utama yang digunakan oleh penyebar teror di bawah langit ini, bahwa umat Islâm tidak peduli dengan keluarga dan tidak ingat akan bahaya fitnah. Sedangkah para pelaku teror malah digemari merujuk pada ayat yang menyuruh berjihad di jalan Allah, abai pada peringatan Allāh di atas, sehingga yang terjadi adalah apa yang kita lihat dan rasakan pada hari ini.

Mazhab Pemikiran Studi Terorisme di Indonesia

Dalam bagian ini, ingin dilanjutkan diskusi mengenai jika ada sesuatu yang berhubungan dengan terorisme, pasti ujungnya adalah Amerika atau CIA. Bahkan tidak jarang sering dihubungkan dengan Israel. Inti bagian ini merupakan diskusi lanjutan terhadap artikel yang ditulis oleh Nasir Djamil (ND) tentang Abu Bakar Ba'asyir (Proyek Kontra-Terorisme) (*Serambi Indonesia*, 23 Agustus 2010).

Sebenarnya mazhab pemikiran telah berkembang di kalangan gerakan Islam di Indonesia. Alhasil, dalam setiap aksi-aksi terorisme, selalu diarahkan pada wacana Amerika menguasai dunia Islam di Indonesia. Terkait dengan penangkapan Abu Bakar Ba'asyir (ABB) juga dianggap sebagai pesanan Amerika. Mazhab pemikiran ini cukup berhasil "menenangkan" dan "menggiring" masyarakat pada musuh bersama yaitu Amerika sebagai simbol Barat versus Islam.

Salah satu kelebihan mazhab di atas adalah mengaitkannya dengan Noam Chomsky yang cukup keras dalam mengkritik kebijakan Amerika terhadap Islam. Sebenarnya ND bisa juga merujuk pada salah seorang penulis yang kurang lebih sama dengan Chomsky yaitu Jared Israel, yang sejak tahun 2001 sangat aktif

mempropagandakan teori konspirasi terhadap isu terorisme di Amerika. Atau, ND juga bisa merujuk Robert Dreyfuss yang selalu berargumen bahwa lahirnya gerakan Islam garis geras di Timur Tengah adalah bukti kedigdayaan pihak Amerik dan Israel dalam operasi kontra-intelijen.[8]

Dengan begitu, agak sulit untuk membuktikan asumsi ND keliru terhadap penangkapan ABB dan "serba Amerika". Hal ini mungkin karena latar belakang ND yakni gerakan Islam dan posisi ND yang dekat dengan isu-isu pertahanan, hukum dan keamanan yaitu Komisi III DPR-RI. Hanya saja, ketika peristiwa Jalin pada bulan Februari 2010, salah seorang senator Aceh, Farhan. Hamid malah bertemu dengan ABB untuk "silaturrahmi" mengenai isu teroris di Aceh. Farhan juga berada di Jantho ketika dia ingin mengklarifikasi terkait dengan latihan kelompok terorisme di desa Jalin. Farhan, dengan begitu, boleh jadi mampu menjelaskan apakah ABB terkait dengan gerakan terorisme di Aceh. Jadi, publik punya pencerahan yang beda dari wacana yang dikedepankan oleh ND.

Mengapa ABB begitu penting dalam sel terorisme di Indonesia? Dalam gerakan terorisme di Aceh pasca-Tsunami, nama ABB jarang sekali muncul. Yang ada adalah sekelompok jaringan Solo yang masuk ke Aceh yang melebarkan sayap gerakan di Aceh melalui operasi penggalangan untuk mendapatkan simpati dari rakyat Aceh. Karena itu, tidak mengejutkan dari beberapa nama dan wajah yang muncul saat peristiwa teroris di Aceh, mereka adalah "tamu" yang telah disediakan kelompok tahun 2005. Sayang, pemerintah Aceh sendiri tidak punya program dalam menghadapi persoalan ini secara komprehensif.[9]

Harus diakui bahwa tokoh sekaliber ABB tahu akan keberadaan jaringan teroris di Aceh. Dalam studi terorisme, istilah "tahu" itu punya banyak makna. Dalam studi ini, kerap dianggap bahwa "tahu" belum tentu terlibat. Misalnya salah seorang tokoh lokal menandaskan bahwa beberapa yang ditangkap di Aceh adalah *aneuk miet geutanyoe* (anak murid kita), namun mereka salah jalan dalam memaknai jihad. Mereka adalah sudah lama berada di Aceh dan punya hubungan dengan jaringan gerakan keagamaan di propinsi ini. Dalam beberapa hal tertentu, nama ABB kerap muncul sebagai tokoh yang sangat dihormati dan dipandang sebagai panutan. Dalam hal ini, komunikasi dan silaturrahmi Solo – Aceh kerap terjadi untuk membangun generasi baru di Indonesia.

Namun demikian, harus dibedakan antara ABB "tahu" bahwa ada terorisme di Aceh dengan "aksi" terorisme itu sendiri. Biasanya, ABB ditangkap ketika dia

---

[8] Dreyfuss, *Devil's Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam*.

[9] Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Aceh Bukan Target Operasi," *KONTRAS*, March 18-24 2010.

”tahu” yang bermakna terlibat, serta terdapat ”aksi” terorisme. Namun, untuk membuktikan dia terlibat atau tidak, pengadilanlah yang memutuskannya. Jika memang ABB pesanan Amerika, maka sudah sejak tahun 2001, dia bisa diekstradisikan ke Amerika. Namun, ABB sendiri pernah berdakwah sampai ke luar negeri setelah pulang ke Indonesia, namun pihak Amerika sekali tidak pernah menangkapnya. Hal yang berbeda dengan kasus Omar al-Faruq dan Hambali.[10]

Karena itu, dalam membaca peta terorisme di tanah air, sebenarnya ND juga harus mampu melihat secara komprehensif, tidak hanya ”serba Amerika dan CIA.” Apa yang ditulisnya dalam *Serambi Indonesia* persis sebagai sebuah upaya kontra-intelijen yang marak saat ini. Mazhab ini memang dikenal dipelopori oleh Z.A. Maulani.[11] Di era Orde Baru, kelompok-kelompok Islam garis keras malah disatukan dalam sebuah upaya kepentingan negara, misalnya Komando Jihad.[12] Tentu ND harus secara jeli melihat ABB dalan peta gerakan Islam di Indonesia.

Tentu saja ABB tidak bisa begitu saja diletakkan dalam konteks di atas. Namun ada mazhab lain yang kerap muncul yaitu Mazhab Sidney Jones.[13] Mazhab ini menguraikan tali temali anggota terorisme, tidak hanya berdasarkan dari data intelijen, namun juga dari hasil-hasil BAP anggota teroris yang ditangkap oleh aparat keamanan. Namun, mazhab ini hanya ingin menjelaskan bahwa ”memang ada teroris di Indonesia” namun ABB tetap dianggap tidak begitu penting. Dalam wacana terorisme, Mazhab Maulani dan Mazhab Sidney biasanya berkembang secara pesat. Karena itu, alur pemikiran kedua mazhab ini pun bisa ditebak

---

[10] Conboy, *Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service*.

[11] ZA Maulani, "Hantu Jama'ah Islamiyah," *Hidayatullah* 2003; ZA Maulani, "Teror Dan Fitnah Itu Terungkap Sudah," *PANJIMAS*, September 2003; ZA Maulani, "Terorisme, Amerika, Dan Bom Bali," in *Terorisme & Konspirasi Anti Islam*, ed. Abduh Zulfidar Akaha (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002).

[12] Nur Khalik Ridwan, *Regenerasi Nii: Membedah Jaringan Islam Jihadi Di Indonesia* (Jakarta: Erlangga, 2008).

[13] Sidney Jones, "Jemaah Islamiyah: A Short Description," *Kultur: The Indonesian Journal For Muslim Cultures* 3,1(2003); Sidney Jones, "Terrorism and 'Radical Islam' in Indonesia," in *Terrorism and Islam in Indonesia: Myths and Realities*, ed. Marika Vicziany and David Wright-Neville (Clayton: Monash Asia Institute, 2005); Sidney Jones, "Konflik Aceh Dan Papua," *Tempo*, 19-23 Mei 2003; Sidney Jones, "Terorisme: Pelajaran Dari Aceh," *Tempo*, March 15-21 2010. "Sidney Jones: Beberapa Pembuat Bom Masih Buron," *Tempo*, July 20-26 2009; "Sidney Jones: "Hambali Adalah Petinggi Al-Qaidah"," *Tempo*, November 3 2002; Sidney Jones, "Terrorism in Southeast Asia: An Update," in *Regional Outlook Forum 2005 Terrorism: International and Regional Dimensions*, ed. Chin Kin Wah and Aris Ananta (Singapore: ISEAS, 2005). Sidney Jones, "The Changing Nature of Jemaah Islamiyah," *Australian Journal of International Affairs* Vol.59, No.2(2005); Sidney Jones, "Terluka, Tapi Masih Bernyawa," *Tempo*, 19 October 2003.

ujungnya seperti kait mengait antara gerakan terorisme dengan sejarah gerakan Islam di Indonesia, khususnya dimulai sejak peristiwa DI/TII. Dalam konteks ini, nama ABB tidak bisa dipisahkan, karena dia adalah sejawat Abdullah Sungkar yang mendeklarasikan *Jemaah Islam.*[14]

Adapun mazhab lain adalah mazhab "pengamat intelijen." Mereka kerap diundang sebagai "pengamat terorisme" di televisi swasta. Terkadang, mereka seolah-olah lebih banyak "tahu" mengenai sepak terjang operasi intelijen, namun mereka miskin karya atau hasil penelitian yang komprehensif mengenai studi terorisme itu sediri. Informasi yang mereka dapatkan terkadang sangat valid bahkan A-1, namun tidak sedikit yang memakai kerangka *deception theory* (teori penyesatan). Karena itu, peran mereka seperti selebritis. Sekadar membandingkan dengan "pengamat intelijen" luar negeri seperti Jessica Stern (*super terrorism expert*) yang menghasilkan karya-karya dalam disiplin kajian terorisme,[15] "pengamat intelijen" di Jakarta lebih banyak mengarahkan opini masyarakat terhadap isu terorisme.

Bagi mereka sosok seperti ABB tidak perlu banyak dikomentari. Sebab yang mereka perhatikan adalah isu terorisme, bukan tokoh itu sendiri. Mereka harus piawai dalam membedah jaringan terorisme seperti "siapa melakukan apa", namun mereka jarang sekali berani membuka operasi kontra-intelijen dalam isu terorisme di Indonesia. Alhasil, informasi yang berkembang pun bisa jadi seperti mengarahkan opini publik, ketimbang menyampaikan informasi yang benar mengenai "apa yang sebenarnya" dan "siapa yang memanfaatkan siapa."

Dari beberapa mazhab di atas, maka pengetahuan kita mengenai terorisme pun dikendalikan dan diarahkan. Sebagai contoh, upaya ND mengaitkan isu penangkapan ABB dengan kepentingan Amerika adalah bukan hal baru dalam studi terorisme di Indonesia. Namun, apakah ND bisa menjamin jika ABB tidak "tahu" sama sekali mengenai "aksi" terorisme di Aceh? Apakah ND berani berpendapat jangan-jangan isu terorisme ini sama dengan keberadaan beberapa gerakan Islam pada era Orde Baru? Jika pada tahun 1970-an muncul gerakan *Islam Jama'ah* yang

---

[14]ICG, "Impact of the Bali Bombings," (Jakarta/Brussel2002); ———, "Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism Mostly Don't Mix," in *Asia Report* (Brussel/Jakarta: ICG, 2004); ———, "Indonesia Backgrounder: How the Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates," in *Asia Report* (Jakarta/Brussel: ICG, 2002); ———, "Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the Australian Embassy Bombing," in *Asia Report* (Brussel/Jakarta: ICG, 2005).

[15]Stern, *Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill*.

mendekatkan Golkar dengan dengan gerakan ortodok Islam,[16] sekarang malah *Jema'ah Islam*.

Dari paparan di atas, terlihat bahwa ada beberapa mazhab pemikiran studi terorisme di Indonesia. Karena itu, ND semestinya bisa menempatkan ABB dalam konteks mazhab-mazhab ini. Sebab ABB memiliki tafsiran tersendiri dalam setiap mazhab di atas. Mazhab Sidney lebih membidik pesantren ABB melalui Ngruki dan jaringan santrinya dalam dinamika terorisme di Indonesia. Mazhab "pengamat intelijen" lebih melihat "serba kebetulan" dalam jaringan terorisme di Indonesia dan hubungannya dengan ABB. Jadi, ND tidak lagi terpaku pada teori konspirasi, karena pengalaman sejarah gerakan Islam di Indonesia memang menjadi sasaran manajemen konflik. Tidak terkecuali peran dan sepak terjang ABB di dalamnya.

[16] Sidney Jones, "It Can't Happen Here: "A Post-Khomeini Look Indonesian Islam," *Asian Survey* 20,3(1980).311-23.

BAB 35

Memahami Kasus KPK VS POLRI

PADA tahun 2007, saya pernah mengatakan dalam satu diskusi, bahwa KPK akan dikerjain habis-habisan. Alasan saya saat itu adalah dalam tradisi politik Indonesia, siapapun yang kuat dan terlalu "berani," baik lembaga maupun individu, pasti akan dikerjain. Dugaan saya memang benar adanya, mulai tahun 2008, satu persatu anggota pimpinan KPK terjerat persoalan hukum. Sekarang, isu KPK versus Polri sudah menjadi "bola panas" bahkan presiden SBY seperti Pak Harto pada tahun 1998 mulai memanggil tokoh-tokoh nasional, untuk meminta masukan mengenai kasus Bibit-Chandra. Baru-baru ini KPK sedang dihadapkan dengan lembaga kejaksaan Indonesia.

Dalam memahami kasus ini, tidak perlu melihat siapa yang bermain dibelakang skandal ini. Dalam tradisi politik Indonesia, Gus Dur pernah digulingkan dari kursi kepresidenan melalui kasus yang sampai hari ini belum terbukti secara hukum, yaitu skandal Brunei. Soekarno, yang pernah dianggap sebagai tokoh pendiri bangsa Indonesia, digulingkan melalui G 30 S PKI dengan dalih komunis. Soeharto sebagai Bapak Pembangunan digulingkan pada tahun 1998 melalui reformasi dengan alasan ekonomi. Artinya, di Indonesia tidak boleh ada lembaga atau individu yang memiliki kekuatan *super power*. KPK, dalam hal ini, sedang menuju lembaga *super power* dalam memberantas korupsi. Karena itu, wajar jika lembaga ini dikerjain habis-habisan.

Di Jakarta, upaya untuk mengatur isu atau peta masalah, bisa dilakukan di mana saja. Bisa di kamar hotel, penjara, taksi, kantor lurah, atau di mana saja, asal mampu menghasilkan skenario yang amat luar biasa untuk mencapai target yaitu tidak boleh ada yang super kuat di bawah burung Garuda Pancasila. Dalam menyusun skenario ini, siapapun bisa menjadi target, apakah itu presiden hingga ketua RT. Begitu juga, siapapun boleh menjadi pemain, mulai dari lembaga intelijen asing, hingga tukang jual pulsa di pinggir jalan. Demikian juga, remote kontrol boleh jadi dikendalikan mulai dari Shanghai (Cina) hingga di kota Sangkuriang (Bandung). Biasanya, akan kasus seperti ini akan terkuak setelah 30 puluh tahun, setelah pemain dan pelaku tersebut pensiun dan akan menceritakan "jasa-jasa" mereka.

Pola kasus KPK vs POLRI memang hanya berawal dari persoalan uang dan wanita. Biasanya dalam menghancurkan karakter suatu sistem bangsa, selain uang, wanita juga dijalankan, seperti peran Matahari di beberapa negara dalam sejarah operasi intelijen. Tidak sedikit para pemimpin yang tersandung karena persoalan wanita. Setelah uang dan wanita, skenario selanjutnya adalah melalui media, supaya publik bisa diarahkan wacana dan pemikiran mereka. Lalu, yang terakhir muncullah gelombang unjuk rasa di mana-mana, sesuai dengan rencana, yaitu ingin melumpuhkan target. Dalam melihat kasus KPK vs. POLRI, dugaan saya arahnya tidak hanya kepada KPK, tetapi juga kepada Presiden SBY.

Melihat dua tahun terakhir, pamor Indonesia di mata internasional memang sudah naik. Setelah berhasil keluar dari kemelut ekonomi global dan menembak mati Noordin M. Top, Indonesia memang cenderung aman dari goncangan, kecuali saat gempa di Tasikmalaya dan Padang. Setelah itu, baru kasus KPK diberitakan kepada publik tanpa batas. Senyum manis Bibit-Chandra dimaknai sebagai orang yang "tidak bersalah." Lalu ditampilkan sorot mata yang tajam dari Kabareskim dan Wakabareskrim POLRI yang menujukkan bahwa mereka sangat serius di dalam menangani kasus ini. Setelah itu, publik diarahkan pada telunjuk SBY yang seolah-olah tidak akan melakukan intervensi di dalam kasus KPK vs. Polri ini. Bahasa tubuh inilah yang mengingatkan saya pada kasus-kasus serupa, seperti kasus Gus Dur. Atau kasus Akbar Tanjung (Skandal BULOG?) ketika beberapa hari mendekam di penjara. Kita semua seolah-olah ditampilkan bahwa semua serius di dalam persoalan hukum. Gus Dur pernah melarang massa-nya dari Jawa Timur untuk datang ke Jakarta, karena beliau tahu, kalau ini adalah permainan politik dan hukum.

Sebentar lagi, ribuan massa akan turun ke jalan dan semua tokoh akan pasang badan demi Bibit-Chandra. Lalu bentrokkan terjadi, setelah itu baru selesai. Inilah

tradisi politik di Jakarta yang sudah berlangsung puluhan tahun. Sang dalang pun tertawa terkekeh, karena misi mereka mempermainkan politik dan hukum di Indonesia berhasil. Karena itu, di dalam menyusun skenario seperti ini, darah dan nyawa bisa dihalalkan, asal tidak ada lembaga atau individu yang memiliki kekuatan *super power* di Indonesia. Hemat saya, setelah itu presiden SBY bersama jajarannya terkait akan "menghentikan" semua ini, karena sudah berada di ujung drama politik dan hukum. Pahlawan nantinya bisa muncul dari penjara atau penjual pulsa HP yang sedang menyadap HP pemain di lapangan.

Membuka tabir korupsi di Indonesia, memang seperti memulihkan penyakit *pure* (puru). Sebab penyakit ini ada di setiap lembaga di Indonesia, mulai dari lembaga penegak hukum hingga yang memproduksi hukum. Dalam kasus KPK vs. POLRI, pola drama politik dan hukum memang hampir serupa dengan kasus BAPINDO atau Bank Bali, yaitu mulai dari kasus Bank Century dan wanita. Untuk konteks Aceh, pola yang sama untuk kasus uang pemerintah Aceh Utara. Di Jakarta, pelaku jenis ini biasanya penguasaha keturunan Cina yang sukses di Indonesia. Kita tentu ingat bahwa beberapa mereka ini jarang bisa ditangkap, seperti kasus Eddy Tansil yang menyeret beberapa aparat penegak hukum. Mereka bisa dan sudah terbiasa mendapatkan perlindungan hukum di negara-negara tentangga, seperti di Singapura atau Cina. Karena itu, seperti sudah saya katakan biasanya, yang mengolah isu atau skandal seperti ini, biasanya dilakukan dalam lintas batas negara. Targetnya bisa merusak sistem sebuah negara atau melumpuhkan kekuatan *super power*, sebab bisa menganggu jaringan bisnis mereka yang antar lintas negara juga. Karena itu, nyawa dan darah adalah hal yang wajar bagi jaringan mafia ini. Mereka bisa masuk ke mana saja. Kasus KPK vs. Polri sudah menyiratkan asumsi ini.

Karena itu, dalam operasi lintas batas negara ini, operasi yang dijalankan adalah bukan ingin mendapatkan uang, namun ingin melumpuhkan suatu sistem negara. Wajar jika SBY sangat berhati-hati di dalam kasus ini, karena dia tahu betul siapa yang harus dia hadapi di dalam kasus ini. Jika salah dia tanggapi, bisa merusak program 100 harinya. Atau bisa juga, kasus ini bisa mendatangkan keuntungan bagi SBY, namun kebuntungan di depan kacamata politik dan hukum. Dilema seperti inilah yang pernah dialami oleh beberapa presiden Indonesia, ketika mendapatkan "tekanan asing" di dalam kasus-kasus besar. Sebab, jika salah mengeluarkan pendapat, tatanan politik bisa hancur, dan kejadian seperti tahun 1998 bisa terulang di Indonesia. Di luar negeri, jika dibaca biografi negarawan tetangga, tekanan-tekanan ini pernah dialami oleh Mahathir Mohammad atau Raja Thailand, sehingga saat terjadi unjuk rasa atau kegiatan anarkis, mereka

memilih diam, daripada berkomentar, karena bisa menguntungkan pihak asing atau pengatur skenario. Atau, mereka memilih untuk memenjarakan tokoh-tokoh yang bisa menjadi ikon perlawanan terhadap pemerintahan mereka untuk sementara waktu. Semoga kasus Bibit-Chandra tidak mengarah kesini.

Rakyat harus belajar memahami kasus ini, bukan melihat apa yang terjadi di layar kaca atau media massa, melainkan menelaah kemana arah "bola panas" ini. Tatanan bangsa Indonesia memang masih sangat rapuh, karena bangsa ini belum begitu bisa berdikari (berdiri di atas kaki sendiri). Orang tahu, bahwa untuk melumpuhkan sistem di Indonesia, uang dan wanita masih bisa dikedepankan. Di sinilah peran tokoh-tokoh nasional di Jakarta, supaya mereka mampu menjelaskan persoalan ini bukan seperti kucing mengejar bola. Maksudnya, jika manusia dilempar bola, maka dia akan melihat siapa yang melempar bola dan kenapa dia melakukannya. Namun, jika kucing dilempar bola, maka dia tidak akan melihat siapa yang melemparnya, namun mengejar bola tersebut. Namun, kali ini kucing berhadapan dengan cecak dan buaya, sehingga kucing pun bingung mana yang harus dibela, karena keduanya adalah aparat penegak hukum. Di samping cicak berjalan di atas dinding, sedangkan buaya tinggal di sungai. Media seolah-olah membela cicak, ternyata informasi mereka pun boleh jadi dari "raja buaya."

Inilah tamsil buat mereka di Jakarta yang sedang sibuk dengan kasus KPK vs. Polri. Kita di Aceh perlu belajar dari apapun dari apa terjadi pada kilometer 2000-an tersebut. Karena itu, dalam filsafat *peneurah pliek u* orang Aceh disebutkan: *yang duk sidroe, yang peh bajoe, yang mat beusoe sama mandum*. Agaknya inilah tamsil hikayat politik dan hukum di Jakarta yang bermanfaat bagi rakyat Aceh kali ini. Tuhan telah memperingatkan bahwa fitnah sangat kejam. Makanya, jangan heran jika produksi fitnah sering diselesaikan oleh Tuhan melalui bencana yang datang bertubi-tubi di negeri ini. Jadi, saya berharap tradisi seperti ini tidak perlu lagi dijalankan di Aceh, karena yang menanggung akibatnya adalah rakyat jelata. ☙

BAB 36

Senyum Para Pelaku Sejarah

DALAM bab kali ini saya ingin mengupas arti sebuah senyuman. Sebab dalam dua bulan terakhir, dalam kasus KPK, di televisi banyak sekali disuguhkan senyuman. Mulai senyuman pembawa acara Metro-TV ketika mengolah kata-kata dalam membaca berita dan wawancara hingga senyuman Rani Juliani di luar pengadilan dalam kasus Antasari Azhar. Suguhan senyuman yang paling manis muncul juga dari Ari Muladi dan Chandra M. Hamzah. Senyuman yang membuat orang terkesima adalah senyuman mantan Kapolri, Jenderal Bambang Hendarso Danuri dalam dengar pendapat antara Polri dan DPR. Bahkan ada anggota DPR yang sangat memuji senyuman Kapolri ini. Agaknya senyuman memiliki arti tersendiri di dalam sebuah sejarah.

Dalam sejarah senyuman di beberapa negara, sejauh pengetahuan saya ada empat senyuman yang paling diingat oleh publik internasional. *Pertama*, senyuman Amrozi Nurhasyim ketika dihukum mati karena terlibat dalam bom Bali I. Publik Australia sempat geram dengan senyuman manis Amrozi ketika ditampilkan di televisi dan media cetak internasional. Mereka kadang mengundang para pakar bahasa tubuh untuk memaknai kenapa Amrozi selalu tersenyum. Bagaimana mungkin seorang masih bisa tersenyum setelah melakukan aksi pemboman yang menewaskan lebih dari 200 orang.

Kedua, adalah senyuman Yigal Amir dari Israel. Seorang anak muda Yahudi yang saleh ini nekat membunuh Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin pada 4

November 1995. Yigal Amir dipandang sebagai wakil kelompok Yahudi yang tidak menginginkan adanya perdamaian antara Israel dan Palestina. Proses perdamaian yang digagas oleh Yitzhak Rabin dan Yasser Arafat pada tahun-tahun 1994-1995. Senyuman manis Amrozi Nurhasyim dan Yigal Amir pernah disandingkan dalam tulisan John Gee yang berjudul *Conviction of Balinese Bomber Amrozi Recalls Rabin Assassin Yigal Amir* (2003).[1]

Adapun *ketiga* adalah misteri senyuman Raja Thailand, Bhumibol Adulyadej. Raja ini menurut Paul M. Handley memang tidak pernah tersenyum sama sekali. Sehingga Paul pada tahun 2006 menulis buku *The King Never Smiles: A Biography of Thailand's Bhumibol Adulyadej* (Raja tidak Pernah Tersenyum: Sebuah Biografi Raja Thailand Bhumibol Adulyadej).[2] Buku ini dilarang beredar di Thailand karena telah menghina raja Thailand. Konon website penerbit buku (Yale University Press) diblokir oleh pemerintah Thailand. Gara-gara buku ini pula tidak sedikit orang berupaya untuk mencari selembar foto apakah Raja Thailand ini pernah tersenyum selama hidupnya.

Sementara yang keempat adalah senyum Pak Harto. Saya mendapati satu buku khusus mengenai Pak Harto yang ditulis oleh OG Roeder pada tahun 1969/1970 yang berjudul *The Smiling General, President Soeharto of Indonesia* (Jenderal yang Tersenyum, Presiden Soeharto di Indonesia). Senyum Pak Harto memang dikenal sangat manis dan membuat orang terkesima manakala siapapun berjumpa dengan dirinya. Bahkan disebutkan jika ada orang marah, kalau sudah berhadapan dengan senyuman Pak Harto, orang tersebut pasti takluk. Begitulah rumor mengenai pengaruh dan kekuatan senyuman Pak Harto.

Di samping empat senyuman tersebut, kalau saya tidak salah, ketika perang Teluk awal tahun 1990-an, salah seorang lelaki yang menjadi komandan perang dari Pasukan Sekutu Amerika dianggap memiliki bibir sangat seksi dan senyuman yang amat manis. Perihal senyuman komandan perang ini mengingatkan saya pada senyuman manis William Nessen dan Bambang Dharmono dalam film *Black Road* (2005). Pada akhir film tersebut ada senyum lepas antara Bambang Dharmono dengan William Nessen di sebuah restoran.

Sebenarnya, di dalam film *Black Road* ini ada beberapa senyuman yang punya arti sangat mendalam. Senyum Abu Klik yang mengatakan bahwa dia pernah dilatih

---

[1] John Gee, "Conviction of Balinese Bomber Amrozi Recalls Rabin Assassin Yigal Amir," *The Washington Report on Middle East Affairs* 22, no. 8 (2003).36-7.

[2] Paul M. Handley, *The King Never Smiles: A Biography of Thailand's Bhumibol Adulyadej* (London: Yale University Press, 2006).

militer oleh seorang tentara Amerika. Atau, senyum Pang Toni sang-kombatan yang mengambarkan kegetiran perjuangan di hutan belantara selama bertahun-tahun. Ada juga senyum manis Shadia Marhaban ketika bersama William Nessen, mulai dari becak hingga ke pelaminan. Ada juga senyum seorang anak ditepi laut ketika mengupas kelapa pasca-Tsunami. Melihat senyuman anak ini dan senyum-senyum orang Aceh lainnya, William Nessen terheran-heran sambil mengatakan: "*lihatlah orang Aceh, walaupun ditimpa musibah seperti Tsunami, mereka selalu tersenyum.*"

Inilah kekuatan dan pengaruh senyuman. Di dalam agama Islâm, senyum sangat dianjurkan, karena dianggap sadaqah. Raihan musisi dari Malaysia pun mencoba menyanyikannya dalam yang berjudul *senyum*. Yang menarik setiap senyuman memiliki makna tersendiri, apalagi dikaitkan dengan kumis. Dari empat senyuman di atas (Amrozi, Yigal Amir, Raja Thailand, dan Pak Harto) tidak ada satupun di antara mereka yang berkumis. Sehingga yang paling banyak tersenyum di dalam kasus KPK juga tidak ada satupun yang berkumis. Antasari jarang tersenyum, malah menangis ketika mendengar pengakuan Williardi. Padahal Antasari berkumis. Kumis merupakan dengan kewibawaan dan keberanian. Bahkan di dalam film *Black Road* karya William Nessen, mereka yang punya senyum manis, tidak ada satupun yang berkumis.

Beberapa pembunuh bayaran yang pernah saya jumpai di Pulau Jawa yang dikenal dengan *Gali*, ada yang berkumis dan ada yang tidak. Namun, bagi yang tidak berkumis biasanya memasang tato di tubuh mereka. Sehingga memperlihatkan kesan angker dan ketakutan bagi orang disekitarnya. Ketika kampanye mereka sering dibayar menjadi pasukan khusus untuk menjadi satgas partai tertentu. Bagi yang tidak berkumis dan bertato, maka senyum harus dikurangi atau dihilangkan kalau berada di depan massa. Namun ada juga bagi yang berkumis dan bertato, senyum menjadi sangat mahal. Bahkan sebagian anggota tubuh yang bertato diperlihatkan kepada orang sambil menunjukkan wajah sangarnya. Artinya, bagi *wong cilik* kesangaran tidak boleh ditampilkan dengan senyuman, melainkan melalui kumis yang tebal dan tato di badan. Inilah makna kekuasaan, kehebatan, dan keberanian bagi *wong cilik*, tapi minus senyuman.

Sedangkan bagi orang besar, senyum mereka adalah sebuah keharusan, walaupun kadang tidak ada kumis dan tato. Bahkan ada sekolah khusus untuk diajarkan bagaimana tersenyum di depan publik ketika hendak menduduki jabatan-jabatan tertentu. Namun, kumis dan tato mereka ternyata disimbolkan dengan kekuasaan, jabatan, dan uang. Sehingga orang pasti cemas dengan senyum Pak Harto, karena kadang orang yang mengkritiknya bisa [di]celaka[i] hidupnya. Demikian pula, dibalik senyum polos Amrozi dan Yigal Amir ada keberanian yang

melebihi orang yang berkumis dan bertato. Adapun senyum Raja Thailand dinilai sebagai simbol yang cukup penting bagi rakyat Thailand, yaitu kapan sebenarnya Raja ini tersenyum. Karena dia memiliki kekuasaan seperti dewa.

Jadi, kita harus mampu menafsirkan konteks senyuman di dalam televisi dan media cetak dalam kasus KPK saat ini. Apakah ada model "senyuman Amrozi dan Yigal Amir," atau "senyuman ala Pak Harto." Kalau perlu kita juga harus mengamati siapa saja yang tampil di TV tidak pernah tersenyum yang masuk kategori "Raja Thailand." Dengan begitu, kita akan menempatkan siapa yang paling berhasil memikat publik dengan senyuman mereka. Karena drama KPK ini menjadi semacam pelajaran yang amat berarti bagi rakyat Indonesia saat ini.

Sebagai akhir dari bab ini, saya teringat akan sebuah dialog dalam salah satu film India. Ketika seorang gadis dirayu oleh pemuda yang amat ganteng dan memiliki senyum yang manis. Sang gadis menjawab rayuan pemuda tersebut dengan kata-kata sambil menatap ke kamera: "*dia belum berhasil berbohong dengan cara benar*." Sang gadis tahu betul bahwa senyum itu adalah kebohongan semata. Jadi membaca bahasa tubuh, terutama masalah senyuman adalah sangat menarik. Karena dibalik senyum ada banyak makna yang terkandung di dalamnya. Mari kita kembali ke televisi untuk mencari senyuman siapa yang paling jujur di dalam drama KPK kali ini. ☙

BAB 37

Dinamika PKA 2009

KAGET dan heran, itulah keterkejutan saya, ketika mengetahui kontingen Aceh Selatan melakukan *walk out* dari arena PKA tahun 2009. Walaupun itu adalah kesalahan pada level kepanitiaan dan protokoler, saya lebih tertarik ingin melihat lebih dari itu, yaitu kenapa saya sangat mencintai Aceh Selatan. Bukti kecintaan saya pada Aceh Selatan adalah saat PKA ini dimulai, saya malah melakukan perjalanan darat dari Banda Aceh ke Tapaktuan dan menetap di sana selama tiga hari penuh untuk menikmati alam Syaikh Tuan Tapa tersebut. Ada beberapa warga Aceh Selatan yang bertanya, kenapa saya berada di Aceh Selatan, saat orang ramai menghadiri PKA di Banda Aceh.

Saya hanya menjawab bahwa saya ingin tahu kenapa Aceh Selatan ini sangat disegani, khususnya karena banyak ulama-ulama terkemuka dari daerah ini. Jawaban saya dapatkan ketika saya melakukan perjalanan selama tiga hari dan melihat kota yang penuh legenda ini. Karena itu, ketika saya melihat Aceh Selatan yang dipenuhi dengan jiwa yang besar, saya kaget melihat sikap kontingen Aceh Selatan yang seolah-olah penampilan mereka harus tersungkur karena tidak dilihat oleh SBY dan seperti "dikerjain" dalam beberapa perlombaan selama PKA.

Agaknya, seorang yang berjiwa besar dan pernah memenangi PKA sebelumnya, rasa tegar dan sabar adalah patut ditunjukkan. Hal ini saya dapatkan ketika berada di Aceh Selatan, di mana simbol-simbol ketegaran dan kesabaran terlihat jelas. Kawasan yang diapit gunung dan lautan adalah menciptakan manusia yang tegar

di dalam segala kondisi. Mereka yang berada di kawasan pesisir adalah manusia yang tahan banting di dalam setiap cuaca. Bahkan saya sempat berpesan bahwa Aceh Selatan ini akan menjadi kota favorit saya setelah Aceh Barat yang melakukan pembangunan yang cukup dahsyat. Saya melihat bahwa ada kemiripan antara Aceh Selatan dan Aceh Barat dari segi ilmu kemanusiaan.

Namun ketegaran, kesabaran, dan kepasrahan, harus takluk di depan rasa harga diri dan dipermalukan. Sebenarnya, bagi saya dalam teori cobaan, semakin tinggi martabat satu kaum, maka cobaan dan goncangan akan datang bertubi-tubi. Dalam hal ini, apa yang dialami oleh Aceh Selatan adalah bukan hal yang harus dijawab dengan hengkang dari PKA. Sebab, jika memang tujuannya adalah untuk menampilkan diri di depan SBY, maka saya yakin inilah awal cobaan yang menimpa kontingen Aceh Selatan. PKA adalah bukan ajang untuk menampilkan siapa yang terbaik dan pernah dikunjungi oleh Presiden, melainkan ajang menunjukkan kesahajaan dan kewara'an daerah di pentas lokal, nasional, dan bahkan internasional. Jadi, inilah cobaan yang tidak bisa dilewati oleh kontingen Aceh Selatan saat ini.

Pada alam Aceh Selatan mengajarkan kesahajaan dan kewara'an yang amat luar biasa. Dari beberapa kecamatan yang saya kunjungi minggu lalu, saya melihat bahwa masyarakat di sini sangat relijius. Namun hal positif yang dapat ditangkap adalah kehidupan mereka ini terbentuk karena mereka pandai menjaga alam sekitar dan tahu bertata-krama dengan orang luar. Kesantunan dan kesopanan serta manis tutur kata inilah kesan yang saya dapatkan ketika saya terima ketika berada di dalam perjalanan tiga hari saya di Kabupaten ini. Agaknya, di dalam kajian kosmologi, sebuah kaum yang 'mesra' dengan alam, maka kaum tersebut tidak terbiasa berduka di tempat umum. Mereka ingin langsung pulang ke rumah dan sambil mengatakan bahwa dunia ini tidak adil.

Walaupun saya belum melihat anjungan Aceh Selatan, namun dengan melihat wajah Aceh Selatan dari dekat, kesan inilah yang saya tangkap. Kepada salah seorang staf BAPPEDA Aceh Selatan saya berpesan, bahwa bumi Aceh Selatan ini akan 'bergetar' jika anak muda yang sedang menuntut ilmu diberikan wadah untuk mengembangkan ilmu yang mereka dapatkan di perantauan. Sehingga saya mendengar mereka sedang berupaya mendirikan Universitas Tjut Ali. Namun ketika saya melihat sikap kontingen yang terlalu cepat menyerah di dalam ajang PKA ini, saya kembali berpikir untuk melakukan penilaian ulang terhadap pesan saya kepada Staf BAPPEDA tersebut. Hal ini saya tegaskan karena saya ingin betul membangun dunia ilmu pengetahuan di kawasan Pantai Barat Selatan Aceh yang selama ini, menurut saya, agak terabaikan. Padahal, mereka telah menghasilkan

ulama yang tidak sedikit bagi Aceh.

Bagi saya, Aceh Selatan di tambah dengan kabupaten lain di Pantai Barat adalah wilayah yang cukup strategis untuk membangun impian saya: sebuah sekolah tinggi yang menggabungkan aspek ilmu-ilmu yang pernah berkembang di Aceh hingga ilmu-ilmu yang berkembang di Barat dan Timur. Saya dapat merasakan bahwa Di samping alam dan watak manusia yang mendukung, pembangunan pusat-pusat studi Ilmu seperti ini dapat dikembangkan di situ. Karena itu, saya sempat kaget, karena belum sempat melihat simbol-simbol Aceh Selatan di dalam PKA kali ini. Saya sempat berniat ingin melihat apa saja alat-alat tradisional yang mereka punyai. Sebab kuat dugaan saya, alat-alat tradisional Aceh Selatan lebih mirip dengan alat-alat tradisional yang pernah ada di zaman Persia kuno.[1]

Karena itu, saya berharap ketika kontingen Aceh Selatan sampai di daerah mereka, bisa memikirkan sikap mereka di dalam konteks orang yang sabar dan tegar serta sebagai kawasan ilmu pengetahuan *tempoe doeloe*. Kemarahan yang paling bagus adalah dijawab dengan mengatakan kalau kita lebih baik dan bagus dari orang lain, maka kita harus membuktikan kepada dunia luas. Di sinilah peran pemimpin Aceh Selatan serta tokoh-tokoh adat, untuk membuktikan bahwa piala kemenangan sudah mereka dapatkan dengan kegagalan (baca: aksi walk out), namun jika mereka sanggup mewujudkan impian tersebut di dalam beberapa tahun ke depan, maka saya yakin keberhasilan mereka akan datang pada saat PKA-PKA mendatang.

Karena benteng orang pesisir, menurut ilmu kemanusiaan, adalah ilmu dan kebijaksanaan. Orang Aceh menyebutnya *ureung sige kheun* atau *peukeunong kheun*. Marwah dan harga diri itu dilihat dari kadar ilmu dan kebijaksanaan yang dimiliki oleh kaum tersebut. Bukan dengan aksi emosi dan mau belajar dari kegagalan. Sebab, kita harus sering bertanya pada diri kita sendiri, kenapa ada perlakuan seperti ini. Apakah ini kesengajaan atau kealpaan. Dalam kajian ilmu cobaan, hal-hal yang dialami oleh kontingen Aceh Selatan adalah hal yang lumrah terjadi. Bahkan di belahan dunia manapun, hal semacam ini sering terjadi.

Karena itu, ada ungkapan orang bijak kepada anak muda yaitu kalau hendak menuntut sesuatu jangan pernah salah pasang niat. Melihat sikap kontingen Aceh Selatan seperti itu, saya sendiri masih bertanya-tanya apa sesungguhnya niat awal ketika ikut PKA kali ini. Apakah ingin dilihat oleh Presiden? Ingin banyak dapat piala? Atau sebenarnya ingin menunjukkan sikap dan watak kaum tersebut yaitu tegar, sabar, dan pasrah kepada Allāh. Jika yang terakhir ini adalah niat mereka,

[1] Bustamam-Ahmad, *Acehnologi*.

maka sudah pasti kepulangan tergesa-gesa adalah bukan sikap yang bijak, mengingat di ajang PKA inilah kita memperlihat nilai-nilai kearifan lokal yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten di negeri Aceh Darussalam ini.

Lebih jauh dari itu, potret alam Aceh Selatan telah mengajarkan pada saya hal-hal seperti kesabaran, ketegaran, dan kepasrahan. Karena jika ada musibah, mereka tidak bisa lari, karena sangat dekat dengan laut, begitu juga jika bukit-bukit itu 'bergerak' saya yakin mereka akan lari ke laut. Di sinilah simbol kepasrahan yang muncul kepada Allāh. Sayang, saya tidak melihat sikap ini pada kontingen Aceh Selatan. Di atas semua itu, saya bisa menghormati sikap kontingen ini dan dapat dijadikan pelajaran bagi kontingen lainnya. Semua kaum di dunia ini dianugerahkan kemuliaan dari Allāh melalui pintu hikmah. Jadi, untuk melihat semua ini perlu ditinjau dari kacamata hikmah. Di sinilah kita bersimpuh bahwa ada kekuatan di muka bumi ini yang mengatur setiap gerak dan langkah kita, yaitu Allāh, bukan panitia atau protokoler semata. Jadi, hikmah inilah yang harus kita tunggu dari sikap kontingen Aceh Selatan. ☙

BAB 38

Manajemen Unjuk Rasa di Aceh

KOTA Banda Aceh kerap didatangi massa untuk mendukung atau kontra dengan pemerintahan Irwandi dan Nazar. Akan tetapi, tidak sedikit pula massa yang anti dengan pemerintahan IRNA. Fenomena massa datang ke Banda Aceh untuk berunjuk rasa adalah hal yang lumrah. Namun, akan sangat menarik jika melihat fenomena unjuk rasa pada awal tahun. Beberapa tahun yang lalu, ketika IRNA baru naik, tepatnya pada awal tahun 2008 juga tidak sedikit massa dari kalangan dayah yang ”menyerbu” Banda Aceh menginginkan pemerintahan IRNA melaksanakan Syari’at Islam secara kaffah.

Mengamati unjuk rasa di Banda Aceh memang tidaklah serumit dengan unjuk rasa di Jakarta atau propinsi lain. Kalau di Jakarta, setiap unjuk rasa sudah barang tentu ada ”*secret operation*” di dalamnya. Namun, sekarang budaya unjuk rasa, tidaklah sekejam pada era Orde Baru.[1] Massa jarang dipukuli atau ditangkap, kecuali mereka yang berbuat anarkis. Yang terjadi mungkin ”kontak badan” dengan aparat keamanan.

Akan halnya unjuk rasa di Aceh sangat menarik dicermati. Karena seolah-olah mirip dengan unjuk rasa di Jakarta yaitu pro dan kontra terhadap SBY-Boediono.

[1] Mengenai budaya kekerasan pada era Orde Baru, baca R.E. Elson, "In Fear of the People: Suharto and the Justification of State-Sponsored Violence under the New Order," in *Roots of Violence in Indonesia*, ed. Freek Colombijn and J. Thomas Lindblad (Singapore: ISEAS, 2002).173-96.

Di Aceh juga muncul fenomena yang sama yaitu pro dan kontra terhadap IRNA. Sebagai teks sosial, sudah tentu unjuk rasa tidak bisa dianggap remeh. Karena itu bisa menjadi kekuatan besar jika pemimpin tidak peka terhadap unjuk rasa.

Saya menganggap unjuk rasa adalah sebuah karir di luar kantor. Beberapa kawan saya yang unjuk rasa pada tahun 1996 hingga 2000-an, kebanyakan dari mereka sekarang sudah menjadi pejabat atau anggota DPR/DPRD. Dulu bahkan, unjuk rasa dianggap sebagai "Kuliah Kerja Nyata" bagi beberapa organisasi bawah tanah di Pulau Jawa. Setelah beberapa hari diisi dengan teologi pembebasan, kemudian diajarkan manajemen konflik, lalu mereka disuruh untuk unjuk rasa di tempat-tempat yang mudah dilihat publik. Walhasil, kadang orator atau provokator besoknya harinya langsung membeli koran, untuk mengecek apakah wajah mereka muncul di koran atau tidak. Jika isunya besar, mereka menanti-nanti kalau wajah mereka muncul di televisi swasta. Inilah yang saya sebut sebagai karir di luar kantor.

Jadi unjuk rasa sebenarnya latihan bagi mereka, bukan unjuk rasa dalam arti sebenarnya, yaitu ada isu utama yang ingin diperjuangkan. Unjuk rasa jarang ada yang mendukung pemerintah, kecuali sebagai unjuk rasa tandingan seperti yang terjadi di Jakarta baru-baru ini yang sangat mudah dikoordinasi. Dapat dikatakan bahwa unjuk rasa adalah perjuangan dengan kata-kata di jalanan, ketika aspirasi melalui jalur formal tidak berhasil. Namun beberapa aktor intelektual atau provokator selalu menghilang jika terjadi kericuhan. Atau, ketika ditangkap biasanya dilepascan kembali.

Dalam konteks Aceh, unjuk rasa masih sebagai ajang untuk memperjuangkan aspirasi. Walaupun kadang kala, kita tidak tahu aspirasi apa sebenarnya yang dituntut. Dalam hal ini, saya ingin membagi aspirasi itu kepada tiga kelompok. Pertama, ada aspirasi simbolik. Di sini keinginan publik ingin diwujudkan melalui protes sosial melalui simbol-simbol yang mereka yakini sebagai wacana tandingan terhadap pemerintah. Di Aceh unjuk rasa model ini masih menggema hingga hari ini, walaupun dari sisi manajemen isu belum tuntas seluruhnya. Yang paling kerap terjadi adalah sang aktivis tidak mampu "mengawal" isu simbolik, sehingga sangat mudah ditunggangi.

Kedua ada unjuk rasa sebagai formal yang digiring oleh kekuatan yang lebih kuat di bekalangnya. Di sini unjuk rasa menjadi ritual atau agenda tahunan, bahkan bulanan. Dalam teori ini, siapapun yang berkoar-koar di jalanan, sudah barang tentu ada kekuatan kuat dibelakangnya, apakah itu disengaja atau tidak. Banyak dari provokator atau orator ulung yang ternyata adalah para pelaksana tugas khusus untuk unjuk rasa. Kepiawaan mereka diasah dan terus dididik untuk memancing

emosi massa. Di Aceh unjuk rasa formal seperti ini kerap terjadi di daerah sebagai bagian dari manajemen konflik.

Adapun unjuk rasa yang paling utama adalah unjuk rasa yang bersifat substantif. Model unjuk rasa ini adalah terjadinya ”pengawalan isu” yang cukup ketat oleh beberapa kelompok sosial yang memiliki kemampuan mengolah emosi massa. Unjuk rasa substantif ini dilakukan secara terus menerus hingga sang target lumpuh atau mau mengubah gaya kepemimpinannya. Unjuk rasa seperti ini sangat jarang terjadi di Aceh, kecuali kalau rakyat menginginkan sebuah revolusi. Di sini dapat dilihat modelnya pada tahun 1998 di Jakarta. Atau unjuk rasa di Thailand yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Di Aceh, belum ada unjuk rasa misalnya yang berani menduduki bandara SIM seperti di Bangkok.

Jadi, kalau kita melihat saat ini adanya unjuk rasa di Banda Aceh, maka silahkan pembaca menilai, kira-kira kemana arah unjuk rasa ini. Apakah ritual tahunan sebagai bagian dari manajemen konflik? Atau, akankah terjadi sebuah perubahan total di Aceh dalam pemerintahan IRNA. Unjuk rasa yang hanya mampu mengalihkan perhatian adalah unjuk rasa yang bersifat simbolik saja, karena setelah itu tidak ada perubahan yang signifikan.

Dari segi isu, unjuk rasa di Banda Aceh juga tidak memuat hal yang cukup substantif. Isu ketidaksenangan terhadap IRNA memang sudah terhembus sejak hari pertama mereka dilantik. Goyangan demi goyangan juga terus menerpa para pemimpin Aceh ini. Namun, kekuatan oposisi di Aceh masih bercabang seperti rel kereta api. Kita tentu saja masih perlu mempelajari apakah upaya menggoyang IRNA karena kedua mereka tidak mampu memimpin? Atau, apakah memang sebagai upaya untuk mengalihkan isu yang paling prinsipil yaitu kenapa IRNA tidak mengakomodasi aspirasi kelompok oposisi di Aceh di luar kelompok IRNA?

Menurut saya, sosok Irwandi memang enigmatik (susah ditebak). Agaknya dia merupakan perpaduan gaya kepemimpinan Gus Dur dan Soekarno. Gus Dur kalau keluar negeri paling disukai bahkan dipuja, ketika pulang ke negerinya dihujat. Kita lihat misalnya, wajah Irwandi selalu berbinar kalau bertemu dengan pihak asing, baik di Aceh, Jakarta maupun di luar negeri. Adapun gaya Soekarno adalah Irwandi seolah-olah menyembunyikan ideologi yang diyakininya. Lalu berupaya untuk seolah-olah mengakomodir semua ideologi asalkan bisa membangun Aceh. Sikap kecurigaan terhadap Irwandi sampai detik ini masih menjadi tanda tanya bagi kalangan tertentu di Aceh atau Jakarta. Sama dengan kecurigaan terhadap

Soekarno apakah dia Nasionalis, Agamis, atau Komunis?[2] Sampai detik ini, hanya Soekarno yang tahu jawabannya.

Adapun sosok Muhammad Nazar persis seperti gaya Soeharto dan SBY yang memakai filosofi *menang ora ngerusake* (menang tanpa merusak). Karena itu, gaya bicaranya yang sangat hati-hati di media, terutama dalam hal masalah penyimpangan di dalam pemerintahannya. Ini cukup mencerminkan bagaimana gaya Muhammad Nazar. Gaya ini memang sangat disukai karena didalamnya ada unsur kehati-hatian, . Agaknya dengan begitulah dia mampu bertahan, seperti pengalaman Soeharto dan SBY saat ini.[3] Salah satu gaya bahasanya adalah "Silahkan diproses menurut hukum jika ada penyimpangan!" Atau, "kita mendukung upaya penegakan hukum." Gaya bahasa ini sering kita jumpai di harian nasional jika pejabat sedang diwawancarai oleh wartawan.

Jadi, bagi mereka yang sedang unjuk rasa di Banda Aceh atau siapa saja yang ingin berdemontrasi di hadapan IRNA, setidaknya harus mampu memahami karakter dan gaya kepemimpinan IRNA. Catatan saya tentang Gus Dur, Soekarno, Soeharto, dan SBY adalah perbandingan sekilas untuk memudahkan kita menempatkan gaya IRNA. Bagi orang Aceh, pemimpin harus memakai gaya Aceh yaitu *peugah lage na, peuna lage peugah.* Inilah paradoks kepemimpinan Aceh saat ini.

Dalam sejarah kepemimpinan Aceh, posisi Gubernur dan Wakil Gubernur memang belum pernah diturunkan oleh rakyat. Yang ada beberapa gubernur menjadi menteri di Jakarta karena keberhasilan mereka. Ada juga yang harus mendekam di penjara. Jika unjuk rasa tidak berhasil menggoyang mereka, sudah pasti ada goyangan lainnya yang lebih parah dari unjuk rasa.

Dalam tafsiran sosial, gaya kepemimpian mereka kuat secara simbolik, tetapi lemah secara substantif. Pada awalnya IRNA merupakan simbol kekuatan oposisi di Aceh. Namun, dalam gerbong IRNA tidak semua kekuatan oposisi bisa masuk di dalamnya. Bahkan pada pemilu 2009 menunjukkan bagaimana gerbong oposisi IRNA bercerai berai hingga dimanfaatkan oleh partai nasional. Namun, kekuatan oposisi IRNA juga tidak mampu memuaskan janji-janji saat mereka dipilih oleh rakyat. Bahkan sekarang kekuatan oposisi yang sudah mengkristal selama 30 tahun

---

[2] Baca Howard M. Federspiel, "Soekarno Dan Apolog-Apolog Muslimnya, "in *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius Di Indonesia*, ed. Abu Zahra (Bandung: Pustaka Hidayah, 1999).

[3] Lihat misalnya Dino Patti Djalal, *Harus Bisa! Seni Memimpin Ala Sby* (Jakarta: Red & White Publishing, 2008).

lebih sudah menjadi wakil rakyat. Jadi, dapat dipastikan bahwa kekuatan simbolik ini tidak mengkristal dalam pengalaman kepemerintahan di Aceh.

Sebab itu, tidak mengejutkan jika sekarang hal-hal yang bersifat substantif menjadi terabaikan. Setelah gerbong oposisi diobrak abrik selama tiga tahun terakhir, maka sekarang harapan simbolik dititipkan kantong-kantong wakil rakyat dari Partai Aceh. Dalam beberapa tahun ke depan, kekuatan oposisi yang muncul di eksekutif dan legislatif sebagai pilihan rakyat Aceh juga agaknya sulit merealisasikan hal-hal yang bersifat substantif bagi pembangunan Aceh. Alhasil, kekuatan simbolik di parlemen juga bisa diobrak-abrik, jika mereka tidak mampu memilih dan memilah mana kepentingan simbolik dan substantif. Dalam hal ini, sekarang rakyat Aceh seolah-olah tidak memiliki kereta kepemimpinan yang substantif. Mereka sudah tidak mau lagi mendengar hal-hal yang bersifat simbolik.

Jadi, kalau IRNA mampu mengelola manajemen konflik ini, maka dapat dipastikan kepemimpinan mereka akan baik-baik saja. Namun, seperti tradisi dan budaya politik di Indonesia, jika melalui unjuk rasa tidak berhasil, maka biasanya akan dibuka catatan-catatan hitam yang mampu menjerat keduanya kembali pada persoalan hukum, misalnya korupsi. Inilah kenapa perpaduan gaya kepemimpinan Gus Dur (*gitu aja kok repot!)*, Soekarno (orator ulung), Soeharto (*menang ora ngerusake*), dan SBY (*thinking general*) sedang berlangsung di Aceh. Harus diakui, keempat pemimpin tersebut kecuali SBY, semuanya digulingkan dari kursi kepresidenan. Karena mereka gagal mengatur mana kepentingan simbolik dan substatif di dalam pemerintahan mereka. Sehingga emosi rakyat bisa dikendalikan sebagai senjata makan tuan. ☙

BAB 39

Memahami Tun Dr. Mahathir

DALAM bab ini ingin dikaji sosok Tun Dr. Mahathir sebagai tokoh serbabisa dalam kajian negara bangsa. Namun, saya lebih melihat sosok TDM secara personal. Ini dikeranakan sebagai orang Acheh, nama Tun Dr. Mahathir (TDM) memang tidak begitu asing. Sejak menjadi santri pada tahun 1990, di salah satu madrasah tsanawiyyah, nama beliau sudah dikenali oleh setiap santri di Acheh Timur. Saat itu, nama beliau disandingkan sebagai tokoh reformasi Islam dari Asia Tenggara. Sesiapa saja yang ingin mendalami gerakan pembaruan Islam, nama TDM harus dijadikan sebagai rujukan utama. Spirit TDM di Aceh memang tidak dapat dinafikan, hal ini dikeranakan hubungan emosional orang Acheh dengan Malaysia yang sudah berlangsung selama ratusan tahun.

Sebagai contoh, Syed Naquib Al-Attas ketika membangun ide-ide dasar mengenai perkembangan pendidikan Islam (*Islamic Studies*) di ISTAS, beliau merujuk falsafah pemikirannya daripada asas-asas minda Hamzah Fansuri yang pernah disemai di Acheh pada abad ke-16 dan 17 Masehi.[1] Tidak hanya itu, Andaya salah seorang peneliti Dunia Melayu juga menggambarkan bagaimana kontribusi Acheh dalam penguatan identitas Melayu . Hal yang sama juga dilakukan oleh TDM dalam mengubah Dunia Melayu melalui pendekatan melihat kegemilangan

[1] Syed Muhammad Naquib al-Attas, *Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu* (Bangi: UKM Publisher, 1972). Syed Naguib al-Attas, *Some Aspects of Sufism as Understood and Practised among the Malays* (Singapore: Malaysia Sociological Research Institute, 1963).

Acheh sebagai salah satu faktor penting ketika dia membangun Malaysia, sebagaimana dituliskannya dalam buku *Malay Dilemma*.[2]

Kehadiran TDM memang bukan seperti era kerajaan Sultan Iskandar Muda, melainkan beliau memimpin pada saat era moden, namun masih tetap mempertahankan dua hal iaitu keberadaan perlembagaan Melayu dan kemunculan konsep negara bangsa (*nation state*). Setakat ini, beberapa pemimpin Muslim agak sukar menjalankan roda pemerintahan mereka, kerana berhadapan dengan konsep *negara bangsa* yang cuba menegasikan peran etnik dan agama dalam kerajaan. Namun demikian, Tun Mahathir melalui konsep-konsep islamisasi dan wawasan 2020, berhasil memadukan antara Islam dan pembangunan di Malaysia. Inilah salah satu alasan mengapa nama beliau sangat dikenal di Asia Tenggara. Menjadi ikon bagi anak-anak di Tanah Rencong tentu sahaja memunculkan pertanyaan: apa yang istimewa dari TDM ini?

Tentu sahaja sudah begitu banyak karya yang mengupas bagaimana keistimewaan TDM. Keistimewaan pertama adalah kemampuan TDM dalam mempelajari sejarah kegemilangan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara, lalu spirit keberhasilan tersebut dicoba diterapkan dalam roda kerajaan dan juga tercermin dari pemikirannya. Faktor-faktor sejarah Melayu menjadi dasar bagi TDM dalam mengembangkan gagasan identiti Melayu yang modern. Beliau mengambil sejarah sebagai iktibar.

Adapun keistimewaan kedua adalah mengambil spirit konsep negara bangsa dalam pembangunan ekonomi. Di sini TDM tidak melakukan proses sekularisasi dalam arti pemikiran Barat di mana agama dan negara harus dipisahkan, melainkan TDM melakukan proses sekularisasi yang islami seperti yang pernah dipraktekkan di Rasulullah di Madinah . Sehingga sekularisasi islami model TDM agak susah ditantang, kerana spirit dan jiwa dalam proses sekularisasi ini adalah nilai-nilai Islam yang tidak dapat digantikan oleh spirit sekularisasi Barat.

Sehingga, seolah-olah terkesan Mahathir anti-Barat, walaupun model pembangunan negara Malaysia seperti yang dilakukan oleh Barat. Pada saat yang sama, Barat pun tidak dapat menghadang TDM, karena dia memberikan ruang publik bagi nilai-nilai Barat untuk diterapkan sebagai asas kegiatan perekonomian Barat. Bagi mereka yang tidak mengenai konsep *the self* di era moden, cenderung akan salah menilai sosok TDM, yang seolah-olah mesra dengan pihak Barat.

Sementara keistimewaan yang ketiga adalah kemampuan dalam membaca tanda-tanda zaman. Seorang pemimpin, sekalipun memiliki kemampuan intelijensi

[2] Mohamad, *Malay Dilemma*.

yang tinggi, namun diharuskan mampu membaca tanda-tanda zaman, agar mampu menciptakan kesiapan mental dan spiritual bagi negaranya yang sedang dipimpin. Kerana itu, tidak mengejutkan jika ketajaman berpikir TDM ini terkadang sulit dipahami oleh beberapa pihak. Sebagai contoh, pada tahun 2001, saat orang takut membicarakan Negara Islam, TDM dengan lantang mengatakan bahawa Malaysia adalah Negara Islam yang fundamentalis.[3] Namun, pandangan TDM ini tidak dianggap sebagai pemikiran radikal, kerana jika dilihat dari aspek *takwîl*, TDM sedang menggunakan pendekatan *ushuliyyah* (*fundamental*) dalam mencabar suasana zaman, di mana Islam sedang dikecam dalam pentas global. Hal yang sama dilakukan oleh TDM ketika menangis pada tahun 2002 dalam salah satu mesyuarat agung UMNO, kerana memandang beliau tidak berhasil memimpin orang Melayu . Di sini dapat dipahami bahawa beliau berhasil memimpin Malaysia, tetapi tidak berhasil membawa orang Melayu menghadapi cabaran di negaranya sendiri. Dalam Perhimpunan Agong tersebut, TDM berucap:

> Ini tidak mengapa jika individu Melayu sudah menjadi orang yang gagah yang memiliki kebolehan yang tersendiri, kebolehan bersaing tanpa keistimewaan yang hari ini mereka anggap sebagai hak mereka. Tetapi mereka bukan sahaja tidak menjadi individu yang gagah; sebaliknya mereka tidak sanggup menghadapi persaingan barang sedikit pun. Tanpa pengalaman bersaing dengan orang lain, jika perlindungan tiba-tiba hilang maka tidak mungkin sama sekali mereka *survive*.[4]

Beberapa keistimewaan TDM di atas kemudian dibalut dengan beberapa pemikiran yang cukup otentik iaitu mengenai jati diri manusia dan hakikat sebuah bangsa. Namun kelajuan pola pikir TDM ini terkadang sukar untuk diikuti, jika tidak difahami secara benar menurut falsafah pemikiran. Dalam kategori ini, pemikiran TDM dapat dimasukkan dalam kelompok pemikir intepretatif dan implikatif. Maksud dari tahap pemikir seperti ini adalah seseorang pemikir sudah paham bagaimana aspek pengaruh atau kesan dari pemikirannya terhadap orang lain atau sebuah komuniti. Biasanya di sini adalah tugas pada analis atau kelompok *think thank* yang bekerja di belakang layar, di mana hasil pemikiran mereka dilaksanakan atau dijadikan sebagai sebuah hasil kebijakan dari pemikirannya. Namun ada juga kelompok pemikir pada tahap ini yang menuliskan ide-ide mereka di dalam buku, lalu sarjana atau penuntut ilmu menjadikannya sebagai dasar untuk melihat aspek sosial kehidupan manusia. Pada tahap ini, ilmu sudah

[3] Bustamam-Ahmad, "The Discourse of the Islamic State and Islamic Law in Malaysia."

[4] Mahathir Mohammad, "Lebih Banyak Kecewa Daripada Gembira," *MASSA*, June 29 - July 5 2002.21.

mulai dirasakan ada manfaat bagi sekelompok manusia, apakah nanti hasilnya baik atau buruk, maka diperlukan standar keilmuan untuk menilainya.

Keberadaan TDM di Malaysia tentu saja sudah dirasakan manfaatnya selama 30 tahun lebih. Gagasan-gagasan cemerlang TDM selalu diaktulisasikan ke dalam realiti negara bangsa di Malaysia. Pemikir kategori ini selalu mampu menerapkan gagasan nya ke dalam masyarakat, sehingga masyarakat, disadari atau tidak, selalu menanti kehadiran pemikir tersebut. Buah dan tata cara berpikir TDM melalui keistimewaan di atas telah tampak dalam pembangunan di Malaysia. Di samping itu, TDM menjadi jembatan Dunia Islam dan Dunia Melayu dengan Barat. Sehingga wajah Malaysia saat ini adalah berkah dari gagasan TDM yang selalu otentik atau asli.

Di akhir esei ini saya ingin menutup dengan andalan bahwa para pembaru hanya muncul muncul satu kali dalam setiap episod sejarah. Mereka hadir menjadi penyangga kaumnya dan selalu dirindui oleh rakyat. Pembaru juga tidak akan dilupakan. Ini bukan kerana kejeniusan pembaru tersebut, melainkan kerana dalam diri (*self*) telah dihubungkan antara apa yang disebut mikro dan makro kosmos (*alam al-saghir* dan *'alam al-kabir*). Pada sosok TDM telah diberikan kelebihan dalam *alam al-saghir*, sehingga dia mampu mengendalikan pikirannya dan dituangkan dalam bentuk gagasan membangun negara bangsa.

Setakat ini, TDM telah pernah menjadi pemimpin Malaysia dan bahkan sekarang masih diambil kira beberapa pandangannya. Orang tentu sahaja tidak akan membantah pikirannya, bukan kerana tidak mampu, melainkan apa yang dipikirkan mampu diimplementasikan, sehingga orang yang mencabar harus melakukan terlebih dahulu apa yang pernah dilakukan TDM sebelumnya. Kegemilangan berpikir ini tentu sahaja telah diwariskan dalam tradisi berpikir Melayu selama ratusan tahun lalu. Hanya sahaja, orang Melayu kerap tidak mampu memahami bagaimana tahapan-tahapan bepikir model Melayu. Sehingga, terkadang cara berpikir TDM banyak ditentang oleh kaum Melayu sendiri. Padahal sejak awal, model berpikir Melayu ini dengan mengedepankan nilai-nilai Islam telah menjadi asas tata pikir TDM pada aspek meta teori. Sehingga dalam kontek kajian negara bangsa, TDM juga telah berhasil menggabungkan nilai-nilai ke-Melayu-an menjadi salah satu unsur penting dalam *Asian Values*.[5]

Akhirnya, esei ini telah menampakkan bagaimana kontribusi TDM dalam perlbagai sudut pendekatan dalam kajian negara bangsa. Dapat disimpulkan bahwa TDM telah menjadi ikon pemikir dari Dunia Melayu untuk Dunia Islam dan juga

[5] Barr, *Cultural Politics and Asian Values: The Tepid War*.

menjadi wakil di Barat, di mana dia tidak hanya mampu "mengkritik" kaumnya sendiri, tetapi paling tidak, mampu mengeluarkan mereka dari kemelut identiti atau jati diri menjadi negara maju di rantau Asia Tenggara. Bagaimana pun, episod sejarah kontemporar di Malaysia, tidak akan lengkap ditulis, jika tidak melibatkan peranan TDM di dalamnya. Paling tidak, esei in telah merangkumi beberapan peranan TDM dari aspek falsafah pemikiran dan mengapa TDM penting dalam kajian negara bangsa, tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di Asia Tenggara. ☙

BAB 40

Belajar Berjudi Ala Malaysia

KETIKA pertama kali mendatangi ke Genting[1] Highland, penulis tidak pernah membayangkan kalau di situ terdapat pusat judi terbesar di Asia Tenggara. Sebagai Muslim, penulis juga tidak pernah membayangkan kalau Malaysia yang sering dikatakan sebagai negara yang sangat Islami memiliki pusat perjudian tersebut. Di situ terdapat hotel Genting dengan tarip per-malam RM360. Kalau dirupiahkan sekitar satu juta rupiah. Di sekitar pusat judi ini juga terdapat berbagai macam pusat rekreasi mulai dari untuk anak kecil hingga orang dewasa. Satu hal yang menarik kalau kita kesitu adalah untuk menjangkau kawasan tersebut, kita harus naik *sky way* (kereta gantung) dengan membayar satu kali perjalanan pulang pergi RM6 (Rp. 15000). Setelah sampai di situ kita disuguhkan berbagai macam makanan yang kadar kehalalannya juga masih dipertanyakan. Tak jarang pula, di kawasan Genting ini sering diselenggarakan berbagai festival dan konser. Dengan kata lain, Genting Highland adalah kebanggaan Malaysia setelah menara kembar

[1] *Genting* adalah salah satu perusahaan yang dimiliki oleh Lim Goh Tong, dari suku Cina, sub-etnik Hokkien. Lihat Edmund Terence Gomez, "Chinese Business Development in Malaysia: Metworks, Entrepreneurship or Patronage?," in *Chinese Entrepreneurship and Asian Business Networks*, ed. Thomas Menkhoff and Solvay Gerke (London and New York: Routledge, 2004).162. Mengenai studi Cina di Malaysia, baca Leo Suryadinata, *Understanding the Ethnic Chinese in Southeast Asia* (Singapore: ISEAS, 2007). Leo Suryadinata, ed. *Ethnic Chinese in Singapore and Malaysia: A Dialogue between Tradition and Modernity* (Singapore: Times Academic Press, 2002).

Petronas dan KL Tower dan terakhir yang baru saja dibangun yaitu kawasan Sun Way Lagoon.

Kalau kita masuk ke tempat perjudian tersebut, kita diperiksa apakah kita Muslim atau tidak. Sebagai warga asing, terutama dari Indonesia jangan coba-coba untuk masuk ke kawasan tersebut. Sebab sudah tentu kita dianggap beragama Islam. Kecuali mereka yang bukan Islam, maka akan dibolehkan masuk. Jadi, untuk masuk ke arena perjudian tersebut, memang hanya dikhususkan bagi non-Muslim. Penulis sendiri tidak tahu apakah ada hak keistimewaan bagi orang Muslim yang tajir untuk ikut menghaburkan duit di kasino tersebut. Di dalam kasino tersebut terdapat bank dan *money changer* yang dapat menukar uang kita. Kebetulan penulis pernah masuk dengan alasan untuk menukarkan uang untuk yang membawa Dollar Amerika. Sempat juga melirik ke para wajah penjudi, hampir semuanya orang-orang keturunan Cina. Artinya, suku Melayu yang identik dengan Islam tidak dibolehkan masuk ke kasino tersebut.

Sementara itu, ada metode lain yang dilakukan pemerintah dalam melegalkan judi di sana yaitu tradisi togel (*toto gelap*). Kebijakan ini hanya ditujukan kepada Cina. Dan, yang menjual nomor-nomor togel tersebut hampir semua orang Cina. Toko-toko yang menjual togel ini dapat ditemui kawasan Chow Kit dan Central Market. Dua kawasan ini, menurut hemat penulis sangat banyak ditemui orang Indonesia, baik sebagai tenaga kerja maupun turis. Nah, untuk penjualan togel ini, nampaknya tidak ada penjagaan ketat dari pemerintah. Penulis melihat banyak yang membeli nomor bukan hanya berwajahkan Cina, tetapi wajah Melayu, India, dan Bangladesh. Sehingga ramai dari mereka yang selalu kasak kusuk untuk menanti pengumuman nomor mana yang akan keluar sebagai pemenangnya.

Sebenarnya pusat maksiat di Malaysia tidak sedikit, kalau kita jalan-jalan di kawasan taman KLCC (*Kuala Lumpur City Center*), maka akan kita dapati pemandangan yang agak ke-Amerika-an. Di sini muda mudi boleh berbuat semaunya, apakah itu berciuman, berpelukan dan disekitar pusat kota itu terdapat banyak hotel yang bisa melanjutkan kisah asmaranya. Tingkat kemaksiatan di Malaysia sekarang dapat dikatakan semakin meningkat. Ini dibuktikan daripada keseriusan pemerintah untuk membimbing generasi muda Melayu agar tidak berbuat hal-hal yang tidak senonoh.[2]

Judi di Malaysia sangat didukung oleh pemerintah. Sebab, di Malaysia terdapat tiga suku bangsa yaitu Melayu, Cina, dan India. Sudah dipastikan suku

[2] Lihat misalnya dalam Zaeenath Kausar, *Social Ills in Malaysia: Causes and Remedies* (Kuala Lumpur: Recearch Centre, IIUM, 2005).

Melayu pasti beragama Islam. Sedangkan dua suku terakhir belum tentu beragama Islam. Sebagai negara modern, Malaysia ingin mengembangkan suatu negara yang mampu melintas batas-batas agama. Malaysia ingin seperti bangsa-bangsa Barat di mana hak-hak individu sangat dihormati, termasuk hak untuk berjudi. Karena itu, judi dilokalisasikan satu tempat yakni di Genting Highland.

Jika kita bandingkan dengan Indonesia dengan penduduk 200 juta. Umat Islam sekitar 85% dari jumlah keseluruhan. Di samping itu, di Indonesia suku mencapai 200 lebih. Dapat dibayangkan kalau Indonesia seperti dari Maroko ke Rusia. Begitu luasnya bangsa ini sehingga sulit untuk membandingkan negara ini dengan Malaysia, terutama dalam masalah judi.

Di Indonesia, tradisi berjudi memang menjadi pemandangan sehari-hari. Hampir di setiap pelosok negeri ini, dapat ditemukan praktik perjudian kendati dengan beragam cara. Untuk tingkat kampung, nyabung ayam adalah trend mark perjudian. Pusat-pusat perjudian paling banyak ditemukan di kawasan perkotaan. Tempatnya pun bermacam ada di terminal, gang-gang pasar, depan toko, atau di gedung-gedung khusus yang hanya dihadiri oleh orang-orang yang "khusus" pula. Uniknya, kelas judi di Indonesia tidak merata, yang miskin berjudi sesamanya. Yang kaya juga begitu, punya klub sendiri yang mengurusi praktik perjudian.

Judi di Indonesia sangat dekat dengan premanisme dan *baking*. Dua hal ini sering berada di balik praktik perjudian. Hampir pusat-pusat perjudian ada yang membakingnya, sehingga sangat sulit bagi masyarakat untuk mengawasi praktek tersebut. Selain ada keterlibatan aparat, tempat perjudian juga selalu dilindungi oleh beberapa gelintir orang yang punya "kuasa".

Judi di Indonesia memang sudah menjadi tradisi dan nampaknya sangat sulit dihapus. Kendati negara tidak mendukung, tetapi "kekuatan negara" selalu digunakan untuk melindungi praktek tersebut.

Jika kita bandingkan dengan Malaysia, orang yang berjudi adalah orang-orang kaya. Mereka berjudi bukan sebagai mata pencaharian. Bukan juga diikuti oleh tindak kejahatan setelah kalah dalam berjudi. Berjudi bagi mereka adalah suatu kesenangan. Karena itu, ketika berjudi mereka tidak pernah membayangkan apakah anak istri sudah makan di rumah. Begitu juga, manakala menang judi, tidak lantas membuat mereka berhenti kerja untuk menghidupi keluarga. Orang Cina sudah dikenal kerja kerasnya. Mereka selalu memikirkan bagaimana mendapat uang dengan cara mereka sendiri, tak peduli agama membolehkan atau melarangnya. Kerja keras inilah yang kemudian membuat mereka kaya dan menghaburkan uang di meja judi.

Sedangkan di Indonesia, hampir mereka yang berjudi adalah yang memiliki penghasilan menengah ke bawah. Tukang becak misalnya, dengan penghasilan seadanya, dia rela menghabiskan di lapak judi. Tukang batu, demi untuk menang dalam berjudi, upah kerjanya seharian dihabiskan di meja judi. Sehingga anak istri yang paling menderita. Akibatnya, konflik muncul di mana suami harus mencukupi kebutuhan sehari-hari. Jalan pintasnya adalah merampok, mencuri, mencopet, dan menipu. Inilah fenomena judi di Indonesia.

Sekarang, jika judi hendak dilokalisasikan di Indonesia, maka ada tiga hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, tradisi berjudi di Indonesia sudah mentradisi dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, ada dan tidaknya lokalisasi judi, praktek ini akan terus dijumpai. Jika alasan pelaksanaan lokalisasi untuk meningkatkan pendapatan negara, maka alangkah naifnya jika bangsa ini hidup dari hasil-hasil praktek perjudian.

Kedua, lokalisasi perjudian akan meningkatkan kejahatan. Meskipun lokalisasi judi untuk WNA dan non-Muslim, ini hanya sebatas slogan saja. Sebab, yang namanya judi di Indonesia sangat sulit untuk dikendalikan. Sekarang betapa banyak yang melakukan judi juga beragama Islam. Dan yang lebih parah lagi, jika nantinya pulau-pulau dijadikan sebagai tempat untuk berjudi, maka tingkat kejahatan di tengah laut akan semakin meningkat. Ini menyangkut siapa saja yang akan berjudi, tentu mereka membawa uang yang tidak sedikit. Karena itu, apapun alasan yang disampaikan oleh pemerintah, penempatan lokalisasi judi tidak akan membawa kepada kemaslahatan masyarakat secara umum.

Ketiga, Malaysia menerapkan lokalisasi judi sebagian dari proyek pariwisata. Dan, kawasan perjudian tersebut sampai tulisan ini diangkat masih menjadi perdebatan di kalangan umat Islam Malaysia. Hanya saja, ini tidak begitu mencuat, sebab Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohammad "membatasi" dan "mengontrol" kekuatan umat Islam yang berpikir untuk menjalankan ajaran Islam.[3]

---

[3] Mengenai kepemimpinan Mahathir, baca Welsh, ed. *Reflections the Mahathir Years*; Hwang, *Personalized the Politics Malaysian State under Mahathir*. Mengenai potret Islâm pada era Mahathir, lihat Kamarulnizam Abdullah, *The Politics of Islam in Contemporary Malaysia* (Bangi: UKM Publisher, 2003); Farish A Noor, "The Localization of Islamist Discourse in the *Tafsîr* of Tuan Guru Nik Aziz Nik Mat, *Murshid'ul Am* of Pas," in *Malaysia Islam, Society and Politics*, ed. Virginia Hooker and Norani Othman (Singapore: ISEAS, 2003); Ahmad Fauzi Abdul Hamid, "Political Dimensions of Religious Conflict in Malaysia: State Response to an Islamic Movement," *Indonesia and the Malay World* Vol.28, No.80(2000); Judith Nagata, "How to Be Islamic without Being an Islamic State: Contested Models of Development in Malaysia,"

Jadi, apakah kita masih perlu belajar dari Malaysia dalam hal berjudi? Mungkinkah kita berpikir mari kita belajar pada ajaran agama, bahwa judi itu tidak akan mendatangkan manfaat. Dia hanya mendatangkan kemudharatan bagi siapa saja yang melakukan. Semua ini menuntut kita untuk berpikir jernih dalam menentukan sikap yang bijaksana, termasuk dalam hal berjudi. ☙

in *Islam, Globalization and Postmodernity*, ed. Akbar S. Ahmed and Hastings Donnan (London and New York: Routledge, 1999); Jan Stark, "The Islamic Debate in Malaysia: The Unfinished Project," *South East Asia Research* 11,1(2003); Joel S. Kahn, "Islam, Modernity, and the Popular in Malaysia," in *Malaysia: Islam, Society and Politics*, ed. Virginia Hooker and Norani Othman (Singapore: ISEAS, 2003).147-68.

BAB 41

Nasionalisme Indonesia dalam Air Mata Manohara

PADA tahun 2004, saya pernah bergurau dengan kawan saya di Universitas Walailak (Thailand) tentang peran Malaysia di Asia Tenggara, sebagai negara yang suka mencaplok urusan negara tetangganya. Diskusi tersebut muncul karena munculnya dugaan kuat terhadap peran Malaysia dalam konflik di Thailand Selatan.[1] Di samping itu, adanya para pelaku teroris yang beroperasi di Asia Tengggara merupakan hasil 'binaan' para kelompok Islâm garis keras yang berada di Malaysia. Ada yang menyebutkan bahwa peran teroris hasil "binaan" dari Malaysia di Indonesia. Otak pelaku bom di Indonesia dilakukan oleh dua warga Malaysia yaitu Azhari dan Nordin bin Top.[2] Intinya, selama sepuluh tahun terakhir, disadari atau tidak, Malaysia memang sering membawa masalah bagi negara-negara tetangganya.

Inilah sekelumit kisah bagaimana peran Malaysia di rantau Asia Tenggara yang telah banyak menyebabkan beberapa negara gerah, termasuk Thailand. Beberapa tahun belakangan perangai Malaysia terhadap Indonesia memang luar biasa, mulai dari pelecehan seksual hingga perilaku tidak manusiawi yang dialami oleh sebagian

[1] Patrick Jory, "From "Patani Melayu" to "Thai Muslim"," *ISIM Review*, no. 18 (2006).42-43; Jory, "From "Melayu Patani" to "Thai Muslim": The Spectre of Ethnic Identity in Southern Thailand."

[2] Abas, *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Ketua Ji*.

warga Indonesia yang bekerja atau melancong ke negara tersebut. Akan tetapi, pemerintah Indonesia tidak mengambil sikap apapun terhadap perlakuan tersebut.

Sebaliknya, untuk Aceh, Malaysia memberikan kebijakan yang sama sekali sangat 'luar biasa.' Bantuan Tsunami dan jatah tinggal di negara jiran ini cukup dirasakan sangat membantu, karenanya tidak ada alasan bagi rakyat Aceh untuk membenci negara bekas jajahan Sultan Iskandar Muda. Walaupun ada tidak sedikit warga Aceh yang sedang 'menginap' di beberapa penjara Malaysia, karena persoalan ganja atau sabu-sabu. Hubungan Aceh dengan Malaysia tidak mengalami persoalan yang serius. Bahkan, beberapa petinggi GAM menjadikan negara ini sebagai tempat transit ketika mereka pulang ke Indonesia. Di samping, sebagai tempat berobat favorit seperti yang pernah dilakukan oleh Irwandi Yusuf dan (alm.) Ibrahim KBS.

Selama berapa tahun terakhir Malaysia memang sangat luar biasa dalam memancing emosi rakyat Indonesia. Karena itu, dapat dipahami bahwa pemerintah ketika Indonesia tidak mau terpancing dengan perilaku pemerintah Malaysia. Dalam hal ini, pemerintah malah menjadikan "kreasi" Malaysia sebagai alat untuk menimbung rasa nasionalisme di kalangan rakyat Indonesia. Artinya, secara diplomatik hubungan kedua negara ini biasa-biasa saja, namun kebencian rakyat Indonesia terhadap bangsa ini sudah sangat luar biasa.

Perang 'urat syaraf' yang dilakukan oleh Malaysia adalah melalui 'pencaplokan' budaya dan 'pendudukan' kedaulatan NKRI. Hingga saat ini pemerintah Indonesia tidak memberikan balasan yang cukup berarti dalam perang urat syaraf ini. Pemerintah Indonesia sudah menganggap bahwa warisan kebencian terhadap Malaysia dari Soekarno sudah cukup untuk menghadang sikap Malaysia tersebut. Jadi, pemerintah tinggal menjadikan isu kebencian ini sebagai alat untuk membalas terhadap perilaku bangsa Malaysia kepada Indonesia.

Dalam situasi seperti ini, kasus Manohara dan Ambalat dapat menjadi contoh yang cukup baik bagaimana sikap Indonesia terhadap Malaysia. Pada satu sisi, Indonesia dipancing melalui jalur kemiliteran, namun pada sisi lain, pihak Indonesia melalui media massa mulai secara perlahan-perlahan membuka aib keluarga Sultan di Kelantan. Saat ini Pemerintah Agong di Malaysia memang dipimpin oleh Sultan di negara bagian utara Malaysia ini. Jadi, perangai Teuku Fakri cukup menjadi preseden bagi rakyat Malaysia bahwa keluarga diraja juga hampir sama dengan keluarga Cina yang menyiksa TKW Indonesia. Inilah pesan moral yang ingin diimbangi oleh pihak Indonesia, artinya biarlah rakyat yang menilai dan memilih bagaimana harus bersikap terhadap perilaku keluarga raja.

Sudah dapat dipastikan bahwa pihak Malaysia akan menutup rapat-rapat aib keluarga Diraja ini. Namun keadaan Manohara yang tidak hanya menjadi warga Indonesia, juga warga Amerika, agaknya dapat menjadi cambuk terhadap kehormatan keluarga Raja di Malaysia. Jadi, semakin Malaysia menutup rapat-rapat kasus ini, semakin menampakkan bagaimana kualitas keluarga para raja di Malaysia. Sejauh ini, Raja atau Sultan di Malaysia merupakan simbol kedaulatan rakyat Melayu. Ketika simbol ini direpresentasikan oleh perilaku suami Manohara tersebut, dapat dibayangkan bahwa dalam hal ini, pihak Indonesia telah memenangi perang urat syaraf ini. Dengan kata lain, wajar kiranya Malaysia ingin mengubah persoalan simbol ini ke arah persoalan territorial, supaya perhatian bangsa Indonesia terpecah.

Demikian pula, jika sikap 'diam' Indonesia yang patuh pada peraturan internasional dalam kasus Ambalat, maka Malaysia ternyata memang tidak berhasil memancing kemarahan pihak Indonesia. Namun sikap kebencian rakyat Indonesia terhadap Malaysia ternyata dikelola dengan baik untuk membangkitkan rasa nasionalisme. Dalam hal ini, saya menduga bahwa pihak pemerintah Malaysia tidak mungkin tidak tahu apa yang dilakukan oleh tentara mereka di Ambalat. Jadi, pencaplokan wilayah kedaulatan NKRI adalah secara langsung maupun tidak langsung telah mendapat restu dari pihak pemerintah pusat di Kuala Lumpur.

Sebenarnya ada slogan klasik yang bisa dilakukan terhadap Malaysia yaitu Ganyang Malaysia.[3] Namun pemerintah RI tidak akan pernah berani melakukan hal ini, sebab secara ekonomi dan politis tidak akan menguntungkan pihak Indonesia. Namun ide lain yang dapat dilakukan, seperti ide ketika menghadang kesombongan negara Singapura beberapa waktu yang lalu, yaitu proses pengucilan oleh pihak Indonesia terhadap Malaysia. Pengucilan juga, hemat saya, juga tidak akan pernah dilakukan, mengingat pemerintah RI saat ini tidak seberani Soekarno. Padahal secara kasat mata, pemerintah Malaysia lebih banyak bergantung pada Indonesia. Beberapa pelaku bisnis Malaysia yang pernah saya jumpai mengatakan bahwa Indonesia adalah pangsa pasar yang cukup strategis, karena itu kestabilan ekonomi Malaysia, lebih banyak dipicu oleh keadaan sosial ekonomi Indonesia.

---

[3] Lihat misalnya sebuah perjalanan Malaysia dalam Ibrahim Mahmood, *Sejarah Perjuangan Umno: Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu (Suatu Penyikapan Kembali Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu Menuju Kemerdekaan)* (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1981). Mengenai upaya sebagian tokoh-tokoh Malaysia bergabung dengan Indonesia, dapat dibaca dalam Li Chuan Siu, *Ikhtisar Sejarah Pergerakan Dan Kesusasteraan Melayu Moden 1945-1965* (Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1986).

Misalnya, jika satu hari saja rakyat Indonesia tidak menggunakan pesawat Malaysia, maka dapat dipastikan berapa kerugian perusahaan ini dan apa akibatnya terhadap perekonomian bangsa Melayu ini. Sebab, di KLIA dan LCCT keberangkatan ke beberapa propinsi Indonesia sangat banyak, untuk tidak menyebut angka ribuan. Demikian pula, jika rakyat Indonesia memboikot semua produk Malaysia dan apapun yang berbau Malaysia, maka dapat dibayangkan apa yang akan dialami oleh pihak Malaysia. Pengalaman penutupan bandara di Bangkok dapat dijadikan sebagai contoh nyata, ketika bandara berhenti dalam beberapa saat. Karena itu, pengucilan dapat dilakukan, walaupun tidak akan pernah dipraktekkan. Akan tetapi jika atas rasa nasionalisme, ide ini dapat dipertimbangkan, mengingat Malaysia memang tidak pernah menghormati bangsa Indonesia dalam hal apapun.

Di sinilah letak kelemahan bangsa Indonesia, sebab bangsa ini tidak percaya diri dalam menghadapi satu masalah. Bangsa ini lebih suka memakai emosi rakyat sebagai senjata. Pikiran para diplomat adalah bagaimana menjaga hubungan bukan mencoba bersikap rasional dalam masalah ini. Bangsa ini tidak menghitung berapa biaya moril yang harus ditanggung oleh rakyatnya. Jadi, karena bangsa ini bukan bangsa yang mandiri, maka pihak Indonesia juga harus berterima kasih pada kasus Manohara dan Ambalat, karena di dalamnya ada serpihan-serpihan nasionalisme bangsa Indonesia yang dapat ditampung dalam ember bocor Republik Indonesia.

Sebenarnya jika langkah strategis di atas dilakukan selama 4 bulan saja, maka negara Malaysia akan mengalami perubahan yang cukup mendasar, yaitu bagaimana menghormati manusia dan bangsa lain untuk tidak menjadikan manusia sebagai binatang, seperti yang dialami oleh para TKW dan Manohara. Tambahan pula, jika bangsa Indonesia sepakat untuk menutup hubungan diplomatik dengan Malaysia, maka bangsa ini akan kembali pada semangat nasionalisme yang hakiki, sebagaimana yang pernah dipelopori oleh Soekarno melalui Ganyang Malaysia!

Namun lagi-lagi pemerintah Indonesia tidak akan berani mengambil sikap ini, dengan alasan yang bisa diduga-duga. Bangsa ini hanya berani pada warga sendiri. Inilah ciri khas Indonesia pasca-Orde Lama, di mana apapun akan dilakukan untuk bermesraan, walaupuan rasa nasionalisme tergadai di tengah lautan Ambalat dan deraian air mata Manohara. Nasionalisme Indonesia hanya muncul ketika media memblow up apapun yang dilakukan oleh pihak Malaysia sebagai satu kesalahan.

Akhirnya, nasionalisme tersebut tergadai dan tercerabut manakala pemerintah Indonesia tidak mampu menangkap sinyal dibalik sikap Malaysia terhadap Indonesia. Bangsa Indonesia hanya pandai mengelola konflik, namun tidak pernah pintar dan cerdas mengambil pesan dibalik konflik dengan Malaysia. Saya beranggapan bahwa air mata Manohara dan 'Manohara' yang lain akan terus

muncul sepanjang sejarah Indonesia. Demikian pula, tentara Diraja Malaysia akan terus mencaplok wilayah NKRI, karena pemerintah RI tidak memiliki wibawa di mata negara tetangga ini. Alhasil, ternyata kita membutuhkan Malaysia hanya untuk membangkitkan nasionalisme yang sudah hampir punah ini. ☙

BAB 42

Makna 1-Malaysia bagi Aceh

DALAM bab ini saya ingin mencari makna 1-Malaysia bagi rakyat Aceh. Setidaknya ada tiga andalan kenapa saya mengaitkan isu 1-Malaysia dengan Aceh. *Pertama*, jika ditinjau dari perspektif sejarah, hubungan Aceh dengan Semenanjung Melayu tidak dapat dinafikan. Setiap episode sejarah di Aceh selalu memiliki hubungan dan peristiwa yang terjadi di Tanah Melayu. Misalnya, ketika ramai orang menganggap Tun Sri Lanang dibunuh di Aceh, ternyata pujangga Melayu ini diangkat menjadi Raja pada satu negeri di Samalanga.[1] Ketika Aceh sedang berperang, beberapa wakil Aceh sibuk mencari sokongan di Pulau Pinang. Hal lain yang tidak dapat dipungkiri adalah bagaimana citra dan imej Sultan Iskandar Muda di Tanah Melayu.

Kedua, hubungan kekal antara Aceh dengan Melayu tidak hanya terbukti dalam sisi politik dan keamanan sahaja. Tetapi juga hubungan pemikiran yang telah berlangsung selama 4 abad lebih. Di sini kita boleh menyebut bagaimana Syed Naquib Al-Attas menyebutkan permata Melayu itu pernah bersinar tidak hanya di Melaka, tetapi juga di Pasai. Demikian pula, pujangga Melayu yakni Hamzah Fansuri telah berjasa dalam membina fondasi pemikiran ke-Melayu-an di

[1] A. Samad Ahmad, ed. *Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,2003); Tun Seri Lanang, ed. *Sulalat Al-Salatin Ya'ni Perturunan Segala Raja-Raja (Sejarah Melayu)* (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka,2009).

Aceh,[2] yang kemudian oleh Syed Naquib Al-Attas dipandang sebagai Bapak Sastera Melayu.[3] Inilah peranan yang sangat dominan dalam sejarah Aceh dan Melayu yang hingga hari ini para sarjana secara berterusan menggali aspek kontribusi Aceh dalam peradaban Melayu.

Ketiga, sebagai sebuah Negara Maju, Malaysia selalu menyibukkan diri membantu Aceh dalam keadaan apapun jua. Ketika konflik, Malaysia memberikan ruang negaranya bagi pendatang daripada Aceh untuk bertahan hidup. Di sini makna bertahan bukanlah dalam sekadar menopang cara cari makan, tetapi memberikan kesempatan bagi pemuda dan pemudi Aceh untuk menuntut ilmu di beberapa perguruan tinggi di Malaysia. Ketika Aceh dilanda Tsunami tahun 2004, Malaysia secara aktif memberikan bantuan baik materi maupun moril terhadap rakyat Aceh.

Tiga hal di atas membuktikan bagaimana hubungan yang kekal antara Aceh dengan Malaysia. Hubungan ini memanglah hubungan negara dengan negeri. Ini kerana Aceh tidak lagi menjadi suatu negara, melainkan sebuah negeri di Indonesia. Hubungan-hubungan tersebut terus berlaku tanpa ada halangan dan cabaran yang bermakna. Sehingga ketika adanya slogan 1-Malaysia, agaknya Aceh boleh berada dalam satu kafilah negara Malaysia. Konsep kafilah memang seperti kumpulan orang yang hendak mencapai satu tujuan bersama yang dipimping oleh seorang amir.

---

[2] Lihat beberapa kajian berikut: Vladimir Braginsky, "The Name and the Named: On the Extent of Hamzah Fansuri's Renown in the Malay Indonesian World (Notes and Materials)," in *Knowledge, Language, Thought and Civilization of Islam: Essays in Honor of Syed Muhammad Naquib Al-Attas*, ed. Wan Mohd Nor Wan Daud and Muhammad Zainiy Uthman (Skudai: Universiti Teknologi Malaysia, 2010); V. I. Braginsky, "Some Remarks on the Structure of the *Syair Perahu* by Hamzah Fansuri," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 131, no. 4 (1975); V. I. Braginsky, "Towards the Biography of Hamzah Fansuri. When Did Hamzah Live ? Data from His Poems and Early European Accounts," *Archipel* 57(1999); V. I. Braginsky, "On the Copy of Hamzah Fansuri's Epitaph Published by C. Guillot & L. Kalus.," *Archipel* 62(2001); Amirul Hadi, "Exploring the Life of Hamzah Fansûrî," *Al-Jâmi'ah: Journal of Islamic Studies* 41, 2(2003); Hamdan Hassan, "Konsep Wujudiyah Hamzah Fansuri," in *Tokoh-Tokoh Sastera Melayu Klasik*, ed. Mohammad Daud Mohamad (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987); T. Iskandar, "Hamzah Fansuri Pengarah, Penyair, Ahli Tasawuf," in *Tokoh-Tokoh Sastera Melayu Klasik*, ed. Mohammad Daud Mohamad (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987); A. Johns, "The Poems of Hamzah Fansuri," *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 146, no. 2/3 (1990).

[3] Al-Attas, *Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu*.

Di Aceh tidak ada lagi raja atau sultan. Di Aceh tidak ada lagi pujangga sekaliber Hamzah Fansuri. Di Aceh juga tidak ada lembaga perguruan tinggi yang ternama. Di Aceh juga tidak ada lagi kesultanan yang boleh membina hubungan mesra dengan beberapa kerajaan/kesultanan di Malaysia. Artinya, Aceh telah berada pada titik nadir di mana tidak ada yang boleh dijadikan sebagai rombongan utama, kecuali dia duduk di bangku paling belakang dalam kafilah 1-Malaysia.

Karena itu, ketika muncul 1-Malaysia, propaganda ini tidaklah sampai ke Aceh. Sebab propaganda ini hanya bertujuan pada isu perpaduan dan perkauman yang ada di Malaysia sendiri. Inilah yang menarik bagi wacana apakah 1-Malaysia sama dengan konsep 1-Melayu.[4] Konsep 1-Melayu belum muncul, karena persoalan "mereka" dan "kami" tidak berlaku bagi rakyat Aceh. Konsep 1-Melayu bertujuan untuk mengais sejarah identiti di Tanah Melayu untuk saling bersatu atas nama kesamaan budaya, bahasa, dan sejarah. Inilah kemudian yang memberikan andil yang cukup besar bagi peranan Aceh di dalamnya.

Sebagai contoh, Andaya dalam artikelnya Aceh's Contribution to Standard of Malayness (2001: 29-68) telah memberikan satu penjelasan yang cukup bagus mengenai bagaimana kontribusi Aceh dalam membentukan Dunia Melayu.[5] Saat ini tentu saja Dunia Melayu berbeza dengan Dunia Malaysia. Aceh, dalam hal ini, pernah memberikan peranan yang cukup signifikan terhadap Dunia Melayu, walaupun belum ada konsep 1-Melayu. Dengan kata lain, konsep berterusan untuk mempersatukan orang Melayu boleh diambil dari hubungan baik antara Aceh dengan Melayu atau Aceh dengan Malaysia.

Jadi, kalaulah boleh diandai dalam kajian ini adalah untuk berusaha memperkuat perpaduan di antara kaum Melayu untuk terus: *Pertama*, menjaga nilai-nilai sejarah Melayu. *Kedua*, membina hubungan yang mesra dengan seluruh etnik Melayu yang ada di rantau Asia Tenggara. *Ketiga*, menarik kembali isu kebangkitan Dunia Melayu guna menjadikan Malaysia sebagai penggagas 1-Melayu.

Hal ini berbeda dengan konsep 1-Malaysia yang bersifat *state oriented*. Konsep 1-Melayu bersifat pada *ethno oriented* yang sekiranya boleh menjadi isu serantau, minimal pada tingkat ASEAN. Hal ini disebabkan pada tahun 2015, ASEAN akan menjalankan sebuah konsep Komunitas ASEAN.[6] Tentu saja, pengalaman

---

[4] Lihat misalnya, Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Menatap Masa Depan Melayu Di Asia Tenggara: Sebuah Catatan Sosial Antropologis" (paper presented at the International Conference on Islam in Malay World, Bandung, 2011).

[5] Lihat juga Andaya, *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*.

[6] Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Redefinisi "Perbatasan Dan Keamanan" Di Asia Tenggara (Sebuah Paradigma Untuk Ketahanan Nasional)," *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

bagaimana Aceh menjadikan standarisasi Melayu boleh ditiru dari perspektif sejarah dan etnologi. Walaupun sekarang Aceh tidaklah seperti Aceh dahulu kala. Upaya untuk membangun konsep 1-Melayu ini tentu saja boleh dilakukan melalui pencapaian yang telah dilakukan melalui konsep 1-Malaysia.

Artinya, konsep 1-Melayu berusaha untuk menghimpun semua lapisan Melayu di dunia ini. Ini bersifat kosmopolitan dan lebih pada tahap identitas sahaja.[7] Jika ini boleh dilakukan, maka sekali lagi, Aceh akan terus menempel pada konsep 1-Melayu, sebagaimana etnik lainya seperti Minangkabau dan Bugis.

Alhasil, jika semua mimpi di atas dilakukan, maka Malaysia akan menjadi negara pertama di dunia yang mampu menghimpun satu etnis besar. Hanya saja, kita pasti punya alasan untuk memikirkan ulang, karena jika mengambil pengalaman Aceh, tentu sahaja mimpi tersebut akan sia-sia belaka. Namun, jika diambil spirit hubungan Aceh dengan Melayu, maka konsep 1-Melayu boleh menjadi isu baru di Rantau Asia Tenggara ini. ☙

15, no. 2 (2011).

[7] Kahn, *Other Malays: Nationalism and Cosmopolitanism in the Modern Malay World*.

Poskrip:
Menatap Masa Depan Aceh

KETIKA buku ini diselesaikan, Aceh sedang mengalami proses transisi politik yang amat kuat. Sehingga proses transisi politik mengundang sejumlah kekhawatiran bahwa operasi militer akan dijalankan di Aceh, khususnya ketika pesta demokrasi dijalankan, yakni PILKADA berlangsung. Transisi politik yang dimaksud adalah keupayaan rakyat Aceh untuk berpolitik secara terbuka untuk memilih pemimpin, gubernur. Sejak MoU Helsinki ditandatangani, upaya meleburkan GAM ke dalam masyarakat dan birokrasi telah berjalan dengan baik. Walaupun, iramanya selalu diwarnai dengan kekerasan, mulai dari perampokan hingga ke penembakan. Proses ini sedang berlangsung, di mana rakyat dan elit politik Aceh sedang menjalankan fungsinya masing-masing. Namun, ditengah-tengah transisi politik ini, pihak pemerintah pusat tetap menginginkan proses ini berlangsung di bawah kontrol dan payung NKRI. Artinya, apapun gerakan politik, baik yang dimainkan oleh mantan kombatan dan non-kombatan, haruslah mengedepankan NKRI.

Dalam buku ini, pembaca agaknya telah bisa menangkap bagaimana dinamika Aceh sejak Tsunami tahun 2004. Dinamika yang dimaksud adalah kejelasan antara kepentingan rakyat Aceh dengan kepentingan luar Aceh. Kepentingan luar Aceh, setidaknya terbagi ke dalam dua kategori, yaitu kepentingan dalam negeri dan luar negeri. Setiap kepentingan tersebut, selalu melibatkan tokoh-tokoh lokal untuk memainkan peran mereka di kancah lokal. Kepentingan yang dititipkan ini kemudian menjelma menjadi mesiu konflik kepentingan, antara kelompok yang mengingkan Aceh tetap di bawah NKRI dengan kelompok yang menginginkan Aceh lepas dari NKRI. Secara kasat mata, kelompok terakhir memang tidak begitu mencuat, karena kata 'merdeka' tidak ada lagi dalam kamus perjuangan politik rakyat Aceh. Paling tidak, ini terlihat dari keterlibatan anggota GAM baik dalam aspek eksekutif dan legislatif. Mereka sekarang menjadi tokoh atau pemain utama dalam kancah politik.

Melihat luasnya cakupan dari isi buku ini, menyiratkan bahwa dinamika atau penggalan sejarah Aceh selama 7 tahun terakhir cukup komplek. Misalnya, bagaimana kita menjelaskan keterlibatan kombatan dalam kehidupan sosial dan politik rakyat Aceh. Keterlibatan mereka dalam melakukan diplomasi politik ke pihak pemerintah pusat. Demikian pula, keterlibatan beberapa tokoh inti dalam menjaga nilai-nilai perdamaian yang telah digagas pada tahun 2005. Angka 7 merupakan angka yang penuh misteri.[1] Karena itu, sulit memprediksi bagaimana sejarah masa depan Aceh, khususnya ketika para pemain politik di Aceh, tidak mampu mengikuti irama kendali politik yang dimainkan oleh pemerintah Indonesian.

Buku ini, secara telegrafik telah mencoba merespon beberapa peristiwa penting yang terjadi di Aceh. Dari aspek agama, isu hukum Islam dan pemurtadan menjadi dominan. Walaupun persoalan aliran sesat di Aceh juga tidak kalah pentingnya untuk dikaji. Aspek kajian terhadap agama di Aceh tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan rakyat Aceh. Namun, persoalan sosial politik juga menjadi hal yang cukup penting, terutama setelah penandatangan MoU Helsinki pada tahun 2005. Bab-bab dalam buku ini telah merespon berbagai isu yang muncul, terutama dalam persoalan hubungan sikap Jakarta terhadap Aceh, persoalan kepemimpinan dan pemerintahan, dan langgam politik para mantan kombatan GAM/TNA. Tidak kalah pentingnya adalah peristiwa politik di Jakarta, yang terkadang, sedikit banyak mewarnai berita dan isu yang berkembang di Aceh. Sikap Jakarta selalu menjadi perhatian rakyat Aceh, terutama ketika persoalan sosial keamanan muncul di propinsi paling Barat ini.

Dari berbagai isu dan isi buku ini, terlihat bahwa secara teoritik, Aceh masih sangat *fragile* untuk dikatakan sebagai propinsi yang aman. Ketika para investor di undang, tidak sedikit kekerasan muncul di beberapa tempat di Aceh. Ketika Aceh damai, tanah *endatu* menjadi ladang amal bagi para teroris. Ketika Aceh sedang asyik membangun semangat keagamaan, malah isu pemurdatan dan aliran sesat begitu marak. Dapat dikatakan bahwa Aceh, sedang dan akan menjadi laboratorium sosial bagi para peminat kajian ilmu-ilmu sosial. Dibandingkan dengan propinsi lain, negeri Aceh selalu melewati berbagai krisis yang terkadang tidak pernah berujung. Karena itu, salah satu syarat menjadi rakyat Aceh adalah membiasakan diri dengan semua peristiwa sosial dan politik, yang berujung pada persoalan keamanan.

---

[1] Annemarie Schimmel, *The Mystery of Numbers: Misteri Angka-Angka Dalam Berbagai Peradaban Kuno Dan Tradisi Agama Islam, Yahudi, Dan Kristen*, trans. Agung Prihnatoro (Bandung: Pustaka Hidayah, 2006).

Untuk itu, bagian akhir buku ini mencoba melihat bagaimana tensi kehidupan rakyat Aceh di masa yang akan datang. Tentu saja melihat masa depan, tidak bisa melewatkan apa yang terjadi pada masa lalu dan masa yang akan datang. Kalau kita menceritakan masa lalu dan membaca sejarah hikayat-hikayat yang berbahasa Aceh dan Melayu, maka tidak dapat dipungkiri Aceh merupakan satu Negara yang berdaulat. Aceh memiliki sistem ketatanegaraan tersendiri. Namun setelah Aceh bertemu dengan Belanda dan kepentingan Inggris di Selat Melaka, Aceh mengalami perubahan yang cukup signifikan. Bahkan perubahan yang paling krusial adalah ketika Aceh bertemu dengan kuasa Jawa. Aceh menjadi kerdil dan sangat kecil. Apapun yang dituntut oleh rakyat Aceh, mulai dari pelaksanaan syari'at Islam hingga kemerdekaan, selalu berujung pada *syo' ujong*. Maksudnya, tidak pernah berhasil dan tidak pernah mendapatkan kebahagian yang hakiki sebagai sebubah negara yang berdaulat.

Salah satu aspek yang paling menyedihkan adalah kehilangan konsep kuasa dan doktrin kosmik sebagai orang Aceh. Di Aceh tidak ada lagi kuasa sebagai sebuah kerajaan atau pemerintahan yang berdaulat. Ketidakadaan Sultan atau raja, menyebabkan Aceh tidak memiliki otoritas duniawi yang paling tinggi. Poros kuasa hilang begitu Aceh mendapat perlawanan dari pihak Belanda dan bergabung dengan Republik Indonesia. Nasib Aceh memang tidak lebih baik dibandingkan dengan kawan sejawatnya yaitu Melaka. Menurut sejarah, Aceh dan Melaka memang telah berjasa dalam membina peradaban di Nusantara. Demikian pula, otoritas keagamaan yang ada pada ulama juga sedikit demi sedikit mulai terkikis. Peran sosial mereka dalam segala bidang kehidupan digantikan oleh aparatur pemerintah, yang memiliki wawasan dan konsep yang berbeda. Karena kedua otoritas dunia dan spiritual meredup, maka dunia kosmik keacehan menghilang sedikit demi sedikit.

Adapun serpihan hasil peradaban dan kebudayaan *endatu* menjadi faktor simbolik ketika rakyat Aceh ingin membuka lembaran sejarah kegemilangan mereka. Maksudnya, mereka mampu memahami konteks sejarah, namun tidak mampu mengulang kegemilangan yang pernah dilakukan oleh para *endatu*. Serpihan peradaban Aceh yang paling diakui adalah karya-karya intelektual para ulama dan sistem ketatanegaraan yang sangat mapan untuk zamannya. Kini simbol-simbol tersebut telah terlembagakan bukan di atas mahkota para diraja atau sabda pandita para ulama. Akibatnya, serpihan tersebut menjadi spirit yang tidak mampu menggerakan energi rakyat Aceh untuk menjadi lebih baik di kemudian hari.

Dalam buku ini, terlihat bahwa rakyat Aceh begitu cepat merespon setiap isu yang berkembang. Mereka walaupun kerap menjadi objek "permainan" dari

pemerintah pusat, melalui berbagai cara dan pola, selalu menginginkan, untuk tidak mengatakan bermimpi, memiliki pemimpin sekaliber Sultan Iskandar Muda. Spirit Sultan ini masih menyusup dalam jiwa rakyat Aceh. Berpikir untuk menyelesaikan sesuatu dengan penuh wibawa masih menjadi pedoman rakyat Aceh. Namun, karena kekuasaan dan kewenangan tidak lagi berada di Aceh, maka apapun yang diinginkan oleh rakyat Aceh harus diperjuangkan terlebih dahulu. Mereka harus mempertegas eksistensi mereka di hadapan NKRI. Mereka juga harus menceritakan bagaimana jasa *endatu* mereka pada NKRI. Cerita-cerita tersebut, walaupun kerap menjadi romantisme sejarah, terkadang mampu membangkitkan spirit keacehan. Dengan kata lain, sejarah menjadi pembangkit semangat. Walaupun pada kenyataannya, sejarah di Indonesia lebih banyak dikuasai dan dimonopoli oleh sejarah Jawa,[2] maka Aceh selalu menjadi "catatan tersendiri" bagi negara Indonesia.

Untuk itu, melihat Aceh masa depan tentu saja sama dengan melukis di atas air. Karena hubungan Aceh dengan Jawa telah menyisakan sejumlah kecemasan bagi rakyat Aceh. Pada saat yang sama, hubungan Aceh dengan Melayu, pada masa yang akan datang, juga seperti melukis di atas batu. Maksudnya, hubungan Aceh dengan Jawa, sama sekali tidak memiliki dasar yang amat kokoh. Sehingga kerapuhan hubungan ini, dimanfaatkan oleh GAM untuk membangkitkan semangat perlawanan terhadap Jawa. Namun, belakangan hubungan tersebut kembali mesra, setelah MoU Helsinki. Pada saat yang bersamaan, hubungan Aceh dengan Melayu, seperti hendak bersatu. Namun kedua identitas ini tidak bisa bersatu dalam kerangka *negara bangsa*.[3] Mereka hanya bersatu dalam kerangka hubungan sejarah. Akibatnya, orang Melayu selalu menceritakan bagaimana hubungan nenek moyang mereka dengan orang Aceh.

Potret suram masa depan Aceh juga tidak kalah pentingnya dengan potret suram Republik Indonesia. Ketika buku ini ditulis (2012), Indonesia sedang mengalami kemelut politik yang tidak berujung. Aceh sedang akan melaksanakan Pilkada. Kemelut politik Aceh, terutama konflik elit politik, selalu direspon oleh pihak Jakarta. Hanya saja, respon kali ini tidaklah melalui operasi militer. Namun, kepentingan elit Aceh dirangkul dalam satu ikat sayur politik. Misalnya, GAM melalui PA (Partai Aceh) tidak lagi malu-malu untuk merangkul para jenderal yang pernah menjadi komandan terdepan dalam beberapa operasi militer di Aceh. Pada saat yang sama, beberapa elit jenderal di Jakarta sudah diisukan untuk melakukan

[2] Lihat misalnya Kuntowijoyo, *Selamat Tinggal Mitos Selama Datang Realitas: Esai-Esai Budaya Dan Politik* (Bandung: Mizan, 2002).

[3] David Brown, *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia* (London: Routledge, 1995).

protes terhadap gaya kepemimpinan Presiden SBY (Susilo Bambang Yudhoyono). Namun, konflik di Jakarta sedikit banyak selalu berimbas pada eskalasi politik di Aceh.

Hanya saja di Aceh, semua kekuatan yang berkonflik di Aceh[4] sudah dirangkul dengan baik oleh pemerintah Indonesia. Karena itu, adanya pendekatan baru dalam menangani konflik di Aceh amat menarik untuk dicermati. Dengan kata lain, setiap pelaku konflik kepentingan tidak dibiarkan ”liar.” Sehingga masing-masing pihak menganggap mendapat restu atau ”pengamanan” dari Jakarta. Pola mem-back up pelaku konflik kepentingan ini dapat dikatakan sebagai sejarah baru Aceh. Dengan begitu, pihak asing tidak bisa melakukan proses pendampingan bagi pihak-pihak yang bertikai di Aceh. Sehingga masing-masing kelompok bisa menjalankan misi-misi mereka pada poros masing-masing, asalkan tidak memisahkan diri dari Republik Indonesia. Akan tetapi, karena potret suram bangsa Indonesia, maka pola ini pun tidak menyehatkan situasi pembangunan di Aceh. Sebab, masa depan Aceh tidak lagi ditentukan oleh rakyat Aceh sendiri, melainkan dikelola oleh para elit lokal.

Akibatnya, sejarah masa depan Aceh hanya menjadi sejarah para pelaku yang hanya mementingkan kelompok dan individu semata. Turunnya tensi dari meminta ”mardeka” kepada ”damai” telah memperlihatkan bagaimana dinamika kehidupan sosial kemasyarakatan dan sosial politik. Bab-bab dalam buku ini telah menunjukkan perjalanan tersebut ditoreh oleh baik pelaku, baik mantan kombatan maupun non-kombatan. Peristiwa Tsunami tahun 2004 dan Damai 2005 adalah dua peristiwa penting dalam memori rakyat Aceh. Ketika damai ditandatangani, dimaksudkan untuk menghentikan semua kegiatan perang yang telah merengut nyawa manusia. Adapun peringatan Tsunami memberikan pelajaran bagaimana ratusan ribu nyawa manusia hilang dalam waktu beberapa saat. Dengan kata lain, sepak terjang para pelaku sejarah di Aceh berada di atas ratusan ribu nyawa manusia, baik yang meninggal akibat konflik maupun tragedi Tsunami.

Dalam sejarah kemanusiaan, perilaku membantai nyawa manusia adalah hal yang kerap ditemui dalam literatur sejarah. Setiap diktator sudah pasti hidup di atas nyawa-nyawa manusia. Namun, setelah diktator tersebut mati, bangsa yang menjadi korban perilaku elit tersebut, sering menjadi bangsa yang terdepan dalam kemajuan. Di sini jika dibandingkan dengan sejarah Aceh kontemporer, dampak dari ratusan ribu nyawa manusia tidak begitu membekas dalam jiwa para pelaku

[4] Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad, "Tiga Kekuatan Besar," *Serambi Indonesia*, 6 Juli 2011.

sejarah di Aceh. Mereka ternyata tidak begitu memperhatikan antara pengorbanan dan perjuangan. Karena itu, untuk meramal masa depan sejarah Aceh memang agak sulit, karena:

Pertama, tidak ada ideologi yang memaksa orang Aceh untuk bersatu dan bertahan di bawah kepentingan bersama. Bahkan ideologi keacehan, telah sirna dan menjadi semacam *panacea* sejarah. [5] Hasan di Tiro hanya bisa menjadikan sejarah sebagai sumber ideologinya. Namun, pada tahun 2005, dia dikhianati oleh kawan-kawan seperjuangangnya sendiri, untuk berhenti di depan kata "damai" dengan pemerintah Republik Indonesia.

Kedua, tidak ada kesamaan persepsi mengenai identitas keacehan. Sejauh ini, identitas keacehan belum mampu menjadi spirit untuk melawan spirit ke-Jawa-an dalam bingkai NKRI. Pola pengembosan identitas Aceh, tidak hanya dilakukan dengan proses adu domba antar sesama mantan pejuang yang selalu memiliki semangat keacehan, tetapi juga dilakukan dengan memporak-porandakan struktur masyarakat. Persoalan identitas memang menjadi persoalan tersendiri pada abad ke-21 ini. Sebab, identitas sudah tidak lagi mengenal tapal batas, yang sudah dibungkus dengan semangat globalisme dan kosmopolitanisme. Artinya, jika pun Aceh masih ingin dipertahankan identitasnya, maka tantangannya tidak hanya datang dari lokal dan nasional, tetapi juga internasional. Sedangkan dari nasional berupaya untuk "menghancurkan" dari dalam identitas keacehan. Dengan kata lain, orang Aceh tidak memiliki konsep yang komprehensif mengenai jati diri keacehan. Dengan kata lain, untuk menoreh sejarah masa depan, orang Aceh masih belum memiliki impian, seperti yang pernah dipraktikka oleh generasi terdahulu.[6]

Ketiga, adanya kelompok baru dalam kehidupan sosial keagamaan yang memaksa rakyat Aceh mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan adat istiadat dan kebudayaan mereka sehari-hari. Harus diakui bahwa telah terjadi proses pengkotakkan antara kehidupan adat dengan kehidupan beragama. Kehidupan adat istiadat telah ditarik sedemikian kuatnya pada ranah simbolik semata. Sedangkan kehidupan beragama ditarik pada ranah formalisme. Dalam sejarah Aceh, adat dan agama disatukan dalam satu tarikan nafas orang Aceh. Pola ini hanya dapat dilihat di kawasan pedesaan. Kendati pada saat yang sama, telah mengalami proses modernisasi. Adat yang pada awalnya merupakan inti sari cara berpikir mengenai pandangan hidup orang Aceh dipaksakan berada pada wilayah-wilayah simbolik. Adat tidak lagi menjadi hal terpenting dalam kehidupan rakyat Aceh. Demikian

[5] Reid, *An Indonesian Frontier: Acehnese & Other Histories of Sumatra*.

[6] Bambang Bujono, ed. *Aceh Kembali Ke Masa Depan* (Jakarta: IKJ Press,2005).

pula, agama yang pada awalnya merupakan bagian dari *living tradition* juga dipaksakan melalui semangat formalisme agama pada ranah yang cukup rigid. Hal di atas boleh karena telah terjadi pergeseran dalam bidang transformasi sosial dan transformasi ilmu pengetahuan. Sehingga, beberapa peristiwa yang dianalisa dalam buku ini menguatkan pandangan tersebut.

Keempat, Aceh menjadi bahagian Republik Indonesia. Negara ini sendiri setiap detik selalu dilanda krisis dalam berbagai bidang. Adapun fondasi kebangsaan Indonesia adalah negara yang mempertahankan nilai-nilai kosmik dari budaya Aceh. Harus diakui bahwa sejak bergabung dengan NKRI, Aceh memang selalu dilanda konflik. Bahkan, setelah GAM dan RI berdamai, Aceh tetap mewariskan konflik dari generasi sebelumnya. Pola penyelesaian damai dengan pihak Aceh, yang sedikit banyak, diwakilkan pada gerakan GAM, telah mengakibatkan Aceh berada dalam posisi buah simalakama. Maksudnya, GAM sendiri menjadi pemicu dan pemacu konflik dan telah banyak menyakiti masyarakat Aceh, atas nama propoganda yang dimainkan. Sedangkan RI, dalam beberap hal tertentu, kerap bermain mata dengan elit GAM, mulai dari distribusi keperluan ekonomi hingga kaplingan wilayah-wilayah kekuasaan di Aceh. Akibatnya, ke depan, sejarah Aceh akan sangat suram, kecuali generasi GAM mampu merumuskan identitas Aceh Baru. Sejauh ini, GAM ingin kembali pada 1873 dan era sultan Iskandar Muda, namun perilaku dan pola diplomasi mereka, masih jauh kalah dengan era diplomasi era perdagangan Aceh dengan Pulau Pinang.[7] Artinya, saat itu, orang Aceh disegani karena memiliki marwah dan memiliki alasan kuat untuk menyatakan bahwa *kami berbeda dengan anda!*

Dalam buku ini, paling tidak, telah dijelaskan dinamika dan pengalaman pahit Aceh bersatu dengan Republik Indonesia. Dinamika tersebut terus menjadi saksi sejarah untuk mengatakan bahwa Aceh perlu melakukan perubahan paradigma, yaitu berpikir mengenai jati diri keacehan dan kembali memikirkan bahwa yang dapat menulis sejarah masa depan Aceh adalah rakyat Aceh sendiri. Selama 8 tahun terakhir, kita telah menyaksikan betapa kuat arus pusaran sejarah Aceh yang terjadi, mulai dari persekongkolan beberapa gelintir yang mengatasnamakan Aceh hingga pada perubahan kebudayaan yang dilakukan atas nama rehab-rekon Tsunami. Namun, pengalaman satu dekade terakhir ini, diharapkan mampu memberikan

[7] Salina Zainol, *Hubungan Perdagangan Aceh Dengan Pulau Pinang* (Kuala Lumpur: UM Press, 2005). Nordin Hussin, "Networks of Malay Merchants and the Rise of Penang as a Regional Trading Centre," *Southeast Asian Studies* 43, no. 3 (2005); Nordin Hussin, *Trade and Society in the Straits of Melaka: Dutch Melaka and English Penang, 1780-1830* (Singapore: NUS Press, 2007).

proses penyadaran kepada masyakarat Aceh, tentang makna perbuatan dan sikap mereka terhadap sejarah Aceh. Buku ini, dengan begitu, telah merekam sikap orang Aceh dalam merespon dinamika sejarah mereka sendiri. ☙

Daftar Pustaka

Abas, Nasir. *Membongkar Jamaah Islamiyah: Pengakuan Mantan Ketua JI*. Jakarta: Grafindo Khazanah Ilmu, 2009.

Abdullah, Kamarulnizam. *The Politics of Islam in Contemporary Malaysia*. Bangi: UKM Publisher, 2003.

Abdullah, M. Amin. *Dinamika Islam Kultural: Pemetaan Atas Wacana Keislaman Kontemporer*. Diedit oleh M. Muchlas Rowi, Hilman Latief and Asep P.B. Bandung: Mizan, 2000.

Abdullah, Taufik. *Islam Dan Masyarakat: Pantulan Sejarah Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial, 1996.

Abinales, Patricio N. *Making Mindanao: Cotabato and Davao in the Formation of the Philippine Nation-State*. Manila: Ateneo De Manila University Press, 2004.

Abrahamian, Ervand. "'Ali Shari'ati: Ideologue of the Iranian Revolution." In *Islam, Politics, and Social Movements*, 289-97. London: I.B. Tauris, 1988.

Ahmad, A. Samad, ed. *Sulalatus Salatin: Sejarah Melayu*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2003.

Ahmad, Shahnon. *Kesasterawanan Kepolitikan, Kealaman, Kedirian, Kemanusiaan*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1992.

Akkach, Samer. "The World of Imagination in Ibn 'Arabi's Ontology." *British Journal of Middle Eastern Studies* 24,1 (1997): 97-113.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib. *Islam and Secularism*. Kuala Lumpur: ISTAC, 1993.

_____. *Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu*. 4 ed. Bandung: Mizan, 1990.

_____. *Islam Dalam Sejarah Dan Kebudayaan Melayu*. Bangi: UKM Publisher, 1972.

_____. *The Mysticism of Hamzah Fansuri*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press, 1970.

_____. *Rânîrî and the Wujûdiyyah of 17th Century Acheh*. Singapore: MBRAS, 1966.

_____. *Some Aspects of Sufism as Understood and Practised among the Malays*. Singapore: Malaysia Sociological Research Institute, 1963.

Al-Chaidar. *Aceh Bersimbah Darah: Mengungkap Penerapan Status Daerah Operasi Militer (Dom) 1989-1998*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1999.

al-Ranirî, Syaikh Nûrdîn Muhammad Jaylanî ibn 'Alî Hasanî ibn Muhammad Hamîd. *Shirât Al-Mustaqîm*. Jeddah: Al-Haramayn, n.d.

Alfian, Ibrahim. *Perang Di Jalan Allah*. Jakarta: Sinar Harapan, 1987.

Amin, M. Masyhur. "Kedudukan Kelompok Elite Aceh Dalam Perspektif Sejarah." In *Kelompok Elit Dan Hubungan Sosial Di Pedesaan*, diedit oleh Alfian, 11-60. Jakarta: Pustaka Grafika Kita, 1988.

Amiruddin, M. Hasbi. *Ulama Dayah: Pengawal Agama Masyarakat Aceh*. Translated by Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad. Lhokseumawe: Nadya Foundation, 2003.

Amstrong, Karen. *The Case Fo God*. New York: Anchor Books, 2009.

Amstrong, Karen. *History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam*. New York Ballantine Books, 1993.

An-Na'im, Abdullahi Ahmed. *Islam and the Secular State: Negotiating the Future Shari'a*. Cambridge: Harvard University Press, 2007.

Andaya, Leonard Y. "Aceh's Contribution to Standards of Malayness." *Archipel* 61 (2001): 29-68.

_____. *Leaves of the Same Tree: Trade and Ethnicity in the Straits of Melaka*.

Honolulu: University of Hawai'i Press, 2008.

Anderson, Benedict. *Spectre of Comparisons: Nationalism, Southeast Asia, and the World*. Manila: Ateneo de Manila University Press, 2004.

Aphornsuvan, Thanet. "Origins of Malay Muslim "Separatism" in Southern Thailand." In *Thai South and Malay North: Ethnic Interaction on a Plural Peninsula*, diedit oleh Michael J. Montesano dan Patrick Jory, 91-123. Singapore: NUS Press, 2008.

Arkoun, Mohammed. "The Concept of Authority in Islamic Thought: La Hukma Illa Lillâh." In *The Islamic World: From Classical to Modern Times*, diedit oleh C.E. Boswirth, Charles Issawi, Roger Savory dan A.L. Udovitch, 31-54. Darwin: The Darwin Press, 1989.

Aspinnall, Edward. "Combatants to Contractors: The Political Economy of Peace in Aceh." *Indonesia* 87 (2009): 1-34.

_____. "The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?" In *Policy Studies No. 20* Washington: East-West Center, 2005.

_____. "The Helsinki Agreement: A More Promising Basis for Peace in Aceh?" In *Policy Studies*. Washington: East-West Center Washington, 2005.

_____. *Islam and Nation: Separatist in Aceh, Indonesia*. California: Stanford University Press, 2009.

Avineri, Shlomo. *The Social and Political Thought of Karl Marx*. Cambridge: Cambridge University Press, 1972.

Baharuddin, Shamsul Amri. "Identity Construction, Nation Formation, and Islamic Revivalism in Malaysia." In *Politics and Religious Renewal in Muslim Southeast Asia*, diedit oleh Robert W. Hefner dan Patricia Horvatich, 207-27. Honolulu: University of Hawaii Press, 1997.

_____. "A Question of Identity: A Case Study of Malaysian Islamic Revivalism and the Non-Muslim Response." In *Nation-State, Identity and Religion in Southeast Asia*, diedit oleh Tsuneo Ayabe. Singapore: Singapore Society of Asian Studies, 1998.

Barnard, Timothy P., ed. *Contesting Malayness: Malay Identity across Boundaries*. Singapore: Singapore University Press, 2006.

Barr, Michael D. *Cultural Politics and Asian Values: The Tepid War*. London dan New York: Routledge Curzon, 2004.

Barton, Greg. *Gagasan Islam Liberal Di Indonesia: Pemikiran Neo-Modernisme Nurcholish Madjid, Djohan Effendi, Ahmad Wahib, Dan Abdurrahman Wahid*. Jakarta: Paramadina, 1999.

_____. "Indonesia's Nurcholish Madjid and Abdurrahman Wahid as Intellectual Ulama: The Meeting of Islamic Traditionalism and Modernist in Neo-Modernist Thought." *Islam and Christian-Muslim* 8,3 (1997): 337-42.

_____. *Indonesia's Struggle: Jemaah Islamiyah and the Soul of Islam*. Sidney: University of New South Wales Press, 2004.

_____. "Neo-Modernisme: A Vital Synthesis of Traditionalist and Modernist Islamic Thought in Indonesia." *Studia Islamika* 2,3 (1995): 1-75.

Benda, Harry J. "The Structure of Southeast Asian History: Some Preliminary Observations." In *Continuity and Change in Southeast Asia: Collected Journal Articles of Harry J. Benda*, diedit oleh Adrienner Suddard, 121-53. New Haven: Yale University Southeast Asia Studies, 1972.

Binder, Leonard. *Islamic Liberalism: A Critique of Development Ideologies*. Chicago dan London: The University of Chicago Press, 1988.

Bottomore, Tom, ed. *A Dictionary of Marxist Thought*. Diedit oleh Laurence Harris, V.G. Kiernan dan Ralph Miliband. Oxford: Blackwell Reference, 1988.

Bottomore, Tom, ed. *Modern Interpretations of Marx*. Oxford: Basil Blackwell, 1981.

Bowen, John R. "Elaborating Scripture: Cain and Abel in Gayo Society." *Man* 27,3 (1992): 495-516.

_____. "The Forms Culture Takes: A State-of-the-Field Essay on the Anthropology of Southeast Asia." *The Journal of Asian Studies* 54,4 (1995): 1047-78.

_____. *Muslims through Discourse*. New Jersey: Princenton University Press, 1993.

_____. "On Scriptual Essentialism and Ritual Variation: Muslim Sacrifice in Sumatra and Morocco." *American Ethnologist* 19,4, no. Imagining Identities: Nation, Culture, and the Past (1992): 656-71.

_____. *Religion in Practices: An Approach to the Anthropology of Religion*. New York: Pearson, 2004.

_____. "Salat in Indonesia: The Social Meanings of an Islamic Ritual." *Man* 24,4 (1989): 600-19.

_____. *Sumatran Politics and Poetics: Gayo History, 1900-1989*. New Haven dan London: Yale University Press, 1991.

_____. "The Transformation of an Indonesian Property System: "Adat," Islam, and Social Change in the Gayo Highlands." *American Ethnologist* 15, no. 2 (1988): 274-93.

_____. ""You May Not Give It Away": How Social Norms Shape Islamic Law in Contemporary Indonesian Jurisprudence." *Islamic Law and Society* 5, no. 3 (1998).

Braginsky, V. I. "On the Copy of Hamzah Fansuri's Epitaph Published by C. Guillot & L. Kalus." *Archipel* 62 (2001): 21-33.

_____. "Some Remarks on the Structure of the *Syair Perahu* by Hamzah Fansuri." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 131, no. 4 (1975): 407-26.

_____. "Towards the Biography of Hamzah Fansuri. When Did Hamzah Live ? Data from His Poems and Early European Accounts." *Archipel* 57 (1999): 135-75.

_____. "The Name and the Named: On the Extent of Hamzah Fansuri's Renown in the Malay Indonesian World (Notes and Materials)." Dalam *Knowledge, Language, Thought and Civilization of Islam: Essays in Honor of Syed Muhammad Naquib Al-Attas*, diedit oleh Wan Mohd Nor Wan Daud dan Muhammad Zainiy Uthman, 365-430. Skudai: Universiti Teknologi Malaysia, 2010.

Brown, David. *The State and Ethnic Politics in Southeast Asia*. London: Routledge, 1995.

Buchman, David. "Structuralism Reconsidered: Ibn Al-'Arabi and Cultural Variation in Muslim Societies." *The Muslim World* 94, no. 1 (2004): 131-38.

Bujono, Bambang, ed. *Aceh Kembali Ke Masa Depan*. Jakarta: IKJ Press, 2005.

Bustamam-Ahmad, Kamaruzzaman. "Aceh Bukan Target Operasi." *KONTRAS*, March 18-24 2010, 7.

_____. *Acehnologi*. Banda Aceh: Bandar Publishing, 2012.

_____. "Agen." *Serambi Indonesia*, 17 Januari 2011.

_____. "The Application of Islamic Law in Indonesia: The Case Study of Aceh." *Journal of Indonesian Islam* 1,1 (2007): 135-80.

_____. "Dari *Teungku* Ke *Ustaz*: Potret Pendidikan Islam Di Aceh." *Kajian Islam* 6, no. 1 (2011): 1-16.

_____. "The Discourse of the Islamic State and Islamic Law in Malaysia." Dalam *Asian Transformations in Action*, 16-25. Tokyo: The Nippon Foundation, 2009.

_____. "From Islamic Revivalism to Islamic Radicalism in Southeast Asia: A Case of Malaysia." Dalam *Culture, Identity, and Religion in Southeast Asia*, diedit oleh Alistair D.B.Cook, 69-87. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing, 2007.

_____. *Islam Historis: Dinamika Studi Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press, 2002.

_____. *Islamic Law in Southeast Asia: A Study of Its Application in Aceh and Kelantan*. Chiang Mai: Silkworm, 2009.

_____. "Jejak Spirit Aceh." Dalam *Ulama Dan Politik: Menyonsong Aceh Baru*, diedit oleh Bustami Abubakar, 1-15. Banda Aceh: Lembaga Studi Masyarakat Aceh dan STAIN Malikussaleh,, 2011.

_____. "Kearifan Lokal Dalam Perspektif Epistemologi 'Irfani." Dalam *Kearifan Lokal Di Laut Aceh*, diedit oleh M. Adli Abdullah, Sulaiman Tripa and Murizal Hamzah, 1-13. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2010.

_____. "Kontribusi Daerah Aceh Terhadap Perkembangan Awal Hukum Islam Di Indonesia." *Al-Jâmi'ah: Journal of Islamic Studies* 64 (1999): 143-75.

_____. "Memahami Cara *Seumike Ureung* Aceh." Paper presented at the Aceh Development International Conference: Sustainable Development and Acehnese Welfare: Opportunities and Challenges, International Islamic University, 2012.

_____. "Menakar Harga Kemarahan Orang Aceh: Etnografi Kekerasan Di Indonesia." Dalam *Tamaddun Dan Sejarah: Etnografi Kekerasan Di Aceh*, diedit oleh Hasanuddin Yusuf Adan, 9-38. Yogyakarta: Prismasophie Press, 2003.

_____. "Menatap Masa Depan Melayu Di Asia Tenggara: Sebuah Catatan Sosial Antropologis." Paper presented at the International Conference on Islam in Malay World, Bandung, 2011.

_____. "Panglima La'ot Di Aceh Masa Kini: Sebuah Tinjauan Sosial Antropologi." Dalam *Kearifan Lokal Di Laut Aceh*, diedit oleh M. Adli Abdullah, Sulaiman Tripa dan Murizal Hamzah, 37-78. Banda Aceh, 2010.

_____. "Pesantren Sebagai Pusat Peradaban Muslim: Pengalaman Indonesia Untuk Asia Tenggara." *Edukasi* 8, no. 2 (2010): 3939-66.

_____. "Putra Aceh Di Nanggroe Budha." *Aceh Magazine*, July 2007, 34-35.

_____. "Redefinisi "Perbatasan Dan Keamanan" Di Asia Tenggara (Sebuah Paradigma Untuk Ketahanan Nasional)." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* 15, no. 2 (2011): 168-88.

_____. *Satu Dasawarsa the Clash of Civilizations: Membongkar Politik Amerika Di Pentas Dunia*. Yogyakarta: Ar-Ruzza, 2003.

_____. "Tiga Kekuatan Besar." *Serambi Indonesia*, 6 Juli 2011, 8.

_____. "The Violence in Aceh: A Socio-Historical Perspective." Dalam *The Minorities*, diedit oleh Buddhadeb Chaudhuri dan M. Abdus Sabur, 29-58. Bangkok: Asian Resource Foundation, 2008.

_____. *Wajah Baru Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2004.

Cagoco-Gulam, Rufa. "Toward a People-Centered Peace and Development Framework: Some Lessons from Conflict-Affected Communities in Mindanao." *Tambara* 24 (2007): 79-90.

Chittick, William C. *Ibn 'Arabi: Heir to the Prophets*. Diedit oleh Patricia Crone, Makers of the Muslim World. Oxford: Oneworld, 2007.

Conboy, Ken. *Intel: Inside Indonesia's Intelligence Service*. Jakarta: Equinox, 2004.

Corbin, Henry. *Creative Imagination in the Sûfism of Ibn 'Arabî*. Translated by Ralph Manheim. New Jersey: Princeton University Press, 1969.

Croissant, Aurel. "Unrest in South Thailand: Contours, Causes, and Consequences since 2001." *Contemporary Southeast Asia* 25, no. 1 (2005): 21-43.

"'Cuak-Cuak' Pun Berguguran." *Tempo*, 1 Juni 2003, 33.

Derrida, Jacques. *Writing and Difference*. New York dan London: Routledge, 2010.

Djalal, Dino Patti. *Harus Bisa! Seni Memimpin Ala Sby*. Jakarta: Red & White Publishing, 2008.

Dreyfuss, Robert. *Devil's Game: How the United States Helped Unleash Fundamentalist Islam*. New York: Metropolitan Books Henry Holt and Company, 2005.

Dulyakasem, Utai, dan Lertchai Sirichai, eds. *Knowledge and Conflict Resolution: The Crisis of the Border Region of Southern Thailand*. Nakhon Si Thammarat: School of Liberal Arts, Walailak University, The Asia Foundation, The William and Flora Hewlett Foundation, 2005.

Elson, R.E. "In Fear of the People: Suharto and the Justification of State-Sponsored Violence under the New Order." Dalam *Roots of Violence in Indonesia*, diedit oleh Freek Colombijn dan J. Thomas Lindblad, 173-96. Singapore: ISEAS, 2002.

Erawadi. *Wacana Dan Dinamika Intelektual Islam Aceh Abad Xviii Dan Xix*. Jakarta: Kementerian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Lektur Keagamaan, 2011.

Fatah, Eep Saefullah. *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokratisasi Pasca-Orde Baru*. Bandung: Mizan, 2000.

Fealy, Greg. "Half a Century of Violent Jihad in Indonesia: A Historical and Ideological Comparison of Darul Islam and Jema'ah Islamiyah." Dalam *Islamic Terrorism in Indonesia: Myths and Realities*, diedit oleh Marika Vicziany dan David Wright-Neville, 15-32. Clayton: Monash Asia Institute, 2005.

Federspiel, Howard M. "Soekarno Dan Apolog-Apolog Muslimnya." Dalam *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius Di Indonesia*, diedit oleh Abu Zahra, 213-28. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.

Friedman, Milton. *Capitalism and Freedom*. Chicago and London: The University of Chicago Press, 1982.

Fukuyama, Francis. *The Great Disruption: Human Nature and the Reconstruction of Social Order*. New York: The Free Press, 1999.

_____. *Our Posthuman Future: Consequences of the Biotechnology Revolution*. New York: Farrar, Straus and Giroux, 2002.

Gee, John. "Conviction of Balinese Bomber Amrozi Recalls Rabin Assassin Yigal Amir." *The Washington Report on Middle East Affairs* 22, no. 8 (2003): 36-37.

Gerth, H.H., dan C. Wright Mills, eds. *From Max Weber in Sociology*. London dan Boston: Routledge 1974.

Ghani, Yusra Habib Abdul. *Mengapa Sumatera Menggugat*: Biro Penerangan Acheh-Sumatera National Liberation Front, 2000.

Gilquin, Michel. *The Muslim of Thailand*. Translated by Michael Smithies. Chiang Mai: Silkworm Books, 2005.

Gomez, Edmund Terence. "Chinese Business Development in Malaysia: Metworks, Entrepreneurship or Patronage?" In *Chinese Entrepreneurship and Asian Business Networks*, diedit oleh Thomas Menkhoff dan Solvay Gerke, 159-83. London dan New York: Routledge, 2004.

Hadi, Amirul. "Exploring the Life of Hamzah Fansûrî." *Al-Jâmi'ah: Journal of Islamic Studies* 41, 2 (2003): 277-306.

_____, ed. *Kearifan Yang Terganjal: Shafwan Idris & Intelektual Aceh*. Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2002.

Hamid, Ahmad Fauzi Abdul. "Political Dimensions of Religious Conflict in Malaysia: State Response to an Islamic Movement." *Indonesia and the Malay World* Vol.28, No.80 (2000): 32-65.

HAMKA. *Lembaga Budi*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 2001.

Handley, Paul M. *The King Never Smiles: A Biography of Thailand's Bhumibol Adulyadej*. London: Yale University Press, 2006.

Harun, Jelani. "Bustan Al-Salatin, 'the Garden of Kings': A Universal History and Adab Work from Seventeenth-Century Aceh." *Indonesia and the Malay World* 32, no. 92 (2004): 21-52.

Hassan, Hamdan. "Konsep Wujudiyah Hamzah Fansuri." Dalam *Tokoh-Tokoh Sastera Melayu Klasik*, diedit oleh Mohammad Daud Mohamad, 10-24. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.

Huntington, Samuel P. *The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order*. London: Touchstone Books, 1997.

Hussin, Nordin. "Networks of Malay Merchants and the Rise of Penang as a Regional Trading Centre." *Southeast Asian Studies* 43, no. 3 (2005): 215-37.

_____. *Trade and Society in the Straits of Melaka: Dutch Melaka and English Penang, 1780-1830*. Singapore: NUS Press, 2007.

Hwang, In-Wong. *Personalized the Politics Malaysian State under Mahathir*. Singapore: ISEAS, 2003.

Ibrahim, Zawawi. "Orang Asli Citizenry and Nationhood: Mediating the Voices the Bumiputra "Other" in Malaysia." *Asian Studies Review* 21, no. 1 (1997): 107-14.

ICG. "Impact of the Bali Bombings." 1-8. Jakarta/Brussel, 2002.

———. "Indonesia Backgrounder: How the Jemaah Islamiyah Terrorist Network Operates." In *Asia Report*. Jakarta/Brussel: ICG, 2002.

———. "Indonesia Backgrounder: Why Salafism and Terrorism Mostly Don't Mix." In *Asia Report*. Brussel/Jakarta: ICG, 2004.

———. "Recycling Militants in Indonesia: Darul Islam and the Australian Embassy Bombing." In *Asia Report*. Brussel/Jakarta: ICG, 2005.

———. "Southern Thailand: Insurgency, Not Jihad." In *Asia Report*. Brussel: ICG, 2005.

III, Wilfred Magno Torres, ed. *Rido: Cland Feuding and Conflict Management in Mindanao*. Makati City: The Asia Foundation, 2007.

Iqbal, Muhammad. *The Recontruction of Religious Thought in Islam*. Kuala Lumpur: Master Piece Publication, 2006.

Ishak, Otto Syamsuddin. *Perdamaian Yang Berikhtiar, Yang Menentang: Kronik Perundingan Gam-Ri Di Helsinki 2005*. Banda Aceh: Achehnese Civil Society Task Force, 2008.

Iskandar, T. "Hamzah Fansuri Pengarah, Penyair, Ahli Tasawuf." Dalam *Tokoh-Tokoh Sastera Melayu Klasik*, diedit oleh Mohammad Daud Mohamad, 1-9. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1987.

Islam, Syed Serajul. "The Islamic Independence Movement in Pattani of Thailand and Mindano of the Philippines." *Asian Survey* 38, 5 (1998): 441-56.

Jan, Abdul Murat bin Mat. "Gerakan Darul Islam Di Aceh 1953-1959." B.A. Thesis, Gadjah Mada University, 1975.

Johns, A. "The Poems of Hamzah Fansuri." *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde* 146, no. 2/3 (1990): 325-31.

Johns, A.H. "The Qur'an in the Malay World: Reflection on 'Abd Al-Rauf of Singkel (1615-1693)." *Journal of Islamic Studies* 9,2 (1998): 120-45.

Jones, Sidney. "The Changing Nature of Jemaah Islamiyah." *Australian Journal of International Affairs* Vol.59, No.2 (2005): 169-78.

_____. "It Can't Happen Here: "A Post-Khomeini Look Indonesian Islam." *Asian Survey* 20,3 (1980): 311-23.

_____. "Jemaah Islamiyah: A Short Description." *Kultur: The Indonesian Journal For Muslim Cultures* 3,1 (2003): 105-14.

_____. "Konflik Aceh Dan Papua." *Tempo*, 19-23 Mei 2003, 60.

_____. "Terluka, Tapi Masih Bernyawa." *Tempo*, 19 October 2003, 30-31.

_____. "Terorisme: Pelajaran Dari Aceh." *Tempo*, March 15-21 2010, 16-17.

_____. "Terrorism and 'Radical Islam' in Indonesia." In *Terrorism and Islam in Indonesia: Myths and Realities*, diedit oleh Marika Vicziany dan David Wright-Neville, 3-13. Clayton: Monash Asia Institute, 2005.

_____. "Terrorism in Southeast Asia: An Update." Dalam *Regional Outlook Forum 2005 Terrorism: International and Regional Dimensions*, diedit oleh Chin Kin Wah dan Aris Ananta, 24-30. Singapore: ISEAS, 2005.

Jory, Patrick. "From "Melayu Patani" to "Thai Muslim": The Spectre of Ethnic Identity in Southern Thailand." In *Working Paper Series*, 1-27. Singapore: Asia Research Institute, 2007.

Jory, Patrick. "From "Patani Melayu" to "Thai Muslim"." *ISIM Review*, no. 18 (2006): 42-43.

Kahn, Joel S. "Islam, Modernity, and the Popular in Malaysia." Dalam *Malaysia: Islam, Society and Politics*, diedit oleh Virginia Hooker dan Norani Othman, 147-68. Singapore: ISEAS, 2003.

_____. *Other Malays: Nationalism and Cosmopolitanism in the Modern Malay World*. Singapore: Singapore University Press, 2006.

Kasimin, Amran. *Religion and Social Change among the Indigenous People of the Malay Peninsula*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.

Kausar, Zaeenath. *Social Ills in Malaysia: Causes and Remedies*. Kuala Lumpur: Recearch Centre, IIUM, 2005.

Kingsbury, Damien. "The Free Aceh Movement: Islam and Democratisation." *Journal of Contemporary Asia* 37, no. 2 (2007): 166-89.

Kingsbury, Damien, ed. *Violence in between Conflict and Security in Archipelagic Southeast Asia*. Victoria: Monash University Press, 2005.

Kuntowijoyo. *Selamat Tinggal Mitos Selama Datang Realitas: Esai-Esai Budaya Dan Politik*. Bandung: Mizan, 2002.

Kurzman, Charles. "Introduction: Liberal Islam and Its Islamic Context." Dalam *Liberal Islam: A Source Book*, diedit oleh Charles Kurzman, 3-26. New York dan Oxford: Oxford University, 1998.

Lanang, Tun Seri, ed. *Sulalat Al-Salatin Ya'ni Perturunan Segala Raja-Raja (Sejarah Melayu)*. Diedit oleh Muhammad Haji Salleh. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2009.

Lim, Kim Hui. "*Budi* as the Malay Mind: A Philosophical Study of Malay Ways of Reasoning and Emotion in Peribahasa." Ph.D. Thesis, University of Hamburg, 2003.

Liow, Joseph Chinyong. "The Security Situation in Southern Thailand: Toward an Understanding of Domestic and International Dimensions." *Studies in Conflict & Terrorism* 27 (2004): 531–48.

Lombard, Denys. *Nusa Jawa: Silang Budaya Warisan Kerajaan-Kerajaan Konsentris*. Vol. 3. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Lukens-Bull, Ronald A. "Between Text and Practice: Considerations in the Anthropological Study of Islam." *Marburg Journal of Religion* Vol.4, No.2 (1999): 1-21.

Madjid, Nurcholish. *Islam Agama Peradaban: Membangun Makna Dan Relevansi Islam Dalam Sejarah*. Jakarta: Paramadina, 2000.

_____. *Islam Dan Agama Kemanusiaan: Membangun Tradisi Dan Visi Baru Islam Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1995.

_____. *Islam Doktrin Dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, Dan Komodernan*. V ed. Jakarta: Paramadina, 2005.

Mahmood, Ibrahim. *Sejarah Perjuangan Umno: Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu (Suatu Penyikapan Kembali Sejarah Perjuangan Bangsa Melayu Menuju Kemerdekaan)*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1981.

Maulani, ZA. "Hantu Jama'ah Islamiyah." *Hidayatullah*, 2003, 32-33.

_____. "Teror Dan Fitnah Itu Terungkap Sudah." *PANJIMAS*, September 2003, 44-45.

_____. "Terorisme, Amerika, Dan Bom Bali." Dalam *Terorisme & Konspirasi Anti Islam*, diedit oleh Abduh Zulfidar Akaha, 1-31. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002.

McLellan, David. *The Thought of Karl Marx: An Introduction*. Second ed. New York: The Macmillan Press, 1980.

Means, Gordon P. "The Orang Asli: Aboriginal Policies in Malaysia." *Pacific Affairs* 58, no. 4 (1985-1986): 637-52.

Meij, Dick van der. "Pluralism and Identity in the Indonesian-Malay World: The *Isra' Mi'raj* as a Token of Both." *Studia Islamika* 11,3 (2004): 429-66.

Mohamad, Mahathir. *Malay Dilemma*: Asia Pacific Press, 1970.

Mohammad, Mahathir. "Lebih Banyak Kecewa Daripada Gembira." *MASSA*, June 29 - July 5 2002.

Montesano, Michael J., dan Patrick Jory, eds. *Thai South and Malay North: Ethnic Interactions on a Plural Peninsula*. Singapore: NUS Press, 2008.

Morrison, Ken. *Marx, Durkheim, Weber: Formations of Modern Social Thought*. Second ed. London: Sage Publications, 2006.

Mulyadi, Sukidi. "Max Weber's Remarks on Islam: The Protestant Ethic among Muslim Puritans." *Islam and Christian Muslim Relations* Vol.17, No.2 (2006): 185-205.

_____. "The Travelling Idea of Islamic Protestantism: A Study of Iranian Luthers." *Islam and Christian Muslim Relations* Vol.16, No.4 (2005): 401-12.

Muniron. "Pandangan Al-Ghazali Tentang *Ittihâd* Dan *Hulûl*." *PARAMADINA* 1,2 (1999): 145-61.

Nagata, Judith. "How to Be Islamic without Being an Islamic State: Contested Models of Development in Malaysia." Dalam *Islam, Globalization and Postmodernity*, diedit oleh Akbar S. Ahmed dan Hastings Donnan, 63-90. London dan New York: Routledge, 1999.

Nasution, Harun. *Akal Dan Wahyu Dalam Islam*. Jakarta: UI Press, 1986.

_____. *Muhammad Abduh Dan Teologi Rasional Mu'tazilah*. Jakarta: UI Press, 1987.

_____. *Teologi Islam: Aliran Aliran Sejarah Analisa Perbdaningan*. Jakarta: UI Press, 2007.

Noor, Farish A. "The Localization of Islamist Discourse in the *Tafsîr* of Tuan Guru Nik Aziz Nik Mat, *Murshid'ul Am* of Pas." Dalam *Malaysia Islam, Society dan Politics*, diedit oleh Virginia Hooker dan Norani Othman, 195-235. Singapore: ISEAS, 2003.

Parens, Joshua. "Whose Liberalism? Which Islam? Leonard Binder's "Islamic Liberalism"." *Political Science dan Politics* 27,3 (1994): 514-15.

Prados, John. "Note on the Cia's Secret War in Afghanistan." *the Journal of American History* 89,2 (2002): 446-71.

Rasjidi, H.M. *Strategi Kebudayaan Dan Pembaharuan Pendidikan Nasional*. Jakarta: Bulan Bintang, 1980.

Reid, Anthony. *Asal Mula Konflik Aceh: Dari Perebutan Pantai Timur Sumatra Hingga Akhir Kerajaan Aceh Abad Ke-19*. Translated by Masri Maris. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Reid, Anthony. *An Indonesian Frontier: Acehnese & Other Histories of Sumatra*. Singapore: Singapore University Press, 2005.

_____. "Understdaning Melayu (Malay) as a Source of Diverse Modern Identities." Dalam *Contesting Malayness: Malay Identity across Boundaries*, diedit oleh Timothy P. Barnard, 1-24. Singapore: Singapore University Press, 2006.

Riana, I Ketut. *Kakawin Desa Warnnana Uthawi Nagara Krtagama: Masa Keemasan Majapahit*. Jakarta: Kompas, 2009.

Richter, Frank-Jurgen, dan Thang D. Nguyen, eds. *The Malaysian Journey: Progress in Diversity*. Kuala Lumpur: Marshall Cavendish, 2004.

Ridwan, Nur Khalik. *Regenerasi Nii: Membedah Jaringan Islam Jihadi Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2008.

_____. *Islam Borjuis Dan Islam Proletar: Konstruksi Baru Masyarakat Islam Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press, 2001.

Sa'ari, Che Zarrina. *Al-Ghazali dan Intutition: An Analysis, Translation dan Text of Al-Risâlah Al-Laduniyyah*. Kuala Lumpur: Departement of Aqidah and Islamic Thought, Academy of Islamic Studies, University of Malaya, 2007.

Saby, Yusny. "Dari Aceh Ke Indonesia." Dalam *Menjadi Indonesia: 13 Abad Eksistensi Islam Di Bumi Nusantara*, diedit oleh Komaruddin Hidayat dan Ahmad Gaus AF, 377-405. Bandung: Mizan, 2006.

Santoso, F. Harianto, ed. *Wajah Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum 1999*. Jakarta: Kompas, 2000.

Schimmel, Annemarie. *The Mystery of Numbers: Misteri Angka-Angka Dalam Berbagai Peradaban Kuno Dan Tradisi Agama Islam, Yahudi, Dan Kristen*. Translated by Agung Prihnatoro. Bandung: Pustaka Hidayah, 2006.

_____. *Mystical Dimensions of Islam*. Chapel Hill: The University of North Carolina, 1975.

Serajul Islam, Syed. *The Politic of Islamic Identity in Southeast Asia*. Singapore: Thomson, 2005.

Shiddiqi, Nourouzzaman. *Fiqh Indonesia : Penggagas Dan Gagasannya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.

"Sidney Jones: "Hambali Adalah Petinggi Al-Qaidah"." *Tempo*, November 3 2002, 52-54.

"Sidney Jones: Beberapa Pembuat Bom Masih Buron." *Tempo*, July 20-26 2009, 39-40.

Siu, Li Chuan. *Ikhtisar Sejarah Pergerakan Dan Kesusasteraan Melayu Moden 1945-1965*. Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1986.

Soelaiman, Darwis A. "Aceh Dan Melayu (Tanggapan Untuk Kamaruzzaman)." *Serambi Indonesia*, 19 Desember 2009.

Stark, Jan. "The Islamic Debate in Malaysia: The Unfinished Project." *South East Asia Research* 11,1 (2003).

Stern, Jessica. *Terror in the Name of God: Why Religious Militants Kill*. New York: Harper Collins, 2005.

Sugunnasil, Wattana. "Islam, Radicalism, and Violence in Southern Thailand." *Critical Asian Studies* Vol.38, No.1 (2006): 119-44.

Suhrke, Astri. "Loyalists and Separatists: The Muslim in Southern Thailand." *Asian Survey* 17, no. 3 (1977): 237-50.

Suryadinata, Leo, ed. *Ethnic Chinese in Singapore and Malaysia: A Dialogue between Tradition and Modernity* Singapore: Times Academic Press, 2002.

Suryadinata, Leo. *Understanding the Ethnic Chinese in Southeast Asia*. Singapore: ISEAS, 2007.

Taylor, Charles. *The Explanation of Behaviour*. London: Routledge & Kegan Paul, 1964.

Taylor, Charles. *Sources of the Self: The Making of the Modern Identity*. Cambridge: Harvard University Press, 1989.

Tippe, Syarifuddin. *El-Hurr: Nurani Untuk Aceh*. Banda Aceh: Yayasan Ulul Arham, 2001.

Tiro, Tengku Hasan di. "Konsep-Konsep Kunci Ideologi Acheh Merdeka." *Suara Acheh Merdeka* VII (1996): 29-37.

Trijono, Lambang, ed. *The Making of Ethnic & Religious Conflicts in Southeast Asia*. Yogyakarta: Center for Security and Peace Studies, 2004.

Umar, Nasaruddin. "Perspektif Jender Dalam Islam." *Paramadina* 1,1 (1998): 96-128.

Usman, A. Rani. *Etnis Cina Perantauan Di Aceh*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009.

Wahyudi, Yudian. *Hasbi's Theory of Ijtihad in the Context of Indonesian Fiqh*. Yogyakarta: Nawesea 2007.

Weber, Max. *The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism*. Translated by Talcott Parsons. London dan New York: Routledge, 2002.

Welsh, Bridget, ed. *Reflections the Mahathir Years*. Washington, DC: Southeast Asia Studies Program, The Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS), Jonhs Hopkins University, 2004.

Werbner, Pnina. *Pilgrims of Love: The Anthropology of a Global Sufi Cult*. Indianapolis & Bloomington: Indian University Press, 2003.

Wood, Linda A., dan Rolf O Kroger. *Doing Discourse Analysis: Methods for Studying Action in Talk and Text*. London: Sage Publications, 2000.

Yunus, Anas M., ed. *Gerak Kebangkitan Aceh: Kumpulan Karya Sejarah Muhammad Junus Djamil*. Banda: Jaya Mukti, 2005.

Yusuf, Imtiyaz, dan Lars Peter Schmidt, eds. *Understanding Conflict and Approaching Peace in Southern Thailand*. Bangkok: Konrad Adenauer Stiftung, 2006.

Zainol, Salina. *Hubungan Perdagangan Aceh Dengan Pulau Pinang*. Kuala Lumpur: UM Press, 2005.

Zed, Mestika. "Hidden History: Sejarah Kebrutalan Dan Kejahatan Negara Melawan Kemanusiaan. Isu-Isu Dan Strategi Dalam Konteks Sejarah Indonesia." *Jurnal Demokrasi & HAM* 2, no. 1 (2002): 6-73.

Tentang Penulis

Kamaruzzaman Bustamam-Ahmad dilahirkan di Krueng Mane pada 17 September 1978. Studi formal dimulai sejak MIN Krueng Mane (1990), Madrasah Ulumul Qu'ran Langsa (1993), Madrasah Aliyah Program Khusus Banda (1996). Lalu jenjang perguruan tinggi ditempuh mulai S-1 dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2000), kemudian S-2 pada University of Malaya Kuala Lumpur (2005), dan S-3 pada jurusan Sosiologi dan Antropologi La Trobe University, Australia (2009). Selama studi pernah beberapa kali mendapatkan beasiswa di antaranya dari Pemerintah Aceh, IPRS (*International Post-Graduate Research Scholarship*), LTUPRS (*La Trobe University Post-Graduate Research Scholarship*), dan Faculty Grant dari La Trobe University.

Adapun karya-karya yang pernah dihasilkan adalah *Mencari Islam* (2000), *Relasi Islam dan Negara* (2001), *Islam Historis* (2002), *Satu Dasawarsa The Clash of Civilization* (2003), *Masa Depan Pembidangan Ilmu di PTAI* bersama Akh. Minhaji (2003), *Wajah Baru Islam di Indonesia* (2004), *Islamic Law in Southeast Asia: A Study of Its Application in Kelantan and Aceh* (2009), *Acehnologi* (2012), *Wahdatul Wujud: Membedah Dunia Kamal* (2013). Selain itu menjadi editor buku bersama Patrick Jory dengan judul *The Contemporary of Islamic Education and Islamic Studies in Southeast Asia* (2011) dan *Islamic Thought in Southeast Asia* (2013). Kotributor dalam *Culture, Identity and Religion in Southeast Asia* (2007), *The Minorities* (2008), *Asian Transformations in Action* (2009), dan *Oxford Islamic Studies Online* (2012). Selain itu, beberapa tulisan terbit di dalam jurnal seperti *Studia Islamika*, *Indonesian Islam*, *Pemikir*, *Kajian* Islam, *Al-Jami'ah*, *Ar-Raniry* dan lain sebagainya.

Adapun riwayat pekerjaan dimulai sebagai *dosen luar biasa* (baca: dosen honor) pada IAIN Sunan Kalijaga, UNSYIAH, dan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh. Pada tahun 2005 menjadi dosen pada Walailak University, Thailand. Sebelum tahun 2005, menjadi *Fellow* pada program *Asian Muslim Action Network* (AMAN) di

Thailand. Setelah itu, pada tahun 2007 menjadi *Fellow* pada *Asian Public Intellectual* (API), Nippon Foundation. Pada tahun 2008 menjadi *Peneliti Senior* pada Aceh Justice Resource Center di Banda Aceh sebagai bagian program UNDP. Pada tahun 2009 menjadi *consultant* untuk studi tentang Panglima La'ot pada UNFAO Banda Aceh. Pada tahun 2011 diangkat menjadi *Research Fellow* di University of Malaya, Kuala Lumpur. Pada tahun yang sama pula, diangkat menjadi Dosen Tetap pada Fak. Syari'ah, IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh. Akhirnya, tahun 2013 menjadi Ketua Departemen *Jinayah wa Siyasah* pada Fakultas Syari'ah, IAIN Ar-Raniry. Di samping itu juga sebagai *editor-in-chief* Jurnal Media Syari'ah pada fakultas yang sama. Adapun di luar kampus berkiprah sebagai *Wakil Direktur* pada LSAMA (Lembaga Studia Agama dan Masyakarat Aceh).

Untuk alamat koresponden silahkan menghubungi abah.shatilla@gmail.com

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYAIKH NURUDDIN AR-RANIRY

BANDA ACEH

ACEH BARU

POST-TSUNAMI

Aceh sampai saat ini tak pernah lepas dari sorotan. Dengan beragam keunikan, kekhasan, sekaligus renik konflik di dalamnya, Aceh senantiasa melahirkan kajian yang memberi kontribusi positif terhadap khazanah keindonesiaan. Bahkan, dalam sejarah kemerdekaan Indonesia pasca proklamasi dikumandangkan, Aceh memainkan peran yang sangat signifikan. Ketika Belanda melancarkan agresi militer dan menguasai kembali hampir seluruh wilayah Indonesia, Aceh tak pernah mampu ditaklukkan. Aceh melalui radio Rimba Raya menjadi modal identitas strategis untuk mengumumkan kepada dunia luar bahwa Indonesia masih ada dan tetap merdeka. Tak sekadar itu, di masa-masa sulit pengentasan buta huruf pada awal kemerdekaan, Aceh menyumbangkan putra-putra terbaiknya, seperti Hasbi Ash-Shiddieqy, Abu Bakar Aceh, dan Tgk. Ismail Yacob, untuk ekspansi ke pelbagai daerah. Karena di Aceh hampir tidak pernah ada periode buta huruf, sebab mereka setidak-tidaknya dapat membaca kitab Jawoe (bahasa Melayu tulisan Arab latin) yang sekarang telah menjadi bahasa Indonesia.

Memang Aceh sempat luluh lantak dilumat gelombang tsunami 26 Desember 2004, namun justru fase itu menjadi titik-balik kehidupan Aceh dalam beragam dinamikanya. Aceh perlahan berevolusi, dialektika tradisi dan globalisasi menjadi suatu keniscayaan. Pergulatan identitas, benturan budaya, geliat ekonomi, serta percaturan politik mewarnai eksistensi Aceh di tengah deru gelombang modernisasi.

Dan, buku ini merekam semua detak kehidupan Aceh post-tsunami. Ditulis sendiri oleh Putra Aceh—saksi kunci sekaligus terlibat langsung dalam evolusi Aceh—menjadikan ulasan-ulasan buku ini sangat inspiratif. Kegetiran serta harapan membaur, menumpu pada cita-cita utama menuju masa depan mandiri.

KAUKABA

KAUKABA DIPANTARA
(Anggota IKAPI)
krapyak kulon rt 05 no 181
sewon bantul yogyakarta
telp/fax. 0274-387435
email: redaksi@kaukaba.com
web: www.kaukaba.com

LSAMA

ISBN: 978-602-1508-12-1